



PEMERINTAH
KABUPATEN KLATEN

PERATURAN BUPATI
NOMOR 9 TAHUN 2026

RKPD KABUPATEN KLATEN 2027





BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan dibutuhkan untuk memastikan pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik guna mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pembangunan di Daerah terlaksana dengan baik perlu adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan dengan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dalam suatu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan di Daerah, maka perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025 Nomor 253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Bupati adalah Bupati Klaten.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB II
RKPD TAHUN 2027

Pasal 2

- (1) RKPD tahun 2027 merupakan penjabaran dari RPJMD tahun 2025-2029.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2027 sampai dengan Desember 2027.

Pasal 3

RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun anggaran 2027;
- b. penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran dan PPAS dengan dewan perwakilan rakyat Daerah; dan
- c. penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2027; dan
- d. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 4

RKPD tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
- e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
- f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- g. penutup.

Pasal 5

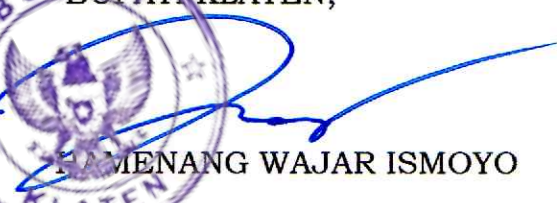
Ketentuan mengenai RKPD tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 30 Juni 2026

BUPATI KLATEN,

MENANG WAJAR ISMOYO

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 30 Juni 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,


JAKA PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2026 NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2027





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1-1
1.1. Latar Belakang	1-1
1.2. Dasar Hukum.....	1-6
1.3. Hubungan RKPD Antar Dokumen Perencanaan Lainnya	1-10
1.4. Maksud dan Tujuan	1-11
1.5. Sistematika Dokumen RKPD	1-12
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	2-1
2.1. Kondisi Umum	2-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	2-24
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	2-49
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	2-101
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	2-155
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RKPD 2025 dan Realisasi RPJMD	2-187
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	2-235
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	3-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	3-2
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	3-8
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	4-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jangka Menengah	4-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2027.....	4-7
4.3. Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kebijakan Nasional Dan Provinsi	4-14
4.4. Kebijakan Pembangunan Daerah Berbasis Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (T-H-I-S).....	4-31
4.5. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk RKPD Tahun 2027	4-35
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	5-1
5.1. Kerangka Pendanaan	5-1
5.2. Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2027	5-1
5.3. Perincian Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2027	5-33
5.4. Ringkasan Pagu Indikatif Tahun 2027	5-67
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	6-1
6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)	6-1
6.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6-3
6.3. Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)	6-14
BAB VII PENUTUP	7-1
LAMPIRAN	1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rincian Wilayah Administrasi Kabupaten Klaten.....	2-2
Tabel 2.2	Nama dan Panjang Sungai Yang Melintasi Kabupaten Klaten.....	2-7
Tabel 2.3	Daftar Embung di Kabupaten Klaten.....	2-8
Tabel 2.4	Penggunaan Lahan di Kabupaten Klaten Tahun 2025.....	2-9
Tabel 2.5	Jumlah, Pertumbuhan & Kepadatan Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-20
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Kelompok Umur Tahun 2025.....	2-22
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025.....	2-23
Tabel 2.8	Tabel Luas Tanam dan Produksi Padi Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-26
Tabel 2.9	Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pangan Tahun 2021-2025.....	2-29
Tabel 2.10	Capaian Indikator Akses dan Pelayanan Air Minum Kabupaten Klaten Tahun 2021–2025.....	2-31
Tabel 2.11	Cakupan Pelayanan Air Minum di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-31
Tabel 2.12	Cakupan Pelayanan Sanitasi di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-33
Tabel 2.13	Kondisi Daerah Irigasi di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-34
Tabel 2.14	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-36
Tabel 2.15	Timbulan Sampah di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-37
Tabel 2.16	Penanganan Sampah di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-39
Tabel 2.17	Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Klaten Tiap Semester	2-40
Tabel 2.18	Luasan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-41
Tabel 2.19	Hasil Kajian Resiko Bencana Kabupaten Klaten.....	2-46
Tabel 2.20	Kejadian Bencana di Kabupaten Klaten 2021-2025.....	2-47
Tabel 2.21	Nilai Kerusakan Akibat Bencana di Kabupaten Klaten 2021-2025.....	2-48
Tabel 2.22	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-51
Tabel 2.23	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-52
Tabel 2.24	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia di Kabupaten Klaten tahun 2021-2025.....	2-54
Tabel 2.25	Perkembangan Jumlah Produk UMKM yang Bersertifikasi Halal di Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2025.....	2-57
Tabel 2.26	Daftar Komoditi Makanan yang Memberi Pengaruh Besar Terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode 2025.....	2-58
Tabel 2.27	Daftar Komoditi Bukan Makanan yang Berpengaruh Besar Terhadap kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode 2025.....	2-59



Tabel 2.28	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-60
Tabel 2.29	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-67
Tabel 2.30	Perbandingan Komponen Penyusun IPM se-Solo Raya Tahun 2025.....	2-67
Tabel 2.31	Nilai Indikator Penyusunan IZN Kabupaten Klaten Tahun 2025	2-87
Tabel 2.32	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancangara Di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-97
Tabel 2.33	Jumlah Daya Tarik Wisata, Pengunjung, Lama Tinggal dan Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Tahun 2021-2025.....	2-97
Tabel 2.34	Sumbangan Sektor Pariwisata terhadap PAD Tahun 2021-2025	2-98
Tabel 2.35	Jumlah Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-100
Tabel 2.36	Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-102
Tabel 2.37	Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025.....	2-103
Tabel 2.38	Permasalahan dan Solusi yang Dihadapi di Bidang Kesehatan (Khususnya SPM).....	2-104
Tabel 2.39	Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025	2-105
Tabel 2.40	Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025.....	2-107
Tabel 2.41	Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Tahun 2025	2-107
Tabel 2.42	Realisasi Capaian SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Klaten Tahun 2025	2-108
Tabel 2.43	Realisasi Capaian SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Klaten Tahun 2022-2025	2-108
Tabel 2.44	Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas	2-109
Tabel 2.45	Kendala Dan Solusi Dalam Pelaksanaan SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban	2-109
Tabel 2.46	Pelaksanaan SPM Urusan Sosial Kabupaten Klaten Tahun 2025	2-111
Tabel 2.47	Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Sosial Tahun 2025.....	2-112
Tabel 2.48	Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Ketentraman dan Keindahan (K3) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-116
Tabel 2.49	Rasio Petugas Satpol PP Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-116
Tabel 2.50	Peta Kerawanan Kebakaran Berdasar Angka Kejadian Kebakaran di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-118
Tabel 2.51	Capaian Kinerja Tanggap Bencana Kebakaran Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-119
Tabel 2.52	Nilai Komponen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-123
Tabel 2.53	Jenis dan Jumlah Keputusan DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2021 - 2025.....	2-124
Tabel 2.54	Jabatan ASN Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-127
Tabel 2.55	ASN dan Pejabat ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-128



Tabel 2.56	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat, Bimtek, dan Seminar Tahun 2021-2025.....	2-128
Tabel 2.57	Manajemen Pengelolaan ASN Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-128
Tabel 2.58	Capaian Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-130
Tabel 2.59	Tindak Lanjut Temuan BPK dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-132
Tabel 2.60	Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-133
Tabel 2.61	Dokumen dan Kajian Bapperida Tahun 2021-2025	2-135
Tabel 2.62	Peningkatan Peserta Lomba Krenova Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-136
Tabel 2.63	Jumlah Pelayanan Akta di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-137
Tabel 2.64	Capaian Pelayanan Akta di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-138
Tabel 2.65	Jumlah Layanan Informasi Kependudukan di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-138
Tabel 2.66	Perkembangan Status Desa Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-139
Tabel 2.67	Data Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2025.....	2-141
Tabel 2.68	Capaian Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2025.....	2-142
Tabel 2.69	Perkembangan Koperasi Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-143
Tabel 2.70	Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-144
Tabel 2.71	Indeks Satu Data Indonesia Tahun 2021-2025.....	2-146
Tabel 2.72	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Tahun 2021-2025	2-147
Tabel 2.73	Data terkait Kepustakaan di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-149
Tabel 2.74	Data terkait Kearsipan di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-150
Tabel 2.75	Data Capaian Kearsipan di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-151
Tabel 2.76	Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten 2021-2025	2-152
Tabel 2.77	Perkembangan Capaian Disparitas Harga Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-156
Tabel 2.78	Perkembangan rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-157
Tabel 2.79	Perkembangan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-158
Tabel 2.80	Perkembangan Rasio PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-159
Tabel 2.81	Jumlah Pasar Kios, Los dan Pedagang Menurut Kecamatan Tahun 2021-2025.....	2-159
Tabel 2.82	Perkembangan Rasio Kewirausahaan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-160
Tabel 2.83	Perkembangan Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-161
Tabel 2.84	Perkembangan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHK) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-162



Tabel 2.85	Perkembangan Produksi Pertanian Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-162
Tabel 2.86	Perkembangan Populasi Peternakan di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-164
Tabel 2.87	Perkembangan Dukungan Sistem Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-165
Tabel 2.88	Perkembangan Produksi Perikanan Darat Kabupaten Klaten Tahun 2021 -2025.....	2-166
Tabel 2.89	Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-172
Tabel 2.90	Data Kondisi Jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-172
Tabel 2.91	Kondisi Jembatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-174
Tabel 2.92	Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-176
Tabel 2.93	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaaan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-177
Tabel 2.94	Sarana dan Prasarana Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-178
Tabel 2.95	Jumlah Sarana Angkutan Umum di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-179
Tabel 2.96	Data Uji Kendaraan Bermotor di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025...	2-180
Tabel 2.97	Data Terminal Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Klaten Tahun 2025.....	2-180
Tabel 2.98	Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten/kota Tahun 2021-2025	2-182
Tabel 2.99	Pemenuhan Rumah Layak Huni di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-183
Tabel 2.100	Persentase prasarana dan perlengkapan jalan terpasang di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-183
Tabel 2.101	Perkembangan Realisasi PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-184
Tabel 2.102	Tabel Perkembangan Realisasi PMA di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-184
Tabel 2.103	Perkembangan Capaian Pembangunan Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-185
Tabel 2.104	Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025	2-188
Tabel 2.105	Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025	2-189
Tabel 2.106	Capaian Kinerja Urusan Pendidikan	2-195
Tabel 2.107	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan	2-196
Tabel 2.108	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2-199
Tabel 2.109	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	2-201
Tabel 2.110	Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2-202
Tabel 2.111	Capaian Kinerja Urusan Sosial	2-203
Tabel 2.112	Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja.....	2-204
Tabel 2.113	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2-205



Tabel 2.114	Capaian Kinerja Urusan Pangan.....	2-206
Tabel 2.115	Capaian Kinerja Urusan Pertanahan	2-207
Tabel 2.116	Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup	2-208
Tabel 2.117	Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	2-210
Tabel 2.118	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2-211
Tabel 2.119	Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2-212
Tabel 2.120	Capaian Kinerja Urusan Perhubungan	2-213
Tabel 2.121	Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika	2-213
Tabel 2.122	Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2-214
Tabel 2.123	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal	2-215
Tabel 2.124	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga	2-216
Tabel 2.125	Capaian Kinerja Urusan Statistik	2-217
Tabel 2.126	Capaian Kinerja Urusan Persandian	2-217
Tabel 2.127	Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan	2-218
Tabel 2.128	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan	2-219
Tabel 2.129	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan	2-219
Tabel 2.130	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan	2-220
Tabel 2.131	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata	2-221
Tabel 2.132	Capaian Kinerja Urusan Pertanian.....	2-222
Tabel 2.133	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan	2-223
Tabel 2.134	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian	2-224
Tabel 2.135	Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi	2-224
Tabel 2.136	Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah	2-225
Tabel 2.137	Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD.....	2-227
Tabel 2.138	Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah	2-228
Tabel 2.139	Capaian Kinerja Urusan Keuangan Daerah	2-229
Tabel 2.140	Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	2-230
Tabel 2.141	Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan	2-231
Tabel 2.142	Capaian Kinerja Urusan Pengawasan	2-231
Tabel 2.143	Capaian Kinerja Urusan Kewilayahan.....	2-233
Tabel 2.144	Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	2-234
Tabel 3.1	Proyeksi Indikator Ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2026-2027	3-5
Tabel 3.2	Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Klaten Tahun 2026 dan 2027	3-7
Tabel 3.3	Proyeksi Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Klaten Tahun 2026 dan 2027.....	3-7
Tabel 3.4	Realisasi dan Rencana Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022-2027.....	3-11
Tabel 3.5	Realisasi dan Rencana Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022-2027.....	3-16
Tabel 3.6	Realisasi dan Rencana Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022-2027.....	3-18



Tabel 3.7	Proyeksi Ringkasan Kerangka Keuangan Daerah pada RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2027	3-19
Tabel 3.8	Laporan Perkembangan Kontribusi Dunia dalam Prioritas Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2026.....	3-20
Tabel 3.9	Prioritas Pembangunan yang Berpotensi Didukung CSR	3-21
Tabel 3.10	Proyeksi target kontribusi CSR dalam Pembangunan Daerah.....	3-21
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2027	4-3
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027.....	4-9
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Klaten Tahun 2027	4-13
Tabel 4.4	Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2027	4-14
Tabel 4.5	Keselarasan Sasaran Utama Pembangunan (SUP) Tahun 2027	4-16
Tabel 4.6	Keselarasan IUP Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Klaten	4-17
Tabel 4.7	Dukungan Kabupaten Klaten terhadap Pelaksanaan Program Strategis Nasional Tahun 2027	4-21
Tabel 4.8	Keterkaitan Intervensi KEM-PPKF Regional dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2027	4-24
Tabel 4.9	Dukungan Kabupaten Klaten terhadap Program Delegasi Provinsi	4-27
Tabel 4.10	Sinkronisasi Sasaran Indikator Makro Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Klaten Tahun 2027	4-30
Tabel 4.11	Dukungan Pencapaian Indikator Tematik Provinsi Jawa Tengah	4-31
Tabel 4.12	Keselarasan Sasaran Makro dengan Pokok-Pokok Pikiran	4-38
Tabel 4.13	Keselarasan Sub Kegiatan dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	4-39
Tabel 5.1	Rencana Program dan Kegiatan Penunjang yang Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	5-2
Tabel 5.2	Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Alokasi Anggaran terhadap Proyek Strategis Nasional (ProSN) Kabupaten Klaten Tahun 2027	5-9
Tabel 5.3	Rencana Program / Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) 2025-2029	5-16
Tabel 5.4	Sub Kegiatan yang Mendukung Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Klaten	5-26
Tabel 5.5	Rencana Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian 10 Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati	5-28
Tabel 5.6	Ringkasan Pagu Indikatif Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2027 Berdasarkan Perangkat Daerah	5-29
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Klaten Tahun 2027	6-1
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Klaten Tahun 2027	6-3
Tabel 6.3	Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Klaten Tahun 2027.....	6-14



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pendekatan dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten	1-3
Gambar 1.2	Pendekatan berorientasi pada substansi dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten	1-4
Gambar 1.3	Alur Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2025	1-5
Gambar 1.4	Hubungan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2025 dengan Dokumen Perencanaan	1-10
Gambar 2.1	Peta Wilayah Kabupaten Klaten	2-1
Gambar 2.2	Peta Topografi Kabupaten Klaten.....	2-3
Gambar 2.3	Peta Kelerengan Kabupaten Klaten.....	2-4
Gambar 2.4	Peta Geologi Kabupaten Klaten	2-5
Gambar 2.5	Peta Curah Hujan Kabupaten Klaten.....	2-6
Gambar 2.6	Peta Hidrogeologi Kabupaten Klaten.....	2-9
Gambar 2.7	Peta Pola Ruang Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Kabupaten Klaten	2-18
Gambar 2.8	Piramida Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2025 Semester II	2-24
Gambar 2.9	Peningkatan IKP Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-25
Gambar 2.10	Prevalence of Undernourishment Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-28
Gambar 2.11	Cakupan Pelayanan Air Minum di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-32
Gambar 2.12	Akses Aman Sanitasi di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-33
Gambar 2.13	Kondisi Daerah Irigasi di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-35
Gambar 2.14	Perkembangan Data Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (tonCO ₂ eq) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-42
Gambar 2.15	Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-45
Gambar 2.16	Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2021-2025.....	2-47
Gambar 2.17	Perkembangan Jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana) Kabupaten Klaten 2021-2025	2-48
Gambar 2.18	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025.....	2-50
Gambar 2.19	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Konstan 2010 di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-51
Gambar 2.20	Perkembangan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (dalam Juta Rupiah) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-54
Gambar 2.21	Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025	2-55
Gambar 2.22	Posisi Relatif Gini Rasio Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2025	2-56
Gambar 2.23	Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 (Rupiah/Kapita/Bulan).....	2-59
Gambar 2.24	Perkembangan Relevansi Persentase Kemiskinan di Kabupaten Klaten terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025	2-60
Gambar 2.25	Perkembangan Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 - 2025	2-62



Gambar 2.26	Perkembangan Relevansi Indeks Keparahana Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 - 2025	2-63
Gambar 2.27	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2021-2025	2-64
Gambar 2.28	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2021-2025.....	2-65
Gambar 2.29	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-66
Gambar 2.30	Capaian IPM Nasional Provinsi Jateng dan Kabupaten Klaten Tahun 2021 - 2025	2-66
Gambar 2.31	Perkembangan Usia Harapan Hidup Masyarakat di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-69
Gambar 2.32	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-70
Gambar 2.33	Harapan Lama Sekolah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-70
Gambar 2.34	Angka Partisipasi Sekolah Usia 5 – 6 Tahun Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-71
Gambar 2.35	Angka Kematian Ibu Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-72
Gambar 2.36	Jumlah Kasus Kematian Bayi Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-73
Gambar 2.37	Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-75
Gambar 2.38	Perbandingan prevalensi stunting Kabupaten Klaten dibandingkan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.....	2-76
Gambar 2.39	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-77
Gambar 2.40	Capaian Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-78
Gambar 2.41	Annual Parasites Incidence Malaria Di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-79
Gambar 2.42	Cakupan Kepesertaan Jamkesmas di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-80
Gambar 2.43	Persentase PPKS yang mendapatkan peningkatan kesejahteraan sosial di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-81
Gambar 2.44	Jumlah Pengemis Gelandangan Orang Terlantar (PGOT) di Rumah Singgah Kabupaten Klaten Tahun 2022-2025	2-82
Gambar 2.45	Perkembangan Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-83
Gambar 2.46	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-83
Gambar 2.47	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-84
Gambar 2.48	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-85
Gambar 2.49	Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) Bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-86
Gambar 2.50	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-88
Gambar 2.51	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah Di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-89
Gambar 2.52	Kelompok Kesenian Yang Aktif Terlibat/ Mengadakan Pertunjukan Kesenian Dalam 1 (Satu) Tahun Terakhir Di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-90



Gambar 2.53	Indeks Pembangunan Pemuda di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-90
Gambar 2.54	Persentase Prestasi Olahraga di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-91
Gambar 2.55	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-93
Gambar 2.56	Kemampuan Literasi SD dan SMP Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-93
Gambar 2.57	Kemampuan Numerasi SD dan SMP Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-94
Gambar 2.58	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya & Mengarustamakan Kebudayaan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-95
Gambar 2.59	Capaian SPM Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-101
Gambar 2.60	Persentase Penegakan Perda Kabupaten Klaten 2021-2025.....	2-115
Gambar 2.61	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman,Keindahan) Kabupaten Klaten 2021-2025.....	2-115
Gambar 2.62	Angka Kejadian Kebakaran di Kabupaten Klaten 2021-2025	2-117
Gambar 2.63	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-120
Gambar 2.64	Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Klaten Tahun 2023 – 2025	2-121
Gambar 2.65	Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2025	2-122
Gambar 2.66	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2025	2-123
Gambar 2.67	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2024	2-125
Gambar 2.68	Nilai Indeks Profesionalisme (IP) ASN Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-126
Gambar 2.69	Merit Sistem Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-126
Gambar 2.70	Jumlah Pegawai Kabupaten Klaten Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2021-2025	2-127
Gambar 2.71	Indeks Integritas Nasional (Survei Penilaian Integritas) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-131
Gambar 2.72	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-134
Gambar 2.73	Kapabilitas Inovasi Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-135
Gambar 2.74	Nilai Indeks Inovasi daerah (IID) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-136
Gambar 2.75	Peningkatan Jumlah Inovasi Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-137
Gambar 2.76	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-140
Gambar 2.77	Nilai Pengawasan Kearsipan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025.....	2-149
Gambar 2.78	Data Pertanahan di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-152
Gambar 2.79	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-153
Gambar 2.80	Nilai Dimensi Indeks Harmonisasi Kabupaten Klaten Tahun 2025	2-154
Gambar 2.81	Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-155
Gambar 2.82	Perkembangan Pertumbuhan Industri Pengolahan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-157
Gambar 2.83	Total kredit pada bank milik kabupaten/kota per PDRB Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-167



Gambar 2.84	Total dana pihak ketiga pada bank kabupaten/kota per PDRB Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-168
Gambar 2.85	Return On Asset (ROA) BUMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 ..	2-168
Gambar 2.86	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-169
Gambar 2.87	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-170
Gambar 2.88	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-170
Gambar 2.89	Kontribusi Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-171
Gambar 2.90	RTLH tertangani di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-177
Gambar 2.91	Peta Sebaran Terminal di Kabupaten Klaten.....	2-180
Gambar 2.92	Persentase Desa Mandiri Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025	2-186
Gambar 4.1	Konsistensi Antara Prioritas Daerah dengan Isu Strategis RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2027	4-13



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk menjamin keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan secara sistematis, terarah, terpadu, dan partisipatif guna mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2027 disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang merupakan penjabaran tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2025–2029. RKPD ini menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja perangkat daerah, kebijakan penganggaran, serta pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan daerah secara terarah dan berkesinambungan.

Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2027 dilaksanakan melalui proses perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terpadu, dan partisipatif, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses perencanaan tersebut dilaksanakan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan antarjenjang pemerintahan, RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, serta kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2029. Keselarasan perencanaan tersebut dimaksudkan untuk mendukung pencapaian



sasaran pembangunan nasional dan regional, sekaligus memperkuat peran Kabupaten Klaten dalam pembangunan wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten tahun 2027 diarahkan pada pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Klaten tahun 2025-2029 yaitu “Mewujudkan Klaten Yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan” dan pelaksanaan 6 misi pembangunan jangka menengah daerah yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih sehat, cerdas, produktif, berdaya saing dan berkepribadian;
2. Efektivitas pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan yang menjamin kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
3. Nilai tambah ekonomi kerakyatan yang ditingkatkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkeadilan;
4. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah terus ditingkatkan menuju pemerintahan yang bersih, bebas korupsi dan berkeadaban serta setia pada Pancasila, UUD 1945 dan Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera);
5. Nilai Daya Saing dan Kemandirian Daerah berbasis potensi lokal yang terus ditingkatkan didukung pengembangan Klaten sebagai Kabupaten yang smartcity;
6. Gotong royong memajukan kebudayaan dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian warisan leluhur.

Prioritas pembangunan daerah tahun 2027 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan tema pembangunan “**Akselerasi Pembangunan SDM dan Infrastruktur**” yang diarahkan pada:

- a. Peningkatan akses dan mutu pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial;
- b. Peningkatan kemudahan berusaha dan berinvestasi;
- c. Pengembangan dan modernisasi infrastruktur ekonomi dan sosial;
- d. Peningkatan ekosistem inovasi dan riset pengembangan daerah;
- e. Pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah.

Dengan disusunnya RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2027, diharapkan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja pembangunan daerah secara akuntabel, sesuai dengan kaidah perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, serta memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (*no one left behind*).

Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2027 menggunakan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan, baik dari sisi proses maupun substansi.



Pendekatan yang berorientasi pada proses mencakup:

1) Pendekatan teknokratik

Pendekatan Teknokratik dimaknai sebagai pendekatan perencanaan yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh proses penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2027 dengan melibatkan tenaga ahli yang berkompeten

2) Pendekatan politik

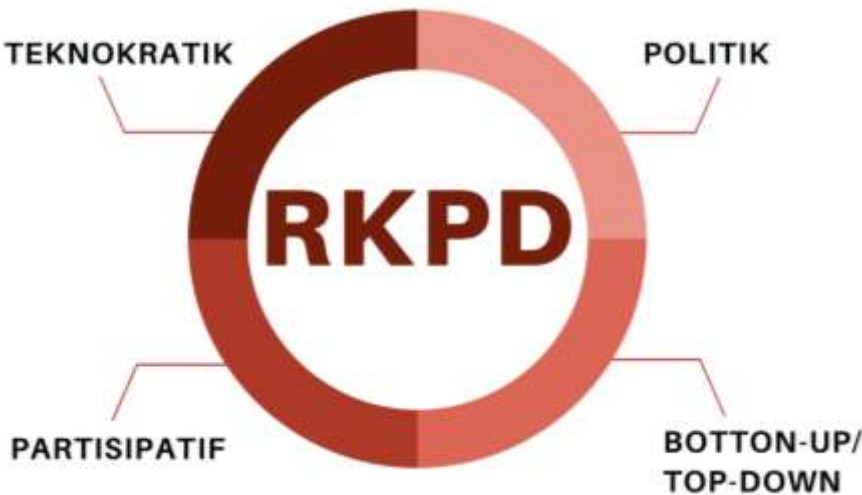
Pendekatan Politik dimaknai sebagai pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan dengan diakomodirnya saran dan masukan Kepala Daerah dan pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam dokumen RKPD.

3) Pendekatan partisipatif

Pendekatan partisipatif dimaknai sebagai pendekatan perencanaan yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui konsultasi publik dan musrenbang RKPD Kabupaten Klaten

4) Pendekatan *Bottom-up* dan *Top-down*.

Pendekatan *Bottom-up* dan *Top-down* dimaknai sebagai pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program-program prioritas pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini ditunjukkan dengan penyusunan RKPD yang memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan penyelarasan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional.

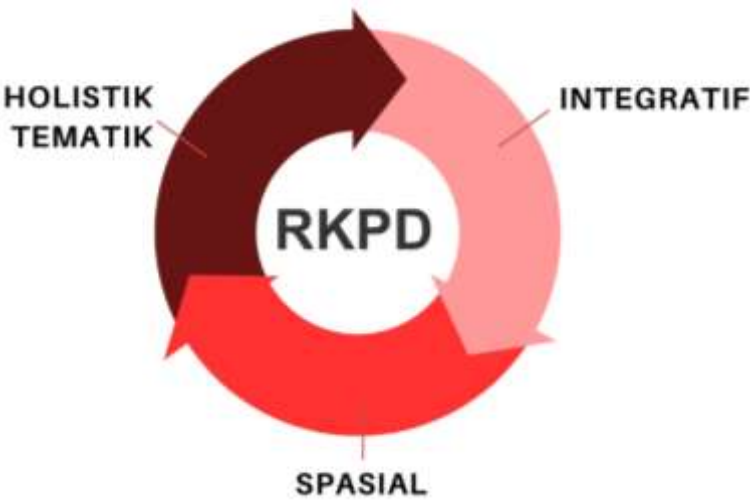


Gambar 1.1 Pendekatan berorientasi pada proses dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten



Pendekatan dari sisi substansi yang digunakan dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten meliputi:

- 1) Pendekatan Holistik-Tematik;
Pendekatan Holistik-Tematik dalam RKPD Kabupaten Klaten dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/ bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
- 2) Pendekatan Integratif
Pendekatan Integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan daerah ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
- 3) Pendekatan Spasial.
Sedangkan, pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam arah kebijakan pengembangan wilayah.



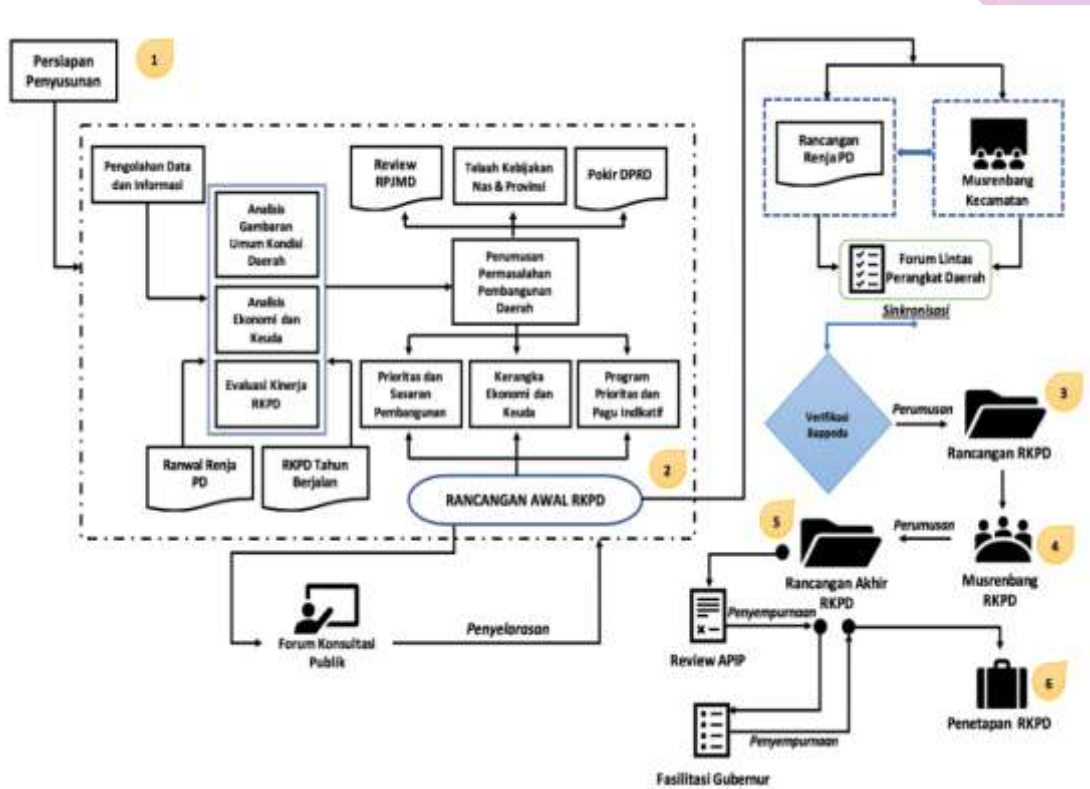
Gambar 1.2 Pendekatan berorientasi pada substansi dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten

Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2027, disusun melalui 6 tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan RKPD;
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD;
3. Penyusunan Rancangan RKPD;
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD; dan
6. Penetapan RKPD.



Secara lengkap, tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Klaten tahun 2027 disajikan pada berikut



Gambar 1.3 Alur Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2027

Berdasarkan Gambar tersebut di atas, serta memperhatikan Pasal 11 Ayat (2) Huruf c Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, serta sesuai dengan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Telah dijelaskan bahwa RKPD memuat kerangka ekonomi Daerah, program prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Memperhatikan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, RKPD sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), maka konsekuensi dari pelaksanaan atas pasal-pasal tersebut, rencana kerja, program dan kegiatan yang disusun dalam RKPD harus terukur dan dapat dilaksanakan dengan memperhitungkan kemampuan APBD. RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2027 wajib diintegrasikan dan diselaraskan dengan program-program pemerintah (Pusat, dan Provinsi) melalui tahapan konsolidasi seiring dengan periodisasi pelaksanaan RPJPN 2025-2045.



1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056), sebagaimana telah diubah dengan PP No. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
21. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);



22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19, SK Nomor 193186 A);
23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Kepmendagri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak;
32. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;



33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah: B-278/2024, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 161);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 170);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten 4 Tahun 2021 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2031;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024 Nomor 14, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah: (14-303/2024), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 252);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025 Nomor 3, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah : (3-163/2025), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025 Nomor 253);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

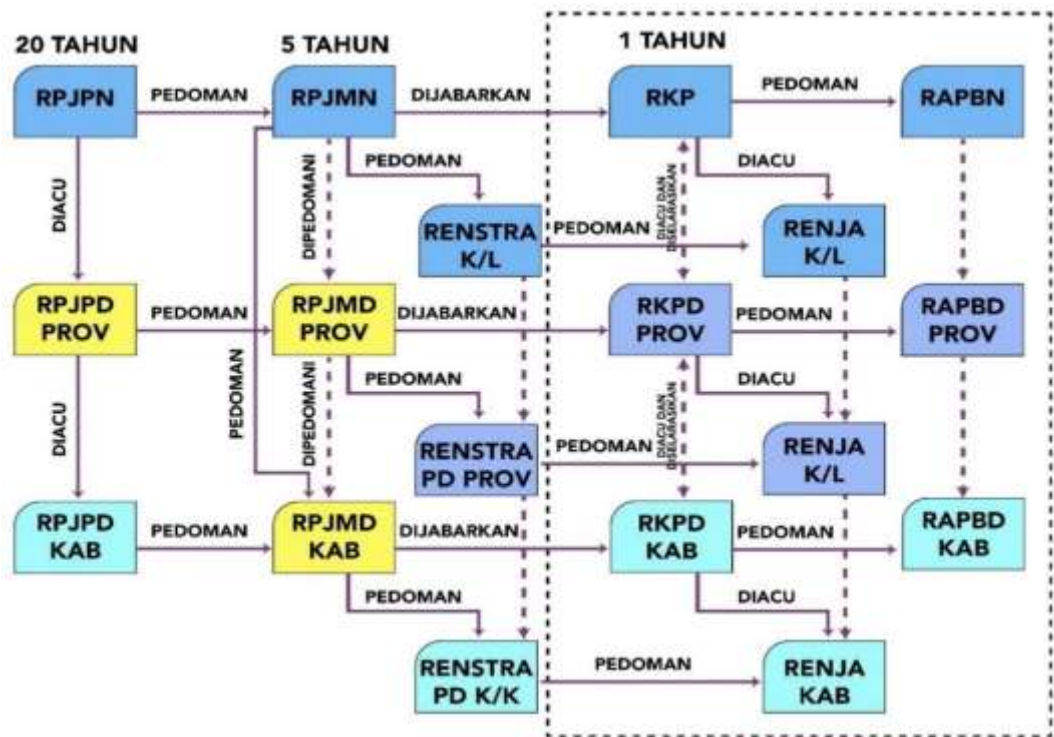


43. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten.

1.3. Hubungan RKPD Antar Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2027 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2027 juga memperhatikan sinergitas dengan dokumen perencanaan di atasnya yaitu RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 dan RKP Tahun 2027. Hal ini terkait dengan kebijakan dan arah pembangunan serta prioritas dan beberapa sumber dana program dan kegiatan yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dokumen RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2027 memiliki keterkaitan dengan beberapa dokumen perencanaan di Kabupaten Klaten, maupun dokumen perencanaan di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Adapun gambar hubungan antar dokumen sebagai berikut:



Gambar 1.4 Hubungan Dokumen RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2027 dengan Dokumen Perencanaan



Penjelasan masing-masing dokumen perencanaan terkait diuraikan sebagai berikut.

1. Hubungan Dengan Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2025

Hasil evaluasi RKPD Tahun 2025 memberikan gambaran atas pencapaian kinerja Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2025 yang akan menjadi menjadi dasar dalam merumuskan permasalahan, isu strategis dan penentuan prioritas pembangunan tahunan daerah tahun 2027.

2. Kajian Terhadap RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan RKPD Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Klaten, perlu memperhatikan isu strategis pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029 terutama terkait permasalahan dan isu strategis daerah. Penyusunan RKPD Tahun 2027 juga harus memperhatikan Renstra Perangkat Daerah terkait dengan permasalahan dan isu strategis serta indikator kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

3. Kajian Terhadap Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Kajian ini digunakan untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah ditetapkan berkaitan dengan identifikasi kebijakan untuk tahun rencana. Hal ini terkait dengan karakteristik kebijakan yang relevan, yakni amanat perundang-undangan yang mengikat secara umum suatu daerah, kebijakan pemerintah pusat atau provinsi yang menjadikan pemerintah pusat atau provinsi yang memberikan suatu dampak tidak langsung terhadap suatu daerah. Pada tahap ini diperlukan kajian terhadap informasi dan kebijakan yang memiliki kaitan maupun dampak langsung atau tidak langsung terhadap daerah.

4. Hubungan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2027 juga harus memperhatikan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terkait dengan permasalahan, isu strategis, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja perangkat daerah tahun 2027. Setelah RKPD ditetapkan, RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2027 dimaksudkan untuk:

1. Menyediakan dokumen yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2027;
2. Menyediakan dokumen sebagai pedoman menyusun rencana kerja (renja) Perangkat Daerah Tahun 2027.



1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2027 adalah mewujudkan sinergitas serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2024 dengan berpedoman Pasal 79 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat kondisi umum Daerah meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek potensi Daerah; evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD; serta menguraikan permasalahan pembangunan Daerah.

BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan; arah kebijakan ekonomi Daerah serta arah kebijakan keuangan Daerah.

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Memuat rencana program prioritas Daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2027.

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah berdasarkan target indikator kinerja Daerah yang kemudian ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai bentuk pedoman dalam pencapaian kinerja tahunan pada RPJMD.

BAB VII Penutup

Pada bagian ini berisi kaidah pelaksanaan dan penutup.

Lampiran



BAB II

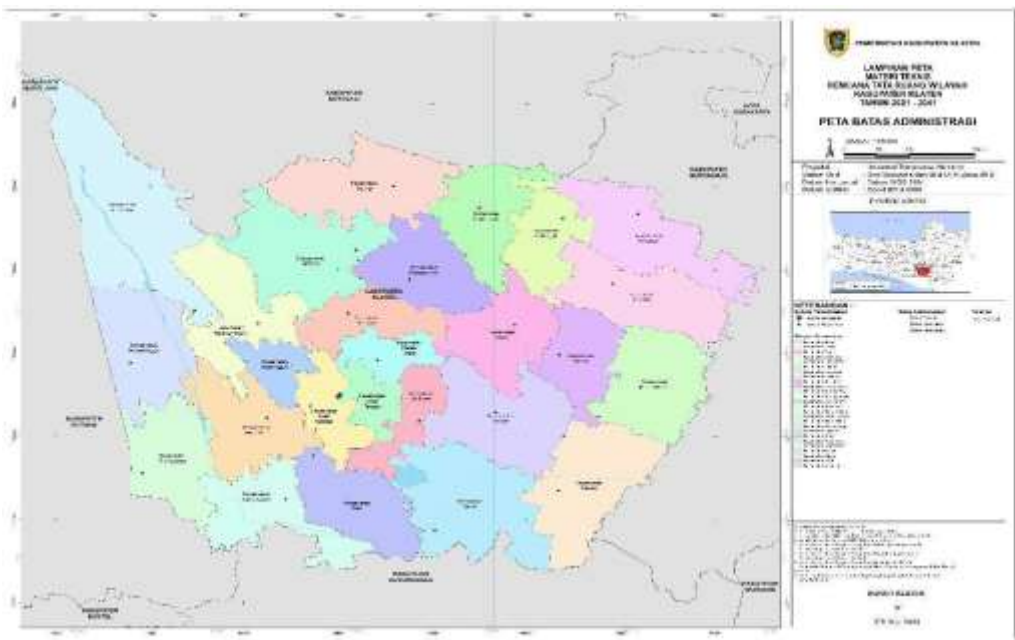
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki posisi strategis karena berada di antara dua pusat pertumbuhan wilayah, yaitu Kota Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2024, Kabupaten Klaten memiliki luas wilayah kurang lebih 701,52 km². Berdasarkan letak geografis dan administratif, Kabupaten Klaten memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali
- Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo
- Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Sebelah Barat : Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Klaten

Letak geografis dan batas wilayah administrasi Kabupaten Klaten menjadi faktor penting dalam mendukung keterkaitan antarwilayah (interkonektivitas) serta pengembangan wilayah yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya. Secara administratif, Kabupaten Klaten terbagi ke dalam **26 kecamatan**, **10 kelurahan**, dan **391 desa**, dengan rincian sebaran wilayah administrasi sebagai berikut:



Tabel 2.1 Rincian Wilayah Administrasi Kabupaten Klaten

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Desa/ Kelurahan	RT	RW
1	Prambanan	26,09	16	356	134
2	Gantiwarno	26,44	16	306	127
3	Wedi	26,25	19	448	189
4	Bayat	42,09	18	460	166
5	Cawas	35,93	20	491	207
6	Trucuk	34,68	18	487	197
7	Kalikotes	14,10	7	290	94
8	Kebonarum	10,41	7	171	70
9	Jogonalan	27,59	18	448	206
10	Manisrenggo	30,60	16	434	171
11	Karangnongko	29,49	14	332	142
12	Ngawen	18,45	13	334	125
13	Ceper	25,76	18	471	166
14	Pedan	19,99	14	407	143
15	Karangdowo	30,80	19	376	151
16	Juwiring	30,90	19	402	149
17	Wonosari	33,40	18	375	138
18	Delanggu	20,03	16	338	110
19	Polanharjo	25,21	18	253	109
20	Karanganom	25,61	19	292	137
21	Tulung	34,44	18	355	142
22	Jatinom	37,10	18	489	181
23	Kemalang	60,19	13	314	110
24	Klaten Selatan	15,09	12	338	131
25	Klaten Tengah	9,59	9	331	100
26	Klaten Utara	11,17	8	287	95
Kabupaten Klaten		701,52	401	9.593	3.689

b. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Klaten terletak di bagian tenggara Provinsi Jawa Tengah dan memiliki posisi geografis yang strategis karena berada di antara dua wilayah perkotaan utama, yaitu Kota Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara geografis, Kabupaten Klaten terletak pada 7°32’ – 7°48’ Lintang Selatan dan 110°26’ – 110°47’ Bujur Timur.

Kondisi geografis Kabupaten Klaten secara umum didominasi oleh wilayah dataran rendah hingga perbukitan. Bagian utara dan timur wilayah Kabupaten Klaten merupakan daerah dataran rendah yang relatif landai dan berkembang sebagai kawasan permukiman, pertanian, serta pusat aktivitas ekonomi. Sementara itu, bagian barat dan selatan memiliki kontur wilayah yang lebih bervariasi, dengan sebagian wilayah perbukitan yang berdekatan dengan kawasan Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu. Letak geografis dan kondisi



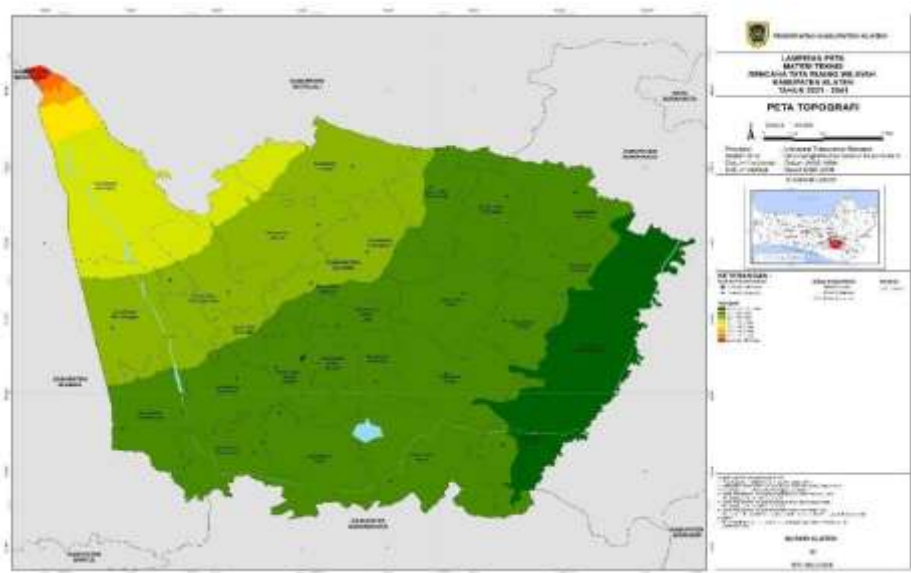
wilayah Kabupaten Klaten berpengaruh signifikan terhadap pola pemanfaatan ruang, pengembangan wilayah, serta arah kebijakan pembangunan daerah.

c. Kondisi Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Klaten secara umum didominasi oleh wilayah dataran rendah hingga bergelombang, dengan variasi ketinggian wilayah yang cukup beragam. Ketinggian wilayah Kabupaten Klaten berada pada kisaran ± 100 meter hingga lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Bagian utara dan timur Kabupaten Klaten merupakan daerah dataran rendah dengan topografi relatif landai, yang berkembang sebagai kawasan pertanian produktif, permukiman, serta pusat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Wilayah ini memiliki kemiringan lereng yang kecil sehingga relatif mendukung pengembangan infrastruktur dan aktivitas budidaya.

Sementara itu, bagian barat dan selatan Kabupaten Klaten memiliki topografi yang lebih bervariasi, mulai dari bergelombang hingga berbukit. Wilayah barat berada pada kawasan yang dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik Gunung Merapi, dengan bentuk lahan lereng dan kaki gunung yang memiliki tingkat kesuburan tanah tinggi namun juga memiliki potensi kerawanan bencana. Adapun wilayah selatan merupakan bagian dari kawasan perbukitan yang termasuk dalam sistem Pegunungan Seribu, dengan karakteristik topografi berbukit dan ketersediaan lahan datar yang terbatas.



Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041

Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Klaten

Secara terperinci, kondisi topografi Kabupaten Klaten sebagai berikut:

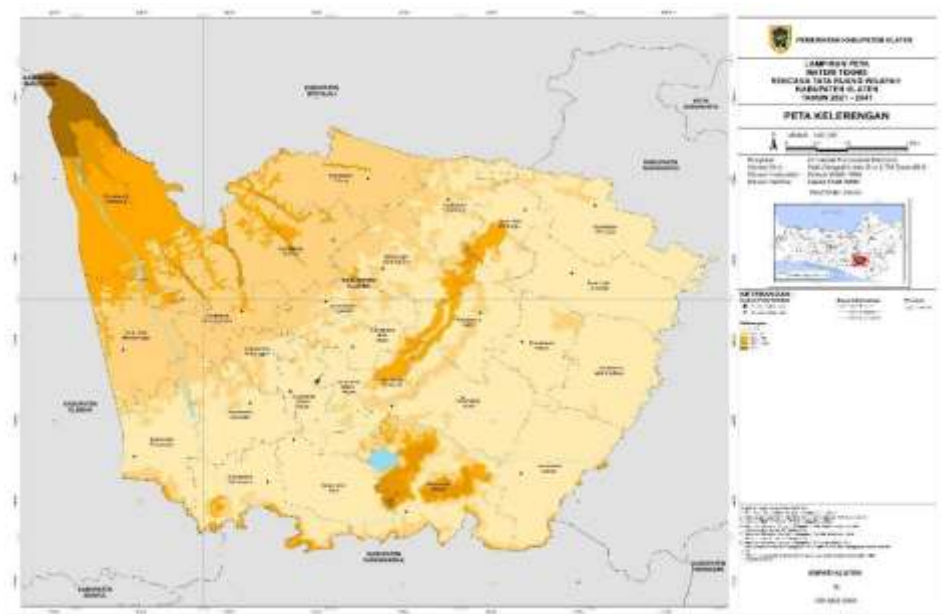
1. Wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 mdpl berada di Kecamatan Juwiring, Karangdowo dan Cawas;
2. Wilayah dengan ketinggian antara 100-200 mdpl berada di Kecamatan Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas bagian barat, Trucuk, Kalikotes, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Kebonarum bagian selatan, Ngawen bagian



- selatan dan timur, Ceper, Pedan, Karanganom bagian timur, Polanharjo bagian timur, Delanggu, Juwiring bagian barat dan Wonosari bagian barat.
3. Wilayah dengan ketinggian antara 200-400 mdpl berada di Kecamatan Manisrenggo, Jogonalan bagian utara, Karangnongko, Kebonarum bagian utara, Ngawen bagian utara, Jatinom, Karanganom bagian barat, Tulung dan Polanharjo bagian barat.
 4. Wilayah dengan ketinggian antara 400-1.000 mdpl berada di Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Jatinom dan Tulung.
 5. Wilayah dengan ketinggian 1.000-2.000 mdpl berada di Kecamatan Kemalang.

Perbedaan kondisi topografi tersebut berpengaruh terhadap pola pemanfaatan ruang, sebaran penduduk, serta pengembangan sektor unggulan daerah. Oleh karena itu, pengelolaan pembangunan Kabupaten Klaten perlu memperhatikan kesesuaian lahan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta aspek mitigasi bencana dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Jika dilihat dari kelerengannya, sebagian besar Kabupaten Klaten memiliki kelerengan 0-2% di wilayah bagian tengah ke selatan, kemudian kelerengan lebih dari 2-5%, dan semakin ke utara semakin kelerengan tinggi. Kelerengan lebih dari 40% terdapat di Kecamatan Kemalang karena merupakan lereng Gunung Merapi. Kelerengan 0-2% dan 2-5% masuk dalam kategori datar dan memiliki daya dukung yang baik untuk lahan terbangun, sehingga dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh wilayah Kabupaten Klaten secara topografi memiliki daya dukung yang baik untuk kawasan budidaya. Wilayah yang perlu mendapat perhatian adalah wilayah dengan kemiringan lereng lebih dari 25% karena sudah masuk kategori curam, bahkan di beberapa tempat memiliki kerengan lebih dari 45% yang berarti sangat curam dan sulit untuk dikembangkan sebagai kawasan terbangun.



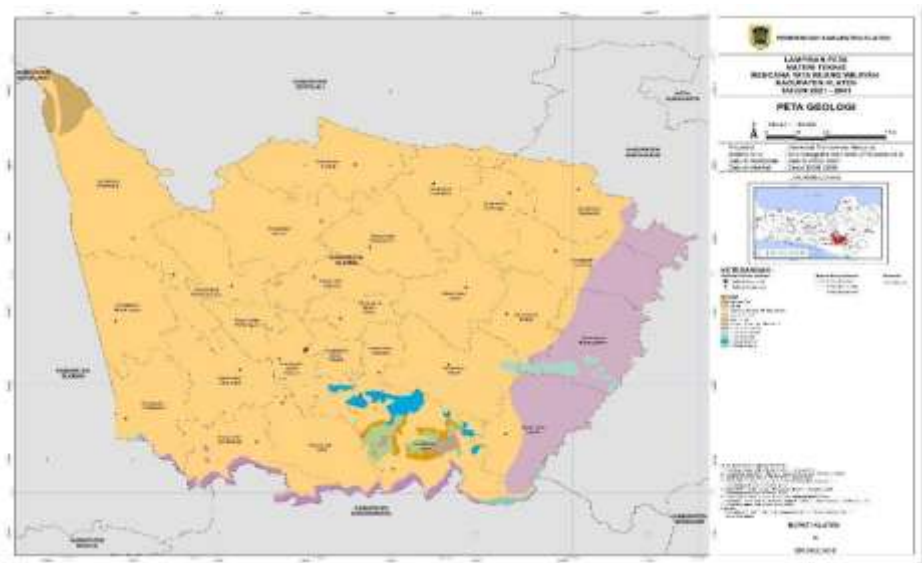
Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041

Gambar 2.3 Peta Kelerengan Kabupaten Klaten



d. Kondisi Geologi

Geologi permukaan adalah kondisi geologi tanah atau batu yang ada di permukaan dan sebarannya baik lateral maupun vertikal hingga kedalaman batuan dasar serta sifat-sifat keteknikan tanah atau batu tersebut, dalam kaitannya untuk menunjang pengembangan kawasan. Keadaan geologi Kabupaten Klaten diketahui merupakan vulkanik kwarter muda yakni batuan induk yang membentuk lapisan tanah. Jenis batuan yang ada merupakan batuan gunung api merapi. Kondisi geologi wilayah Kabupaten Klaten terdiri dari beberapa jenis batuan, meliputi: Aluvium Tua, Endapan Aluvium, Batuan Gunungapi Merapi, Batuan Gunungapi Tua, Batuan Malihan, Batuan Merapi Tua, Dasit, Pendul, Formasi Gamping Wungkal, Formasi Kebobutak, Formasi Semilir, dan Formasi Wonosari.



Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041

Gambar 2.4 Peta Geologi Kabupaten Klaten

e. Kondisi Klimatologi

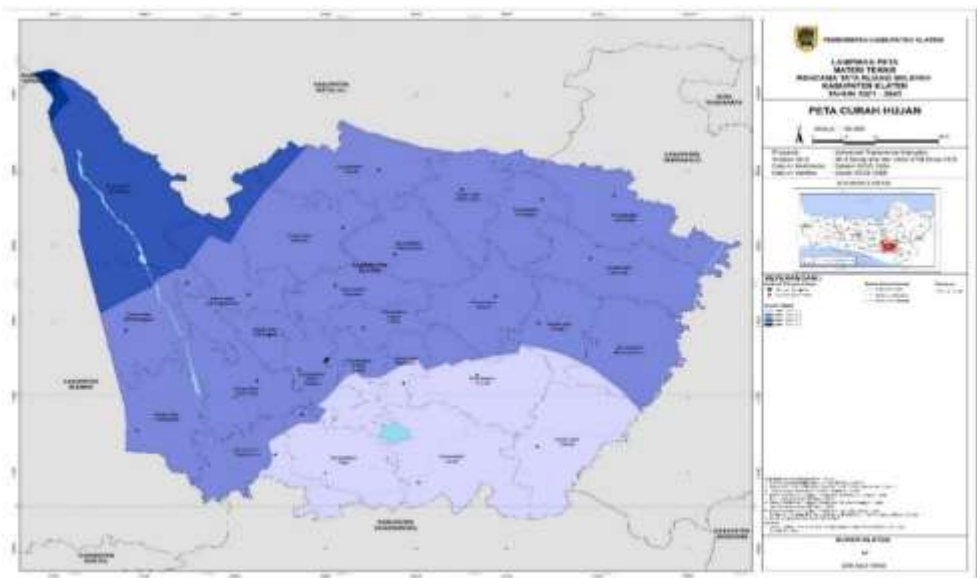
Kabupaten Klaten secara klimatologis berada dalam zona iklim tropis muson, yang ditandai oleh pergantian dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau sepanjang tahun. Pola iklim ini dipengaruhi oleh pergerakan angin monsun yang membawa massa udara basah pada musim hujan dan massa udara kering pada musim kemarau. Iklim tropis tersebut berimplikasi pada distribusi curah hujan, temperatur udara, kelembapan, dan angin di wilayah Kabupaten Klaten.

Berdasarkan data dari **Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Region II Jawa Tengah**, Kabupaten Klaten memiliki ciri klimatologi sebagai berikut:

1. Curah hujan tahunan rata-rata **berkisar antara 400–500 mm**, dengan variasi antar musim dan lokasi wilayah.
2. Suhu udara rata-rata berkisar antara $\pm 28\text{--}30^{\circ}\text{C}$, dengan kelembapan relatif yang umumnya tinggi pada musim hujan dan menurun pada musim kemarau.
3. Kecepatan angin rata-rata berkisar 20–25 km/jam, yang juga dipengaruhi oleh dinamika muson dan topografi setempat.



Distribusi curah hujan di Kabupaten Klaten menunjukkan pola musiman, di mana curah hujan tertinggi umumnya terjadi pada **periode musim hujan** (sekitar Oktober hingga Maret), sedangkan periode **April hingga September** merupakan masa musim kemarau dengan jumlah hujan yang relatif lebih rendah. Curah hujan bulanan di wilayah Klaten menunjukkan variasi signifikan dengan puncak curah hujan pada awal tahun dan penurunan pada puncak kemarau, sesuai dengan pola iklim tropis di sebagian besar Jawa Tengah. Data statistik klimatologi menunjukkan misalnya curah hujan mencapai ratusan milimeter pada bulan puncak hujan dan berkurang drastis pada musim kemarau.



Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041

Gambar 2.5 Peta Curah Hujan Kabupaten Klaten

f. Kondisi Hidrologi dan Geohidrologi

Dari aspek hidrologi, wilayah Kabupaten Klaten dipengaruhi oleh beberapa daerah aliran sungai (DAS), antara lain DAS Bengawan Solo dan DAS Opak, serta memiliki potensi sumber daya air berupa sungai, mata air, dan jaringan irigasi yang mendukung sektor pertanian. Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Klaten sebagai salah satu wilayah penyangga ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah. Luas DAS Bengawan Solo yang ada di Kabupaten Klaten mencapai $\pm 67.024,08$ ha. Wilayah Kabupaten Klaten yang termasuk dalam DAS Opak yaitu Kecamatan Kemalang, Manisrenggo dan Prambanan. Luas DAS Opak yang ada di Kabupaten Klaten $\pm 3.074,27$ ha.

Pengelolaan sungai di wilayah Kabupaten Klaten pada prinsipnya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, mengingat sungai-sungai yang ada termasuk dalam Wilayah Sungai Bengawan Solo dan Wilayah Sungai Opak–Progo yang bersifat lintas kabupaten/kota dan lintas provinsi. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten berperan dalam mendukung pengelolaan sungai melalui



koordinasi, pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengelolaan drainase lingkungan.Sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Klaten, sebagai berikut:

Tabel 2.2 Nama dan Panjang Sungai Yang Melintasi Kabupaten Klaten

No	Nama Sungai	Panjang (km)	No	Nama Sungai	Panjang (km)
1	Bengawan Solo	8,50	41	Modin	8,86
2	Dengkeng	40,75	42	Jiwan	7,50
3	Brambang	16,00	43	Gemampir	6,10
4	Buntung	10,00	44	Banaran	2,75
5	Pusur	30,00	45	Logede	7,70
6	Bloro	5,00	46	Gempolan	4,40
7	Babadan	6,50	47	Somokaton	5,50
8	Ngolodono	7,00	48	Afur birit	3,85
9	Mlese	23,50	49	Slengregan	4,40
10	Tambong	1,70	50	Mlese	3,00
11	Padangan	11,00	51	Panggang	3,80
12	Kalikuning	10,20	52	Depok	2,75
13	Papah	2,75	53	Sampang	0,80
14	Ujung	32,50	54	Ondo	4,65
15	Birin	15,40	55	Cliling	5,50
16	Mindi	1,20	56	Song	1,65
17	Widoro	2,50	57	Gebang	1,75
18	Ngawu – awu	1,20	58	Sangiran	2,00
19	Lusah	24,75	59	Gupak Warak	0,50
20	Sambomerten	1,50	60	Kluwih	3,65
21	Banyuurip	2,50	61	Woro	16,8
22	Af. Paten	13,20	62	Sukunan	4,50
23	Menggah	1,50	63	Ipik	2,00
24	Simping	12,65	64	Deleran	7,00
25	Kongklangan	7,30	65	Cewok	7,50
26	Borongan	10,75	66	Putih	6,05
27	Opak	64,00	67	Klegung	6,60
28	Kauman	9	68	Jumok	7,25
29	Jebol	22,5	69	Wonggo	18,00
30	Kingkang	8,00	70	Gamping	6,85
31	Dandang	6,50	71	Metuk	4,30
32	Ceper	30,00	72	Lunyu	7,15
33	Bajing	7,50	73	Kroman	10,50
34	Macanan	4,50	74	Batang	3,85
35	Trucuk	11,50	75	Dompol	9,65
36	Beji	10,00	76	Bumiharjo	7,15
37	Jalin	1,60	77	Puluhan	6,50
38	Afur kalijaran	6,70	78	Karangduren	5,50
39	Afur deres	4,15	79	Ngrancah	11,00
40	Merbung	15,25	80	Gempol	3,50

Sumber: DPUPR Kabupaten Klaten, 2025

Selain memanfaatkan aliran sungai sebagai sumber air, wilayah Kabupaten Klaten juga memiliki sumber air berupa waduk, embung, mata air dan sumber lainnya. Waduk



yang ada di Kabupaten Klaten yaitu Waduk Rowo Jombor yang berada di Kecamatan Bayat dengan luas 189 ha. Waduk ini mempunyai kedalaman 4,5 m dan mampu menampung air 4.000.000 m³. Tujuan utama pembuatan Waduk Rowo Jombor adalah untuk menampung air dari sungai-sungai di sekitarnya untuk mengendalikan banjir, dan sebagai persediaan air irigasi untuk lahan pertanian di sekelilingnya pada musim kemarau. Namun kemudian juga dimanfaatkan untuk keperluan lain, seperti pariwisata dan perikanan. Untuk mata air yang ada di Kabupaten Klaten sebanyak 206 yang tersebar di 20 kecamatan, dimana 38 diantaranya berlokasi di Kecamatan Tulung. Dari 206 mata air tersebut 17 diantaranya dalam kondisi mati. Sumber air lainnya yaitu embung. Sampai dengan Tahun 2025 di Kabupaten Klaten sudah terbangun 17 embung.

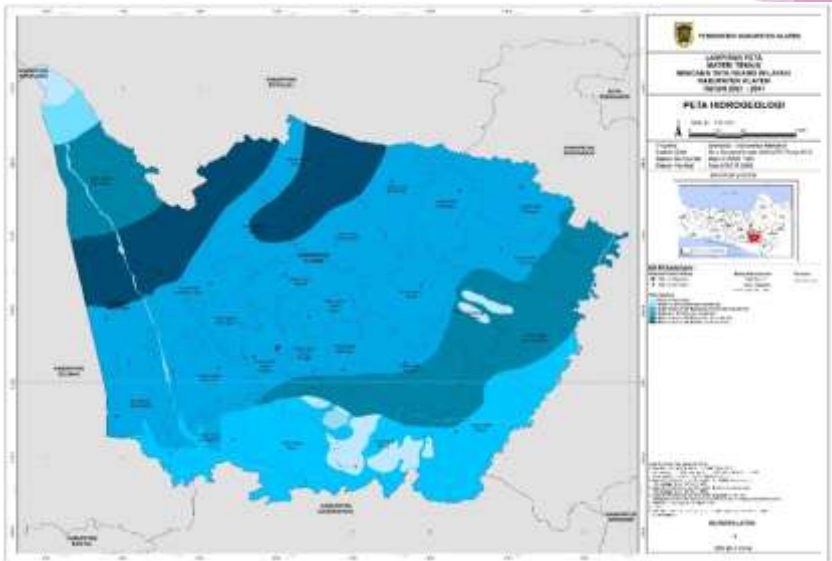
Tabel 2.3 Daftar Embung di Kabupaten Klaten

No	Nama	Lokasi	
		Desa	Kecamatan
1	Embung Tarubasan	Tarubasan	Karanganom
2	Embung Taskombang	Taskombang	Manisrenggo
3	Embung Pandes	Pandes	Wedi
4	Embung Krakitan I	Krakitan	Bayat
5	Embung Krakitan II	Krakitan	Bayat
6	Embung Kendalsari	Kendalsari	Kemalang
7	Embung Kluwih	Kecemen	Manisrenggo
8	Embung Panggang	Panggang	Kemalang
9	Embung Mranggen	Mranggen	Jatinom
10	Embung Madirdo	Tlogo	Prambanan
11	Embung Karangasem	Karangasem	Cawas
12	Embung Krikilan	Krikilan	Bayat
13	Embung Karangpake	Karangpake	Trucuk
14	Embung Tambong Wetan	Tambong wetan	Kalikotes
15	Embung Sidorejo	Sidorejo	Kemalang
16	Embung Tegalmulyo	Tegalmulyo	Kemalang
17	Embung Tijayan	Tijayan	Manisrenggo

Sumber: DPUPR Kabupaten Klaten, 2025

Hidrogeologi atau air tanah adalah semua air yang terdapat pada lapisan pengandung air (akuifer) di bawah permukaan tanah. Air tanah dapat diklasifikasikan atas air tanah dangkal dan air tanah dalam, yang masing-masing diupayakan diperoleh besaran potensinya. Hidrogeologi di wilayah Kabupaten Klaten dibedakan menjadi:

1. Akuifer produktif terdapat setempat;
2. Akuifer dengan produktivitas sedang dan penyebaran luas;
3. Akuifer dengan produktivitas sedang terdapat setempat;
4. Akuifer dengan produktivitas tinggi dan penyebaran luas;
5. Akuifer produktif dengan penyebaran luas; dan
6. Daerah air tanah langka.



Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041

Gambar 2.6 Peta Hidrogeologi Kabupaten Klaten

g. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Klaten menunjukkan menggambarkan pola pemanfaatan ruang yang mencerminkan dinamika pembangunan wilayah, aktivitas sosial ekonomi, serta kondisi lingkungan hidup daerah. Berdasarkan hasil inventarisasi dan klasifikasi tutupan lahan, wilayah Kabupaten Klaten terdiri atas 31 (tiga puluh satu) kelas tutupan lahan yang mencakup kawasan terbangun, kawasan pertanian, kawasan perairan, serta kawasan vegetasi alami dan buatan, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2.4 Penggunaan Lahan di Kabupaten Klaten Tahun 2025

No.	Pengunaan Lahan	Luas (ha)
1	Area Parkir	0,04
2	Bangunan Industri, perdagangan dan perkantoran	786,29
3	Bangunan non-permukiman lain	946,18
4	Bangunan permukiman desa	15.041,88
5	Bangunan permukiman kota	6.297,74
6	Embung	6,11
7	Hutan kota, jalur hijau dan taman kota	27,88
8	Hutan lahan tinggi primer kerapatan sedang	901,25
9	Hutan Lahan Tinggi Sekunder Kerapatan Sedang	55,56
10	Hutan Tanaman Industri	586,73
11	Jaringan jalan aspal/beton/tanah	3.201,85
12	Jaringan rel kereta	43,21
13	Kebun Campuran	20,19
14	Kolam Air Tawar Lain	189,25
15	Kolam Ikan Air Tawar	10,29
16	Ladang/tegalan hortikultura	7.424,26
17	Lahan Terbuka Lain	679,75
18	Lapangan diperkeras	208,55
19	Lapangan Olahraga	11,29
20	Penggalian pasir, tanah dan batu (sirtu)	275,45
21	Permukaan Diperkeras Lain	18,89
22	Saluran Air	215,75



No.	Penggunaan Lahan	Luas (ha)
23	Sawah	0,54
24	Sawah dengan padi terus menerus	32.170,10
25	Semak Belukar	1,28
26	Stadion dan sarana olah raga	7,31
27	Stasiun	6,92
28	Sungai	842,33
29	Tempat Penimbunan dan Pembuangan Sampah	0,08
30	Terminal bus	4,91
31	Waduk multiguna	170,24
Grand Total		70.152,12

Sumber: DPUPR Kabupaten Klaten, 2025

Penggunaan lahan di Kabupaten Klaten menunjukkan keragaman fungsi ruang yang mencerminkan karakter wilayah agraris dan kawasan terbangun. Berdasarkan klasifikasi penutup lahan, tutupan lahan Kabupaten Klaten masih didominasi oleh sawah, termasuk sawah dengan pola tanam padi terus-menerus, serta ladang/tegalan hortikultura dan kebun campuran, yang mencerminkan peran strategis Klaten sebagai salah satu lumbung pangan di Provinsi Jawa Tengah. Keberlanjutan tutupan lahan pertanian ini menjadi aspek penting dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi masyarakat perdesaan.

Kawasan terbangun meliputi bangunan industri, perdagangan dan perkantoran, permukiman desa, permukiman kota, bangunan non-permukiman lain serta prasarana transportasi yang berkembang seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Selain itu, terdapat kawasan hutan, semak belukar, lahan terbuka, serta perairan darat seperti waduk, embung, dan kolam yang berfungsi sebagai kawasan lindung, daerah resapan air, dan pendukung sistem hidrologi.

Secara keseluruhan, komposisi tutupan lahan Kabupaten Klaten mencerminkan keterpaduan antara fungsi lindung dan fungsi budidaya. Kondisi ini menjadi dasar penting dalam perumusan arah kebijakan penataan ruang, pengendalian pemanfaatan lahan, serta perencanaan pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Klaten agar pertumbuhan wilayah dapat berjalan seimbang, berdaya saing, dan berkelanjutan.

h. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah disusun dengan memperhatikan kesesuaian Dokumen RTRW Provinsi Jawa Tengah khususnya wilayah Subosukawanasraten dan mengacu pada Pasal 58 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2041, serta memperhatikan kondisi eksisting wilayah di Kabupaten Klaten. Pengembangan Potensi Wilayah diarahkan dengan memperhatikan pola ruang yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kawasan Lindung, terdiri atas:
- a. Badan air; dengan luas kurang lebih 455 (empat ratus lima puluh lima) hektar terdapat di:



- 1) Kecamatan Bayat
 - 2) Kecamatan Cawas;
 - 3) Kecamatan Gantiwarno;
 - 4) Kecamatan Jogonalan;
 - 5) Kecamatan Juwiring;
 - 6) Kecamatan Karangdowo;
 - 7) Kecamatan Kemalang;
 - 8) Kecamatan Manisrenggo;
 - 9) Kecamatan Prambanan;
 - 10) Kecamatan Trucuk;
 - 11) Kecamatan Wedi; dan
 - 12) Kecamatan Wonosari.
- b. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya; Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan lindung seluas 56 hektar di Kecamatan Bayat.
- c. Kawasan Konservasi; Kawasan Konservasi berupa Kawasan pelestarian alam, yaitu Taman Nasional Gunung Merapi seluas 901 hektar di Kecamatan Kemalang.
- d. Kawasan Lindung Geologi; Kawasan Lindung Geologi berupa cagar alam geologi, yaitu kawasan keunikan batuan dan fosil seluas 7 hektar di Kecamatan Bayat.
- e. Kawasan Cagar Budaya; Kawasan Cagar Budaya meliputi:
- 1) Candi Bubrah, Candi Lumbung, Candi Sewu, Candi Lor/Candirejo, Candi Asu/Gana, Candi Plaosan Lor, Candi Plaosan Kidul, dan Candi Sojiwan, dengan luas kurang lebih 72 (tujuh puluh dua) hektar di Kecamatan Prambanan;
 - 2) Kawasan Pandanaran dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektar di Kecamatan Bayat;
 - 3) Candi Karangnongko dan Candi Merak di Kecamatan Karangnongko; Kawasan Pesanggrahan Paku Buwono X di Kecamatan Kemalang; Makam Ki Ageng Gribig di Kecamatan Jatinom;
 - 4) Makam Ki Ageng Perwito di Kecamatan Wonosari;
 - 5) Makam Panembahan Romo di Kecamatan Klaten Selatan;
 - 6) Makam Kyai Melati di Kecamatan Klaten Tengah;
 - 7) Makam Ronggowarsito di Kecamatan Trucuk; dan
 - 8) Makam Syeh Domba di Kecamatan Bayat.
- 2. Kawasan Budidaya**, terdiri atas:
- a. Badan Jalan; Badan Jalan luas kurang lebih 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) hektar terdapat di:
- 1) Kecamatan Ceper;
 - 2) Kecamatan Delanggu;
 - 3) Kecamatan Jogonalan;



- 4) Kecamatan Karanganom;
 - 5) Kecamatan Karangnongko;
 - 6) Kecamatan Kebonarum;
 - 7) Kecamatan Klaten Utara;
 - 8) Kecamatan Manisrenggo;
 - 9) Kecamatan Ngawen;
 - 10) Kecamatan Polanharjo; dan
 - 11) Kecamatan Prambanan.
 - 12) Kawasan hutan produksi; Kawasan hutan produksi terdiri atas:
 - 13) Kawasan Hutan Produksi Terbatas; Kawasan Hutan Produksi Terbatas, seluas 199 hektar di Kecamatan Bayat.
 - 14) Kawasan Hutan Produksi Tetap, seluas 394 hektar di Kecamatan Bayat dan Kalikotes.
- b. Kawasan Perkebunan Rakyat; Kawasan Perkebunan Rakyat seluas 2.340 hektar di Kecamatan Bayat, Kecamatan Karangnongko dan Kecamatan Kemalang.
- c. Kawasan pertanian; Kawasan pertanian terdiri atas:
- 1) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas 32.000 hektar yang terdapat di seluruh kecamatan.
 - 2) Kawasan Peternakan seluas 251 hektar yang terdapat di:
 - a) Kecamatan
 - b) Bayat;
 - c) Kecamatan Gantiwarno;
 - d) Kecamatan Jatinom;
 - e) Kecamatan Karangnongko;
 - f) Kecamatan Kemalang;
 - g) Kecamatan Manisrenggo;
 - h) Kecamatan Ngawen;
 - i) Kecamatan Prambanan; dan
 - j) Kecamatan Tulung.
- d. Kawasan Perikanan berupa Kawasan Perikanan Budi Daya seluas 82 hektar yang terdapat di :
- a) Kecamatan Kalikotes;
 - b) Kecamatan Karanganom;
 - c) Kecamatan Karangnongko;
 - d) Kecamatan Kebonarum;
 - e) Kecamatan Ngawen;
 - f) Kecamatan Polanharjo;
 - g) Kecamatan Prambanan; dan
 - h) Kecamatan Tulung.



- e. Kawasan pertambangan dan energi berupa Kawasan pertambangan mineral, yaitu Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan seluas kurang lebih 65 hektar terdapat di Kecamatan Jatinom dan Kecamatan Tulung.
- f. Kawasan Peruntukan Industri seluas kurang lebih 1.690 hektar yang terdapat di:
 - a) Kecamatan Bayat;
 - b) Kecamatan Cawas;
 - c) Kecamatan Ceper;
 - d) Kecamatan Delanggu;
 - e) Kecamatan Gantiwarno;
 - f) Kecamatan Jatinom;
 - g) Kecamatan Jogonalan;
 - h) Kecamatan Juwiring;
 - i) Kecamatan Kalikotes;
 - j) Kecamatan Karanganom;
 - k) Kecamatan Karangdowo;
 - l) Kecamatan Kebonarum;
 - m) Kecamatan Klaten Selatan;
 - n) Kecamatan Klaten Tengah;
 - o) Kecamatan Klaten Utara;
 - p) Kecamatan Ngawen;
 - q) Kecamatan Pedan;
 - r) Kecamatan Polanharjo;
 - s) Kecamatan Prambanan;
 - t) Kecamatan Trucuk;
 - u) Kecamatan Tulung;
 - v) Kecamatan Wedi; dan
 - w) Kecamatan Wonosari
- g. Kawasan Pariwisata terdiri atas:
 - 1) Kawasan Pariwisata alam meliputi:
 - a) Bukit Sidoguro dengan luas kurang lebih 4 (empat) hektar di Kecamatan Bayat;
 - b) Obyek Mata Air Cokro (OMAC) dengan luas kurang lebih 2 (dua) hektar di Kecamatan Polanharjo dan 3 (tiga) hektar di Kecamatan Tulung;
 - c) Batu Batu Putih di Kecamatan Bayat;
 - d) Bukit Cinta di Kecamatan Bayat;
 - e) Bukit Patrum di Kecamatan Bayat;
 - f) Jombor Permai di Kecamatan Bayat;
 - g) Kawah Putih di Kecamatan Bayat;
 - h) Kawasan Lindung Geologi di Kecamatan Bayat;
 - i) Kebon Asri di Kecamatan Bayat;



- j) Pesona Puncak Arjuna di Kecamatan Bayat;
 - k) Watu Sepur di Kecamatan Bayat;
 - l) Pemandian Jolotundo di Kecamatan Karanganyar;
 - m) Umbul Brintik di Kecamatan Kebonarum;
 - n) Umbul Brondong di Kecamatan Kebonarum;
 - o) Umbul Pluneng Tirtomulyani di Kecamatan Kebonarum;
 - p) Umbul Pluneng Tirtomulyono di Kecamatan Kebonarum;
 - q) Deles Indah di Kecamatan Kemalang;
 - r) Girpasang di Kecamatan Kemalang;
 - s) Kalitalang di Kecamatan Kemalang;
 - t) Umbul Gedaren di Kecamatan Jatinom;
 - u) Umbul Susuhan di Kecamatan Ngawen;
 - v) Umbul Besuki di Kecamatan Polanharjo;
 - w) Umbul Kemanten di Kecamatan Polanharjo;
 - x) Umbul Ponggok di Kecamatan Polanharjo;
 - y) Umbul Sigedang–Kapilaler di Kecamatan Polanharjo;
 - z) Pusur Tubing di Kecamatan Polanharjo;
 - aa) Rivermoon Tubing di Kecamatan Polanharjo;
 - bb) Umbul Nilo di Kecamatan Tulung; dan
 - cc) Umbul Pelem di Kecamatan Tulung.
- 2) Kawasan Pariwisata buatan meliputi: Kawasan Pariwisata buatan meliputi:
- a) Museum Gula Jawa Tengah dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektar di Kecamatan Jogonalan;
 - b) Tirta Pelangi di Kecamatan Kalikotes;
 - c) Kolam Renang Tirta Indah di Kecamatan Klaten Selatan;
 - d) Kolam Renang Tirta Yudha Bakti di Kecamatan Klaten Selatan;
 - e) Kolam Renang Moon di Kecamatan Klaten Utara;
 - f) Prilon Park di Kecamatan Klaten Utara;
 - g) D'Wangen Ketjeh Resto di Kecamatan Polanharjo;
 - h) Kampung Dolanan Sidowayah di Kecamatan Polanharjo;
 - i) Kawasan Wisata Siblarak di Kecamatan Polanharjo;
 - j) Kolam Renang Tirta Kamandanu di Kecamatan Polanharjo;
 - k) Pemancingan Omah Iwak di Kecamatan Polanharjo;
 - l) Kolam Renang Pancingan 47 di Kecamatan Tulung;
 - m) Kolam Renang Lumintu 1001 di Kecamatan Polanharjo;
 - n) Kolam Renang Sumber Mina di Kecamatan Polanharjo;
 - o) Pemancingan Janti di Kecamatan Polanharjo;
 - p) Ponggok Ciblon di Kecamatan Polanharjo;
 - q) Kolam Renang Galuh Tirtonirmolo di Kecamatan Prambanan;
 - r) Kolam Renang Tirta Kencana Miri di Kecamatan Trucuk;



- s) Aqua Regia di Kecamatan Tulung;
 - t) Kolam Renang Bale Tirta di Kecamatan Tulung;
 - u) Kolam Renang Pancingan 100 di Kecamatan Tulung;
 - v) Pesona Alam Tirta di Kecamatan Tulung;
 - w) Pemandian Lumban Tirta di Kecamatan Tulung;
 - x) Semego di Kecamatan Tulung;
 - y) Umbul Asri di Kecamatan Tulung; dan
 - z) Pengembangan potensi wisata buatan lainnya di seluruh kecamatan.
- 3) Kawasan Pariwisata budaya meliputi; Kawasan Pariwisata buatan meliputi:
- a) Kampung Pecel Ngerangan di Kecamatan Bayat
 - b) Makam Sunan Pandanaran di Kecamatan Bayat;
 - c) Makam Ki Ageng Gribig di Kecamatan Jatinom;
 - d) Tradisi Yaqowiyu di Kecamatan Jatinom;
 - e) Tugu Waseso dan Menoro Baskoro di Kecamatan Karanganom;
 - f) Candi Merak di Kecamatan Karangnongko;
 - g) Candi Karangnongko di Kecamatan Karangnongko;
 - h) Candi Asu/Gana di Kecamatan Prambanan;
 - i) Candi Bubrah di Kecamatan Prambanan;
 - j) Candi Lor/Candirejo di Kecamatan Prambanan;
 - k) Candi Lumbung di Kecamatan Prambanan;
 - l) Candi Plaosan Kidul di Kecamatan Prambanan;
 - m) Candi Plaosan Lor di Kecamatan Prambanan;
 - n) Candi Sojiwan di Kecamatan Prambanan;
 - o) Makam Ronggo Warsito di Kecamatan Trucuk;
 - p) Makam Ki Ageng Perwito di Kecamatan Wonosari; dan
 - q) Keunikan lokal sebagai desa wisata meliputi:
 - 1. Desa Wisata Gununggajah di Kecamatan Bayat;
 - 2. Desa Wisata Jarum di Kecamatan Bayat;
 - 3. Desa Wisata Jotangan di Kecamatan Bayat;
 - 4. Desa Wisata Krakitan di Kecamatan Bayat;
 - 5. Desa Wisata Ngerangan di Kecamatan Bayat;
 - 6. Desa Wisata Paseban di Kecamatan Bayat;
 - 7. Desa Wisata Tlingsing di Kecamatan Cawas;
 - 8. Desa Wisata Pokak di Kecamatan Ceper;
 - 9. Desa Wisata Glagah di Kecamatan Jatinom;
 - 10. Desa Wisata Mranggen di Kecamatan Jatinom;
 - 11. Desa Wisata Plawikan di Kecamatan Jogonalan;
 - 12. Desa Wisata Tanjung di Kecamatan Juwiring;
 - 13. Desa Wisata Jimbung di Kecamatan Kalikotes;
 - 14. Desa Wisata Beku di Kecamatan Karanganom;



15. Desa Wisata Soropaten di Kecamatan Karanganom;
 16. Desa Wisata Karangnongko di Kecamatan Karangnongko;
 17. Desa Wisata Malangjiwan di Kecamatan Kebonarum;
 18. Desa Wisata Ngrundul di Kecamatan Kebonarum;
 19. Desa Wisata Pluneng di Kecamatan Kebonarum;
 20. Desa Wisata Balerante di Kecamatan Kemalang;
 21. Desa Wisata Panggang di Kecamatan Kemalang;
 22. Desa Wisata Sidorejo di Kecamatan Kemalang;
 23. Desa Wisata Tegalmulyo di Kecamatan Kemalang;
 24. Desa Wisata Tlogowatu di Kecamatan Kemalang;
 25. Desa Wisata Danguran di Kecamatan Klaten Selatan;
 26. Desa Wisata Nglinggi di Kecamatan Klaten Selatan;
 27. Desa Wisata Jomboran di Kecamatan Klaten Tengah;
 28. Desa Wisata Duwet di Kecamatan Ngawen;
 29. Desa Wisata Manjungan di Kecamatan Ngawen;
 30. Desa Wisata Nganjat di Kecamatan Polanharjo;
 31. Desa Wisata Ponggok di Kecamatan Polanharjo;
 32. Desa Wisata Sidowayah di Kecamatan Polanharjo;
 33. Desa Wisata Brajan di Kecamatan Prambanan;
 34. Desa Wisata Bugisan di Kecamatan Prambanan;
 35. Desa Wisata Kebondalem Kidul di Kecamatan Prambanan;
 36. Desa Wisata Melikan di Kecamatan Wedi;
 37. Desa Wisata Pasung di Kecamatan Wedi; dan
 38. Desa Wisata Sidowarno di Kecamatan Wonosari.
- 4) Kawasan Permukiman; Kawasan Permukiman terdiri atas:
- a) Kawasan Permukiman Perkotaan seluas 10.433 hektar yang terdapat di seluruh kecamatan;
 - b) Kawasan Permukiman Perdesaan seluas 20.783 hektar yang meliputi:
 1. Kecamatan Bayat;
 2. Kecamatan Cawas
 3. Kecamatan Ceper;
 4. Kecamatan Delanggu;
 5. Kecamatan Gantiwarno;
 6. Kecamatan Jatinom;
 7. Kecamatan Jogonalan;
 8. Kecamatan Juwiring;
 9. Kecamatan Kalikotes;
 10. Kecamatan Karanganom;
 11. Kecamatan Karangdowo;
 12. Kecamatan Karangnongko;



13. Kecamatan Kebonarum;
14. Kecamatan Kemalang;
15. Kecamatan Manisrenggo;
16. Kecamatan Ngawen;
17. Kecamatan Pedan;
18. Kecamatan Polanharjo;
19. Kecamatan Prambanan;
20. Kecamatan Trucuk;
21. Kecamatan Tulung;
22. Kecamatan Wedi; dan
23. Kecamatan Wonosari.

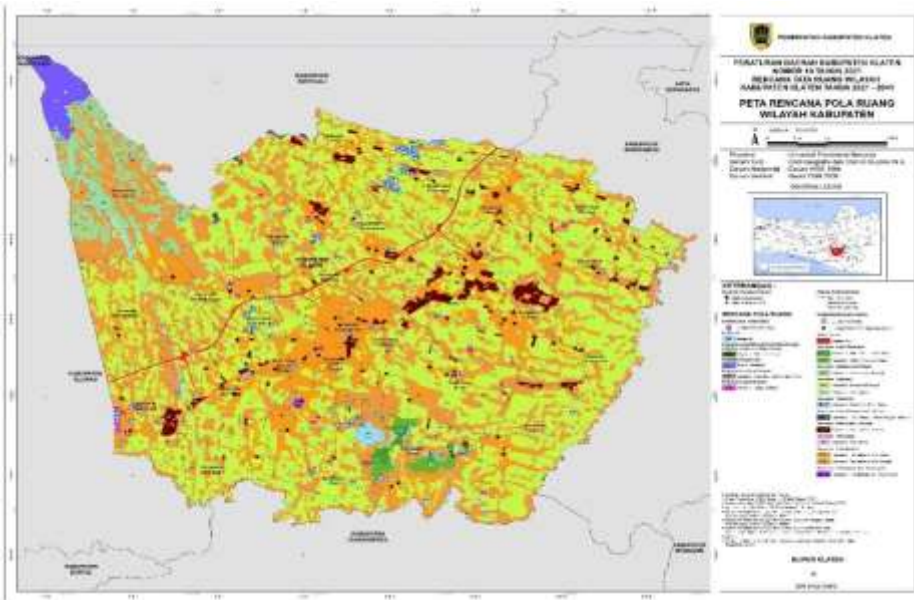
5) Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:

- a) Depo Pendidikan dan Latihan Tempur Rindan IV/ Diponegoro dengan luas kurang lebih 28 (dua puluh delapan) hektar terdapat di Kecamatan Klaten Selatan;
- b) Komando Distrik Militer Klaten terdapat di Kecamatan Klaten Tengah;
- c) Kepolisian Resor Klaten terdapat di Kecamatan Klaten Utara;
- d) Lapangan tembak terdapat di Kecamatan Trucuk;
- e) Komando Rayon Militer meliputi :
 1. Komando Rayon Militer 01/Kota di Kecamatan Klaten Tengah;
 2. Komando Rayon Militer 02/Jogonalan di Kecamatan Jogonalan;
 3. Komando Rayon Militer 03/Delanggu di Kecamatan Delanggu;
 4. Komando Rayon Militer 04/Pedan di Kecamatan Pedan;
 5. Komando Rayon Militer 05/Jatinom di Kecamatan Jatinom;
 6. Komando Rayon Militer 06/Kebonarum di Kecamatan Klaten Selatan;
 7. Komando Rayon Militer 07/Wedi di Kecamatan Wedi;
 8. Komando Rayon Militer 08/Ngawen di Kecamatan Ngawen;
 9. Komando Rayon Militer 09/ Prambanan di Kecamatan Prambanan;
 10. Komando Rayon Militer 10/Gantiwarno di Kecamatan Gantiwarno;
 11. Komando Rayon Militer 11/Karangnongko di Kecamatan Karangnongko;
 12. Komando Rayon Militer 12/Manisrenggo di Kecamatan Manisrenggo;
 13. Komando Rayon Militer 13/ Kemalang di Kecamatan Kemalang;
 14. Komando Rayon Militer 14/Karanganom di Kecamatan Karangnom;
 15. Komando Rayon Militer 15/ Polanharjo di Kecamatan Polanharjo;
 16. Komando Rayon Militer 16/ Tulung di Kecamatan Tulung;
 17. Komando Rayon Militer 17/Karangdowo di Kecamatan Karangdowo;
 18. Komando Rayon Militer 18/Bayat di Kecamatan Bayat;
 19. Komando Rayon Militer 19/Trucuk di Kecamatan Trucuk;
 20. Komando Rayon Militer 20/Cawas di Kecamatan Cawas;



- 21. Komando Rayon Militer 21/Juwiring di Kecamatan Juwiring;
 - 22. Komando Rayon Militer 22/Wonosari di Kecamatan Wonosari;
 - 23. Komando Rayon Militer 23/Ceper di Kecamatan Ceper; dan
 - 24. Komando Rayon Militer 24/Klaten Utara di Kecamatan Klaten Utara.
- f) Kepolisian sektor meliputi:
- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Kecamatan Bayat; | 14. Kecamatan Kemalang; |
| 2. Kecamatan Cawas; | 15. Kecamatan Klaten Tengah; |
| 3. Kecamatan Ceper; | 16. Kecamatan Klaten Utara; |
| 4. Kecamatan Delanggu; | 17. Kecamatan Manisrenggo; |
| 5. Kecamatan Gantiwarno; | 18. Kecamatan Ngawen; |
| 6. Kecamatan Jatinom; | 19. Kecamatan Pedan; |
| 7. Kecamatan Jogonalan; | 20. Kecamatan Polanharjo; |
| 8. Kecamatan Juwiring; | 21. Kecamatan Prambanan; |
| 9. Kecamatan Kalikotes; | 22. Kecamatan Trucuk; |
| 10. Kecamatan Karanganom; | 23. Kecamatan Tulung; |
| 11. Kecamatan Karangdowo; | 24. Kecamatan Wedi; dan |
| 12. Kecamatan Karangnongko; | 25. Kecamatan Wonosari. |
| 13. Kecamatan Kebonarum; | |

Peta Pola Ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya dapat dilihat pada Gambar berikut



Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041

Gambar 2.7 Peta Pola Ruang Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya Kabupaten Klaten

i. Demografi

1. Jumlah, Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk

Penduduk di Kabupaten Klaten Tahun 2025 semester II berjumlah 1.304.428 jiwa, dengan rincian penduduk laki laki 648.387 jiwa dan penduduk perempuan 656.041 jiwa. Sedangkan untuk persebaran penduduk di Kabupaten Klaten, penduduk terbanyak



di Kecamatan Trucuk 81.096 jiwa dan penduduk paling sedikit di Kecamatan Kebonarum 19.941 jiwa.

Kepadatan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk masing-masing wilayah. Dengan luas wilayah mencapai 701,52 km² dan jumlah penduduk mencapai 1.304.428 jiwa, Kabupaten Klaten memiliki kepadatan penduduk secara agregat sebesar 1.859 jiwa/km². Sebaran jumlah, pertumbuhan, dan kepadatan penduduk dirinci per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.5 Jumlah, Pertumbuhan & Kepadatan Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

No.	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)					Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)				Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk
		2021	2022	2023	2024	2025	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025		
1	2	3					4				5	6
1	Prambanan	51.499	52.068	52.712	53.155	53.389	1,1	1,24	0,84	0.22	26,09	2.046
2	Gantiwarno	38.620	38.875	39.091	39.194	39.102	0,66	0,56	0,26	-0.12	26,44	1.479
3	Wedi	52.068	52.355	52.716	52.878	52.673	0,55	0,69	0,31	-0.19	26,26	2.006
4	Bayat	63.541	64.083	64.374	64.539	64.705	0,85	0,45	0,26	0.13	42,1	1.537
5	Cawas	57.569	57.990	58.339	58.471	58.378	0,73	0,6	0,23	-0.08	35,94	1.624
6	Trucuk	79.064	79.933	80.568	80.923	81.096	1,1	0,79	0,44	0.11	34,69	2.338
7	Kebonarum	19.835	19.868	19.911	19.973	19.941	0,17	0,22	0,31	-0.08	10,42	1.914
8	Jogonalan	58.869	59.487	59.893	60.168	60.090	1,05	0,68	0,46	-0.06	27,59	2.178
9	Manisrenggo	43.018	43.566	43.910	44.249	44.511	1,27	0,79	0,77	0.3	30,6	1.455
10	Karangnongko	36.873	37.125	37.420	37.649	37.778	0,68	0,79	0,61	0.17	29,49	1.281
11	Ceper	65.048	65.369	65.918	66.205	66.256	0,49	0,84	0,44	0.04	25,77	2.571
12	Pedan	46.907	47.210	47.586	47.803	48.000	0,65	0,8	0,46	0.21	20	2.400
13	Karangdowo	43.486	43.639	43.873	43.950	43.806	0,35	0,54	0,18	-0.16	30,83	1.421
14	Juwiring	58.354	58.784	59.198	59.375	59.507	0,74	0,7	0,3	0.11	30,9	1.926
15	Wonosari	62.816	63.370	64.063	64.387	64.511	0,88	1,09	0,51	0.1	33,38	1.933
16	Delanggu	42.129	42.342	42.560	42.605	42.663	0,51	0,51	0,11	0.07	20,03	2.130
17	Polanharjo	41.009	41.194	41.371	41.435	41.391	0,45	0,43	0,15	-0.05	25,22	1.641
18	Karanganom	46.304	46.725	47.179	47.453	47.597	0,91	0,97	0,58	0.15	25,62	1.858
19	Tulung	53.834	54.430	54.856	55.157	55.376	1,11	0,78	0,55	0.2	34,44	1.608
20	Jatinom	60.296	60.752	61.526	62.064	62.258	0,76	1,27	0,87	0.16	37,11	1.678
21	Kemalang	39.479	39.907	40.372	40.656	40.889	1,08	1,17	0,7	0.29	60,19	679
22	Ngawen	45.853	46.144	46.325	46.330	46.325	0,63	0,39	0,01	-0.01	18,45	2.511



No.	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)					Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)				Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk
		2021	2022	2023	2024	2025	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025		
23	Kalikotes	37.069	37.307	37.609	37.807	37.786	0,64	0,81	0,53	-0.03	14,11	2.678
24	Klaten Utara	47.928	48.379	48.903	49.060	49.129	0,94	1,08	0,32	0.07	11,17	4.398
25	Klaten Tengah	41.146	41.238	41.557	41.763	41.701	0,22	0,77	0,5	-0.07	9,59	4.348
26	Klaten Selatan	43.921	44.571	44.862	45.399	45.570	1,48	0,65	1,2	0.19	15,09	3.020
Jumlah		1.276.535	1.286.711	1.296.692	1.302.648	1.304.428	0,80	0,78	0,46	0,07	701,52	1.859

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Klaten, Data DKB Semester II Tahun 2025



Berdasarkan tabel tersebut, kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Klaten Utara sebesar 4.398 jiwa/km² yang dapat diartikan bahwa 1 km² terdapat 4.398 jiwa, sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Kemalang sebesar 679 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk tahun 2024-2025 adalah 0,07%. Angka tersebut menurun dibandingkan dengan laju pertumbuhan 2023-2024 yaitu sebesar 0,46%. Hal ini disebabkan dari tingkat fertilitas (angka kelahiran) yang mengalami penurunan atau tingkat mortalitas (angka kematian) yang meningkat, juga disebabkan adanya faktor meningkatnya emigrasi penduduk (keluarnya penduduk dari wilayah tersebut ke wilayah lain). Sebanyak 10 (sepuluh) kecamatan tercatat mengalami penurunan penduduk dari tahun 2024-2025 serta beberapa kecamatan lain yang memiliki angka laju pertumbuhan penduduk yang rendah. Secara umum jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2024 yaitu 1.304.428 jiwa atau meningkat sebanyak 1.780 jiwa.

2. Penduduk Menurut Struktur Umur

Berdasarkan kelompok usia penduduk di Kabupaten Klaten tahun 2025, penduduk usia produktif (15 – 59 tahun) masih mendominasi jumlah penduduk secara keseluruhan sebesar 824.263 jiwa. Kelompok usia yang paling tinggi jumlah penduduknya ada pada rentang usia 15 – 19 tahun sebesar 100.821 jiwa. Kelompok usia dengan jumlah penduduk paling kecil ada pada rentang usia 70 – 75 tahun sejumlah 46.149 jiwa. Secara keseluruhan untuk jumlah penduduk Kabupaten Klaten adalah 1.304.428 jiwa dengan 63,19% (824.263 jiwa) merupakan penduduk usia produktif dan sejumlah 36,81% (480.165 jiwa) merupakan penduduk usia nonproduktif (usia di bawah 15 tahun dan di atas 59 tahun). Rincian jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Kelompok Umur Tahun 2025

No	Usia (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1	0 - 4	68.929
2	5 - 9	90.204
3	10 - 14	96.402
4	15 - 19	100.821
5	20 - 24	94.037
6	25 - 29	91.387
7	30 - 34	88.258
8	35 - 39	84.878
9	40 - 44	99.184
10	45 - 49	94.740
11	50 - 54	87.515
12	55 - 59	83.443
13	60 - 64	72.802
14	65 - 69	58.807



No	Usia (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
15	70 - 74	39.215
16	≥ 75	53.806
Jumlah		1.304.428

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, Data DKB Semester II Tahun 2025

3. Piramida Penduduk

Piramida penduduk adalah komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin. Berdasarkan pembagian jenis kelamin dan rentang usia pada tabel di bawah, piramida penduduk Kabupaten Klaten membentuk piramida stasioner/granat. Bentuk piramida yang cenderung mengerucut di bagian bawah dan bagian atas dapat diartikan jumlah penduduk Kabupaten Klaten memperlihatkan keseimbangan antara jumlah kelahiran dan kematian penduduk. Piramida ini juga dapat mengindikasikan pertumbuhan penduduk yang relatif stabil serta jumlah penduduk usia produktif yang lebih dominan dibandingkan penduduk usia nonproduktif.

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025

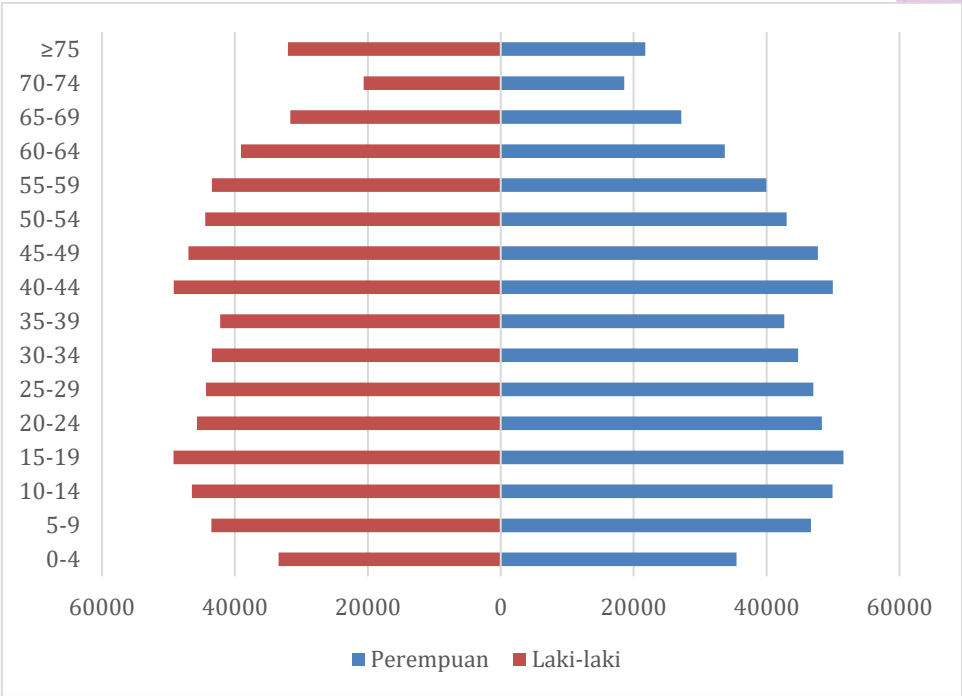
No	Usia (Tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)
1	0 - 4	35.495	33.434	68.929
2	5 - 9	46.670	43.534	90.204
3	10 - 14	49.914	46.488	96.402
4	15 - 19	51.579	49.242	100.821
5	20 - 24	48.322	45.715	94.037
6	25 - 29	47.034	44.353	91.387
7	30 - 34	44.773	43.485	88.258
8	35 - 39	42.665	42.213	84.878
9	40 - 44	49.984	49.200	99.184
10	45 - 49	47.727	47.013	94.740
11	50 - 54	43.046	44.469	87.515
12	55 - 59	39.967	43.476	83.443
13	60 - 64	33.706	39.096	72.802
14	65 - 69	27.155	31.652	58.807
15	70 - 74	18.581	20.634	39.215
16	≥ 75	21.769	32.037	53.806
Jumlah		648.387	656.041	1.304.428

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, Data DKB Semester II Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas maka dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk Kabupaten Klaten tahun 2025 yang cenderung membentuk piramida stasioner seperti pada gambar di bawah dapat mengindikasikan bahwa jumlah penduduk di setiap kelompok usia relative seimbang, mencerminkan angka kelahiran rendah dan angka kematian yang juga tidak terlalu tinggi. Hal ini dapat dikaitkan pada



laju pertumbuhan penduduk antara tahun 2024 dan 2025 yang mengindikasikan pertumbuhan penduduk yang cenderung melambat.



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, Data DKB Semester II Tahun 2025

Gambar 2.8 Piramida Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2025 Semester II

Bentuk piramida stationer seperti di atas menunjukkan populasi yang seimbang. Namun jika dikaitkan dengan aspek ekonomi dapat menjadi kekurangan karena pasokan tenaga kerja baru (dari kelompok usia produktif) cenderung tetap dan tidak meningkat secara signifikan. Pada tahun-tahun mendatang pertumbuhan penduduk yang tidak meningkat dan cenderung melambat maka bentuk piramida penduduk ke depan akan berubah menjadi piramida konstruktif mengindikasikan semakin banyak penduduk usia kelompok tua pada wilayah tersebut.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

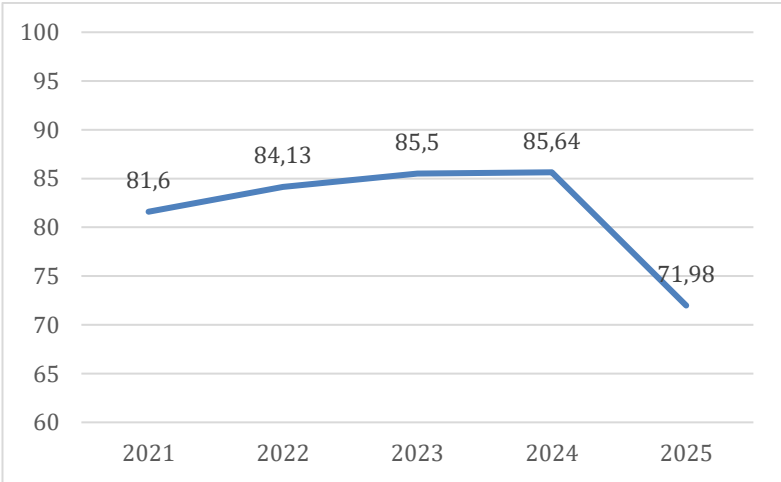
a. Ketahanan Pangan

Pangan menjadi isu strategis dalam pembangunan karena pemenuhannya merupakan hak setiap warga negara yang dijamin kuantitas dan kualitasnya. Dalam mendukung terpenuhinya ketahanan pangan maka disusun Indeks Ketahanan Pangan yang memiliki peran dalam mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi di wilayah. Indeks Ketahanan Pangan merupakan gabungan dari beberapa indikator yang digunakan untuk menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi serta memberikan gambaran peringkat pencapaian ketahanan pangan di wilayah.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan indeks komposit terdiri dari Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan, dan Indeks Pemanfaatan. IKP Kabupaten Klaten pada tahun 2024 yang dirilis oleh Badan Pangan Nasional menunjukkan angka 85,64.



IKP yang dihasilkan Kabupaten Klaten sejak tahun 2021 menunjukkan tren peningkatan dan tergolong kelompok Prioritas 6. Kelompok 6 ini menunjukkan Kabupaten Klaten termasuk dalam wilayah yang memiliki tingkat ketahanan paling baik karena merupakan kelompok paling tinggi dari 5 (lima) kelompok di bawahnya. Berikut grafik yang menunjukkan peningkatan IKP Kabupaten Klaten dari tahun ke tahun.



Sumber: DKPP Kabupaten Klaten, 2026

Gambar 2.9 Peningkatan IKP Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Berdasarkan capaian IKP di atas Kabupaten Klaten secara konsisten telah mengalami peningkatan dan termasuk kelompok wilayah yang masih sangat tahan dari kerawanan pangan. Badan Pangan Nasional pada tahun 2025 telah melakukan penyempurnaan metode perhitungan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) melalui pendekatan lebih komprehensif yang sebelumnya menggunakan 9 (sembilan) indikator menjadi 12 (dua belas) indikator pembentuk, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 223.1 Tahun 2025 tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Nasional Tahun 2025. Kedua belas indikator pembentuk IKP terbagi ke dalam 3 (tiga) aspek sebagai berikut:

1. Aspek Ketersediaan Pangan:
 - a. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, pisang)
 - b. Rasio ketersediaan energi per kapita per hari terhadap standar kebutuhan
 - c. Rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan
 - d. Rasio Cadangan Beras Pemerintah Daerah (SBPD) yang dimiliki terhadap CBPD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Aspek Keterjangkauan Pangan:
 - a. Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan
 - b. Koefisien variasi harga (beras medium, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng)
 - c. *Prevalence of Undernourishment (PoU)*.



3. Aspek Pemanfaatan Pangan:
- a. Rata-rata lama sekolah perempuan umur di atas 15 tahun
 - b. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih
 - c. Persentase keamanan pangan (segar dan siap saji) yang memenuhi standar terhadap total sampel
 - d. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi
 - e. Prevalensi balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting)

Mendasari hal tersebut Kabupaten Klaten melakukan penyesuaian capaian realisasi IKP tahun 2025 menjadi 71,98. Hasil penyesuaian capaian IKP antara metode lama dan baru tidak dapat diperbandingkan secara langsung namun dengan nilai tersebut tetap dapat diidentifikasi kerentanan terhadap terjadinya kerawanan pangan. Nilai IKP Kabupaten Klaten termasuk dalam kelompok prioritas 5 (rentang nilai 69,53 – 77,35) merupakan wilayah tahan terhadap terjadinya kerawanan pangan.

Tabel 2.8 Tabel Luas Tanam dan Produksi Padi Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Tahun	Luas Tanam (ha)	Luas Panen (ha)	Produksi (ton g kg)	Produktivitas (ku/ha)
2021	72.654	67.242	387.733	57,66
2022	70.801	64.968	367.724	56,61
2023	71.654	64.735	355.717	54,95
2024	70.082	54.219	304.871	56,23
2025	74.279	62.028	346.278	55,83

Sumber data: BPS Kabupaten Klaten, 2026

Kabupaten Klaten secara detail pada setiap aspek yang membentuk Indeks Ketahanan Pangan secara komposit adalah sebagai berikut: Indeks Ketersediaan 56,51; Indeks Keterjangkauan 79,68; dan Indeks Pemanfaatan 79,86. Indeks Ketersediaan Pangan di Kabupaten masih relatif rendah yang identik dengan rasio cadangan pangan yang juga masih relatif rendah. Salah satu upaya Kabupaten Klaten mendorong peningkatan ketersediaan cadangan pangan di setiap tahunnya adalah dengan melaksanakan program Luas Tambah Tanam (LTT) tanaman pangan padi. Diharapkan dengan adanya penambahan luas tanam padi akan meningkatkan juga luas panen dan berpengaruh ke produksi sehingga ketersediaan pangan di Kabupaten Klaten dapat terpenuhi.

Data menunjukkan luas tanam di Kabupaten Klaten yang cenderung fluktuatif namun di tahun 2025 terdapat peningkatan yang signifikan dari luas tanam hingga ke produksinya. Peningkatan ini tidak terlepas dari pencaanangan Program Strategis Nasional (ProSN) Ketahanan Pangan yang mendorong optimalisasi produksi melalui LTT padi sehingga terjadi peningkatan areal tanam dan berdampak positif terhadap kenaikan produksi. Hal tersebut menandakan bahwa perluasan tanam yang didukung oleh intervensi program pemerintah dapat menjadi strategi efektif dalam meningkatkan produksi padi. Selain itu juga ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan

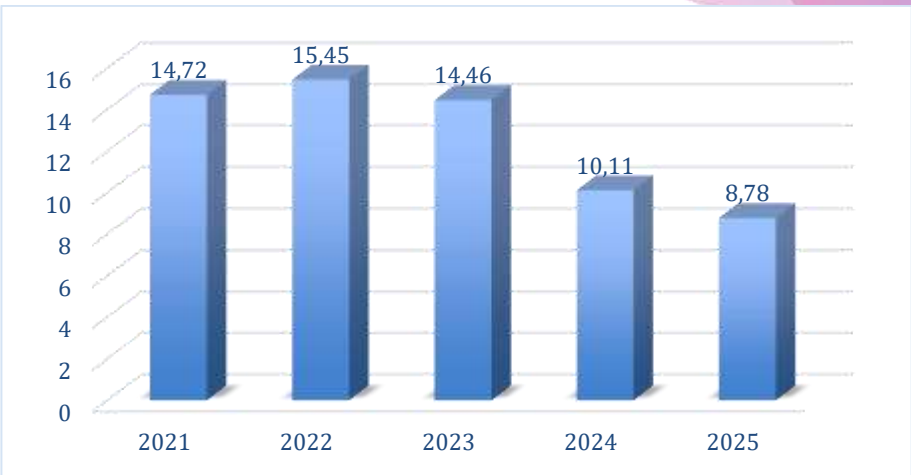


Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan sebagai penguatan jaringan irigasi pertanian yang menjadi salah satu faktor dalam peningkatan produksi mendukung ketahanan dan swasembada pangan. Selain, itu pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga secara rutin memberikan berupa bantuan pupuk, pompa air, sumur dalam ke kelompok-kelompok tani dengan harapan dapat meningkatkan intensitas tanam yang semula hanya 2 kali menjadi 3 kali dalam setahun sehingga ketersediaan pangan akan meningkat.

Perlu strategi untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan mengingat arah kebijakan pengembangan Kabupaten Klaten adalah untuk mendukung program unggulan di sektor pertanian. Sinergi lintas sektor dengan melibatkan pemerintah pusat dan provinsi serta kerja sama kemitraan dengan pemangku kepentingan lain seperti swasta/BUMN, organisasi kemasyarakatan dan pertanian, para petani dan pembudidaya pangan diperlukan untuk pembangunan sistem ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan.

Ketidakcukupan konsumsi pangan oleh FAO didefinisikan sebagai kondisi manusia dalam kesehariannya mengonsumsi pangan yang tidak menyediakan energi makanan yang dibutuhkan untuk menjadi sehat dan aktif. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU) merupakan perhitungan yang telah memperhatikan kebutuhan energi minimum individu berdasarkan usia, jenis kelamin, tinggi badan, dan aktivitas fisik yang dilakukan. PoU merupakan proporsi populasi penduduk yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan yang diukur dari asupan energi di bawah kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif terhadap populasi penduduk secara keseluruhan.

Kondisi ketidakcukupan pangan menjadi tantangan serius terutama pada kelompok rumah tangga berpendapatan rendah, masyarakat pedesaan serta wilayah dengan keterbatasan akses pangan. Ketidakcukupan konsumsi pangan tidak hanya disebabkan oleh rendahnya daya beli, tetapi juga oleh distribusi pangan yang tidak merata, fluktuasi harga bahan pangan serta rendahnya pengetahuan gizi masyarakat. Perlu upaya penurunan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dengan pendekatan terpadu melalui penguatan ketahanan pangan, peningkatan pendapatan masyarakat, stabilisasi harga pangan, serta edukasi gizi yang berkelanjutan agar masyarakat mampu mengakses dan mengonsumsi pangan yang cukup, beragam, dan bergizi seimbang.



Sumber: DKPP Kabupaten Klaten, 2026

Gambar 2.10 Prevalence of Undernourishment Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (POU) di Kabupaten Klaten mengalami penurunan pada tahun 2021-2024 yaitu sebesar 14,72% pada tahun 2021, menurun menjadi 10,11% pada tahun 2024, meskipun mengalami kenaikan pada tahun 2022 dikarenakan masih ada pengaruh pandemi dan terjadi kelangkaan serta peningkatan harga minyak goreng yang mengakibatkan adanya *shifting commodity* pada kelompok kesejahteraan menengah ke bawah. Tren penurunan POU menunjukkan adanya perbaikan dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat serta efektifitas upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan kualitas konsumsi pangan.

Ketersediaan cadangan pangan masyarakat di Kabupaten Klaten saat ini masih di bawah target minimum 50% yang ditetapkan Pemerintah Pusat, akibat keterbatasan anggaran daerah. Meski demikian, pemerintah daerah terus mengupayakan peningkatannya setiap tahun melalui stabilisasi harga, penguatan stok pangan, antisipasi krisis akibat perubahan iklim dan tekanan ekonomi global, serta perlindungan daya beli masyarakat.

Pedoman penghitungan gizi untuk menjadi standar dalam perencanaan dan evaluasi kecukuan gizi penduduk adalah menggunakan indikator Pola Pangan Harapan (PPH). PPH merupakan standar komposisi kelompok pangan yang ideal untuk memenuhi kebutuhan energi dan gizi, menjadi acuan untuk menilai kualitas konsumsi pangan penduduk di Indonesia, diukur dengan Skor PPH (maksimal 100), di mana semakin tinggi skornya, semakin beragam dan seimbang konsumsinya, dengan fokus pada 9 kelompok pangan seperti padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, sayur dan buah, serta gula, minyak, kacang-kacangan, biji berminyak, dan bumbu.

Pada tahun 2021 skor PPH Kabupaten Klaten sudah menunjukkan pola konsumsi pangan masyarakat sudah berada pada kategori baik dan mendekati skor ideal. Kondisi tersebut terus berlanjut di tahun 2022 yang mengalami peningkatan menjadi 91,5 yang mengindikasikan adanya perbaikan meskipun tidak signifikan. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan pencapaian menjadi 89,60 karena berkurangnya keberagaman konsumsi pangan dari kelompok bahan pangan hewani,



gula, sayur, dan buah serta kelompok pangan lainnya di masyarakat. Pada tahun 2024 skor mengalami kenaikan signifikan menjadi 92,77 karena didukung oleh intervensi program pangan seperti penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah, penyaluran pangan penanganan stunting, penanganan kerawanan pangan dan masifnya sosialisasi terkait konsumsi B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman) kepada masyarakat. Tren positif terus berlanjut pada tahun 2025 dengan pencapaian skor 96,23. Capaian ini menandakan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Klaten semakin beragam, seimbang, dan mendekati pola pangan ideal.

Peningkatan ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat, ketersediaan dan aksesibilitas pangan, pengetahuan gizi masyarakat yang dapat menentukan keragaman, keseimbangan, dan mutu konsumsi pangan rumah tangga menuju gizi seimbang.

Tabel 2.9 Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pangan Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	91,00	91,50	89,60	92,77	96,32
2	Ketersediaan pangan utama/beras	Ton	285.205,06	278.026,00	286.141,00	261.447,13	294.922,49
3	Ketersediaan energi per kapita	K.kal/ kapita/hari	2.663	3.454	2.862	1.890	3.414
4	Ketersediaan protein	Gram/ kapita/hari	72,64	94,03	79,41	85,80	92,51
5	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	8	9	10,25	13,56	17,05
6	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	83	84	81	95,09	93,5

Sumber: DKPP Kabupaten Klaten, 2026

Indikator lain yang berpengaruh terhadap pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) meliputi kecukupan gizi masyarakat dan kebutuhan kalori. Berdasarkan Permen Pertanian No. 65/2010, standar ketersediaan energi minimal adalah 90% dari 2.200 kkal/hari per orang. Kecukupan gizi mencakup kebutuhan energi dan protein harian sesuai usia, jenis kelamin dan aktivitas.

Ketersediaan energi dan protein per kapita di Kabupaten Klaten mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2021, angka ketersediaan tercatat sebesar 2.663 akibat dampak pandemi Covid-19. Tahun 2022 menunjukkan pemulihan dengan peningkatan signifikan hingga 3.454 kkal, tetapi kembali menurun di tahun 2023 menjadi 2.862 kkal karena penurunan konsumsi pada beberapa kelompok pangan seperti pangan hewani, gula, sayur dan buah. Penurunan semakin tajam pada tahun 2024 yakni menjadi 1.890 kkal, disebabkan oleh naiknya harga bahan pokok yang



menurunkan daya beli masyarakat serta alih fungsi lahan pertanian untuk proyek strategis nasional jalan tol Solo-Jogja.

Ketersediaan pangan merupakan salah satu pilar utama dalam ketahanan pangan. Tingkat ketersediaan yang stabil dan berkelanjutan mencerminkan kemampuan wilayah dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya sekaligus menopang pasokan pangan bagi wilayah selain Kabupaten Klaten yang diarahkan sebagai lumbung pangan padi Provinsi Jawa Tengah secara umum mengalami fluktuasi ketersediaan pangan utama selama tahun 2021-2025. Meskipun Kabupaten Klaten memiliki potensi bedar namun stabilitas produksi masih menjadi tantangan. Peran sebagai lumbung pangan menuntut tidak hanya tingginya produksi, tetapi juga konsistensi ketersediaan, penguatan cadangan pangan, dan sistem distribusi yang efisien.

Peningkatan ketersediaan pada tahun 2025 memperkuat peran strategis Kabupaten Klaten dalam menjaga ketahanan pangan. Namun, terjadinya penurunan pada tahun 2022 (278.026,00 ton) dan tahun 2024 (261.447,13 ton) menunjukkan pentingnya mitigasi risiko melalui pengelolaan irigasi yang berkelanjutan, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), serta diversifikasi sumber produksi dan cadangan pangan.

Sebagai wilayah yang diarahkan sebagai lumbung pangan padi provinsi, Kabupaten Klaten memiliki peran strategis dalam menjaga ketersediaan pangan utama yaitu beras. Tingginya ketersediaan padi mencerminkan kuatnya aspek ketersediaan dalam ketahanan pangan. Namun, capaian ketersediaan pangan utama tidak selalu beriringan dengan peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Perbedaan ini dikarenakan bahwa tingginya skor PPH menekankan pada keberagaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. Meskipun ketersediaan padi meningkat, apabila konsumsi masyarakat masih didominasi oleh beras dan belum diimbangi dengan konsumsi pangan sumber protein hewani, nabati, sayur, buah, serta pangan berlemak secara proporsional, maka skor PPH tidak menjadikan meningkat.

b. Akses Air Minum

Indikator Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan ini digunakan mengingat pentingnya akses air minum aman, terutama bagi masyarakat perkotaan. Untuk air siap minum perkotaan yang merupakan layanan PDAM sudah mencapai 100% karena seluruh air PDAM yang melayani rumah tangga perkotaan merupakan air siap minum. Namun demikian untuk capaian akses air minum layak di Kabupaten Klaten secara keseluruhan belum sepenuhnya terpenuhi karena masih ada kendala di beberapa wilayah.

Data tren capaian Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan, akses layanan air minum aman, serta cakupan pelayanan air minum melalui jaringan perpipaan di Kabupaten Klaten dapat terlihat di tabel diawah ini:



Tabel 2.10 Capaian Indikator Akses dan Pelayanan Air Minum Kabupaten Klaten Tahun 2021–2025

Indikator	Satuan	Capaian tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	9,86	10,76	11,10	11,06	16,77
Akses layanan air minum aman	%	32,67	32,53	33,13	35,58	32,55
Cakupan pelayanan air minum melalui jaringan perpipaan	%	32,67	32,53	33,13	35,58	32,55

Sumber: DPUPR Kabupaten Klaten, 2026

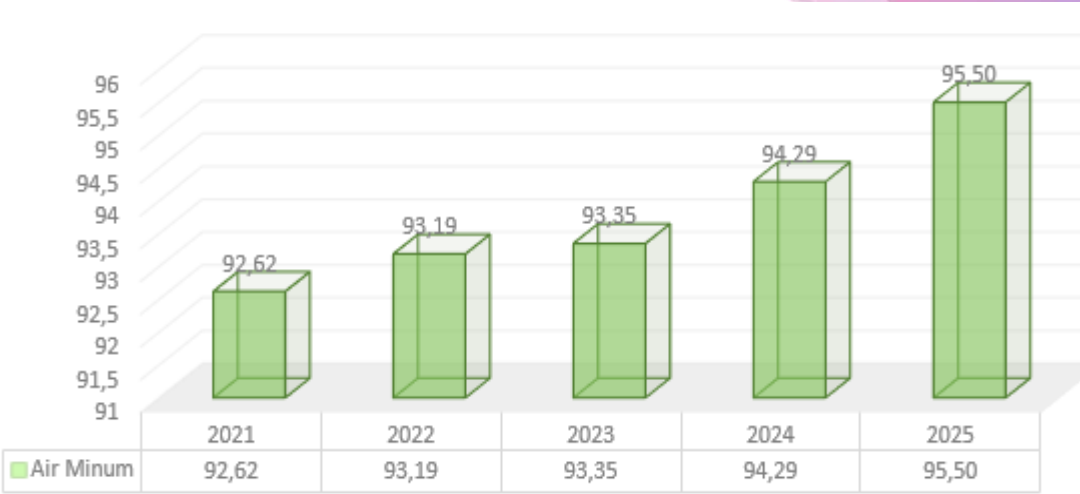
Data Capaian Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan diakomodir dari data PDAM Kabupaten Klaten adapun dari tren capaian yang ada untuk Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan, namun karena tahun 2024 mengalami penurunan debit sehingga di tahun 2024 turun menjadi 11,06 persen dan tahun 2025 mengalami kenaikan kembali mencapai 16,77 persen. Hal ini membuktikan bahwa capaian Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan menunjukkan hal positif.

Capaian cakupan pelayanan air minum melalui jaringan perpipaan di Kabupaten Klaten asumsinya di Kabupaten Klaten sama dengan akses layanan air minum aman, dilihat dari tren diatas dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 mengalami fluktuatif. Cakupan akses air minum layak (akses perpipaan dan bukan jaringan perpipaan) di Kabupaten Klaten selama kurun waktu lima tahun terakhir mulai tahun 2021 sampai dengan 2025 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Capaian tahun 2021 sebesar 92,62% meningkat menjadi 95,50% di tahun 2025 dengan perincian untuk wilayah perkotaan sebesar 95,73% dan wilayah perdesaan sebesar 96,36%. Selengkapnya cakupan akses air minum di Kabupaten Klaten tahun 2021-2025 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.11 Cakupan Pelayanan Air Minum di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Sektor	Skala	Capaian Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Air Minum	Kabupaten	1.181.835	1.190.459	1.205.331	1.225.924	1.245.052
	%	92,62	93,19	93,38	94,29	95,50
	Perkotaan	462.103	1.125.360	1.142.340	1.160.863	1.175.602
	%	93,66	93,50	93,91	94,77	95,73
	Perdesaan	720.819	62.754	63.356	65.061	72.892
	%	92,1	84,98	84,84	86,51	96,36

Sumber: DPUPR Kabupaten Klaten, 2026



Sumber: DPUPR Kabupaten Klaten, 2026

Gambar 2.11 Cakupan Pelayanan Air Minum di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Walaupun capaian akses air minum sudah cukup tinggi tetapi masih dijumpai kendala,yaitu sulitnya mencari sumber air di daerah lereng Merapi yang mencakup Desa Tlogowatu, Desa Tegalmulyo, Desa Sidorejo, Desa Tangkil, Desa Kendalsari dan Desa Talun yang terletak di Kecamatan Kemalang. Kemudian ada wilayah yang sumber airnya berasa asin berada di Kecamatan Cawas (Desa Bogor, Desa Pogung), Kecamatan Bayat (Desa Krikilan, Desa Ngerangan), Kecamatan Juwiring (Desa Gondangsari), Kecamatan Karangdowo (Desa Tumpukan, Desa Demangan, Desa Tambak, Desa Munggun) dan Kecamatan Pedan (Desa Kalangan, Desa Kaligawe).

Untuk mencapai target tersebut, berbagai upaya dilakukan melalui pengembangan layanan PDAM, optimalisasi dana desa, pemanfaatan CSR, DAK, hibah air minum, serta program berbasis masyarakat seperti Pamsimas, Sanitasi Desa, dan Kotaku. Kolaborasi sumber pendanaan terus diupayakan demi tercapainya target Pelayanan Air Minum di Kabupaten Klaten.

c. Sanitasi Aman

Perubahan paradigma indikator akses sanitasi dari semula “layak dan aman” menjadi “aman dan berkelanjutan” menandai penguatan pendekatan pembangunan sanitasi nasional yang lebih komprehensif dan berorientasi jangka panjang. Dalam **RPJPN 2025–2045**, sanitasi ditempatkan sebagai bagian integral dari agenda **Transformasi Pembangunan**, yang tidak hanya menekankan pada penyediaan sarana, tetapi juga pada keberfungsian sistem pengelolaan air limbah domestik secara menyeluruh.

Perubahan paradigma ini mendukung target SDGs untuk mencapai *safely managed sanitation*. Mengubah paradigma dalam perencanaan dan penganggaran, khususnya Program Sanitasi (pilar ke-4) sanitasi sehingga memperhatikan pemenuhan rantai layanan secara penuh. Adapun indikator keberlanjutan dalam target dan capaian akses sanitasi aman antara lain adalah: terdapat layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT),



SDM/operator pengelola yang bersertifikasi dan penerapan tarif yang memenuhi pemulihan biaya operasi pemeliharaan.

Cakupan pelayanan sanitasi layak Kabupaten Klaten pada tahun 2021 sudah mencapai 100%, dan ditargetkan untuk peningkatan dari akses layak menjadi akses aman air limbah domestik, yaitu fasilitas buang air besar (BAB) individual yang terkoneksi ke sistem terpusat (perpipaan) atau tangki septik yang disedot secara berkala dengan lumpur yang di olah pada Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018). Akses aman sanitasi tahun 2024 baru mencapai 1,64%, dan tahun 2025 meningkat menjadi 1,81% dan di tahun 2026 ditargetkan 1,94%. Rendahnya akses aman ini dikarenakan belum optimalnya pendataan terhadap masyarakat yang memanfaatkan layanan sedot tinja, terutama yang dilakukan oleh pihak swasta, terutama masyarakat yang berada di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, Boyolali dan Sleman (Yogyakarta). Selain itu juga masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan jasa sedot tinja. Sebenarnya sudah cukup banyak masyarakat yang sadar dan memanfaatkan jasa layanan lumpur tinja, tetapi belum ada data sedot tinja yang dilakukan oleh pihak swasta.

Selengkapnya cakupan pelayanan sanitasi di Kabupaten Klaten tahun 2021-2025 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.12 Cakupan Pelayanan Sanitasi di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Sektor	Skala	Capaian Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Sanitasi	Kabupaten	1.327.577	1.277.455	1.291.161	1.300.142	1.303.696
	%	100	100	100	100	100
	Perkotaan	493.395	1.203.610	1.216.481	1.224.933	1.228.049
	%	100	100	100	100	100
	Perdesaan	782.637	73.845	74.680	75.209	75.647
	%	100	100	100	100	100

Sumber: DPUPR Kabupaten Klaten, 2026



Sumber: DPUPR Kabupaten Klaten, 2026

Gambar 2.12 Akses Aman Sanitasi di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025



Upaya pemenuhan target terkait sanitasi dilakukan melalui optimalisasi alokasi dari berbagai sumber dana diantaranya dana desa, CSR, DAK, hibah maupun program berbasis masyarakat seperti Sanitasi Desa, dan program lainnya. Tahun 2025 Kabupaten Klaten juga mengusulkan untuk sumber dana yang berasal dari DAK Kegiatan Pembangunan/Optimalisasi IPLT untuk Peningkatan/Rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Jomboran Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten serta segera akan direalisasikan layanan lumpur tinja terjadwal.

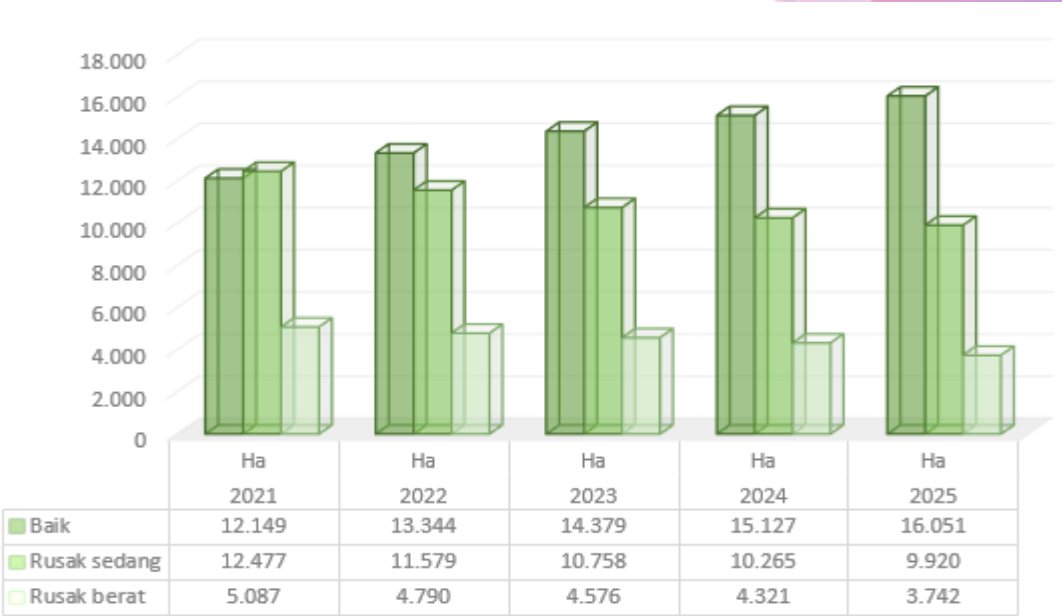
Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) Kewenangan Kabupaten/kota merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pengelolaan irigasi dimana salah satu komponennya adalah besarnya persentase DI (Daerah Irigasi) dalam kondisi baik atau biasa dikenal dengan IKSI (Indes Kinerja Sistem Irigasi).

Permen PUPR Nomor 14 tahun 2015 menerangkan luas area layanan irigasi di Kabupaten Klaten sebesar 29.713 ha yang tercakup dalam Daerah Irigasi (DI). Secara kewenangan, 2 D.I. menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yaitu D.I. Tuk Kuning (BBWS Serayu Opak) dengan luasan 115 Ha dan D.I. Colo (BBWS Bengawan Solo) dengan luasan 1.888 Ha sesuai dalam Lampiran 1 Permen PUPR Nomor 14 tahun 2015, 2. D.I menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu D.I. Jaban dengan luasan 1.191 ha dan D.I. Ploso Wareng dengan luasan 1.100 ha sesuai dengan Lampiran 2 Permen PUPR Nomor 14 tahun 2015 dan 478 D.I. yang menjadi kewenangan Kabupaten Klaten sesuai dengan Lampiran 3 Permen PUPR Nomor 14 tahun 2015. Dengan pembagian kewenangan itu, maka pengelolaan irigasi dilakukan dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Klaten maupun yang bersumber dari dana desa. Pengelolaan sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Kondisi DI Tahun 2021 - 2025 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.13 Kondisi Daerah Irigasi di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Kondisi DI	Capaian Tahun									
	2021*		2022		2023		2024		2025	
Baik	12.149	40.89	13.344	44,91	14.379	49,03	15.127	50,91	16.051	54,02
Rusak sedang	12.477	41.99	11.579	38,97	10.758	36,21	10.265	34,55	9.920	33,39
Rusak berat	5.087	17.12	4.790	16,12	4.576	15,4	4.321	14,54	3.742	12,59

Sumber: DPUPR Kabupaten Klaten, 2026



Sumber: DPUPR Kabupaten Klaten, 2026

Gambar 2.13 Kondisi Daerah Irigasi di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Berdasarkan Grafik diatas terlihat bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir (tahun 2021-2025), kondisi Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Klaten Kondisi Baik mengalami peningkatan, sampai dengan tahun 2025 mencapai 16.051 Ha atau 54,02% sedangkan yang Rusak Sedang dan Rusak Berat mengalami penurunan dari tahun ke tahunnya, artinya bahwa penanganan Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Klaten sudah cukup baik untuk penanganannya.

Pembangunan dan pemeliharaan prasarana sumber daya air selain digunakan untuk keperluan irigasi, juga diarahkan untuk penanganan banjir. Daerah rawan banjir di Kabupaten Klaten meliputi: Kecamatan Bayat, Cawas, Ceper, Gantiwarno, Juwiring, Karangdowo, Pedan, Prambanan, Trucuk, Wedi, dan Wonosari. Penanganan sumber daya air dilakukan dengan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, operasi irigasi, pengadaan sarana prasarana pengelolaan irigasi, pembangunan embung, pemeliharaan dan rehabilitasi embung, pemeliharaan dan penataan kawasan waduk, serta rehabilitasi kawasan sumber air. Selain itu juga dengan penguatan talud/ tebing sungai, sesuai dengan kewenangan.

d. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup yang lestari membutuhkan perencanaan strategis dan terukur untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pembangunan tetap menjaga keseimbangan antara aktivitas manusia dan lingkungan alam. Pengujian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi alat ukur yang dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yang disebut juga IKLH, merupakan gambaran awal yang dapat memberikan ringkasan tentang kondisi lingkungan pada suatu wilayah dalam periode tertentu. Nilai yang ditunjukkan semakin tinggi maka semakin baik kondisi lingkungannya. IKLH terdiri dari beberapa indikator pembetnuk



yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. Capaian IKLH Kabupaten Klaten dari tahun 2021-2025 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.14 Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Komposit IKLH	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Kualitas Air (IKA)	36,15	47,69	58,46	53,85	71,39
Indeks Kualitas Udara (IKU)	84,95	87,85	88,16	86,35	79,48
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	42,54	25,83	26,56	27,20	48,06
IKLH	55,90	59,17	63,50	61,09	69,56

Sumber: DLH Kabupaten Klaten, 2026

Berdasarkan tabel capaian di atas menunjukkan secara umum adanya peningkatan kualitas lingkungan dengan adanya dinamika yang fluktuatif pada beberapa indikator penyusunnya. Nilai IKLH mengalami peningkatan dari 55,90 pada tahun 2021 menjadi 63,50 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi 61,09, namun kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2025 menjadi 69,56.

Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan pengambilan sampel pada 13 titik yaitu di Sungai Soran (hulu dan hilir), Kroman (hulu dan hilir), Kacang Ijo (hulu dan hilir), Modin (hulu dan hilir), Merbung (hulu dan hilir), Pusur (hulu dan hilir), serta Rowo Jombor. Berdasarkan tabel di atas hasil pengukuran menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari 36,15 (2021) menjadi 58,46 (2023). Pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 53,85, namun pada tahun 2025 meningkat tajam menjadi 71,39. Peningkatan yang tajam ini menjadi salah satu kontributor utama dalam peningkatan nilai IKLH Kabupaten Klaten pada tahun 2025. Peningkatan nilai IKA mengindikasikan adanya peningkatan efektivitas pengendalian pencemaran air, perbaikan sistem pengelolaan limbah domestik dan industri, juga peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan limbah. Untuk menjaga kesuburan dan mengurangi pencemaran lingkungan ada peran di sektor pertanian terkait penggunaan pupuk organik yang terus digalakkan di Kabupaten Klaten. Hal ini berpengaruh secara tidak langsung sebagai faktor yang meningkatkan indeks kualitas air karena residu penggunaan pupuk yang larut ke sungai tidak lagi mengandung bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran.

Indeks Kualitas Udara (IKU) dilakukan pengambilan sampel pada 4 titik lokasi yaitu Masjid Agung Al-Aqsha; Koperasi Batur Jaya, Ceper; Perumda Gergunung; serta Pemda Klaten. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai IKU Kabupaten Klaten cenderung fluktuatif dan menurun di tahun 2025. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penambahan 1 parameter pengukuran yaitu Particulate Matter (PM_{2.5}). Sehingga nilai pada tahun-tahun sebelumnya belum mengakomodir dari parameter tersebut dan tidak dapat dibandingkan secara langsung hasil pengukurannya. Meskipun demikian nilai IKU Kabupaten Klaten masih berada di rentang kategori Baik. Beberapa langkah yang dapat



dilakukan untuk meningkatkan capaian IKU adalah dengan pengendalian yang terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan seperti peningkatan pengawasan dan pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor, mendorong percepatan.

Faktor lain yang dapat menunjang lingkungan hidup yang asri adalah terbebasnya suatu daerah dari permasalahan sampah. Persoalan sampah masih menjadi permasalahan besar di berbagai wilayah di Indonesia bahkan dunia karena bukan semata persoalan teknis. Pengelolaan sampah harus terhubung dari hulu hingga hilir dan sangat kompleks. Berbagai upaya pengelolaan sampah yang masih berjalan belum mampu menekan laju timbunan sampah yang terus meningkat. Data timbunan sampah dirinci per kecamatan dari tahun 2021-2025 di Kabupaten Klaten sebagai berikut:

Tabel 2.15 Timbunan Sampah di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

No.	Kecamatan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
		Jumlah penduduk (jiwa)	Jumlah sampah dihasilkan *	Jumlah penduduk (jiwa)	Jumlah sampah dihasilkan *	Jumlah penduduk (jiwa)	Jumlah sampah dihasilkan *	Jumlah penduduk (jiwa)	Jumlah sampah dihasilkan *	Jumlah penduduk (jiwa)	Jumlah sampah dihasilkan *
			(kg)		(kg)		(kg)		(kg)		(kg)
1	Bayat	63.486	19.046	63.486	31.743	63.486	31.933	66.447	33.423	64.601	32.494
2	Cawas	57.548	17.264	57.548	28.774	57.548	28.947	58.409	29.380	58.473	29.412
3	Ceper	43.516	13.055	43.516	21.758	43.516	21.889	66.069	33.233	66.258	33.328
4	Delanggu	46.270	13.881	46.270	23.135	46.270	23.274	42.628	21.442	42.631	21.443
5	Gantiwarno	38.642	11.593	38.642	19.321	38.642	19.437	39.151	19.693	39.164	19.699
6	Jatinom	45.856	13.757	45.856	22.928	45.856	23.066	61.744	31.057	62.138	31.255
7	Jogonalan	42.941	12.882	42.941	21.471	42.941	21.599	60.093	30.227	60.091	30.226
8	Juwiring	42.124	12.637	42.124	21.062	42.124	21.188	59.374	29.865	59.514	29.936
9	Kalikotes	19.922	5.977	19.922	9.961	19.922	10.021	37.680	18.953	37.749	18.988
10	Karanganom	60.232	18.070	60.232	30.116	60.232	30.297	47.391	23.838	47.625	23.955
11	Karangdowo	62.757	18.827	62.757	31.379	62.757	31.567	43.923	22.093	43.910	22.087
12	Karangnongko	65.094	19.528	65.094	32.547	65.094	32.742	37.477	18.851	37.696	18.961
13	Kebonarum	58.918	17.675	58.918	29.459	58.918	29.636	19.955	10.037	19.953	10.036
14	Kemalang	37.108	11.132	37.108	18.554	37.108	18.665	40.487	20.365	40.766	20.505
15	Klaten Selatan	47.945	14.384	47.945	23.973	47.945	24.116	45.287	22.779	45.551	22.912
16	Klaten Tengah	41.206	12.362	41.206	20.603	41.206	20.727	41.671	20.961	41.815	21.033
17	Klaten Utara	43.927	13.178	43.927	21.964	43.927	22.095	48.972	24.633	49.077	24.686
18	Manisrenggo	36.760	11.028	36.760	18.380	36.760	18.490	44.040	22.152	44.359	22.313
19	Ngawen	46.907	14.072	46.907	23.454	46.907	23.594	46.401	23.340	46.316	23.297
20	Pedan	58.274	17.482	58.274	29.137	58.274	29.312	47.761	24.024	47.888	24.088
21	Polanharjo	53.696	16.109	53.696	26.848	53.696	27.009	41.433	20.841	41.397	20.823
22	Prambanan	51.363	15.409	51.363	25.682	51.363	25.836	52.911	26.614	53.249	26.784
23	Trucuk	79.039	23.712	79.039	39.520	79.039	39.757	80.709	40.597	80.961	40.723
24	Tulung	39.447	11.834	39.447	19.724	39.447	19.842	55.043	27.687	55.299	27.815
25	Wedi	52.039	15.612	52.039	26.020	52.039	26.176	52.814	26.565	52.788	26.552
26	Wonosari	41.013	12.304	41.013	20.507	41.013	20.630	64.272	32.329	64.427	32.407
JUMLAH		1.276.030	382.809	1.276.030	638.015	1.276.030	641.843	1.302.142	654.977	1.303.696	655.759

Sumber: DLH Kabupaten Klaten, 2026

Berdasarkan tabel timbunan sampah Kabupaten Klaten Tahun 2021–2025, terlihat bahwa Kecamatan Trucuk secara konsisten menjadi penyumbang timbunan sampah terbesar setiap tahunnya. Pada tahun 2021, timbunan sampah Trucuk mencapai



23.712 kg dan meningkat signifikan pada tahun 2022 menjadi 39.520 kg serta 39.757 kg pada 2023. Tren kenaikan ini berlanjut pada 2024 sebesar 40.597 kg dan kembali meningkat pada 2025 menjadi 40.723 kg. Besarnya kontribusi Trucuk sejalan dengan jumlah penduduk yang juga paling tinggi dibandingkan kecamatan lain, sehingga berimplikasi langsung terhadap volume sampah yang dihasilkan. Perhitungan timbunan sampah ini didasari dari indeks sampah per orang yaitu sebesar 0,5 kg/orang/hari sehingga dalam sehari Kabupaten Klaten dapat menghasilkan ± 650.000 kg dalam sehari (dengan jumlah penduduk 1.304.408 jiwa).

Kecamatan Kalikotes tercatat sebagai kecamatan dengan timbunan sampah paling rendah pada periode 2021–2023, yakni sebesar 5.977 kg (2021), 9.961 kg (2022), dan 10.021 kg (2023). Namun, pada 2024 dan 2025 terjadi peningkatan signifikan menjadi 18.953 kg dan 18.988 kg, yang menunjukkan adanya perubahan cukup besar, baik dari sisi jumlah penduduk maupun pola konsumsi. Pada tahun 2024–2025, posisi timbunan sampah terendah beralih ke Kecamatan Kebonarum, dengan angka 10.037 kg pada 2024 dan relatif stagnan di 10.036 kg pada 2025, menjadikannya kontributor sampah terkecil pada dua tahun terakhir.

Total timbunan sampah Kabupaten Klaten menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2021 total timbunan sampah sebesar 382.809 kg, kemudian melonjak cukup tajam pada 2022 menjadi 638.015 kg dan kembali naik pada 2023 menjadi 641.843 kg. Peningkatan berlanjut pada 2024 sebesar 654.977 kg dan relatif stabil pada 2025 di angka 655.759 kg. Lonjakan signifikan antara 2021 dan 2022 mengindikasikan adanya perubahan metode perhitungan, peningkatan cakupan layanan, pertumbuhan penduduk, atau perubahan pola konsumsi masyarakat. Sementara itu, periode 2023–2025 menunjukkan tren kenaikan yang lebih landai, mengarah pada kondisi yang cenderung stabil namun secara tetap berangsur-angsur meningkat.

Peningkatan timbunan sampah yang terjadi dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa persoalan persampahan bukan lagi sekadar isu teknis pengangkutan, melainkan telah menjadi tantangan perilaku dan pola konsumsi masyarakat. Kondisi ini juga mengingat beban tempat pemrosesan akhir (TPA) yang semakin berkurang dari waktu ke waktu. TPA yang beroperasi di Kabupaten Klaten hanya satu dan berlokasi di TPA Troketon, Kecamatan Pedan.

Solusi yang dapat dilakukan adalah memperkuat gerakan pilah sampah dari sumbernya (rumah tangga). Kabupaten Klaten telah menetapkan regulasi untuk mendukung gerakan ini yang dituangkan dalam Surat Edaran Bupati Klaten Nomor B/600.1.17.3/1242/2025/25/M tentang Gerakan Pilah Sampah dari Rumah. Dalam regulasi tersebut masyarakat diwajibkan untuk memilah sampah dari rumah tangga menurut jenis dan kategorinya: sampah organik (yang bisa membusuk), anorganik (yang tidak/sulit membusuk), dan residu (yang sulit/tidak dapat diolah/diproses kembali). Ditegaskan juga bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten (dalam hal ini Dinas Lingkungan



Hidup) sudah tidak mengangkut sampah organik ke TPA. Pemilahan sederhana antara sampah organik, anorganik bernilai ekonomi, dan residu dapat secara signifikan mengurangi volume sampah yang harus diangkut ke TPA. Namun, keberhasilan gerakan ini sangat bergantung pada konsistensi sistem pengangkutan dan pengelolaan berikutnya. Masyarakat harus melihat bahwa sampah yang sudah dipilah benar-benar dikelola secara terpisah. Jika sistem hilir tidak mendukung, maka motivasi masyarakat untuk memilah akan menurun. Data penanganan sampah di Kabupaten Klaten selama lima tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.16 Penanganan Sampah di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Unit	Keterangan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Bank sampah	Jumlah Unit	45	62	62	60	93
	Kemampuan Pengolahan (ton/hari)	0,05	1,891	1,9	1,897	2,45
	Jumlah Sampah ditangani (ton/hari)	2,25	1,891	1,9	1,182	2,27
	Persentase Terhadap Total Timbunan Sampah	0,57%	0,00%	0,30%	0,18%	0,35%
Bank sampah induk	Kemampuan Pengelolaan (ton/hari)	0	0	0	0	2,5
	Persentase Terhadap Total Timbunan Sampah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,38%
Pengolahan sampah mandiri (Pengepul)	Jumlah Unit	0	0	0	0	31
	Kemampuan Pengolahan / Pengepul (ton/hari)	100	0	0	0,0169	135,030
	Persentase Terhadap Total Timbunan Sampah	0	0	0	0	20,59%
Pengolahan sampah mandiri (Pusat Olah Organik)	Jumlah Unit	0	0	0	0	68
	Kemampuan Pengelolaan / Pusat Olah Organik (ton/hari)	0	0	0	0	8,53
	Persentase Terhadap Total Timbunan Sampah	0%	0%	0%	0%	1,30%
Penanganan setempatTPS3R	Jumlah Unit	23	33	33	41	52
	Kemampuan Pengolahan Pengangkutan (ton/hari)	0,830	106,440	100,928	86,757	42,900
	Jumlah Sampah ditangani (ton)	19,09	100,3	98,07	84,03	31,00
	Persentase Terhadap Total Timbunan Sampah	6,26%	0,02%	15,37%	12,83%	4,79%
TPA Troketon	Jumlah Unit	1	1	1	1	1
	Kemampuan Pengolahan Pengangkutan (ton/hari)	95,02	100,4	119,57	125,3	168
	Jumlah Sampah ditangani (ton)	95,02	100,4	119,57	122,47	168
	Persentase Terhadap Total Timbunan Sampah	24,81	0%	19%	18,70%	26%
TOTAL SAMPAH TERTANGANI	Kemampuan Pengolahan Pengangkutan (ton/hari)	95,020	208,730	222,400	213,971	348,370
	Jumlah Sampah ditangani (ton)	95,900	202,590	219,540	207,677	201,690
	Persentase Terhadap Total Timbunan Sampah	50,94	0%	34%	31,71%	53,03%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, 2026

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa persentase sampah yang berhasil ditangani masih berfluktuasi dan belum sepenuhnya sebanding dengan peningkatan timbunan sampah. Meskipun pada tahun 2025 capaian penanganan meningkat hingga



sekitar 53,03%, pada tahun-tahun sebelumnya persentasenya sempat berada pada kisaran yang lebih rendah.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas pengolahan baik melalui TPA, TPS3R, bank sampah, maupun pengolahan mandiri, belum sepenuhnya mampu mengimbangi pertumbuhan volume sampah. Oleh karena itu, gerakan pilah sampah dari sumber menjadi solusi yang cukup strategis untuk mengurangi beban sistem penanganan. Jika pemilahan di rumah tangga berjalan efektif, maka sampah organik dapat diolah secara mandiri atau di pusat olah organik, sementara sampah anorganik dapat disalurkan ke bank sampah dan pengepul, sehingga volume residu yang masuk ke TPA berkurang. Dengan dukungan edukasi di sekolah dan penguatan kesadaran di tingkat rumah tangga, gerakan pilah sampah dapat meningkatkan efektivitas fasilitas yang sudah ada sekaligus mendorong kenaikan persentase sampah tertangani secara lebih stabil dan berkelanjutan.

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan lingkungan hidup karena limbah tersebut berpotensi menimbulkan pencemaran serta membahayakan kesehatan manusia apabila tidak ditangani sesuai ketentuan. Setiap pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib untuk melakukan pengelolaan melalui mekanisme yang memenuhi standar, baik secara mandiri maupun dikerjasamakan dengan pengelola pihak ketiga yang memiliki izin pengelolaan limbah B3. Data menunjukkan jumlah pelaku usaha yang melaporkan pengelolaan limbah B3 sebagai berikut:

Tabel 2.17 Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Klaten Tiap Semester

Keterangan	Tahun							
	2021	2022	2023		2024		2025	
			I	II	I	II	I	II
Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Klaten Tiap Semester	N/A	N/A	8	16	12	8	13	11

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, 2026

Tabel menunjukkan jumlah pelaku usaha di Kabupaten Klaten yang melaporkan pengelolaan limbah cenderung stagnan. Pelaku usaha yang melaporkan terdiri dari perusahaan industri dan rumah sakit (swasta dan pemerintah). Data yang ada belum dapat menggambarkan pengelolaan limbah B3 di daerah sehingga perlu evaluasi pengelolaan limbah B3 yang didukung pengembangan sistem pendataan yang lebih komprehensif. Sebagai dukungan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam pengelolaan limbah B3 pemerintah daerah secara rutin memberikan fasilitasi penyusunan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 sebagai salah satu persyaratan yang diintegrasikan dengan dokumen persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Upaya ini



dilakukan karena pengelolaan limbah berkontribusi terhadap kualitas air, udara, dan lahan yang berpengaruh pada kualitas lingkungan hidup.

Lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan tidak lepas dari penyediaan ruang terbuka hijau (RTH) yang memadai dan terpelihara. RTH mampu berfungsi sebagai penyerap karbon dioksida (CO₂), penghasil oksigen (O₂), pengendali suhu dalam lingkup mikro, resapan air, serta habitat bagi keanekaragaman hayati. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Klaten yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten mengalami perkembangan positif dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2025. Pada tahun 2021, jumlah unit RTH tercatat sebanyak 49 unit dengan total luasan 13,408 Ha. Memasuki tahun 2022, terjadi penambahan menjadi 51 unit dengan luasan 13,50 Ha dan jumlah tersebut konsisten dipertahankan hingga tahun 2025. Data tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.18 Tabel Luasan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Ruang Terbuka Hijau	2021	2022	2023	2024	2025
Luasan RTH (Ha)	13,408	13,50	13,50	13,50	13,50
Jumlah Unit RTH	49	51	51	51	51

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, 2026

Keberadaan RTH tidak hanya berfungsi untuk memperindah penataan wilayah namun juga memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas lingkungan hidup masyarakat. Semakin proporsional dan merata distribusi RTH maka besar kontribusinya dalam menekan pencemaran udara, mengurangi risiko banjir, juga sebagai ruang interaksi sosial masyarakat yang sehat dan diharapkan inklusif. RTH juga memberikan kontribusi langsung terhadap nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dalam penilaian IKLH. Dengan dipertahankannya 51 unit RTH secara konsisten sejak tahun 2022 hingga 2025, Kabupaten Klaten menunjukkan komitmen dalam menjaga tutupan lahan hijau sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

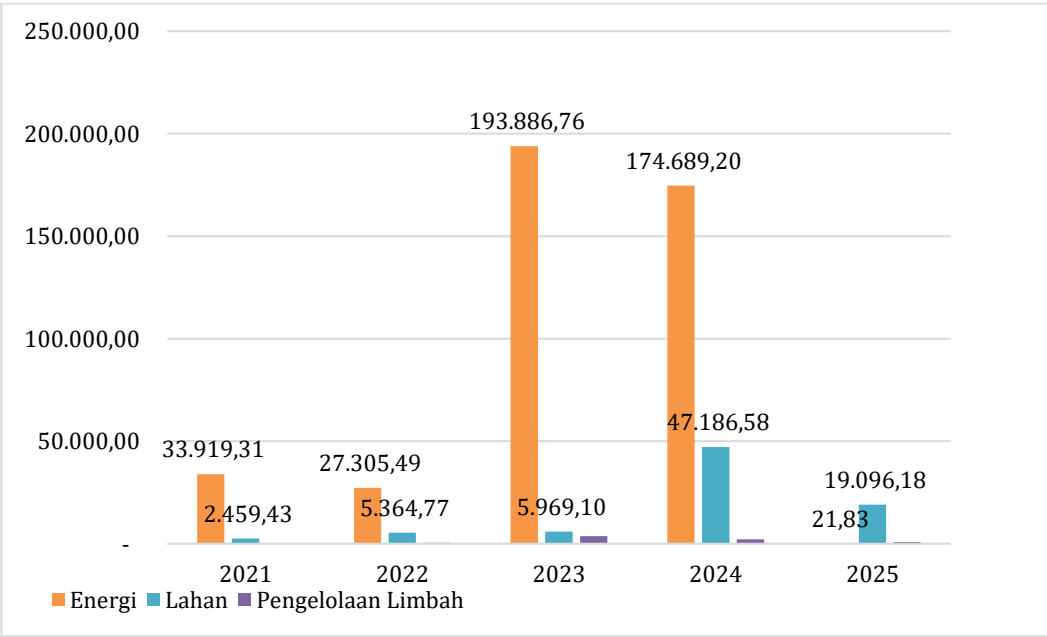
Amanat dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menegaskan bahwa proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit mencapai 30% dari luas wilayah, yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Dengan terpenuhinya ketentuan minimal tersebut, daerah memiliki fondasi ekologis yang kuat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, tangguh terhadap perubahan iklim, serta mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara jangka panjang. Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Klaten baru mampu memenuhi luas wilayah RTH publik sebesar ±0,019% yaitu 13,38 ha. Pemenuhan luasan RTH publik dapat dilakukan dengan mengidentifikasi aset daerah, sempadan sungai, dan lahan lainnya yang berpotensi ditetapkan sebagai RTH publik. Diperlukan juga pengendalian perizinan pembangunan yang lebih selektif serta optimalisasi kerja sama dengan pihak swasta melalui kewajiban penyediaan RTH privat dengan skema kemitraan publik-swasta.



e. Kontribusi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Perubahan iklim menjadi tantangan global yang ditandai dengan meningkatnya suhu rata-rata bumi, perubahan pola curah hujan, kekeringan yang berkepanjangan, bencana banjir yang lebih sering terjadi, tanah longsor, hingga fenomena badai dan gelombang panas yang semakin intens. Fenomena tersebut tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, infrastruktur, serta stabilitas sosial dan ekonomi. Salah satu penyebab utama perubahan iklim adalah peningkatan konsentrasi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer akibat aktivitas manusia, seperti penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan perubahan tata guna lahan. Upaya penurunan emisi GRK menjadi langkah penting untuk menekan laju pemanasan global dan meminimalkan risiko bencana di masa datang.

Dalam rangka mendukung pengendalian perubahan iklim global yang telah memicu berbagai bencana di berbagai belahan dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa bersama negara-negara anggotanya bersepakat untuk mencapai kondisi nol emisi bersih atau dikenal dengan istilah net zero emission. Sejalan dengan komitmen tersebut, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan target nasional net zero emission pada tahun 2060 yaitu menurunkan sekitar 29%. Untuk mendukung pencapaian target nasional tersebut, seluruh pemerintah daerah di Indonesia diwajibkan berperan aktif dalam upaya penurunan emisi GRK sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Sejalan dengan prinsip Ekonomi Hijau, penurunan emisi gas rumah kaca juga merupakan salah satu indikator yang mencerminkan upaya suatu daerah dalam mendukung pembangunan yang lebih efisien dalam penggunaan sumber daya sekaligus mengurangi dampak kerusakan lingkungan.



Sumber: Aksara Bappenas, 2026

Gambar 2.14 Perkembangan Data Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (tonCO₂eq) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025



Berdasarkan dokumen RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045, Kabupaten Klaten ditargetkan mampu berkontribusi terhadap penurunan emisi GRK sebesar 2.696.835,08 tonCO₂eq pada tahun 2030 dan 14.982.417,09 tonCO₂eq pada tahun 2045. Target yang ditentukan untuk tahun 2027 menurut RPJMD Kabupaten Klaten sebesar 1.569.338,99 tonCO₂eq. Sementara ini data realisasi kontribusi penurunan emisi pada tahun 2025 baru mencapai 526.385,20 tonCO₂eq yang telah dilaporkan pada aplikasi AKSARA (aplikasi untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan program yang berhubungan dengan penurunan emisi rumah kaca) dengan target 1.204.249,38 tonCO₂eq. Seperti ditunjukkan pada grafik di atas, pelaporan penurunan emisi didominasi oleh sektor energi pada periode tahun 2021-2024 dan akan terus berlangsung di tahun berikutnya. Sektor pengelolaan limbah dan persampahan perlu dorongan lebih dalam upaya pelaksanaan aksi penurunan emisi GRK serta dalam pelaporannya. Kondisi belum tercapainya sesuai target terutama disebabkan oleh keterbatasan dan belum lengkapnya data untuk periode pelaporan tahun 2010-2020 yang menjadi dasar perhitungan dan pelaporan emisi.

Untuk mempercepat pencapaian target tersebut diperlukan peran aktif seluruh perangkat daerah melalui pendekatan lintas sektor. Berdasarkan pelaporan dari sektor lahan di Kabupaten Klaten, beberapa aksi yang dilakukan untuk penurunan emisi antara lain: pengelolaan taman keanekaragaman hayati, penanaman bibit pohon, dan pengelolaan ruang terbuka hijau. Di sektor pertanian antara lain pengawasan penggunaan pupuk organik, penggunaan biogas untuk masyarakat, pengelolaan ternak rendah karbon. Pada sektor transportasi, aksi yang dilakukan melalui pengembangan transportasi umum yang efisien, manajemen lalu lintas (ATCS), pengujian kendaraan bermotor, dan pelaksanaan hari bebas kendaraan (*car free day*) yang dilaksanakan secara rutin.

Pada sektor persampahan, penguatan berupa pengurangan dan pemilahan sampah dari sumber, optimalisasi bank sampah, peningkatan daur ulang, serta pengelolaan TPA dengan sistem controlled landfill. Sementara itu, pada sektor industri, dilakukan dengan penerapan produksi bersih, efisiensi energi, serta pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Adapun pada sektor energi, langkah penurunan meliputi pembangunan PJU tenaga surya dan pembangunan energi terbarukan (*off grid*).

Pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) merupakan pilar utama dalam transformasi sistem energi yang berkelanjutan dan sejalan dengan komitmen nasional dalam mencapai target *Net Zero Emission* (NZE). Transisi dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang tidak dapat diperbarui, menekan emisi GRK, dan mewujudkan ketahanan energi. Energi terbarukan merupakan energi baru (energi baru terbarukan/EBT) jika dihasilkan oleh teknologi baru dan belum dikonsumsi oleh khalayak umum. Energi ini juga sering disebut sebagai energi alternatif dengan harapan kelak akan menggantikan energi konvensional yang selama ini dipakai.



Kebijakan pengelolaan energi diarahkan pada pemanfaatan sumber daya alam lokal untuk menciptakan akses energi yang bersih dan merata. Pengelolaan energi merupakan kewenangan pemerintah provinsi namun pemerintah kabupaten dapat mengambil pendekatan kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan. Hal ini diambil sebagai upaya mendukung pembangunan rendah karbon dan pencapaian target penurunan emisi GRK. Selain itu, pemerintah kabupaten juga dapat secara mandiri mengidentifikasi potensi-potensi sumber energi baru dan energi terbarukan di daerahnya. Beberapa potensi sumber daya energi terbarukan di Kabupaten Klaten dan pemanfaatannya baik di asset pemerintahan maupun swasta antara lain:

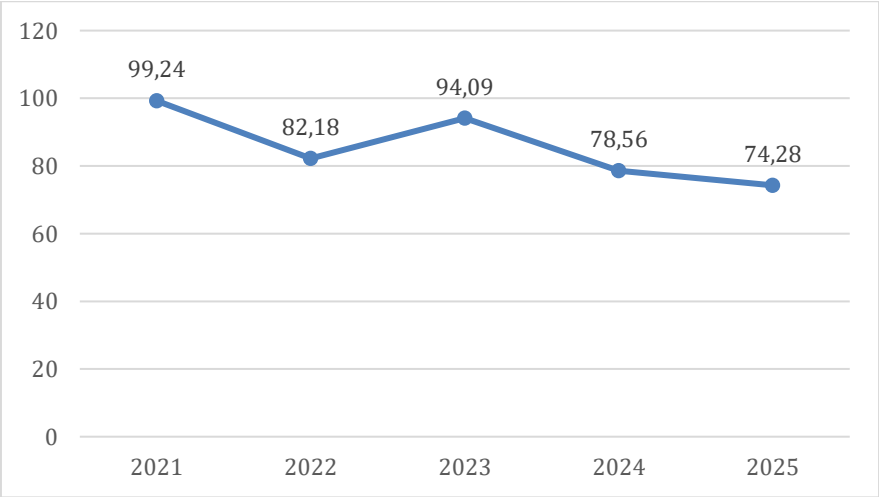
- a. Energi surya (solar): Pemanfaatan intensitas penyinaran matahari karena Indonesia berada di garis khatulistiwa yang membuatnya menerima paparan sinar matahari melimpah sepanjang tahun. Pemanfaatan energi surya dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang telah dilaksanakan antara lain:
 1. Pada gedung aset pemerintahan: Pasar Gedhe Klaten yang mendapatkan program rehabilitasi oleh DJCK Kementerian PUPR menjadi Bangunan Gedung Hijau
 2. Pada gedung sekolah swasta seperti: Pondok Pesantren Ibnu Abbas dan Pondok Pesantren Hidayah Klaten, merupakan hibah yang dilaksanakan oleh Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi sebagai bentuk pelaksanaan konservasi energi di wilayah provinsi.
 3. Beberapa perusahaan di Kabupaten Klaten juga telah menerapkan konservasi energi menggunakan PLTS atap di bangunannya seperti PT. TIV dan PT. Sarihusada Generasi Mahardhika.
- b. Energi mikrohidro: Kabupaten Klaten memiliki potensi umbul (mata air) yang melimpah dan debit air yang cukup untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Pemanfaatan energi hidro skala mikro ini telah diterapkan di Kawasan Obyek Mata Air Cokro, Daleman, Kecamatan Tulung menggunakan 2 (dua) unit generator induksi berkapasitas 40 KVa dan merupakan bantuan dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah tahun 2005.
- c. Bioenergi dan biomassa: Pemanfaatan limbah organik dari pertanian dan peternakan yang dikonversi menjadi biogas atau biomassa. Pemanfaatan energi dari biogas di Kabupaten Klaten dengan media digester biogas yang memproses fermentasi limbah organik menjadi gas metana yang dapat dimanfaatkan untuk memasak serta menjadi pupuk organik. Selama periode 2020-2024 Kabupaten Klaten menerima hibah dari Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi berupa digester biogas yang dimanfaatkan oleh kelompok tani di beberapa desa.



f. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan daerah karena mencerminkan tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap ancaman bencana alam maupun nonalam. Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Klaten pada periode 2021–2025 menunjukkan kondisi yang fluktuatif dengan kecenderungan membaik pada akhir periode. Pada tahun 2021, nilai IRB tercatat sebesar 99,24, yang mencerminkan tingkat risiko bencana yang masih relatif tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten masih menghadapi potensi ancaman bencana yang signifikan, baik bencana alam maupun non-alam, yang diperkuat oleh faktor kerentanan wilayah dan kapasitas penanggulangan bencana yang perlu terus ditingkatkan.

Pada tahun 2022, nilai IRB mengalami penurunan menjadi 82,18. Namun, pada tahun 2023 IRB kembali meningkat menjadi 94,09, yang mengindikasikan adanya peningkatan risiko bencana. Pada tahun 2024, nilai IRB menurun menjadi 78,56 dan kembali menurun di tahun 2025 yaitu di angka 74,28. Tahun 2025 menjadi tahun dengan nilai IRB terendah dalam empat tahun terakhir. Penurunan ini menunjukkan adanya perkembangan positif dalam upaya pengurangan dan pengelolaan risiko bencana di Kabupaten Klaten baik dari sisi pengurangan kerentanan maupun peningkatan kapasitas daerah dan masyarakat dalam mitigasi dan penanggulangan bencana meskipun tingkat risiko bencana Kabupaten Klaten masih berada pada kategori sedang s.d tinggi mengingat karakteristik geografis Klaten yang rawan gempa, erupsi, banjir, dan kekeringan.



Sumber: BPBD Kabupaten Klaten, 2026

Gambar 2.15 Indeks Resiko Bencana (IRB) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Untuk meminimalkan kejadian dan dampak bencana, Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan upaya mitigasi secara struktural dan non-struktural melalui pembangunan zona penghalang antara potensi bencana dan faktor risiko. Langkah-langkah yang telah dilakukan meliputi penyusunan kajian risiko bencana, pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, pengadaan peralatan siaga bencana, pembangunan taman kebencanaan, pelaksanaan gladi kesiapsiagaan,



pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), sekolah sungai, desa tangguh bencana, serta pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC) dan forum relawan di tingkat kecamatan. Kajian risiko bencana menjadi landasan untuk memilih strategi serta kebijakan penanggulangan bencana yang dinilai mampu mengurangi risiko bencana. Dari hasil kajian resiko bencana didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.19 Hasil Kajian Resiko Bencana Kabupaten Klaten

Kategori	Ttitk Wilayah Rawan
Tingkat ancaman tanah longsor (Kategori ancaman sedang)	Kecamatan Bayat (Desa. Paseban), Kecamatan Karangdowo (Desa. Demangan), Kecamatan Kemalang (Desa. Tegalmulyo dan Desa. Talun).
Tingkat ancaman banjir (Kategori ancaman tinggi)	Kecamatan Wonosari (Desa. Bendungan), Kecamatan Ngawen (Desa. Gatak), Kecamatan Jogonalan (Desa. Joton), Kecamatan Cawas (Desa. Pogung) dengan total sekitar 10 kecamatan dan 73 desa.
Tingkat ancaman gempa bumi (Kategori ancaman sedang)	hampir di semua wilayah rawan terutama di daerah prambanan dan cawas.
Tingkat ancaman letusan gunung api (Kategori ancaman tinggi)	hampir semua wilayah di Kecamatan Kemalang, Kecamatan Manisrenggo dan Kecamatan Karangnongko.
Tingkat Ancaman cuaca ekstrem/ puting beliung (Kategori ancaman tinggi)	Kecamatan Prambanan (Desa. Dukuh, Desa. Kabondalemlor), Kecamatan Kalikotes (Desa. Gatak, Desa. Gemblegan), Kecamatan Trucuk (Desa. Bero), Kecamatan Jogonalan (Desa. Joton, Desa. Gondangan, Desa. Nengahan, Desa. Somopuro, Desa. Gatak, Desa. Sumyang, Desa. Tangkisan pos, Desa. Titang), Kecamatan Cawas (Desa. Pakisan), Kecamatan Ngawen (Desa. Kwaren, Desa. Manjungan), Kecamatan Wedi (Desa. Birit, Desa. Sukorejo).

Sumber : BPBD Kabupaten Klaten, 2026

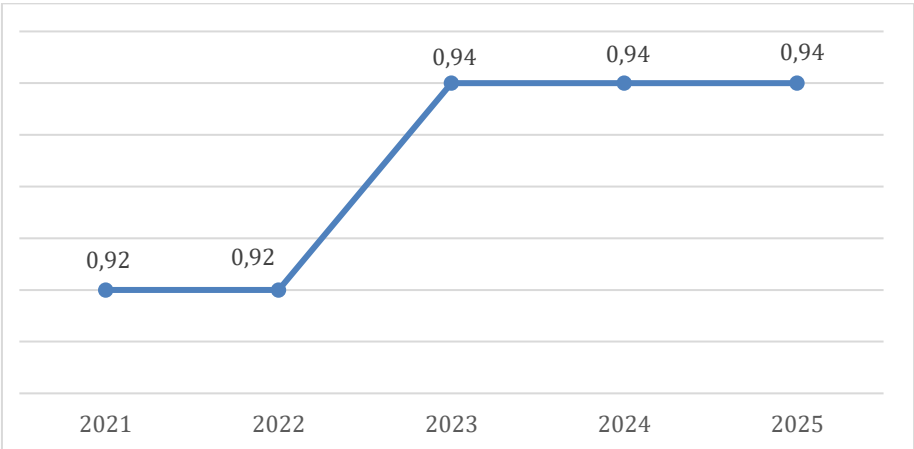
g. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) mencerminkan tingkat kemampuan daerah dalam merespon, mencegah dan mengurangi risiko bencana. Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada grafik berikut. Perkembangan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Klaten pada periode 2021–2024 menunjukkan tren yang stabil. Pada tahun 2021 dan 2022, nilai IKD berada pada angka 0,92, yang mengindikasikan kondisi ketahanan daerah sudah berada pada kategori baik, meskipun belum menunjukkan peningkatan signifikan dalam dua tahun tersebut. Kondisi ini mencerminkan adanya konsistensi dalam upaya menjaga ketahanan daerah.

Pada tahun 2023, IKD Kabupaten Klaten mengalami kenaikan menjadi 0,94, yang menandakan adanya perbaikan kinerja ketahanan daerah. Peningkatan ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari penguatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun tata kelola pemerintahan, serta meningkatnya kesiapsiagaan dan kemampuan adaptasi terhadap berbagai tantangan. Pada tahun 2024 sampai dengan 2025, nilai IKD tetap bertahan di angka 0,94. Nilai stagnan tiga tahun di angka 0,94 ini dikarenakan penilaian IKD sangat bergantung pada keabsahan administrasi dan bukti fisik (*evidence*) pemenuhan dokumen kebencanaan, regulasi kebencanaan serta penguatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor. Nilai



stagnan 0,94 harus dilihat sebagai prestasi positif mengingat Klaten secara geografis memiliki kerawanan terhadap bencana erupsi Gunung Merapi, gempa bumi, banjir, hingga angin kencang. Hal ini menunjukkan bahwa Klaten berhasil mempertahankan stabilitas manajemen bencana dan kapasitas daerahnya di tingkat superior (salah satu yang tertinggi di Jawa Tengah) secara konsisten dari tahun ke tahun meskipun jumlah kejadian bencana di lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Stabilitas ini mencerminkan keberlanjutan kebijakan dan program pembangunan daerah yang efektif dalam penanggulangan bencana. Secara lebih jelas nilai IKD Kabupaten Klaten tergambar pada grafik di bawah.



Sumber : BPBD Kabupaten Klaten, 2026

Gambar 2.16 Nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2021-2025

Kabupaten Klaten memiliki beragam potensi ancaman bencana, mulai dari hidrometeorologis (banjir, angin, longsor), geologis (erupsi merapi, gempa). Sepanjang tahun 2021 hingga 2025, jumlah kejadian bencana menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dengan total 632 kejadian tercatat pada tahun 2025. Peningkatan ini sebagian besar dipicu oleh faktor alam yang sifatnya tidak dapat diprediksi, sehingga diperlukan penguatan kapasitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi risiko bencana di masa mendatang. Informasi lebih lanjut mengenai jumlah dan jenis kejadian bencana di Kabupaten Klaten selama periode tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.20 Kejadian Bencana di Kabupaten Klaten 2021-2025

Jenis Bencana	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Banjir	6	42	26	15	52
Tanah longsor	12	46	35	8	6
Angin Kencang	73	121	96	297	435
Kekeringan	1	1	1	1	1
Letusan Gunung api	0	0	1	0	0
Kebakaran	8	5	317	226	138
Gempa Bumi	0	1	1	1	0
Jumlah	100	216	477	548	632

Sumber:BPBD Kabupaten Klaten, 2026 (Pusdalops, Data Laporan kejadian)



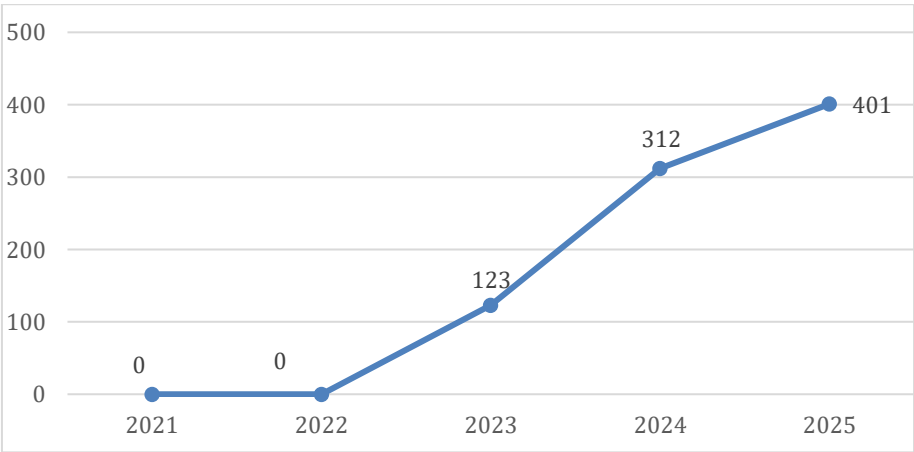
Kejadian bencana juga merugikan bagi pihak yang terdampak dan menjadi korban bencana. Kerugian yang paling dapat dirasakan adalah segi material. Berikut data nilai kerusakan yang diakibatkan oleh berbagai jenis bencana di Kabupaten Klaten dalam rupiah.

Tabel 2.21 Nilai Kerusakan Akibat Bencana di Kabupaten Klaten 2021-2025

Jenis Bencana	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Banjir	-	3.840.977.124	-	-	53.940.000
Tanah longsor	-	3.927.977.124	8.583.361.000	88.610.000	1.920.000
Angin Kencang	10.000.000	2.119.302.124	8.583.861.000	609.150.000	5.018.642.000
Kekeringan	-	-	-	-	-
Letusan Gunung api	-	-	-	-	-
Kebakaran	-	194.400.000	8.562.041.000	338.450.000	3.630.011.000
Gempa Bumi	-	-	75.000.000	20.000.000	-
Jumlah	10.000.000	10.082.656.372	25.804.263.000	1.056.210.000	8.704.513.000

Sumber: BPBD Kabupaten Klaten, 2026 (Pusdalops, Data Laporan kejadian)

Kabupaten Klaten terus melakukan upaya dalam meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi bencana. Hal ini salah satunya dilakukan dengan percepatan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana). Optimalisasi asistensi Pembentukan Destana telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten sehingga tidak hanya melalui intervensi APBD, APBD Provinsi dan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam hal ini adalah Universitas Gajah Mada Yogyakarta namun desa juga dapat melakukan penilaian dan pembentukan Destana secara mandiri dengan dipandu fasilitator dari BPBD Kabupaten Klaten. Sehingga ditahun 2025 sejumlah 391 desa dan 10 kelurahan di Kabupaten Klaten telah terbentuk Destana. Berikut perkembangan pembentukan Destana di Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2025.



Sumber : BPBD Kabupaten Klaten, 2026

Gambar 2.17 Perkembangan Jumlah Desa Tangguh Bencana (Destana) Kabupaten Klaten 2021-2025



2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

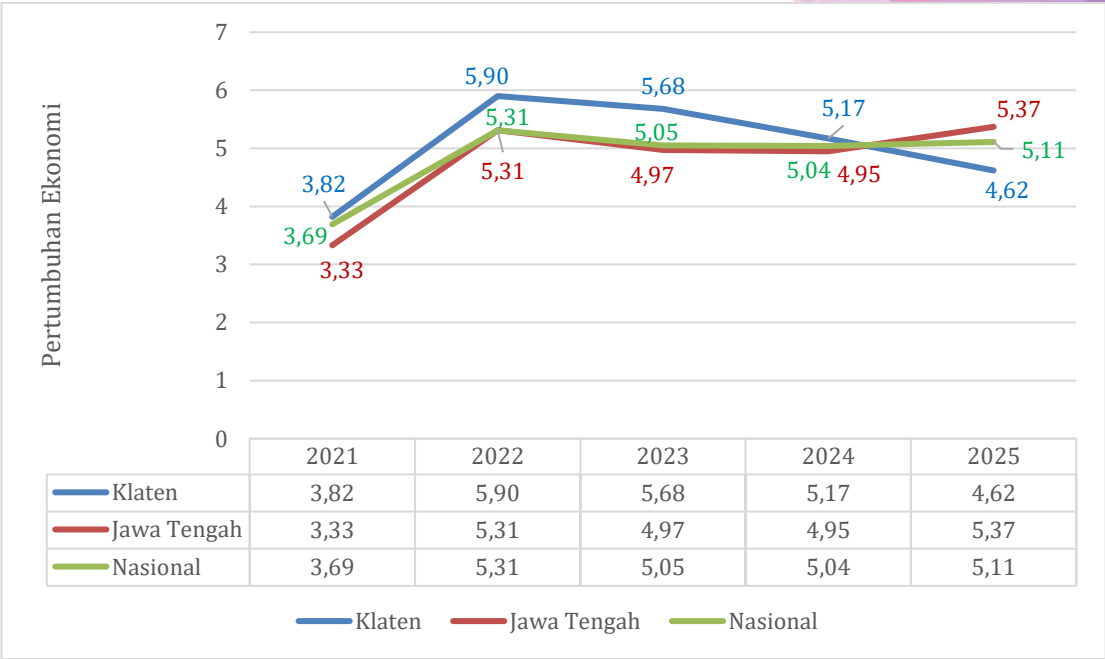
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi atau *economic growth*, merupakan proses kenaikan *output* per kapita yang dimiliki suatu daerah dalam jangka panjang atau perubahan tingkat kegiatan ekonomi suatu daerah yang terjalin dalam periode tertentu atau akumulasi dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi juga di definisikan sebagai suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten pada periode 2021–2025 menunjukkan tren penguatan, meskipun nilai pertumbuhan ekonomi mengalami perkembangan yang fluktuasi. Pada tahun 2023 semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan ekonomi positif. Pertumbuhan tertinggi adalah lapangan usaha Konstruksi karena adanya pembangunan jalan tol Solo - Jogja yang melewati wilayah Kabupaten Klaten dan pembangunan Pasar Gedhe Klaten.

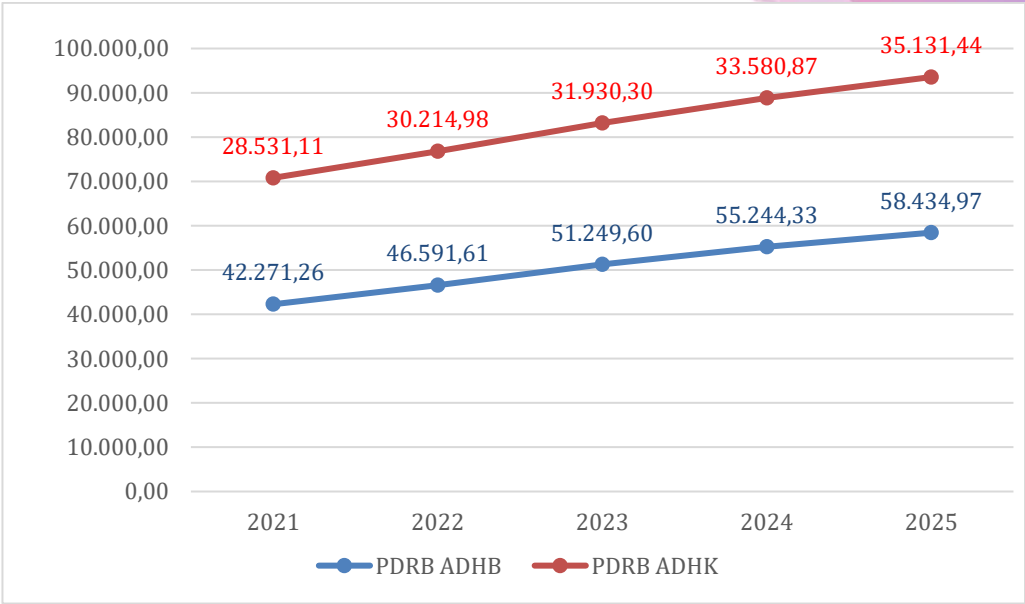
Pada tahun 2024 dan 2025, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten mengalami perlambatan jika dibanding tahun 2023 dimana tahun 2024 sebesar 5,17% dan tahun 2025 sebesar 4,62 persen. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 salah satunya disumbang pada lapangan usaha Konstruksi yaitu yang mengalami perlambatan sebesar -11,56 persen. Hal ini dipengaruhi oleh kegiatan pembangunan jalan tol Jogja-Solo yang melewati Kabupaten Klaten sudah berakhir sejak triwulan 2 tahun 2025. Sedangkan kontribusi terbesar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten pada tahun 2025 disumbang dari lapangan usaha Penyediaan Makan Minum yaitu sebesar 11,40 persen. Hal ini dikarenakan adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan mulai tahun 2025 sangat mempengaruhi meningkatnya lapangan usaha Penyediaan makan minum,. Struktur ekonomi pada tahun 2025 didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha yaitu Industri Pengolahan sebesar 38,71 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 14,58% dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 9,61 persen.



Sumber : BPS Kabupaten Klaten dan Jawa Tengah, 2026

Gambar 2.18 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Pada tahun 2025, Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten sebesar 4,62% lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Tengah sebesar 5,37% dan Nasional sebesar 5,11%. Walaupun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten tahun 2025 mengalami perlambatan tetapi Pembangunan ekonomi di Kabupaten Klaten menunjukkan adanya kenaikan, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya besaran angka PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Nilai PDRB Klaten atas dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2025 mencapai 58.434,97 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 3.190,64 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai 55.244,33 miliar rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi beberapa kategori dan kenaikan harga. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB mengalami kenaikan, dari 33.580,87 miliar rupiah pada tahun 2024 menjadi 35.131,44 miliar rupiah tahun 2025. Ada kenaikan sebesar 1.550,57 miliar rupiah yang didorong oleh kategori lapangan penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar 11,40 persen.



Sumber : BPS Kabupaten Klaten dan Jawa Tengah, 2026

Gambar 2.19 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Konstan 2010 di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Kinerja sektor tertinggi yang berkontribusi terhadap PDRB ADHB Kabupaten Klaten tahun 2025 adalah sektor Industri Pengolahan sebesar 22.622,06 miliar rupiah, selanjutnya Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 8.674,83 miliar rupiah diikuti sektor Pertanian, Kehutanan, dan perikanan sebesar 5.617,56 miliar rupiah. Secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.22 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Milyar Rupiah)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	3.019,02	3.067,58	3.104,58	3.090,26	3.305,06
Pertambangan dan Penggalian	737,59	745,25	763,64	799,05	790,87
Industri Pengolahan	9.832,84	10.217,66	10.811,12	11.401,47	12.006,47
Pengadaan Listrik dan Gas	55,81	58,21	61,62	64,29	67,11
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15,70	15,84	16,16	16,71	17,10
Konstruksi	1.860,30	2.170,91	2.567,60	2.790,94	2.468,27
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.952,34	5.152,05	5.339,68	5.535,43	5.854,45
Transportasi dan Pergudangan	480,54	861,44	904,23	959,08	1.035,61
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.134,93	1.304,46	1.422,45	1.549,62	1.726,22
Informasi dan Komunikasi	1.593,77	1.631,35	1.740,06	1.874,16	2.014,63
Jasa Keuangan dan Asuransi	966,28	976,39	985,99	997,50	1.031,65
Real Estate	428,22	447,91	476,97	501,00	534,79
Jasa Perusahaan	95,37	100,21	105,42	114,46	123,87
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Dan Jaminan Sosial Wajib	625,04	631,53	660,60	707,82	742,63



Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Milyar Rupiah)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Jasa Pendidikan	1.841,65	1.875,51	1.965,18	2.103,29	2.263,51
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	365,59	373,42	391,50	422,23	441,98
Jasa lainnya	526,12	585,26	613,49	653,57	707,22
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	28.531,11	30.214,98	31.930,30	33.580,87	35.131,44

Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2026

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2025 juga mengalami peningkatan. Kategori lapangan usaha yang paling besar menghasilkan PDRB ADHK tahun 2025 masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu industri pengolahan sebesar 12.006,47 miliar rupiah diikuti oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5.854,45 miliar rupiah serta Pertanian, Kehutanan, dan perikanan sebesar 3.305,06 miliar rupiah. Seperti dapat dilihat pada dibawah ini.

Tabel 2.23 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Lapangan Usaha	Nilai PDRB (Milyar Rupiah)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	3.019,02	3.067,58	3.104,58	3.090,26	3.305,06
Pertambangan dan Penggalian	737,59	745,25	763,64	799,05	790,87
Industri Pengolahan	9.832,84	10.217,66	10.811,12	11.401,47	12.006,47
Pengadaan Listrik dan Gas	55,81	58,21	61,62	64,29	67,11
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15,70	15,84	16,16	16,71	17,10
Konstruksi	1.860,30	2.170,91	2.567,60	2.790,94	2.468,27
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.952,34	5.152,05	5.339,68	5.535,43	5.854,45
Transportasi dan Pergudangan	480,54	861,44	904,23	959,08	1.035,61
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.134,93	1.304,46	1.422,45	1.549,62	1.726,22
Informasi dan Komunikasi	1.593,77	1.631,35	1.740,06	1.874,16	2.014,63
Jasa Keuangan dan Asuransi	966,28	976,39	985,99	997,50	1.031,65
Real Estate	428,22	447,91	476,97	501,00	534,79
Jasa Perusahaan	95,37	100,21	105,42	114,46	123,87
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Dan Jaminan Sosial Wajib	625,04	631,53	660,60	707,82	742,63
Jasa Pendidikan	1.841,65	1.875,51	1.965,18	2.103,29	2.263,51
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	365,59	373,42	391,50	422,23	441,98
Jasa lainnya	526,12	585,26	613,49	653,57	707,22
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	28.531,11	30.214,98	31.930,30	33.580,87	35.131,44

Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2026

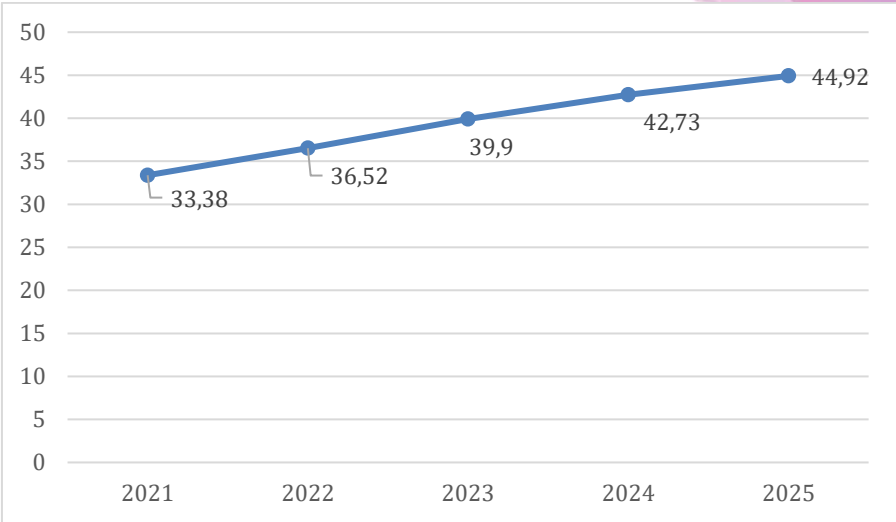


Kondisi ekonomi makro Kabupaten Klaten selama tahun 2021-2025 relatif fluktuatif, dimana hal ini juga dipengaruhi oleh perekonomian nasional dan perekonomian global. Adanya perang Rusia - Ukraina dan juga dampak dari kebijakan tarif Trump yang berlaku mulai 2025-2026, memicu tekanan pada sektor ekspor dengan potensi penurunan daya saing, risiko PHK, dan pelemahan Rupiah. Bangkrutnya beberapa perusahaan besar seperti Sritex dan Gudang Garam membawa konsekuensi adanya PHK dalam jumlah besar. Tarif Trump berlaku mulai 2025-2026 juga akan berdampak pada neraca perdagangan Indonesia. Perang Iran melawan Israel dan Amerika yang mulai pada akhir Februari 2026 juga berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan perekonomian global, dimana selat hormus yang selama ini menjadi salah jalur perdagangan minyak dunia berada di wilayah negara Iran. Apabila Iran menutup selat hormus maka berpotensi mempengaruhi harga minyak dunia yang pada akhirnya dapat berdampak pada naiknya berbagai macam komoditas perdagangan.

Di tingkat nasional selesai proses pembangunan jalan tol Solo – Yogyakarta yang melintasi kabupaten Klaten berdampak pada menurunnya kontribusi bidang konstruksi pada pertumbuhan ekonomi daerah. Disisi lain Program Nasional Makan bergizi gratis berdampak pada naiknya kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2025 mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 4,62 %, t menurun dari capaian Tahun 2024 yang tumbuh sebesar 5,17% dan juga di bawah Capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 5,37% pertumbuhan ekonomi Nasional 5,11 %.

b. PDRB Per Kapita

Pertumbuhan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2021-2025 mengalami kenaikan seiring dengan pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku. PDRB per Kapita tahun 2021 sebesar 33,38 juta rupiah dan setiap tahun meningkat hingga mencapai 44,92 juta rupiah pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan adanya pertumbuhan aktivitas ekonomi serta peningkatan nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai sektor usaha di daerah. Sektor industri pengolahan, perdagangan, pertanian, pariwisata, konstruksi serta jasa menjadi kontributor utama dalam pembentukan PDRB Kabupaten Klaten, yang turut mendorong peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Gambaran pertumbuhan PDRB per Kapita tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



Sumber : BPS Kabupaten Klaten dan Jawa Tengah, 2026

Gambar 2.20 Perkembangan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (dalam Juta Rupiah) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

c. Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia

Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia adalah ukuran ketimpangan yang dilihat dari persentase pengeluaran kelompok 40% penduduk terbawah (40% lowest-income households) terhadap total pengeluaran, dengan kriteria: tinggi (kurang dari 12%), moderat (12-17%), dan rendah (lebih dari 17%).

Sebagian besar penduduk Kabupaten Klaten masih terkonsentrasi pada kelompok pengeluaran rendah hingga menengah. Kondisi ini mencerminkan bahwa perekonomian daerah masih didominasi oleh rumah tangga dengan daya beli terbatas, yang umumnya bekerja pada sektor pertanian, perdagangan kecil, dan sektor informal lainnya. Meskipun demikian, proporsi penduduk pada kelompok pengeluaran menengah menunjukkan kecenderungan meningkat, seiring dengan membaiknya akses terhadap pendidikan, lapangan kerja nonpertanian, serta aktivitas ekonomi lokal.

Tabel 2.24 Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia di Kabupaten Klaten tahun 2021-2025

Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (%)	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
20% atas	43,63	44,98	48,85	50,95	N/A
40% tengah	36,78	35,86	33,71	32,91	N/A
40% bawah	19,59	19,17	17,44	16,15	N/A

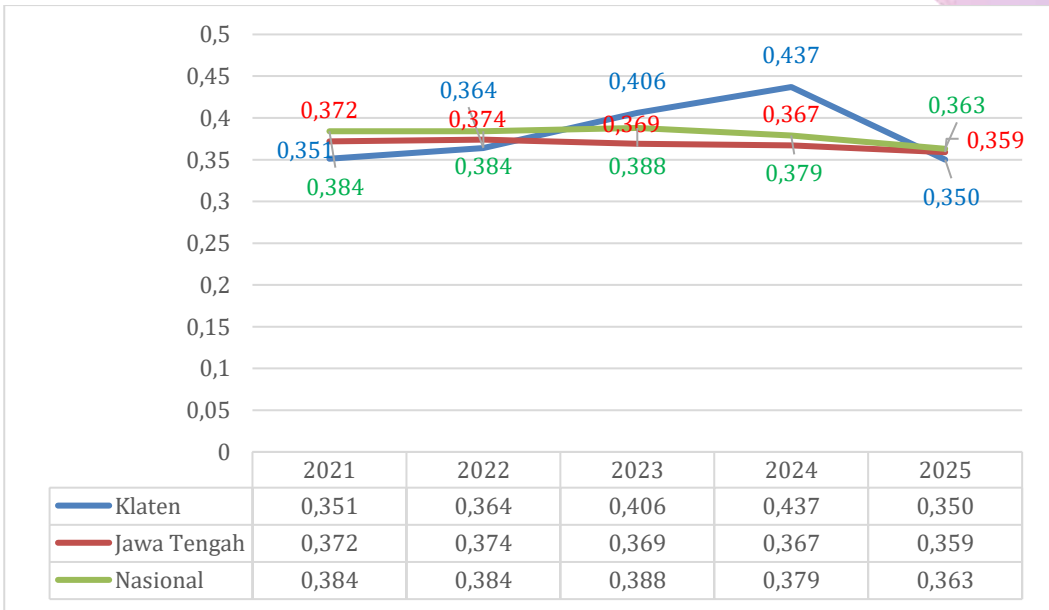
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2026

d. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator statistik yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran dalam suatu wilayah atau negara. Nilai Indeks Gini berada pada rentang 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 0, berarti distribusi pendapatan semakin merata, sedangkan semakin mendekati angka 1



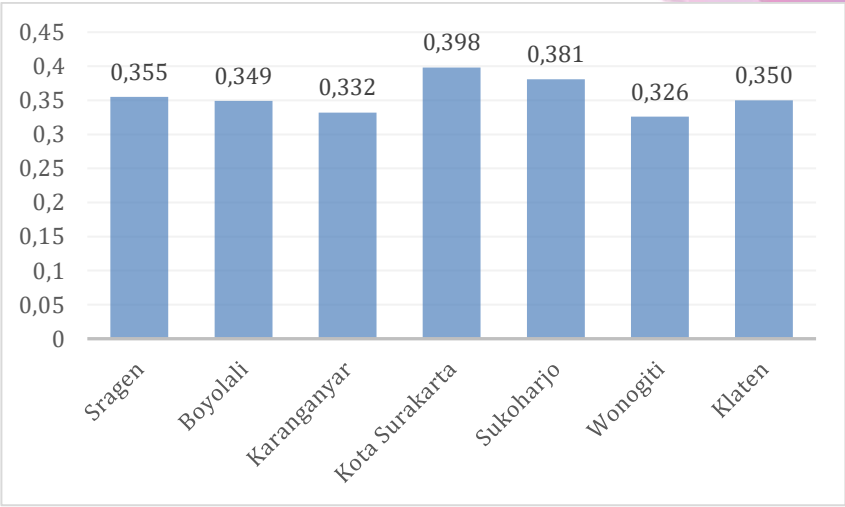
menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi, di mana sebagian besar pendapatan dikuasai oleh kelompok kecil masyarakat.



Sumber : BPS Kabupaten Klaten dan Jawa Tengah, 2026

Gambar 2.21 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025

Di Kabupaten Klaten pada tahun 2021-2025, nilai Indeks Gini menunjukkan perkembangan fluktuatif, kecenderungan meningkat selama periode 2021–2024 dan turun pada tahun 2025. Pada tahun 2021, Indeks Gini tercatat sebesar 0,351 dan menurun menjadi 0,350 pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan tingkat ketimpangan antara lain pada perbaikan pemerataan pendapatan yang dapat didorong oleh peningkatan kesempatan kerja, penguatan sektor ekonomi produktif, pemberdayaan UMKM, serta berbagai program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan. Indeks Gini di Kabupaten Klaten berada dalam posisi lebih rendah jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,359 dan Nasional sebesar 0,369 (bulan September 2025), nilai ini masih berada dalam kategori ketimpangan sedang dimana Kabupaten Klaten masuk dalam rentang 0,30 - 0,49. Pemerintah Daerah perlu terus memperkuat kebijakan pembangunan inklusif agar pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat yang lebih merata bagi seluruh Masyarakat.



Sumber : BPS Kabupaten Klaten dan Jawa Tengah, 2026

Gambar 2.22 Posisi Relatif Gini Rasio Kabupaten Klaten dengan Kabupaten/ Kota Sekitar Tahun 2025

Pada tahun 2025, nilai Indeks Gini kabupaten/kota di Solo Raya berada pada kisaran 0,3–0,4, yang menggambarkan adanya ketimpangan pendapatan tingkat sedang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi masih perlu diiringi dengan peningkatan pemerataan pendapatan. Capaian Indeks Gini di Kabupaten Klaten sebesar 0,350 jika dibandingkan dengan capaian Kabupaten Kota se Solo Raya berada pada posisi menengah, capaian tertinggi di Kota Surakarta sebesar 0,398, diikuti oleh Kabupaten Sukoharjo sebesar 0,381 dan Kabupaten Sragen sebesar 0,355, sementara nilai Indeks Gini terendah di Kabupaten Wonogiri sebesar 0,326, diikuti oleh Kabupaten Karanganyar sebesar 0,332 dan Kabupaten Boyolalai sebesar 0,349. Nilai Indeks Gini di Klaten menunjukkan tingkat pemerataan ekonomi di Kabupaten Klaten cukup baik dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Solo Raya, namun tetap diperlukan upaya untuk mengurangi kesenjangan melalui peningkatan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas serta pemerataan akses ekonomi.

e. Jumlah Produk Tersertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan sebuah proses penilaian untuk memastikan seluruh aspek produk (bahan, proses, pengemasan, distribusi) sesuai standar halal yang dikeluarkan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), bagian dari Kementerian Agama dengan dasar penetapannya adalah fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Sebagai upaya pendukung pengembangan ekonomi syariah, Kabupaten Klaten bekerjasama dengan Kementerian Agama dalam melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM baik usaha mikro maupun industri kecil, terutama pada sektor makanan olahan, obat herbal dan air minum dalam kemasan. Pendampingan ini tidak hanya fokus pada peningkatan kapasitas produksi, tetapi juga pada fasilitasi sertifikat halal sebagai bentuk jaminan kualitas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Perkembangan jumlah sertifikasi halal dan jumlah produk bersertifikasi halal dapat dilihat pada tabel berikut,



Tabel 2.25 Perkembangan Jumlah Produk UMKM yang Bersertifikasi Halal di Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2025

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Sertifikat Halal	92	543	6.213	4.214	3.818
Jumlah Produk Bersertifikasi Halal	2.237	2.452	13.474	16.050	17.679

Sumber : Kementerian Agama Kab. Klaten, 2026

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2021-2025 perkembangan jumlah sertifikasi halal mengalami perkembangan fluktuatif dimana perolehan sertifikat halal terbanyak pada tahun 2023 yaitu sebanyak 6.213 sertifikat, dan mulai menurun ditahun 2024 sebanyak 4.214 sertifikat dan tahun 2025 menjadi 3.818 sertifikat. Namun jika dilihat dari jumlah produk bersertifikasi halal pada tahun 2021-2025 menunjukkan peningkatan dengan capaian tertinggi pada tahun 2025 sebanyak 17.679 sertifikat, hal ini menunjukkan bahwa sertifikat halal yang diperoleh pelaku usaha bisa memuat lebih dari 1 (satu) produk. Peningkatan capaian tahun 2025 didukung dengan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BJPH) yang berada dibawah naungan Kementrian Agama Kabupaten Klaten antara lain sosialisasi, pendampingan kepada pelaku usaha dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah serta stakeholder terkait. Hal ini juga menunjukkan peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya standar halal dalam memperluas akses pasar, baik domestik maupun global dan meningkatkan daya saing produk.

f. Kemiskinan

1. Garis Kemiskinan

Pengukuran kemiskinan, konsep yang digunakan oleh BPS dengan menentukan penduduk referensi yaitu 20% penduduk yang berada di atas garis kemiskinan sementara (GKS) yang dalam hal ini garis kemiskinan sementara adalah garis kemiskinan periode lalu yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK).

Garis Kemiskinan yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang terdiri atas 52 jenis komoditi dasar makanan yang dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita, sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan jumlah nilai kebutuhan minimum dari komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah pada Maret 2025 tercatat sebesar Rp 537.812/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan



sebesar Rp 407.576/kapita/bulan (75,78 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 130.236/kapita/bulan (24,22 persen). Persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 9,48 persen, mengalami penurunan, yaitu 0,10% poin dibanding September 2024. Pada Maret 2025, secara rata-rata rumah tangga miskin di Provinsi Jawa Tengah memiliki 4,40 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.366.373 per rumah tangga miskin per bulan.

Beberapa komoditi makanan dan bukan makanan yang dapat berpengaruh terhadap kenaikan garis kemiskinan, sebagai berikut :

a. Komoditi Makanan

Pada Pada Maret 2025, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di pedesaan, pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar yakni sebesar 22,66% di perkotaan dan 22,89% di pedesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (8,59% di perkotaan dan 7,52% di pedesaan). Komoditi lainnya adalah daging ayam ras (4,66% di perkotaan memberikan sumbangan ketiga terhadap GK dan 4,22% di pedesaan memberikan sumbangan keempat terhadap GK), telur ayam ras (4,66% di perkotaan memberikan sumbangan keempat dan 4,22% di pedesaan memberi sumbangan ketiga terhadap GK). Gambaran lengkap komoditi makanan yang memberikan pengaruh besar terhadap kenaikan garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.26 Daftar Komoditi Makanan yang Memberi Pengaruh Besar Terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode 2025

No	Komoditi	Kota (%)	Komoditi	Desa (%)
1	Beras	22,66	Beras	22,89
2	Rokok kretek filter	8,59	Rokok kretek filter	7,52
3	Telur ayam ras	4,66	Telur ayam ras	4,22
4	Daging ayam ras	4,40	Daging ayam ras	4,12
5	Tempe	2,49	Tempe	2,67
6	Kue basah	2,46	Kue basah	2,46
7	Gula pasir	2,34	Tahu	2,43
8	Mie instan	2,33	Gula pasir	2,37
9	Roti	2,14	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	2,25
10	Tahu	2,14	Mie instan	2,21
11	Komoditi makanan lainnya	21,58	Komoditi makanan lainnya	22,64

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025



b. Komoditi Bukan Makanan

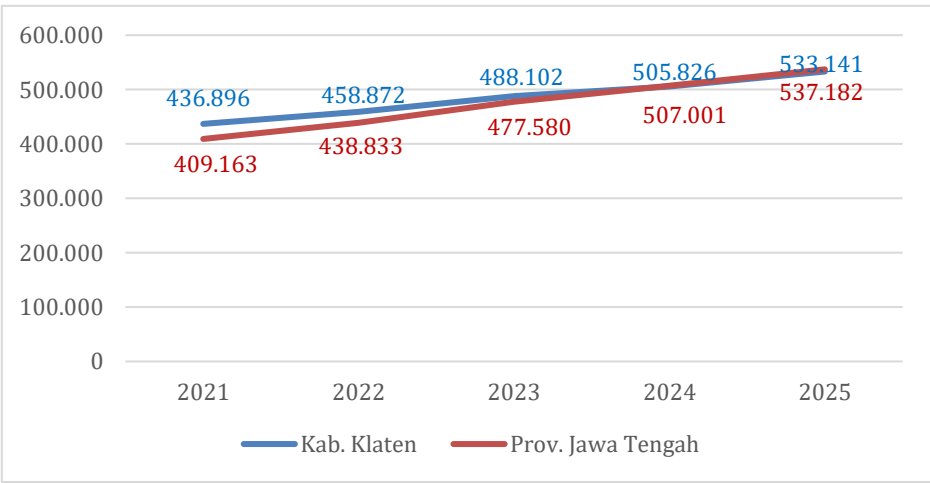
Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan besar baik pada GK perkotaan maupun perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, dan pendidikan. Secara rinci ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.27 Daftar Komoditi Bukan Makanan yang Berpengaruh Besar Terhadap kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode 2025

No	Komoditi	Kota (%)	Komoditi	Desa (%)
1	Perumahan	7,26	Perumahan	8,70
2	Bensin	3,22	Bensin	3,27
3	Pendidikan	2,09	Listrik	1,33
4	Listrik	1,96	Pendidikan	1,24
5	Perlengkapan mandi	1,25	Perlengkapan mandi	1,14
6	Kesehatan	1,11	Kesehatan	1,14
7	Pengeluaran bukan makan lainnya	7,31	Pengeluaran bukan makan lainnya	7,39

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Garis kemiskinan Kabupaten Klaten lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.23 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 (Rupiah/Kapita/Bulan)

2. Persentase Penduduk Miskin

Berdasarkan hasil survey dari BPS, pengukuran garis kemiskinan dengan rata-rata pengeluaran per kapita penduduk miskin di Kabupaten Klaten pada Tahun 2024 sebesar Rp. 505.826,00. sedangkan jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) pada Tahun 2024 sebanyak 141.840 jiwa dengan persentase 12,04%.Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten pada tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.28 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

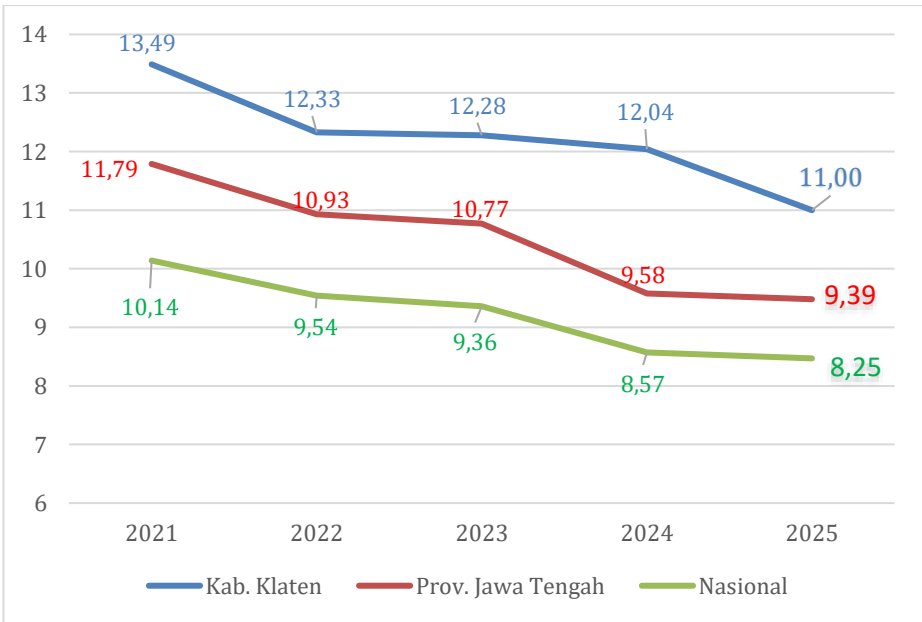
Tahun	Jumlah Penduduk Disdukcapil (Jiwa)	Jumlah Penduduk BPS (Jiwa)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin
2021	1.276.030	1.267.272	158.200	13,49
2022	1.277.455	1.275.850	144.870	12,33
2023	1.291.161	1.275.850*	144.430	12,28
2024	1.300.142	1.284.386	141.840	12,04
2025	1.303.696	1.300.940	129.680	11,00

Sumber : BPS dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, 2025

Berdasarkan tabel tersebut menggambarkan perkembangan jumlah penduduk dan kondisi kemiskinan pada periode 2021–2025. Secara umum, jumlah penduduk menunjukkan tren meningkat setiap tahun. Berdasarkan data Disdukcapil, jumlah penduduk bertambah dari 1.276.030 jiwa pada tahun 2021 menjadi 1.303.696 jiwa pada tahun 2025. Sejalan dengan itu, data BPS juga menunjukkan kenaikan jumlah penduduk dari 1.267.272 jiwa pada tahun 2021 menjadi 1.300.940 jiwa pada tahun 2025.

Di sisi lain, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yang konsisten. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin tercatat 158.200 jiwa, kemudian menurun menjadi 144.870 jiwa pada 2022, 144.430 jiwa pada 2023, dan 141.840 jiwa pada 2024. Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2025, dengan jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 129.680 jiwa. Penurunan jumlah penduduk miskin tersebut tercermin pula pada persentase penduduk miskin yang terus menurun dari 13,49% pada tahun 2021 menjadi 11,00% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat meskipun jumlah penduduk terus mengalami pertumbuhan.

Perkembangan relevansi persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 disajikan pada gambar berikut:



Sumber : BPS Kabupaten Klaten dan Jawa Tengah. 2025

Gambar 2.24 Perkembangan Relevansi Persentase Kemiskinan di Kabupaten Klaten terhadap Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025



Berdasarkan gambar di atas perkembangan persentase kemiskinan di Kabupaten Klaten selama periode 2021–2025 menunjukkan tren penurunan yang konsisten, sejalan dengan pola yang terjadi di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. Namun demikian, persentase kemiskinan di Kabupaten Klaten masih berada di atas rata-rata provinsi dan nasional sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2021, persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten tercatat sebesar 13,49 persen, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah sebesar 11,79% dan nasional sebesar 10,14 persen. Pada tahun 2022, seluruh wilayah mengalami penurunan tingkat kemiskinan. Kabupaten Klaten turun menjadi 12,33 persen, Jawa Tengah menjadi 10,93 persen, dan nasional menjadi 9,54 persen. Penurunan berlanjut pada tahun 2023, meskipun dengan laju yang relatif lebih lambat. Persentase kemiskinan di Kabupaten Klaten mencapai 12,28 persen, Jawa Tengah 10,77 persen, dan nasional 9,36 persen. Pada tahun 2024, tren penurunan kembali berlanjut dengan persentase kemiskinan Kabupaten Klaten sebesar 12,04 persen, Jawa Tengah 9,58 persen, dan nasional 8,57 persen.

Pada tahun 2025, persentase kemiskinan periode bulan Maret di Kabupaten Klaten turun cukup signifikan menjadi 11,00 persen. Sementara itu, Provinsi Jawa Tengah berada pada angka 9,48% dan nasional sebesar 8,47 persen. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun Kabupaten Klaten masih memiliki tingkat kemiskinan yang relatif lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah dan nasional, kesenjangan tersebut cenderung menyempit, yang mengindikasikan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Klaten selama periode 2021–2025.

3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Menurut Data Kemiskinan Makro

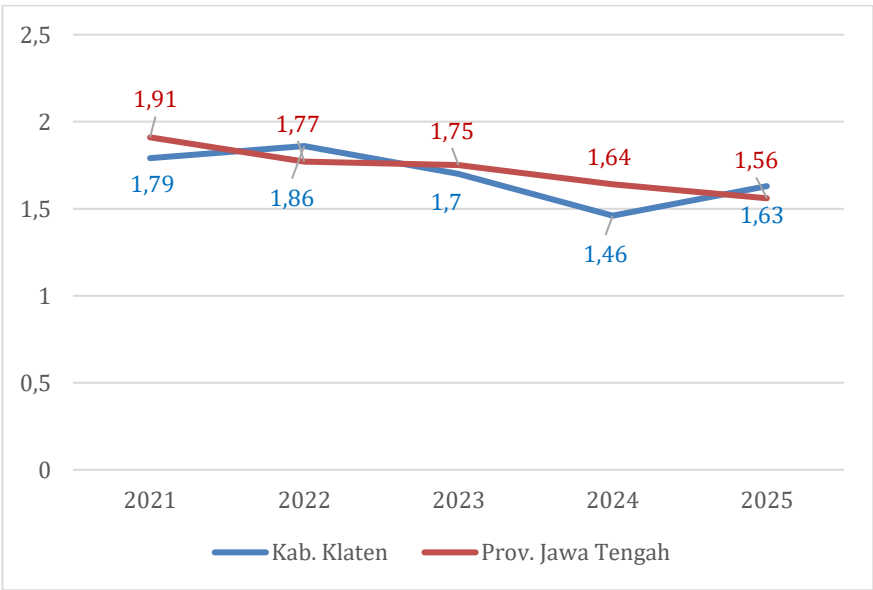
Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Klaten selama periode 2021–2025 dapat dilihat pada gambar 2. menunjukkan tren penurunan yang relatif konsisten, sejalan dengan kondisi di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata jarak pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin mengecil, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.

Pada tahun 2021, nilai P1 Kabupaten Klaten tercatat sebesar 1,79, lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 1,91. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedalaman kemiskinan di Kabupaten Klaten relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi. Namun, pada tahun 2022, nilai P1 Kabupaten Klaten meningkat menjadi 1,86 dan berada di atas Jawa Tengah yang menurun menjadi 1,77, sehingga menunjukkan kedalaman kemiskinan di Klaten sempat lebih tinggi dibandingkan provinsi. Selanjutnya, pada tahun 2023, Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Klaten kembali menurun menjadi 1,70, sedangkan Provinsi Jawa Tengah berada pada angka 1,75. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2024, di mana P1 Kabupaten Klaten turun cukup signifikan menjadi 1,46, lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah sebesar 1,64. Pada tahun 2025, nilai P1 Kabupaten Klaten sedikit meningkat menjadi



1,63, sementara Provinsi Jawa Tengah terus mengalami penurunan hingga mencapai 1,56. Secara keseluruhan, meskipun terjadi fluktuasi pada beberapa tahun, perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Klaten cenderung menurun dan relatif sejalan dengan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan kondisi ekonomi penduduk miskin, meskipun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk menekan kedalaman kemiskinan agar semakin mendekati atau lebih baik dari capaian provinsi.

Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten tersaji pada grafik terhadap Provinsi Jawa Tengah dapat disajikan pada Grafik berikut.

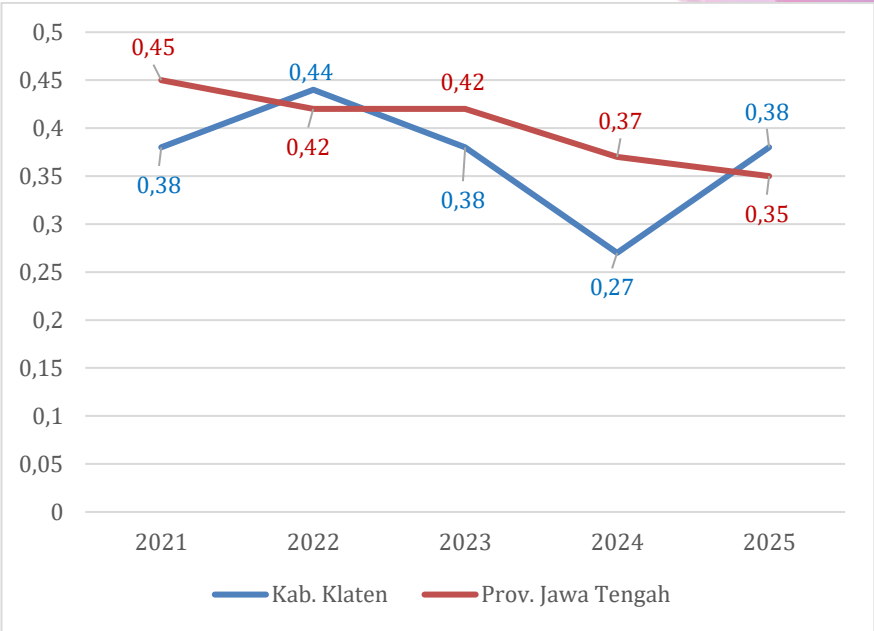


Sumber : BPS Kabupaten Klaten dan Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.25 Perkembangan Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025

4. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Data Kemiskinan Makro

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan ukuran untuk mengetahui penyebaran ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks keparahan kemiskinan semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Menurut hasil penghitungan BPS, persentase Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten pada Tahun 2025 lebih tinggi jika dibandingkan daripada Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah. Perbandingan persentase Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten dan Provinsi Jawa Tengah bisa dilihat pada grafik berikut.



Sumber : BPS Kabupaten Klaten dan Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.26 Perkembangan Relevansi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten terhadap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2025

Dari gambar di atas, selama periode tahun 2021–2025, perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Klaten menunjukkan pola yang relatif sejalan dengan Provinsi Jawa Tengah, meskipun dengan tingkat fluktuasi yang lebih tinggi. Pada tahun 2021, nilai P2 Kabupaten Klaten tercatat sebesar 0,38, lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 0,45. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat keparahan kemiskinan di Kabupaten Klaten relatif lebih ringan dibandingkan rata-rata provinsi. Pada tahun 2022, Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Klaten meningkat menjadi 0,44 dan berada sedikit di atas nilai Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 0,42. Peningkatan ini menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kabupaten Klaten pada periode tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2023, nilai P2 Kabupaten Klaten mengalami penurunan menjadi 0,38, sementara Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 0,42, yang menandakan adanya perbaikan kondisi keparahan kemiskinan meskipun masih berada pada tingkat yang relatif sebanding dengan provinsi. Perkembangan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Klaten turun tajam menjadi 0,27, jauh lebih rendah dibandingkan Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 0,37. Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan distribusi pengeluaran di kalangan penduduk miskin serta efektivitas berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di Kabupaten Klaten.

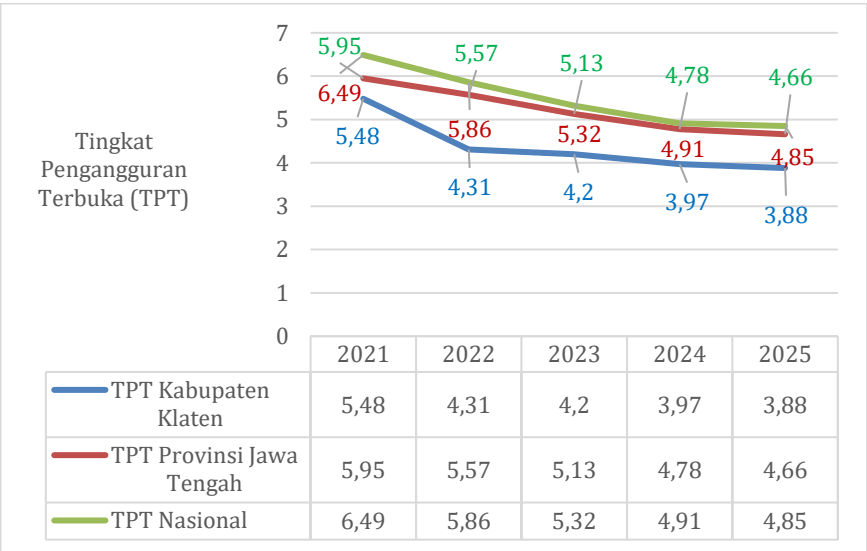
Namun demikian, pada tahun 2025 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Klaten kembali meningkat menjadi 0,38, sementara Provinsi Jawa Tengah justru menurun menjadi 0,35. Kondisi ini menunjukkan bahwa keparahan kemiskinan di Kabupaten Klaten kembali mengalami peningkatan dan sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah dan berkelanjutan, khususnya yang menyasar rumah



tangga miskin dengan tingkat kerentanan tertinggi, guna menekan kembali tingkat keparahan kemiskinan di Kabupaten Klaten.

g. **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Gambaran perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klaten dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2021-2025 dapat dilihat seperti pada gambar di bawah ini :



Sumber : BPS Kabupaten Klaten dan Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.27 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2021-2025

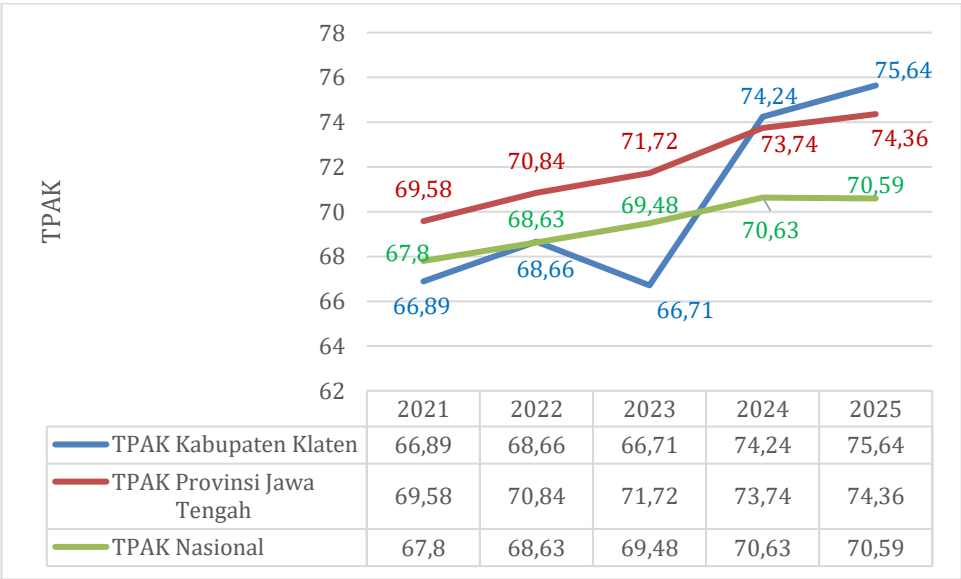
Dari gambar di atas menunjukkan perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan nasional selama periode 2021–2025 yang secara umum mengalami tren penurunan. Pada tahun 2021, TPT Kabupaten Klaten tercatat sebesar 5,48%, lebih rendah dibandingkan TPT Jawa Tengah sebesar 5,95% dan nasional sebesar 6,49%. Pada tahun 2022, TPT di ketiga wilayah mengalami penurunan. Kabupaten Klaten turun cukup signifikan menjadi 4,31%, sementara Jawa Tengah menjadi 5,57% dan nasional menjadi 5,86%. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2023, dengan TPT Kabupaten Klaten sebesar 4,20%, Jawa Tengah 5,13%, dan nasional 5,32%. Memasuki tahun 2024 dan 2025, TPT terus menurun secara konsisten. Pada tahun 2024, TPT Kabupaten Klaten mencapai 3,97%, lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah (4,78%) dan nasional (4,91%). Penurunan berlanjut hingga tahun 2025, di mana TPT Kabupaten Klaten tercatat sebesar 3,88%, sedangkan Jawa Tengah dan nasional masing-masing sebesar 4,66% dan 4,85%.

Secara keseluruhan, TPT Kabupaten Klaten selama periode 2021–2025 selalu berada di bawah rata-rata Jawa Tengah dan nasional. Kondisi ini menunjukkan kinerja penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Klaten relatif lebih baik serta mencerminkan perbaikan kondisi pasar kerja yang berkelanjutan



h. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Gambaran perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Klaten dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional selama Tahun 2021-2024 dapat dilihat seperti pada gambar di bawah ini :



Sumber : BPS Kabupaten Klaten dan Jawa Tengah, 2025

Gambar 2.28 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2021-2025

Gambar di atas menunjukkan perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional pada periode 2021–2025. Secara umum, ketiga wilayah mengalami tren peningkatan TPAK, meskipun dengan dinamika yang berbeda. TPAK Kabupaten Klaten mengalami fluktuasi pada awal periode. Setelah meningkat dari 66,89% pada 2021 menjadi 68,66% pada 2022, TPAK Klaten sempat menurun pada 2023 menjadi 66,71 persen. Namun, pada 2024 terjadi peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 74,24% dan kembali meningkat pada 2025 menjadi 75,64 persen. Pada akhir periode, TPAK Kabupaten Klaten tercatat lebih tinggi dibandingkan TPAK Provinsi Jawa Tengah maupun nasional. TPAK Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil. Nilainya meningkat dari 69,58% pada 2021 menjadi 70,84% pada 2022, kemudian terus naik menjadi 71,72% pada 2023 dan 73,74% pada 2024, sebelum mencapai 74,36% pada 2025.

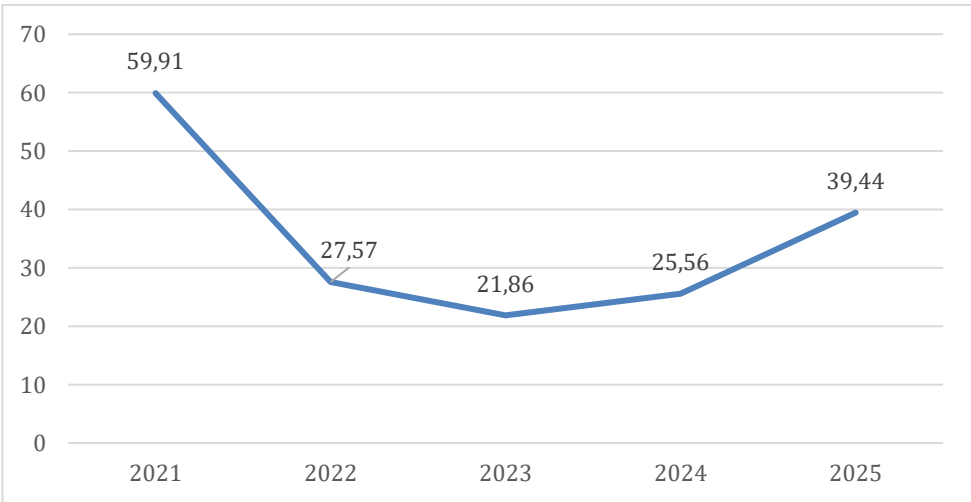
Sementara itu, TPAK nasional juga mengalami peningkatan bertahap dari 67,80% pada 2021 menjadi 70,59% pada 2025. Namun, laju peningkatan TPAK nasional cenderung lebih lambat dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Klaten. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya perbaikan partisipasi penduduk dalam angkatan kerja di semua tingkat wilayah, dengan Kabupaten Klaten mencatat peningkatan paling menonjol terutama sejak tahun 2024.

i. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) merupakan instrumen penting dalam memberikan perlindungan sosial bagi pekerja dan buruh dari berbagai



risiko kerja. Perkembangan jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta Program Jamsostek mencerminkan tingkat kepatuhan pemberi kerja serta cakupan perlindungan tenaga kerja di suatu wilayah. Perkembangan cakupan kepesertaan jaminan social ketenagakerjaan Kabupaten Klaten Tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Kab. Klaten Tahun 2025 (per bulan November 2025)

Gambar 2.29 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Pada tahun 2021, besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Program Jamsostek di Kabupaten Klaten tercatat sebesar 59,91. Angka ini menunjukkan tingkat kepesertaan yang relatif tinggi pada awal periode pengamatan. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan menjadi 27,57. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2023, di mana besaran kepesertaan kembali menurun menjadi 21,86. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya penurunan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja dan buruh di Kabupaten Klaten pada periode tersebut.

Pada tahun 2024, besaran pekerja/buruh peserta Jamsostek mulai menunjukkan tren peningkatan menjadi 25,56. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2025 dengan nilai sebesar 39,44. Kenaikan tersebut mencerminkan adanya perbaikan cakupan kepesertaan Jamsostek, yang diduga dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran pemberi kerja dan pekerja akan pentingnya perlindungan jaminan sosial, serta penguatan kebijakan dan program perluasan kepesertaan Jamsostek di Kabupaten Klaten.

Secara keseluruhan, perkembangan besaran pekerja/buruh peserta Program Jamsostek di Kabupaten Klaten selama periode 2021–2025 menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam, dengan penurunan signifikan pada periode 2022–2023 dan pemulihan pada periode 2024–2025. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk memperluas cakupan kepesertaan Jamsostek, khususnya bagi pekerja sektor informal dan usaha mikro, guna meningkatkan perlindungan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh di Kabupaten Klaten.



2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang menunjukkan capaian keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai dari teratasinya permasalahan mendasar masyarakat. Permasalahan tersebut di antaranya yaitu kemiskinan, pengangguran, buta huruf, dan ketahanan pangan. Tiga dimensi dasar pembentuk IPM, yaitu: (i) Umur Panjang dan Hidup Sehat (*A Long and Healthy Life*) yang diukur dengan indeks Usia Harapan Hidup; (ii) pengetahuan (*Knowledge*) yang diukur dengan Rata-rata lama sekolah dan Angka harapan lama sekolah, (iii) Standar Hidup Layak (*Decent Standard of Living*) yang diukur dengan Pengeluaran Riil Per Kapita.

Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan secara sampling oleh Badan Pusat Statistik. IPM Kabupaten Klaten mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Capaian IPM Kabupaten Klaten pada Tahun 2021 sebesar 76,12 dan telah mencapai 78,68 pada Tahun 2025. Adapun hasil penghitungan IPM Kabupaten Klaten tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.29 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Indikator IPM	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Usia harapan Hidup (UHH)	76,86	76,95	77,07	77,30	77,69
Angka harapan lama sekolah (HLS)	13,39	13,4	13,41	13,43	13,44
Rata-rata lama sekolah (RLS)	8,81	9,09	9,27	9,29	9,3
Pengeluaran Riil Per kapita (dIm Ribuan Rp)	12.017	12.522	12.968	13.513	13.948
IPM	76,12	76,95	77,59	78,16	78,68

Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2026

Perbandingan hasil penghitungan IPM di Kawasan Subosukowonosraten pada Tahun 2025, menempatkan Kabupaten Klaten pada posisi ke-3 setelah Kota Surakata dan Kabupaten Sukoharjo. Tabel perbandingan penghitungan IPM Kawasan Subosukowonosraten dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel perbandingan penghitungan IPM Kawasan Subosukowonosraten dapat dilihat pada tabel berikut.

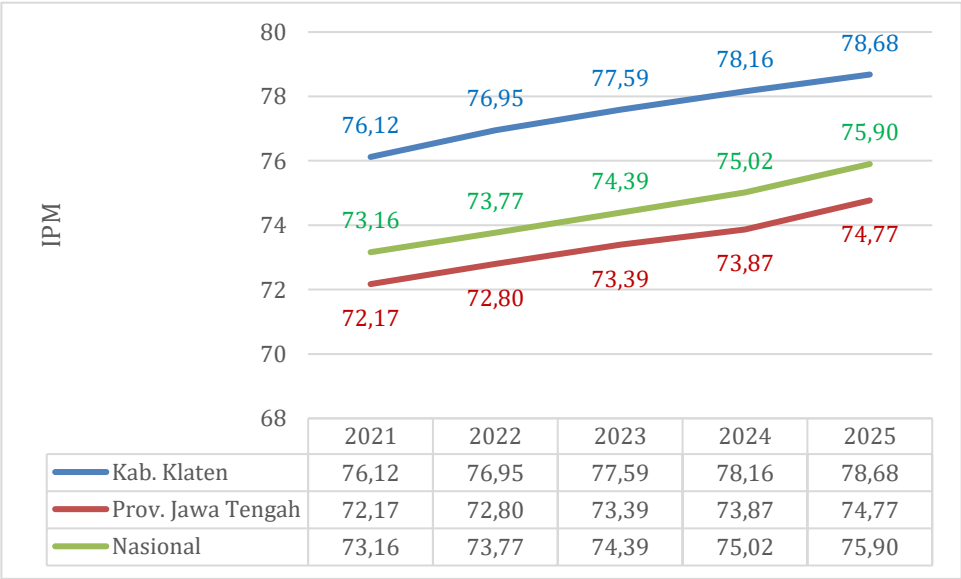
Tabel 2.30 Perbandingan Komponen Penyusun IPM se-Solo Raya Tahun 2025

Kabupaten	UHH	HLS	RLS	Pengeluaran Perkapita (Rp. 000)	IPM	Peringkat Provinsi
Klaten	77,69	13,44	9,30	13.948	78,68	6
Boyolali	76,76	12,90	8,41	14.594	76,95	11
Sukoharjo	78,21	14,03	10,02	13.238	79,90	5
Wonogiri	77,30	12,76	7,85	10.938	73,42	21
Sragen	76,48	13,21	7,89	14.461	76,38	13
Karanganyar	78,21	13,74	9,27	13.244	78,67	7
Surakarta	78,18	15,08	11,26	16.883	84,92	3

Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2026



Perkembangan IPM Kabupaten Klaten jika disandingkan dengan capaian IPM tingkat Provinsi Jateng dan capaian IPM Nasional adalah seperti tergambar sebagai berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.30 Capaian IPM Nasional Provinsi Jateng dan Kabupaten Klaten Tahun 2021 - 2025

Dari gambar di atas menunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, dan tingkat nasional selama periode 2021–2025 yang secara konsisten mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, IPM Kabupaten Klaten tercatat sebesar 76,12, lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Jawa Tengah sebesar 72,17 dan IPM nasional sebesar 73,16. Kondisi ini menunjukkan capaian pembangunan manusia di Kabupaten Klaten sudah relatif lebih baik sejak awal periode. Pada tahun 2022, IPM di ketiga wilayah meningkat. IPM Kabupaten Klaten naik menjadi 76,95, Jawa Tengah menjadi 72,80, dan nasional menjadi 73,77. Tren peningkatan berlanjut pada tahun 2023, dengan IPM Kabupaten Klaten mencapai 77,59, Provinsi Jawa Tengah 73,39, dan nasional 74,39. Memasuki tahun 2024, IPM Kabupaten Klaten kembali meningkat menjadi 78,16, diikuti oleh Jawa Tengah sebesar 73,87 dan nasional sebesar 75,02. Pada tahun 2025, IPM Kabupaten Klaten mencapai 78,68, sedangkan IPM Provinsi Jawa Tengah dan nasional masing-masing sebesar 74,77 dan 75,90.

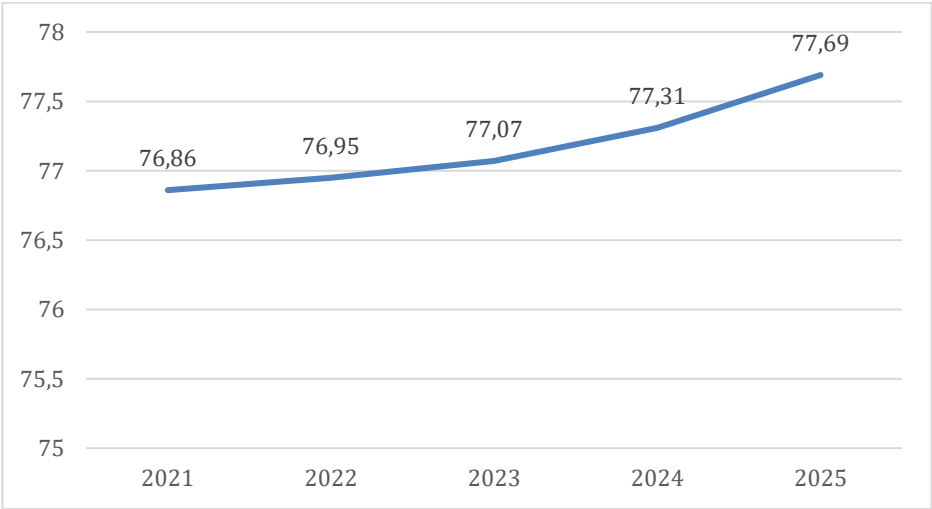
Secara keseluruhan, IPM Kabupaten Klaten selama periode 2021–2025 selalu berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional. Peningkatan IPM yang berkelanjutan ini mencerminkan perbaikan kualitas pembangunan manusia, khususnya pada aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, serta menunjukkan keberhasilan pembangunan daerah yang relatif lebih baik dibandingkan wilayah lain.

b. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH mencerminkan derajat kesehatan dan



ukuran peningkatan kesejahteraan suatu masyarakat. UHH dihitung dari hasil sensus dan survey kependudukan. Perkembangan UHH di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2025

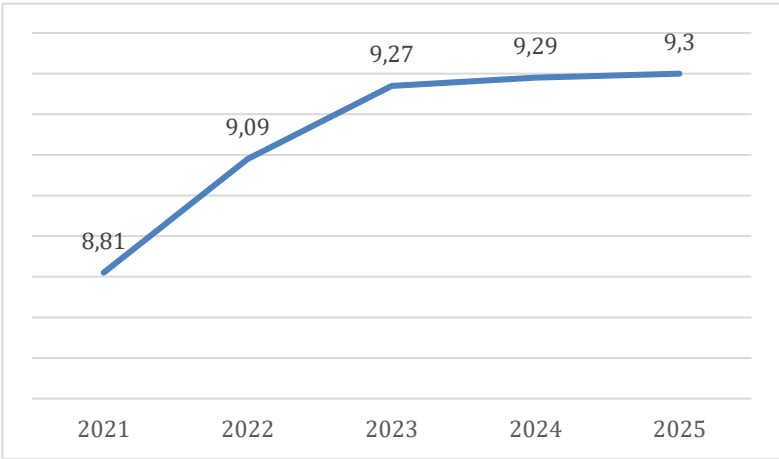
Gambar 2.31 Perkembangan Usia Harapan Hidup Masyarakat di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Gambar di atas menunjukkan perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) selama periode 2021–2025 yang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, UHH tercatat sebesar 76,86 tahun. Angka ini meningkat pada tahun 2022 menjadi 76,95 tahun dan kembali naik pada tahun 2023 menjadi 77,07 tahun. Peningkatan UHH semakin terlihat pada tahun 2024, di mana usia harapan hidup mencapai 77,31 tahun. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2025 dengan UHH mencapai 77,69 tahun. Secara keseluruhan, selama lima tahun terakhir UHH meningkat sebesar 0,83 tahun. Kenaikan Usia Harapan Hidup ini mencerminkan perbaikan kondisi kesehatan masyarakat, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, serta membaiknya pola hidup dan lingkungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas hidup penduduk secara umum terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun.



c. Rata-Rata Lama Sekolah

Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 disajikan pada gambar di bawah ini.



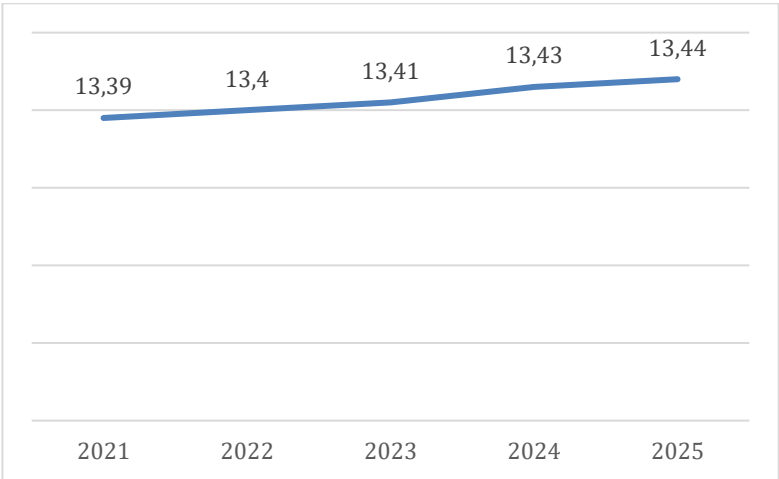
Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.32 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Dari gambar di atas menunjukkan perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) selama periode 2021–2025 yang terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, RLS tercatat sebesar 8,81 tahun. Angka ini meningkat cukup signifikan pada tahun 2022 menjadi 9,09 tahun, menunjukkan adanya perbaikan capaian pendidikan penduduk. Peningkatan RLS berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 9,27 tahun. Pada tahun 2024, RLS kembali naik menjadi 9,29 tahun dan mencapai 9,30 tahun pada tahun 2025. Secara keseluruhan, selama periode lima tahun tersebut, RLS meningkat sebesar 0,49 tahun. Kenaikan Rata-rata Lama Sekolah ini mencerminkan semakin baiknya akses dan partisipasi penduduk dalam pendidikan formal. Kondisi ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan sektor pendidikan serta keberhasilan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

d. Harapan Lama Sekolah

Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.33 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

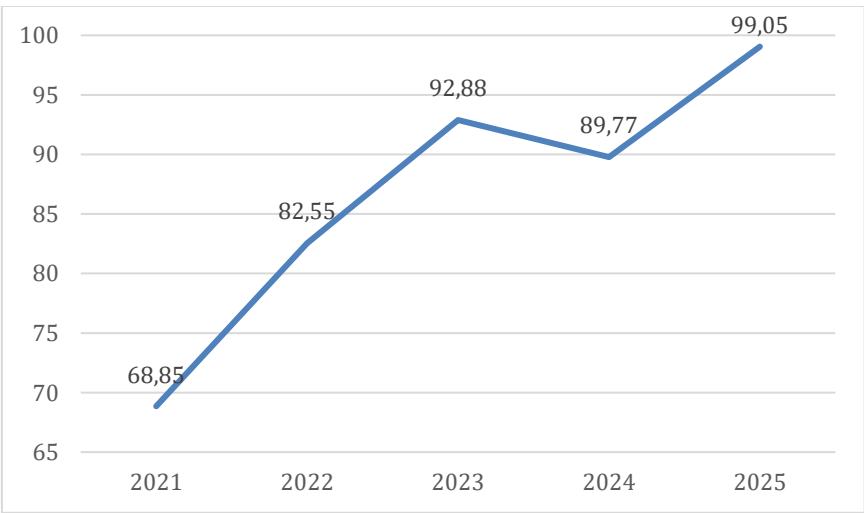


Dari gambar di atas menunjukkan perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) selama periode 2021–2025 yang cenderung meningkat secara bertahap. Pada tahun 2021, HLS tercatat sebesar 13,39 tahun. Angka ini meningkat menjadi 13,40 tahun pada 2022 dan kembali naik menjadi 13,41 tahun pada 2023. Peningkatan HLS terlihat lebih jelas pada tahun 2024, di mana harapan lama sekolah mencapai 13,43 tahun. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2025 dengan capaian HLS sebesar 13,44 tahun. Secara keseluruhan, selama lima tahun terakhir HLS meningkat sebesar 0,05 tahun.

Kenaikan Harapan Lama Sekolah ini mencerminkan meningkatnya peluang anak-anak untuk menempuh pendidikan yang lebih panjang di masa mendatang. Hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan akses dan keberlanjutan pendidikan, serta komitmen pembangunan di bidang pendidikan yang semakin baik dari tahun ke tahun.

e. Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun

Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5–6 tahun mencerminkan tingkat akses dan pemerataan layanan pendidikan anak usia dini sebagai dasar kesiapan memasuki pendidikan dasar.



Sumber : Dinas Pendidikan Klaten, 2025

Gambar 2.34 Angka Partisipasi Sekolah Usia 5 – 6 Tahun Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

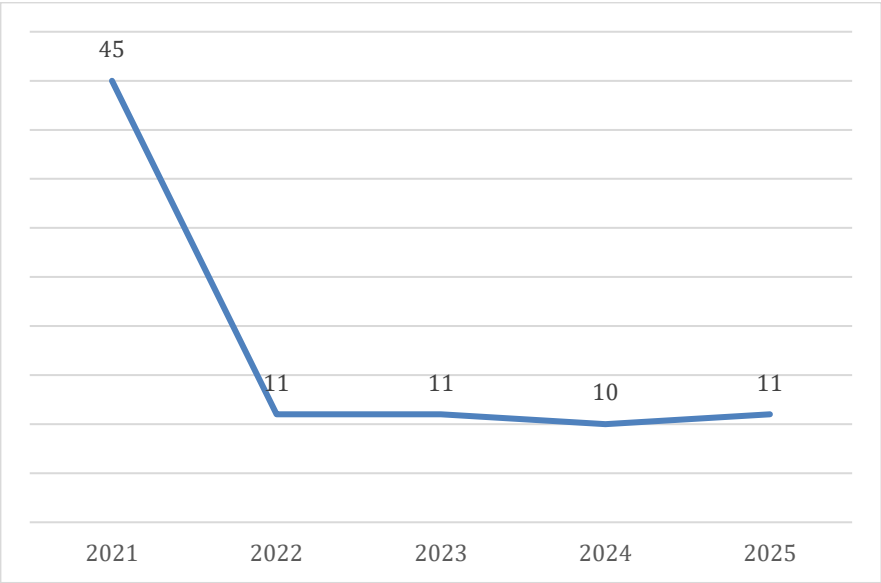
Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 5–6 tahun di Kabupaten Klaten selama periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang sangat positif dengan kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun, meskipun sempat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, APS usia 5–6 tahun tercatat sebesar 68,85%, yang kemudian meningkat signifikan pada tahun 2022 menjadi 82,55%. Peningkatan ini mengindikasikan semakin membaiknya akses dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini (PAUD). Tren peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian sebesar 92,98%, yang menunjukkan semakin optimalnya jangkauan layanan pendidikan bagi anak usia pra sekolah.



Pada tahun 2024, APS mengalami sedikit penurunan menjadi 89,77%. Meskipun demikian, capaian tersebut masih berada pada kategori tinggi dan mencerminkan bahwa sebagian besar anak usia 5–6 tahun telah memperoleh akses pendidikan. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi sosial ekonomi keluarga, perpindahan penduduk, keterbatasan sarana dan prasarana PAUD di beberapa wilayah, serta belum meratanya kualitas dan akses layanan pendidikan anak usia dini. Namun demikian, kondisi tersebut dapat segera direspons sehingga pada tahun 2025 APS kembali meningkat secara signifikan menjadi 99,05%. Secara keseluruhan, capaian APS usia 5–6 tahun di Kabupaten Klaten menunjukkan keberhasilan pembangunan sektor pendidikan, khususnya dalam memperluas akses layanan PAUD.

f. Jumlah Kasus Kematian Ibu

Perkembangan Jumlah Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.35 Angka Kematian Ibu Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) selama periode tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan tren yang membaik dan relatif terkendali. Pada tahun 2021, jumlah kematian ibu tercatat sebanyak 45 kasus. Angka ini merupakan capaian tertinggi dalam periode tersebut dan mengindikasikan masih tingginya risiko kematian maternal pada tahun tersebut. Memasuki tahun 2022, terjadi penurunan yang sangat signifikan menjadi 11 kasus. Penurunan drastis ini menunjukkan adanya perbaikan dalam sistem pelayanan kesehatan ibu, peningkatan akses dan kualitas layanan persalinan, serta penguatan program pencegahan dan penanganan komplikasi kehamilan. Pada tahun 2023, angka kematian ibu tetap berada pada 11 kasus, menunjukkan kondisi yang stabil. Tahun 2024 kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 10 kasus, yang menjadi angka terendah dalam lima tahun terakhir. Namun pada tahun 2025 terjadi kenaikan tipis



menjadi 11 kasus. Meskipun terjadi peningkatan satu kasus, secara umum kondisi masih tergolong stabil dan jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2021.

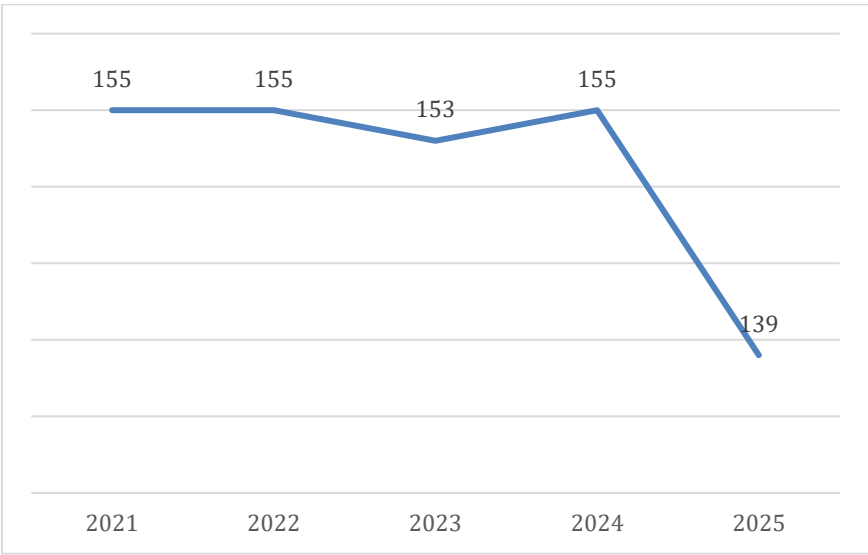
Secara keseluruhan, tren AKI selama tahun 2021–2025 memperlihatkan keberhasilan upaya penurunan kematian ibu, terutama sejak tahun 2022. Tantangan ke depan adalah mempertahankan capaian tersebut sekaligus terus menekan angka kematian ibu agar dapat mencapai level yang lebih rendah secara berkelanjutan melalui penguatan deteksi dini risiko kehamilan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan maternal, serta optimalisasi sistem rujukan.

Penyebab kematian ibu pada Tahun 2025 masih didominasi disebabkan karena perdarahan sebanyak 6 kasus , hipertensi atau pre eklamsi sebanyak 3 kasus, penyakit jantung sebanyak 1 kasus dan lain - lain sebanyak 1 kasus. Dari 11 kasus kematian ibu di Kabupaten Klaten sebanyak 72,73 % ibu yang meninggal umurnya lebih dari 35 Tahun yang artinya ibu hamil tersebut termasuk resiko tinggi. Sebanyak 81,8 % kematian ibu terjadi saat masa nifas, yang berarti kurangnya pemantauan pada saat nifas atau kurang optimalnya pemantauan kunjungan nifas. Kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan buku KIA selama kehamilan juga menjadi faktor pendukung terjadinya kematian ibu di Kabupaten klaten.

Dalam kehamilannya ibu hamil seyogyanya mendapatkan pelayanan sesuai standar, salah satunya adalah pelayanan ANC terpadu pada Trimester 1 sebanyak 1 kali dan trimester 3 sebanyak 1 kali. Masih banyaknya jumlah ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya > 12 minggu menjadikan ibu hamil tidak mendapatkan pelayanan ANC terpadu sesuai standar, selain itu ibu yang bekerja dan tidak mendapatkan ijin dari perusahaan sehingga tidak bisa mendapatkan pelayanan ANC terpadu.

g. Jumlah Kasus Kematian Bayi

Perkembangan Kasus Kematian Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.36 Jumlah Kasus Kematian Bayi Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025



Perkembangan jumlah kasus kematian bayi selama periode tahun 2021 hingga 2025 menunjukkan tren yang relatif fluktuatif namun cenderung menurun pada akhir periode. Pada tahun 2021, jumlah kasus kematian bayi tercatat sebanyak 155 kasus. Angka tersebut tetap sama pada tahun 2022, menunjukkan kondisi yang masih stagnan tanpa adanya penurunan signifikan. Pada tahun 2023, terjadi sedikit penurunan menjadi 153 kasus. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan, meskipun belum terlalu signifikan. Namun pada tahun 2024, jumlah kasus kembali meningkat menjadi 155 kasus, yang mengindikasikan masih adanya tantangan dalam upaya penurunan kematian bayi, baik dari aspek pelayanan kesehatan neonatal, faktor gizi, maupun kondisi kesehatan ibu. Perkembangan yang cukup menggembirakan terjadi pada tahun 2025, di mana jumlah kasus kematian bayi menurun cukup tajam menjadi 139 kasus. Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas intervensi kesehatan, seperti penguatan pelayanan antenatal dan postnatal, peningkatan kualitas layanan persalinan di fasilitas kesehatan, serta optimalisasi perawatan bayi baru lahir.

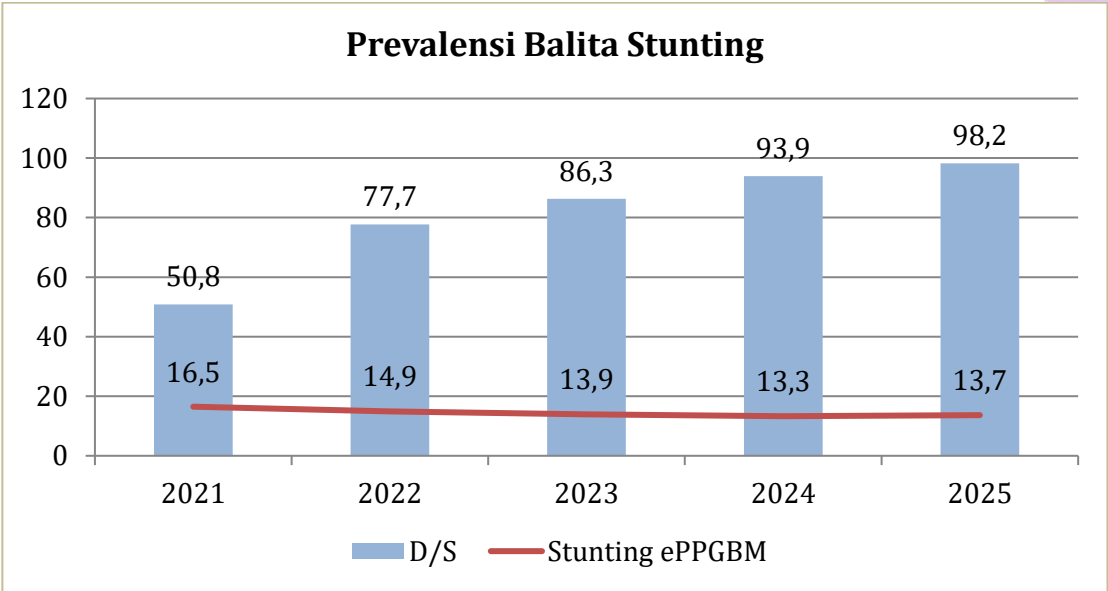
Secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami fluktuasi, tren lima tahun terakhir menunjukkan adanya kemajuan pada tahun 2025. Ke depan, diperlukan konsistensi dalam peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan bayi, penguatan sistem rujukan neonatal, serta edukasi kepada masyarakat guna mempertahankan dan mempercepat penurunan angka kematian bayi secara berkelanjutan.

Penyebab kematian bayi pada Tahun 2025 didominasi oleh BBLR sebanyak 36,7%, kelainan Kongenital 15,1 % dan Asfiksia sebesar 7,9%. Tingginya kelahiran dengan prematur atau usia kehamilan kurang dari 37 minggu menyebabkan kasus BBLR dan kelainan kongenital menjadi penyebab tertinggi dalam kematian bayi. Selain itu kejadian BBLR juga bisa dipengaruhi dari saat ibu hamil sudah mengalami anemia dan KEK, dimana ibu hamil anemia di Kabupaten Klaten sebanyak 6,8 % dan Ibu hamil KEK sebesar 11,12 %. Tantangan yang dihadapi dalam menurunkan kematian bayi adalah kesenjangan fasilitas kegawatdaruratan perinatal dimana ketersediaan inkubator dan fasilitas NICU (*Neonatal Intensive Care Unit*) level 2 dan 3 sering kali penuh ketika terjadi rujukan kegawatdaruratan neonatal dan perinatal.



h. Prevalensi Stunting pada Balita

Perkembangan Prevelensi Stunting pada balita di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.37 Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

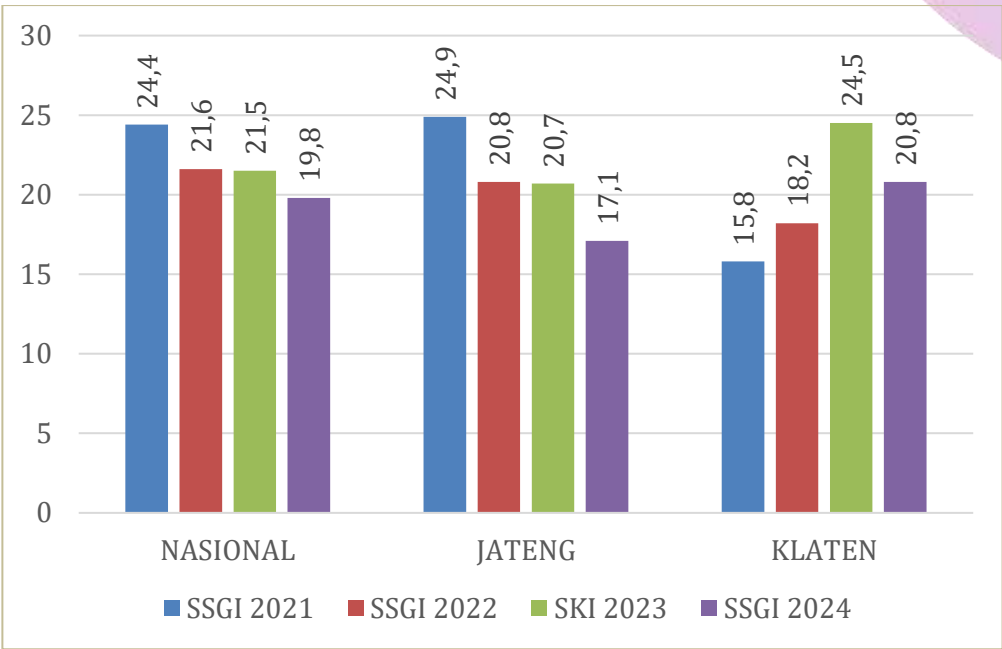
Gambar di atas menunjukkan perkembangan prevalensi balita stunting selama periode tahun 2021 hingga 2025. Gambar tersebut menunjukkan tren yang relatif menurun meskipun terjadi sedikit fluktuasi pada akhir periode. Pada tahun 2021, prevalensi stunting tercatat sebesar 16,5 persen. Angka ini kemudian mengalami penurunan menjadi 14,9% pada tahun 2022 dan kembali menurun menjadi 13,9% pada tahun 2023. Penurunan berlanjut pada tahun 2024 hingga mencapai 13,3 persen, yang merupakan capaian terendah dalam lima tahun terakhir. Kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan dalam intervensi percepatan penurunan stunting, seperti peningkatan cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi, serta penguatan edukasi kepada masyarakat. Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi sedikit kenaikan menjadi 13,7 persen. Meskipun kenaikannya tidak signifikan, kondisi ini perlu menjadi perhatian agar tidak berkembang menjadi tren peningkatan pada tahun-tahun berikutnya.

Di sisi lain, cakupan D/S (perbandingan jumlah balita yang ditimbang dengan jumlah sasaran) menunjukkan peningkatan yang konsisten dari 50,8% pada tahun 2021 menjadi 98,2% pada tahun 2025. Peningkatan cakupan ini mengindikasikan semakin optimalnya pelaksanaan pemantauan pertumbuhan balita, sehingga data yang dihasilkan semakin akurat dan intervensi dapat lebih tepat sasaran.

Secara keseluruhan, capaian prevalensi stunting menunjukkan tren yang membaik hingga tahun 2024, dengan tantangan menjaga konsistensi penurunan pada tahun-tahun berikutnya melalui penguatan intervensi gizi spesifik dan sensitif, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting. Perbandingan prevelensi stunting Kabupaten Klaten



dibandingkan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.38 Perbandingan prevelensi stunting Kabupaten Klaten dibandingkan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Secara umum, prevalensi stunting di tingkat nasional dan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun, sedangkan Kabupaten Klaten mengalami fluktuasi. Pada tingkat nasional, prevalensi stunting menurun dari 24,4% pada 2021 menjadi 21,6% pada 2022. Pada 2023, angka stunting relatif stabil di 21,5 persen, kemudian kembali turun pada 2024 hingga mencapai 19,8 persen. Penurunan ini mencerminkan perbaikan status gizi balita secara nasional.

Di Provinsi Jawa Tengah, tren penurunan stunting terlihat lebih signifikan. Prevalensi stunting turun dari 24,9% pada 2021 menjadi 20,8% pada 2022, relatif stabil pada 2023 sebesar 20,7 persen, dan kembali menurun cukup tajam pada 2024 menjadi 17,1 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional pada tahun yang sama. Sementara itu, Kabupaten Klaten menunjukkan pola yang berbeda. Prevalensi stunting di Klaten sebesar 15,8% pada 2021, meningkat menjadi 18,2% pada 2022 dan melonjak pada 2023 hingga 24,5 persen. Namun, pada 2024 prevalensi stunting kembali menurun menjadi 20,8 persen. Meskipun terjadi penurunan, angka stunting di Kabupaten Klaten pada 2024 masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 dan berada di atas angka Provinsi Jawa Tengah.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan keberhasilan penurunan stunting di tingkat nasional dan Provinsi Jawa Tengah, namun Kabupaten Klaten masih memerlukan penguatan intervensi yang lebih terarah dan berkelanjutan agar prevalensi stunting dapat ditekan secara konsisten.

Di Kabupaten Klaten kasus stunting sangat linier dengan tingginya jumlah BBLR dimana bayi yang lahir dengan BBLR atau prematur memiliki risiko 3 hingga 4 kali



lebih besar untuk tumbuh menjadi anak stunting jika tidak mendapatkan intervensi kejar tumbuh. Remaja yang anemia dan KEK di Kabupaten Klaten masih tinggi sehingga menyebabkan ibu hamil anemia di Kabupaten Klaten sebanyak 6,8 % dan Ibu hamil KEK sebesar 11,12 % dan menyebabkan banyaknya kasus bayi dengan BBLR.

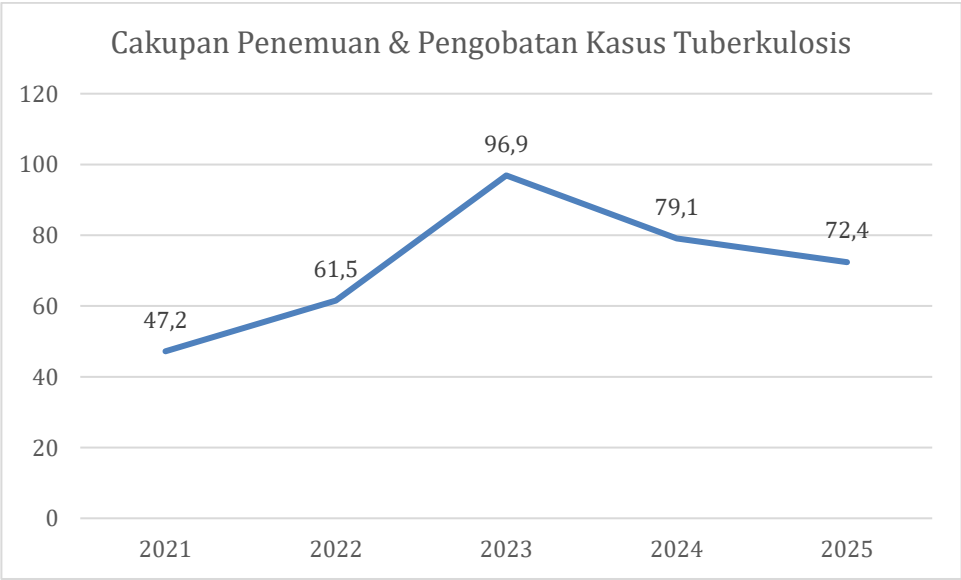
Adanya bimbingan perkawinan untuk calon pengantin di Kabupaten Klaten sangat membantu untuk melakukan edukasi pada calon ibu hamil dalam mempersiapkan kehamilan yang sehat dan layak hamil.

Selain hal tersebut faktor yang mempengaruhi adalah akurasi alat antropometri di posyandu dimana tantangannya adalah memastikan seluruh kader posyandu mahir menggunakan alat antropometri kit yang standar dan melakukan kalibrasi yang berkala dan juga alat antropometri yang sudah rusak / tidak bisa dipakai di posyandu.

Intervensi spesifik juga sudah diberikan misalnya pemberian Makanan Tambahan untuk bayi dan balita dengan stunting, tetapi belum semua bayi dan balita dengan stunting mendapatkan PMT yang sesuai standard.selain itu dipengaruhi juga dari faktor keluarga yang belum optimal dalam pola asuh.

i. **Cakupan Penemuan & Pengobatan Kasus Tuberkulosis**

Perkembangan Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.39 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Gambar di atas menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021, cakupan penemuan dan pengobatan kasus TB masih relatif rendah, yaitu sebesar 47,2 persen. Pada 2022, capaian ini meningkat menjadi 61,5 persen, menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya deteksi dan penanganan kasus TB. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2023, ketika cakupan mencapai 96,9 persen. Capaian ini mengindikasikan optimalisasi kegiatan penemuan kasus serta keberhasilan layanan pengobatan TB pada tahun tersebut. Namun, pada



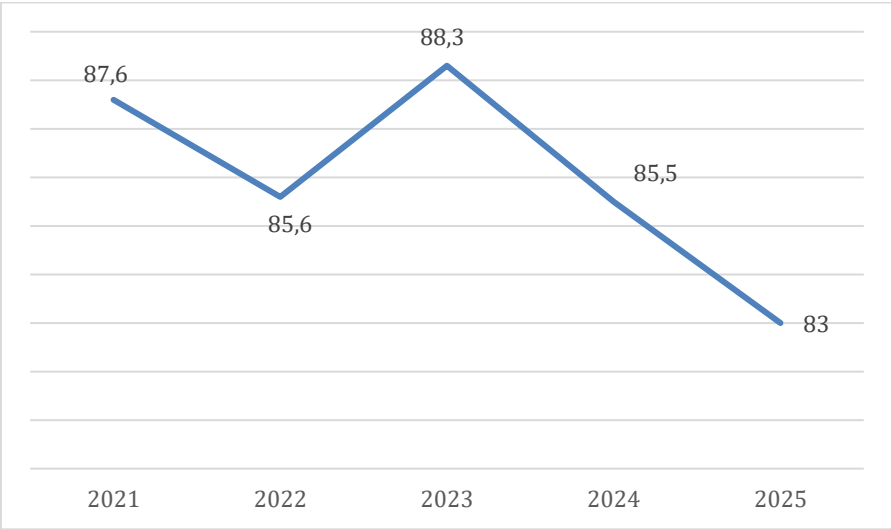
tahun 2024 cakupan kembali menurun menjadi 79,1% dan terus menurun pada 2025 hingga mencapai 72,4 persen.

Secara keseluruhan, meskipun capaian tertinggi terjadi pada tahun 2023, tren penurunan pada dua tahun terakhir. Hal ini disebabkan masih belum optimalnya penemuan aktif secara luas di masyarakat, baik pada masyarakat umum maupun kelompok khusus, belum terpenuhinya ketersediaan logistik pemeriksaan pemeriksaan laboratorium penegakan diagnosa TBC, pengetahuan masyarakat tentang penyakit tuberkulosis berakibat kesadaran masyarakat untuk periksa jika mengalami gejala TBC.

Untuk itu perlu penguatan kembali strategi penemuan kasus aktif, sosialisasi TBC secara luas, serta dukungan lintas sektor agar upaya penemuan dilakukan secara masif dan komprehensif melibatkan semua unsur.

j. **Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis**

Perkembangan Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.40 Capaian Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis Di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

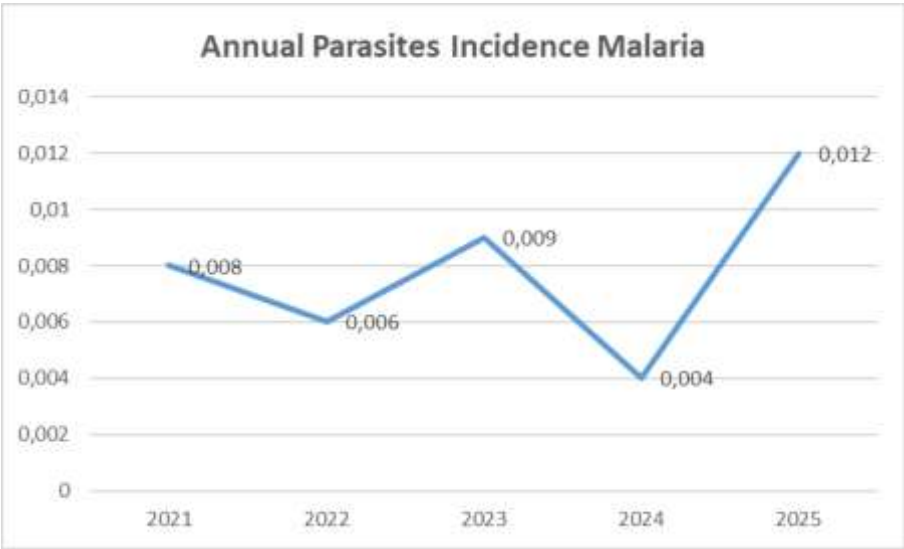
Gambar di atas menunjukkan capaian angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis yang relatif tinggi namun berfluktuasi selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021, angka keberhasilan pengobatan TB tercatat sebesar 87,6 persen. Pada 2022, capaian ini mengalami penurunan menjadi 85,6 persen. Pada tahun 2023, angka keberhasilan pengobatan kembali meningkat dan mencapai titik tertinggi selama periode pengamatan, yaitu sebesar 88,3 persen. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan kembali menjadi 85,5 persen, dan penurunan berlanjut pada 2025 hingga mencapai 83 persen.

Angka keberhasilan pengobatan belum mencapai target yang diharapkan lebih dikarenakan kepatuhan pasien dalam berobat TBC. Diperlukan penguatan upaya pendampingan pasien, peningkatan kepatuhan minum obat, serta penguatan sistem



rujukan dan pemantauan pengobatan agar angka keberhasilan pengobatan TB dapat kembali meningkat dan dipertahankan secara berkelanjutan.

k. Annual Parasites Incidence Malaria



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.41 Annual Parasites Incidence Malaria Di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Kabupaten Klaten merupakan daerah bebas malaria sejak tahun 2014. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, setiap tahun ditemukan kasus malaria dengan API dibawah 1 per 1.000 penduduk (sesuai dengan target yaitu dibawah 1 per 1.000 penduduk). Semua kasus malaria yang ditemukan di Kabupaten Klaten, merupakan kasus malaria *import*.

Upaya untuk mempertahankan status bebas malaria terus dilakukan, antara lain dengan *surveilans* migrasi (khususnya bagi yang datang dari wilayah endemis malaria), deteksi dini dengan pemeriksaan darah, pengendalian vektor (nyamuk) di lingkungan, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor.

l. Persentase Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Cek Kesehatan Gratis merupakan program dari Kementrian Kesehatan yang diatur melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/33/2025 tentang petunjuk teknis Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/84/2026 tentang Petunjuk Teknis Cek Kesehatan Gratis. Kabupaten Klaten sendiri telah melaksanakan CKG sejak bulan sejak awal tahun 2025. Hingga Desember 2025 sebanyak 36% penduduk Klaten telah mengikuti program cek kesehatan gratis. Capaian tersebut dapat dikatakan cukup rendah dan hal ini bisa disebabkan oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya skrining kesehatan sejak dini masih rendah, keterbatasan bahan medis habis pakai serta keterbatasan sumber daya manusia pelaksana di Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.



m. Rasio NDR RSUD Bagas Waras

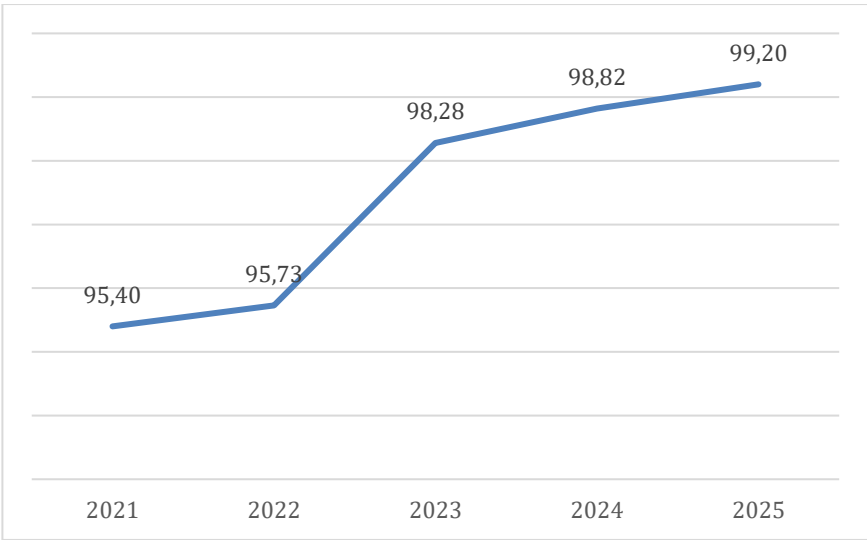
Rasio *Net Death Rate* (NDR) merupakan indikator mutu pelayanan rumah sakit yang menggambarkan jumlah pasien meninggal dunia setelah menjalani perawatan lebih dari 48 jam per 1.000 pasien keluar (hidup dan meninggal). Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pelayanan medis, khususnya dalam penanganan pasien selama masa perawatan.

Berdasarkan dokumen perencanaan kinerja, Rasio NDR RSUD Bagas Waras pada tahun 2025 tercatat sebesar 19,5%. Capaian ini berada di bawah standar maksimal yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, yaitu kurang dari 25%, sehingga menunjukkan bahwa mutu pelayanan rumah sakit dalam menangani pasien rawat inap telah berada pada kategori yang baik.

Ke depan, RSUD Bagas Waras berkomitmen untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian tersebut melalui peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, penguatan penerapan standar pelayanan dan keselamatan pasien, optimalisasi sistem rujukan, serta peningkatan sarana dan prasarana pelayanan. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat menjaga angka kematian pasien selama perawatan tetap rendah sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara berkelanjutan.

n. Cakupan Kepesertaan Jamkesmas

Perkembangan Cakupan Kepesertaan Jamkesmas di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.42 Cakupan Kepesertaan Jamkesmas di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Gambar di atas menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021, cakupan kepesertaan tercatat sebesar 95,40% dan meningkat menjadi 95,73% pada 2022. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023, ketika cakupan kepesertaan naik menjadi 98,28 persen. Tren positif ini berlanjut pada 2024 dengan capaian 98,82% dan kembali meningkat pada 2025 hingga mencapai 99,20 persen dengan Keaktifan Peserta 81,33%. Capaian tersebut

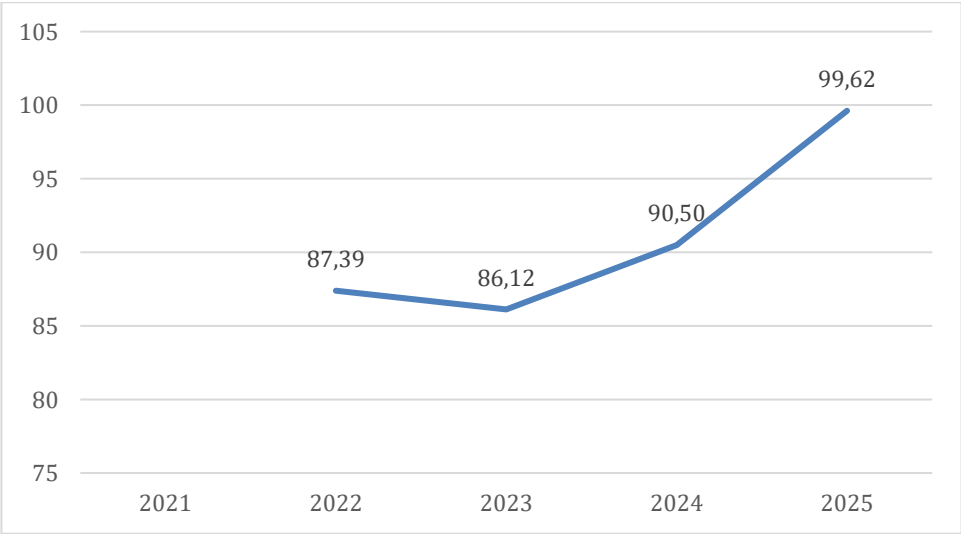


menunjukkan bahwa hampir seluruh penduduk telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional namun tidak seluruhnya aktif. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 target Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional adalah 99% dengan Cakupan Kepesertaan Aktif 83,5%. Data tersebut menunjukkan bahwa cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional telah mencapai target namun keaktifan peserta belum mencapai target. Hal ini bisa disebabkan karena adanya penonaktifan kepesertaan dari segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan masih kurangnya kesadaran Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) Mandiri untuk melakukan iuran secara rutin.

Secara keseluruhan, peningkatan cakupan kepesertaan Jamkesmas mencerminkan keberhasilan upaya perluasan akses layanan kesehatan serta komitmen pemerintah dalam menjamin perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Cakupan yang mendekati universal pada tahun 2025 menjadi modal penting dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan dan penguatan sistem pelayanan kesehatan. . Namun masih diperlukan dukungan Pemerintah Daerah dalam pengalokasian anggaran iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan Pemerintah Daerah dan Bantuan Iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas 3, untuk mempertahankan cakupan kepesertaan dan meningkatkan cakupan keaktifan peserta.

o. Persentase PPKS yg mendapatkan peningkatan kesejahteraan sosial

Perkembangan Persentase PPKS yg mendapatkan peningkatan kesejahteraan sosial di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber: DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten, 2026

Gambar 2.43 Persentase PPKS yg mendapatkan peningkatan kesejahteraan sosial di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

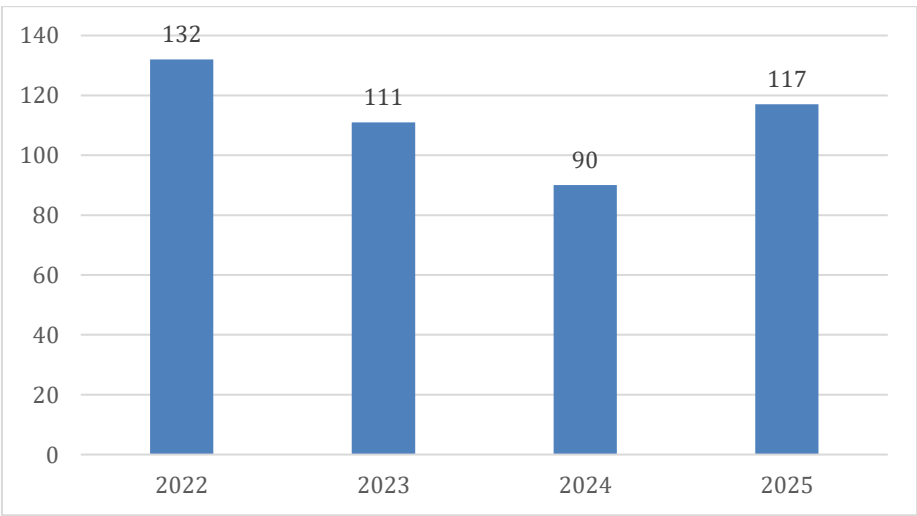
Gambar persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan peningkatan kesejahteraan sosial menunjukkan capaian yang relatif tinggi selama periode 2021–2025. Tahun 2021 data tidak rilis, sedangkan data tahun 2025 belum rilis. Pada tahun 2022, persentase PPKS yang mengalami peningkatan



kesejahteraan sosial tercatat sebesar 87,39 persen. Pada tahun 2023, persentase tersebut sedikit menurun menjadi 86,12 persen. Namun, pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 90,5 persen, dan pada Tahun 2025 mencapai 99,62% yang merupakan capaian tertinggi selama periode pengamatan.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa sebagian besar PPKS telah merasakan dampak positif dari program kesejahteraan sosial yang dilaksanakan. Peningkatan capaian pada tahun 2024 mencerminkan efektivitas intervensi sosial dan penguatan program perlindungan sosial dalam mendorong peningkatan kesejahteraan kelompok rentan.

Pengemis Gelandangan Orang Terlantar (PGOT) yang memerlukan pelayanan social di rumah singgah juga menunjukkan peningkatan sebagaimana tabel berikut :



Sumber: DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten, 2026

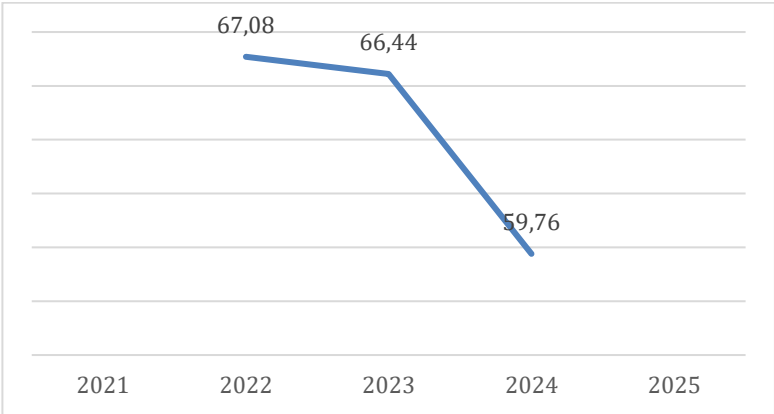
Gambar 2.44 Jumlah Pengemis Gelandangan Orang Terlantar (PGOT) di Rumah Singgah Kabupaten Klaten Tahun 2022-2025

Pada Tahun 2025 PGOT yang ditemukan dan mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar melalui rumah singgah adalah 117 orang , hal ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2024 sejumlah 90 orang. Pelayanan meliputi pemenuhan sandang, pangan, pelayanan kesehatan dasar. Penjangkauan layanan melalui kegiatan penelusuran identitas kependudukan, reunifikasi dengan keluarga dan rujukan baik ke fasilitas pelayanan kesehatan maupun rujukan ke panti milik Provinsi Jawa Tengah bagi PGOT yang tidak memiliki keluarga. Karena keterbatasan kapasitas panti , maka rujukan melalui sistim antrian atau daftar tunggu.



p. Indeks Perlindungan Anak

Perkembangan Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber: DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten, 2025

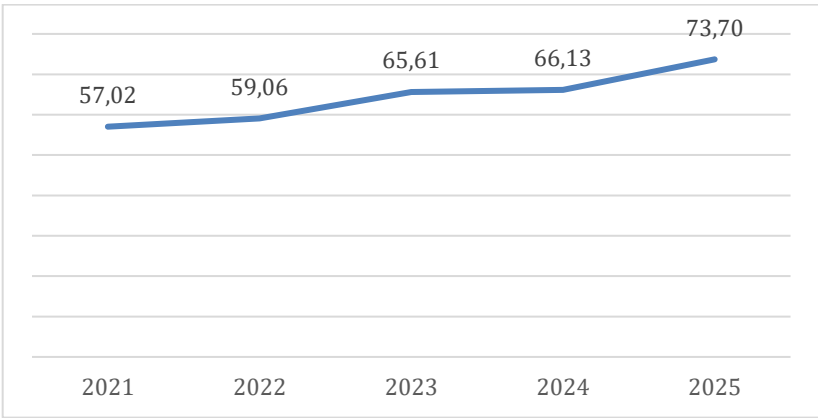
Gambar 2.45 Perkembangan Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Gambar Indeks Perlindungan Anak menunjukkan kecenderungan penurunan selama periode 2021–2025. Tahun 2021 data tidak rilis, sedangkan data tahun 2025 belum rilis Pada tahun 2022, nilai Indeks Perlindungan Anak tercatat sebesar 67,08. Nilai tersebut sedikit menurun pada tahun 2023 menjadi 66,44. Penurunan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2024, ketika Indeks Perlindungan Anak turun menjadi 59,76. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, perlindungan khusus, maupun lingkungan yang ramah anak.

Secara keseluruhan, tren penurunan Indeks Perlindungan Anak perlu menjadi perhatian serius. Diperlukan penguatan kebijakan, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi program perlindungan anak agar kualitas perlindungan dan pemenuhan hak anak dapat kembali ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.

q. Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)

Perkembangan Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber: DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.46 Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

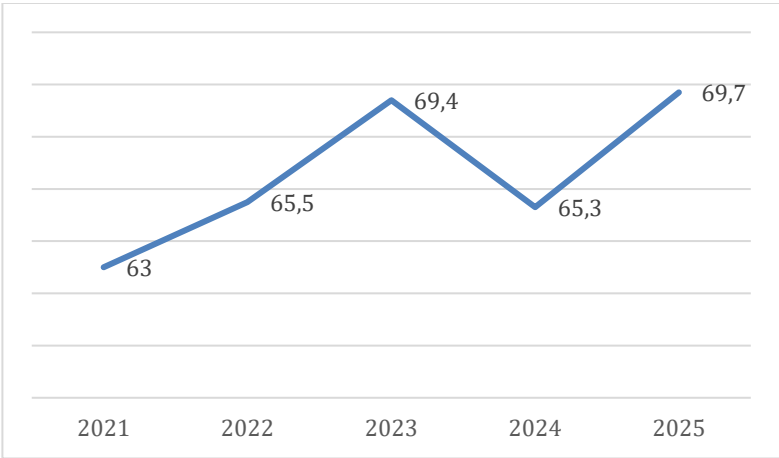


Gambar Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2021–2025. Data tahun 2025 tercatat sebesar 73,70. Pada tahun 2021, nilai ibangga tercatat sebesar 57,02. Selanjutnya, pada 2022 meningkat menjadi 59,06, menunjukkan adanya perbaikan pada kondisi dan ketahanan keluarga. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2023, ketika nilai Ibangga naik menjadi 65,61. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2024 dengan capaian sebesar 66,13, yang merupakan nilai tertinggi selama periode pengamatan.

Secara keseluruhan, peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga mencerminkan membaiknya kualitas kehidupan keluarga, termasuk aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta ketahanan dan keharmonisan keluarga. Capaian ini menunjukkan efektivitas berbagai program pembangunan keluarga dan menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan.

r. **Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)**

Perkembangan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber: DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.47 Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

IPBK adalah indeks komposit yang mempresentasikan dimensi pembangunan berwawasan kependudukan sebagai alat ukur dalam memahami kondisi pembangunan berwawasan kependudukan di Indonesia. IPBK terdiri atas 5 dimensi yakni partisipatif, inklusif, keberlanjutan, holistic integratif, dan kesetaraan. Gambar Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi selama periode 2021–2025. Data tahun 2025 sebesar 69,7. Tahun 2025 ini terjadi reformulasi perhitungan IPBK, sehingga capaian tahun ini tidak bisa dibandingkan dengan periode tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, nilai IPBK tercatat sebesar 63. Selanjutnya, pada 2022 terjadi peningkatan menjadi 65,5, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam pengintegrasian aspek kependudukan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2023, ketika nilai IPBK mencapai 69,4. Capaian ini mencerminkan semakin optimalnya kebijakan dan

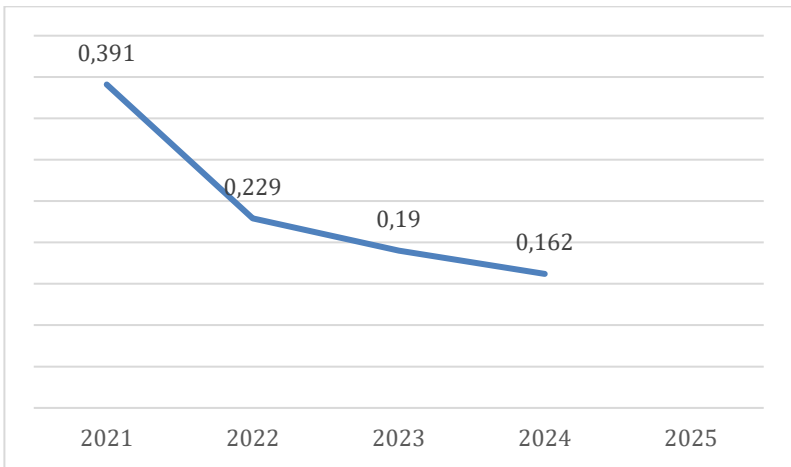


program pembangunan yang berwawasan kependudukan. Namun, pada tahun 2024 nilai IPBK kembali menurun menjadi 65,3..

Secara keseluruhan, meskipun IPBK sempat mencapai capaian tertinggi pada 2023, penurunan pada 2024 perlu menjadi perhatian. Diperlukan penguatan kembali komitmen dan implementasi kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan agar capaian IPBK dapat kembali meningkat dan berkelanjutan.

s. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber: DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten, 2025

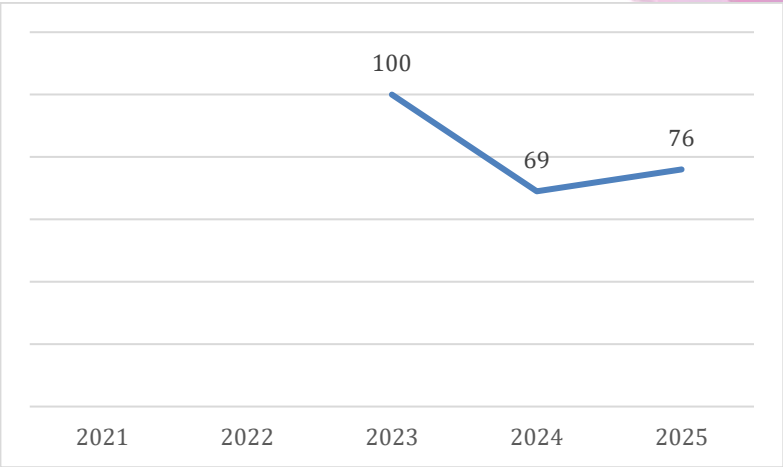
Gambar 2.48 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Gambar Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menunjukkan tren penurunan yang konsisten selama periode 2021–2025. Data tahun 2025 belum rilis. Pada tahun 2021, nilai IKG tercatat sebesar 0,391, yang mengindikasikan tingkat ketimpangan gender yang masih relatif tinggi. Pada tahun 2022, nilai IKG menurun cukup signifikan menjadi 0,229. Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2023 dengan nilai IKG sebesar 0,190, dan kembali menurun pada tahun 2024 hingga mencapai 0,162. Penurunan nilai IKG menunjukkan semakin berkurangnya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan.

Secara keseluruhan, penurunan IKG yang berkelanjutan mencerminkan adanya kemajuan dalam upaya pengarusutamaan gender, peningkatan akses dan partisipasi perempuan, serta perbaikan kesetaraan gender dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik. Capaian ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan agar kesetaraan gender dapat terwujud secara lebih optimal.

t. Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitas dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang Ketenagakerjaan

Perkembangan Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitas dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber: Disperinaker Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.49 Jumlah penyangang disabilitas yang mendapatkan fasilitas dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang Ketenagakerjaan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Gambar di atas menunjukkan perkembangan jumlah penyangang disabilitas yang mendapatkan fasilitas dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang ketenagakerjaan pada periode 2021–2025. Pada Tahun 2021 dan 2022 data masih belum ada karena ULD bidang ketenagakerjaan baru ada di tahun 2023. Bentuk fasillitasi dari ULD bidang ketenagakerjaan berupa sosialisasi, konsultasi, maupun pelatihan. Pada tahun 2023, jumlah penerima fasilitas tercatat paling tinggi, yaitu sebanyak 100 orang. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 69 orang. Memasuki tahun 2025, jumlah penerima kembali mengalami peningkatan menjadi 76 orang, meskipun belum mencapai angka seperti pada tahun 2023. Secara umum, data ini menggambarkan adanya fluktuasi dalam pemberian fasilitas ULD, dengan penurunan pada 2024 yang kemudian diikuti oleh upaya pemulihan pada 2025.

u. Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS)

Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) adalah alat ukur untuk menilai kualitas hidup dan perkembangan kesejahteraan masyarakat, mencakup dimensi objektif (pendapatan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan) dan subjektif (persepsi, partisipasi), yang dikembangkan Kementerian Sosial bersama BPS dan Bappenas sebagai dasar evaluasi program sosial dan perbaikan kebijakan untuk memastikan hak-hak warga negara terpenuhi secara menyeluruh. Indeks ini biasanya disusun dari tiga dimensi antara lain kebutuhan dasar, peranan sosial, dan keberdayaan ekonomi. Sasaran cakupan dan batasan kelompok sasaran dalam IKESOS antara lain: lansia (individu yang berusia lebih dari 60 tahun); penyangang disabilitas memenuhi kriteria kecacatan, ketelantaran, keterpencilan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, dan korban diskriminasi; serta seluruh lapisan masyarakat.

Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) menghasilkan nilai yang berada dalam rentang 0 hingga 100. Nilai yang mendekati 100 menunjukkan tingkan kesejahteraan sosial yang semakin baik. Perhitungan IKESOS di level kabupaten baru dilakukan di tahun 2025 dan masih belum rilis secara resmi. Nilai IKESOS tingkat Nasional pada



Tahun 2025 mencapai 50,56. Sedangkan tingkat Jawa Tengah mencapai 55,81. Kabupaten Klaten telah melampaui capaian Nasional dan Jawa Tengah yaitu 57,83. Dari nilai indeks tersebut menunjukkan tingkat kesejahteraan sosial Kabupaten Klaten pada kategori sedang atau menengah, yang mengindikasikan bahwa kondisi masyarakat yang cukup baik namun masih memiliki ruang untuk peningkatan di berbagai aspek seperti Pendidikan, Kesehatan, pendapatan dan lingkungan hidup, serta mencerminkan bahwa Sebagian besar kebutuhan dasar masyarakat mulai terpenuhi, tetapi perlu perhatian pada peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan.

v. Indeks Zakat Nasional

Indeks Zakat Nasional (IZN) adalah alat ukur yang dikembangkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk menilai kinerja pengelolaan zakat di Indonesia. Indeks ini mengevaluasi aspek regulasi dan dukungan pemerintah, kualitas database muzaki dan mustahik, pengelolaan kelembagaan zakat dan dampak zakat terhadap kesejahteraan penerima zakat. BAZNAS Kabupaten Klaten telah aktif melakukan koordinasi zakat, infak, dan sedekah (ZIS) bersama pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penghimpunan ZIS.

Kegiatan sosialisasi zakat-infak-sedekah (ZIS) juga telah dilaksanakan oleh BAZNAS Klaten bersama instansi lain. Sedangkan Pemerintah Kabupaten telah mengeluarkan Surat Edaran Bupati Klaten Nomor B/400.8.1/935/2025/03/M tanggal 3 Oktober 2025 tentang Zakat, Infak dan Sedekah Atas Gaji dan Tambahan Penghasilan Bagi Anggota DPRD, ASN, Pegawai Rumah Sakit, Karyawan BUMN/BUMD dan Instansi Vertikal yang Beragama Islam di Kabupaten Klaten untuk berkontribusi dalam meningkatkan Indeks Zakat Nasional (IZN). Secara keseluruhan, pengelolaan zakat BAZNAS Kab. Klaten di tahun 2025 masuk dalam kategori Cukup Baik dengan nilai IZN 0,39. Nilai masing-masing indeks indikator penyusunan IZN dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.31 Tabel Nilai Indikator Penyusunan IZN Kabupaten Klaten Tahun 2025

No	Indikator / Indeks	Nilai	Kategori
1	Dukungan APBN/APBD	> 0,90	Sangat Baik
2	Literasi Dakwah Zakat	0,85	Sangat Baik
3	Indeks Tata Kelola	0,60	Cukup Baik
4	Penguatan Jaringan	0,58	Cukup Baik
5	Regulasi	0,50	Cukup Baik
6	Penguatan Database	0,38	Kurang Baik
7	Indeks Dampak Zakat	0,10	Tidak Baik

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional, 2026

Jika dilihat berdasarkan nilai masing-masing indeks indikator penyusunan IZN, indikator dukungan APBN/APBD merupakan indikator yang memiliki nilai tertinggi atau termasuk dalam kategori Sangat Baik dengan nilai lebih dari 0,90. Disusul indikator literasi dakwah zakat yang juga berada pada kategori Sangat Baik dengan nilai 0,85.



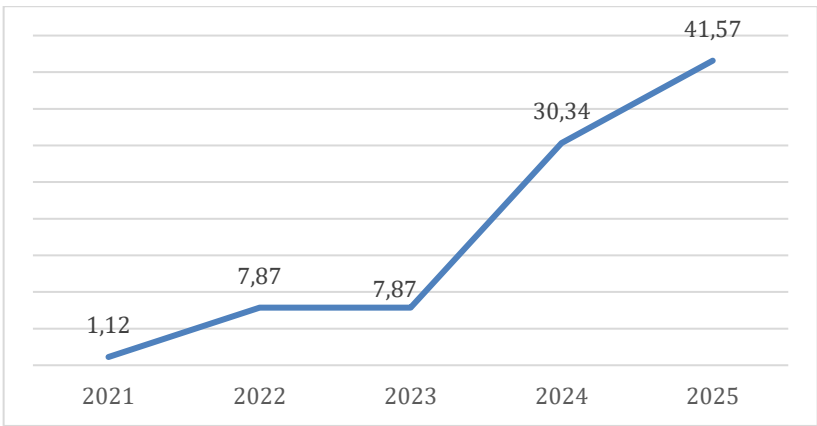
Kemudian indeks tata kelola (0,60), indikator penguatan jaringan (0,58) dan indikator regulasi (0,50) berada pada kategori Cukup Baik.

Adapun indikator penguatan database berada pada kategori Kurang Baik dengan nilai 0,38 sehingga perlu dilakukan pemutakhiran (updating) data secara berkala dan akurat mengenai data mustahik maupun muzaki perorangan agar penyaluran lebih tepat sasaran. Sedangkan indeks dampak zakat berada pada kategori Tidak Baik dengan nilai 0,10 sehingga perlu evaluasi mendalam pada program pendayagunaan agar bantuan yang diberikan benar-benar efektif dalam membantu mustahik (penerima zakat) keluar dari garis kemiskinan, hingga mampu bertransformasi menjadi muzaki (pembayar zakat).

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya, Olahraga dan Literasi

a. Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang Dilestarikan

Perkembangan Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber: Disbudporapar Kabupaten Klaten, 2025

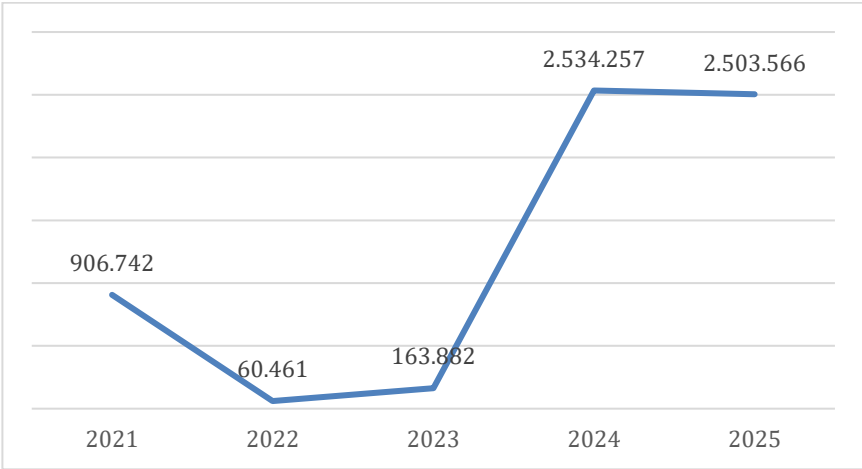
Gambar 2.50 Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Gambar di atas menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021, persentase pelestarian masih relatif rendah, yaitu sebesar 1,12 persen. Pada 2022 terjadi peningkatan menjadi 7,87% dan angka tersebut bertahan pada 2023. Peningkatan yang sangat tajam mulai terlihat pada tahun 2024, ketika persentase CB dan WBTB yang dilestarikan melonjak menjadi 30,34 persen. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2025 dengan capaian sebesar 41,57 persen, yang merupakan nilai tertinggi selama periode pengamatan. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya komitmen dan upaya yang semakin kuat dalam pelestarian cagar budaya dan warisan budaya tak benda. Peningkatan signifikan sejak 2024 mengindikasikan penguatan kebijakan, program, serta keterlibatan berbagai pihak dalam menjaga dan melestarikan kekayaan budaya daerah secara berkelanjutan.



b. Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah

Perkembangan jumlah pengunjung tempat bersejarah di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber: Disbudporapar Kabupaten Klaten, 2025

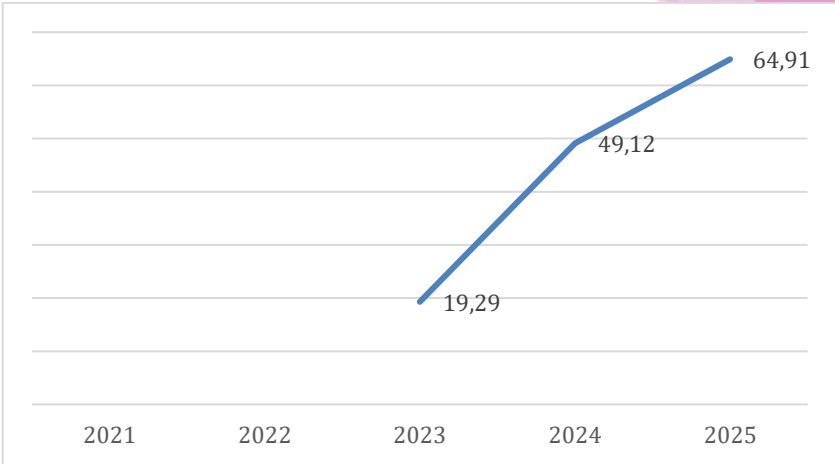
Gambar 2.51 Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah Di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Gambar jumlah pengunjung tempat bersejarah menunjukkan dinamika kunjungan yang berfluktuasi selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021, jumlah pengunjung tercatat sebesar 906.742 orang. Namun, pada 2022 terjadi penurunan yang sangat tajam hingga mencapai 60.461 orang, yang mengindikasikan masih terbatasnya aktivitas kunjungan, kemungkinan akibat pembatasan kegiatan dan pemulihan sektor pariwisata. Pada tahun 2023, jumlah pengunjung mulai menunjukkan peningkatan menjadi 163.882 orang, meskipun masih relatif rendah dibandingkan kondisi sebelum penurunan. Lonjakan kunjungan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2024, dengan jumlah pengunjung mencapai 2.534.257 orang. Pada 2025, jumlah pengunjung sedikit menurun menjadi 2.503.566 orang, namun tetap berada pada level yang tinggi.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya pemulihan yang sangat kuat pada kunjungan ke tempat bersejarah sejak tahun 2023, dengan puncak kunjungan pada 2024. Tingginya jumlah pengunjung pada dua tahun terakhir mencerminkan meningkatnya minat masyarakat terhadap wisata sejarah serta membaiknya kondisi sektor pariwisata dan kegiatan budaya.

c. Persentase Kelompok Kesenian Yang Aktif Terlibat/ Mengadakan Pertunjukan Kesenian Dalam 1 Tahun Terakhir

Perkembangan Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/ mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 (satu) tahun terakhir di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber: Disbudporapar Kabupaten Klaten, 2025

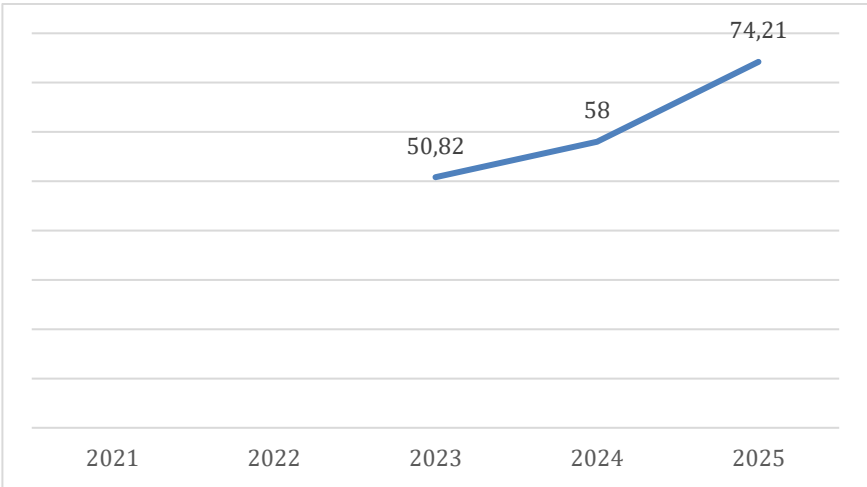
Gambar 2.52 Kelompok Kesenian Yang Aktif Terlibat/ Mengadakan Pertunjukan Kesenian Dalam 1 (Satu) Tahun Terakhir Di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Gambar persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat atau mengadakan pertunjukan kesenian dalam satu tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan pada periode 2023–2025. Pada tahun 2023, persentase kelompok kesenian yang aktif tercatat sebesar 19,29 persen. Pada tahun 2024, angka tersebut meningkat tajam menjadi 49,12 persen, menunjukkan adanya peningkatan aktivitas kesenian yang cukup pesat. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2025 dengan persentase mencapai 64,91 persen, yang merupakan capaian tertinggi selama periode pengamatan. Untuk data tahun 2021 dan 2022 belum tersedia.

Secara keseluruhan, peningkatan ini mencerminkan semakin menggeliatnya aktivitas kelompok kesenian serta meningkatnya partisipasi pelaku seni dalam penyelenggaraan pertunjukan. Hal ini menunjukkan keberhasilan upaya pembinaan, fasilitasi, dan promosi kesenian, sekaligus menjadi indikator positif bagi penguatan ekosistem seni dan budaya di daerah.

d. Indeks Pembangunan Pemuda

Perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber: Disbudporapar Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.53 Indeks Pembangunan Pemuda di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

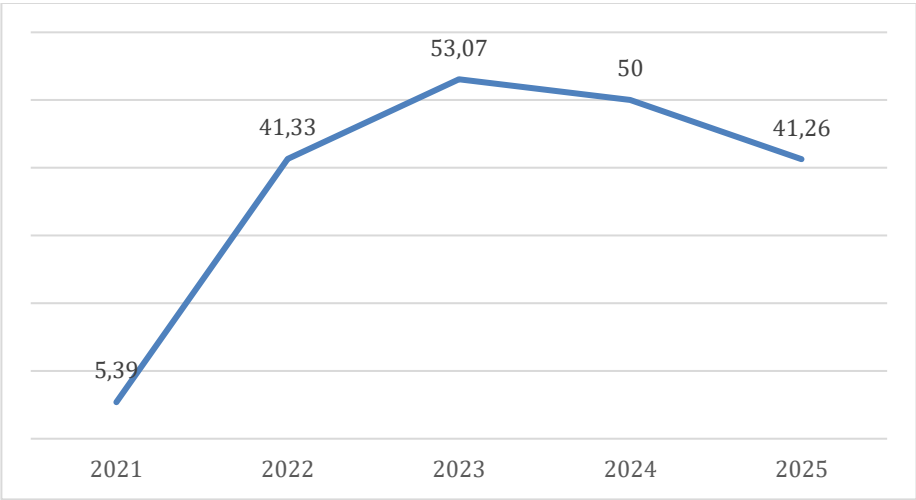


Gambar Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menunjukkan tren peningkatan yang positif selama periode 2023–2025. Pada tahun 2023, nilai IPP tercatat sebesar 50,82. Selanjutnya, pada tahun 2024 IPP meningkat menjadi 58, menunjukkan adanya perbaikan pada berbagai aspek pembangunan kepemudaan. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada tahun 2025, ketika IPP mencapai 74,21. Kenaikan ini mengindikasikan semakin baiknya kualitas dan peran pemuda dalam pembangunan, baik dari aspek pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, partisipasi, maupun kepemimpinan. Untuk data tahun 2021 dan 2022 belum tersedia.

Secara keseluruhan, tren peningkatan IPP mencerminkan keberhasilan program dan kebijakan yang mendukung pemberdayaan pemuda. Capaian ini menjadi modal penting untuk mendorong kontribusi pemuda yang lebih optimal dalam pembangunan daerah di masa mendatang.

e. Persentase Prestasi Olahraga

Perkembangan Persentase Prestasi Olahraga di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber: Disbudporapar Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.54 Persentase Prestasi Olahraga di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Gambar persentase prestasi olahraga menunjukkan perkembangan yang berfluktuasi selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021, persentase prestasi olahraga masih relatif rendah, yaitu sebesar 5,39 persen. Pada 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan menjadi 41,33 persen. Peningkatan berlanjut pada tahun 2023, dengan persentase prestasi olahraga mencapai 53,07 persen, yang merupakan capaian tertinggi selama periode pengamatan. Namun, pada 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 50 persen. Penurunan yang lebih tajam terjadi pada tahun 2025, ketika persentase prestasi olahraga turun menjadi 41,26 persen.

Secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami peningkatan yang sangat baik hingga tahun 2023, tren penurunan pada dua tahun terakhir menunjukkan perlunya penguatan kembali pembinaan atlet, peningkatan kualitas sarana dan prasarana



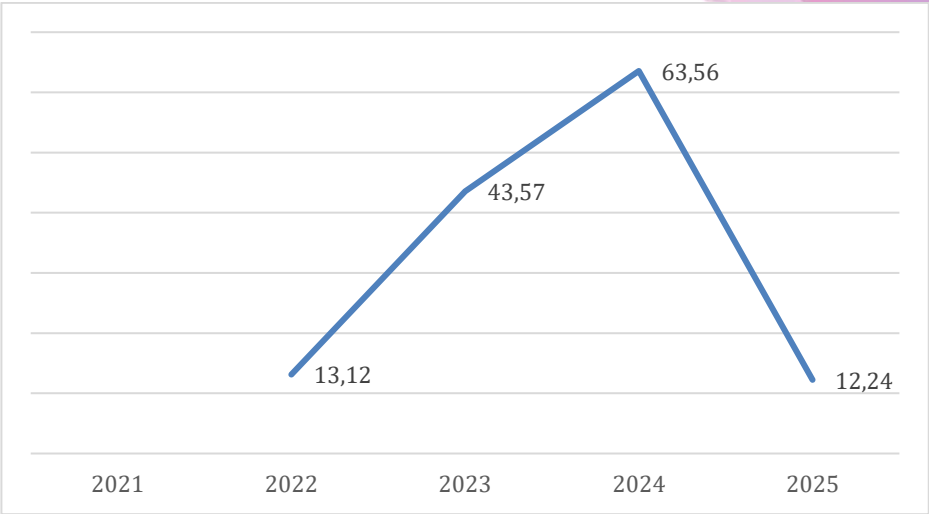
olahraga, serta konsistensi dukungan terhadap kegiatan olahraga agar prestasi dapat kembali meningkat dan berkelanjutan

f. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Literasi Pembangunan Masyarakat didefinisikan sebagai sebuah angka yang mencerminkan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan, yang ditunjukkan oleh rata-rata hasil pembagian antara Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) dengan Aspek Masyarakat (AM) dibandingkan dengan masing-masing standar UPLMnya. Adapun unsur-unsur yang dinilai dalam Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yaitu pemerataan layanan perpustakaan (UPLM1), ketercukupan koleksi perpustakaan (UPLM2), ketercukupan sumber daya manusia/tenaga perpustakaan (UPLM3), tingkat kunjungan masyarakat (UPLM4), jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP (UPLM5), keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan (UPLM6), dan jumlah anggota perpustakaan (UPLM7). Dengan berbagai unsur tersebut, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat diharapkan dapat menjadi ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat yang dapat meningkatkan literasi masyarakat dalam suatu daerah.

Kajian Indeks Literasi Pembangunan Masyarakat pada Kabupaten Klaten dilaksanakan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mulai tahun 2022 sehingga pada tahun 2021, belum dapat diketahui hasil capaiannya. Hasil pengukuran Indeks Literasi Pembangunan Masyarakat pada Kabupaten Klaten tahun 2022 mencapai 13,12 dengan kategori Sedang berdasarkan target Renstra Perpustakaan Nasional Republik Indonesia setelah dikonversi. Sementara pada tahun 2023, Indeks Pembangunan literasi Masyarakat Kabupaten Klaten mencapai 43,57 dan mengalami peningkatan sebesar 30,45 dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Klaten mencapai 63,56 dengan kategori Sedang dan mengalami peningkatan sebesar 19,99 dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2025, IPLM menggunakan instrumen dan metodologi terbaru sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2025. Perubahan ini berdampak terjadinya ketidaksesuaian antara capaian dengan target yang telah ditetapkan ditahun sebelumnya. Saat ini, pengukuran IPLM dititikberatkan pada dimensi kinerja sebesar 70% sedangkan dimensi kepatuhan/fisik sebesar 30 persen. Berdasarkan hal tersebut, hasil pengukuran tahun 2025 tidak menunjukkan penurunan atau kenaikan, melainkan nilai baru dalam perspektif pengukuran yang lebih substantif terhadap kinerja perpustakaan. Capaian Kabupaten Klaten tahun 2025 sebesar 12,24. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan perkembangan literasi masyarakat yang terus membaik dari tahun ke tahun.

Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 disajikan pada gambar di bawah ini.

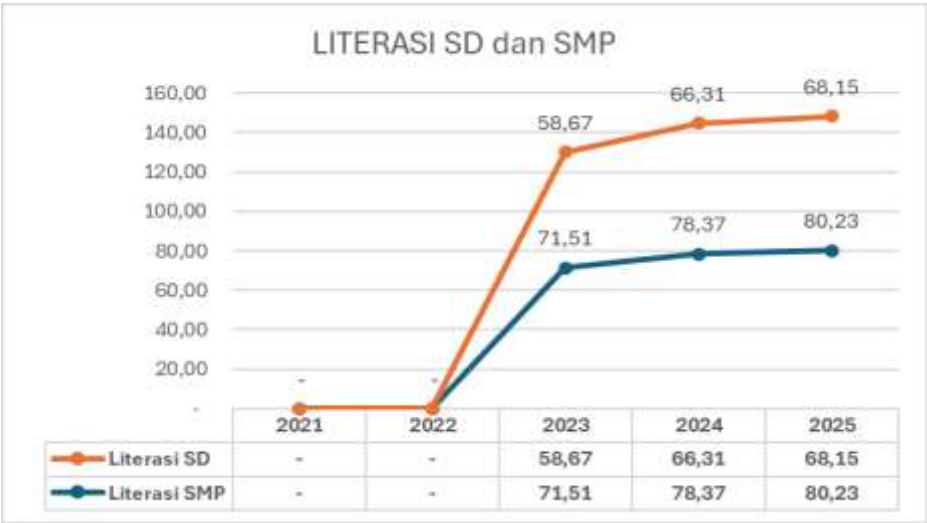


Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.55 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

g. Literasi membaca SD dan SMP serta Numerasi SD danSMP

1. Literasi Membaca SD dan SMP



Sumber : Dinas Pendidikan Klaten, 2025

Gambar 2.56 Kemampuan Literasi SD dan SMP Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Capaian literasi pada jenjang SD dan SMP menunjukkan tren peningkatan yang positif sejak data mulai tersedia pada tahun 2023. Untuk jenjang SD, capaian literasi pada tahun 2023 tercatat sebesar 58,67%, kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi 66,31%, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2025 menjadi 68,15%. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan kemampuan literasi peserta didik sekolah dasar yang didukung oleh berbagai intervensi pembelajaran dan penguatan budaya literasi di satuan pendidikan.

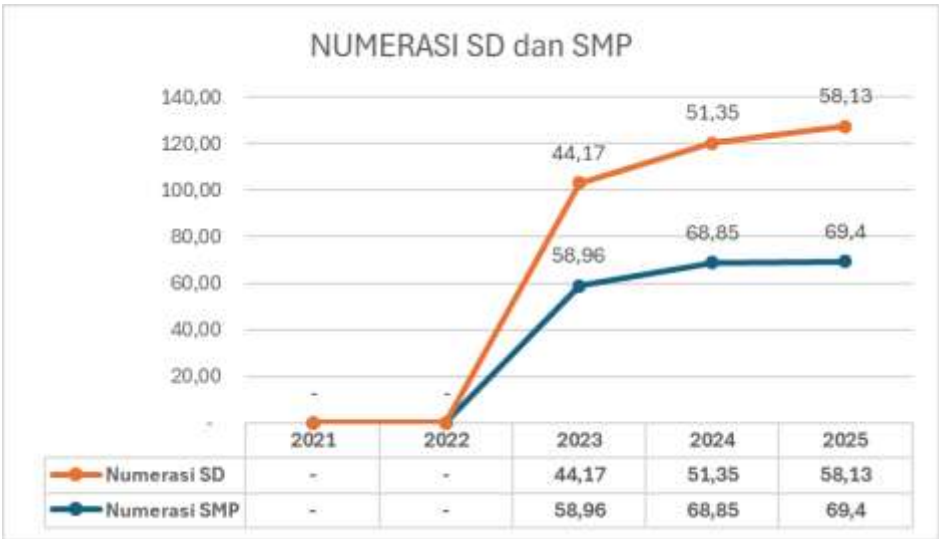
Sementara itu, capaian literasi SMP berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan SD dan menunjukkan peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2023, literasi SMP mencapai 71,51%, meningkat menjadi 78,37% pada tahun 2024, dan kembali naik pada tahun 2025 hingga 80,23%. Tren ini mencerminkan semakin



matangnya kemampuan literasi peserta didik pada jenjang pendidikan menengah pertama.

Secara keseluruhan, meskipun data literasi belum tersedia pada tahun 2021 dan 2022, capaian sejak tahun 2023 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mempercepat peningkatan literasi, khususnya pada jenjang SD, agar kesenjangan capaian antar jenjang pendidikan dapat semakin diperkecil.

2. Numerasi SD dan SMP



Sumber : Dinas Pendidikan Klaten, 2025

Gambar 2.57 Kemampuan Numerasi SD dan SMP Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Capaian numerasi pada jenjang SD dan SMP menunjukkan kecenderungan peningkatan yang cukup signifikan sejak data tersedia pada tahun 2023. Pada jenjang SD, capaian numerasi tahun 2023 tercatat sebesar 44,17%, kemudian meningkat menjadi 51,35% pada tahun 2024 dan kembali naik pada tahun 2025 hingga mencapai 58,13%. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kemampuan dasar berhitung dan pemahaman numerik peserta didik sekolah dasar, meskipun capaian tersebut masih memerlukan penguatan agar mencapai tingkat yang lebih optimal.

Sementara itu, capaian numerasi SMP berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan SD dan juga menunjukkan tren positif. Pada tahun 2023, numerasi SMP mencapai 58,96%, meningkat cukup tajam pada tahun 2024 menjadi 68,85%, dan relatif stabil dengan peningkatan pada tahun 2025 menjadi 69,40%. Hal ini mencerminkan bahwa kemampuan numerasi peserta didik pada jenjang SMP semakin berkembang seiring dengan peningkatan kompleksitas pembelajaran matematika dan penerapan strategi pembelajaran yang lebih efektif.

Secara keseluruhan, meskipun data numerasi belum tersedia pada tahun 2021 dan 2022, capaian sejak tahun 2023 menunjukkan progres yang positif. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan dan terarah, khususnya pada jenjang SD,



sebagai fondasi utama untuk mendorong peningkatan numerasi yang lebih merata dan berkelanjutan hingga jenjang pendidikan selanjutnya

h. Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya dan Mengarusutamakan Kebudayaan

Perkembangan satuan pendidikan yg mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya & mengarusutamakan kebudayaan di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber : Dinas Pendidikan Klaten, 2025

Gambar 2.58 Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru Mengajar Mulok Bahasa Daerah/Seni Budaya & Mengarustamakan Kebudayaan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Persentase satuan pendidikan yang memiliki guru pengajar muatan lokal bahasa daerah dan/atau seni budaya pada periode tahun 2021–2025 menunjukkan capaian yang konsisten dan optimal, yaitu sebesar 100% setiap tahun. Capaian ini menandakan bahwa seluruh satuan pendidikan telah memenuhi kebutuhan pendidik untuk mendukung pembelajaran muatan lokal, khususnya dalam pelestarian bahasa daerah dan pengembangan seni budaya. Konsistensi capaian 100% ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam menjaga identitas budaya lokal melalui jalur pendidikan formal. Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah menjaga keberlanjutan kualitas pembelajaran muatan lokal agar tidak hanya terpenuhi dari sisi ketersediaan guru, tetapi juga dari mutu proses dan hasil pembelajaran.

Terkait urusan kebudayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, terdapat 10 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang menjadi fokus perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan di Indonesia. Di Kabupaten Klaten berdasarkan dokumen Pokok-pokok Pikiran Kebudayaan yang disusun tahun 2024, secara keseluruhan terdapat 636 OPK yang tersebar dalam 10 kategori dan cagar budaya. Manuskrip menjadi sal satu domain yang teridentifikasi dengan jumlah sebanyak 34 OPK. Tradisi lisan mencatat jumlah yang lebih



besar yaitu 73 OPK. Adat istiadat menjadi salah satu kategori dominan dengan total 105 OPK diikuti oleh ritus yang memiliki 94 OPK. Pengetahuan tradisional menunjukkan kontribusi signifikan dengan jumlah 90 OPK, sedangkan teknologi tradisional tercatat memiliki 27 OPK. Seni sebagai salah satu aspek budaya yang kaya menjadi domain dengan jumlah OPK paling sedikit hanya 2. Selain itu, permainan rakyat mencatatkan 61 OPK, sedangkan olahraga tradisional terdata sebanyak 20 OPK. Cagar Budaya menambah daftar ini dengan jumlah 16 objek.

i. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara

Secara makro optimalisasi sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu industri yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan taraf hidup, yang pada akhirnya secara simultan dapat menggerakkan sektor-sektor produksi lain. Sementara itu, arah kebijakan pengembangan sektor pariwisata nasional meliputi pemasaran pariwisata nasional dengan mendatangkan wisatawan baik domestik maupun mancanegara, pembangunan destinasi pariwisata dengan meningkatkan daya tarik daerah tujuan agar mampu bersaing di dalam maupun luar negeri.

Kabupaten Klaten merupakan sebuah kabupaten yang terletak di antara Yogyakarta dan Surakarta, hal ini menjadikan Kabupaten Klaten memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata dan menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Potensi wisata yang banyak diminati wisatawan mancanegara yaitu keindahan alamnya yang masih asri, berpadu dengan kekayaan budaya Jawa yang kental, menjadikan Klaten sebagai destinasi alternatif yang unik dan autentik. Selain itu, Kabupaten Klaten juga terkenal dengan seribu mata air yang menawarkan pengalaman berenang di air jernih dengan suasana pedesaan yang tenang.

Selain wisata alam, Klaten juga memiliki daya tarik sejarah dan budaya yang kuat. Keberadaan Candi Prambanan dan candi-candi kecil di sekitarnya menjadi magnet bagi wisatawan mancanegara yang ingin menelusuri jejak peradaban Hindu-Buddha di Jawa. Interaksi langsung dengan masyarakat lokal, seperti mengikuti aktivitas pertanian, belajar membatik, atau mencicipi kuliner tradisional, memberikan pengalaman mendalam yang sulit ditemukan di destinasi wisata massal. Kehadiran wisatawan mancanegara turut memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal dimana homestay, usaha kuliner, pemandu wisata, hingga pengrajin lokal merasakan manfaat dengan meningkatnya kunjungan wisata. Dengan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dan promosi yang tepat, Klaten berpotensi terus berkembang sebagai destinasi wisata internasional yang mengedepankan keaslian, keramahan, dan kearifan lokal. Pengembangan pariwisata juga tidak akan terlepas dari pembangunan di bidang lain, seperti pengembangan infrastruktur daerah dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam proses pembangunan.

Berikut disajikan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Kabupaten Klaten tahun 2021-2025.



Tabel 2.32 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancangara Di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Indikator	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	463	60.461	163.882	214.811	214.823

Sumber: Disbudporapar Kabupaten Klaten, 2026

Berdasarkan data diatas, jumlah kunjungan wisata mancanegara dari tahun 2021 – 2025 selalu meningkat dari 463 orang ditahun 2021 menjadi 214.823 pada tahun 2025, hal ini didukung dengan dibukanya kembali kunjungan wisata setelah pandemi Covid-19 seiring dengan kelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada tahun 2022 maka kegiatan masyarakat untuk berwisata semakin meningkat termasuk wisatawan mancanegara.

Di sisi lama tinggal wisatawan nusantara rata-rata hanya 1 (satu) hari dan untuk wisatawan mancanegara rata-rata hanya 1 (satu) hari. Hal ini disebabkan kebanyakan para wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara hanya sekedar berkunjung di tempat daya tarik wisata saja dan lebih menyukai menginap di Yogyakarta ataupun Surakarta. Ke depan perlu ada penambahan amenitas khususnya untuk jasa akomodasi (Hotel dan Homestay/pondok wisata) dan pengembangan daya tarik wisata baru supaya jumlah kunjungan wisata semakin meningkat serta lama kunjungan wisatawan pun semakin lama.

Demikian juga dengan rata-rata pengeluaran relatif belum begitu besar. Untuk wisatawan nusantara dan mancanegara hanya berkisar antara Rp. 1.000.- s/d Rp.1.500.000.- dan wisatawan mancanegara berkisar Rp.1.500.000.- s/d Rp.2.500.000.-

Tabel 2.33

Jumlah Daya Tarik Wisata, Pengunjung, Lama Tinggal dan Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah Daya tarik wisata (obyek)	Pengunjung		Lama Tinggal (hari)		Rata-rata Pengeluaran (Rp)	
		Wisnu	Wisman	Wisnu	Wisman	Wisnu	Wisman
2021	82	1.632.085	463	1	1	1.000.000	1.500.000
2022	82	4.777.338	60.461	1	1	1.000.000	1.500.000
2023	122	6.309.870	163.882	1	1	1.000.000	1.500.000
2024	129	6.647.805	214.811	1	1	1.000.000	1.500.000
2025	132	7.358.504	214.823	1	1	1.000.000	1.500.000

Sumber: Disbudporapar Kabupaten Klaten, 2026

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah daya tarik wisata menunjukkan peningkatan yang konsisten, dari 82 obyek pada tahun 2021–2022 menjadi 132 obyek pada tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan adanya pengembangan, penataan, serta pengakuan terhadap potensi destinasi wisata baru yang berkontribusi pada daya tarik daerah. Dari sisi jumlah pengunjung, wisatawan nusantara (wisnus) mengalami lonjakan



yang sangat signifikan. Pada tahun 2021 tercatat 1.632.085 kunjungan, meningkat drastis pada tahun 2022 menjadi 4.777.338, dan terus bertambah hingga mencapai 7.358.504 kunjungan pada tahun 2025. Tren ini menunjukkan pemulihan pariwisata pascapandemi sekaligus meningkatnya minat wisatawan domestik terhadap destinasi wisata daerah.

Sementara itu, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) juga menunjukkan pertumbuhan yang positif, dari 463 kunjungan pada tahun 2021, jumlah wisman meningkat menjadi 60.461 pada tahun 2022, kemudian melonjak signifikan pada tahun 2023 hingga 163.882, dan relatif stabil pada tahun 2024–2025 di kisaran 214 ribu kunjungan. Hal ini mengindikasikan mulai pulihnya kepercayaan wisatawan mancanegara serta meningkatnya eksposur destinasi di tingkat internasional. Lama tinggal baik wisnus maupun wisman tercatat stabil pada angka 1 hari setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa pola kunjungan masih didominasi oleh wisata harian (*one day trip*), sehingga peluang peningkatan lama tinggal masih terbuka lebar melalui pengembangan paket wisata terpadu dan atraksi berbasis event

Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PAD Tahun 2021-2025 disajikan pada tabel di bawah ini

Tabel 2.34 Sumbangan Sektor Pariwisata terhadap PAD Tahun 2021-2025

No	Jenis PAD	Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Pajak Hotel Bintang	762.651.635	1.136.795.371	1.177.765.048	1.261.258.640	1.097.354.973
2	Pajak Hotel Melati/Motel	127.217.828	165.587.907	182.714.451	197.572.602	199.554.958
3	Pajak Rumah Makan	2.777.678.048	4.418.592.021	7.091.155.252	9.838.508.693	12.469.668.547
4	Pajak Catering catering	4.009.137.308	5.514.503.005	7.419.754.602	8.010.487.863	7.897.013.895
5	Pajak Pagelaran Kesenian/ Musik/ Tari/ Busana	23.754.600	278.295.615	279.572.356	946.967.106	385.490.095
6	Pajak Permainan Ketangkasan	145.883.750	356.336.000	253.111.183	283.911.019	955.177.173
7	Pajak Hiburan/ pertandingan Olahraga	120.860.500	49.409.300	546.832.500	599.738.158	1.714.871.274
8	Retribusi Daya tarik wisata	837.599.759	2.186.293.000	2.108.299.000	4.931.305.000	5.026.915.000
	Lain-lain				182.961.315	303.573.167
Jumlah		8.804.783.428	14.452.269.721	19.059.204.392	26.252.710.396	30.074.388.392

Sumber: Disbudporapar Kabupaten Klaten, 2026

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pariwisata dari pajak dan retribusi pariwisata menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama periode 2021–2025. Total Pendapatan Asli Daerah (PAD meningkat secara konsisten dari Rp.8.804.783.428 pada tahun 2021 menjadi Rp.30.074.388.392 pada tahun 2025, atau naik lebih dari tiga kali lipat dalam lima tahun



terakhir. Kontributor terbesar PAD Sektor Pariwisata berasal dari Pajak Rumah Makan, yang mengalami pertumbuhan sangat pesat, dari Rp.2.777.678.048 pada 2021 menjadi Rp.12.469.668.547 pada 2025. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya aktivitas usaha kuliner seiring pemulihan ekonomi dan berkembangnya sektor pariwisata. Pajak Catering juga memberikan kontribusi besar dan relatif stabil, dengan realisasi tertinggi pada tahun 2024 sebesar Rp.8.010.487.863, meskipun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2025.

Sektor Pajak Hotel Bintang dan Hotel Melati/Motel menunjukkan fluktuasi namun tetap berada pada tren positif, menandakan meningkatnya tingkat hunian akomodasi. Pajak Hiburan dan pertandingan Olahraga terdiri dari beberapa sektor yaitu Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi, Diskotek, Karaoke, Klub Malam, Bar, Olah Raga Permainan dan tempat rekreasi menunjukkan pertumbuhan yang kuat selama 5 (Lima) tahun terakhir. Sementara itu, Retribusi daya tarik wisata menunjukkan pertumbuhan yang sangat kuat, dari Rp. 837.599.759 pada tahun 2021 menjadi Rp.5.026.915.000 pada tahun 2025, mencerminkan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan optimalisasi pengelolaan destinasi wisata. Pendapatan dari pos lain-lain mulai tercatat sejak tahun 2024 dan turut menambah total PAD. Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa sektor pariwisata, kuliner, dan hiburan menjadi penggerak utama peningkatan PAD, serta memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan melalui peningkatan kualitas layanan, diversifikasi event, dan penguatan promosi daerah.

Dalam mendukung pengembangan kepariwisataan tidak terlepas dengan keterlibatan dari sektor ekonomi kreatif yang terdiri dari 17 sub sektor dan ekonomi kreatif telah mampu serta terbukti menjadi tulang punggung dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam pengembangan untuk menjadikan Kabupaten Klaten sebagai Kota Kreatif, pada tahun 2020 telah dilakukan kajian terkait Potensi Ekonomi Kreatif, dan dari 17 sub sector ekonomi kreatif telah terseleksi dan direkomendasikan 3 (tiga) sub sektor ekonomi kreatif yaitu sektor kriya, kuliner dan seni pertunjukkan, dimana produk tersebut memiliki daya ungkit bagi berkembangnya UMKM. Guna mendukung program tersebut, telah dibentuk Komite Ekonomi Kreatif (KEK) sebagai wadah Kelembagaan Ekonomi Kreatif berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 435/34 Tahun 2023 tanggal 9 Februari 2023, selain itu perlunya disusun Rencana Induk Ekonomi Kreatif dan adanya fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) untuk produk-produk UMKM dan ekonomi kreatif, untuk meningkatkan daya saing dan melindungi potensi tersebut, jangan sampai potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Klaten menjadi hilang. Untuk menghidupkan jalur-jalur perekonomian di Kabupaten Klaten dan menjadikan Kabupaten Klaten sebagai Kota Kreatif, pada tahun 2014 telah disusun masterplan Pengembangan Ekonomi Kreatif Jimbung Pandanaran dan Prambanan Deles.



Tabel 2.35 Jumlah Sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual di Kabupaten Klaten
Tahun 2021-2025

No.	Jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)	-	16	-	16	-
2.	Hak Cipta	-	1	-	-	-
3.	Merk	-	9	-	12	25
Jumlah		-	26	-	28	25

Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, 2026

Berdasarkan tabel diatas, rekapitulasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tahun 2021–2025 bahwa pada tahun 2021 dan tahun 2023 belum ada fasilitasi dan fasilitasi ada pada tahun 2022, 2024 dan 2025 dengan jumlah sertifikasi HKI pada tahun 2022 sebanyak 26 sertifikat, tahun 2024 sebanyak 28 sertifikat dan tahun 2025 ada 25 sertifikat, meliputi fasilitasi pembiayaan pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), Hak Cipta, dan Merek. Fasilitasi tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hasil karya, inovasi, identitas daerah, produk unggulan, serta kekayaan budaya yang dimiliki oleh masyarakat, pelaku usaha, perangkat daerah, lembaga pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Pelaksanaan program ini menunjukkan upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual sekaligus mendorong terciptanya ekosistem inovasi yang kondusif. Melalui pembiayaan pendaftaran HKI, diharapkan semakin banyak karya dan produk unggulan daerah yang memperoleh pengakuan hukum, sehingga memiliki nilai tambah, meningkatkan daya saing, memperkuat identitas daerah, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian pendaftaran HKI selama periode 2021–2025 mencerminkan meningkatnya perhatian terhadap perlindungan aset intelektual di Kabupaten Klaten. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Klaten akan terus memperluas jangkauan fasilitasi pendaftaran HKI, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak agar semakin banyak inovasi dan kekayaan intelektual daerah yang terlindungi secara hukum dan mampu mendukung pembangunan daerah yang berdaya saing.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang diberikan kepada hasillah pikir manusia dalam menciptakan produk, jasa atau proses yang berguna untuk masyarakat. Dalam Hak Kekayaan Intelektual, objek yang dilindungi adalah karya-karya yang dihasilkan oleh kemampuan inteletual manusia bahwa karya-karya tersebut memerlukan pengorbanan waktu, tenaga dan biaya sehingga perlu adanya penghargaan dan perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut. Seiring dengan kepedulian masyarakat Kabupaten Klaten tentang perlindungan Kekayaan Intelektual, peningkatan



kesadaran pelaku ekonomi kreatif untuk mendaftarkan serta melindungi produknya dan untuk peningkatan Kekayaan Intelektual Komunal.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Urusan Layanan Wajib

a. Capaian pelayanan SPM

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Klaten merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara umum, capaian pelayanan SPM Kabupaten Klaten menunjukkan tren yang semakin membaik, meskipun masih terdapat tantangan dalam aspek pemerataan, kualitas layanan, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Klaten terus mendorong penguatan perencanaan, penganggaran, serta koordinasi lintas perangkat daerah guna mengoptimalkan pencapaian SPM pada seluruh urusan pelayanan dasar.

1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Perkembangan satuan pendidikan yg mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/seni budaya & mengarusutamakan kebudayaan di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 disajikan pada gambar di bawah ini.



Sumber : Dinas Pendidikan Klaten, 2025

Gambar 2.59 Capaian SPM Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pendidikan pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan selama periode 2021–2025 menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dan relatif stabil. Pada jenjang SPM PAUD, capaian berada pada kisaran 99,74%–100%, dengan beberapa tahun mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa layanan pendidikan anak usia dini telah terpenuhi hampir secara menyeluruh sesuai standar yang ditetapkan.



Capaian SPM Pendidikan Dasar juga menunjukkan kondisi yang sangat baik, dengan capaian 100% pada sebagian besar tahun, meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2024 menjadi 99,64%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan layanan pendidikan dasar di daerah telah berjalan optimal dan konsisten.

Sementara itu, SPM Pendidikan Kesetaraan memperlihatkan capaian yang juga sangat tinggi, berada pada rentang 98,33%–100%, dengan tren peningkatan hingga kembali mencapai 100% pada tahun 2025. Secara keseluruhan, capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pemenuhan layanan pendidikan sesuai standar minimal. Ke depan, tantangan utama tidak hanya pada pemenuhan capaian kuantitatif, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan pendidikan agar capaian SPM tersebut berdampak nyata terhadap peningkatan mutu hasil belajar peserta didik.

2. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Bahwa urusan kesehatan merupakan urusan wajib dasar yang memiliki 12 indikator SPM yang harus dipenuhi. Berikut capaian SPM urusan kesehatan Kabupaten Klaten tahun 2021-2025.

Tabel 2.36 Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun Ke-				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil	%	95,24	100	100	100	100
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	99,99	100	100	100
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	98,21	100	100	100	100
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	90,66	95,16	100	100	100
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	58,28	94,03	100	100	100
6	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	84,98	100	100	100	100
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	93,41	100	100	100	100



No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun Ke-				
			2021	2022	2023	2024	2025
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	68,16	100	100	100	100
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	96,45	100	100	100	100
11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	24,65	100	100	100	100
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	88,35	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2025

Tabel 2.37 Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Kesehatan Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	$68,7 + 19 = 87,70$	TUNTAS MADYA
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	$75, 57 + 19,63 = 95,2$	TUNTAS UTAMA
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	$74,59 + 19,52 = 94,11$	TUNTAS UTAMA
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	$80 + 19,95 = 99,95$	TUNTAS UTAMA
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	$80 + 20 = 100$	TUNTAS PARIPURNA
6.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	$80 + 20 = 100$	TUNTAS PARIPURNA
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	$80 + 20 = 100$	TUNTAS PARIPURNA
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	$80 + 20 = 100$	TUNTAS PARIPURNA
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	$80 + 20 = 100$	TUNTAS PARIPURNA
10.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	$80 + 20 = 100$	TUNTAS PARIPURNA
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	$80 + 20 = 100$	TUNTAS PARIPURNA
12.	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	$80 + 20 = 100$	TUNTAS PARIPURNA

Sumber: Laporan SPM TA. 2025

Capaian indikator SPM bidang Kesehatan yang masih belum tercapai pada tahun 2025 sesuai dengan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan antara lain dapat dilihat pada tabel berikut



Tabel 2.38 Permasalahan dan Solusi yang Dihadapi di Bidang Kesehatan (Khususnya SPM)

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	Internal		
1.	Pengumpulan Data	Pengumpulan Data SPM Dinas Kesehatan dengan 12 indikator, dari 34 Puskesmas, 1 RS Umum Daerah, 1 RS Pusat, 1 RS Jiwa Daerah, 1 0 RS Swasta dan Balkesmas membutuhkan waktu lama, sementara dari Pemerintah Daerah laporan dibatasi tanggal 5	Dilakukan update data
2.	Perencanaan dan Penganggaran	Penghitungan pemenuhan kebutuhan sangat rigid, dan biasanya penghitungan pemenuhan kebutuhan pemenuhan mutu direncanakan secara global tidak dirinci per indikator SPM	Menyesuaikan dengan anggaran yang didapat

Sumber: Laporan SPM TA. 2025

3. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- 1) Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- 2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Mutu pelayanan dasar dalam SPM penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Penerima Layanan Dasar SPM ini adalah Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum. Mutu pelayanan dasar SPM penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari meliputi:

- 1) Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon).
- 2) Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023).
- 3) Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon).
- 4) Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.



Mutu pelayanan dasar dalam SPM Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Kuantitas ditunjukkan pada setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah, sedangkan Kualitas Pelayanan Dasar Domestik meliputi :

- 1) Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik.
- 2) Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota.
- 3) Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota.
- 4) Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar.

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan standar pelayanan minimal bidang Pekerjaan Umum dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.39 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Anggaran (Rp. 000)
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	380	Setiap Tahun	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	190	Setiap Tahun	714.100
					Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	190	Setiap Tahun	187.107,40
					Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap	Tutup Mutu	Setiap Tahun	-

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Anggaran (Rp. 000)
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	2050	Setiap Tahun	Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)			
					Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst.	Tutup Mutu	Setiap Tahun	-
					Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	1.025	Setiap Tahun	177.366
					Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	375	Setiap Tahun	2.718.669,50
					Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	405	Setiap Tahun	10.932.458
					Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	245	Setiap Tahun	4.177.050

Sumber: DPUPR Kabupaten Klaten, 2025

Pada tahun 2025 Target penerima layanan dasar Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sebanyak 380 orang, sedangkan untuk penerima layanan dasar Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik sebanyak 2.050 orang. Hasil capaian SPM urusan Pekerjaan



Umum untuk Penyediaan kebutuhan pokok air minum dan Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.40 Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp.000)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	380 orang	380 orang	100	901.207,40	844.707.599	93,73
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	2.050 orang	2.050 orang	100	18.005.543,50	17.072.010,038	94,55

Sumber: DPUPR Kabupaten Klaten, 2025

4. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) Penanganan rumah tidak layak huni; dan
- 2) Penyediaan sarana permukiman.

Pencapaian SPM urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada tahun 2022 adalah 0, dikarenakan Pemerintah Kabupaten Klaten selama 5 tahun terakhir ini tidak menangani penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota maupun fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Namun mulai tahun 2022 SPM di perumahan rakyat dan kawasan permukiman terkait Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota target kinerjanya tercapai 100% semua begitu juga ditahun 2025 dapat terlihat di tabel dibawah ini.

Tabel 2.41 Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	100	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian ha katas penggunaan tanah dan/ atau bangunan +rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni	100	100	100

Sumber: Disperakim Kabupaten Klaten, 2025



5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Pada Tahun 2025, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Klaten secara umum menunjukkan kinerja yang baik. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, penyediaan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana telah dilaksanakan secara responsif dan terkoordinasi, sehingga berkontribusi dalam meningkatkan rasa aman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.

Tabel 2.42 Realisasi Capaian SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Klaten Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar			Anggaran (Rp.000)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	APBD	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Kabupaten /Kota	60 orang	60 orang	100	5.533.567,060	4.796.433,32	86,68
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	4.460 orang	4.460 orang	100	126.748,250	108.171,100	85.34
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.920 orang	1.920 orang	100	2.149.002,844	1.914.432,70	89,08
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	255 orang	255 orang	100	1.860.745,300	1.375.326,968	73.91
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (DAMKAR)	150 orang	150 orang	100	9.559.615,967	8.091.606,867	84,64

Sumber :Satpol PP & Damkar dan BPBD Kabupaten Klaten, 2025

Tabel 2.43 Realisasi Capaian SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Klaten Tahun 2022-2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian SPM Tahun			
				2022	2023	2024	2025
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Kabupaten /Kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten /Kota	%	100	100	100	100
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian SPM Tahun			
				2022	2023	2024	2025
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (DAMKAR)	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP & Damkar dan BPBD Kabupaten Klaten, 2025

Adapun rincian Capaian Indeks Pencapaian (IP) Standar Pelayanan Minimal Sub Bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Untuk Jenis Pelayanan Dasar Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 2.44 Indeks Pencapaian (IP) SPM Bidang Urusan Trantibumlinmas

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (Ip Layanan + Ip Mutu)	Kategori Indeks SPM
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum Kabupaten /Kota	80 + 20 = 100	Tuntas Paripurna
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	80 + 20 = 100	Tuntas Paripurna
3.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	80 + 20 = 100	Tuntas Paripurna
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	80 + 20 = 100	Tuntas Paripurna
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (DAMKAR)	80 + 20 = 100	Tuntas Paripurna

Sumber : Satpol PP & Damkar dan BPBD Kabupaten Klaten, 2025

Permasalahan, kendala dan solusi dalam pelaksanaan SPM urusan Ketenteraman dan Ketertiban diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2.45 Kendala Dan Solusi Dalam Pelaksanaan SPM Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
Sub Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
I	Internal	Belum terpenuhinya standar sarana prasarana Satpol PP untuk mendukung penegakan Perda/perkada.	Penambahan anggaran Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana
		Adanya perbedaan persepsi dalam mengitung kebutuhan SPM	Bimtek, Desk dan Pelatihan SPM secara berkala
		Keterbatasan SDM Satpol PP dan PPNS.	Dibukanya rekrutmen ASN, PPPK dan pelaksanaan pelatihan PPNS
II	Eksternal	Masyarakat disekitar radius 0-50 meter penanganan pelanggaran Perda belum berkenan memberikan	Perlunya kerjasama dengan OPD terkait



No	Sumber	Permasalahan	Solusi
Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			
		data lengkap KTP dan KK untuk pendataan SPM	
Sub Bidang Kebencanaan			
I	Internal	Pengumpulan data korban bencana alam mengalami kesulitan dalam penyediaan data NIK dan Nomor KK	1. Mensinergikan data dengan Program Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) 2. Pencermatan data dan kerjasama dengan Disdukcapil dalam pendataan warga Negara
		Masih minimnya peralatan penanganan bencana	Penganggaran Pengadaan peralatan bencana
		Penganggaran sudah dilakukan, namun belum berdasarkan perhitungan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini karena tidak bisa memprediksi kejadian bencana.	Tetap menganggarkan sebagai antisipasi terhadap bencana yang mungkin terjadi dan 2. Melakukan identifikasi lebih lanjut mengenai rumah yang terletak di daerah rawan bencana
		Kurangnya pemahaman pentingnya Standar Pelayanan Minimal	Meningkatkan kapasitas pengampu SPM dengan Bimtek dan Pelatihan SPM
II	Eksternal	Masih kurangnya koordinasi lintas bidang dan lintas sektor dalam penerapanSPM	Melakukan rapat koordinasi mengenai penerapan SPM
Sub Bidang Kebencanaan			
I	Internal	Pengumpulan data korban kebakaran mengalami kesulitan dalam penyediaan data NIK dan Nomor KK	1. Mengkoordinasikan kemudahan akses data dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2. Memberdayakan Peran Relawan Pemadam dalam melakukan Pendataan korban kebakaran
		Penghitungan kebutuhan untuk mendukung layanan response time pelaksanaan Pemadaman dan pengendalian kebakaran masih sulit direalisasikan	Penyesuaian pagu anggaran untuk merealisasikan kebutuhan sarana prasarana dalam mendukung layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan di setiap Wilayah Manajemen Kebakaran
		Penyusunan rencana pemenuhan layanan dasar masih belum bisa menjangkau setiap Wilayah Manajemen Kebakaran	Penambahan Pos Layanan Pemadam kebakaran dengan memprioritaskan pada wilayah rawan kebakaran,Peningkatan jumlah Relawan Pemadam kebakaran dan optimalisasi peran SKKL (Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan)
		Keterbatasan Sarana dan Prasarana serta SDM Pemadam Kebakaran dalam rangka mendukung tercapainya waktu tanggap (respon time)	Penambahan sarana prasarana dan peningkatan kualitas SDM sebagai upaya peningkatan capaian pelaksanaan layanan dasar



No	Sumber	Permasalahan	Solusi
Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			
			Pemadam Kebakaran dan Operasi non kebakaran masih relatif cukup tinggi.
		Kesulitan dalam distribusi SDM, Sarana prasarana dan peralatan dalam mensikapi laporan kejadian kebakaran dan penyelamatan dalam waktu yang bersamaan.	Mengusulkan penambahan SDM, dan melibatkan Relawa Pemadam Kebakaran (Redkar) 2. Penyediaan sarana prasarana sesuai kebutuhan dan antisipasi kejadian yang bersamaan.
		Ketersediaan sumber air yang belum merata di setiap wilayah manajemen kebakaran.	Berkoordinasi dengan Dinas/Instansi lainya untuk membantu Suplai air.
		Akses jalan yang sempit dan banyaknya warga yang menonton di tempat kejadian kebakaran.	Peningkatan peran masyarakat dalam mitigasi kebakaran.
II	Eksternal	Akses jalan yang sempit dan banyaknya warga yang menonton di tempat kejadian kebakaran.	Peningkatan peran masyarakat dalam mitigasi kebakaran

Sumber : Satpol PP & Damkar dan BPBD Kabupaten Klaten, 2025

6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial merupakan tolok ukur pemenuhan pelayanan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sebagai bagian dari upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Klaten mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan sosial yang terukur, berkelanjutan, dan menjangkau kelompok rentan.

Tabel 2.46 Pelaksanaan SPM Urusan Sosial Kabupaten Klaten Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target		Realisasi Capaian SPM		Capaian
			Jumlah Orang yg Akan Dilayani (orang)	APBD 2025 (Rp.)	Jumah Orang yg Terlayani (orang)	APBD Tahun 2025 (Rp.)	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyan dang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	188	390.531.600	188	274.343.352	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	470	538.922.400	470	411.515.028	100



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Rencana Target		Realisasi Capaian SPM		Capaian
			Jumlah Orang yg Akan Dilayani (orang)	APBD 2025 (Rp.)	Jumah Orang yg Terlayani (orang)	APBD Tahun 2025 (Rp.)	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar lanjut usia Terlantar di Luar Panti	900	749.813.200	900	548.686.704	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	140	179.640.800	140	137.171.676	100
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	240	243.300.000	189	24.395.760	78,75

Sumber: DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten, 2025

Tabel 2.47 Indeks Pencapaian (IP) SPM Urusan Sosial Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	80 +20 = 100	Tuntas Paripurna
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	80 +20 = 100	Tuntas Paripurna
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	80 +20 = 100	Tuntas Paripurna
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	80 +20 = 100	Tuntas Paripurna
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	80 +20 = 100 (tidak terjadi bencana)	Tuntas Paripurna

Sumber: DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten, 2025

Kendala dalam pelaksanaan penerapan SPM Urusan Sosial di Kabupaten Klaten antara lain :

- a. Internal
 - 1. Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masih bersumber dari pendataan mandiri yang dilakukan oleh DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan data rujukan nasional, yaitu Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui aplikasi SIKS-NG milik Kementerian Sosial. Kondisi tersebut



mengakibatkan data sasaran SPM belum dapat diidentifikasi berdasarkan desil kesejahteraan yang diutamakan untuk sasaran SPM berada pada desil 1-5;

2. Keterbatasan akses dalam melakukan pengecekan desil kesejahteraan, karena bidang rehabilitasi sosial belum memiliki akun tersendiri pada sistem data yang digunakan, sehingga dalam pelaksanaannya masih harus menggunakan (meminjam) akun milik bidang dayalinjamsos. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data sebagai dasar pemenuhan SPM Bidang Sosial;
 3. Kesulitan dalam memilah kebutuhan secara spesifik karena perbedaan karakteristik kelompok sasaran serta keterbatasan komponen pada Standar Satuan Harga (SSH);
 4. Perencanaan anggaran yang tertuang pada dokumen Renstra DISSOSP3APPKB Tahun 2021-2025 belum sepenuhnya mengacu pada standar biaya minimal untuk setiap jenis layanan dasar. Saat ini, di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) hanya mengakomodasi penganggaran untuk 7 mutu layanan;
 5. Beberapa mutu layanan dasar belum dapat direalisasikan secara optimal karena alokasi anggaran yang tersedia belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan untuk keseluruhan 12 mutu layanan dasar SPM dan ada beberapa penganggarnya masih melekat atau terintegrasi dengan mutu layanan lainnya, sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya dapat berdiri sendiri sesuai standar yang ditetapkan;
 6. Sarana dan prasarana rumah singgah di Kabupaten Klaten saat ini belum sepenuhnya memenuhi standar kelayakan. Kondisi bangunan dan fasilitas pendukung yang terbatas serta sebagian mengalami kerusakan menyebabkan tingkat kenyamanan dan keamanan penerima manfaat (PPKS) belum optimal;
 7. Keterbatasan SDM pelaksana dalam penanganan bencana
- b. Eksternal
1. Kondisi kejadian bencana yang bersifat insidental, sehingga anggaran kebencanaan pada APBD tidak selalu dapat terserap optimal meskipun tetap harus disiapkan;
 2. Perubahan dan peningkatan kebutuhan sosial masyarakat yang dinamis, sehingga memerlukan penyesuaian kebijakan dan penganggaran secara berkelanjutan;
 - 3.

Solusi dan tindak lanjut untuk mengatasi kendala di atas adalah :



a. Internal

1. Melakukan sinkronisasi data PPKS hasil pendataan mandiri daerah dengan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui aplikasi SIKS-NG Kementerian Sosial, sehingga data sasaran SPM dapat terverifikasi dan terklasifikasi berdasarkan desil kesejahteraan;
2. Mengusulkan pembuatan akun akses masuk DTSEN pada Bidang Rehabilitasi Sosial untuk pengecekan desil kesejahteraan pada sistem data terkait (SIKS-NG/DTSEN);
3. Menyusun pedoman teknis internal perhitungan kebutuhan dan anggaran berbasis mutu layanan SPM serta melakukan usulan standar harga agar lebih merepresentasikan kebutuhan riil masing-masing mutu layanan dasar;
4. Melakukan penyesuaian perencanaan dan penganggaran pada dokumen perencanaan atau renstra tahun 2025-2030 yang dapat mengakomodasi penganggaran pada 12 mutu layanan dasar;
5. Memanfaatkan penganggaran dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang dilaksanakan oleh Sentra Antasena Magelang untuk mendukung dan menutup pemenuhan mutu layanan dasar SPM yang belum terakomodasi dalam APBD;
6. Mengajukan anggaran dalam rangka upaya renovasi dan peningkatan sarana prasarana rumah singgah agar dapat menyediakan tempat tinggal sementara yang layak, aman, dan manusiawi bagi PPKS selama masa pelayanan;
7. Menyiapkan relawan sosial melalui rekrutmen dan pelatihan Taruna Siaga Bencana dari masyarakat.

b. Eksternal

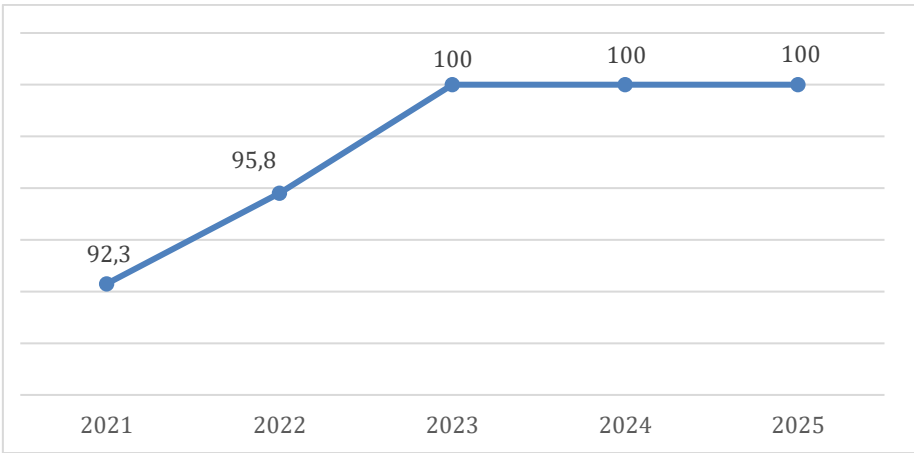
1. Mengarahkan anggaran kebencanaan agar dapat digunakan untuk kegiatan kesiapsiagaan, mitigasi, dan penguatan kapasitas, sehingga tetap bermanfaat meskipun tidak terjadi bencana besar.
2. Melakukan perencanaan dan penganggaran yang adaptif, pemutakhiran data PPKS secara berkala, serta penguatan koordinasi dan pemanfaatan berbagai sumber pendanaan agar kebijakan dan program tetap tepat sasaran.

b. Persentase Penegakan Perda

Persentase penegakan Peraturan Daerah (Perda) di Kabupaten Klaten menunjukkan peningkatan yang sangat positif selama periode 2021–2024. Capaian penegakan Perda meningkat dari 92,3% pada tahun 2021 menjadi 95,8% pada tahun 2022, dan mencapai 100% pada tahun 2023 serta dapat dipertahankan



hingga tahun 2024 dan 2025. Kondisi ini mencerminkan semakin efektifnya kinerja penegakan Perda yang didukung oleh penguatan peran Satpol PP, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta konsistensi pengawasan dan penindakan di lapangan, sehingga turut berkontribusi terhadap terwujudnya ketertiban umum dan kepastian hukum di Kabupaten Klaten.

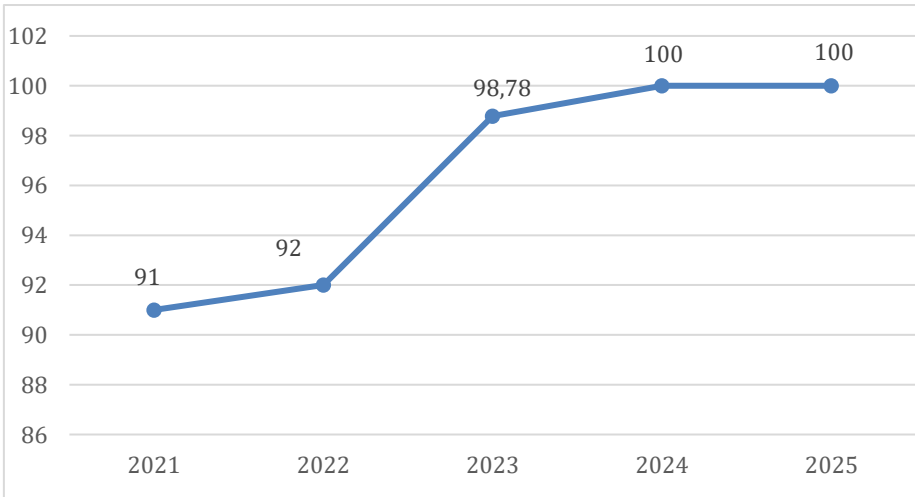


Sumber : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.60 Persentase Penegakan Perda Kabupaten Klaten 2021-2025

c. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Tingkat penyelesaian pelanggaran Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kabupaten Klaten menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan selama periode 2021–2024. Capaian penyelesaian pelanggaran K3 meningkat dari 91% pada tahun 2021 menjadi 92% pada tahun 2022, kemudian melonjak menjadi 98,78% pada tahun 2023, mencapai 100% pada tahun 2024 dan bertahan 100% di tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan adanya penguatan kinerja kelembagaan Satpol PP, baik dari sisi pengawasan, penindakan, maupun koordinasi lintas perangkat daerah. Namun demikian untuk mengantisipasi fluktuasi jumlah pelanggaran masih perlunya penguatan pendekatan preventif dan edukatif.



Sumber : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.61 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kabupaten Klaten 2021-2025



Pelanggaran terbanyak secara konsisten berasal dari reklame dan PKL, yang setiap tahunnya mencatat jumlah kasus cukup signifikan. Namun demikian, sebagian besar pelanggaran tersebut dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan, dengan rasio penyelesaian yang tinggi. dominasi pelanggaran pada sektor reklame dan PKL mengindikasikan masih adanya persoalan struktural, seperti rendahnya kepatuhan pelaku usaha, keterbatasan pemahaman regulasi, serta dinamika aktivitas ekonomi informal. Selain itu, meskipun tingkat penyelesaian tinggi, fluktuasi jumlah pelanggaran menunjukkan bahwa pendekatan penegakan masih cenderung reaktif, sehingga perlu diperkuat dengan upaya preventif agar jumlah pelanggaran dapat ditekan secara berkelanjutan. Secara lebih rinci Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Ketentraman dan Keindahan (K3) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Tabel 2.48 Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Ketentraman dan Keindahan (K3) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

No	Jenis Pelanggaran	Tahun (Jumlah Kejadian)									
		2021		2022		2023		2024		2025	
		Langgar	Selesai	Langgar	Selesai	Langgar	Selesai	Langgar	Selesai	Langgar	Selesai
1.	Reklame	810	751	921	850	572	567	497	488	501	450
2.	Perijinan Usaha	4	4	2	2	3	3	7	5	5	5
3.	Menara Telekomunikasi	6	6	10	4	2	2	4	4	10	10
4.	PKL	267	229	345	330	325	319	309	298	310	280
5.	Bangunan Liar	3	2	4	4	5	5	0	0	14	14

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten, 2026

Capaian persentase penegakan Perda dan tingkat penyelesaian Pelanggaran Ketertiban Ketentraman dan Keindahan (K3) mengindikasikan adanya penguatan kinerja kelembagaan Satpol PP, baik dari sisi pengawasan, penindakan, maupun koordinasi lintas perangkat daerah. Meskipun kondisi SDM satuan petugas Satpol terbatas namun dengan mengedepankan strategi pencegahan pelanggaran K3 melalui peningkatan sosialisasi Perda, pembinaan kepada PKL dan pelaku usaha, serta optimalisasi patroli dan pengawasan berbasis wilayah rawan pelanggaran mampu menyelesaikan pelanggaran K3. Rasio petugas Satpol PP Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.49 Rasio Petugas Satpol PP Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

No	Tahun	Rasio per 10.000 penduduk	Jumlah Petugas Satpol PP	Jumlah Penduduk
1	2021	0,4	49	1.327.577
2	2022	0,3	39	1.267.272
3	2023	0,3	33	1.275.850
4	2024	0,2	28	1.302.648
5	2025	0,3	33	1.303.696

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten, 2026

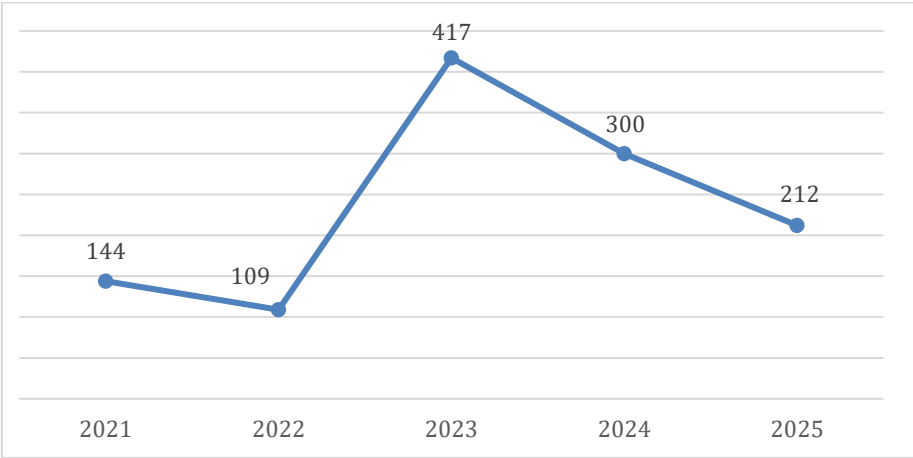
Rasio petugas Satpol PP terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Klaten selama periode 2021–2025 menunjukkan kecenderungan menurun, dari 0,4 petugas per 10.000 penduduk pada tahun 2021 menjadi 0,2 pada tahun 2024, sebelum kembali



meningkat menjadi 0,3 pada tahun 2025. Penurunan rasio ini terjadi seiring dengan berkurangnya jumlah petugas Satpol PP, sementara jumlah penduduk relatif stabil dan cenderung meningkat. Secara normatif, kondisi ini mencerminkan keterbatasan kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung fungsi penegakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

d. Tanggap Bencana (Kebakaran)

Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten Klaten selama periode 2021–2025 menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam. Pada 2021 tercatat 144 kejadian, menurun menjadi 109 kejadian pada 2022. Namun pada 2023 terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai 417 kejadian. Setelah itu, jumlah kejadian menurun pada 2024 menjadi 300 kejadian dan kembali turun pada 2025 menjadi 212 kejadian. Lonjakan tajam kejadian kebakaran pada 2023 dipengaruhi oleh faktor cuaca ekstrem (musim kemarau panjang), kepadatan aktivitas permukiman dan usaha, serta rendahnya kepatuhan terhadap standar keselamatan kebakaran.



Sumber : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten, 2026

Gambar 2.62 Angka Kejadian Kebakaran di Kabupaten Klaten 2021-2025

Penurunan pada 2024–2025 menunjukkan adanya perbaikan upaya pencegahan dan penanganan, namun level kejadian yang masih relatif tinggi menandakan bahwa risiko kebakaran belum sepenuhnya terkendali. Kondisi ini menuntut penguatan strategi pencegahan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan kapasitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran agar tren penurunan dapat berkelanjutan.

Kejadian kebakaran di Kabupaten Klaten pada tahun 2025 masih relatif tinggi dengan total 212 kejadian, yang menunjukkan perlunya pemetaan wilayah rawan kebakaran. Tingginya kejadian tersebut dipengaruhi oleh potensi kerawanan di setiap kecamatan serta dampak perubahan iklim ekstrem, khususnya pada musim kemarau, yang mempercepat proses pembakaran dan perambatan api. Persebaran kejadian kebakaran di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel peta rawan kebakaran berdasarkan angka kejadian kebakaran berikut.



Tabel 2.50 Peta Kerawanan Kebakaran Berdasar Angka Kejadian Kebakaran di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

No	Kecamatan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Ceper	13	13	68	31	19
2	Klaten Utara	13	15	43	37	26
3	Trucuk	14	8	32	12	21
4	Pedan	7	4	28	21	16
5	Wonosari	6	3	25	13	8
6	Klaten Selatan	5	5	22	27	13
7	Jogonalan	6	7	20	14	9
8	Delanggu	4	6	20	16	13
9	Ngawen	4	4	17	15	10
10	Klaten Tengah	14	9	15	13	20
11	Juwiring	22	10	15	13	15
12	Bayat	5	3	15	7	3
13	Kalikotes	3	5	11	5	1
14	Prambanan	3	3	11	6	10
15	Jatinom	1	0	10	11	3
16	Tulung	0	1	10	6	6
17	Cawas	2	2	10	5	8
18	Wedi	4	3	10	10	0
19	Karanganom	6	1	9	11	1
20	Karangdowo	0	2	7	5	2
21	Polanharjo	2	2	7	4	4
22	Gantiwarno	1	0	4	8	1
23	Kebonarum	3	1	3	5	3
24	Karangnongko	0	0	3	1	0
25	Manisrenggo	3	2	1	4	0
26	Kemalang	3	0	1	0	0
JUMLAH		144	109	417	300	212

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten, 2025

Dalam upaya menurunkan kejadian kebakaran, Pemerintah Kabupaten Klaten telah melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran di desa/kelurahan serta pembinaan Satuan Keselamatan Kebakaran Lingkungan (SKKL) pada bangunan gedung. Namun, ketangguhan penanganan kebakaran masih menghadapi kendala berupa luasnya cakupan wilayah layanan, pertumbuhan dan mobilitas penduduk, keterbatasan infrastruktur, meluasnya kawasan rawan kebakaran, waktu tanggap yang belum optimal, terbatasnya sosialisasi regulasi dan standar teknis, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Kondisi ini menuntut penguatan kebijakan dan kelembagaan guna meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanggulangan kebakaran, layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan, serta pengkajian risiko kebakaran dalam perencanaan wilayah terpadu.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Klaten Tahun 2025 100 % artinya jumlah kejadian kebakaran terlapor dalam Kabupaten Klaten dapat tertangani semuanya baik oleh Damkar Klaten, kelompok masyarakat maupun kerjasama dengan kabupaten terdekat. Capaian kinerja tanggap bencana kebakaran Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 2.51 Capaian Kinerja Tanggap Bencana Kebakaran
Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Indikator	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100
Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	60,83	67	57,20	83,33	71,74
Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	menit	13,6	22,56	22,89	15,97	14,12

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten, 2025

Capaian kinerja tanggap bencana kebakaran di Kabupaten Klaten menunjukkan kinerja yang relatif baik. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota selama periode 2021–2025 telah mencapai 100% secara konsisten, yang menandakan seluruh wilayah telah terlayani oleh sistem penanggulangan kebakaran. Sementara itu, tingkat waktu tanggap (*response time*) pada wilayah manajemen kebakaran (WMK) berfluktuasi, dengan capaian terendah pada 2023 sebesar 57,20% dan meningkat kembali pada 2024 menjadi 83,33%, dan menurun menjadi 71,74% pada 2025. Penurunan ini justru menunjukkan kinerja yang positif.

Adapun waktu tanggap penanganan kebakaran secara rata-rata menunjukkan perbaikan pada 2024–2025. Menurunnya angka waktu tanggap (*response time*) dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja yang positif. Perbaikan waktu tanggap pada 2024–2025 mengindikasikan adanya peningkatan kinerja dan kapasitas layanan, namun capaian tersebut masih perlu dioptimalkan agar lebih stabil dan responsif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan manajemen wilayah kebakaran, peningkatan sarana prasarana dan SDM, serta optimalisasi sistem respon cepat guna meningkatkan efektivitas penanggulangan kebakaran secara berkelanjutan.

2.1.3.2. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kabupaten Klaten telah melakukan penajaman *roadmap* reformasi birokrasi Dalam rangka mendorong terciptanya birokrasi digital kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Klaten menunjukkan tren yang sangat positif dengan kenaikan yang signifikan, terutama dalam dua tahun terakhir. Hal ini mencerminkan adanya transformasi dari birokrasi yang bersifat prosedural menuju birokrasi yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*) dan berdampak langsung pada masyarakat.

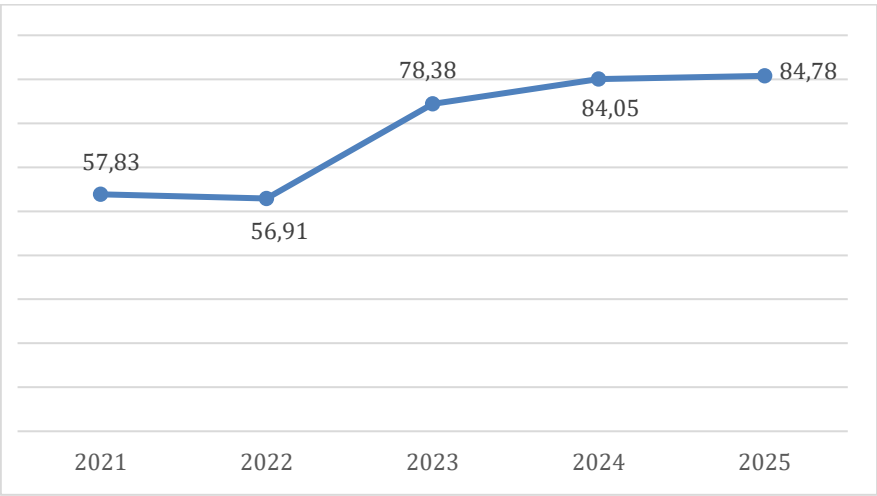
Pada tahun 2022 terjadi penurunan nilai IRB dari 57,83 di tahun 2021 menjadi 56,91. Hal ini salah satunya disebabkan oleh proses adaptasi terhadap perubahan kebijakan nasional terkait penyederhanaan birokrasi dan peralihan jabatan struktural ke fungsional. Pada tahun 2023 terjadi lonjakan di angka 78,38 dengan kategori



predikat “BB (Sangat Baik)”. Peningkatan ini merupakan hasil dari penguatan sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP), percepatan digitalisasi pelayanan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta komitmen pada RB Tematik (fokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi).

Pada tahun 2024 nilai IRB berhasil ditingkatkan kembali di angka 84,05 dengan predikat “A (memuaskan)”. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi di Kabupaten Klaten bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sudah menjadi budaya kerja. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Klaten Tahun 2025 adalah 84,78 dengan kategori A-, menunjukkan peningkatan dari hasil evaluasi tahun sebelumnya.

Secara lebih jelas perkembangan nilai IRB Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 tergambar pada grafik berikut.

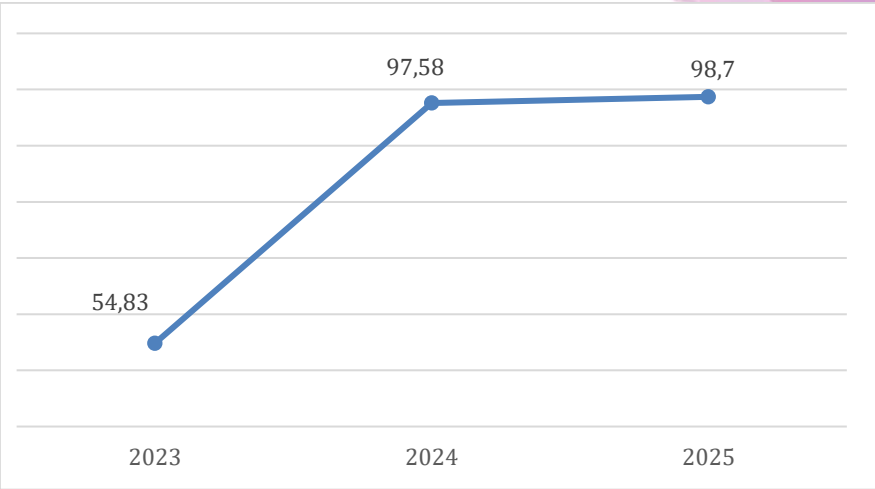


Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.63 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2025

b. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) Kabupaten Klaten baru mulai dilakukan penilaian pada Tahun 2024 atas pelaksanaan tahun 2023 dengan nilai 54,38 dengan predikat “Cukup”. Kondisi ini dipengaruhi oleh masih rendahnya koordinasi harmonisasi regulasi dengan Kemenkumham, serta database peraturan daerah (JDIH) yang belum terintegrasi secara optimal. Sedangkan penilaian atas pelaksanaan Tahun 2024 melonjak sebesar 97,58 dan mencapai puncaknya di tahun 2025 IRB sebesar 98,70 dengan kategori AA (Istimewa). Pencapaian ini didukung dengan koordinasi harmonisasi regulasi dengan Kemenkumham yang lebih intensif, peningkatan kualitas *legal drafter* di lingkungan Kabupaten Klaten serta digitalisasi produk hukum yang sangat transparan melalui penataan database JDIH Kabupaten Klaten. Meskipun sudah kategori istimewa namun masih ada catatan hasil evaluasi yang perlu ditindaklanjuti seperti pemenuhan data dukung pengajuan harmonisasi dan dukungan tingkat kehadiran pimpinan tinggi dalam rapat harmonisasi.



Sumber : Bagian Hukum Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.64 Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Klaten Tahun 2023 – 2025

Lonjakan nilai Indeks Reformasi Hukum (IRH) di tahun 2025 menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten telah melakukan pembenahan regulasi secara masif. Hal ini menjadi modal utama bagi kenaikan Indeks Reformasi Birokrasi. Peningkatan IRH dan IRB membuktikan sinergi keberhasilan dalam mengintegrasikan aspek administrasi (RB) dengan aspek legalitas (IRH) karena birokrasi yang efisien hanya bisa berjalan di atas payung hukum yang sehat dan tidak tumpang tindih.

c. Indeks Akses Keuangan Daerah

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan indikator strategis yang diluncurkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kemenko Perekonomian untuk memetakan tingkat akses dan inklusi layanan keuangan di daerah sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran. IKAD Kabupaten Klaten baru mulai dilakukan pengukuran di tahun 2024.

Nilai Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kabupaten Klaten Tahun 2024 sebesar 4,90 menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal berada pada kategori sedang, namun belum optimal. Capaian ini mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat telah memiliki keterhubungan dengan layanan perbankan dan lembaga keuangan, tetapi masih terdapat keterbatasan dalam jangkauan, pemanfaatan, dan pemerataan akses keuangan, khususnya pada kelompok rentan dan wilayah tertentu.

Pada tahun 2025 nilai IKAD Kabupaten Klaten mengalami penurunan sebesar 0,23 poin menjadi 4,67. Penurunan ini mengindikasikan adanya beberapa permasalahan dalam mempertahankan konsistensi akses keuangan. Hal ini menjadi sinyal perlunya penguatan peran pemerintah daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk memperluas jangkauan layanan keuangan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta mendorong pemanfaatan produk keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan masyarakat. Tanpa intervensi kebijakan

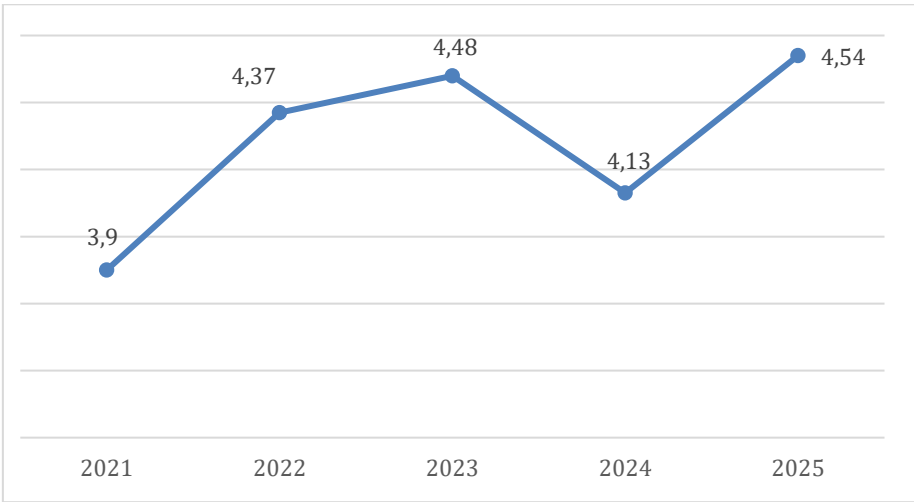


yang lebih terarah, keterbatasan akses keuangan berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan memperlebar kesenjangan kesejahteraan.

d. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik sebagai alat ukur komprehensif untuk melihat seberapa 'baik' pelayanan publik yang hasilnya mencerminkan seberapa puas masyarakat sebagai penerima layanan. Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Klaten menunjukkan tren peningkatan yang signifikan pada periode 2021–2023, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2024. Pada tahun 2021, IPP berada pada angka 3,90, yang mencerminkan kualitas pelayanan publik dalam kategori baik, namun masih memerlukan berbagai penguatan, khususnya pada aspek standar pelayanan dan kepuasan masyarakat. Tahun 2022 menjadi periode lonjakan kinerja dengan nilai IPP meningkat menjadi 4,37. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan nyata dalam tata kelola pelayanan, inovasi layanan, serta peningkatan komitmen perangkat daerah dalam memenuhi standar pelayanan publik.

Kinerja pelayanan publik mencapai puncaknya pada tahun 2023 dengan nilai IPP sebesar 4,48, yang menunjukkan kualitas pelayanan publik Kabupaten Klaten berada pada kategori sangat baik. Capaian ini mencerminkan konsistensi perbaikan layanan, optimalisasi digitalisasi, serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Pada tahun 2024 IPP Kabupaten Klaten mengalami penurunan menjadi 4,13 sehingga perlu penguatan monitoring dan evaluasi standar pelayanan maupun penguatan inovasi pelayanan publik. Sedangkan Nilai IPP Kabupaten Klaten tahun 2025 kembali meningkat mencapai 4,54 yang merupakan capaian tertinggi selama periode 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, baik dari aspek standar pelayanan, kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, maupun komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan kepuasan masyarakat.



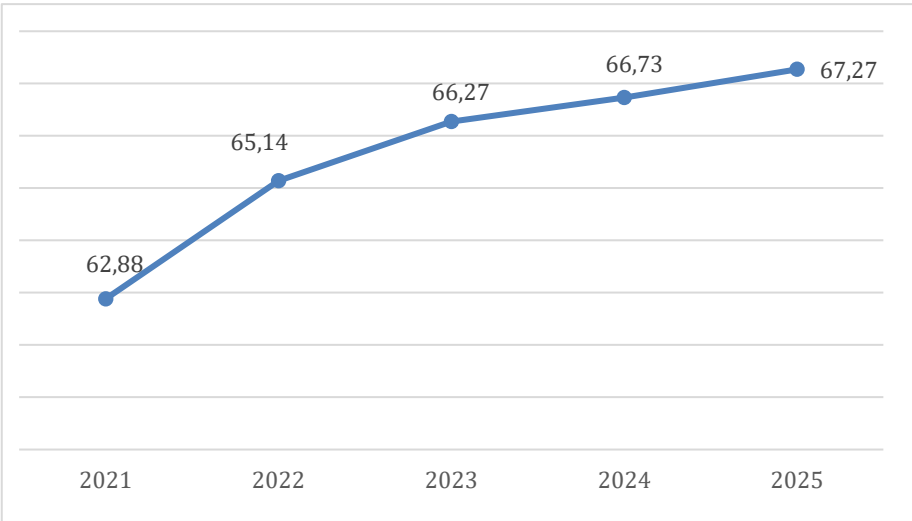
Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.65 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2025



e. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten selama periode tahun 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang positif. Pada tahun 2021, nilai akuntabilitas kinerja tercatat sebesar 62,88, kemudian meningkat secara signifikan pada tahun 2022 menjadi 65,14. Peningkatan tersebut berlanjut pada tahun 2023 dengan nilai 66,27, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 66,73 dan tahun 2025 di angka 67,27.



Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.66 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2025

Nilai akuntabilitas kinerja yang terus naik mencerminkan adanya perbaikan sistem manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten melalui perbaikan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Upaya penguatan perencanaan kinerja, penyelarasan indikator kinerja dengan sasaran pembangunan daerah, serta peningkatan kualitas pelaporan dan evaluasi kinerja telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Nilai komponen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten per komponen secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.52 Nilai Komponen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30	20,96	21,30	21,39	21,52	21,73
2	Pengukuran Kinerja	25	15,43	18,56	19,18	19,41	19,70
3	Pelaporan Kinerja	15	10,42	10,73	10,83	10,90	10,92
4	Evaluasi Internal	10	5,39	14,55	14,87	14,90	14,92
5	Capaian Kinerja	20	10,68	-	-	-	-
	Nilai hasil Evaluasi	100	62,88	65,14	66,27	66,73	67,27
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B	B	B	B

Sumber: Bagian Organisasi Kabupaten Klaten, 2025



Komponen Pelaporan Kinerja merupakan komponen dengan nilai terendah dibandingkan komponen lainnya. Pada tahun 2025, nilai Pelaporan Kinerja tercatat sebesar 10,92 dari bobot 15. Dilihat dari perkembangan nilai pelaporan kinerja dari tahun 2021-2025 relatif lebih lambat dibandingkan komponen lain seperti Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja. Hal ini mengindikasikan bahwa laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan analisis mendalam atas capaian kinerja, khususnya keterkaitan antara target, realisasi, dan dampak (*Outcome*) yang dihasilkan. Pelaporan kinerja cenderung masih berorientasi pada penyampaian data dan narasi deskriptif sehingga perlu memperkuat analisis kinerja berbasis outcome dan manfaat, bukan hanya output. Disamping itu laporan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis, perbaikan perencanaan dan penganggaran pada periode berikutnya.

f. Administrasi Pemerintahan

Ditinjau dari jenis keputusan, Keputusan DPRD (non-pimpinan dan non-badan) merupakan jenis keputusan dengan jumlah terbanyak setiap tahunnya. Jumlah keputusan ini meningkat dari 27 keputusan pada tahun 2021 menjadi 38 keputusan pada tahun 2025, yang mencerminkan intensitas pelaksanaan fungsi DPRD dalam pengambilan kebijakan strategis dan penetapan keputusan kelembagaan.

Jumlah Peraturan Daerah (Perda) menunjukkan tren fluktuatif, dari 5 Perda pada tahun 2021, menurun menjadi 4 Perda pada tahun 2022, kemudian meningkat signifikan hingga mencapai 12 Perda pada tahun 2024, sebelum kembali menurun menjadi 8 Perda pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembentukan Perda sangat dipengaruhi oleh prioritas legislasi daerah serta dinamika regulasi nasional.

Sementara itu, Keputusan Pimpinan DPRD relatif stabil dalam jumlah terbatas, berkisar antara 3–5 keputusan, yang menunjukkan bahwa keputusan pimpinan lebih bersifat administratif dan situasional. Sedangkan Keputusan Badan Anggaran dan Keputusan Badan Musyawarah menunjukkan kecenderungan meningkat, khususnya pada tahun 2025, yang mencerminkan semakin intensifnya pembahasan penganggaran serta penjadwalan dan pengaturan kegiatan DPRD. Secara lebih rinci jenis dan jumlah keputusan DPRD Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53 Jenis dan Jumlah Keputusan DPRD Kabupaten Klaten Tahun 2021 - 2025

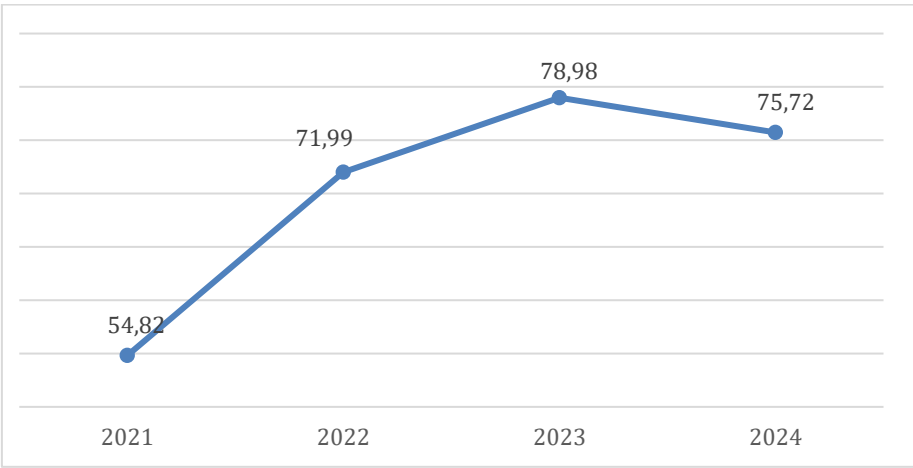
Jenis Keputusan DPRD	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
01. Perda	5	4	7	12	8
02. Keputusan DPRD	27	31	37	31	38
03. Keputusan Pimpinan DPRD	3	3	3	3	5
04. Keputusan Badan Anggaran	7	7	8	10	12
05. Keputusan Badan Musyawarah	13	14	12	11	15
Jumlah	55	59	67	67	78

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten, 2025



g. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten selama periode 2021–2024 menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik, meskipun pada tahun terakhir terjadi sedikit penurunan. Pada tahun 2021, nilai IPKD berada pada angka 54,82 kemudian meningkat signifikan menjadi 71,99 pada tahun 2022. Peningkatan berlanjut pada tahun 2023 dengan capaian 78,98 yang merupakan nilai tertinggi selama periode pengamatan. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan signifikan dalam tata kelola keuangan daerah, yang mencakup perencanaan anggaran, pelaksanaan, pelaporan, serta pengawasan keuangan. Pada tahun 2024 nilai IPKD mengalami penurunan menjadi 75,72. Sedangkan nilai IPKD atas tahun anggaran 2025 baru akan rilis di awal tahun 2027.



Sumber: BPKPAD Kabupaten Klaten, 2025*
Gambar 2.67 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2024

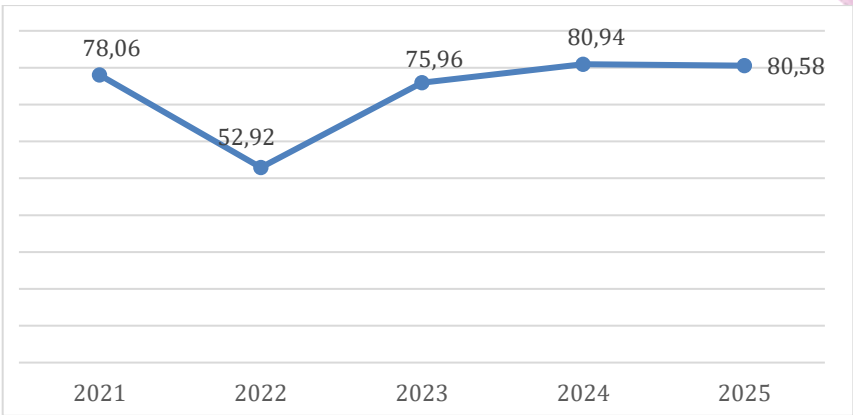
h. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Klaten pada periode 2021–2025 menunjukkan fluktuatif. Setelah mencapai 78,06 pada tahun 2021, indeks mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022 menjadi 52,92 yang mengindikasikan belum optimalnya pemenuhan indikator profesionalitas ASN. Namun, upaya pembenahan manajemen ASN menunjukkan hasil positif dengan meningkatnya indeks menjadi 75,96 pada tahun 2023 dan mencapai 80,94 pada tahun 2024. Pada tahun 2025, indeks relatif stabil meskipun turun di angka 80,58 tetap berada pada kategori baik, yang mencerminkan konsistensi peningkatan profesionalitas ASN di Kabupaten Klaten.

Penghitungan penilaian IPASN untuk tahun 2025 sudah menggabungkan nilai IPASN PNS dan PPPK dengan rincian nilai rata-rata IPASN PNS 80,56 dan nilai rata rata IPASN PPPK 80,61 ada penurunan nilai IPASN PNS sebesar 2,25 karena tidak optimalnya aspek kompetensi ASN, sedangkan nilai IPASN PPPK terjadi kenaikan sebesar 6,06. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip sistem merit dalam manajemen ASN di Kabupaten Klaten telah berjalan, namun masih memerlukan



penguatan, terutama pada aspek manajemen talenta, pengembangan kompetensi berkelanjutan, dan penataan jabatan berbasis kualifikasi dan kinerja.

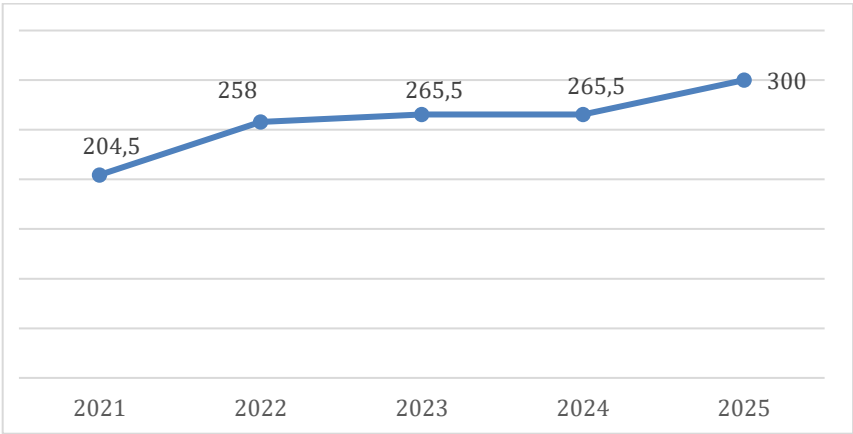


Sumber: BKPSDM Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.68 Nilai Indeks Profesionalisme (IP) ASN Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Penerapan Sistem Merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Klaten pada periode 2021–2025 menunjukkan peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2021, nilai Sistem Merit berada pada angka 204,5 dan meningkat signifikan menjadi 258 di tahun 2022. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2023 dan 2024, dengan capaian yang relatif stabil di angka 265,5. Sedangkan di tahun 2025, nilai Sistem Merit kembali mengalami peningkatan cukup signifikan menjadi 300, yang menunjukkan adanya penguatan implementasi sistem merit secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Pada Tahun 2025 untuk menjembatani jeda waktu sampai adanya penilaian sistem merit dari Kementrian PAN RB, LAN dan BKN Kabupaten Klaten melakukan penilaian secara mandiri dengan menggunakan aplikasi Sipinter (Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit) dari KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) dengan nilai tahun 2025 di angka 300, terjadi peningkatan sebesar 34,5. Peningkatan di tahun terakhir ini menunjukkan adanya langkah strategis yang lebih progresif, antara lain peningkatan kualitas pengembangan kompetensi ASN, serta penguatan sistem penilaian kinerja dan pengisian jabatan berbasis merit.



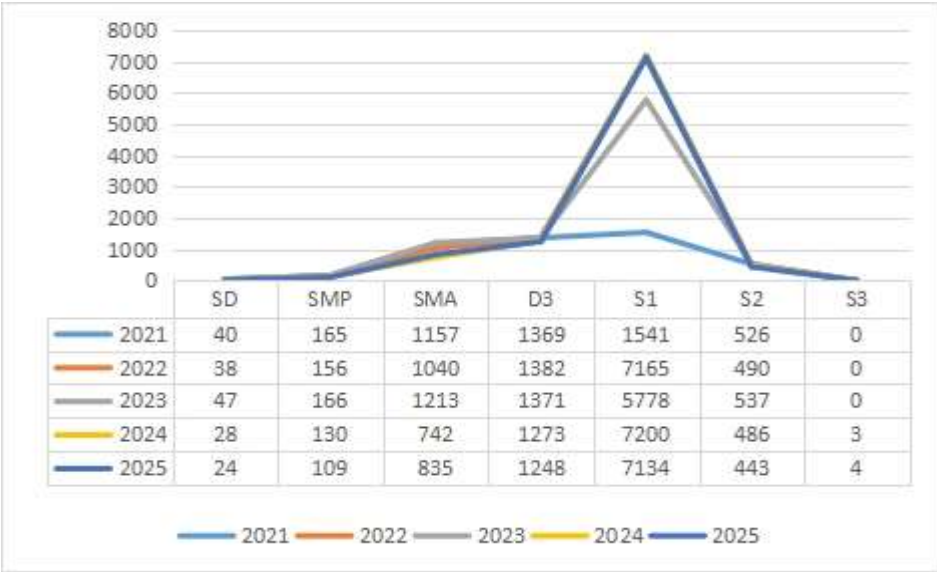
Sumber: BKPSDM Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.69 Merit Sistem Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025



i. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Komposisi ASN Kabupaten Klaten berdasarkan tingkat pendidikan selama periode 2021–2025 didominasi oleh pegawai berpendidikan Strata 1 (S1), dengan jumlah tertinggi dibandingkan jenjang pendidikan lainnya. Selain itu, ASN berpendidikan SMA dan Diploma (D3) juga masih menempati proporsi yang cukup besar, sementara jumlah ASN berpendidikan S2 dan S3 relatif terbatas. Secara umum, jumlah ASN pada hampir seluruh jenjang pendidikan menunjukkan kecenderungan menurun hingga tahun 2025. Berikut gambaran jumlah ASN Kabupaten Klaten (tidak termasuk PPPK paruh waktu) berdasarkan jenjang pendidikan tahun 2021-2025:



Sumber: BKPSDM Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.70 Jumlah Pegawai Kabupaten Klaten Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2021-2025

Komposisi jabatan ASN Kabupaten Klaten selama periode 2021–2025 didominasi oleh **jabatan fungsional tertentu**, yang jumlahnya meningkat signifikan pada 2023 dan relatif stabil hingga 2025. Jumlah **jabatan pelaksana (fungsional umum)** menunjukkan tren penurunan yang konsisten, sementara **jabatan administrasi** juga mengalami penurunan secara bertahap. Adapun **jabatan pimpinan tinggi** relatif stabil dengan kecenderungan meningkat pada akhir periode. Secara keseluruhan, total jumlah jabatan ASN berfluktuasi dengan puncak pada 2023 dan kembali menurun pada 2024–2025.

Tabel 2.54 Jabatan ASN Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Indikator	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	orang	25	21	24	29	30
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	orang	557	376	377	372	364
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	orang	6.007	5.483	8.311	8.137	8132
Jumlah pemangku jabatan pelaksana (Fungsional Umum)	orang	2.523	2.331	1.500	1.324	1274
Jumlah	orang	9.112	8.211	1.0212	9.862	9.800

Sumber: BKPSDM Kabupaten Klaten, 2025



Gambaran ASN dan pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam kurun waktu tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.55 ASN dan Pejabat ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Indikator	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	19,37	42,78	347,22	224,96	78,76
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, Latsar dan Fungsional	%	0	0	27,68	22,26	45,36

Sumber: BKPSDM Kabupaten Klaten, 2025

Jumlah ASN Kabupaten Klaten yang mengikuti diklat, bimtek, dan seminar pada 2021–2025 menunjukkan fluktuasi, dengan penurunan hingga 2024 dan peningkatan signifikan pada 2025 menjadi 7.716 peserta untuk diklat teknis dan 542 peserta diklat jabatan (Diklat Latsar, Diklatpim, dan diklat fungsional). Kondisi ini mencerminkan penguatan kembali upaya pengembangan kompetensi ASN, yang perlu dijaga keberlanjutannya melalui perencanaan pengembangan kompetensi yang lebih terarah, merata, dan selaras dengan kebutuhan jabatan serta prioritas pembangunan daerah.

Tabel 2.56 Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat, Bimtek, dan Seminar Tahun 2021-2025

No	Permohonan	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Diklat Teknis	-	293	1.250	347	7.176
2	Diklat Jabatan (Diklat latsar, Diklatpim, dan diklat fungsional)	-	3.220	842	1.110	542
JUMLAH		4.918	3.513	2.092	1.457	7.718

Sumber: BKPSDM Kabupaten Klaten, 2025

Sedangkan capaian manajemen pengelolaan ASN Kabupaten Klaten tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.57 Manajemen Pengelolaan ASN Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Indikator	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Profesionalitas ASN	indeks	78,06	52,92	75,96	80,94	80,58
Indeks Sistem Merit	nilai	204,5	258	265,5	265,5	300
Persentase ASN yang mengikuti diklat	%	155,86	42,78	20,48	22,49	78,76
Persentase Mutasi Pegawai Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	%	-	247	98,8	48,60	85,33
Persentase Kualifikasi Calon ASN sesuai formasi	%		213	84,38	100,8	100,19
Persentase Kinerja ASN bernilai baik	%		94,14	115,12	100	100
Persentase Kasus kepegawaian yang terselesaikan	%		100	51	416,6	83,33

Sumber: BKPSDM Kabupaten Klaten, 2025



Manajemen pengelolaan ASN Kabupaten Klaten selama periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang cukup positif, ditandai dengan peningkatan **Indeks Profesionalitas ASN** yang cenderung membaik hingga mencapai 80,58 pada 2025. **Indeks Sistem Merit** juga mengalami peningkatan signifikan menjadi 300 pada 2025, yang mencerminkan penguatan penerapan prinsip merit dalam manajemen ASN. Namun, fluktuasi partisipasi pengembangan kompetensi, dinamika mutasi pegawai, serta ketidakstabilan penyelesaian kasus kepegawaian menunjukkan bahwa implementasi manajemen talenta belum sepenuhnya konsisten. Oleh karena itu, diperlukan penguatan manajemen talenta ASN secara terintegrasi melalui pemetaan kompetensi dan kinerja, pengembangan kompetensi berkelanjutan, penempatan ASN berbasis potensi dan kebutuhan organisasi.

a. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern (KAPIP)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Klaten selama periode tahun 2021–2025 menunjukkan tingkat maturitas yang stabil. Berdasarkan hasil penilaian, maturitas SPIP Kabupaten Klaten tercatat berada pada Level 3 secara konsisten dari tahun 2021 hingga tahun 2024. Capaian tersebut mencerminkan bahwa sistem pengendalian intern telah terdefinisi dengan baik dan diterapkan secara terstruktur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Pada Tahun 2025, evaluasi SPIP pada pemerintah daerah dalam lingkup pembinaan BPKP Perwakilan D.I. Yogyakarta tidak dilaksanakan secara menyeluruh karena adanya penyesuaian jadwal evaluasi. Dari total 12 Inspektorat Daerah yang menjadi objek pembinaan, evaluasi hanya dilaksanakan pada 8 Inspektorat Daerah, yaitu Inspektorat Provinsi D.I. Yogyakarta, Inspektorat Kabupaten Gunungkidul, Inspektorat Kabupaten Bantul, Inspektorat Kota Yogyakarta, Inspektorat Kabupaten Magelang, Inspektorat Kota Magelang, Inspektorat Kabupaten Kebumen, dan Inspektorat Kabupaten Purworejo.

Meskipun evaluasi maturitas SPIP oleh BPKP Perwakilan D.I. Yogyakarta belum dilaksanakan pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Klaten telah melaksanakan Penilaian Mandiri (PM) SPIP yang disertai penjaminan kualitas. Hasil penilaian menunjukkan nilai penilaian mandiri SPIP sebesar 3,988, Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 4,098, dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 3,910. Capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam penguatan sistem pengendalian intern dan perbaikan tata kelola secara berkelanjutan.

Evaluasi Kapabilitas APIP (KAPIP) pada Tahun 2025 tidak dilaksanakan secara menyeluruh sebagai dampak adanya perubahan kebijakan dan regulasi yang menjadi pedoman peningkatan kapabilitas APIP. Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah telah dicabut dan digantikan dengan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang



ditetapkan pada 28 November 2025. Sehubungan dengan masa transisi penerapan kebijakan tersebut, pelaksanaan evaluasi pada Tahun 2025 dilakukan secara terbatas melalui pendekatan sampling pada beberapa pemerintah daerah di wilayah kerja BPKP Perwakilan DIY, yaitu Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Pemerintah Kabupaten Kebumen, dan Pemerintah Kabupaten Magelang.

Secara keseluruhan, pelaksanaan evaluasi SPIP dan Kapabilitas APIP pada Tahun 2025 menunjukkan adanya fase transisi kebijakan dan penyesuaian mekanisme evaluasi di bawah pembinaan BPKP Perwakilan D.I. Yogyakarta, sehingga pelaksanaan penilaian belum dilakukan secara menyeluruh dan sebagian dilaksanakan melalui pendekatan sampling. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap menunjukkan komitmen penguatan tata kelola melalui pelaksanaan Penilaian Mandiri SPIP yang disertai penjaminan kualitas, sebagaimana ditunjukkan oleh capaian nilai SPIP, MRI, dan IEPK Pemerintah Kabupaten Klaten. Kondisi ini mencerminkan adanya sinergi antara penguatan sistem pengendalian intern, peningkatan kapabilitas APIP, dan penerapan manajemen risiko sebagai fondasi perbaikan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan, sekaligus menjadi modal awal untuk optimalisasi pembinaan dan evaluasi pada periode perencanaan berikutnya.

Level maturitas SPIP ini menunjukkan bahwa unsur-unsur pengendalian intern, meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan, telah diimplementasikan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, SPIP telah menjadi bagian dari mekanisme pengelolaan pemerintahan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, kepatuhan terhadap peraturan, serta efektivitas dan efisiensi kegiatan. Capaian maturitas SPIP yang sejalan dengan kapabilitas APIP pada Level 3 menunjukkan adanya sinergi antara pengendalian intern dan fungsi pengawasan internal dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 2.58 Capaian Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Kabupaten Klaten
Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3
2	Maturitas SPIP	3	3	3	3	3

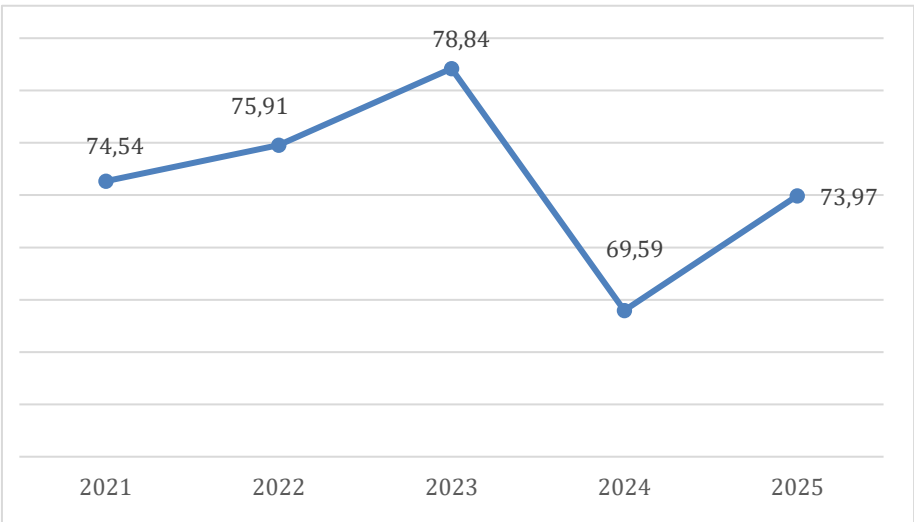
Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten, 2025

j. **Indeks Integritas Nasional**

Indeks Integritas Nasional Kabupaten Klaten selama periode tahun 2021–2025 menunjukkan dinamika capaian yang fluktuatif. Pada tahun 2021, nilai Indeks Integritas Nasional tercatat sebesar 74,54, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 75,91. Peningkatan ini berlanjut hingga mencapai nilai tertinggi pada tahun 2023 sebesar 78,84. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan signifikan dengan nilai



indeks sebesar 69,59. Pada tahun 2025, Indeks Integritas Nasional kembali mengalami peningkatan menjadi 73,97. Kondisi ini mencerminkan bahwa upaya penguatan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten telah menunjukkan hasil, namun masih menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi penerapan nilai-nilai integritas secara berkelanjutan. Beberapa langkah strategis yang diperlukan antara lain digitalisasi layanan, penguatan pengawasan internal dan partisipasi publik. Upaya peningkatan SPI dan IIN akan menjadi bagian dari kebijakan reformasi birokrasi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.



Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.71 Indeks Integritas Nasional (Survei Penilaian Integritas) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Indeks Integritas Nasional tahun 2025 di angka 73,97. Survei Penilaian Integritas ini dilakukan pada 3 (tiga) komponen yang meliputi komponen internal, komponen eksternal dan komponen eksper. Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2025, hasil indeks integritas Pemerintah Kabupaten Klaten untuk komponen internal dengan nilai 80.39, komponen eksternal 89,26 dan komponen eksper 67,04. Masing-masing komponen terdiri dari beberapa dimensi dengan banyak indikator sebagai tolok ukurnya.

Berdasarkan hasil SPI KPK Tahun 2025, dimensi yang menjadi prioritas perbaikan Pemerintah Kabupaten Klaten ialah komponen internal pada dimensi Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas, dengan indikator Melihat/Mendengar Kasus Korupsi Diungkap. Dimensi ini memperoleh skor 43,71 (rentan) dengan level risiko sangat tinggi. Berdasarkan petunjuk pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut dari KPK, Pemerintah Daerah dapat memilih akar masalah, rekomendasi, rencana aksi, dan rencana data dukung melalui platform spi.kpk.go.id sesuai dengan kondisi Pemerintah Daerah masing-masing. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten telah melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan Perangkat Daerah yang berkaitan dengan indikator dan dimensi tersebut dengan hasil bahwa akar masalah terhadap rendahnya indikator Melihat/Mendengar Kasus Korupsi Diungkap ialah pegawai enggan



menyampaikan laporan pelanggaran korupsi. Rekomendasinya ialah Mendorong pegawai untuk mau melaporkan korupsi melalui WBS, dan untuk rencana aksi yang dipilih ialah level semi ideal, yakni:

1. Penyiapan email atau nomor khusus pengaduan yang dikelola oleh Inspektorat/Satuan Pengawas Internal dengan akses terbatas.
2. Pembuatan formulir online pengaduan dan SOP penanganan pengaduan dengan batas waktu yang jelas.
3. Penetapan kebijakan zero tolerance terhadap pelanggaran dan ajakan pelaporan melalui surat edaran resmi.
4. Pelaporan rekapitulasi aduan dan tindak lanjut kepada pimpinan setiap triwulan.
5. Sosialisasi WBS secara masif kepada pegawai, pengguna layanan, mitra penyedia, NGO, dan pemangku kepentingan lainnya melalui media digital maupun analog.

k. Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Fungsi pengawasan internal oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten semakin diperkuat, terutama pada periode 2024–2025 yang ditandai dengan peningkatan signifikan jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan. Lonjakan jumlah rekomendasi mengindikasikan semakin luasnya cakupan pemeriksaan dan meningkatnya ketelitian dalam mengidentifikasi permasalahan tata kelola, keuangan, maupun kinerja perangkat daerah.

Di sisi lain, peningkatan persentase tindak lanjut rekomendasi hingga mencapai 94,41% pada tahun 2025 mencerminkan komitmen dan responsivitas perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan internal. Meskipun demikian, fluktuasi tingkat tindak lanjut pada periode sebelumnya menunjukkan masih adanya tantangan dalam konsistensi penyelesaian rekomendasi, baik dari aspek kapasitas sumber daya, koordinasi, maupun kompleksitas temuan. Secara keseluruhan, tren ini menggambarkan perbaikan berkelanjutan dalam sistem pengendalian internal pemerintah daerah, namun tetap diperlukan penguatan monitoring, asistensi tindak lanjut, serta peningkatan kualitas rekomendasi agar seluruh temuan dapat diselesaikan secara tepat waktu dan berkelanjutan.

Tabel 2.59 Tindak Lanjut Temuan BPK dan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Indikator	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Tindak Lanjut Temuan BPK						
Akumulasi Jumlah Rekomendasi	Rekomendasi	883	895	902	927	949
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	%	93,09	95,08	97,78	97,41	96,63
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Inspektorat						
Akumulasi Jumlah Rekomendasi	Rekomendasi	230	244	242	1.529	1448



Indikator	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal	%	46,08	100	50	84,24	94,41

Sumber: Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten, 2025 (Data Semester I)

I. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) merupakan instrumen evaluasi kualitas proses perencanaan pembangunan daerah yang digunakan untuk menilai konsistensi, keterpaduan, serta kinerja perencanaan pembangunan. Sehubungan dengan diberlakukannya RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029, penilaian IPPD untuk Tahun 2025 belum dilaksanakan pada tahun berjalan dan direncanakan akan dilakukan pada Tahun 2026 Triwulan I, sesuai dengan siklus penilaian dan periodesasi RPJMD yang baru. Namun demikian, pada periode RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021–2025 telah dilakukan pengukuran terhadap indikator yang menjadi bagian dari aspek penilaian IPPD sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2023, yaitu persentase Program Prioritas Nasional yang didukung oleh program daerah serta status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD, yang mulai diukur sejak Tahun 2022.

Tabel 2.60 Capaian Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

No	Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang Didukung Program Daerah	%	-	100	100	100	100
2	Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD	%	-	89,13	89,29	91,30	89,09

Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, 2025

Pengukuran indikator tersebut menjadi dasar evaluasi keterpaduan perencanaan pusat dan daerah serta capaian kinerja pembangunan, sekaligus sebagai pijakan awal dalam pelaksanaan dan peningkatan kualitas penilaian IPPD pada periode perencanaan selanjutnya.

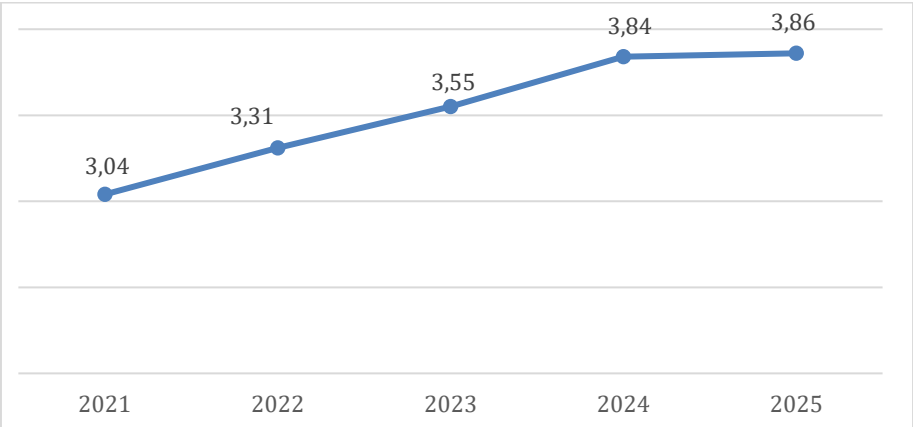
m. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Klaten menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2021–2024. Nilai IDSD meningkat dari 3,04 pada tahun 2021 menjadi 3,31 pada 2022, kemudian naik menjadi 3,55 pada 2023, 3,84 pada 2024 dan mencapai 3,86 pada 2025. Peningkatan berkelanjutan ini mencerminkan perbaikan kapasitas daya saing daerah dalam mendukung aktivitas ekonomi, kualitas tata kelola, serta ekosistem pembangunan daerah.

Nilai IDSD Kabupaten Klaten di tahun 2025 mengalami kenaikan 0,04 poin dibandingkan tahun 2024. Jika dilihat dari 4 (empat) aspek pembentuk IDSD



Kabupaten Klaten ada 3 aspek yang mengalami peningkatan yaitu aspek Lingkungan dan Infrstruktur naik 0,16 poin dari 4,26 tahun 2024 menjadi 4,43 tahun 2025, Aspek Sumber Daya manusia naik 0,20 poin dari 4,26 tahun 2024 menjadi 4,46 tahun 2025, aspek Pasar naik 0,06 poin dari 3,39 tahun 2024 menjadi 3,45 tahun 2025, pada tahun 2025 ada Ekosistem Inovasi mengalami penurunan 0,49 poin dari 3,45 tahun 2024 menjadi 2,96 tahun 2025.



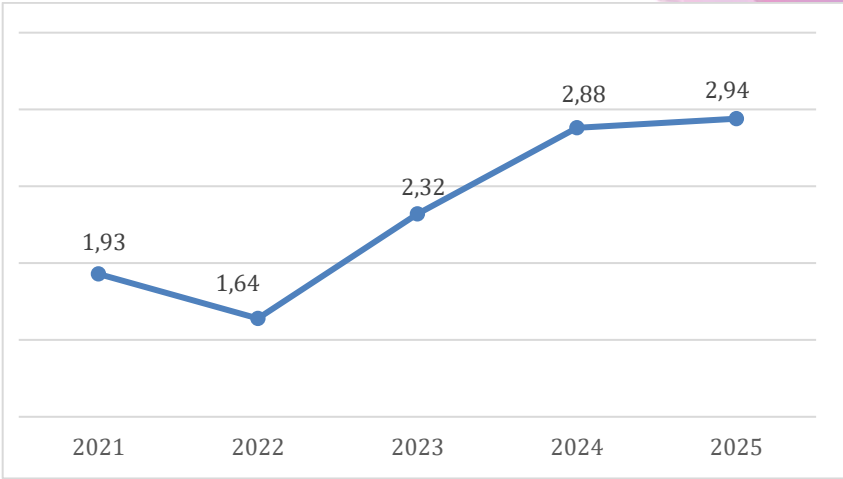
Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.72 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

n. Kapabilitas Inovasi

Kapabilitas inovasi merupakan salah satu faktor kunci pembentuk IDSD, khususnya dalam mendorong efisiensi tata kelola, kualitas layanan publik, dan produktivitas ekonomi daerah. Kapabilitas inovasi Kabupaten Klaten selama periode 2021–2024 menunjukkan kecenderungan membaik pada dua tahun terakhir. Nilai kapabilitas inovasi tercatat sebesar 1,93 pada 2021, mengalami penurunan menjadi 1,64 pada 2022. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya dukungan kebijakan, kelembagaan, dan kolaborasi inovasi. Selanjutnya meningkat signifikan menjadi 2,32 pada 2023 dan kembali naik menjadi 2,88 pada 2024 dan 2,94 di tahun 2025. Peningkatan ini selaras dengan kenaikan IDSD Kabupaten Klaten yang mencapai 3,84 pada 2024 dan 3,86 pada tahun 2025. Hal menunjukkan bahwa penguatan inovasi mulai berkontribusi positif terhadap daya saing daerah.

Perbaikan kapabilitas inovasi pada 2023–2025 memperkuat fondasi peningkatan IDSD melalui peningkatan inovasi pelayanan, pemanfaatan teknologi, serta meningkatnya kolaborasi lintas sektor. Meskipun demikian kapabilitas inovasi yang masih berada pada kategori menengah sehingga diperlukan upaya penguatan inovasi secara berkelanjutan.



Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.73 Kapabilitas Inovasi Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

o. Penelitian dan Pengembangan

Menindaklanjuti Perpres Nomor 78 Tahun 2021 tentang BRIN, Pemerintah Kabupaten Klaten telah memperkuat integrasi urusan penelitian dan pengembangan melalui penetapan Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Bapperida. Sebagai upaya penguatan infrastruktur riset dan inovasi daerah, Bapperida menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Kemajuan IPTEK Daerah Tahun 2025–2029 yang menjadi bahan masukan penyusunan RPJMD sekaligus penjabaran target dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan, Bapperida menghasilkan dokumen penelitian dan kajian yang memberikan rekomendasi kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah. Selama periode 2021–2025, berbagai dokumen dan rekomendasi telah dihasilkan sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan. Dokumen penelitian dan kajian Bapperida selama kurun waktu 2021-2025 sebagai berikut.

Tabel 2.61 Dokumen dan Kajian Bapperida Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Kajian/ Penelitian	12	12	11	26	26
2	Rekomendasi/Implementasi Penelitian	6	6	6	17	20

Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, 2025

Kegiatan kelitbangan lainnya dilaksanakan melalui fasilitasi **Kreativitas dan Inovasi (Krenova)** dalam bentuk lomba untuk menjangring inovasi pelajar dan masyarakat yang aplikatif, berpotensi direplikasi, serta mendukung pemenuhan kebutuhan teknologi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peserta lomba krenova di kabupaten Klaten mengalami peningkatan dari tahun 2021-2025, peningkatan yang cukup signifikan peserta krenova pada tahun 2023 sejak mulai dibuka peserta pelajar untuk SMP sederajat.

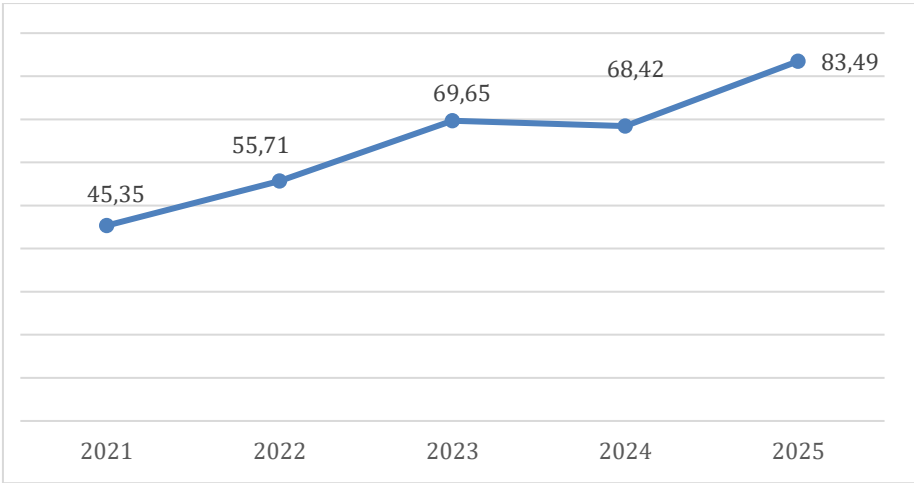


Tabel 2.62 Peningkatan Peserta Lomba Krenova Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

No	Tahun	Peserta Pelajar SMP	Peserta Pelajar SMA/SMK	Peserta Masyarakat Umum	Jumlah
1	2021	-	17	18	35
2	2022	-	19	15	34
3	2023	59	35	49	143
4	2024	64	59	31	154
5	2025	71	104	45	220

Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, 2025

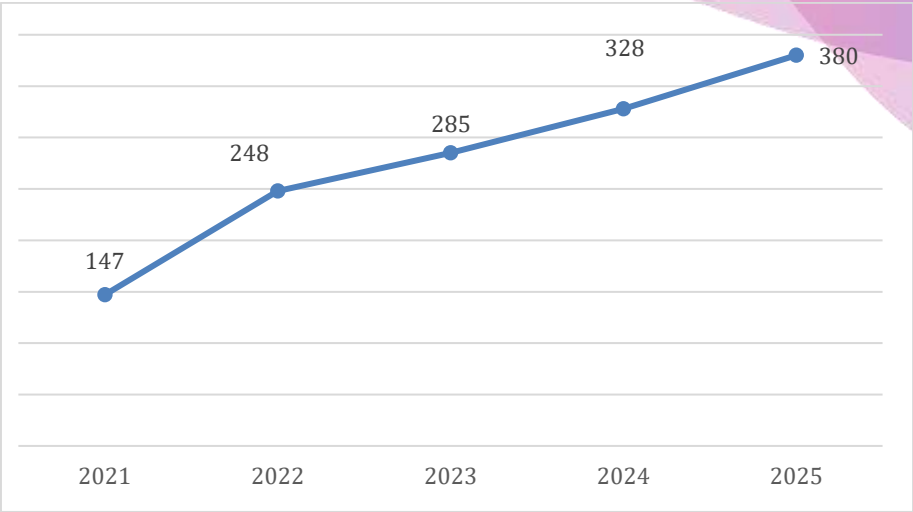
Capaian Indeks Inovasi Daerah (IID) Kabupaten Klaten selama periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang sangat positif. Nilai IID meningkat dari 45,35 pada tahun 2021 dengan predikat *Inovatif*, menjadi 55,71 pada 2022 dan terus naik menjadi 69,65 pada 2023, 68,42 pada 2024, serta mencapai 83,49 pada 2025. Sejak tahun 2022, Kabupaten Klaten secara konsisten berada pada predikat *Sangat Inovatif*.



Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.74 Nilai Indeks Inovasi daerah (IID) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Capaian Kabupaten Klaten sebagai daerah sangat inovatif tercermin dari peningkatan jumlah inovasi daerah selama periode 2021–2025. Jumlah inovasi meningkat secara konsisten dari 147 inovasi pada tahun 2021, menjadi 248 inovasi pada 2022, 285 inovasi pada 2023, 328 inovasi pada 2024, dan mencapai 380 inovasi pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya penguatan budaya inovasi di lingkungan pemerintah daerah, baik pada level perangkat daerah maupun unit pelayanan publik, sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.



Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.75 Peningkatan Jumlah Inovasi Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

2.1.3.3. Fokus Urusan Layanan Pilihan

a. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk

Cakupan layanan pendaftaran penduduk di Kabupaten Klaten menunjukkan kinerja yang semakin membaik selama periode 2021–2025. Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak usia 0–17 tahun meningkat signifikan dari 63,87% pada 2022 menjadi 78,51% pada 2025. Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) mulai tercatat sejak 2024 dan terus mengalami peningkatan, dari 6,00% pada 2024 menjadi 7,02% pada 2025. Sementara itu, cakupan perekaman KTP Elektronik telah mencapai tingkat sangat tinggi dan stabil, meningkat dari 99,02% pada 2022 menjadi 99,34% pada 2025. Capaian ini menunjukkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan yang semakin inklusif dan berkelanjutan, khususnya dalam perluasan kepemilikan identitas dasar penduduk.

Tabel 2.63 Jumlah Pelayanan Akta di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

No	Jenis Akta	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 satu hari yang memiliki KIA	N/A	63,87	68,81	73,13	78,51
2	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	N/A	N/A	N/A	6,00	7,02
3	Persentase Perekaman KTP Elektronik	N/A	99,02	99,03	99,04	99,34

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Klaten 2025

2. Cakupan Layanan Pencatatan Sipil

Capaian layanan akta pencatatan sipil di Kabupaten Klaten selama periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang dinamis pada masing-masing jenis layanan. Pelayanan akta kelahiran meningkat pada periode 2021–2023 dari 21.012 menjadi 23.529 akta, kemudian mengalami penurunan pada 2024 menjadi 16.314



akta, sebelum kembali meningkat pada 2025 menjadi 19.761 akta. Pelayanan akta kematian cenderung menurun dari 13.021 akta pada 2021 menjadi 10.926 akta pada 2022 dan 16.196 akta pada 2023, kemudian relatif stabil pada 2024–2025. Sementara itu, pelayanan akta perkawinan dan perceraian menunjukkan fluktuasi dengan jumlah yang relatif kecil dibandingkan jenis akta lainnya. Di sisi lain, persentase penduduk usia 0–18 tahun yang memiliki akta kelahiran terus meningkat secara konsisten hingga mencapai 99,36% pada 2025.

Fluktuasi jumlah pelayanan akta mencerminkan pengaruh faktor demografis, perubahan peristiwa kependudukan, serta tingkat kesadaran masyarakat dalam melaporkan kejadian penting. Penurunan jumlah layanan pada periode tertentu tidak serta-merta menunjukkan penurunan kinerja, namun lebih dipengaruhi oleh dinamika kelahiran, kematian, dan status perkawinan penduduk.

Tabel 2.64 Capaian Pelayanan Akta di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

No	Jenis Akta	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kelahiran	21.012	22.199	23.529	16.314	19.761
2	Kematian	13.021	10.926	16.196	13.863	16.227
3	Perkawinan	563	508	405	424	376
4	Perceraian	52	48	53	48	69
5	Persentase Penduduk Usia 0-18 Tahun yang Mempunyai Akte Kelahiran	94,37	97,98	99,12	99,29	99,36

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Klaten 2025

3. Cakupan Layanan Informasi Kependudukan

Cakupan layanan informasi kependudukan di Kabupaten Klaten selama periode 2021–2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik. Persentase ketersediaan data kependudukan tercatat konsisten mencapai 100% setiap tahun, mencerminkan tersedianya data kependudukan yang lengkap dan berkelanjutan. Sementara itu, pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah dan organisasi/lembaga melalui perjanjian kerja sama mulai terdata pada 2024 sebesar 72,55% dan meningkat menjadi 80,80% pada 2025.

Tingkat pemanfaatan data oleh perangkat daerah dan mitra eksternal yang belum optimal perlu didorong melalui percepatan kerja sama pemanfaatan data serta penguatan tata kelola keamanan dan akses data agar informasi kependudukan dapat dimanfaatkan secara lebih luas dan efektif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data.

Tabel 2.65 Jumlah Layanan Informasi Kependudukan di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

No	Cakupan Layanan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase ketersediaan data kependudukan	100	100	100	100	100



No	Cakupan Layanan	2021	2022	2023	2024	2025
2	Persentase Perangkat daerah dan organisasi atau lembaga yang berpotensi memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	NA	NA	NA	72,55	80,8

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Klaten 2025

b. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perkembangan Status Desa Kabupaten Klaten Tahun 2021–2025, struktur status desa menunjukkan pergeseran yang semakin positif. Desa tertinggal yang pada tahun 2021 masih berjumlah 3 desa telah berhasil dieliminasi dan menjadi 0 desa sejak tahun 2022 hingga 2025. Jumlah desa berstatus berkembang mengalami penurunan signifikan dari 272 desa pada tahun 2021 menjadi 78 desa pada tahun 2025. Sebaliknya, jumlah desa berstatus maju menunjukkan tren peningkatan konsisten dari 113 desa pada tahun 2021 menjadi 237 desa pada tahun 2025. Peningkatan paling menonjol terjadi pada desa mandiri yang naik drastis dari hanya 3 desa pada tahun 2021 menjadi 76 desa pada tahun 2025 atau 19,43 % dari total keseluruhan desa sejumlah 391 desa di Kabupaten Klaten.

Perkembangan tersebut menunjukkan keberhasilan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan desa di Kabupaten Klaten yang berorientasi pada peningkatan kemandirian dan kapasitas desa. Hilangnya status desa tertinggal sejak tahun 2022 mengindikasikan adanya perbaikan signifikan dalam pemenuhan indikator dasar pembangunan desa, seperti pelayanan dasar, infrastruktur, dan tata kelola. Penurunan jumlah desa berkembang yang diikuti dengan peningkatan desa maju dan mandiri mencerminkan adanya proses “naik kelas” status desa secara berkelanjutan. Lonjakan desa mandiri pada periode 2024–2025 menunjukkan dampak positif dari optimalisasi Dana Desa, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat. Namun demikian, capaian persentase desa mandiri di Kabupaten Klaten yang masih tergolong rendah yaitu sebesar 19,43 % (76 dari 391 desa) menunjukkan perlunya akselerasi kebijakan pembangunan desa yang lebih terfokus dan berbasis data Indeks Desa Membangun (IDM).

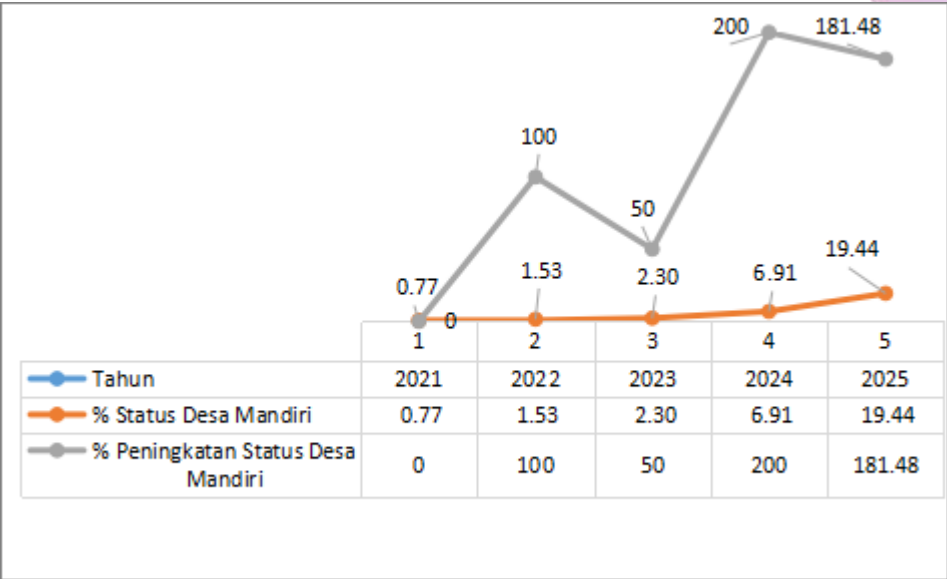
Tabel 2.66 Perkembangan Status Desa Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Status Desa	Jumlah (Desa) s.d Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Sangat tertinggal	0	0	0	0	0
Tertinggal	3	0	0	0	0
Berkembang	272	248	209	161	78
Maju	113	137	173	203	237
Mandiri	3	6	9	27	76
Total Desa	391	391	391	391	391

Sumber: Dispermasdes Kabupaten Klaten, 2026



Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 secara lebih jelas dapat dilihat pada grafik di bawah:



Sumber: Dispermasdes Kabupaten Klaten, 2026

Gambar 2.76 Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Fluktuasi persentase peningkatan Desa Mandiri ini mengindikasikan bahwa proses peningkatan status desa di Kabupaten Klaten belum sepenuhnya berkelanjutan dan merata. Peningkatan status desa mandiri pada setiap tahun menunjukkan adanya efektivitas kebijakan, dukungan anggaran, atau program pemberdayaan desa yang berjalan lebih optimal, seperti penguatan BUMDes, peningkatan infrastruktur dasar, dan kapasitas pemerintahan desa. Namun demikian masih rendahnya status desa mandiri yaitu sebesar 19,43% (76 desa dari sejumlah 391 desa) menunjukkan masih adanya tantangan struktural, antara lain kesenjangan kapasitas antar desa, keterbatasan inovasi ekonomi lokal, serta ketergantungan pada bantuan eksternal.

Secara umum, tren ini menunjukkan arah positif, namun belum cukup kuat untuk mempercepat peningkatan jumlah Desa Mandiri secara signifikan. Kondisi ini menuntut Pemerintah Kabupaten Klaten untuk memperkuat strategi akselerasi Desa Mandiri, antara lain melalui penajaman intervensi berbasis IDM, pendampingan intensif pada desa berkembang dan maju, replikasi praktik baik dari desa yang berhasil naik status, serta penguatan ekonomi desa yang berkelanjutan.

Terbitnya Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 9 Tahun 2024 mengalihkan instrumen penilaian status desa dari Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa (ID) mulai tahun 2025. Terjadi perubahan mendasar pada konsep dan dimensi penyusun kedua indeks tersebut yang secara langsung mengubah variabel komponen perhitungan dan berdampak pada perhitungan proyeksi realisasi maupun penentuan target status desa kedepannya. Hal ini sebagaimana pemutakhiran target indikator Persentase Desa Mandiri yang telah diamanatkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kepada Kabupaten/ Kota dalam rangka



Penyelarasan RPJMD 2025-2029 dengan RPJMN dan dengan mendasari perubahan konsep perhitungan dari Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa (ID).

c. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan layanan pilihan yang berperan dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan kualitas keluarga. Capaian pada urusan ini mencerminkan kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelayanan keluarga berencana secara berkelanjutan.

Tabel 2.67 Data Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2025

Indikator	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
TFR (Angka Kelahiran Total)	%	N/A	1,95	1,92	1,91	1,94
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/ MCPR</i>)	%	N/A	75,29	62,77	70,3	63,6
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	N/A	7,16	6,22	7,3	12,6

Sumber: DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten, 2025

Berdasarkan tabel di atas, *Total Fertility Rate (TFR)* menunjukkan kecenderungan menurun pada periode 2022–2024. Pada tahun 2022, TFR Kabupaten Klaten tercatat sebesar 1,95, kemudian menurun menjadi 1,92 pada tahun 2023 dan kembali turun menjadi 1,91 pada tahun 2024, naik kembali di tahun 2025 menjadi 1,94. Penurunan TFR di tahun 2024 mengindikasikan semakin terkendalinya tingkat kelahiran dan keberhasilan program pengendalian penduduk serta keluarga berencana. Data TFR tahun 2021 belum tersedia.

Sejalan dengan itu, persentase pemakaian kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/MCPR*) menunjukkan dinamika yang berfluktuasi. Pada tahun 2022, MCPR tercatat sebesar 75,29 persen, kemudian mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2023 menjadi 62,77 persen. Namun, pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 70,3 persen, tahun 2025 menurun lagi menjadi 63,6. Data MCPR tahun 2021 belum dirilis.

Sementara itu, persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) juga mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022, angka *unmet need* sebesar 7,16 persen, menurun menjadi 6,22% pada tahun 2023, namun kembali meningkat pada tahun 2024 dan 2025 menjadi 7,3 dan 12,6 persen. Data *unmet need* untuk tahun 2021 belum tersedia.

Secara keseluruhan, tren penurunan TFR di Kabupaten Klaten menunjukkan capaian positif dalam pengendalian kelahiran. Namun, fluktuasi pada



penggunaan kontrasepsi modern dan *unmet need* menandakan perlunya penguatan layanan keluarga berencana, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kontrasepsi, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat agar capaian pembangunan kependudukan dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

d. **Komunikasi dan Informatika**

Di era globalisasi, masyarakat menuntut pelayanan pemerintah yang cepat, fleksibel dan efisien. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna meningkatkan kualitas layanan publik. SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pemerintah Kabupaten Klaten menggunakan indeks SPBE sebagai alat ukur untuk mengetahui peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Capaian indeks SPBE untuk Kabupaten Klaten Tahun 2025 telah mencapai 4,22. Dengan melihat capaian indeks SPBE untuk Kabupaten Klaten di Tahun 2025 sebesar 4,2 menggambarkan bahwa upaya digitalisasi pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik. Sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor: /66/PD.02/2025 tanggal 21 April 2025 mulai tahun 2025 indikator SPBE sudah tidak lagi digunakan dan di ganti dengan Indeks Pemerintahan Digital (Indeks Pemdi) Namun demikian untuk tahun 2025 belum ada penilaian resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Target, indikator, dan strategi penguatan tata kelola pemerintahan digital yang selaras dengan kerangka pengukuran Indeks Pemdi Sudah Terakomodir dalam Dokumen Perencanaan baik di RPJMD Renstra dan Renja OPD dengan Terimplementasikannya Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) Yang Meliputi Tata Kelola, Manajemen SPBE, dan Audit TIK. Perkembangan Capaian Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten Tahun 2021 - 2025 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.68 **Capaian Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2025**

Indikator	Satuan	Tahun Ke					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,00	2,74	N/A	3,70	4,07	4,22
Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Diskominfo Kabupaten Klaten, 2025



e. Koperasi & Usaha Kecil Menengah

Koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Keberadaan koperasi di Kabupaten Klaten jumlahnya cukup banyak dan tersebar di seluruh kecamatan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif diharapkan dapat memberdayakan ekonomi berbasis kerakyatan, guna menurunkan angka kemiskinan dan menurunkan jumlah pengangguran. Pemberdayaan usaha mikro dan kecil (UMK) serta koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian. Berikut ini perkembangan koperasi di Kabupaten Klaten tahun 2021-2025.

Tabel 2.69 Perkembangan Koperasi Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

No	Pengembangan Usaha Nasional	Jumlah (Unit)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Koperasi	898	900	909	912	1280
2	KUD	34	34	34	34	35
3	Koperasi Aktif	494	315	312	304	723
4	Koperasi Tidak Aktif	404	585	597	608	557
5	Koperasi Sehat	16	16	16	16	17
6	Koperasi Cukup Sehat	335	203	260	288	266

Sumber: DKUKMP Kabupaten Klaten, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, perkembangan jumlah koperasi di Kabupaten Klaten pada tahun 2021-2025 mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2024 sebanyak 912 koperasi, mengalami peningkatan jika dibanding pada tahun 2023 sebanyak 909 koperasi, ada penambahan sebanyak 3 koperasi yang terinput di data base Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Sedangkan di tahun 2025 jumlah koperasi ada 1.280 unit koperasi, penambahan jumlah koperasi disebabkan karena adanya program pembentukan Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih, diharapkan dapat memperkuat perekonomian lokal, memperluas lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan.

Jumlah koperasi aktif dalam tinjauan Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan adalah koperasi yang dalam 3 tahun terakhir masih melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi. Jumlah koperasi aktif pada tahun 2024 sebanyak 312 koperasi, mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2023 sebanyak 304 koperasi. Sedangkan untuk koperasi tidak aktif pada tahun 2024 sebanyak 608, mengalami kenaikan sebanyak 11 koperasi dibandingkan dengan tahun 2023 sebanyak 597 dikarenakan koperasi tersebut tidak melaksanakan RAT selama 3 tahun berturut-turut. Jumlah koperasi aktif tahun 2025 ada 723 unit koperasi, hal ini disebabkan oleh adanya penambahan koperasi di tahun 2025 dan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih ada 425 Koperasi.



Dari total koperasi aktif terdapat 17 koperasi dinyatakan sehat dengan hasil penilaian koperasi di atas 80, sedangkan yang katagori cukup sehat terdapat 266 koperasi dengan dasar hasil penilaian koperasi 60 sampai kurang dari 80 dan untuk koperasi baru belum bisa di nilai kesehatan koperasinya karena baru bisa dinilai setelah melakukan laporan RAT minimal 2 (dua) kali.

Perlunya pembinaan dan pendampingan koperasi cukup sehat agar menjadi koperasi aktif, serta mendukung rencana program pemerintah dalam mewujudkan Koperasi Merah Putih sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dimana setiap desa/kelurahan memiliki 1 unit Koperasi Merah Putih dengan harapan akan menguatkan perekonomian kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Kabupaten Klaten yang berbasis pada prinsip gotong royong dan kekeluargaan serta mendukung pengembangan UMKM.

Jumlah usaha mikro selama kurun waktu tahun 2021-2025 mengalami kenaikan, pada tahun 2024 terdapat 50.332 unit usaha mikto dan pada tahun 2025 terdapat 50.957 unit usaha. Ada pertambahan jumlah usaha mikro sebesar 635 usaha mikro atau mengalami sebesar 1,26%. Sedangkan usaha mikro yang mempunyai legalitas usaha dengan telah dikeluarkannya Nomor Induk Berusaha (NIB) tahun 2025 terdapat 10.780 usaha mikro.

Tabel 2.70 Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten
Tahun 2021-2025

No	Pengembangan Usaha Nasional	Jumlah (Unit)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Unit Usaha (UMKM)					
	a). UMKM Mikro	50.125	50.175	50.245	50.322	50.957
	b). UMKM Kecil	5.030	5.030	5.030	5.030	5.227
2	Jumlah Tenaga Kerja (orang)					
	a).Usaha Kecil	137.228	141.266	141.571	142.986	146.198
	b).Usaha Menengah/ Besar	12.717	12.717	12.717	12.884	13.355

Sumber: DKUKMP dan Disperinaker Kabupaten Klaten, 2026

Kenaikan jumlah UMKM berdampak pada bertambahnya penyerapan tenaga kerja untuk usaha kecil dari 142.986 orang pada tahun 2024 menjadi 146.198 orang pada tahun 2025 atau bertambah 3.212 orang. Sedangkan jumlah tenaga kerja usaha menengah/besar pada tahun 2021-2023 sebanyak 12.717 orang. Kondisi ini dikarenakan banyak lapangan usaha yang gulung tikar saat Pandemi Covid-19 sehingga melakukan pengurangan tenaga kerja. Sedangkan jumlah tenaga kerja untuk usaha menengah besar tahun 2024 sebanyak 12.884 orang, naik dibandingkan tahun 2025 sebesar 13.355 orang yaitu terdapat kenaikan sebanyak 471 orang.

Guna mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM, Pemerintah Kabupaten Klaten telah menetapkan 10 (sepuluh) produk unggulan daerah berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 31/050/1 Tahun 2024 tentang Produk



Unggulan Daerah yaitu Batik, Lurik, Konveksi, Tembakau Asepan dan Rajangan, Mebel, Keramik, Logam. Di samping itu, Kabupaten Klaten juga telah memiliki 11 (sebelas) Klaster UKM yaitu Klaster Batik, Lurik, Konveksi, Keramik, Mebel, Logam, Handycraft, Makanan Olahan, Lereng Merapi, Desa Wisata dan Minapolitan sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 050/91 Tahun 2017, dengan harapan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi local serta dapat menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan sector dan sub sektor lainnya. Selain itu juga melalui Keputusan Bupati Klaten Nomor 518.3/866 Tahun 2019 tentang Batik Sindu Melati sebagai Batik Khas Kabupaten Klaten, guna mengangkat batik sebagai salah satu produk unggulan Kabupaten Klaten, diharapkan dapat menjadi trademark dan brand image bagi Kabupaten Klaten.

Guna meningkatkan akses pasar dan guna mendorong kecintaan terhadap produk lokal UMKM Kabupaten, pada tahun 2019 telah ditetapkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penggunaan Slogan Aku Cinta Produk Klaten. Pemberdayaan UMKM khususnya usaha mikro perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai pelatihan untuk klaster UMKM guna meningkatkan ketrampilan SDM UMKM, penguatan kelembagaan, fasilitasi bantuan bahan baku, peralatan maupun modal usaha, fasilitasi standarisasi produk antara lain PIRT, halal, label kandungan nutrisi, merk dagang, HAKI, SKKNI dan lain lain sebagainya..

f. Statistik

Penyelenggaraan urusan statistik memiliki peran strategis dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas serta pengambilan kebijakan berbasis data (evidence-based policy). Proses perencanaan pembangunan memerlukan dukungan data dan informasi statistik yang berkualitas, karena ketersediaan data yang andal merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Penyelenggaraan tata kelola data yang baik untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan dapat mendorong keterbukaan serta transparansi dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah terus berkomitmen meningkatkan kualitas tata kelola data sektoral guna memastikan setiap kebijakan publik yang dilahirkan benar-benar berbasis pada fakta lapangan dan kebutuhan riil masyarakat.

Urgensi penguatan instrumen pengumpulan data ini dipertegas melalui implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI). Pelaksanaan SDI bertujuan mewujudkan keterpaduan data pembangunan melalui penerapan standar data, metadata, interoperabilitas data, serta penggunaan kode referensi dan data induk yang seragam di seluruh perangkat daerah. Berdasarkan hasil Evaluasi Satu Data



Indonesia, capaian Indeks Satu Data Indonesia Kabupaten Klaten menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2023 Kabupaten Klaten memperoleh nilai 56,34 dengan kategori Cukup dan meningkat menjadi 72,82 dengan kategori Baik pada tahun 2024, serta untuk tahun 2025 masih menunggu hasil evaluasi. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin baiknya koordinasi antar penyelenggara Satu Data Indonesia, peningkatan kualitas data dan metadata, serta optimalisasi pemanfaatan portal data daerah.

Tabel 2.71 Indeks Satu Data Indonesia Tahun 2021-2025

No	Indeks	Nilai				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Satu Data Indonesia	NA	NA	56,34	72,82	NA

Sumber: Bappenas, 2026

Dalam rangka meningkatkan kualitas data statistik sektoral, Pemerintah Kabupaten Klaten terus memperkuat tata kelola data melalui implementasi Satu Data Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyelenggaraan Forum Satu Data Klaten secara rutin sebanyak dua kali dalam setahun sebagai wadah koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian berbagai permasalahan data antar perangkat daerah. Forum ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesepahaman para produsen data dalam menerapkan standar data, metadata, dan interoperabilitas data sesuai ketentuan yang berlaku.

Kualitas data pembangunan diarahkan untuk memenuhi enam dimensi utama, yaitu akurat, relevan, tepat waktu (timeliness), mudah diakses (accessibility), koheren (coherence) yang mencerminkan konsistensi antar sektor, antar periode waktu, dan antar wilayah, serta mudah diinterpretasikan (interpretability). Untuk mewujudkan kualitas data tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten melaksanakan berbagai langkah strategis yang meliputi peningkatan kualitas data dan metadata, penguatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data dan statistik.

Pemerintah Kabupaten Klaten menjalin kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klaten dalam penyusunan dan penerbitan berbagai publikasi statistik serta dokumen perencanaan pembangunan daerah. Publikasi dan dokumen tersebut antara lain Kabupaten Klaten Dalam Angka (KKDA), Kajian Ekonomi Daerah (KED), Tabel Input–Output, Profil Desa, Profil Daerah, Evaluasi RKPD, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Di sisi lain, potret riil atas kualitas dan kematangan pengelolaan data di tingkat daerah diukur secara objektif melalui instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Evaluasi yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah yang menghasilkan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS).



EPSS merupakan instrumen evaluasi yang digunakan untuk menilai kualitas penyelenggaraan statistik sektoral secara menyeluruh, meliputi aspek prinsip Satu Data Indonesia, kualitas proses bisnis statistik, kelembagaan statistik, kualitas data statistik, serta tingkat pemanfaatan data statistik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Hasil evaluasi tersebut menjadi gambaran tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mudah diakses.

Dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, Pemerintah Kabupaten Klaten terus melakukan berbagai upaya, antara lain melalui penguatan koordinasi antara Walidata, Pembina Data, dan Produsen Data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data dan statistik, pengembangan sistem informasi pendukung statistik sektoral, serta peningkatan kualitas metadata dan dokumentasi statistik sektoral pada seluruh perangkat daerah.

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral menunjukkan adanya peningkatan kinerja penyelenggaraan statistik sektoral di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2023, nilai IPS Kabupaten Klaten tercatat sebesar 1,61 dengan kategori kurang, kemudian meningkat menjadi 2,52 pada tahun 2024 dengan kategori cukup. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek kelembagaan, proses bisnis statistik, serta kualitas data dan pemanfaatan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Tabel 2.72 Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Tahun 2021-2025

No	Indeks	Nilai				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	NA	NA	1,61	2,52	NA

Sumber: Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Badan Pusat Statistik, 2026

Peningkatan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral diharapkan dapat memperkuat implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Klaten, sehingga ketersediaan data pembangunan semakin berkualitas, terintegrasi, dan mampu mendukung perumusan kebijakan serta pengambilan keputusan yang tepat sasaran dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Harapannya di tahun 2025 nilai predikat indeks pembangunan statistik meningkat menjadi lebih baik.

g. Perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2025 sejumlah 83.782 orang. Kondisi ini mengalami peningkatan signifikan sebanyak 16.068 orang apabila dibandingkan dengan jumlah pengunjung pada tahun 2023. Pada tahun 2025, terdapat pengembangan program inovasi layanan



perpustakaan yaitu Bus Jemput Anak Baca Buku (BEJANAKU). Program inovasi ini memberikan pengenalan lebih dini terhadap kegemaran membaca dan perpustakaan kepada anak-anak TK-KB melalui kunjungan ke perpustakaan daerah menggunakan armada bus. Kunjungan ini memiliki rute ke beberapa kantor pemerintahan yaitu pengenalan terhadap kantor Bupati dan pusat pemerintahan di Kabupaten Klaten melalui kunjungan ke Kantor Bupati, pengenalan terhadap kebencanaan melalui kunjungan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan pengenalan terhadap pusat ibadah keagamaan yang berada di kompleks Graha Bung Karno. Pengembangan dilakukan pada pergantian rute tujuan akhir yaitu pengenalan terhadap pusat ibadah keagamaan yang berada di kompleks Grha Bung Karno. Sampai dengan akhir tahun 2025, seluruh layanan perpustakaan dapat beroperasi secara optimal. Adapun layanan perpustakaan yang telah beroperasi secara normal yaitu:

1. Pinjam Buku Cara Online (Jambu Carlin)
2. Bus Jemput Anak Baca Buku (Bejanaku)
3. Pojok Baca Buku Digital (Pocadi) di Mall Pelayanan Publik
4. Perpustakaan *Car Free Day*
5. Layanan perpustakaan keliling

Dalam meningkatkan layanan perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten juga meluncurkan program inovasi Kartu Tanda Anggota Perpustakaan Berbasis Nomor Induk Kependudukan (Kanda Pusta Berindu). Program inovasi ini merupakan sinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten yaitu dengan pengintegrasian data anggota Perpustakaan yang mudah diakses masyarakat yang diimplementasikan dalam bentuk penyaluran data dengan telah terintegrasinya data anggota perpustakaan dengan penerapan NIK maka anggota perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten otomatis menjadi anggota Perpustakaan Nasional. Selain itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tetap berupaya untuk mengoptimalkan pelayanan melalui sistem online/Digital dengan Aplikasi I-Klaten yang berisi koleksi buku Digital (*e-book*) yang dapat diakses oleh anggota masyarakat yang tercatat sebagai anggota e-pustaka dengan mengunduh dari layanan Playstore di samping dengan pelayanan langsung yang dilaksanakan oleh perpustakaan Daerah.

Jumlah koleksi buku perpustakaan tahun 2025 sebanyak 53.860 eksemplar. Penambahan jumlah koleksi buku tahun 2025 sebanyak 1.349 eksemplar dibandingkan tahun 2024. Jumlah judul koleksi judul buku sampai dengan saat ini sebanyak 39.921 eksemplar sedangkan untuk jumlah pustakawan pada tahun 2025 sebanyak 5 (lima) orang pustakawan. Berkaitan dengan perkembangan perpustakaan desa di wilayah Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2025, terdapat 206 perpustakaan yang telah dilakukan pembinaan dari



sebanyak 391 desa di Kabupaten Klaten. Pembinaan perpustakaan ini menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya sehingga diharapkan seluruh desa di wilayah Kabupaten Klaten dapat terbina perpustakaannya.

Tabel 2.73 Data terkait Kepustakaan di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

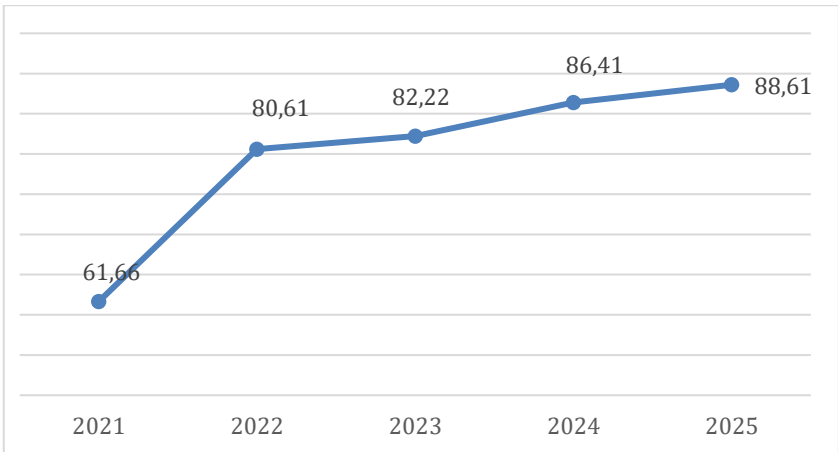
Indikator	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang/ Pengunjung	11.811	35.434	57.291	67.714	83.782
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eksemplar	50.156	50.745	51.377	52.511	53.860
Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun	Orang/ Pengunjung	55.154	51.867	51.785	48.626	51.206
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	Eksemplar	37.673	38.009	38.348	39.178	39.921
Jumlah pengunjung perpustakaan per hari	Orang/ Pengunjung	32	97	157	185	229
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	64,184	59,738 2	64,67	78,09	58,5
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	-	13,12	43,57	63,56	12,24

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten, 2026

h. Kearsipan

1. Pengawasan Kearsipan

Nilai pengawasan kearsipan Kabupaten Klaten menunjukkan peningkatan yang konsisten selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021, nilai pengawasan kearsipan berada pada angka 61,66 kemudian meningkat signifikan menjadi 80,61 pada 2022. Peningkatan berlanjut secara bertahap pada 2023 (82,22) dan 2024 (86,41) hingga mencapai 88,61 pada 2025. Kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan serta peningkatan kepatuhan perangkat daerah terhadap standar pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten2, 2026

Gambar 2.77 Nilai Pengawasan Kearsipan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

2. Capaian Kinerja Indikator Kearsipan

Secara keseluruhan, capaian indikator kearsipan Kabupaten Klaten berada pada kategori sangat baik, terutama sejak 2023. Peningkatan tajam pada ketersediaan arsip hingga mencapai 100% mengindikasikan keberhasilan penguatan sistem pengelolaan arsip, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun kepatuhan perangkat daerah. Selain itu, tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara juga meningkat dari 63,33% pada 2021 menjadi 89,17% pada 2024–2025, mencerminkan perbaikan tata kelola arsip yang berkelanjutan. Indikator pengawasan kearsipan internal menunjukkan kinerja sangat baik, dengan capaian melebihi 100% pada 2022–2023 dan tetap terjaga hingga 2025. Sementara itu, persentase arsip yang diakuisisi telah mencapai 100% sejak 2022-2025 menunjukkan konsistensi dalam upaya penyelamatan arsip statis.

Meskipun capaian pengawasan internal yang melampaui target mencerminkan efektivitas pembinaan dan pengendalian kearsipan, namun ke depan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas, bukan hanya kuantitas pemenuhan indikator. Dengan demikian, fokus kebijakan selanjutnya perlu diarahkan pada penguatan kualitas arsip, digitalisasi, peningkatan kompetensi SDM kearsipan, serta integrasi pengelolaan arsip antar perangkat daerah, agar capaian kinerja tidak hanya tinggi secara angka, tetapi juga berdampak nyata terhadap akuntabilitas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

Tabel 2.74 Data terkait Kearsipan di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Indikator	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	70,00	70,01	100	100	100
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	63,33	64,17	82,50	89,17	89,17
Persentase pengawasan kearsipan internal	%	N/A	112	117,65	100	101,96
Persentase arsip yang diakuisisi	%	N/A	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten, 2025

Capaian kinerja kearsipan Kabupaten Klaten tidak terlepas dari dukungan capaian indikator lainnya. Jumlah koleksi arsip meningkat konsisten dari 122.445 arsip pada 2021 menjadi 128.721 arsip pada 2025, mencerminkan komitmen



berkelanjutan dalam penyelamatan dan pengelolaan arsip daerah. Cakupan pengawasan juga telah optimal, ditunjukkan oleh jumlah perangkat daerah yang diaudit meningkat dari 24 perangkat daerah pada 2021 menjadi 51 perangkat daerah sejak 2022 dan bertahan hingga 2025, yang mengindikasikan pengawasan kearsipan telah menjangkau seluruh perangkat daerah. Peningkatan kapasitas SDM pengelola kearsipan menunjukkan perbaikan, dari 2 orang pada 2021 menjadi 5 orang sejak 2022, namun jumlah tersebut masih terbatas dibandingkan kebutuhan pengelolaan arsip yang semakin kompleks. Secara lebih detail data capaian kearsipan Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.75 Data Capaian Kearsipan di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Indikator	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Koleksi Arsip	Arsip	122.445	125.767	126.458	127.660	128.721
Jumlah OPD yang diaudit	OPD	24	51	51	51	51
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip di Daerah Rawan Bencana (Arsip yang dialihmediakan)	Arsip	2.028	3.322	2.088	1.152	1.011
Jumlah Pengunjung Arsip	Orang	45	45	43	39	43
Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Orang	2	5	5	5	5

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten 2025

i. Kehutanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terkait urusan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah adalah pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) kabupaten/kota. Untuk Kabupaten Klaten tidak ada wilayah TAHURA, sehingga untuk urusan ini Kabupaten Klaten tidak memiliki kewenangan.

j. Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan energi dan sumber daya mineral yang merupakan kewenangan kabupaten adalah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten. Hingga saat ini di Kabupaten Klaten belum ditemukan sumber panas bumi, sehingga tidak ada program bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

k. Pertanahan

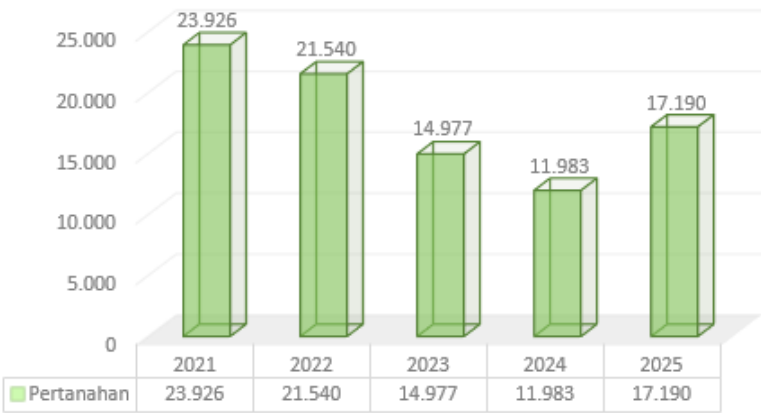
Urusan pertanahan menjadi salah satu indikator urusan piliham. Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten pada tahun 2021 menerbitkan 23.926 sertifikat, tahun 2022 menerbitkan 19.518 sertifikat, tahun 2023 menerbitkan 14.977 sertifikat, tahun 2024 menerbitkan 11.983 sertifikat, dan tahun 2025 menerbitkan 17.190 sertifikat. Adapun data Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten 2021-2025 disajikan pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.76 Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang diterbitkan Kantor
Pertanahan Kabupaten Klaten 2021-2025

No	Bulan	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Januari	1.157	2.161	1.566	1.370	828
2	Februari	1.016	1.560	1.249	1.001	940
3	Maret	3.582	1.909	1.340	872	906
4	April	3.211	1.634	889	751	1.673
5	Mei	2.147	938	1.262	1.161	2.380
6	Juni	1.728	1.828	1.281	828	709
7	Juli	1.249	2.209	1.560	1.185	1.360
8	Agustus	2.303	1.535	1.171	1.056	1.495
9	September	3.271	1.856	761	617	1.083
10	Oktober	1.824	1.187	1.332	499	1.375
11	November	1.247	1.331	1.241	750	2.246
12	Desember	1.191	1.370	1.325	1.893	2.195
TOTAL		23.926	19.518	14.977	11.983	17.190

Sumber: Kantor ATR Kabupaten Klaten, 2025



Sumber: Kantor ATR Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.78 Data Pertanahan di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Dari grafik diatas bisa dilihat bahwa capaian kinerja ATR BPN terkait Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan di tahun 2018 ada program dari Presiden Joko Widodo terkait pemutihan (program sertifikat gratis), namun pada tahun 2025 Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah di Kabupaten Klaten mengalami kenaikan lagi yaitu sebanyak 17.190 sertifikat.

2.1.3.4. Fokus Urusan Pemerintahan Umum

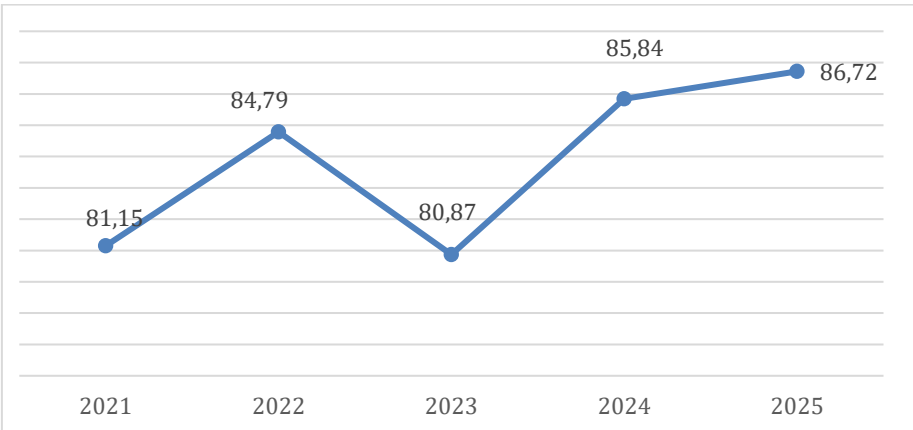
a. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Demokrasi Indonesia (IDI) di Kabupaten Klaten menjadi tolok ukur untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang inklusif serta menjamin kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan demokratis. IDI Kabupaten Klaten selama periode tahun 2021–2025 menunjukkan dinamika capaian yang fluktuatif namun cenderung meningkat pada akhir periode. Pada tahun 2021, nilai IDI Kabupaten Klaten tercatat sebesar 81,15, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 84,79. Namun pada



tahun 2023 terjadi penurunan nilai IDI menjadi 80,87. Selanjutnya, pada tahun 2024, nilai IDI kembali mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai 85,84 dan 86,72 di tahun 2025.

Capaian tahun 2025 tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas penyelenggaraan demokrasi, termasuk meningkatnya tingkat partisipasi politik pemilih yang tinggi di Kabupaten Klaten (di angka 81,61%), keterbukaan kanal pelayanan publik dan ruang pengaduan, serta kebebasan berpendapat. Karakter masyarakat Kabupaten Klaten yang cenderung mengedepankan guyub rukun dalam menghadapi dinamika politik juga berimplikasi positif terhadap tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.



Sumber : Bakesbangpol Kabupaten Klaten, 2026

Gambar 2.79 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

b. Jumlah Kejadian Konflik SARA

Kondisi konflik yang berkaitan dengan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) di Kabupaten Klaten secara umum berada dalam situasi aman dan kondusif dengan tingkat potensi konflik yang relatif rendah. Masyarakat mampu menjaga kerukunan dan toleransi dalam kehidupan sosial, didukung oleh kearifan lokal serta peran aktif tokoh masyarakat dan tokoh agama. Pemerintah Kabupaten Klaten bersama TNI, Polri, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) secara aktif melakukan upaya deteksi dini, mediasi, dan pencegahan konflik sosial. FKUB juga berperan strategis dalam menjaga komunikasi lintas agama, memfasilitasi dialog, serta menyelesaikan potensi permasalahan secara musyawarah.

Pada periode waktu 2021-2025 di Kabupaten Klaten Tidak terdapat konflik SARA berskala besar yang berdampak luas terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Potensi konflik yang muncul umumnya bersifat laten, sporadis, dan dapat dikelola melalui mekanisme sosial serta peran aktif pemerintah daerah dan aparat terkait. Meskipun kondisi relatif kondusif, namun konflik SARA menjadi potensi risiko yang perlu diantisipasi. Penguatan sistem deteksi dini dan pemetaan potensi konflik sosial perlu dilakukan melalui peningkatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan konflik sosial, peningkatan literasi digital masyarakat untuk mencegah



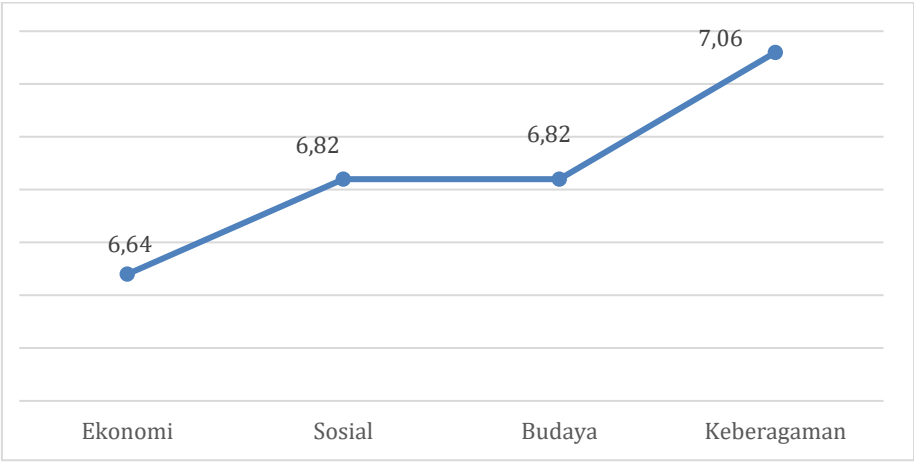
hoaks/ ujaran kebencian dan optimalisasi peran FKUB dan forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM).

c. Indeks Harmoni Indonesia

Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) sebagai tolok ukur komposit yang mengukur tingkat kerukunan dan keselarasan sosial, budaya, ekonomi, dan keberagaman di Kabupaten Klaten baru mulai dilakukan pengukuran di tahun 2025. Berdasarkan hasil pengukuran, kondisi harmoni masyarakat Kabupaten Klaten pada tahun 2025 berada pada kategori “Baik”, dengan skor 6,83 dari skala 9. Ditinjau dari dimensi pembentuknya, Dimensi Sosial dan Budaya masing-masing memperoleh skor 6,82 (Baik). Capaian ini menunjukkan bahwa nilai gotong royong, kohesivitas sosial, serta pelestarian budaya lokal masih terjaga dengan baik.

Sementara itu, harmoni di Kabupaten Klaten paling kuat ditopang oleh Dimensi Keberagaman yang mencapai skor 7,06 (Sangat Baik). Hal ini mencerminkan kuatnya praktik toleransi antarumat beragama, peran tokoh agama yang efektif dalam menjaga kerukunan, serta relatif minimnya konflik berbasis identitas keagamaan. Kondisi ini menjadi modal sosial penting dalam menjaga stabilitas daerah dan mendukung keberlanjutan pembangunan. Meskipun demikian dimensi keberagaman tetap menjadi dimensi yang paling rentan memiliki potensi risiko sehingga perlu penyusunan rencana tindak lanjut pengendalian risiko sebagai upaya mitigasi.

Adapun Dimensi Ekonomi menjadi aspek yang relatif paling lemah dengan skor 6,64 (Baik). Kondisi ini mengindikasikan bahwa tantangan kesejahteraan ekonomi, kesempatan kerja, dan kewirausahaan masih berpotensi memengaruhi stabilitas harmoni. Ketimpangan akses ekonomi, terbatasnya lapangan kerja berkualitas, serta belum optimalnya pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat menjadi faktor yang menurunkan tingkat keharmonisan apabila tidak ditangani secara sistematis. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2027 untuk Akselerasi Pembangunan SDM dan Infrastruktur sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing daerah, pemerataan infrastruktur serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.



Sumber : Bakesbangpol Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.80 Nilai Dimensi Indeks Harmonisasi Kabupaten Klaten Tahun 2025



2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

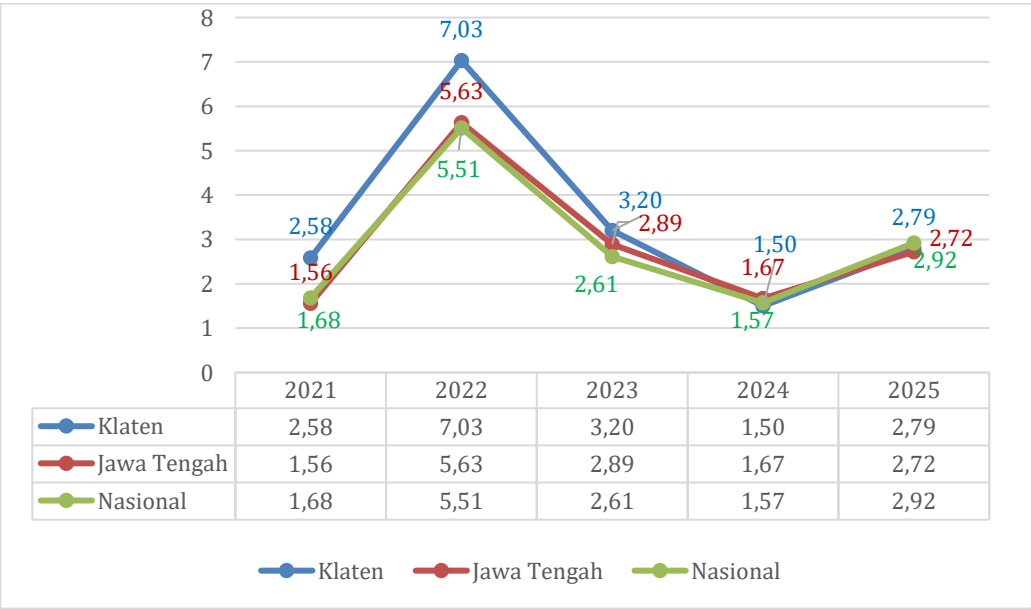
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Tingkat Inflasi

Perkembangan inflasi di Kabupaten Klaten selama Tahun 2021-2025 mengalami fluktuatif. Inflasi di Kabupaten Klaten pada Tahun 2021 sebesar 2,58% atau lebih rendah dibanding Tahun 2025 sebesar 2,79%. Mulai tahun 2022 inflasi Kabupaten Klaten sebesar 7,03%, dimana data ini diambil dari tingkat inflasi Kota Surakarta yang menggambarkan inflasi Kabupaten Klaten, hal ini dikarenakan pada tahun 2022 Badan Pusat Statistik Kabupaten Klaten tidak menghitung tingkat inflasi. Sedangkan untuk tahun 2023 inflasi Kabupaten Klaten sebesar 3,20%, dan mengalami penguatan menjadi 1,50% pada tahun 2024 dan tahun 2025 sebesar 2,79%, hal ini disebabkan banyak terjadi perubahan harga barang kebutuhan pokok penting pembentuk tingkat inflasi daerah.

Laju inflasi selama Tahun 2021-2025 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif, namun berdasarkan penggolongannya inflasi di Kabupaten Klaten apabila dilihat termasuk ringan, karena masih di bawah 10% per tahunnya. Sementara itu jika dibandingkan dengan inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada tahun 2025, inflasi Kabupaten Klaten sebesar 2,79% mengalami penguatan dibandingkan dengan inflasi Jawa Tengah sebesar 2,72% dan inflasi Nasional sebesar 2,92%. Hal ini disebabkan oleh terkendalinya harga beberapa komoditas pangan utama, ketersediaan pasokan pangan, kelancaran distribusi dan berfungsinya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klaten.

Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Klaten selama Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada di bawah ini.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPS Indonesia, 2026

Gambar 2.81 Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025



2. Disparitas harga

Disparitas harga mencerminkan adanya perbedaan nilai jual suatu barang atau jasa di berbagai wilayah, waktu, maupun saluran distribusi. Perbedaan ini umumnya dipengaruhi oleh faktor biaya produksi, distribusi, ketersediaan pasokan, tingkat permintaan, serta struktur pasar yang tidak merata. Apabila tidak dikelola dengan baik, disparitas harga dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi, menurunkan daya beli masyarakat, serta memicu ketidakadilan sosial, sehingga diperlukan peran kebijakan dan pengawasan untuk menjaga keseimbangan harga di berbagai wilayah.

Tabel 2.77 Perkembangan Capaian Disparitas Harga Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Indikator	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Disparitas Harga	%	1,07	1,04	1,01	12,8	6,54

Sumber : DKUKMP Kabupaten Klaten, 2026

Disparitas harga untuk 13 (tiga belas) komoditas di Kabupaten Klaten pada tahun 2021-2025 menunjukkan perkembangan yang cukup baik dimana pada tahun 2021-2023 relatif menurun yaitu pada tahun 2021 sebesar 1,07, pada tahun 2022 sebesar 1,04 dan pada tahun 2023 sebesar 1,01, kondisi ini menunjukkan terjadinya perbedaan harga antar wilayah relatif semakin kecil, dimana hal ini mencerminkan kondisi distribusi barang dan kestabilan harga yang cukup baik. Namun pada tahun 2024 disparits harga mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 12,8%, yang dipengaruhi antara lain oleh perubahan biaya distribusi, perubahan harga komoditas dan gangguan pasokan. Pada tahun 2025 disparitas harga mengalami penurunan menjadi 6,54 persen, hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam menjaga stabilitas harga. Selain itu perkembangan nilai disparitas harga juga dipengaruhi oleh factor pasokan dan permintaan barang musiman serta kondisi cuaca ekstrem yang berdampak pada produksi pangan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi disparitas harga antara lain melalui inspeksi mandadak (sidak) ke pasar-pasar tradisonal serta menggelar operasi pasar murah di berbagai kecamatan.

3. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Sektor industri pengolahan merupakan salah satu kontributor penting dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten. Peran sektor ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang didominasi oleh kegiatan pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi, terutama yang berbasis pada potensi lokal. Industri pengolahan di Klaten didukung oleh keberadaan industri kecil dan menengah, seperti industri makanan dan minuman, tekstil, kerajinan, serta pengolahan hasil pertanian, yang tersebar di berbagai wilayah kecamatan.

Rasio PDRB Industri Pengolahan mencerminkan besarnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. Rasio ini menjadi indikator penting dalam menilai tingkat industrialisasi dan



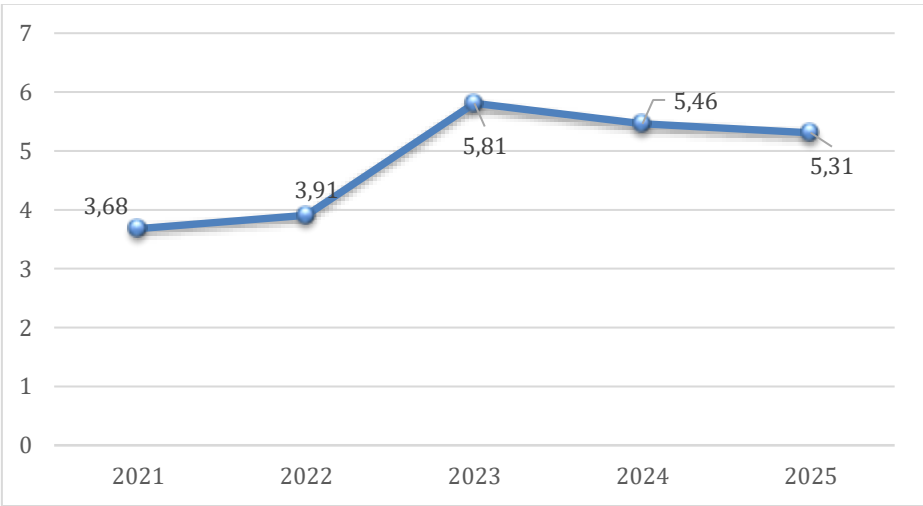
struktur perekonomian daerah, hal ini menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan masih memegang peranan penting dalam perkembangan perekonomian di Kabupaen Klaten.

Tabel 2.78 Perkembangan rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Indikator	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
PDRB Industri Pengolahan	%	37,72	37,29	37,93	38,55	38,71

Sumber : Disperinaker Kabupaten Klaten, 2026

Rasio PDRB sektor industri pengolahan yang selama tahun 2021-2025 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2021, rasio tercatat sebesar 37,72% melambat menjadi 37,34% pada tahun 2022, namun sektor ini kembali menunjukkan pertumbuhan hingga mencapai 38,71% pada tahun 2025. Data ini mencerminkan bahwa sektor industri pengolahan tetap menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten.



Gambar 2.82 Perkembangan Pertumbuhan Industri Pengolahan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Pertumbuhan sektor lapangan usaha industri pengolahan di Kabupaten Klaten dari tahun 2021-2025 mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif. Pada tahun 2024 sempat mengalami penurunan sebesar 0,35% dan di tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,15 persen

Guna mendukung percepatan pemulihan pertumbuhan ekonomi di sektor industry pengolahan dan industry lain diperlukan peran aktif pemerintah dalam memfasilitasi pelaku IKM untuk meningkatkan daya saing produk baik produk lokal maupun produk berorientasi ekspor dan salah satu cara adalah dengan program Percepatan Penggunaan produk Dalam Negeri (P3DN) melalui gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI), sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro,



Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

4. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menggambarkan tingkat kontribusi sektor tersebut terhadap total PDRB suatu wilayah. Rasio ini menjadi indikator penting dalam menilai peran industri pariwisata dan jasa pendukungnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan rasio PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Klaten dipengaruhi oleh meningkatnya destinasi wisata dan even pariwisata, pertumbuhan usaha kuliner, baik skala besar maupun UMKM serta dampak jalan tol Jogja-Solo. Selain itu, peningkatan daya beli masyarakat dan mobilitas penduduk juga turut mendorong pertumbuhan sektor ini. Kondisi tersebut mencerminkan semakin berkembangnya sektor jasa yang berorientasi pada pelayanan dan konsumsi.

Tabel 2.79 Perkembangan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Indikator	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	3,54	3,76	3,76	3,88	4,15

Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2026

Perkembangan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum pada tahun 2021-2025 menunjukan perkembangan yang relatif meningkat meskipun stagnan di tahun 2022-2023 sebesar 3,76% dan mengalami peningkatan di tahun 2024 sebesar 3,88% serta tahun 2025 sebesar 4,15 persen, menunjukkan bahwa sektor ini memiliki peranan yang semakin menonjol dalam struktur perekonomian di Kabupaten Klaten yaitu dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan mulai tahun 2025.

5. Rasio PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Rasio PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mencerminkan besarnya kontribusi sektor perdagangan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah. Rasio ini menunjukkan peran aktivitas perdagangan, baik grosir maupun eceran, serta jasa reparasi kendaraan bermotor dalam mendorong pergerakan ekonomi daerah. Sektor ini merupakan salah satu pilar penting dalam struktur ekonomi daerah karena mencerminkan aktivitas distribusi barang dan jasa yang luas, serta memberi peluang lapangan kerja dan perputaran ekonomi lokal.



Tabel 2.80 Perkembangan Rasio PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Indikator	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Rasio PDRB PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	15,56	15,27	14,86	14,57	14,58

Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2026

Perkembangan Rasio PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 mengalami perlambatan yaitu pada tahun 2021 sebesar 15,56% dibandingkan tahun 2025 sebesar 14,85%, hal ini mencerminkan bahwa terdapat perlambatan aktifitas ekonomi dimana terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat.

Pasar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan sektor perdagangan di Kabupaten Klaten. Pasar merupakan sarana pendukung keberhasilan pembangunan ekonomi daerah dalam melaksanakan fungsinya sebagai sarana distribusi perdagangan. Gambaran Jumlah perkembangan pasar kios, los dan pedagang tahun 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.81 Jumlah Pasar Kios, Los dan Pedagang Menurut Kecamatan Tahun 2021-2025

Kecamatan	Pasar	Jumlah		
	Pemerintahan	Kios	Los	Pedagang
01 Prambanan	3	60	20	160
02 Gantiwarno	2	35	11	86
03 Wedi	3	248	21	648
04 Bayat	1	101	45	440
05 Cawas	4	183	19	999
06 Trucuk	2	49	12	55
07 Kalikotes	1	25	10	119
08 Kebonarum	1	10	-	2
09 Jogonalan	2	44	14	183
10 Manisrenggo	1	61	16	159
11 Karangnongko	1	76	4	120
12 Ngawen	1	21	1	95
13 Ceper	0	-	-	-
14 Pedan	1	56	-	217
15 Karangdowo	1	72	2	216
16 Juwiring	3	172	7	210
17 Wonosari	1	50	2	196
18 Delanggu	1	319	4	226
19 Polanharjo	0	-	-	-
20 Karanganom	3	95	14	204
21 Tulung	2	51	10	70
22 Jatinom	2	196	14	729
23 Kemalang	2	2	79	654
24 Klaten Selatan	1	36	3	94
25 Klaten Tengah	6	620	95	1.967
26 Klaten Utara	4	168	11	227
Jumlah				



Kecamatan	Pasar	Jumlah		
	Pemerintahan	Kios	Los	Pedagang
2025	49	2.750	414	8.076
2024	51	3.001	901	8.396
2023	51	2.580	180	8.353
2022	51	2.445	177	7.998
2021	51	2.445	177	7.881

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, 2026

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2021-2025 untuk jumlah kios, los dan pedagang mengalami perkembangan yang fluktuasi, dimana mulai tahun 2023 terjadi peningkatan akibat sudah mulai dibukanya akses pasar, aktivitas masyarakat dan pelaku usaha yang berdampak pada kenaikan daya beli masyarakat sehingga perekonomian mulai pulih dan normal kembali.. Pada tahun 2024 jumlah kios sebanyak 3.001, jumlah los sebanyak 901 dan pedagang sebanyak 8.396, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu jumlah kios sebanyak 2.580, jumlah los sebanyak 180 dan pedagang sebanyak 8.353, hal ini dikarenakan pada tahun 2023 sudah diresmikan dan mulai beroperasinya Pasar Gede Klaten sebagai pasar tradisional di Kabupaten Klaten. Selain itu, pada tahun 2024 ada revitalisasi pasar Pokoh di Desa Menden di Kecamatan Kebonarum.

6. Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio kewirausahaan Daerah merupakan indikator yang menunjukkan persentase jumlah wirausahawan dibandingkan dengan total penduduk usia produktif atau total angkatan kerja. Rasio ini mencerminkan tingkat kemandirian ekonomi dan daya saing suatu daerah. Oleh karena itu, peningkatan rasio kewirausahaan menjadi fokus penting dalam pembangunan ekonomi melalui penguatan akses permodalan, peningkatan keterampilan, kemudahan perizinan, serta penciptaan ekosistem usaha yang kondusif.

Tabel 2.82 Perkembangan Rasio Kewirausahaan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Indikator	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Rasio Kewirausahaan	%	2,6	2,13	2,53	3,30	3,32

Sumber: DKUKMP Kabupaten Klaten, 2026

Perkembangan rasio kewirausahaan tahun 2021-2025 mengalami perkembangan yang fluktuatif, pada tahun 2021 rasio kewirausahaan sebesar 2,60 persen. Selanjutnya pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 2,13 persen, yang menunjukkan adanya perlambatan pertumbuhan pelaku usaha atau aktivitas kewirausahaan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, rasio kewirausahaan kembali meningkat menjadi 2,53 persen dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 3,30 persen dan berlanjut pada tahun 2025 dengan capaian sebesar 3,32 persen, yang menunjukkan semakin meningkatnya



peran masyarakat dalam menciptakan usaha baru dan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif. Peningkatan rasio kewirausahaan antara lain didorong oleh peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan dan pendampingan UMKM, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran dan pengembangan usaha.

7. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kontribusi kegiatan ekonomi koperasi terhadap keseluruhan perekonomian daerah. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan total volume usaha koperasi dengan nilai PDRB pada periode tertentu. Semakin tinggi nilai rasio tersebut, semakin besar peran koperasi dalam mendorong aktivitas ekonomi dan pertumbuhan daerah.

Tabel 2.83 Perkembangan Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Indikator	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,350	1,220	1,240	1,130	1,135

Sumber: DKUKMP Kabupaten Klaten, 2026

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa perkembangan rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB pada tahun 2021-2025 mengalami perkembangan yang fluktuatif yaitu pada tahun 2021 sebesar 1,350 persen, menurun menjadi 1,220 persen tahun 2022, pada tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan sebesar 1,240 persen dan tahun 2024 menurun menjadi sebesar 1, 130 sedangkan pada tahun 2025 mengalami sedikit peningkatan menjadi 1,135 persen. Faktor yang mempengaruhi penurunan capaian pada tahun 2021-2024 antara lain :

1. Pertumbuhan PDRB lebih cepat dibanding pertumbuhan usaha koperasi
Sektor usaha lain (perdagangan modern, industri, jasa, dan perusahaan swasta) berkembang lebih pesat dan mendominasi sehingga kontribusi koperasi terhadap total perekonomian menjadi relatif lebih kecil.
2. Rendahnya daya saing koperasi
Koperasi sering menghadapi keterbatasan modal, teknologi, inovasi produk, dan akses pasar sehingga pertumbuhan volume usahanya tidak secepat pelaku usaha lainnya.
3. Perubahan pola konsumsi masyarakat
Masyarakat cenderung beralih ke minimarket, marketplace digital, dan platform *e-commerce* dibandingkan bertransaksi melalui koperasi.

Capaian pada tahun 2023 dan tahun 2025 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2022 dan tahun 2024 yang dipengaruhi oleh dukungan kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan daya saing koperasi melalui program fasilitasi, penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas pengurus dan anggota koperasi.



8. Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian ADHK

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan perkembangan kinerja sektor pertanian secara riil tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga. Selama periode pengamatan, sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang relatif stabil, mencerminkan perannya yang strategis dalam menopang perekonomian daerah.

Tabel 2.84 Perkembangan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHK) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Indikator	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHK)	%	1,14	1,61	1,21	-0,46	6,95

Sumber: DKPP Kabupaten Klaten, 2026

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa perkembangan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (ADHK) pada tahun 2021-2025 mengalami perkembangan yang fluktuatif dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 1,61 persen, sedangkan pada tahun 2024 mengalami kontraksi sebesar - 0,46% dikarenakan pertumbuhan sektor pertanian masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketergantungan pada faktor cuaca, fluktuasi hasil produksi, serta keterbatasan akses pasar dan permodalan. Namun pada tahun 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 6,95 persen. Hal ini didorong dengan membaiknya produktivitas subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, serta kondisi iklim yang relatif mendukung, penerapan teknologi pertanian, peningkatan luas dan intensitas panen. Selain itu, dukungan kebijakan pemerintah dalam bentuk subsidi sarana produksi, pendampingan petani, dan pembangunan infrastruktur pertanian juga berperan dalam mendorong pertumbuhan sektor pertanian.

Sektor pertanian di Kabupaten Klaten masih menjadi penopang utama kegiatan perekonomian dan mendapatkan arahan sebagai lumbung pangan Provinsi Jawa Tengah. Meskipun demikian, sektor pertanian masih menghadapi tantangan seperti kestabilan produksi dan dukungan teknis serta sumber daya manusia. Pertanian di Kabupaten Klaten selama periode 2021-2025 menunjukkan dinamika perkembangan produksi, produktivitas, dan dukungan sistem pertanian. Perkembangan produksi pertanian Kabupaten Klaten tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.85 Perkembangan Produksi Pertanian Kabupaten Klaten Tahun 2021 -2025

Subsektor	Jenis Komoditas	Produksi					Satuan
		2021	2022	2023	2024	2025	
Tanaman Pangan							
	Padi	480.024	475.550	481.599	440.037	496.379	Ton
	Jagung	88.538	99.663	99.310	87.657	75.981	Ton
	Kedelai	1.998	2.636	1.779	155	425	Ton
	Kacang Tanah	1.087	1.297	904	732	975	Ton



Subsektor	Jenis Komoditas	Produksi					Satuan
		2021	2022	2023	2024	2025	
	Kacang Hijau	1.542	1.558	1.419	1.134	453	Ton
	Ubi Kayu	15.155	23.816	22.823	15.743	20.655	Ton
	Ubi Jalar	266	118	620	172	328	Ton
Hortikultura							
	Cabai Teropong	20,90	34,00	35,80	46,20	25,10	Ton
	Cabai Keriting	583,40	599,80	1.071,91	821,74	660,59	Ton
	Cabe Rawit	1.245,80	1.541,33	1.825,29	1.964,34	3.299,50	Ton
Perkebunan							
	Tembakau asep-an	1.270,83	1.307,68	1.985,33	1799	1399,21	Ton
	Tembakau rajangan	1.567,45	1.601,16	824,73	531	241,95	Ton
	Kopi Arabica	145,98	169,25	169,25	164,99	158,5	Ton
	Kopi Robusta	36,46	36,7	38,94	13,2	7,45	Ton
	Kelapa Hibrida	29,94	35,93	55,25	28,82	26,72	Ton
Peternakan							
	Daging Ruminansia	2.878	2.891	2.639	2.667	2.890	Ton
	Daging Unggas	6.771	6.349	9.452	8.617	12.921	Ton
	Telur	7.742.231	8.459.779	7.887.000	9.953.188	11.544.000	Kilogram
	Susu	4.630.000	4.547.617	3.101.024	1.933.433	2.216.505	Liter

Sumber: DKPP Kabupaten Klaten, 2026

Berdasarkan perkembangan data di atas selama periode 2021–2025, subsektor tanaman pangan menunjukkan tren yang fluktuatif. Produksi padi sebagai komoditas utama relatif stabil, sempat mengalami penurunan pada tahun 2024 sebelum kembali meningkat dan mencapai capaian tertinggi pada tahun 2025. Kondisi tersebut mencerminkan kemampuan sektor pertanian untuk menjaga kesinambungan produksi pangan pokok sekaligus memperkuat ketersediaan beras sebagai komponen utama cadangan pangan daerah. Hal ini menjadi penting mengingat penyediaan dan pemeliharaan cadangan pangan merupakan salah satu mandat pemerintah daerah yang didorong oleh Pemerintah Provinsi dan Program Strategis Nasional dalam rangka menjaga ketahanan pangan, mengantisipasi potensi kerawanan pangan, serta menjamin stabilisasi pasokan dan harga pada kondisi darurat maupun gejolak produksi. Di sisi lain, produksi jagung cenderung mengalami penurunan setelah mencapai puncaknya pada 2022–2023. Komoditas kedelai mengalami penurunan yang sangat tajam pada 2024 dan hanya pulih sebagian pada 2025, sementara kacang tanah dan kacang hijau juga menunjukkan tren menurun meskipun kacang tanah mulai mengalami perbaikan pada tahun terakhir. Produksi ubi kayu dan ubi jalar berfluktuasi, namun keduanya kembali meningkat pada 2025. Secara umum, subsektor ini masih didominasi oleh stabilitas produksi padi sebagai penopang ketahanan pangan daerah, sedangkan komoditas pangan lainnya memerlukan upaya peningkatan produktivitas guna mendukung diversifikasi pangan dan mengurangi ketergantungan pada beras.



Produksi hortikultura selama lima tahun menunjukkan dinamika yang cukup baik, terutama pada komoditas cabai. Produksi cabai rawit mengalami peningkatan secara konsisten setiap tahun dengan lonjakan yang sangat signifikan pada 2025, mencerminkan peningkatan produktivitas maupun luas panen. Cabai keriting meningkat hingga 2023, kemudian mengalami penurunan pada dua tahun berikutnya meskipun masih berada di atas tingkat produksi tahun 2021. Sementara itu, cabai teropong meningkat secara bertahap hingga 2024 sebelum mengalami penurunan pada 2025. Secara keseluruhan, subsektor hortikultura memperlihatkan prospek yang positif dengan pertumbuhan yang didorong oleh peningkatan produksi cabai rawit.

Subsektor perkebunan menunjukkan tren yang beragam antar komoditas. Produksi tembakau asepun meningkat hingga 2023 sebelum mengalami penurunan pada dua tahun terakhir, namun masih berada di atas capaian awal periode. Sebaliknya, tembakau rajangan mengalami penurunan yang cukup tajam sejak 2023 hingga 2025. Produksi kopi arabika relatif stabil dengan sedikit penurunan pada akhir periode, sedangkan kopi robusta cenderung meningkat hingga mencapai produksi tertinggi pada 2025. Produksi tebu juga memperlihatkan tren positif dengan peningkatan yang cukup konsisten selama lima tahun. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas perkebunan memiliki potensi pertumbuhan, meskipun beberapa komoditas tertentu masih menghadapi tantangan dalam mempertahankan produktivitasnya.

Kinerja subsektor peternakan selama 2021–2025 cenderung mengalami peningkatan, terutama pada komoditas unggas. Produksi daging ruminansia relatif stabil dengan sedikit penurunan pada 2023–2024 sebelum kembali meningkat pada 2025. Produksi daging unggas menunjukkan tren meningkat secara keseluruhan meskipun sempat menurun pada 2024, sedangkan produksi telur terus meningkat dan mencapai nilai tertinggi pada 2025.

Tabel 2.86 Perkembangan Populasi Peternakan di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Subsektor	Jenis Komoditas	Populasi					Satuan
		2021	2022	2023	2024	2025	
Peternakan							
	Ternak Ruminansia	273.419	222.701	211.529	180.965	308.585	Ekor
	Ternak Non Ruminansia	7.424.817	8.942.562	6.439.855	8.634.179	9.344.618	Ekor

Sumber: DKPP Kabupaten Klaten, 2026

Dari sisi populasi ternak, jumlah ternak ruminansia mengalami penurunan hingga 2024 namun meningkat tajam pada 2025, sementara populasi ternak non-ruminansia berfluktuasi tetapi secara umum menunjukkan kecenderungan meningkat dibandingkan awal periode. Kondisi ini mengindikasikan bahwa subsektor peternakan memiliki perkembangan yang cukup baik dengan didukung peningkatan produksi hasil ternak, meskipun stabilitas populasi ternak ruminansia masih perlu mendapat perhatian.



Tabel 2.87 Perkembangan Dukungan Sistem Pertanian di Kabupaten Klaten
Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik/fungsional	%	37	37	37	36,68	41
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	50	0	50	68,65	74,39
3	Cakupan penanganan gangguan OPT dan potensi bencana pertanian lainnya	%	NA	50	42	62	77,55
4	Persentase kelompok tani madya dan utama	%	8,33	8	8	8,31	8,57

Sumber: DKPP Kabupaten Klaten, 2026

Dukungan sistem pertanian terlihat dari kondisi infrastruktur irigasi yang cenderung stagnan, dengan persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik masih berada pada kisaran 36–37%. Kondisi ini menjadi salah satu faktor pembatas dalam menjaga stabilitas dan peningkatan produksi pertanian. Sementara itu, persentase penurunan kejadian penyakit hewan menular menunjukkan perlunya perbaikan signifikan, terutama pada tahun 2024-2025 yang mengalami pengurangan efektivitas pengendalian penyakit dan layanan kesehatan hewan. Faktor seperti adanya penolakan vaksinasi dan kurangnya dukungan stakeholder menjadi penghambat menurunnya kejadian penyakit hewan menular.

Cakupan penanganan gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan potensi bencana pertanian menunjukkan perbaikan, meskipun masih bersifat fluktuatif. Hal ini menegaskan perlunya penguatan sistem mitigasi risiko pertanian. Persentase kelompok tani madya dan utama relatif stabil, yang mengindikasikan bahwa penguatan kelembagaan petani masih perlu mendapat perhatian untuk mendukung keberlanjutan pembangunan pertanian.

Kabupaten Klaten memiliki potensi sumber daya air melimpah karena keberadaan sumber mata air yang muncul hamper di seluruh wilayah. Keberadaan sumber mata air ini merupakan potensi local daerah dan daya dukung untuk pemanfaatannya sebagai habitat untuk budidaya ikan di sawah, kolam dan keramba oleh pembudidaya ikan dan masyarakat setempat. Daya dukung dan melimpahnya air mendorong petani dan masyarakat setempat memanfaatkan potensi air untuk berbudidaya ikan di sawah dan kolam.

Potensi sumber mata air di Kabupaten Klaten banyak dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan sektor pertanian dan perikanan. Kabupaten Klaten memiliki kawasan minapolitan I yang meliputi Kecamatan Karanganyar, Tulung dan Polanharjo dengan komoditas ikan nila sebagai unggulannya. Selain itu, Kabupaten Klaten juga memiliki kawasan minapolitan II yang merupakan pengembangan dari



Minapolitan I yang meliputi Kecamatan Kebonarum, Klaten Selatan dan Ngawen, dengan komoditas unggulan yaitu ikan lele dan ikan hias. Produksi perikanan budidaya Kabupaten Klaten cukup besar dan dipasarkan keluar daerah baik dalam bentuk ikan segar maupun olahan ke kabupaten yang berdekatan maupun ke luar provinsi Jawa Tengah. Perkembangan produksi perikanan darat Kabupaten Klaten tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.88 **Perkembangan Produksi Perikanan Darat Kabupaten Klaten Tahun 2021 -2025**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Produksi perikanan tangkap	Ton	311,82	372,87	370,45	498	558
2	Produksi perikanan budidaya	Ton	30.109,31	30.300,49	30.461,15	30.641,00	31.599,00
3	Cakupan tebar benih ikan/ <i>restocking</i> perairan umum	%	8	15	23	26,92	38,46
4	Jumlah produk olahan ikan	kg	1.050.400	1.168.588	1.544.976	1.742.856	2.719.015

Sumber: DKPP Kabupaten Klaten, 2026

Secara umum, produksi perikanan baik tangkap maupun budidaya di Kabupaten Klaten selama periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan dan produksi perikanan tertinggi pada tahun 2025. Cakupan tebar benih ikan atau restocking perairan umum mengalami peningkatan cukup signifikan sejak tahun 2022. Peningkatan ini menunjukkan komitmen dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan melalui pengayaan stok ikan di perairan umum. Meskipun pada tahun 2025 terjadi sedikit penurunan persentase dibandingkan tahun sebelumnya, secara umum cakupan restocking tetap berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan awal periode.

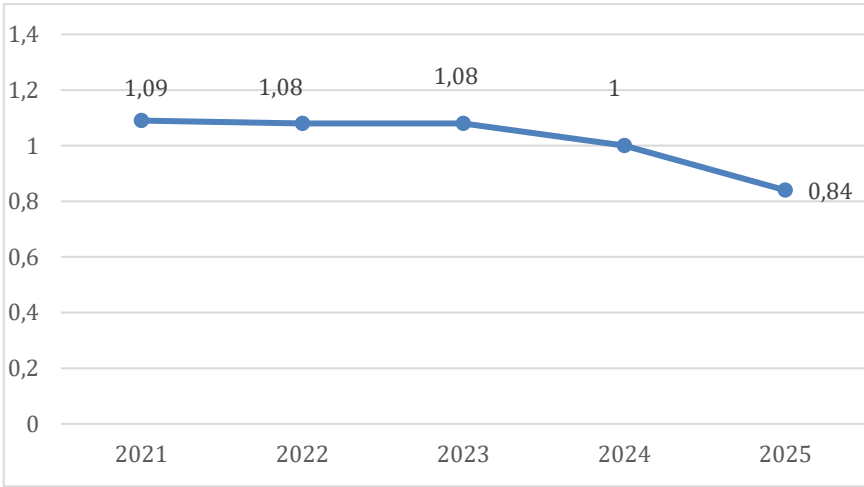
Pada aspek hilir, jumlah produk olahan ikan mengalami lonjakan yang sangat signifikan sepanjang tahun 2021-2025. Peningkatan tajam jumlah produk olahan menunjukkan berkembangnya industri pengolahan ikan dan semakin kuatnya nilai tambah sektor perikanan. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan daya simpan dan nilai ekonomi hasil perikanan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap sumber protein hewani yang beragam dan bergizi.

9. **Total kredit pada bank milik kabupaten/kota per PDRB**

Rasio total kredit pada bank milik Kabupaten terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten selama periode tahun 2021–2024 menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2021, rasio total kredit terhadap PDRB tercatat sebesar 1,09, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi 1,08 dan relatif stagnan pada tahun 2023 dengan nilai 1,08. Pada tahun 2024, rasio tersebut kembali mengalami penurunan yang lebih signifikan hingga mencapai 1,00. Sedangkan di tahun 2025 menurun signifikan di angka 0,84.



Penurunan rasio ini mencerminkan bahwa pertumbuhan penyaluran kredit belum sepenuhnya sejalan dengan pertumbuhan PDRB daerah, sehingga kontribusi sektor perbankan terhadap aktivitas ekonomi daerah mengalami perlambatan relatif. Banyaknya gelombang PHK membuat masyarakat cenderung mengambil tabungan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Masyarakat cenderung menunda pembelian barang-barang sekunder dan berpikir ulang dalam pengambilan kredit untuk investasi. Sehingga hal ini berdampak pada penurunan total kredit.



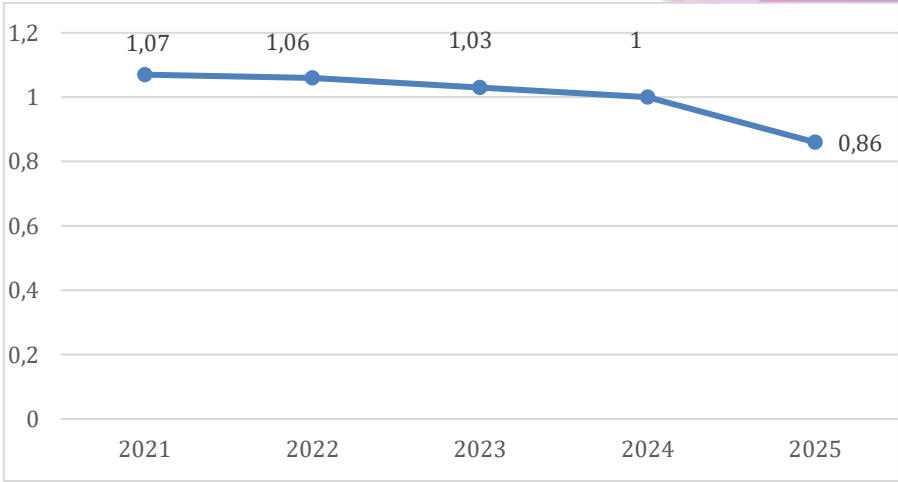
Sumber : Bagian Perekonomian Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.83 Total kredit pada bank milik kabupaten/kota per PDRB Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

10. Total dana pihak ketiga pada bank kabupaten/ kota per PDRB

Rasio Total Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten selama periode tahun 2021–2024 menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2021, rasio DPK terhadap PDRB tercatat sebesar 1,07, kemudian menurun menjadi 1,06 pada tahun 2022 dan kembali turun menjadi 1,03 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, rasio tersebut mencapai 1,00. Sedangkan rasio tahun 2025 menurun signifikan di angka 0,86.

Penurunan rasio ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penghimpunan dana masyarakat melalui perbankan pada bank milik kabupaten belum sepenuhnya sejalan dengan pertumbuhan PDRB daerah, sehingga proporsi simpanan masyarakat terhadap ukuran ekonomi daerah mengalami penurunan relatif. Hal ini terjadi dikarenakan perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola keuangan, seperti meningkatnya konsumsi, investasi non-perbankan, atau penggunaan dana untuk kebutuhan produktif dan konsumtif lainnya. Sehingga diperlukan penguatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, serta pengembangan produk simpanan yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu penurunan signifikan juga disebabkan PD BKK Klaten yang mengalami tutup operasional sejak tanggal 19 Juni 2025 yang berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan milik Pemerintah Daerah lainnya dan ramai-ramai menarik simpanan di lembaga perbankan lainnya tersebut.

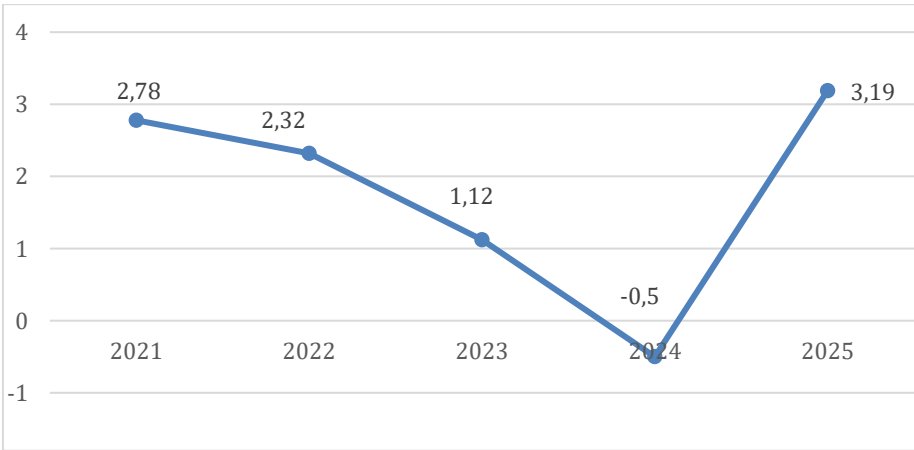


Sumber : Bagian Perekonomian Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.84 Total dana pihak ketiga pada bank kabupaten/kota per PDRB Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

11. Return On Asset (ROA) BUMD

Return on Assets (ROA) BUMD di Kabupaten Klaten selama periode 2021–2024 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, ROA BUMD masih berada pada level 2,78%, mencerminkan kemampuan BUMD dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba secara relatif baik. Namun, pada tahun 2022, ROA menurun menjadi 2,32%, yang mengindikasikan mulai melemahnya efisiensi pemanfaatan aset. Penurunan tersebut berlanjut pada tahun 2023, di mana ROA turun cukup tajam menjadi 1,12%. Kondisi ini menunjukkan bahwa aset yang dimiliki BUMD belum mampu dioptimalkan secara maksimal untuk menghasilkan keuntungan. Pada tahun 2024, ROA tercatat sebesar -0,5%, yang menandakan bahwa secara agregat BUMD di Kabupaten Klaten mengalami kerugian. Hal ini dikarenakan terbebani dengan kondisi Perusahaan Daerah BKK Klaten yang tidak sehat dikarenakan mengalami kerugian cukup besar. Pada tahun 2025 ROA BUMD mengalami peningkatan mencapai 3,19%. Peningkatan ini dikarenakan tahun 2025 PD BKK dinyatakan tutup sementara, sehingga tidak lagi masuk dalam penghitungan ROA BUMD. Sehingga secara umum BUMD Kab Klaten sudah mampu mengoptimalkan penggunaan aset untuk menghasilkan keuntungan.



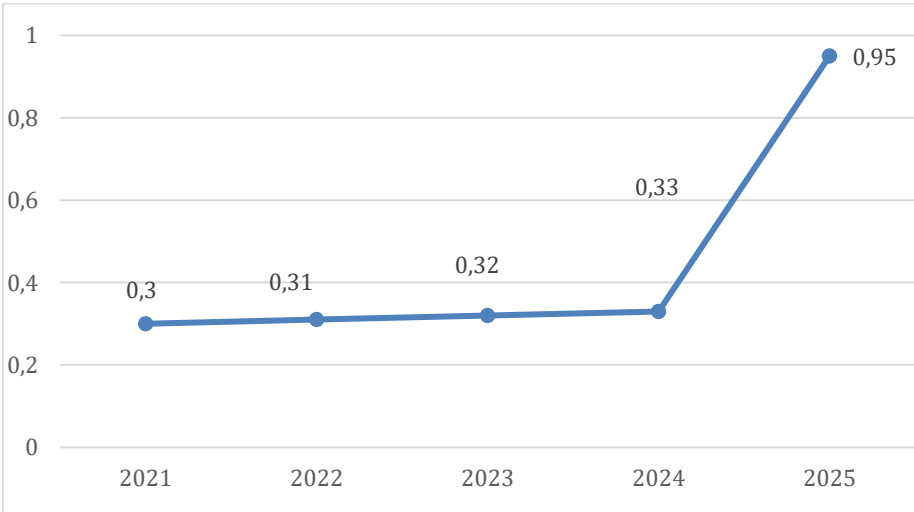
Sumber : Bagian Perekonomian Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.85 Return On Asset (ROA) BUMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025



12. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Klaten selama periode 2021–2025 menunjukkan tren meningkat, dengan lonjakan yang sangat signifikan pada tahun terakhir. Pada tahun 2021, rasio pajak daerah tercatat sebesar 0,30%, kemudian meningkat secara bertahap menjadi 0,31% pada tahun 2022 dan 0,32% pada tahun 2023. Pada tahun 2024, rasio kembali mengalami kenaikan menjadi 0,33%. Peningkatan paling menonjol terjadi pada tahun 2025, di mana rasio pajak daerah terhadap PDRB melonjak tajam hingga mencapai 0,95%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja pengelolaan pajak daerah. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat dimana Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan Opsen BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) menjadi bagian pajak daerah serta adanya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah yang lebih agresif, penyesuaian kebijakan tarif pajak, perbaikan sistem pendataan dan digitalisasi pemungutan pajak oleh Pemerintah Kabupaten Klaten.



Sumber : BPKPAD Kabupaten Klaten, 2025*

Gambar 2.86 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

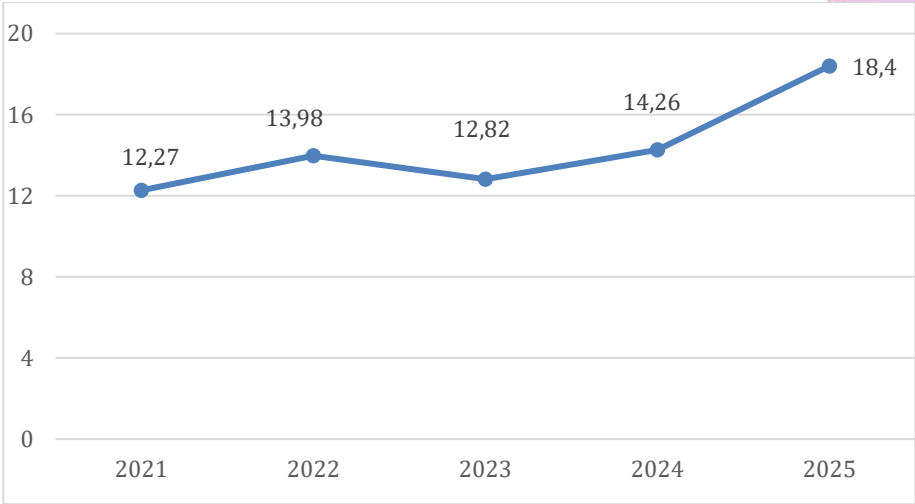
13. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Klaten selama periode 2021–2025 menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2021, rasio kemandirian berada pada level 12,27%, kemudian meningkat menjadi 13,98% pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi 12,82%. Memasuki tahun 2024, rasio kembali mengalami kenaikan menjadi 14,26%, dan pada tahun 2025 meningkat signifikan hingga mencapai 18,40%.

Kenaikan tajam pada tahun 2025 menandai perbaikan struktural dalam pengelolaan pendapatan daerah melalui peningkatan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, optimalisasi pajak, retribusi daerah dan perbaikan kinerja BUMD serta pengelolaan aset daerah. Meskipun demikian, rasio kemandirian keuangan Kabupaten Klaten masih berada pada kategori rendah, yang menunjukkan bahwa



ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi masih cukup besar.

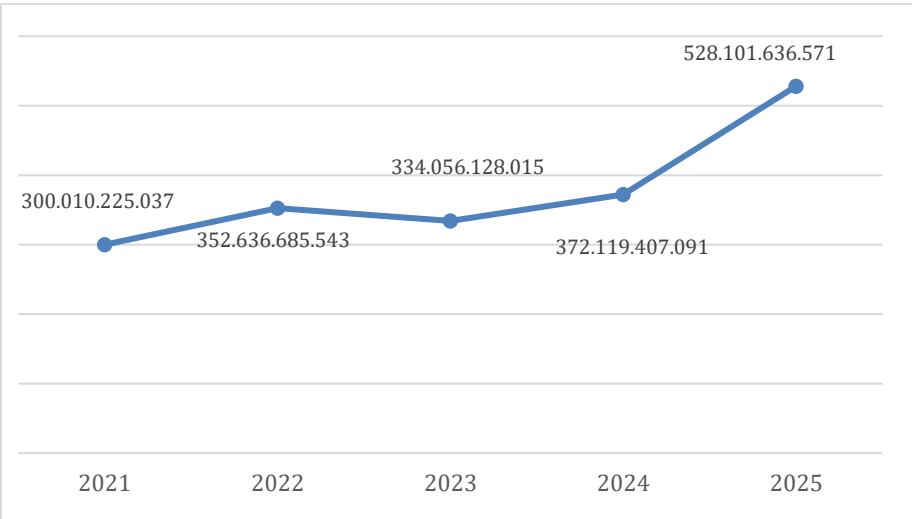


Sumber : BPKPAD Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.87 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

14. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten selama periode 2021–2025 menunjukkan tren meningkat dengan fluktuasi pada pertengahan periode. Pada tahun 2021, realisasi PAD tercatat sebesar Rp300,01 miliar. Nilai ini meningkat cukup signifikan pada tahun 2022 menjadi Rp352,64 miliar, namun pada tahun 2023 PAD mengalami penurunan menjadi Rp334,06 miliar. Memasuki tahun 2024, PAD kembali meningkat menjadi Rp372,12 miliar, dan pada tahun 2025 mengalami lonjakan yang sangat signifikan hingga mencapai Rp528,10 miliar. Peningkatan ini didukung oleh Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, Perbaikan sistem administrasi dan digitalisasi pemungutan serta Peningkatan kinerja BUMD dan pemanfaatan aset daerah.



Sumber : BPKPAD Kabupaten Klaten, 2025

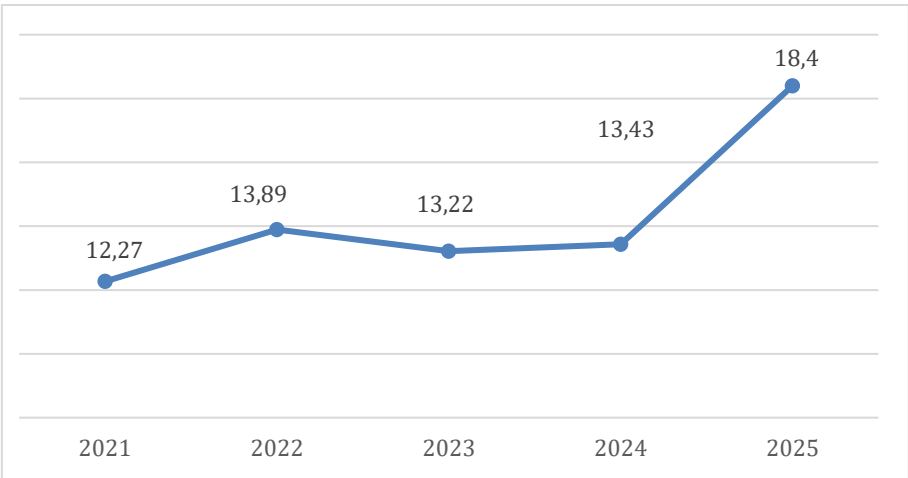
Gambar 2.88 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025



15. Kontribusi Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah Kabupaten Klaten selama periode 2021–2025 menunjukkan tren meningkat. Pada tahun 2021, kontribusi PAD tercatat sebesar 12,27%, kemudian meningkat menjadi 13,89% pada tahun 2022. Pada tahun 2023, kontribusi PAD mengalami sedikit penurunan menjadi 13,22%, namun kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 13,43%. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2025, di mana kontribusi PAD melonjak tajam hingga mencapai 18,40%.

Meskipun demikian, kontribusi PAD yang masih berada di kisaran 20% menunjukkan bahwa ruang peningkatan kemandirian fiskal masih cukup besar. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah menjaga konsistensi pertumbuhan PAD serta memperluas sumber pendapatan daerah agar kontribusi PAD dapat terus meningkat secara berkelanjutan.



Sumber : BPKPAD Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.89 Kontribusi Proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

16. Persentase Tanah Aset Pemerintah Daerah Tersertifikasi

Persentase sertifikasi aset tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten selama periode 2021–2025 menunjukkan peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2021, persentase aset tanah yang telah bersertifikat baru mencapai 60,90%. Pada tahun 2022, capaian tersebut meningkat signifikan menjadi 78,30%, mencerminkan percepatan upaya penertiban dan pengamanan aset daerah.

Peningkatan berlanjut pada tahun 2023 dengan persentase sertifikasi mencapai 83,88%, kemudian kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 85,05%. Pada tahun 2025, persentase sertifikasi aset tanah Pemda Klaten mencapai 86,56%. Belum optimalnya tanah asset pemda tersertifikasi dikarenakan keterbatasan SDM pengelola sertifikasi yang dimiliki dan sulitnya mencari silsilah pemilik tanah yang dimiliki Pemerintah Daerah. Perlu dilakukan upaya salah satunya berkoordinasi dengan Pengguna Barang dari aset tanah yang belum bersertifikat dan dengan



Kementerian Pertanahan terkait langkah-langkah/kebijakan yang harus diambil untuk penyelesaian sertifikasi tanah aset pemerintahan daerah.

Tabel 2.89 Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2021-2025

Tahun	Total Tanah (Bidang)	Bersertifikat (Bidang)	Belum Bersertifikat (Bidang)	Persentase Sudah Bersertifikat
2021	2.028	1.235	793	60,90%
2022	2.134	1.671	463	78,30%
2023	2.134	1.790	344	83,88%
2024	2.160	1.873	323	85,05%
2025	2.143	1.855	288	86,56%

Sumber: BPKPAD Kabupaten Klaten, 2025

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

a. Indeks Infrastruktur

Indeks Infrastruktur merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan, kualitas, dan pemerataan infrastruktur dasar dan pendukung pembangunan di suatu daerah. Capaian Indikator Indeks Infrastruktur tahun 2025 sebesar 72,42% dengan target tahun 2026 sebesar 73,30%, dan 73,75 ditargetkan ditahun 2027. Adapun Indikator Indeks Infrastruktur adalah Rata-rata capaian pembangunan infrastruktur meliputi:

1. Jalan

Sesuai dengan Program Prioritas Bupati yaitu Jalan Alus Padang Banyu Lancar, jalan dan jembatan merupakan prasarana yang sangat penting bagi penunjang sarana angkutan darat. Sesuai dengan fungsinya, kondisi jalan sangat mempengaruhi kelancaran hubungan dari satu wilayah ke wilayah lain. Berdasarkan SK Bupati Klaten No 611.51/130/2023 tentang status Ruas – Ruas Jalan di Kabupaten Klaten ada sebanyak 339 ruas jalan dengan panjang ruas jalan 720,85 km yang tersebar di 26 kecamatan. Panjang jalan di Kabupaten Klaten dari tahun 2020 dibagi menjadi 3 katagori jalan antara lain: kategori jalan negara 33,52 km, jalan provinsi sepanjang 41,36 km, sedangkan jalan kabupaten sepanjang 720,85 km. Tahun 2025 jalan dalam kondisi baik sepanjang 352,20 km atau 48,86%, jalan kondisi sedang sepanjang 254,82 km atau 35,35%, dan rusak ringan sebesar 13,69% atau sepanjang 98,71 km. Untuk jalan rusak berat sepanjang 15,12 km atau 2,10%. Adapun data Kondisi Jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.90 Data Kondisi Jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

No	Keadaan	Status Jalan				
		Jalan Negara	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten		
		2020	2020	2023	2024	2025
I	Jenis Permukaan					
	a. Lopen	33,52	41,36	562,35	30,72	29,64
	b. Berbatu/ Macadam (km)	–	–	-		
	c. Hotmix (km)	–	–	-	558,5	545,59



No	Keadaan	Status Jalan				
		Jalan Negara	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten		
		2020	2020	2023	2024	2025
	d. Kerikil (km)	-	-	5,68		
	e. Tanah/Jalan Belum Tembus (km)	-	-	-		
	f. Beton (km)	-	-	123,49	131,63	144,92
	Jumlah – I (km)	33.52	41,36	720,85	720,85	720,15
II	Kondisi Jalan					
	a. Baik (km)	3,9	25,76	489,08	346,42	352,20
	Persentase (%)			67,85	48,06	48,86
	b. Sedang (km)	29,62	15,61	172,62	259,15	254,82
	Persentase (%)			23,95	35,95	35,35
	c. Rusak Ringan (km)	-		53,47	105,82	98,71
	Persentase (%)			7,42	14,68	13,69
	d. Rusak Berat (km)	-	-	5,68	9,46	15,12
	Persentase (%)			0,79	1,31	2,10
	Jumlah – II (km)	33.52	41,37	720,85	720,85	720,85
	Persentase (%)			100	100	100
III	Kelas Jalan					
	a. Kelas I (km)	-	-			
	b. Kelas II (km)	-	-			
	c. Kelas III (km)	-	41,36			
	d. Kelas IIIA (km)	33,52	-			
	e. Kelas IIIB (km)	-	-			
	f. Kelas IIIC (km)	-	-	720,85	720,85	720,85
	g. Kelas IV (km)	-	-			
	h. Kelas Tidak Dirinci (km)	-	-			
	Jumlah – III (km)	33.52	41,36	720,85	720,85	720,85

Sumber: DPUPR Kabupaten Klaten, 2025

Dari data diatas dapat dilihat bahwa komposit dari Indeks Infrastruktur dari indikator Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota di Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2025 tercapai sebesar 84,21% . Adapun angka capaian sebesar 84,21 % terdiri dari capaian jalan kondisi baik dan capaian jalan kondisi sedang yang ada di Kabupaten Klaten, dengan target tahun 2026 sebesar 84,41%.

Kondisi jembatan pun menjadi bagian penting dari jaringan transportasi yang aman dan nyaman. Pada tahun 2025 Pokja Perencanaan Teknik dan Evaluasi (PTE) Bina Marga melakukan survey dan pendataan ulang atas kondisi jembatan di Kabupaten Klaten, salah satunya juga karena ada permintaan data aset pemkab klaten, ternyata setelah Tim Perencanaan Teknik Dan Evaluasi Jalan Dan Jembatan (PTE) Bina Marga Kabupaten Klaten melakukan survey kelokasi dengan cermat, ditemukan 7 yang masuk dalam kreteria jembatan, ada yang dulunya jembatan ini tidak nampak karena kondisinya yang asma sekali tidak seperti jembatan, ada yang dulu bentangnya tidak masuk kreteria jembatan, alhasil pada tahun 2025 ini jumlah data jembatan di Kabupaten Klaten menjadi 323 dari tahun tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 316 jembatan. Adapun data Kondisi Jembatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 disajikan pada tabel di bawah ini



Tabel 2.91 Kondisi Jembatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

No	Kondisi Jembatan	Tahun (unit)				
		Persentase (%)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Baik	202	181	6	4	5
		64,54	57,83	1,90	1,27	1,55
2.	Sedang dan Ringan	110	105	234	234	247
		35,54	33,55	74,29	74,05	76,47
3.	Rusak Berat	1	26	75	78	71
		0,32	8,31	23,81	24,69	21,98
Jumlah		313	313	315	316	323,00

Sumber: DPUPR Kabupaten Klaten, 2025

Dari data jembatan diatas terlihat bahwa Kondisi Jembatan di Kabupaten Klaten masih perlu penanganan yang intensif, karena kondisi jembatan Baik, Sedang dan Ringan juga Rusak Berat masih menunjukkan grafik yang naik turun, untuk itu perlu dilakukan evaluasi dan perencanaan pembangunan yang lebih intensif.

2. Sanitasi

Terkait dengan upaya penyediaan infrastruktur sanitasi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), hingga tahun 2024, akses sanitasi di Kabupaten Klaten telah mencapai 100%, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat melalui penyediaan layanan dasar yang memadai.

Di bidang sanitasi, pada tahun 2021 hingga 2025 cakupan akses dasar atau layak telah mencapai 100%. Target selanjutnya adalah meningkatkan akses sanitasi aman, yaitu fasilitas buang air besar yang terkoneksi ke sistem terpusat atau tangki septik yang disedot berkala dan diolah di IPLT sesuai Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018. Capaian akses sanitasi aman masih rendah, yakni 1,16% pada tahun 2021, meningkat menjadi 1,89% pada tahun 2025. Rendahnya capaian ini disebabkan belum optimalnya pendataan pengguna layanan sedot tinja, terutama dari pihak swasta, serta kurangnya kesadaran masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan dengan Sukoharjo, Boyolali dan Sleman. Sehingga dari komposit pembentuk indeks infrastruktur dari indikator Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman¹ di Kabupaten Klaten tahun 2025 mencapai 1,91%.

3. Air Minum

Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dalam rangka memenuhi hak setiap warga negara untuk hidup serta untuk mempertahankan hidup,negara berkewajiban untuk menjamin pemenuhan hak setiap warga negara, yang salah satunya adalah melalui penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari. Hal



ini sejalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Permasalahan pemenuhan kebutuhan air di Kabupaten Klaten merupakan salah satu isu strategis dan menjadi agenda penting dalam rencana pembangunan di Kabupaten Klaten. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka untuk memperluas cakupan pelayanan akan pemenuhan terhadap air minum telah dilakukan dengan baik, namun masih ada beberapa kendala sehingga pelayanan pemenuhan air minum bagi masyarakat yang jumlahnya selalu bertambah dan wilayah yang terus berkembang masih belum optimal. Sedangkan komposit indeks infrastruktur dari indikator Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaian capaian 2025 adalah sebesar 95,50 %.

4. Rumah Layak Huni

Berdasarkan capaian kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Klaten, terdapat beberapa indikator yang masih relevan dengan kondisi perumahan dan kawasan permukiman saat ini diantaranya penanganan Rumah Tidak Layak Huni, penanganan kawasan kumuh, serta tingginya *backlog* perumahan.

Dalam kaitannya dengan sistem jaringan sarana dan prasarana, fasilitasi penyediaan rumah layak huni kedepannya diharapkan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan rumah baik di kawasan perkotaan maupun daerah perdesaan yang terhubung dengan ketersediaan infrastruktur perkotaan yang menghubungkan antar kota kecamatan dan pusat pelayanan lainnya.

Selain daripada itu yang tidak kalah penting dalam urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah indikator Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum). Data dari Disperakim Kabupaten Klaten menjelaskan bahwa Jumlah Perumahan di Kabupaten Klaten ada 119 perumahan dengan pengesahan siteplan, berdasarkan rekap masuk per bulan februari 2026 ada 31 rekom pengesahan siteplan. Jumlah Perumahan dengan PSU di Kabupaten Klaten ada 75 Perumahan, namun yang diserahterimkan baru 21 perumahan dengan jumlah sertifikat PSU/Fasum-fasos 76. Sedangkan jumlah PSU yang sertifikat ada 39 sertifikat sudah BAST dan sudah Alih Hak sertifikat Fasum Fasos/PSU sudah atas nama PEMDA, dan 37 Sertipikat sudah BAST dan baru proses alih hak di BPN, sehingga masih adanya prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang belum diserahterimkan dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah tersebut yang belum bisa dilakukan pemeliharaan dan perbaikan karena masih dalam proses alih hak di BPN.



Salah satu indikator yang ditangani dalam urusan perumahan dan kawasan permukiman adalah penanganan rumah tidak layak huni dan penyediaan sarana permukiman. Tahun 2025 indikator sektor perumahan sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Penyelarasan RPJPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu Rumah Tangga dengan akses hunian layak. Target Kabupaten Klaten Tahun 2026 sebesar 97,85 % dan capaiannya di tahun 2025 sudah mencapai 97,79%. Tahun 2025 jumlah penanganan rumah tidak layak huni sebanyak 1.074 unit sehingga total RTLH yang tersisa menjadi 8.584 unit. Sebaran Rumah Tidak Layak Huni dapat di lihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.92 Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

No	Kecamatan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Bayat	1.128	1.118	948	694	628
2	Cawas	1.539	1.528	1.467	435	393
3	Ceper	504	483	465	405	380
4	Delanggu	1.022	1.013	970	560	483
5	Gantiwarno	379	378	367	226	176
6	Jatinom	908	898	710	398	392
7	Jogonalan	627	626	560	298	272
8	Juwiring	508	486	429	253	242
9	Kalikotes	389	388	371	98	59
10	Karanganom	734	717	661	491	426
11	Karangdowo	769	758	703	572	515
12	Karangnongko	646	638	400	242	229
13	Kebonarum	224	224	186	95	94
14	Kemalang	388	385	323	165	161
15	Klaten Selatan	644	633	609	367	353
16	Klaten Tengah	484	484	453	281	278
17	Klaten Utara	573	571	555	441	437
18	Manisrenggo	611	609	525	358	339
19	Ngawen	868	863	818	403	391
20	Pedan	596	593	542	438	429
21	Polanharjo	741	739	721	625	619
22	Prambanan	432	421	414	76	67
23	Trucuk	999	974	687	475	451
24	Tulung	894	880	811	404	394
25	Wedi	891	876	722	225	148
26	Wonosari	513	500	336	247	228
Total RTLH		18.011	17.783	15.762	9.272	8.584
RTLH Tertangani		1.281	1.741	1.766	1.273	1.074
Total RTLH Tertangani		10.786	12.527	14.293	15.566	16.640
Persentase Total RTLH Tertangani		43,54	50,57	57,7	62,84	67,17

Sumber : Disperakim Kabupaten Klaten, 2025



Sumber : Disperakim Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.90 RTLH tertangani di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Dari grafik diatas terlihat bahwa Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tertangani di Kabupaten Klaten dari tahun 2021-2025 mengalami peningkatan, harapannya dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan sehingga sudah tidak ada lagi (Rumah Tidak Layak Huni) RTLH di Kabupaten Klaten. Untuk penanganan RTLH di Kabupaten Klaten dilaksanakan dengan berbagai sumber pendanaan yang ada, antara lain APBN (DAK, BSPS), APBD Provinsi (Bankeu Pemdes), CSR, Baznas, dan CSR dari Dunia usaha.

Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan menjadi salah satu sasaran penanganan dalam urusan perumahan dan kawasan permukiman. Pada tahun 2020 kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Klaten seluas 41,65 hektar yang terbagi di dua lokasi, yaitu di desa Bugisan dan Desa Kebondalem Kidul Kecamatan Prambanan. Pada tahun 2022 dilakukan pendataan ulang kawasan kumuh di Kabupaten Klaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Klaten Nomor 600/35 Tahun 2023 tanggal 9 Februari 2023, di mana total kawasan kumuh di Kabupaten Klaten seluas 145,75 hektar yang tersebar di 9 lokasi. Dengan berbagai program/penanganan yang sudah dilakukan, luas kawasan kumuh Kabupaten Klaten tahun 2024 menyisakan 68,18 hektar dan Tahun 2025 menyisakan 54,14 hektar.

Tabel 2.93 Luas Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaaan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Kawasan Kumuh	Tahun				
	2021	2022*	2023	2024	2025
Luas kawasan permukiman kumuh perkotaaan (ha)	41,65	145,75	112,95	68,18	54,14
Presentase kawasan permukiman kumuh perkotaaan (%)	0,14	1,40	1,10	0,65	0,52



Kawasan Kumuh	Tahun				
	2021	2022*	2023	2024	2025
Pengurangan luasan kumuh perkotaan (ha)	0	0	31,14	44,77	14,04
Presentase Pengurangan Kumuh (%)	0	0	21,37	39,64	20,59

*Mulai Tahun 2022 = pendataan kumuh baru
Sumber : Disperakim Kabupaten Klaten, 2025

5. Prasarana Perlengkapan Jalan

Ketersediaan sarana prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa menjadi tuntutan dalam peningkatan jumlah sarana angkutan publik. Adapun kondisi sarana perhubungan pada saat ini dapat dicerminkan dari keberadaan sarana transportasi darat yang terdiri mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan publik. Secara keseluruhan tidak ada penambahan baru pemasangan sarana dan prasaranan fasilitas perlengkapan jalan, tetapi kondisi fasilitas perlengkapan jalan masih dalam kondisi baik. Pada Tahun 2025 Dinas Perhubungan melakukan pendataan ulang, sehingga dari update data yang ada ternyata jumlah kebutuhan marka jalan terpasang tidak 34,965 m2 namun 90.000 m2, begitu juga guardrail kebutuhan awal 3.000 m setelah update data di tahun 2025 kebutuhan terpasangnya menjadi 4.240 m dan beberapa perubahan kebutuhan Prasarana perlengkapan jalan terpasang di Kabupaten Klaten.

Sehingga sarana pendukung transportasi jalan di Kabupaten Klaten masih belum memadai perlu upaya peningkatan kebutuhan sarpras jalan demi keselamatan serta kelancaran lalu lintas. Data sarana dan prasarana fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 berdasarkan kebutuhan dan yang terpasang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.94 Sarana dan Prasarana Fasilitas Perlengkapan Jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

No	Jenis	Satuan	Kebutuhan	Jumlah Terpasang s/d Tahun 2025	%
1	Rambu lalu lintas biasa	buah	7.200	4.038	56,08
2	Rambu RPPJ	buah	300	172	57,33
3	Rambu tipe F	buah	150	64	42,67
4	Marka Jalan	m ²	90.000	57.570	63,97
5	Traffic light	unit	40	35	87,50
6	Guardrail	m	4.240	3.544	83,58
7	Paku marka/mata kucing	buah	2.185	1.685	77,12
8	Traffic cone	buah	600	190	31,67
9	Delinator	buah	500	-	0,00
10	Cermin tikungan	buah	300	140	46,67
11	Zona selamat sekolah	unit	30	9	30,00
12	Lampu kedip	buah	35	15	42,86
13	Rambu elektronik/VMS	unit	13	8	61,54
14	Water Barrier	Buah	600	186	31,00



No	Jenis	Satuan	Kebutuhan	Jumlah Terpasang s/d Tahun 2025	%
15	Penerangan Jalan Umum	Unit	14.318	6.287	43,91

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2025

Perhubungan memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur transportasi yang baik, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, akan memperlancar arus barang, jasa dan manusia, yang pada gilirannya mendukung perkembangan ekonomi di kedua wilayah tersebut. Untuk menjamin keselamatan pengguna jalan, diperlukan fasilitas pelengkap seperti rambu lalu lintas, marka jalan, alat penerangan, fasilitas pejalan kaki dan fasilitas pendukung lalu lintas lainnya Adapun dari komposit pembentuk indeks infrastruktur dari indikator Persentase prasarana dan perlengkapan jalan terpasang di Kabupaten Klaten tahun 2025 mencapai 73,56%.

Dengan sistem transportasi yang efisien dan fasilitas pelengkap yang baik, kedua wilayah ini saling terintegrasi, mempercepat pemerataan pembangunan, meningkatkan daya saing dan membuka peluang ekonomi lebih luas, baik di kota maupun desa. Adapun kondisi sarana perhubungan pada saat ini dapat dicerminkan dari keberadaan sarana transportasi darat yang terdiri mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan publik. Jumlah sarana angkutan umum di Kabupaten Klaten disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.95 Jumlah Sarana Angkutan Umum di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Jenis Kendaraan	Tahun (unit)				
	2021	2022	2023	2024	2025
01 Mobil Barang	6.829	7.233	6.684	8.657	7.514
* Umum	739	694	661	286	296
* Bukan Umum	6.090	6.539	6023	8371	7218
02 Mobil Bus	433	456	427	515	534
* Umum	399	397	338	228	276
Bus Besar	84	87	76	82	102
Bus Sedang	230	234	201	128	140
Bus Kecil	85	76	61	18	34
* Bukan Umum	34	59	89	287	258
03 Kendaraan Khusus/Alat Berat	14	8	8	50	61
04 Mobil Penumpang	3	-	0	0	0
Jumlah	7.279	7.697	7.119	9.222	8.109

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2025

Pelaksanaan uji kendaraan bermotor di Kabupaten Klaten dilaksanakan sebagai bagian dari upaya menjamin keselamatan, kelaikan jalan, dan kepatuhan terhadap ketentuan teknis kendaraan bermotor. Secara umum data uji kendaraan bermotor di Kabupaten Klaten Tahun 2025 sebanyak 8.859 sudah memenuhi target dari 8.141 yang dari yang ditargetkan.

Sementara itu, untuk jenis kendaraan Mobil Penumpang Umum, Taksi, Kendaraan Roda Tiga, serta Kereta Gandengan, pada periode tersebut tidak dilakukan pengujian karena keterbatasan objek uji dan/atau tidak adanya kendaraan dari jenis tersebut yang terdaftar atau diajukan untuk dilakukan

pengujian pada wilayah Kabupaten Klaten. Selengkapmya data uji kendaraan bermotor tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.96 Data Uji Kendaraan Bermotor di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

No	Jenis Kendaraan	2021	2022	2023	2024	2025	
		Capaian	Capaian	Capaian	Capaian	Target	Capaian
1	Bus Umum	253	192	201	228	210	309
2	Bus Bukan Umum	381	369	219	287	315	298
3	Pick Up	9.679	7.786	6.911	5.702	5.000	5.098
4	Truk	3830	2188	2.100	2.894	2.500	3.033
5	Kereta Tempelan	25	23	22	30	32	34
6	Traktor Head	40	35	30	31	32	34
7	Kend. Khusus	3	8	7	50	52	53
Jumlah Total		14.211	10.601	9.490	9.222	8.141	8.859

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2025

Terminal angkutan penumpang umum dan subterminal di Kabupaten Klaten berfungsi sebagai prasarana pendukung transportasi darat, namun jumlah angkutan umum yang beroperasi dan masuk terminal cenderung menurun seiring berkembangnya moda transportasi berbasis aplikasi serta meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor pribadi. Data terminal angkutan penumpang umum Kabupaten Klaten Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.97 Data Terminal Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Klaten Tahun 2025

No	Terminal	Alamat	kondisi	Type	Luas	Jumlah bus/ angkutan
1	Penggung	Penggung, Ceper, Klaten	85%	C	4500 m ²	1091
2	Cawas	Cawas Klaten	75%	C	3000 m ²	452

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2025



Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041

Gambar 2.91 Peta Sebaran Terminal di Kabupaten Klaten



6. Akses internet

Teknologi yang berlangsung sangat cepat mendorong terjadinya perubahan besar dan fundamental pada suatu industri, pasar, atau tatanan lama yang disebabkan oleh inovasi atau teknologi baru yang lebih efisien, menggantikan cara-cara tradisional secara masif dan mengubah pola hidup masyarakat secara keseluruhan di berbagai aspek kehidupan, mulai dari sistem produksi, pelayanan publik, hingga pola interaksi sosial masyarakat. Teknologi digital seperti *Internet of Things (IoT)*, *Artificial Intelligence (AI)*, *Robotic Process Automation (RPA)*, *Edge Computing* dan sistem otomasi lainnya semakin banyak diadopsi dalam proses bisnis dan tata kelola pemerintahan modern.

Bagi Kabupaten Klaten, perkembangan ini menawarkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi layanan publik, mempercepat arus informasi, serta mendorong produktivitas sektor industri, pertanian dan UMKM. Contohnya, penerapan otomasi dan digitalisasi dapat mendukung pertanian presisi, sistem pemasaran daring bagi UMKM, serta pengelolaan data pembangunan yang lebih akurat dan real time.

Namun di sisi lain, Klaten juga menghadapi tantangan dalam hal kesiapan infrastruktur digital, pemerataan akses internet, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Jika tidak diantisipasi, disrupsi teknologi dapat memperlebar kesenjangan digital, menurunkan daya saing tenaga kerja lokal dan menghambat transformasi ekonomi. Oleh karena itu, Kabupaten Klaten perlu mendorong adopsi teknologi secara inklusif, memperkuat literasi digital masyarakat, serta membangun ekosistem inovasi yang mampu menjembatani antara potensi teknologi dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Intenet Gratis Sampai Desa masuk dalam 10 program prioritas Bupati terpilih harapannya Melalui program “Internet Gratis Sampai Desa”, Pemerintah Kabupaten Klaten berkomitmen memperluas akses digital hingga ke pelosok desa sebagai bagian dari pemerataan layanan publik dan percepatan transformasi digital. Program ini bertujuan menyediakan jaringan internet gratis di ruang-ruang publik strategis seperti balai desa, sekolah, fasilitas kesehatan, dan titik-titik produktif lainnya. Dengan hadirnya internet yang mudah diakses, masyarakat desa dapat memperoleh informasi, mengikuti pendidikan daring, mengembangkan usaha digital, serta terlibat aktif dalam pelayanan pemerintahan berbasis elektronik. Program ini menjadi fondasi penting menuju desa yang terkoneksi, cerdas, dan berdaya saing di era digital. Sedangkan komposit pembentuk indeks infrastruktur dari indikator Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Klaten tahun 2025 mencapai 100%.



b. **Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten/kota**

Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten/kota menjadi salah satu indikator yang ada didalam urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Adapun Capaian Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 yang terkait dengan indikator Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.98 Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten/kota Tahun 2021-2025

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025
Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten/kota	%	89,00	94,67	91,05	91,39	84,21

Sumber : DPUPR Kabupaten Klaten, 2025

Dari tabel diatas bahwa indikator Indikator Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten/kota mengalami penurunan disebabkan ada beberapa regulasi yang menyebabkan perbedaan formulasi perhitungannya.

c. **Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak**

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak salah satu indikator yang ada dalam urusan perumahan dan permukiman dan menjadi salah satu pembentuk dalam indikator indeks infrastruktur.

Tantangan Sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman. Implementasi Program Nasional 3 Juta Rumah, Keputusan Bersama Menteri PKP, Menteri PU dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, 3015/KPTS/MM/2024, 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah.

Adapun Usaha Percepatan Program 3 Juta Rumah di Kabupaten Klaten sudah diupayakan dengan koordinasi aktif dengan OPD terkait (DPUPR, BPKPAD, BPN dan Bank Jateng), koordinasi dengan Disperakim Provinsi terkait FLPP untuk MBR, koordinasi aktif dengan desa untuk pendataan perumahan dan lahan pedesaan, meningkatkan komunikasi aktif dengan pengembang melalui asosiasi resmi. Hal tersebut adalah upaya pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan Hunian Layak di Kabupaten Klaten. Hal tersebut juga ditindaklanjuti dengan Perbup No 50 Tahun 2024 penghapusan bea BPHTB bagi MBR dan Perbup 9 Tahun 2025 tentang penghapusan retribusi PBG bagi MBR.

Persentase rumah layak huni, dengan formula indikator Jumlah rumah layak huni (364.517 unit) dibagi total jumlah rumah (380.279 unit) dikali 100% diperoleh 95,86% yang dijadikan sebagai target 2025. Adapun capaian Indikataor



Pemenuhan Rumah Layak Huni di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.99 Pemenuhan Rumah Layak Huni di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Rumah Layak Huni	%	97,00	97,59	97,96	98,67	97,79

Sumber : Disperakim Kabupaten Klaten, 2025

Terlihat bahwa capaian Indikator Pemenuhan Rumah Layak Huni di Kabupaten Klaten mengalami kenaikan dalam empat tahun terakhir dan mengalami penurunan di Tahun 2025, sehingga perlu upaya untuk menaikkan capaian Pemenuhan Rumah Layak Huni di Kabupaten Klaten.

d. Rasio konektivitas

Kemudahan akses dan konektivitas akan meningkatkan aktivitas ekonomi sehingga akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Daerah yang memiliki infrastruktur yang baik akan memiliki kemudahan akses dan konektivitas. Kabupaten Klaten perlu merumuskan kebijakan tata ruang dan pembangunan wilayah yang adaptif terhadap tren urbanisasi. Penguatan konektivitas antarkawasan, pengendalian alih fungsi lahan, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yang berbasis potensi lokal perlu dilakukan guna memastikan urbanisasi berjalan secara berkelanjutan dan inklusif.

Konektivitas antar wilayah menjadi penting mengingat masih terdapat sekitar 12,28 % penduduk Kabupaten Klaten yang berada di bawah kemiskinan dan sekitar 4,20% yang menganggur. Ketimpangan pembangunan antar wilayah, khususnya wilayah dengan tipologi perbukitan-pedesaan dan daerah perbatasan masih menjadi tantangan tersendiri. Konektivitas tidak lepas dari prasarana dan perlengkapan jalan terpasang, Persentase prasarana dan perlengkapan jalan terpasang merupakan salah satu penyumbang komposit dalam perhitungan capaian dalam indikator Indeks Infrastruktur. Adapun capaian Indikator Persentase prasarana dan perlengkapan jalan terpasang di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.100 Persentase prasarana dan perlengkapan jalan terpasang di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja				
		2021	2022	2023	2024	2025
Persentase prasarana dan perlengkapan jalan terpasang	%	N/A	62,56	70,85	72,47	73,56

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian Indikator Persentase prasarana dan perlengkapan jalan terpasang di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 mengalami kenaikan, harapannya terus dapat mengalami peningkatan karena



masuk nomor satu dalam 10 Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Klaten yaitu “Dalan Padang”.

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

a. Urusan Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara maupun daerah. Melalui penanaman modal, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, diharapkan adanya tambahan sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong transfer teknologi dan pengetahuan. Dengan demikian, penanaman modal berperan strategis dalam memperkuat struktur ekonomi dan meningkatkan daya saing. Perkembangan PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.101 Perkembangan Realisasi PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah investor berskala nasional (PMDN) (investor)	3.984	6.273	16.435	16.315	16.577
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) (Rp. dalam ribuan)	1.377.467.139	3.549.341.388	4.472.800.205.021	3.800.326.178.931	3.125.233.486.488
Kenaika/ penurunan Nilai Realisasi PMDN (persen)	97	158	26	-15	-49

Sumber: DPMPSTSP Kab. Klaten, 2026

Berdasarkan tabel diatas perkembangan realisasi PMDN tahun 2021-2025 cukup fluktuatif. Jumlah investor pada tahun 2025 terdapat 16.577 Investor dengan jumlah investasi sebesar Rp. 3.125.233.486.488,- mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 yaitu terdapat 16.315 investor dengan jumlah investasi sebesar Rp. 6.144.124.124.178.931 hal ini disebabkan oleh pada Tahun 2025 proyek tol Jogja - Solo sudah berakhir dan tidak memberikan tambahan investasi, banyak lahan yang kurang representative untuk investor dari segi infrastuktur dan harga tanah.

Pada tahun 2023 jumlah investor dan nilai investasi mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022 dikarenakan adanya kemudahan perizinan berusaha terutama untuk pelaku usaha mikro, kecil, menengah koperasi serta adanya kebijakan penanaman modal berupa peraturan daerah pemberian insentif dan kemudahan investasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi investor PMDN antara lain lahan yang terbatas dan segi infrastuktur kurang memadai.

Tabel 2.102 Tabel Perkembangan Realisasi PMA di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah investor berskala nasional (PMA) (investor)	18	23	29	31	36
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA) (US\$ dalam ribu)	19.794	44.066	51.0186	51.012	40.018



Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Rasio daya serap tenaga kerja (PMA) (Orang)	231	296	324	247	0
Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMA (Persentase)	319	139	16	-0,01%	-33,24

Sumber: DPMPSTSP Kab. Klaten, 2026

Berdasarkan tabel diatas jumlah investor berskala nasional (PMA) pada tahun 2021-2025 mengalami perkembangan yang fluktuasi dimana pada tahun 2021 terjadi penurunan jumlah investor karena masih adanya pandemic Covid-19, namun pada tahun 2022-2024 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar -33,24% hal ini disebabkan oleh Proyek Strategi Nasional Tol Jogja-Solo sudah berakhir dan tidak memberikan tambahan investasi di kabupaten klaten. Faktor-faktor yang mampengaruhi investor PMA masuk ke Kabupaten Klaten antara lain Tenaga kerja mudah, Upah Minimum Regional (UMR) klaten termasuk rendah, akses transportasi mudah di dukung dengan adanya 3 exit Tol.

b. Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, sehingga semakin tinggi penanaman modal di suatu daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk semakin meningkat. Dalam rangka mengarahkan potensi ekonomi lokal, penyelenggaraan urusan penanaman modal menjadi salah satu urusan yang dapat mendukung peningkatan kontribusi sektor keuangan terhadap PDRB di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.103 Perkembangan Capaian Pembangunan Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025

Indikator	Satuan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	%	21,18	21,52	22,43	23,05	20,65

Sumber : BPS dan DPMPSTSP Kabupaten Klaten, 2026

Perkembangan rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang 2021–2024. Pada tahun 2021, kontribusi PMTB terhadap PDRB tercatat sebesar 21,18%, kemudian meningkat menjadi 21,52% pada 2022. Tren positif ini berlanjut pada 2023 dengan capaian 22,43%, dan kembali mengalami peningkatan pada 2024 menjadi 23,05%, namun pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 20,65%.

Peningkatan rasio PMTB terhadap PDRB tersebut mengindikasikan semakin menguatnya aktivitas investasi fisik di daerah, baik yang bersumber dari sektor swasta maupun pemerintah. Kenaikan ini mencerminkan bertambahnya pembentukan aset tetap seperti bangunan, infrastruktur, mesin, dan peralatan produksi yang berperan penting dalam meningkatkan kapasitas produksi daerah.

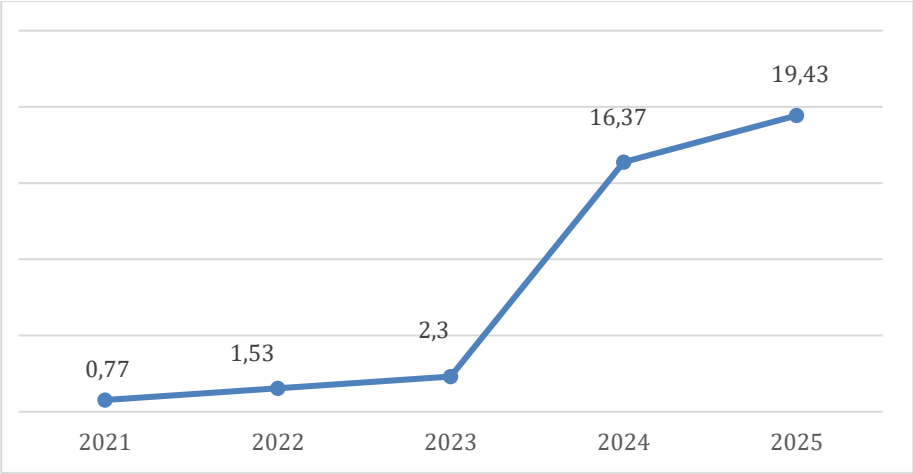


Secara kumulatif, kenaikan PMTB juga menunjukkan meningkatnya kepercayaan pelaku usaha dan investor terhadap prospek perekonomian daerah, seiring dengan perbaikan iklim investasi, pemulihan ekonomi pasca pandemi, serta dorongan pembangunan infrastruktur dan aktivitas industri. Kondisi ini menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena investasi merupakan salah satu motor utama peningkatan produktivitas dan daya saing daerah.

c. Persentase Desa Mandiri

Perkembangan persentase desa mandiri di Kabupaten Klaten selama periode 2021–2025 menunjukkan adanya peningkatan terutama pada dua tahun terakhir. Pada tahun 2021, persentase desa mandiri masih berada pada angka 0,77%, kemudian meningkat menjadi 1,53% pada tahun 2022 dan 2,30% pada tahun 2023. Peningkatan yang sangat tajam terjadi pada tahun 2024, di mana persentase desa mandiri melonjak menjadi 16,37%, dan kembali meningkat pada tahun 2025 hingga mencapai 19,43%.

Meskipun dari tahun ke tahun Persentase Desa Mandiri menunjukkan adanya peningkatan namun angka masih dalam kategori rendah dikarenakan dari sejumlah 391 desa 19,43% (76 desa) dengan status mandiri. Beberapa hal perlu dilakukan diantaranya Optimalisasi pemanfaatan Dana Desa yang lebih terarah dan produktif, Penguatan kelembagaan ekonomi desa (BUMDes), Peningkatan kualitas layanan dasar dan infrastruktur desa, perbaikan tata kelola pemerintahan desa serta Pendampingan desa yang lebih intensif dan terintegrasi.



Sumber : Dispermasdes Kabupaten Klaten, 2025

Gambar 2.92 Persentase Desa Mandiri Kabupaten Klaten Tahun 2021-2025



2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RKPD 2025 dan Realisasi RPJMD

Dasar Evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan salah satu dari empat tahapan perencanaan pembangunan. yang meliputi: (1) penyusunan; (2) penetapan; (3) pengendalian dan perencanaan; serta (4) evaluasi pelaksanaan perencanaan. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 23 yang menyebutkan bahwa pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sangat diperlukan dalam menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif. Hasil Evaluasi ini akan digunakan sebagai bahan masukan dalam menyusun perbaikan kebijakan ataupun perencanaan pembangunan pada Tahun berikutnya. Untuk itu, informasi akurat dari para pemangku kepentingan khususnya para pelaksana pembangunan sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap hasil evaluasi ini.

Untuk mencapai misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan, maka digunakan indikator kinerja pemerintah daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 yang terbagi dalam beberapa aspek, fokus dan urusan bidang. Pada evaluasi ini sebagai identifikasi terhadap capaian pada Tahun 2025 terhadap pencapaian target RKPD Tahun 2025, dengan penjelasan status capaian sebagai berikut :

1. Sangat Tinggi, untuk capaian terhadap target Tahun 2025 sebesar $91,01\% \geq 100\%$ dengan notifikasi ST;
2. Tinggi, untuk capaian terhadap target Tahun 2025 sebesar $76,01\% \leq 91\%$ dengan notifikasi T;
3. Sedang, untuk capaian terhadap target Tahun 2025 sebesar $66,01\% \leq 76\%$ dengan notifikasi S;
4. Rendah, untuk capaian terhadap target Tahun 2025 sebesar $51,01\% \leq 66\%$ dengan notifikasi R;
5. Sangat Rendah untuk capaian terhadap target Tahun 2025 sebesar $\leq 51\%$ dengan notifikasi SR.

Evaluasi kinerja Tahun 2025 terhadap target RKPD Tahun 2025 berdasarkan urusan pemerintahan sebagai berikut:

Tabel 2.104 Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah	Satuan	Target RPJMD 2021-2026	Realisasi Tahun 2024	Tahun 2025		Tingkat Capaian RKPD Tahun 2025 (%)	Status Capaian	Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
1	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	Indeks	0,75	0,823	0,825	0,885	107,27	ST	Bapperida
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70	84,05	84,15	84,78	100,03	ST	Seluruh Urusan
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,47	5,11	5,70 – 6,00	4,64	81,40	T	Seluruh Urusan
4	Infrastruktur wilayah kondisi baik	%	77,72	84,25	85,03	85,08	100,06	ST	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Rasio Konektivitas	Rasio	0,15	0,12	0,15	0,12	80	T	Perhubungan
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78,15	78,16	77,90-78,80	76,68	101	ST	Pendidikan, Kesehatan
7	Persentase Penduduk Miskin	%	9,89	12,04	10,61-11,24	11	102,13	ST	Seluruh Urusan
8	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	97,62	95,99	96,10	96,35	100,26	ST	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	55,99	61,09	63,50	69,56	109,54	ST	Lingkungan Hidup

Tabel 2.105 Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025

Misi		Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran		Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian (%)	Status Capaian	Urusan Pemerintahan Terkait
											Target RKPD	Realisasi			
1		2		3		4		5		6	7	8	9	10	11
1	Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berahlak dan berkepribadian	1.1	Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan	a.	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)					Indeks	0,825	0,885	107,27	ST	8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik
						1.1.1	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	a.	Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang diselesaikan	%	100	100	100	ST	8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik
								b.	Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	%	100	100	1	SR	1.05. Ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, professional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi	2.1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance)	a.	Indeks Reformasi Birokrasi					Indeks	84,15	84,78	100,03	ST	Seluruh Urusan
						2.1.1	Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah	a.	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	80,47	73,97	91,92	ST	6.01. Pengawasan
								b.	Peringkat/Nilai SAKIP	Nilai	68	67,27	98,92	ST	4.01 Sekretariat Daerah
															5.01 Perencanaan
															5.05 Penelitian dan Pengembangan
								c.	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	100	ST	5.02. Keuangan Daerah
															6.01 Pengawasan



Misi		Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran		Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian (%)	Status Capaian	Urusan Pemerintahan Terkait					
											Target RKPD	Realisasi								
1		2		3		4		5		6	7	8	9	10	11					
								d.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,80	4,22	111,05	ST	2.16. Komunikasi dan Informatika					
								2.21 Persandian												
								2.20 Statistik												
								e.	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	Indeks	268	300	111,94	ST	5.03 Kepegawaian					
								5.04 Pendidikan dan Pelatihan												
								2.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	a.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	90,04	86,33	95,88	ST	Kabupaten			
																				2.12. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
																				2.23 Perpustakaan
																				2.24 Kearsipan
																				7.01 Kecamatan
																				4.02 Sekretariat DPRD
																				Sekretariat Daerah
3	Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan	3.1	Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan	a.	Pertumbuhan Ekonomi					%	5,70-6,00	4,62	81,40	T	Seluruh Urusan					
						3.1.1	Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi	a.	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	5,42	5,31	97,97	ST	3.31. Perindustrian					
								b.	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	%	3,63	5,76	158,68	ST	2.17. Koperasi dan UMKM					
																		3.30 Perdagangan		

Misi		Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran		Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian (%)	Status Capaian	Urusan Pemerintahan Terkait
											Target RKPD	Realisasi			
1		2		3		4		5		6	7	8	9	10	11
								c.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	1,61	6,95	431,68	ST	3.27 Pertanian 3.25 Kelautan dan Perikanan
								d.	Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	%	37,74	14,81	39,24	R	3.26 Pariwisata
						3.1.2	Meningkatnya investasi daerah	a.	Persentase peningkatan investasi PMDN	%	50	-43	-86	SR	2.18 Penanaman Modal
								b.	Persentase peningkatan investasi PMA	%	20	1,47	7,35	SR	2.18 Penanaman Modal
4	Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah	4.1	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastrukur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah	a.	Infrastruktur wilayah kondisi baik					%	85,03	85,08	100,60	ST	1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
														1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				b.	Rasio konektivitas					Rasio	0,15	0,12	80	T	2.15. Perhubungan
						4.1.1	Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah	a.	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	91,39	84,21	92,14	ST	1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
								b.	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	62,66	62,8	100,22	ST	1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
								c.	Persentase irigasi kabupaten	%	49,15	54,02	109,91	ST	1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Misi		Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran		Satuan		Tahun 2025		Tingkat Capaian (%)	Status Capaian	Urusan Pemerintahan Terkait
												Target RKPD	Realisasi			
1		2		3		4		5		6		7	8	9	10	11
									dalam kondisi baik							
						4.1.2	Meningkatnya capaian universal access (100-0-100)	a.	Persentase capaian universal access (kumuh, air minum dan sanitasi)	%	99,99	98,44	98,45	ST	1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
															1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman	
						4.1.3	Terkendalinya pemanfaatan Kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang;	a.	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	99,09	99,20	100,11	ST	1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
															2.10 Pertanahan	
						4.1.4	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas penyelenggaraan angkutan;	a.	Kinerja Lalu Lintas (Level Of Service)	Nilai	0,56	0,43	123,21	ST	2.15. Perhubungan	
5	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender	5.1	Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran	a.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					Indeks	77,90 – 78,80	78,68	101	ST	1.01 Pendidikan	
													1.02. Kesehatan			
				b.	Persentase Penduduk Miskin				%	10,61 – 11,24	11	102,13	ST	Semua Urusan		
				c.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)				Indeks	96,10	96,35	100,26	ST	2.08. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
																1.01. Pendidikan

Misi		Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran		Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian (%)	Status Capaian	Urusan Pemerintahan Terkait
											Target RKPD	Realisasi			
1		2		3		4		5		6	7	8	9	10	11
							cerdas dan berdaya saing	b.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9,63	9,3	96,57	ST	1.01. Pendidikan
								c.	Persentase pemajuan kebudayaan	%	5	5	100	ST	2.22 Kebudayaan
						5.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	a.	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	77,31	77,69	100,49	ST	1.02 Kesehatan
															2.09 Pangan
															2.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
															2.19. Pemuda dan Olahraga
						5.1.3	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	a.	Persentase PMKS yang tertangani	%	87,39	97,7	111,80	ST	1.06. Sosial
								b.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,00 – 3,68	3,88	105,43	ST	2.07. Tenaga Kerja
								c.	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7286	N/A	N/A	N/A	2.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						5.1.4	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	a.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	74,33	76,66	103,13	ST	2.08. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
								b.	Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	770	732,65	95,14	ST	2.08. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Misi		Tujuan		Indikator Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran		Satuan	Tahun 2025		Tingkat Capaian (%)	Status Capaian	Urusan Pemerintahan Terkait
											Target RKPD	Realisasi			
1		2		3		4		5		6	7	8	9	10	11
6	Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	6.1	Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan	a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)					Indeks	63,50	69,56	109,54	ST	2.11. Lingkungan Hidup
						6.1.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	a.	Indeks kualitas air	Indeks	70,89	71,39	100,71	ST	2.11. Lingkungan Hidup
								b.	Indeks kualitas udara	Indeks	85,52	79,48	92,94	ST	2.11. Lingkungan Hidup
								c.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	41,82	48,06	114,92	ST	2.11. Lingkungan Hidup
						6.1.2	Meningkatnya penanganan dan pegurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3)	a.	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	65,95	51,09	77,47	T	2.11. Lingkungan Hidup
						6.1.3	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulang an bencana	a.	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,94	0,94	100	ST	1.05. Ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat

1) Capaian terhadap Indikator Kinerja Program

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan

Kinerja penyelenggaraan urusan Pendidikan ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 17 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Pendidikan di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.106 Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
A.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR											
	1.	Urusan Pendidikan										
		1)	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	90	101,83	98	93,67	95,58	ST	Dinas Pendidikan
				Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/Paket B	%	72,35	103,89	79,50	89,23	112,24	ST	Dinas Pendidikan
				Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	90	101,79	92,50	92,93	100,46	ST	Dinas Pendidikan
				Persentase Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	99,95	100,07	99,90	99,72	99,82	ST	Dinas Pendidikan
				Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	%	90	99,62	92,50	93,77	101,37	ST	Dinas Pendidikan
				Persentase SD berakreditasi minimal B	%	98,90	100,35	98,60	98,73	100,13	ST	Dinas Pendidikan
				Persentase SMP berakreditasi minimal B	%	88	100.95	87,93	94,02	106,92	ST	Dinas Pendidikan
				Persentase PAUD dan PNF berakreditasi minimal B	%	37,85	101,20	56,60	88,96	157,18	ST	Dinas Pendidikan
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	98	101,43	98,87	98,78	99,91	ST	Dinas Pendidikan
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ MTs/ Paket B	%	98,90	106,81	98,70	98,04	99,33	ST	Dinas Pendidikan
				Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan Usia 16-18 tahun	%	2,50	126,43	14	13,81	98,65	ST	Dinas Pendidikan

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
		2)	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal SD	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas Pendidikan
				Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal SMP	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas Pendidikan
				Persentase Ketersediaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas Pendidikan
		3)	Program Pengembangan Kurikulum	Rasio Guru/ Murid SD/ MI	Rasio	1:15	101,33	1:15	1:17	102,67	ST	Dinas Pendidikan
				Rasio Guru/ Murid SMP/ MTs	Rasio	1:15	105,33	1:17	1:20	103,90	ST	Dinas Pendidikan
				Rasio Guru/ Murid PAUD	Rasio	1:10	101,35	1:13	1:16	104,11	ST	Dinas Pendidikan

2. Kesehatan

Kinerja penyelenggaraan urusan Kesehatan ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 34 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Kesehatan di Kabupaten Klaten Tahun 2025 :

Tabel 2.107 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
A.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR											
	2.	Urusan Kesehatan										
		1)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas Kesehatan
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas Kesehatan
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas Kesehatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas Kesehatan
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	%	100	100	100	99,05	99,05	ST	Dinas Kesehatan
				Persentase anak usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas Kesehatan
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas Kesehatan
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas Kesehatan
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas Kesehatan
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas Kesehatan
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas Kesehatan
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas Kesehatan
				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun / balita *)	%	10,30	13,34	18	13,77	123,50	ST	Dinas Kesehatan
				Cakupan STBM	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas Kesehatan
				Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas Kesehatan
				Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100,00	ST	Dinas Kesehatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
				Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	30	81,02	25	65,01	260,06	ST	Dinas Kesehatan
				Penderita diare yang ditangani	%	10	9,15	9	159,69	1.774,37	ST	Dinas Kesehatan
				Angka kejadian HIV*)	/1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV	0,18	0,12	0,18	0,128	128,92	ST	Dinas Kesehatan
				Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	/100.000 penduduk	55	121,46	50	132,50	265	ST	Dinas Kesehatan
				Angka Kejadian Malaria*)	< 1/100.000	< 1	0,39	< 1	1,23	77,17	T	Dinas Kesehatan
				Persentase orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	%	10	93,55	92	100	108,70	ST	Dinas Kesehatan
				Angka Kejadian DBD*)	20/100.000	20	98,86	46	40	113,05	ST	Dinas Kesehatan
				Persentase Penduduk Memiliki JKN untuk mencapai UHC (Universal Health Coverage)	%	95	98,82	98,5	99,20	100,71	ST	Dinas Kesehatan
				Persentase Puskesmas terakreditasi minimal Madya	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas Kesehatan
				Persentase RSUD terakreditasi minimal Madya	%	100	100	100	100	100	ST	RSD Bagaswaras
				Persentase puskesmas terpenuhi obat dan vaksin	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas Kesehatan
				Persentase pelayanan lab klinis dan lab air	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas Kesehatan
				Persentase sistem informasi kesehatan	%	80	80	80	80	100	ST	Dinas Kesehatan
		2)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	35,29	35,29	SR	Dinas Kesehatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
				Persentase dokter IGD RSUD yang sudah mengikuti pelatihan kegawatdaruratan sesuai standar.	%	100	100	100	100	100	ST	RSD Bagaswaras
		3)	Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optik dan Usaha Mikro Obat Tradisional yang memenuhi ketentuan	%	50	50	75	87,93	117,24	ST	Dinas Kesehatan
				Persentase industri rumah tangga pangan, tempat pengolahan makanan dan sekolah / sentra makanan jajanan yang memenuhi ketentuan	%	50	44	50	100	200	ST	Dinas Kesehatan
		4)	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	66	76	72	80,55	111,87	ST	Dinas Kesehatan

Keterangan : *) Indikator negatif

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 15 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.108 Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
A.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR											
	3.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										
		1)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	0,31	0,34	0,36	0,46	127,78	ST	DPUPR
		2)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak	%	100	94,25	98,73	95,50	96,73	ST	DPUPR

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
		3)	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	ST	DPUPR
		4)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	2,21	1,63	1,90	1,89	99,47	ST	DPUPR
		5)	Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem Darinase	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	%	61,52	62,62	62,31	62,80	100,79	ST	DPUPR
		6)	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase gedung perkantoran dan gedung non perkantoran yang dibangun	%	100	100	92,86	100	107,69	ST	DPUPR
				Persentase bangunan gedung pemerintah yang laik fungsi	%	52,08	65,17	41,67	40,33	96,78	ST	DPUPR
		7)	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase dokumen RTBL yang tersusun	%	20	20	20	20	100	ST	DPUPR
				Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	%	50	35	40	40	100	ST	DPUPR
		8)	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	100	100	100	100	ST	DPUPR
		9)	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kondisi baik	%	68,22	48,06	67,93	48,86	71,93	S	DPUPR
				Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	%	70,61	1,27	66,77	1,55	2,32	SR	DPUPR
		10)	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun	%	100	70,5	70,50	52,88	75,01	S	DPUPR
				Persentase pelayanan ketataruangan	%	100	100	100	100	100	ST	DPUPR
				Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	%	100	100	100	100	100	ST	DPUPR

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja penyelenggaraan urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 6 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.109 Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
A.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR										
	4.	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
		1) Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	ST	Diperakim
		2) Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	0,02	0,040	0,030	0,031	104,97	ST	Diperakim
		3) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani	%	100	97,63	98,83	97,80	98,95	ST	Diperakim
		4) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum(PSU)	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) kondisi baik	%	100	74,13	86,01	71,70	83,36	T	Diperakim
			Persentase PSU yang diserahterimakan oleh pengembang perumahan	%	78,61	52,76	66,07	100	151,35	ST	Diperakim
		5) Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang diterbitkan	%		0	100	100	100	ST	Diperakim

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kinerja penyelenggaraan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 11 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.110 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
A.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR											
	5	Urusan Ketentraman. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat										
		1)	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan yang Terkondisikan	%	47	43,50	45	0,4	0,8	SR	Satpol PP dan Damkar
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	ST	Satpol PP dan Damkar
				Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	93,60	100	100	97,96	97,96	ST	Satpol PP dan Damkar
				Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkara	%	100	100	100	100	100	ST	Satpol PP dan Damkar
		2)	Program Pencegahan, Penggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tingkat waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	85	83,33	80	71,74	89,67	T	Satpol PP dan Damkar
				Waktu tanggap (Response time) Penanganan Kebakaran	Menit	15,30	94,23	15,20	14,12	107,11	ST	Satpol PP dan Damkar
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	ST	Satpol PP dan Damkar
		3)	Program Penanggulangan Bencana	Persentase kelompok relawan bencana yang aktif	%	55	52	53	53,33	100,63	ST	BPBD
				Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	%	70	63	65	100	153,85	ST	BPBD

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	ST	BPBD
				Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	80	74	75	100	133,33	ST	BPBD

6. Sosial

Kinerja penyelenggaraan urusan Sosial ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 5 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Sosial di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.111 Capaian Kinerja Urusan Sosial

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisa si Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
A.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR											
	6.	Urusan Sosial										
		1)	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase potensi Sumber Kesejahteraan sosial yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%	100	93	100	107,89	107,89	ST	DISOSSP3APPKB
		2)	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial di luar panti	%	67,50	97,67	86,31	90,34	104,67	ST	DISOSSP3APPKB
		3)	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah	%	90,50	84,23	100	96,63	96,63	ST	DISOSSP3APPKB
		4)	Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	89,38	89,38	T	DISOSSP3APPKB
		5)	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan sesuai dengan standar pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	100	ST	DISOSSP3APPKB

B. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**

Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan untuk Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar adalah sebagai berikut:

1. **Tenaga Kerja**

Kinerja penyelenggaraan urusan Tenaga Kerja ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 4 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.112 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
B.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR											
	1.	Urusan Tenaga Kerja										
		1)	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja daerah	%	92	100	100	100	100	ST	Disperinaker
		2)	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	5,95	6,87	15	13,60	91,08	ST	Disperinaker
		3)	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	24,50	85,34	85,34	90,76	106,35	ST	Disperinaker
		4)	Program Hubungan Industrial	Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	100	100	100	100	100	ST	Disperinaker

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 6 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.113 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
B.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
	2.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
		1) Program Pengarusutaman Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsive Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	%	0,90	2,16	2,18	1,34	61,46	R	DISOSSP3APPKB
		2) Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani sesuai standar	%	100	100	100	100	100	ST	DISOSSP3APPKB
		3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Lembaga layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	%	100	100	100	100	100	ST	DISOSSP3APPKB
		4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak	%	67,30	100	57,70	100	173,31	ST	DISOSSP3APPKB
		5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Desa/Kelurahan layak anak	%	100	100	100	100	100	ST	DISOSSP3APPKB
		6) Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	ST	DISOSSP3APPKB

3. Pangan

Kinerja penyelenggaraan urusan Pangan ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 5 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Pangan di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.114 Capaian Kinerja Urusan Pangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
B	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR											
	3.	Urusan Pangan										
		1)	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan pangan utama/beras	Ton	284.075	261.447,13	286.140,99	294.922,49	103,07	ST	DKPP
		2)	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Energi	K.kal/kapita/ hari	3.090	3.060	3.075	3.414	111,02	ST	DKPP
				Ketersediaaan Protein	gram/kapita/ hari	86,40	85,80	86,10	92,51	107,44	ST	DKPP
		3)	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	18	15,38	16	17,05	106,53	ST	DKPP
		4)	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	Ton	84	95,09	83	93,50	112,65	ST	DKPP

4. Pertanahan

Kinerja penyelenggaraan urusan Pertanahan ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 4 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Pertanahan di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.115 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
B.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
	4	Urusan Pertanahan									
		1) Program Penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase sengketa tanah garapan yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	ST	Diperakim
		2) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase pengadaan tanah untuk pembangunan yang selesai tepat waktu	%	100	100	100	94,12	94,12	ST	Diperakim
		3) Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan tanah Absente	Persentase tanah milik daerah yang terfasilitasi pensertifikatannya	%	72,50	57,50	65	69,53	106,97	ST	Diperakim
		4) Program Penatagunaan Tanah	Persentase dokumen penatagunaan tanah yang tersusun	%	100	100	100	100	100	ST	Diperakim

5. Lingkungan Hidup

Kinerja penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 14 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.116 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
B.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR											
	5.	Urusan Lingkungan Hidup										
		1)	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas LH
		2)	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pemantauan kualitas air	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas LH
				Cakupan pemantauan kualitas udara	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas LH
				Persentase kampung iklim yang terbentuk	%	100	61,54	60	80	133,33	ST	Dinas LH
		3)	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH publik yang terkelola dengan baik	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas LH
		4)	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengelolaan limbah B3	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas LH
		5)	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH	%	80	70	75	73,33	97,77	ST	Dinas LH

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
			Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota								
		6)	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat (KSM) yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas LH
				Persentase saka kalpataru yang dibina	%	100	68,52	100	100	100	ST	Dinas LH
		7)	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Tokoh/ lembaga masyarakat /Sekolah/Dunia Usaha yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten	Orang	3	3	3	2	66,67	S	Dinas LH
				Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah) tingkat kabupaten	%	100	100	100	100	100	ST	Dinas LH
		8)	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang ditangani	%	100	90	100	165	165	ST	Dinas LH
		9)	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah diperkotaan yang tertangani	%	83,39	71,38	80,96	83,36	102,96	ST	Dinas LH
				Persentase jumlah sampah yang berkurang	%	34	28,34	32	0	0	SR	Dinas LH

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kinerja penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 12 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.117 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
B.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR											
	6.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										
		1)	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman KTP Elektronik	%	99,09	99,36	99,56	99,34	99,78	ST	Disdukcapil
				Cakupan Kepemilikan KK	%	98,06	99,84	99,92	99,84	99,92	ST	Disdukcapil
				Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	90	73,13	80	78,51	98,14	ST	Disdukcapil
		2)	Program Pencatatan Sipil	Persentase Penduduk umur 0-18 tahun memiliki akta kelahiran	%	100	99,29	100	99,36	99,36	ST	Disdukcapil
				Cakupan penerbitan akta kematian	%	100	100	100	100	100	ST	Disdukcapil
				Cakupan penerbitan akta perkawinan	%	100	100	100	100	100	ST	Disdukcapil
				Cakupan penerbitan akta perceraian	%	100	100	100	100	100	ST	Disdukcapil
				Cakupan penerbitan akta pengesahan anak	%	100	100	100	100	100	ST	Disdukcapil
				Cakupan penerbitan pengangkatan anak	%	100	100	100	100	100	ST	Disdukcapil
		3)	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase ketersediaan database kependudukan	%	100	100	100	100	100	ST	Disdukcapil
				Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	33	72,55	94,12	90,20	95,84	ST	Disdukcapil
		4)	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase ketersediaan profil kependudukan tahunan	%	100	100	100	100	100	ST	Disdukcapil

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 6 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.118 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
B.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR											
	7.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
		1)	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan desa yang terfasilitasi dalam kerjasama antar desa	%	100	100	100	100	100	ST	Dispermasdes
		2)	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase BUMDes berkembang dan maju	%	24,30	15	21,23	14,83	69,87	S	Dispermasdes
				Persentase Desa yang melakukan penatausahaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	ST	Dispermasdes
		3)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	ST	Dispermasdes
				Persentase Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	ST	Dispermasdes
				Persentase Posyantek aktif	%	34,78	31,58	46,15	46,15	100	ST	Dispermasdes

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja penyelenggaraan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 9 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.119 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021- 2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
B.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR											
	8.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										
		1)	Program Pengendalian Penduduk	Persentase ketersediaan data pembangunan berkawasan kependudukan	%	100	100	100	100	100	ST	DISOSSP3APPKB
				Persentase ketersediaan kebijakan pembangunan berkawasan kependudukan	%	100	85,71	100	85,71	85,71	T	DISOSSP3APPKB
		2)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	%	73,50	66,84	73	66,53	91,14	ST	DISOSSP3APPKB
				Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmetneed*)	%	13,95	8,20	8,2	7,29	111,10	ST	DISOSSP3APPKB
		3)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase anggota BKB yang menjadi peserta KB	%	86	100	100	100	100	ST	DISOSSP3APPKB
				Persentase anggota BKR yang menjadi peserta KB	%	77,42	81,60	88,48	81,51	92,12	ST	DISOSSP3APPKB
				Persentase anggota BKL yang menjadi peserta KB	%	66,88	74,02	74,02	71,97	97,23	ST	DISOSSP3APPKB
				Persentase anggota UPPKS yang menjadi peserta KB	%	65,29	71,89	74,43	70,69	96,27	ST	DISOSSP3APPKB
				Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) **)	indeks	56	66,13	65,61	73,70	112,33	ST	DISOSSP3APPKB

Keterangan : *) Indikator negatif

9. Perhubungan

Kinerja penyelenggaraan urusan Perhubungan ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 1 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Perhubungan di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.120 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
B.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR											
	9	Urusan Perhubungan										
		1)	Program Penyelenggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Kecelakaan Lalu Lintas*)	%	0,40	0,28	0,5	0,50	100	ST	Dishub

Keterangan : *) Indikator negatif

10. Komunikasi dan Informatika

Kinerja penyelenggaraan urusan Komunikasi dan Informatika ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 5 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.121 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
B.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR											
	10.	Urusan Komunikasi dan Informatika										
		1)	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Terkait Program dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Disampaikan Ke Masyarakat	%	100	100	100	100	100	ST	Diskominfo
				Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Di Tingkat Kecamatan	%	100	100	72,73	100	137,49	ST	Diskominfo

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
		2)	Program Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	%	100	78	90,74	90,63	99,87	ST	Diskominfo
				Persentase Penambahan Akses Internet Di Ruang Publik	%	100	88,89	90	92,31	102,56	ST	Diskominfo
				Persentase Penambahan Akses (Titik) Internet Di OPD Yang Disediakan Dinas Kominfo	%	74,51	100	70,59	70,59	100	ST	Diskominfo

11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kinerja penyelenggaraan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 6 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.122 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
B.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR											
	11.	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah										
		1)	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	%	75	33,44	34,75	56,48	162,54	ST	DKUKMP
				Persentase Koperasi yang patuh	%	30	33,44	35	56,48	161,38	ST	DKUKMP
		2)	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Pengurus/pengawas/pengelola koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan	%	32,50	36,95	32,20	52,19	162,07	ST	DKUKMP
		3)	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, usahaKecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Pertumbuhan usaha mikro	%	0,17	0,15	0,16	1,26	788,67	ST	DKUKMP
				Persentase UMKM yang melakukan Kemitraan	%	0,40	0,32	0,38	0,38	100	ST	DKUKMP

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
		7)	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi/pendampingan	%	4,20	4,40	4,2	4,44	105,74	ST	DKUKMP

12. Penanaman Modal

Kinerja penyelenggaraan urusan Penanaman Modal ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 5 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Penanaman Modal di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.123 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
B.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR											
	12.	Urusan Penanaman Modal										
		1)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan pengembangan iklim investasi	%	80	67,61	80	80	100	ST	DPMPTSP
		2)	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Potensi investasi yang siap ditawarkan	%	80	73,87	80	80	100	ST	DPMPTSP
		3)	Program Pelayanan Penaman Modal	Persentase Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	%	80	79,38	80	85,90	107,37	ST	DPMPTSP
		4)	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	%	80	68,78	1,4	75,71	94,64	ST	DPMPTSP
		5)	Program pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	%	80	77,19	80	80	100	ST	DPMPTSP

13. Kepemudaan dan Olahraga

Kinerja penyelenggaraan urusan Kepemudaan dan Olahraga ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 3 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.124 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
B.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR											
	13.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga										
		1)	Program Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1,30	1,68	1,68	1,40	83,43	T	Disbudporapar
				Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	5,10	4,34	4,88	4,88	100	ST	Disbudporapar
		2)	Program Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Persentase Atlet Berprestasi	%	7,14	80	53,07	41,26	77,74	R	Disbudporapar

14. Statistik

Kinerja penyelenggaraan urusan Statistik ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 1 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Statistik di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.125 Capaian Kinerja Urusan Statistik

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
B.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR											
	14.	Urusan Statistik										
		1)	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan Statistik Sektoral Yang Memiliki Standar Data Dan Metadata Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia	%	70	50	60	60	100	ST	Diskominfo

15. Persandian

Kinerja penyelenggaraan urusan Persandian ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 2 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Persandian di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.126 Capaian Kinerja Urusan Persandian

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
B.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR											
	15.	Urusan Persandian										
		1)	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi (E-Sign/Tanda Tangan Elektronik) Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	%	68,63	100	58,82	100	170,01	ST	Diskominfo

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
				Persentase Sistem Informasi Perangkat Daerah Yang Diamankan Dengan Sertifikat Elektronik	%	41	38,60	40	50	125	ST	Diskominfo

16. Kebudayaan

Kinerja penyelenggaraan urusan Kebudayaan ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 5 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Kebudayaan di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.127 Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
B.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR											
	16.	Urusan Kebudayaan										
		1)	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase adat dan ritus yang dilestarikan	%	30	25	30	30	100	ST	Disbudporapar
		2)	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase pelaku seni tradisional yang kompeten	%	70	50	60	70	116,67	ST	Disbudporapar
		3)	Program Pembinaan Sejarah	Persentase pembinaan sejarah	%	50	40	45	43	95,56	ST	Disbudporapar
		4)	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase objek cagar budaya yang dilestarikan	%	28	22,73	25	26,67	106,67	ST	Disbudporapar
		5)	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Museum kabupaten terkelola	%	50	64,62	64,62	64,62	100	ST	Disbudporapar

17. Perpustakaan

Kinerja penyelenggaraan urusan Perpustakaan ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 2 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Perpustakaan di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.128 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
B.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR											
	17.	Urusan Perpustakaan										
		1)	Program Pembinaan Perpustakaan	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eksemplar	52.262	52.511	53.581	53.860	100,52	ST	Dispersip
				Persentase perpustakaan yang dibina	%	25	39,90	47,57	50,13	105,38	ST	Dispersip

18. Kearsipan

Kinerja penyelenggaraan urusan Kearsipan ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 4 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Kearsipan di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.129 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
B.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR											
	18.	Urusan Kearsipan										
		1)	Program Pengelolaan Arsip	Persentase arsip yang diakusisi	%	81	100	100	100	100	ST	Dispersip
				Persentase pengawasan kearsipan internal	%	100	100	100	101,96	101,96	ST	Dispersip
		2)	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Arsip usul musnah	Meter Lari	60	34	46	46	100	ST	Dispersip
				Persentase arsip yang dialihmediakan	%	24,55	20,95	38	18,38	48,37	SR	Dispersip

C. Urusan Pilihan

Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan untuk Urusan Pilihan adalah sebagai berikut:

1. Kelautan dan Perikanan

Kinerja penyelenggaraan urusan Kelautan dan Perikanan ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 4 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Klaten

Tabel 2.130 Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
C.	URUSAN PILIHAN											
	1.	Urusan Kelautan dan Perikanan										
		1)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan budidaya	Ton	32.000	30.641	31.500	31.559	100,31	ST	DKPP
		2)	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	Ton	562	498	557	558	100,18	ST	DKPP
		3)	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Cakupan tebar benih ikan/restocking perairan umum	%	46	26,92	38	38,46	101,21	ST	DKPP
		4)	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah produk olahan ikan	Kg	1.266.100	1.742.856	1.742.856	2.719.015	156,01	ST	DKPP

2. Pariwisata

Kinerja penyelenggaraan urusan Pariwisata ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 4 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Pariwisata di Kabupaten Klaten

Tabel 2.131 Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
C.	URUSAN PILIHAN											
	2.	Urusan Pariwisata										
		1)	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis Pariwisata dan Destinasi Pariwisata Terkelola	%	80	80,98	83	83,23	100,28	ST	Disbudporapar
		2)	Program Pemasaran Pariwisata	Tingkat Intensitas promosi pariwisata	%	75	72,60	73	68,49	93,83	ST	Disbudporapar
		3)	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi HKI (Hak Kekayaan Intelektual)	%	100	50	50	50	100	ST	Disbudporapar
		4)	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata yang kompeten	%	45	39,28	40	44,44	111,11	ST	Disbudporapar

3. Pertanian

Kinerja penyelenggaraan urusan Pertanian ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 10 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Pertanian di Kabupaten Klaten

Tabel 2.132 Capaian Kinerja Urusan Pertanian

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
C.	URUSAN PILIHAN											
	3.	Urusan Pertanian										
		1)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	ku/ha	67,13	68	68,82	66,23	96,24	ST	DKPP
				Produktivitas cabe	ku/ha	9,34	13,09	13,29	24,23	182,32	ST	DKPP
				Produktivitas tembakau rajangan	ku/ha	12,28	1,26	21,8	8,4	38,53	SR	DKPP
				Produktivitas tembakau asepun	ku/ha	9,91	1,86	28	16,10	57,50	R	DKPP
		2)	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik/fungsional	%	40	36,68	40	41	101,66	ST	DKPP
				Persentase ketersediaan Prasarana Penyuluhan Pertanian	%	60	50	58	56	96,55	ST	DKPP
				Jumlah Populasi ternak ruminansia besar dan kecil	ekor	315.125	180.600	305.947	308.222	100,74	ST	DKPP
		3)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	22	68,65	22	74,39	-138,15	SR	DKPP
		4)	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan penanganan gangguan OPT dan potensi bencana pertanian lainnya	%	66	62	64	77,55	121,16	ST	DKPP
		5)	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani madya dan utama	%	10,63	8,31	10,13	8,57	84,61	T	DKPP

4. Perdagangan

Kinerja penyelenggaraan urusan Perdagangan ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 10 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Perdagangan di Kabupaten Klaten

Tabel 2.133 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
C.	URUSAN PILIHAN											
	4.	Urusan Perdagangan										
		1)	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Rekomendasi ijin usaha perdagangan yang diterbitkan	%	93	100	92	10,38	11,28	SR	DKUKMP
		2)	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar rakyat/tradisional terrevitalisasi	%	58	45	54	47	86,92	T	DKUKMP
				Persentase PKL yang terbina	%	77	75,96	68,50	81,45	118,91	ST	DKUKMP
				Jumlah pendapatan retribusi pasar	Rp	23.750.000.000	8.668.568.331	6.175.000.000	9.884.153.631	160,07	ST	DKUKMP
		3)	Program Stabilisasi Harga Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase pasar yang diawasi	%	100	100	98	96,03	97,99	ST	DKUKMP
				Persentase Lonjakan harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting (18 bapokting) *)	%	6	5,56	6	5,56	107,33	ST	DKUKMP
				Persentase Kinerja Pupuk	%	98	84,79	98	96,03	97,99	ST	DKUKMP
		4)	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Komoditas yang mampu ekspor	Jenis	4	3	3	3	100	ST	DKUKMP
		5)	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang	%	80	96,1	75	97,26	129,68	ST	DKUKMP
		6)	Program Penggunaan dan Pemasaran produk Dalam Negeri	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi event promosi produk dalam negeri	orang	98	30	16	5	31,25	SR	DKUKMP

5. Perindustrian

Kinerja penyelenggaraan urusan Perindustrian ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 2 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Perindustrian di Kabupaten Klaten

Tabel 2.134 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
C.	URUSAN PILIHAN											
	5.	Urusan Perindustrian										
		1)	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina	%	33,46	25,23	29,48	26,56	90,10	T	Diperinaker
		2)	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang terfasilitasi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	%	27,45	3,76	24,45	3,77	15,40	SR	Diperinaker

6. Transmigrasi

Kinerja penyelenggaraan urusan Transmigrasi ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 1 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Transmigrasi di Kabupaten Klaten

Tabel 2.135 Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
C.	URUSAN PILIHAN											
	6.	Urusan Transmigrasi										
		1)	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase pengiriman transmigran ke lokasi transmigrasi	%	95	100	100	100	100	ST	Diperinaker

D. Penunjang Urusan Pemerintahan

Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan untuk Penunjang Urusan Pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah

Kinerja penyelenggaraan urusan Sekretariat Daerah ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 17 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Sekretariat Daerah di Kabupaten Klaten

Tabel 2.136 Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
C.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
	1	Urusan Sekretariat Daerah										
		1)	Program Administrasi Umum	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan Setda yang sesuai SOP	%	100	100	100	100	100	ST	Bagian Perekonomian dan SDA, Bagian Umum, Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Kesra, Bagian Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Organisasi, dan Bagian Protokol dan Komuikasi Pimpinan Setda
				Persentase pelayanan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terlaksana dengan baik	%	100	100	100	100	100	ST	Bagian Umum Setda
				Persentase pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan terlaksana dengan baik	%	100	100	100	100	100	ST	Bagian Prokopim



Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
				Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelaporan yang tersusun	%	100	100	100	100	100	ST	Bagian Organisasi Setda
				Persentase perangkat daerah yang kelembagaannya dievaluasi	%	100	100	100	100	100	ST	Bagian Organisasi Setda
				Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standart Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	100	ST	Bagian Organisasi Setda
		2)	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase fasilitasi administrasi tata pemerintahan dan kerjasama yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	ST	Bagian Pemerintahan Setda
				Persentase Kecamatan Mencapai Kategori "WASANA"	%	65,38	84,6	84,60	80,77	95,47	ST	Bagian Pemerintahan Setda
				Persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	%	90	100	100	100	100	ST	Bagian Hukum Setda
				Persentase kasus Hukum yang menimpa OPD dan desa yang diberikan bantuan hukum	%	90	100	100	100	100	ST	Bagian Hukum Setda
				Persentase Fasilitasi Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	%	100	100	100	100	100	ST	Bagian Kesra Setda
		3)	Program Perekonomian dan Pembangunan	Tingkat realisasi fisik pelaksanaan pembangunan	%	100	99,46	100	99,90	99,90	ST	Bagian Administrasi Pembangunan Setda
				Persentase Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan dengan e-procurement	%	100	100	100	100	100	ST	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
				Pertumbuhan Setoran Bagian Laba BUMD kepada Pemerintah Daerah	%	5	8,80	10	22,19	221,88	ST	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda
				Persentase BLUD yang Mendapatkan Pembinaan Teknis	%	100	100	100	100	100	ST	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
				Persentase Rekomendasi Tim Pengendali Inflasi Daerah yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	ST	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda
				Pertumbuhan Jumlah Unit Usaha Mikro yang Mendapatkan Akses Keuangan	%	5	1,15	5	4,93	98,68	ST	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda
				Persentase Kebijakan Sumber Daya Alam yang Terlaksana Sesuai dengan Ketentuan	%	100	100	100	100	100	ST	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda

2. Sekretariat DPRD

Kinerja penyelenggaraan urusan Sekretariat DPRD ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 3 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Sekretariat DPRD di Kabupaten Klaten

Tabel 2.137 Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
C.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
	2.	Urusan Sekretariat DPRD										
		1)	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pelayanan Sekretariat DPRD terhadap dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pembentukan Perda	%	75	92,30	92,30	75,00	81,26	T	Sekretariat DPRD
				Persentase pelayanan Sekretariat DPRD terhadap dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Penganggaran	%	100	100	100	100	100	ST	Sekretariat DPRD

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
				Persentase pelayanan Sekretariat DPRD terhadap dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pengawasan	%	100	100	100	96,43	96,43	ST	Sekretariat DPRD

3. Perencanaan Pembangunan Daerah

Kinerja penyelenggaraan urusan Perencanaan Pembangunan Daerah ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 4 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten

Tabel 2.138 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
C.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
	3.	Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah										
		1)	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	100	100	100	100	ST	Bapperida
		2)	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD	%	80	91,30	91,30	89,09	97,58	ST	Bapperida
				Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	85,71	100	85,71	85,71	T	Bapperida
				Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	100	94,38	100	90,96	90,96	T	Bapperida

4. Keuangan Daerah

Kinerja penyelenggaraan urusan Keuangan Daerah ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 5 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Keuangan Daerah di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.139 Capaian Kinerja Urusan Keuangan Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
C.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
	4.	Urusan Keuangan Daerah										
		1)	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)	%	100	100	100	100	100	ST	BPKPAD
				Persentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sesuai Surat Edaran Bupati)	%	100	100	100	100	100	ST	BPKPAD
				Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	%	86	92,35	92,35	88,26	95,58	ST	BPKPAD
		2)	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase barang milik daerah yang teregistrasi	%	100	100	100	100	100	ST	BPKPAD
		3)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD	%	12	13,43	13,44	18,40	136,88	ST	BPKPAD

5. Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja penyelenggaraan urusan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 5 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.140 Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
C.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
	5.	Urusan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan										
		1)	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Kualifikasi Calon ASN sesuai formasi	%	80	100,80	100	100,19	100,19	ST	BKPSDM
				Persentase Kinerja ASN bernilai baik	%	90	100	100	100	100	ST	BKPSDM
				Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan	%	80	88,24	100	100	100	ST	BKPSDM
				Persentase Mutasi Pegawai Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	%	75	48,60	100	85,60	85,60	T	BKPSDM
		2)	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang meningkat Kompetensinya	%	80	224,96	100	78,76	78,76	T	BKPSDM

6. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja penyelenggaraan urusan Penelitian dan Pengembangan ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 2 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Klaten

Tabel 2.141 Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
C.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
	6.	Urusan Penelitian dan Pengembangan										
		1)	Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	73,20	65	68,60	76,92	112,13	ST	Bapperida
				Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	%	16,50	15,09	16	15,85	99,06	ST	Bapperida

7. Pengawasan

Kinerja penyelenggaraan urusan Pengawasan ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 10 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Pengawasan di Kabupaten Klaten

Tabel 2.142 Capaian Kinerja Urusan Pengawasan

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
C.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
	7.	Urusan Pengawasan										
		1)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 1	%	100	100	100	100	100	ST	Inspektorat
				Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 2	%	100	100	100	100	100	ST	Inspektorat
				Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 3	%	100	100	100	100	100	ST	Inspektorat

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
				Persentase pelaksanaan pengawasan wilayah 4	%	100	100	100	100	100	ST	Inspektorat
				Persentase pelaksanaan pengawasan khusus	%	100	100	100	100	100	ST	Inspektorat
		2)	Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi	Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan Wilayah 1	%	100	100	100	100	100	ST	Inspektorat
				Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan Wilayah 2	%	100	100	100	100	100	ST	Inspektorat
				Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan Wilayah 3	%	100	100	100	100	100	ST	Inspektorat
				Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan Wilayah 4	%	100	100	100	100	100	ST	Inspektorat
				Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan Khusus	%	100	100	100	100	100	ST	Inspektorat

8. Kewilayahan

Kinerja penyelenggaraan urusan Kewilayahan ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 6 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Kewilayahan di Kabupaten Klaten

Tabel 2.143 Capaian Kinerja Urusan Kewilayahan

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
C.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
	9.	Urusan Kewilayahan										
		1)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan Publik (PATEN)	%	100	99,81	100	100	100	ST	Kecamatan
		2)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase lembaga masyarakat aktif	%	95	98,48	98,48	104,37	105,98	ST	Kecamatan
		3)	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	%	97	104,28	100	102,18	102,18	ST	Kecamatan
		4)	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase potensi konflik sosial di Kecamatan yang tertangani	%	97	100,61	100	102,10	102,10	ST	Kecamatan
		5)	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	%	98	100,11	100	103,77	103,77	ST	Kecamatan
				Persentase Desa tertib administrasi	%	97	100,66	100	101,85	101,85	ST	Kecamatan

9. Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja penyelenggaraan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik ditunjukkan dengan capaian kinerja sebanyak 9 indikator program. Berikut capaian indikator program urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Klaten

Tabel 2.144 Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang Urusan Pemerintahan dan/ Program				Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target Akhir RPJMD (2021-2026)	Realisasi Tahun 2024	Target 2025	Realisasi Capaian Tahun 2025	% Capaian Tahun 2025	Status Capaian	OPD Penanggung jawab
C.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
	8.	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik										
		1)	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan	%	13	10,58	10,58	11,40	107,75	ST	Bakesbangpol
				Persentase pelajar yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	%	15	11,11	11,11	11,11	100,00	ST	Bakesbangpol
		2)	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik	%	10	8	8	8,33	104,17	ST	Bakesbangpol
				Persentase parpol yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ bantuan keuangan parpol yang tepat waktu	%	80	100	100	100	100	ST	Bakesbangpol
		3)	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	%	100	100	100	100	100	ST	Bakesbangpol
		4)	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Pembentukan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama Tingkat Desa terbentuk	%	100	100	100	100	100	ST	Bakesbangpol
				Cakupan pembinaan dan penyuluhan narkoba pada pelajar	%	31	25,93	25,93	25,93	100,00	ST	Bakesbangpol
		5)	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	ST	Bakesbangpol
				Persentase deteksi dini potensi konflik sosial	%	85	100	100	100	100	ST	Bakesbangpol



2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2027, pemerintah daerah perlu menggali dan menganalisis berbagai permasalahan pembangunan daerah sebagai landasan dalam penetapan isu strategis, prioritas pembangunan, arah kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah mencerminkan perbedaan antara kondisi aktual dengan kondisi yang diharapkan, berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan, analisis data dan indikator pembangunan, serta aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permasalahan yang teridentifikasi menjadi dasar dalam penajaman prioritas pembangunan daerah, perumusan arah kebijakan, serta penetapan program dan kegiatan pembangunan daerah agar lebih tepat sasaran dan berorientasi pada hasil.

1.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Kabupaten Klaten masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan dan tantangan strategis lintas sektor yang memerlukan penanganan terintegrasi dan berkelanjutan. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dianalisis berdasarkan evaluasi kinerja pembangunan dan kondisi daerah. Permasalahan Daerah tahun 2027, sebagai berikut:

1. Akses dan mutu pelayanan dasar belum merata;
2. Masih besarnya tantangan dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial;
3. Kurangnya kualitas dan daya saing tenaga kerja;
4. Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi lokal dan daya tarik investasi;
5. Belum optimalnya implementasi pengarusutamaan gender dan perlindungan anak;
6. Masih adanya tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
7. Belum meratanya pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi informasi;
8. Belum optimalnya pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat;
9. Belum optimalnya partisipasi pemuda dan pembinaan olahraga dan pembinaan prestasi olahraga;



10. Masih terbatasnya kualitas pengelolaan data statistik, arsip, dan layanan perpustakaan.
11. Belum optimalnya penguatan dan pengelolaan sektor pariwisata daerah.

Adapun isu strategis daerah dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Belum Meratanya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Akses Pelayanan Dasar yang Inklusif

Di sektor pendidikan, masih terdapat anak usia dini yang belum mengakses PAUD, rendahnya angka partisipasi murni pada jenjang SD dan SMP, serta keberadaan penduduk usia >15 tahun yang masih buta aksara. Capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah masih perlu ditingkatkan. Di sektor kesehatan, angka kematian bayi dan ibu masih terjadi, prevalensi stunting cukup signifikan, serta rasio tenaga medis belum memenuhi standar pelayanan. Demikian pula pada sektor infrastruktur dasar, masih terdapat jalan dan drainase yang belum optimal, serta masih adanya keterbatasan perumahan layak, akses air minum dan sanitasi. Selain itu, pemenuhan layanan dasar yang responsif terhadap kebutuhan perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya masih perlu ditingkatkan guna mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif.

2. Masih Tingginya Kemiskinan dan Kerentanan Sosial Masyarakat

Masih adanya ketimpangan kesejahteraan, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) belum sepenuhnya optimal dan standar pelayanan minimal (SPM) di bidang sosial belum seluruhnya tercapai. Masih terdapat rumah tidak layak huni, kawasan kumuh dan tingginya *backlog* perumahan menunjukkan belum meratanya kesejahteraan.

3. Rendahnya Kualitas Dan Daya Saing Tenaga Kerja Serta Terbatasnya Kesempatan Kerja Yang Inklusif

Kabupaten Klaten masih menghadapi tingkat pengangguran terbuka yang cukup tinggi, terutama di kalangan usia muda. Kompetensi tenaga kerja relatif rendah, dengan persentase pemilik sertifikasi kompetensi yang sangat kecil dan ketidaksesuaian kompetensi dan keterampilan (*skill mismatch*) antara tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Belum optimalnya pengembangan sistem pasar kerja yang terintegrasi antara pencari kerja, dunia usaha, dan lembaga pelatihan sehingga proses penempatan tenaga kerja belum berjalan secara efektif. Sementara, sengketa hubungan industrial seperti perselisihan upah dan PHK masih sering terjadi. Struktur lapangan kerja juga belum beragam, cenderung terkonsentrasi pada sektor tertentu yang rentan gejolak. Selain itu, transformasi digital belum diimbangi peningkatan keterampilan berbasis teknologi, banyak pekerja informal belum terlindungi jaminan sosial dan tingginya migrasi kerja ke luar daerah mencerminkan terbatasnya peluang kerja layak di Klaten. Selain itu, akses



terhadap kesempatan kerja yang setara bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya juga masih perlu ditingkatkan guna mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif.

4. Belum Optimalnya Penguatan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Lokal Dan Pengembangan Sektor Pariwisata

Pengembangan UMKM dan koperasi sebagai penggerak utama ekonomi daerah masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan akses permodalan, peningkatan kapasitas usaha, inovasi produk, serta perluasan akses pasar. Di sisi lain, peningkatan investasi daerah belum sepenuhnya mampu mendorong penciptaan nilai tambah ekonomi dan penyerapan tenaga kerja secara optimal. Potensi sektor pariwisata Kabupaten Klaten yang cukup beragam juga belum sepenuhnya berkembang secara maksimal, baik dari sisi pengelolaan destinasi, penguatan daya tarik wisata, maupun pengembangan pola perjalanan wisata (*travel pattern*), sehingga kontribusinya terhadap perekonomian daerah masih perlu ditingkatkan melalui pengembangan pariwisata yang berdaya saing dan inklusif.

5. Tantangan dalam ketahanan pangan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Hal ini terlihat dari capaian **skor Pola Pangan Harapan (PPH)** yang belum optimal, yang menunjukkan masih perlunya peningkatan kualitas dan keberagaman konsumsi pangan masyarakat. Di sisi lain, pengelolaan lingkungan hidup masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain dalam pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. Selain itu, kesiapsiagaan dan kapasitas penanggulangan bencana juga masih perlu diperkuat mengingat potensi kerawanan bencana di wilayah daerah, sehingga diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dalam penguatan ketahanan pangan, perlindungan lingkungan, dan pengurangan risiko bencana.

6. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan, Transformasi Digital, Serta Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik belum sepenuhnya terintegrasi, termasuk dalam pengelolaan data pembangunan, statistik sektoral, sistem informasi pelayanan publik, serta penguatan keamanan siber. Di sisi lain, pembangunan desa masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kemandirian desa yang tercermin dari capaian Indeks Desa Membangun (IDM) dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum optimal. Selain itu, pemberdayaan masyarakat, partisipasi pemuda, serta pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan masih perlu diperkuat guna mendorong partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata.



1.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Identifikasi permasalahan disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, analisis kondisi eksisting, serta capaian indikator kinerja dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan yang teridentifikasi menggambarkan kesenjangan antara kondisi aktual dengan target yang telah ditetapkan, serta mempertimbangkan keterbatasan sumber daya, aspek kewilayahan, dan dinamika kebijakan. Hasil identifikasi ini menjadi dasar dalam penajaman isu strategis daerah, perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam RKPD.

1.3.2.1. Permasalahan Pembangunan Pada Aspek Pelayanan Umum Wajib Dasar

a. Pendidikan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pendidikan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi PAUD Belum Konsisten dan Merata

Meskipun APS usia 5–6 tahun berada pada kategori tinggi, capaian tersebut masih berfluktuasi dari tahun ke tahun dan belum sepenuhnya stabil. Permasalahan partisipasi PAUD yang belum merata dan konsisten tidak hanya disebabkan oleh faktor ketersediaan layanan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor permintaan, yaitu tingkat kesadaran masyarakat, kondisi ekonomi keluarga, serta persepsi terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini. Di sisi lain, faktor penyedia layanan berupa mutu lembaga, kompetensi pendidik, sarana prasarana, dan pemerataan layanan juga sangat menentukan keberlanjutan partisipasi anak pada satuan PAUD.

Oleh karena itu, peningkatan partisipasi PAUD memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui penguatan akses layanan, peningkatan mutu penyelenggaraan PAUD, penguatan kapasitas pendidik, sosialisasi kepada masyarakat, optimalisasi PAUD Holistik Integratif, penguatan pendidikan inklusif, serta penyempurnaan sistem pendataan dan monitoring. Seluruh upaya tersebut dapat diimplementasikan melalui berbagai subkegiatan yang menjadi kewenangan Dinas Pendidikan sehingga diharapkan mampu meningkatkan partisipasi PAUD secara lebih merata, konsisten, inklusif, dan berkelanjutan.

2. Capaian Literasi SD Masih Relatif Rendah

Capaian literasi jenjang SD meskipun menunjukkan tren peningkatan, masih berada di bawah jenjang SMP dan belum mencapai tingkat optimal. Belum optimalnya capaian literasi jenjang SD dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kualitas pembelajaran, kompetensi guru, ketersediaan bahan bacaan, budaya literasi sekolah, dan



pemanfaatan perpustakaan. Sementara itu, faktor eksternal meliputi dukungan keluarga, lingkungan belajar di rumah, kesenjangan sosial ekonomi, serta pemerataan akses terhadap sumber belajar.

Selain itu, hasil Asesmen Nasional dan Rapor Pendidikan belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan program peningkatan literasi yang berbasis data, akibatnya, intervensi yang dilakukan belum selalu tepat sasaran terhadap sekolah yang memiliki capaian literasi rendah.

3. Kemampuan Numerasi SD Masih Lemah sebagai Fondasi

Numerasi pada jenjang SD menunjukkan capaian yang relatif lebih rendah dibandingkan literasi maupun numerasi SMP. Rendahnya capaian numerasi pada jenjang SD menunjukkan bahwa penguatan pembelajaran matematika perlu dilakukan secara sistematis sejak kelas awal. Peningkatan kompetensi guru, penyediaan media pembelajaran, pengembangan budaya numerasi sekolah, pemanfaatan hasil Rapor Pendidikan, serta pendampingan sekolah berdasarkan capaian numerasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan peserta didik dalam memahami konsep matematika, bernalar, serta menerapkan pengetahuan matematika untuk menyelesaikan masalah kontekstual masih perlu ditingkatkan. Rendahnya capaian numerasi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek pembelajaran, kompetensi pendidik, sarana prasarana, budaya belajar, maupun tata kelola pendidikan.

4. Kesenjangan Capaian antara SD dan SMP

Baik pada indikator literasi maupun numerasi, terdapat kesenjangan capaian yang cukup jelas antara SD dan SMP. Meskipun capaian pembelajaran pada jenjang SMP menunjukkan hasil yang relatif lebih baik dibandingkan jenjang SD, masih terdapat kesenjangan yang cukup signifikan, terutama pada aspek literasi dan numerasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kompetensi dasar yang seharusnya dikuasai peserta didik sejak pendidikan dasar belum terbentuk secara optimal sebelum memasuki jenjang SMP. Kesenjangan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan peserta didik, tetapi juga berkaitan dengan kualitas pembelajaran, kompetensi pendidik, kesinambungan kurikulum, pemerataan mutu antar satuan pendidikan, serta efektivitas pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan.

Secara umum, permasalahan utama urusan pendidikan di Kabupaten Klaten bukan terletak pada akses semata, melainkan pada kualitas dan konsistensi layanan pendidikan, khususnya pada jenjang PAUD dan SD. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang berfokus pada peningkatan



mutu pembelajaran dasar, pemerataan layanan PAUD, peningkatan kompetensi pendidik, serta penguatan sistem data pendidikan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Faktor Penentu Keberhasilan untuk memperbaiki layanan pendidikan dasar, di antaranya sebagai berikut :

1. Kebijakan dan regulasi nasional yang konsisten dan berkelanjutan
Keberhasilan perbaikan pelayanan pendidikan sangat ditentukan oleh arah kebijakan nasional yang jelas, konsisten, dan berkelanjutan, termasuk standar nasional pendidikan, kebijakan kurikulum, serta kebijakan afirmasi bagi daerah dan kelompok sasaran tertentu.
2. Dukungan pendanaan dari pemerintah pusat
Kecukupan dan keberlanjutan pendanaan pendidikan melalui APBN, seperti Dana Transfer ke Daerah (DAU, DAK, BOSP/BOS), menjadi faktor kunci dalam menjamin pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan di seluruh daerah.
3. Standar, sistem, dan instrumen nasional pendidikan
Keberhasilan ditentukan oleh ketersediaan standar dan sistem nasional, seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rapor Pendidikan, Dapodik, serta sistem asesmen nasional, yang menjadi acuan daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan pendidikan.
4. Pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidikan secara nasional
Program nasional peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, termasuk sertifikasi, pelatihan, dan pengembangan profesional berkelanjutan, menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara merata.
5. Koordinasi dan sinergi kebijakan pusat–daerah
6. Keberhasilan perbaikan pelayanan pendidikan sangat dipengaruhi oleh keselarasan kebijakan dan program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga implementasi kebijakan nasional dapat berjalan efektif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.



b. Kesehatan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kesehatan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Adanya ibu hamil dengan resiko tinggi sebanyak 29,97 % dari jumlah ibu hamil
2. kurangnya pemberdayaan ibu hamil dan keluarga dalam pemanfaatan Buku KIA
3. Pelayanan ANC terpadu yang kurang optimal
4. Kasus kehamilan yang ditemukan > 12 minggu karena hamil tidak diinginkan, malu karena kehamilannya, dll
5. Ibu hamil yang bekerja dan sulit mendapatkan ijin untuk pemeriksaan ANC terpadu
6. Belum optimalnya pemantauan Kunjungan Nifas
7. Ketersediaan inkubator dan fasilitas NICU (*Neonatal Intensive Care Unit*) sering kali penuh
8. Kasus remaja anemia dan KEK, ibu hamil anemia dan KEK yang menyebabkan bayi lahir dengan Berat Badan Bayi Lahor Rendah (BBLR)
9. Alat antropometri di Posyandu yang rusak / belum di kalibrasi
10. Pola Asuh orang tua pada balita
11. Belum semua balita stunting mendapatkan PMT sesuai standard
12. Masih rendahnya capaian Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)
13. Belum optimalnya penemuan kasus TBC secara aktif, sosialisasi ke masyarakat dan upaya bersama lintas sektor.
14. Belum optimalnya surveilans migrasi malaria.
15. Kurang optimalnya verifikasi data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI Pusat) serta masih kurangnya kesadaran masyarakat dan kepatuhan pemberi kerja untuk melakukan iuran jaminan kesehatan secara rutin.

Faktor Penentu Keberhasilan untuk memperbaiki layanan kesehatan dasar, di antaranya sebagai berikut :

1. Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana serta Perbekalan Kesehatan
3. Koordinasi lintas sektor untuk mendukung pelayanan kesehatan
4. Menumbuhkan Kesadaran masyarakat untuk mewujudkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Masih banyaknya infrastruktur yang rusak dan perlu di rehabilitasi/ ditingkatkan;



2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara infrastruktur yang sudah terbangun;
3. Belum / tidak ada dokumen rencana induk (masterplan) sebagai acuan/ guideline untuk arah pembangunan dan pengembangan untuk berbagai sektor (air limbah, persampahan, drainase);
4. Masih adanya tumpang tindih kewenangan terkait perizinan tata ruang dan dinamika kebijakan terkait OSS yang sering berubah-ubah;
5. Masih adanya ketidaksesuaian pemanfaatan ruang; dan
6. Adanya kendaraan bermuatan berlebih yang mempercepat tingkat kerusakan jalan.

Faktor Penentu Keberhasilan untuk memperbaiki urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dasar, di antaranya sebagai berikut :

1. Ketepatan penentuan prioritas penangaann infrastruktur dasar sesuai kemampuan keuangan daerah;
2. Meningkatnya keseadaran masyarakat untuk menjaga & memelihara infrastruktur terbangun;
3. Aktifkan Komisi Irigasi sebagai wadah komunikasi dari unsur masyarakat sampai instasi pemerintah dan stakeholder terkait;
4. Penyusunan masterplan dan dokumen rencana induk sektoral bidang pekerjaan umum;
5. Pemenuhan kebutuhan personil (tenaga ahli/ pengelola teknis dan tenaga trampil/ pelaksana teknis) khususnya dibidang Cipta Karya;
6. Meningkatkan koordinasi dan peran Forum Penataan Ruang dalam proses perijinan usaha;
7. Meningkatkan pengawasan, penegakan hukum dan sanksi tata ruang; dan
8. Meningkatkan pengawasan, penegakan hukum dan sanksi terhadap kendaraan kelebihan muatan (*over dimension, over load* : ODOL).

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya warga masyarkat yang belum mempunyai rumah tinggal yang layak huni;
2. Masih adanya kawasan permukiman kumuh ;
3. Masih adanya prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang belum diserahkan dari pengembang perumahan kepada pemerintah daerah, sehingga tidak bisa dilakukan pemeliharaan dan perbaikan; dan
4. Masih adanya ketidakpastian data perumahan yang tidak melalui pengesahan *site plan* dan ber-*site plan*, serta masih kurangnya kemudahan pembiayaan kepemilikan perumahan.



Faktor Penentu Keberhasilan untuk memperbaiki layanan terkait perumahan dan permukiman, di antaranya sebagai berikut :

1. Komitmen dan dukungan kebijakan pimpinan daerah dalam penanganan kawasan permukiman dan pengurangan kumuh secara berkelanjutan;
2. Penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas OPD, termasuk sinkronisasi program dan kegiatan intervensi;
3. Ketersediaan dan pemanfaatan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan dan evaluasi;
4. Adanya regulasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas fungsi pokok kegiatan Bidang Perumahan; dan
5. Dukungan dan koordinasi antar OPD termasuk OPD vertikal, Pengembang, Asosiasi, Penyedia Jasa Konsultan/Konstruksi, pihak perbankan, pihak penyedia CSR, pihak Akademisi/Pakar.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan kapasitas dan kompetensi SDM Satpol PP dan Damkar dengan rasio jumlah petugas di tahun 2025 sebesar 0,3 per 10.000 penduduk dengan jumlah penduduk sebanyak 1.303.696 jiwa berdampak pada efektivitas penegakan Perda, pelayanan ketenteraman, dan perlindungan masyarakat;
2. Belum optimalnya koordinasi dan sinergi penanganan trantibum lintas sektor;
3. Rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada serta resistensi saat penertiban khususnya untuk penertiban reklame dan pedagang kaki lima;
4. Sinergi dan koordinasi lintas sektor dengan OPD terkait, instansi vertikal, dan lembaga lainnya belum optimal;
5. Masih tingginya waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran, yaitu di angka 14,12 menit dengan luas wilayah yang harus dijangkau 701,52 km².
6. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, terutama armada dan peralatan pemadam kebakaran;
7. Belum semua desa rawan bencana memiliki dokumen ketangguhan bencana.
8. Kurangnya SDM untuk melakukan pendataan warga Negara di wilayah rawan bencana *by name by NIK* untuk memenuhi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;



9. Masih rendahnya kapasitas SDM penanganan bencana di Kabupaten Klaten;
10. Kerja sama penanganan kebencanaan di wilayah perbatasan belum sepenuhnya terbangun.

Faktor Penentu Keberhasilan untuk meningkatkan layanan ketenteraman ketertiban, di antaranya sebagai berikut :

1. Ketersediaan SDM yang memadai dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pelayanan trantibumlinmas;
2. Dukungan Perda dan Perkada yang kuat sebagai dasar hukum pelaksanaan kewenangan penegakan ketertiban dan perlindungan masyarakat;
3. Peningkatan sosialisasi, edukasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat terkait dengan penegakan Perda dan Perkada;
4. Penguatan kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Penambahan posko DAMKAR minimal pada eks-kawedanan di wilayah Kabupaten Klaten agar dapat menjangkau wilayah yang lebih luas dengan *response time* yang lebih cepat serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat agar memiliki ketangguhan dalam menghadapi kebakaran.
6. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan berfungsi optimal;
7. Melakukan pendampingan kepada desa tangguh bencana dalam memenuhi dokumen ketangguhan bencana serta optimalisasi kinerja Satuan Tugas Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana)
8. Melakukan pendataan warga negara kawasan rawan bencana *by name by NIK* bekerjasama dengan kecamatan dan Pemerintah Desa setempat.
9. Meningkatkan kapasitas personil penanganan bencana melalui kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas personil lainnya
10. Meningkatkan kerjasama terkait penanganan bencana di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Klaten.

f. Sosial

Permasalahan yang dihadapi pada urusan sosial di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Belum tersedianya sistem pelaporan sosial terintegrasi (memuat data base penerima layanan, pelayanan social yang diberikan dan sebagainya), sehingga sistem pelaporan masih manual.
2. Belum tersedianya data terupdate khususnya data tentang disabilitas dan lansia
3. Makin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan social, namun keterbatasan sumberdaya



4. Makin tingginya kebutuhan pelayanan di rumah singgah, namun sarana prasarana serta sdm belum memadai

Faktor Penentu Keberhasilan untuk meningkatkan layanan sosial, di antaranya sebagai berikut :

1. Ketaatan terhadap SOP pelayanan sosial
2. SDM/Pemberi layanan sosial yang mempunyai kapasitas yang baik
3. Dukungan Sarana Prasarana yang memadai, inklusif dan ramah disabilitas
4. Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang valid dan terupdate
5. Pemberian intervensi layanan yang tepat sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh PPKS
6. Dukungan regulasi yang memadai dalam memberikan pelayanan sosial

1.3.2.2. Permasalahan Pembangunan Pada Aspek Pelayanan Umum Wajib Non Dasar

a. Tenaga Kerja

Permasalahan yang dihadapi pada urusan tenaga kerja di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka), pada tahun 2025 sebesar 3,88%;
2. Belum optimalnya cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, pada tahun 2025 sebesar 39,44%.

Faktor Penentu Keberhasilan untuk meningkatkan layanan tenaga kerja, di antaranya sebagai berikut :

1. Membuka peluang kerja seluas-luasnya untuk menampung tenaga kerja bagi pencari pekerjaan dan Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dan mengoptimalkan pembinaan terhadap kelompok–kelompok pengangguran untuk membuka kesempatan kerja mandiri melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif ;
2. Mengoptimalkan organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak–hak pekerja;
3. Mengembangkan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan dengan melaksanakan koordinasi dan sosialisasi tentang Undang-undang jaminan sosial.
4. Mengoptimalkan pelatihan kerja bagi para angkatan kerja guna meningkatkan kompetensi dan keterampilan untuk mampu bersaing di pasar kerja;
5. Merintis database ketenagakerjaan secara online.



b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kapasitas dan sinergi kelembagaan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), belum meratanya pemahaman perangkat daerah mengenai perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, serta masih terbatasnya akses dan kemampuan perempuan dalam mengembangkan usaha dan memanfaatkan sumber daya ekonomi. Besaran anggaran responsive gender Tahun 2025 baru tercapai 1,34%.
2. Belum optimalnya kapasitas lembaga layanan keluarga dalam memberikan layanan konsultasi, edukasi, dan pendampingan kepada masyarakat dan belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga. Persentase kecamatan yang mempunyai puspa aktif tahun 2025 dengan capaian 34,62%.
3. Ketersediaan dan pemanfaatan data gender dan anak pada perangkat daerah masih perlu diperkuat sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender dan berpihak pada pemenuhan hak anak. Selain itu, penyebarluasan informasi melalui media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) PUG dan PUHA masih perlu dioptimalkan. Persentase keterisian data pilah gender dan anak kabupaten pada aplikasi sistem informasi gender dan anak (SIGA) Tahun 2025 sebesar 88%.
4. Masih tingginya angka kekerasan baik perempuan maupun anak. Jumlah Kasus kekerasan perempuan tahun 2025 sebanyak 32 kasus dan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum sejumlah 29 kasus.
5. Belum semua sekolah baik jenjang SD, SMP, maupun SMA yang Ramah Anak. Sampai saat ini terdapat 729 sekolah ramah anak dari 834 keseluruhan sekolah yaitu sebesar 87,41% dari jenjang SD, SMP, maupun SMA.
6. Belum adanya SDM di UPTD PPA yang sudah terbentuk, sehingga layanan pada masyarakat khususnya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak belum optimal. Pada UPTD PPA baru terdapat Pelaksana Tugas Kepala UPTD PPA.
7. Belum tersedianya rumah perlindungan, sehingga korban yang memerlukan rumah perlindungan belum bisa terlayani.

Faktor Penentu Keberhasilan untuk meningkatkan layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagai berikut :



1. Peningkatan kapasitas SDM tenaga fasilitator dan pendamping yang memiliki keterampilan fasilitasi yang paham akan gender serta paham akan pemenuhan hak anak
2. Melibatkan peran aktif masyarakat mulai dari tingkat desa dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pemberdayaan ekonomi perempuan di tingkat lokal
3. Pengelolaan anggaran yang optimal untuk peningkatan kapasitas layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4. Sinergitas dan kolaborasi lintas sektor dalam penguatan kapasitas layanan di daerah, integrasi data serta implementasi kebijakan perlindungan hukum

c. Pangan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pangan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang masih di atas rata-rata nasional sehingga menunjukkan sebagian penduduk masih kurang mendapatkan kebutuhan energi dari makanan
2. Tantangan dalam memenuhi cadangan pangan daerah sebagai bagian dari menjaga ketersediaan pangan secara berkelanjutan. Meskipun produksi padi tahun 2025 meningkat, pemerintah daerah tetap perlu menjaga kesinambungan produksi yang mampu menjamin ketersediaan pangan pada kondisi normal maupun saat terjadi bencana, gagal panen, atau gejolak harga.

Faktor Penentu Keberhasilan untuk meningkatkan urusan pangan, di antaranya sebagai berikut :

1. Sinergi lintas sektor (pemerintah, swasta, masyarakat, dan akademis) dalam pembangunan sistem pangan yang berkelanjutan dan terjaganya sistem produksi agar ketersediaan pangan.
2. Penganekaragaman konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman agar sumber daya lokal dapat terserap ke pasar dan konsumen dimulai dengan membiasakan dari individu atau rumah tangga.

d. Pertanahan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanahan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya tanah aset milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat;
2. Masih adanya sengketa terkait pertanahan; dan
3. Alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW).



Faktor Penentu Keberhasilan untuk meningkatkan urusan pertanahan, di antaranya sebagai berikut :

1. Kerjasama dan kolaborasi yang baik antar pihak untuk percepatan penerbitan tanah asset milik pemerintah daerah ; dan
2. Ketersedian data spasial bidang dan kepemilikan tanah yang lengkap dan akurat.

e. Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi pada urusan lingkungan hidup di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Pengurangan sampah di hulu (pada sumbernya) serta pengolahan sampah di hilir (TPA);
2. Masih Kurangnya sosialisasi kegiatan Program kampung iklim di masyarakat;
3. Masih minimnya SDM dan sarana prasarana dalam pengendalian pencemaran, laboratorium lingkungan serta pengawas lingkungan hidup;
4. Kurangnya koordinasi lintas OPD dalam pengendalian pengelolaan lingkungan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup; dan
5. Masih kurangnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Faktor Penentu Keberhasilan untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup, di antaranya sebagai berikut :

1. Penggunaan metode dan peralatan pengolahan sampah dan limbah TPA yang tepat.
2. Meningkatkan gerakan pemilahan sampah melalui Bank sampah dan pengolahan kompos skala rumah tangga, meningkatkan peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah mandiri, membentuk Satgas Sampah Kabupaten Klaten;
3. Melakukan sosialisasi kegiatan Proklamasi secara periodik dan kontinyu kepada masyarakat serta penggunaan media penyampaian informasi yang lebih beragam agar lebih mempercepat penyadartahuan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
4. Penambahan SDM dan peningkatan kapasitas SDM beserta sarana prasarana pengendalian pencemaran, laboratorium lingkungan serta pengawas lingkungan; dan
5. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi lintas OPD dan stakeholder terkait lainnya dalam pencegahan, pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup.



f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan dokumen resmi kependudukan serta kewajiban melakukan pemutakhiran dokumen administrasi kependudukan apabila terjadi perubahan elemen data. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan pada tahun 2025, sebagai berikut:
 - a. **Cakupan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih rendah.** Pada tahun 2025, cakupan aktivasi IKD baru mencapai 7,02 %, masih jauh di bawah target nasional sebesar 30 %;
 - b. **Cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) belum optimal.** Cakupan kepemilikan KIA bagi anak usia 0–17 tahun kurang satu hari pada tahun 2025 baru mencapai 78,51 %;
 - c. **Cakupan perekaman KTP Elektronik (KTP-el) belum sepenuhnya mencapai 100%.** Pada tahun 2025, cakupan perekaman KTP-el tercatat sebesar 99,34 %;
 - d. **Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0–18 tahun masih perlu ditingkatkan.** Pada tahun 2024, cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0–18 tahun mencapai 99,36 %;
 - e. **Cakupan kepemilikan Kartu Keluarga (KK) belum sepenuhnya merata.** Pada tahun 2025, cakupan kepemilikan KK mencapai 99,84 % sehingga masih diperlukan upaya penjangkauan terhadap sisa penduduk yang belum memiliki dokumen tersebut.
2. Pemanfaatan layanan administrasi kependudukan secara daring melalui aplikasi Sakura belum optimal. Pada tahun 2025, pengajuan layanan online Sakura didominasi oleh operator desa sebesar 78,82 %, pengajuan melalui Pandusakti (rumah sakit) sebesar 5,13 % sedangkan pengajuan mandiri masyarakat baru mencapai 16,05%.
3. Belum optimalnya pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh masyarakat dan instansi layanan publik. Belum seluruh instansi pelayanan publik dapat menerima dan memanfaatkan IKD sebagai identitas resmi;
4. Belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan oleh perangkat daerah. Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama pada tahun 2025 baru mencapai 80,8 %.



Faktor Penentu Keberhasilan untuk meningkatkan layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, di antaranya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya dokumen administrasi kependudukan, tata cara pengurusan adminduk yang benar, pengurusan secara tepat waktu, serta pencegahan praktik percaloan;
2. Peningkatan kemudahan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil melalui penyederhanaan prosedur pelayanan yang mudah dipahami masyarakat serta didukung dengan informasi pelayanan yang dipublikasikan secara luas;
3. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, khususnya melalui pengembangan dan optimalisasi layanan online Sakura, guna mendekatkan dan mempermudah akses pelayanan kepada masyarakat;
4. Penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas instansi terkait melalui perjanjian kerja sama dan pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung pelayanan publik yang terintegrasi.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Persentase desa mandiri belum mencapai target, berdasarkan hasil analisis data tahun 2025 baru mencapai 19,43% atau sebanyak 76 desa, sehingga masih diperlukan upaya percepatan peningkatan status desa mandiri;
2. Belum optimalnya pemahaman tugas, fungsi, dan dasar hukum pelaksanaan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
3. Belum optimalnya Pemerintah Desa dalam inventarisasi Aset Desa serta pengelolaan aset desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Masih rendahnya peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa;
5. Belum optimalnya sinergi antarprogram pemberdayaan, sehingga berbagai program yang ada belum terintegrasi secara efektif dalam satu kerangka pemberdayaan yang terpadu.

Faktor Penentu Keberhasilan untuk meningkatkan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, di antaranya sebagai berikut :

1. Penguatan dan pengembangan ekonomi desa, antara lain melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan pasar



desa, serta terciptanya kondisi desa yang kondusif, aman, dan stabil tanpa bencana alam maupun konflik sosial;

2. Pelaksanaan bimbingan teknis bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) guna meningkatkan pemahaman terkait tugas, fungsi, serta dasar hukum pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
3. Fasilitasi dan pembinaan kepada Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan inventarisasi aset desa agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta lebih optimal dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa).
4. Optimalisasi peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) melalui kegiatan Sambung Rasa Bupati sebagai forum komunikasi dan koordinasi yang mempertemukan seluruh unsur kelembagaan desa dengan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
5. Peningkatan koordinasi multisektor dalam berbagai forum/wadah seperti Forum TPPS, Forum TPPK, Forum Kab/Kota Sehat, dll.

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Belum semua ibu hamil /bersalin melaksanakan menggunakan KB Pasca Persalinan (program KB yang digunakan setelah melahirkan hingga 42 hari) untuk menjarakkan kehamilan untuk kesehatan ibu dan bayi.
2. Adanya PUS yang masih belum ikut program KB karena beberapa alasan misalnya karena suami jauh/LDR.
3. Pembangunan belum sepenuhnya berorientasi pada penduduk, karena hasilnya tidak bisa langsung berdampak/dilihat seperti pembangunan fisik

Faktor Penentu Keberhasilan untuk meningkatkan layanan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, di antaranya sebagai berikut :

1. Jumlah dan kompetensi penyuluh KB/PKB dan tenaga kesehatan yang memadai.
2. Akses dan kualitas layanan KB mudah terjangkau hingga tingkat desa/kelurahan serta ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang beragam dan berkelanjutan.
3. Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Klaten terkoordinir dengan baik.
4. Efektivitas pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)



i. Perhubungan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perhubungan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Minat angkutan umum rendah dan load factor turun dikarenakan masyarakat beralih ke kendaraan pribadi dan ojek online sehingga operator merugi;
2. Pelayanan transportasi belum ramah kelompok rentan, serta masih minim fasilitas untuk disabilitas, lansia, dan ibu hamil;
3. Kemacetan di pusat kota dan pusat-pusat keramaian karena pertumbuhan kendaraan pribadi yang tinggi, pengaturan lokasi parkir yang belum maksimal serta kapasitas jalan terbatas;
4. Meningkatnya resiko keselamatan angkutan (kelaikan), armada tua, kurang perawatan, dan pelanggaran operasional.
5. Pelanggaran angkutan barang (ODOL & Gol C), truk galian C melanggar jam operasional & merusak jalan; dan
6. Masih kurangnya sarana prasarana keselamatan jalan.

Faktor Penentu Keberhasilan untuk meningkatkan layanan perhubungan, di antaranya sebagai berikut :

1. Penyiapan regulasi dan prasarana Layanan Khusus bagi kelompok rentan: difabel, lansia, anak dan ibu hamil ;
2. Rerouting Berbasis Data : Penataan ulang trayek sesuai kebutuhan terkini, Integrasi Moda : Menjadikan angkot sebagai feeder KRL / Trans Jateng, Digitalisasi Rute : Informasi rute tersedia di aplikasi/maps;
3. Perbaikan Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) dan pemenuhan sarana dan prasaran keselamatan jalan secara bertahap;
4. Inspeksi dan pengujian kendaraan angkutan umum secara tertib, penerapan manajemen keselamatan angkutan jalan;
5. Pengetatan pengawasan serta penerapan sanksi bagi kendaraan angkutan barang yang melanggar jam operasi serta jalur yang sudah ditentukan; dan
6. Penataan dan penertiban parkir kendaraan serta penerapan aturan penyediaan lahan parkir bagi permohonan ijin usaha yang didirikan.

j. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang dihadapi pada urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Minimnya SDM ASN yang kompeten di bidang komunikasi dan informatika;
2. Website Perangkat Daerah maupun kecamatan yang belum optimal dalam penyajian dan pembaruan informasi publik; dan



3. Masih minimnya literasi digital, khususnya terkait kualitas konten secara internal serta penerapan etika digital bagi masyarakat.

Faktor Penentu Keberhasilan untuk meningkatkan layanan komunikasi dan informatika, di antaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan pengetahuan teknologi informasi bagi seluruh ASN dan juga menambahkan SDM dengan keahlian bidang IT;
2. Peningkatan keterbukaan informasi sebagai upaya untuk mengukur dan menilai tingkat ketersediaan informasi yang disampaikan oleh pejabat publik melalui PPID; dan
3. Peningkatan intensitas kegiatan berbagi pengetahuan dan diskusi internal dengan materi yang mutakhir dan relevan dan Mengoptimalkan pelaksanaan kampanye informasi melalui berbagai kanal publikasi resmi milik pemerintah.

k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan yang dihadapi pada urusan k. Koperasi, Usaha Kecil & Menengah di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia pengurus koperasi yang kompeten.
2. Masih rendahnya kemampuan usaha mikro dalam manajemen usaha
3. Masih rendahnya kualitas produk usaha mikro
4. Masih terbatasnya akses pasar usaha mikro dan masih rendahnya kemampuan dalam memanfaatkan digital marketing

Faktor Penentu Keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan k. Koperasi, Usaha Kecil & Menengah, di antaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas SDM: Pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan teknis pengelola koperasi.
2. Memperkuat kelembagaan Usaha Mikro dengan melalui pelatihan-pelatihan, akses pembiayaan, fasilitasi perizinan dan standarisasi usaha, serta pendampingan usaha yang berkelanjutan.
3. Memperkuat pemasaran dan akses pasar khususnya produk unggulan daerah.
4. Memperkuat ekosistem kewirausahaan dan kemitraan usaha

l. Penanaman Modal

Permasalahan yang dihadapi pada urusan penanaman modal di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Keberadaan Kawasan Peruntukan industri yang menyebar dengan kondisi akses infrastruktur yang beragam menyebabkan kurangnya minat investor.
2. Harga tanah di Kabupaten yang relatif tinggi seringkali menjadi alasan investor mencari lokasi lain



3. Belum optimalnya informasi terkait ketersediaan lahan peruntukkan industri bagi calon investor yang berminat berinvestasi di Kabupaten Klaten.

Faktor Penentu Keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan penanaman modal, di antaranya sebagai berikut :

1. Adanya jalan tol Solo – Jogjakarta dengan tiga *exit* tol, dan dua diantaranya (*exit* tol Prambanan/Jogonalan dan *exit* tol Ceper) yang langsung terhubung dengan kawasan peruntukan industri memudahkan akses dari dan ke kawasan industri.
2. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 2 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi .
3. Promosi yang masif terkait potensi dan kemudahan investasi di Kabupaten Klaten

m. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kompetisi olahraga yang rutin dan terstruktur sebagai sarana pembinaan dan peningkatan prestasi atlet.
2. Belum tersusunnya Desain Olahraga Daerah (DOD) dan belum adanya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Daerah (PPLOPD), sehingga pembinaan atlet usia dini belum merata dan berkelanjutan.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga yang mendukung pembinaan prestasi dan olahraga masyarakat.
4. Budaya olahraga masyarakat masih rendah, ditandai dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga.
5. Terbatasnya wadah pengembangan kapasitas, kreativitas, dan kewirausahaan pemuda.
6. Kurangnya kesadaran berorganisasi dan kepemimpinan di kalangan pemuda.
7. Terbatasnya alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan kepemudaan.

Faktor Penentu Keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan kepemudaan dan olahraga, di antaranya sebagai berikut :

1. Mendorong cabang olahraga untuk menyelenggarakan kompetisi secara mandiri dan berkelanjutan, antara lain melalui fasilitasi pelaksanaan Kejuaraan Renang Piala Bupati oleh PRSI dan Kejuaraan Bulu Tangkis Piala Bupati oleh PBSI sebagai ajang pembinaan atlet.
2. Mengusulkan penyusunan Desain Olahraga Daerah (DOD) dan pembentukan PPLOPD melalui pembentukan tim lintas sektor, pemetaan



potensi dan cabang olahraga unggulan daerah, serta penyusunan dan penetapan regulasi sebagai dasar pembinaan atlet usia dini yang terintegrasi dan berkelanjutan.

3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga melalui peningkatan alokasi anggaran secara bertahap, optimalisasi pemeliharaan dan perawatan sarpras yang telah tersedia, serta penguatan koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak terkait.
4. Melaksanakan penguatan program pemasaran dan pembudayaan olahraga masyarakat secara berkelanjutan melalui peningkatan frekuensi kegiatan olahraga massal, kolaborasi dengan KORMI, KONI, dan NPCI, serta pelibatan komunitas olahraga untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat lintas usia dan kelompok.
5. Menyediakan dan memperkuat fasilitas serta sarana prasarana pendukung kegiatan kepemudaan, termasuk pengembangan *Creative Hub* pada Tahun 2026 sebagai ruang ekspresi, inovasi, kewirausahaan, dan kolaborasi pemuda, serta pemanfaatannya secara terprogram dan berkelanjutan.
6. Memperkuat kolaborasi dengan OKP dan KNPI dalam edukasi dan pembinaan sejak dini terkait pentingnya organisasi dan kepemimpinan, penumbuhan minat pemuda terhadap kegiatan sosial dan organisasi, serta penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.
7. Mengusulkan penambahan alokasi anggaran untuk mendukung program dan kegiatan kepemudaan, termasuk fasilitasi seleksi Jambore Pemuda dan Pemuda Pelopor tingkat Kabupaten.

n. Statistik

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Statistik di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas dan kelengkapan metadata serta Safety Data Sheet perangkat daerah;
2. Lambatnya pengumpulan data sehingga menghambat Analisa & pengambilan keputusan; dan
3. Belum meratanya pemahaman OPD terkait SDI, EPSS, metadata, dan mekanisme e-Walidata.

Faktor Penentu Keberhasilan untuk mengatasi permasalahan Statistik, di antaranya sebagai berikut :

1. Pendampingan terjadwal oleh Pembina data (Kominfo & BPS);
2. Penyusunan timeline baku pengumpulan data dan Monitoring melalui grup koordinasi Satu Data; dan
3. Pelaksanaan Bimtek SDI, EPSS, dan e-Walidata.



o. Persandian

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Persandian di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran perangkat daerah terhadap keamanan informasi;
2. Keterbatasan SDM yang menguasai keamanan siber tingkat lanjut;
3. Masih ditemukan kerawanan pada beberapa aplikasi daerah; dan
4. Belum optimalnya peninjauan risk register secara berkala dan belum sepenuhnya selaras dengan kebijakan manajemen risiko yang berlaku.

Faktor Penentu Keberhasilan untuk mengatasi permasalahan Persandian, di antaranya sebagai berikut :

1. Sosialisasi keamanan siber dan monitoring evaluasi teknis rutin;
2. Koordinasi dengan BSSN dan peningkatan kompetensi internal;
3. Melakukan ITSA secara berkala dan memperkuat mekanisme pelaporan PAKSI D'WATA; dan
4. Melakukan pembaruan *risk register* secara periodik dengan mengidentifikasi seluruh aset informasi (data, software, hardware, sarana pendukung, SDM internal/pihak ketiga), melakukan analisis risiko, mitigasi, serta monitoring dan evaluasi rutin.

p. Kebudayaan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kebudayaan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya regulasi yang spesifik terkait kebudayaan;
2. Kurangnya penelitian terkait kebudayaan;
3. Belum optimalnya pembinaan sejarah lokal sebagai bagian dari upaya pelestarian identitas daerah dan penguatan karakter masyarakat Kabupaten Klaten.
4. Belum optimalnya pengelolaan Museum Daerah sebagai pusat edukasi, pelestarian sejarah, dan pengembangan kebudayaan di Kabupaten Klaten.
5. Belum optimalnya pelestarian Cagar Budaya yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya di Kabupaten Klaten.
6. Belum optimalnya pendataan kebudayaan yang mencakup Objek Pemajuan Kebudayaan, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, serta Sarana dan Prasarana Kebudayaan yang terdapat di Kabupaten Klaten.
7. Masih minimnya pelaku seni budaya yang memahami pentingnya sertifikasi profesi sebagai upaya peningkatan kompetensi dan pengakuan profesional pelaku seni.



Faktor Penentu Keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan kebudayaan, di antaranya sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembinaan dan penyebarluasan sejarah lokal melalui pelaksanaan Program Pembinaan Sejarah dengan dukungan anggaran untuk kegiatan penyebarluasan informasi sejarah lokal melalui lomba cerita pendek dan penayangan film sejarah menggunakan Bioskop Keliling.
2. Mengusulkan penambahan dua orang Sumber Daya Manusia Pamong Budaya yang kompeten di bidang kebudayaan guna memperkuat pelaksanaan pembinaan sejarah, pelestarian budaya, dan pengelolaan museum daerah.
3. Meningkatkan pengelolaan Museum Daerah melalui peningkatan kapasitas dan kualitas SDM museum dengan penyelenggaraan workshop dan pelatihan, pengembangan fungsi edukasi museum, serta pemanfaatan teknologi digital melalui website dan media sosial.
4. Menyelenggarakan program dan kegiatan museum serta promosi kebudayaan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, serta mendorong dukungan kebijakan dan pendanaan dari Pemerintah Daerah agar museum dapat berfungsi secara optimal sebagai pusat edukasi, pelestarian sejarah, dan pengembangan kebudayaan.
5. Meningkatkan upaya pelestarian Cagar Budaya melalui penambahan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai definisi dan kewajiban pelestarian Cagar Budaya, peningkatan jumlah penetapan Cagar Budaya, penyebaran informasi Cagar Budaya secara berkelanjutan, serta pengusulan penambahan anggaran untuk pemeliharaan Cagar Budaya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
6. Mengoptimalkan pendataan kebudayaan melalui koordinasi menyeluruh dengan pelaku seni budaya serta sinergi dengan kecamatan dan desa/kelurahan dalam pendataan SDM kebudayaan, kesenian, adat tradisi, serta sarana dan prasarana pendukung kesenian di masing-masing wilayah.
7. Meningkatkan pemahaman dan partisipasi pelaku seni budaya terhadap sertifikasi profesi melalui sosialisasi pentingnya sertifikasi profesi, serta pelaksanaan sertifikasi bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan skema Penari (Penyaji Karya Tari), Dalang (Teater Wayang), dan Wiyogo (Karawitan Pakeliran).

q. Perpustakaan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perpustakaan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Masih banyak desa yang belum memiliki perpustakaan desa untuk dibina.



2. Masih banyaknya sekolah (SD dan SMP) yang belum memiliki petugas pengelola perpustakaan yang memahami tentang perpustakaan.
3. Masih minimnya jumlah koleksi buku perpustakaan.

Faktor Penentu Keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan perpustakaan, di antaranya sebagai berikut :

1. Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan perpustakaan kepada tenaga pengelola perpustakaan maupun personil yang ditugaskan menjadi pengelola perpustakaan baik perpustakaan sekolah maupun desa secara berkala.
2. Melaksanakan pembinaan perpustakaan khusus (perpustakaan desa, taman baca masyarakat dan rumah baca masyarakat) serta memberikan pemahaman dalam kegiatan tersebut bahwa Alokasi Dana Desa dapat dipergunakan untuk pengelolaan perpustakaan desa.
3. Meningkatkan layanan perpustakaan dengan sistem jemput bola melalui program inovasi Pinjam Buku Cara Online (Jambu Carlin) dan mobil perpustakaan keliling “Mbak Marsini” (Mobil Buku Anak Keliling Mari Datang Kesini).
4. Menambah jumlah koleksi perpustakaan sesuai dengan minat dan kebutuhan masyarakat melalui pengembangan bahan pustaka.
5. Adanya program TPBIS (Transformasi Perpustakaan Berbasis Sosial) dari Perpustnas RI yang memberikan bantuan buku kepada perpustakaan desa dan sekolah.

r. Kearsipan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kearsipan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penerapan pengelolaan kearsipan secara baku pada perangkat daerah, sehingga tata kelola arsip belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Masih rendahnya pemahaman OPD, desa, dan kelurahan dalam pengelolaan arsip, baik arsip dinamis maupun arsip statis, yang berdampak pada belum tertibnya administrasi kearsipan;
3. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) di bidang kearsipan, khususnya tenaga yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sebagai pengelola kearsipan.

Faktor Penentu Keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan kearsipan, di antaranya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembinaan kearsipan secara berkelanjutan kepada perangkat daerah guna meningkatkan kepatuhan terhadap standar dan prosedur pengelolaan arsip.



2. Peningkatan kapasitas pengelola kearsipan melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan pelatihan pengelolaan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tindak lanjut rekomendasi penetapan kebutuhan jabatan fungsional Arsiparis dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kepada Bagian Organisasi dan BKPSDM Kabupaten Klaten dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM kearsipan yang profesional.

1.3.2.3. Permasalahan Pembangunan Pada Layanan Urusan Pilihan

a. Perikanan Tangkap dan Budidaya

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

a. Perikanan Tangkap:

1. Keterbatasan sarana prasarana: Masih banyak nelayan yang menggunakan alat tangkap yang kurang ramah lingkungan
2. Lemahnya kelembagaan nelayan: Kelompok nelayan belum optimal dan pemasaran hasil tangkap secara kolektif.

b. Perikanan Budidaya:

1. Keterbatasan akses benih bermutu & pakan: Ketersediaan benih ikan unggul dan pakan alternatif yang harganya terjangkau masih sulit dijangkau pembudidaya skala kecil.
2. Lemahnya rantai pasok & pemasaran: Pembudidaya masih tergantung tengkulak dengan harga jual yang fluktuatif

Faktor Penentu Keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan perikanan tangkap dan budidaya, di antaranya sebagai berikut :

a. Perikanan Tangkap:

1. Memberikan bantuan alat tangkap yang lebih ramah lingkungan kepada nelayan tangkap
2. Memberikan penguatan kapasitas pada kelompok nelayan melalui pendampingan manajemen kelembagaan dan pemasaran hasil tangkap secara kolektif.

b. Perikanan Budidaya:

1. Memberikan bantuan benih unggul serta pengembangan pakan alternatif berbahan baku lokal yang lebih terjangkau
2. Memperluas akses pemasaran melalui kemitraan dengan pelaku usaha dan penguatan pemasaran yang kolektif melalui kelompok pembudidaya ikan.



b. Pertanian

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanian di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Regenerasi sumber daya manusia dalam pembudidayaan dan pertanian yang semakin menurun.
2. Ketersediaan lahan pertanian produktif yang semakin berkurang karena alih fungsi lahan dan penurunan kualitas tanah karena perubahan iklim dan lingkungan.
3. Perubahan iklim dan lingkungan yang menyebabkan tidak menentukannya waktu panen dan menyebabkan harga tidak stabil.

Faktor Penentu Keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan pertanian, di antaranya sebagai berikut :

1. Inovasi pertanian dengan memanfaatkan teknologi pertanian terbaru serta memanfaatkan lahan yang minimalis.
2. Penyesuaian pola tanam dengan mengikuti prakiraan cuaca BMKG dan diversifikasi tanaman yang adaptif terhadap perubahan iklim.

c. Pariwisata

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pariwisata di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan daya tarik wisata yang belum optimal
2. Konektivitas dan aksesibilitas antar destinasi belum terintegrasi
3. Promosi dan pemasaran destinasi belum maksimal
4. Terbatasnya ruang kreatif dan kapasitas SDM pariwisata serta ekonomi kreatif tingkat dasar
5. Kemudahan akses ke obyek wisata daya tarik wisata dengan adanya *exit* tol Ceper dan Prambanan/Jogonalan
6. Rendahnya kesadaran pelaku usaha mendaftarkan produk/karya dalam Hak Kekayaan Intelektual
7. Belum optimalnya kerjasama antar pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif

Faktor Penentu Keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan pariwisata, di antaranya sebagai berikut :

1. Adanya arah kebijakan yang jelas, konsisten, dan berkelanjutan dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta dukungan lintas Perangkat Daerah.
2. Pengembangan destinasi yang berkualitas dan berdaya saing
3. Peningkatan kapasitas pengelola daya tarik / destinasi wisata, pelaku usaha pariwisata, pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat melalui pelatihan, sertifikasi, serta pendampingan manajemen dan pelayanan wisata.



4. Promosi dan pemasaran pariwisata yang efektif
5. Pemanfaatan teknologi digital, penguatan branding destinasi, serta kerja sama promosi dengan *travel agent*, media, dan *platform daring* (dalam jaringan)
6. Penyelenggaraan *event* pariwisata, ekonomi kreatif dan budaya yang terencana dan berkelanjutan.
7. Kolaborasi dan kemitraan multipihak (*Pentahelix*)
8. Penguatan regulasi dan tata kelola pariwisata
9. Monitoring, evaluasi, dan inovasi berkelanjutan

d. Perdagangan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perdagangan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Penurunan jumlah Tera/Tera Ulang di pasar karena kesadaran pemilik UTTP untuk melakukan tera secara mandiri masih rendah.
2. Sumber daya manusia UMKM kurang memahami tentang standar operasional prosedur dan regulasi terkait ekspor
3. Terjadinya fluktuasi harga pada Hari Besar Keagamaan akibat pengaruh faktor pasar yang menyebabkan Instabilitas di sektor perdagangan.
4. Kondisi fisik sarana distribusi perdagangan (pasar) banyak yang tidak layak

Faktor Penentu Keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan perdagangan, di antaranya sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan Penyuluhan tentang kewajiban tera/tera ulang.
2. Sosialisasi dan penyuluhan tentang SOP ekspor dan import
3. Optimalisasi program untuk stabilisasi harga dan penjaminan ketersediaan secara bersinergi dan terkoordinasi antar lintas sektoral
4. Pembinaan dan pengendalian ekspektasi dan spekulasi masyarakat terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat
5. Prioritas alokasi anggaran revitalisasi pasar
6. Sosialisasi aturan dan zonasi PKL secara berkelanjutan dan Pendekatan persuasif dan dialog dengan PKL

e. Perindustrian

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perindustrian di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang belum optimal, terutama pada aspek kualitas produk, efisiensi proses produksi, standardisasi dan pemenuhan kebutuhan pasar.



2. Keterbatasan pemanfaatan teknologi, inovasi dan digitalisasi industri, sehingga produktivitas dan nilai tambah produk industri pengolahan masih relatif rendah
3. Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia industri yang belum merata, khususnya dalam penguasaan teknologi produksi, manajemen usaha dan kewirausahaan industri.
4. Belum optimalnya integrasi industri pengolahan dengan rantai pasok berbasis potensi lokal, termasuk keterkaitan dengan sektor pertanian, UMKM dan koperasi.
5. Keterbatasan akses pembiayaan dan investasi industri, khususnya bagi IKM untuk pengembangan usaha dan modernisasi peralatan produksi.
6. Fluktuasi pertumbuhan sektor industri pengolahan, yang menunjukkan masih adanya kerentanan industri terhadap dinamika ekonomi dan perubahan permintaan pasar.

Faktor Penentu Keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan perindustrian, di antaranya sebagai berikut :

1. Penguatan kapasitas dan daya saing IKM secara berkelanjutan, melalui peningkatan kualitas produk, standardisasi, sertifikasi dan fasilitasi perluasan akses pasar.
2. Peningkatan penerapan teknologi tepat guna, inovasi dan digitalisasi industri guna mendorong efisiensi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah produk.
3. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia industri, melalui Pendidikan dan pelatihan vokasi, pendampingan usaha serta pengembangan kewirausahaan industri.
4. Penguatan ekosistem industri dan rantai pasok lokal, dengan mendorong keterkaitan antara industri pengolahan, sektor pertanian, UMKM dan koperasi.
5. Peningkatan akses pembiayaan dan fasilitasi investasi industri, termasuk kemitraan usaha dan dukungan terhadap investasi berbasis potensi lokal.
6. Optimalisasi peran pemerintah daerah dalam pembinaan dan fasilitasi industri, termasuk implementasi kebijakan percepatan penggunaan produk dalam negeri dan penguatan pasar produk industri lokal.

f. Transmigrasi

Permasalahan yang dihadapi pada urusan transmigrasi di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Calon Transmigrasi mundur pada saat-saat pengerahan;
2. Potensi calon transmigrasi yang akan diberangkatkan tidak sesuai dengan potensi daerah tujuan transmigrasi; dan
3. Pembangunan transmigrasi pada era Otonomi Daerah sangat rumit dan



Faktor Penentu Keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan transmigrasi, di antaranya sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Program Transmigrasi dengan melakukan fasilitasi dan mediasi (MOU) antara daerah asal dengan Provinsi/ Kabupaten daerah penempatan;
2. Penyuluhan dan pembinaan bagi calon Transmigran penduduk rawan bencana dan kemiskinan sangat diperlukan;
3. Penjajagan dan cek lokasi tempat pengiriman calon Transmigrans sangat diperlukan untuk melihat lokasi yang sesungguhnya; dan
4. Mengupayakan kuota transmigran ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

1.3.2.4. Permasalahan Pembangunan Pada Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah

Permasalahan yang dihadapi pada unsur Sekretariat Daerah di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya regulasi nasional yang mengatur Grand Desain dan Road Map Reformasi Birokrasi sebagai acuan penentuan arah kebijakan dan Perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi belum sepenuhnya berorientasi pada hasil (*Outcome*), sehingga data kinerja belum maksimal digunakan sebagai dasar penganggaran berbasis kinerja.
2. Belum optimalnya capaian indikator pembentukan produk hukum inisiatif daerah dalam penilaian IRH, pengajuan produk hukum yang mendekati deadline, serta pengelolaan website hukum yang belum optimal.
3. Belum adanya sistem monitoring-evaluasi terintegrasi yang menyebabkan kualitas laporan fisik, keuangan, dan progres konstruksi kurang optimal.
4. Pengembangan aplikasi pengadaan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP) yang bersifat insidental dan minim sosialisasi menghambat adaptasi pengguna.
5. Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan dan capaian kinerja bidang Kesejahteraan Rakyat.
6. Sinergi kerja sama daerah, pemahaman kebijakan otda, dan fasilitasi administrasi kewilayahan belum optimal.
7. Belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
8. Pelaksanaan protokol, komunikasi pimpinan, dan pemutakhiran perangkat dokumentasi berbasis teknologi belum optimal.
9. Belum optimalnya pembinaan BLUD dikarenakan belum adanya petunjuk teknis dari Kemendagri sebagai pedoman di daerah, Program subsidi



bunga yang overload dikarenakan pelaku usaha mikro yang membutuhkan modal usaha.

Faktor Penentu Keberhasilan untuk mengatasi permasalahan unsur Sekretariat Daerah, di antaranya sebagai berikut :

1. Pemantauan kebijakan nasional, menyiapkan dokumen pendukung, dan menjaga kontinuitas program Reformasi Birokrasi. Penguatan implementasi SAKIP yang berorientasi pada outcome yang didukung komitmen pimpinan, peningkatan kapasitas SDM, keakuratan data, serta integrasi evaluasi kinerja ke dalam perencanaan anggaran.
2. Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dalam penjadwalan Raperda, serta optimalisasi website hukum untuk transparansi digital.
3. Pembangunan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaporan serta Penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) pengendalian yang ketat.
4. Meningkatkan literasi teknologi informasi SDM pengadaan agar cepat beradaptasi dengan aplikasi elektronik terbaru.
5. Pemanfaatan anggaran bidang Kesra secara tepat sasaran pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
6. Meningkatkan koordinasi kerja sama daerah, kapasitas aparatur otda, serta memperkuat peran kecamatan/kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembinaan dan evaluasi administrasi kewilayahan.
7. Meningkatkan ketepatan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang pimpinan.
8. Melaksanakan bimtek SDM keprotokolan, memperkuat komunikasi stakeholder, dan memperbarui perangkat dokumentasi berbasis teknologi terkini.
9. Meningkatkan koordinasi internal Kabupaten Klaten dan eskternal (provinsi dan nasional) serta prioritas alokasi anggaran program subsidi bunga.

b. Sekretariat DPRD

Permasalahan yang dihadapi pada unsur Sekretariat DPRD di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Dinamika perubahan regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat yang relatif cepat berdampak pada program dan kegiatan Sekretariat DPRD yang telah direncanakan, sehingga sering perlu dilakukan penyesuaian kebijakan, penganggaran, serta pelaksanaan kegiatan pendukung tugas dan fungsi DPRD.
2. Menurunnya produk hukum (peraturan daerah) yang ditetapkan di tahun 2025, hanya 10 Rancangan Perda yang ditetapkan dari 16 Rancangan Perda yang sudah dimasukkan dalam Propemperda Tahun 2025;



3. Belum optimalnya pemenuhan keterwakilan perempuan di DPRD di periode pilkada tahun 2024, baru 22% (11 orang) dari 30% (15 orang) amanah yang ditetapkan.

Faktor Penentu Keberhasilan untuk mengatasi permasalahan unsur Sekretariat DPRD, di antaranya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD guna memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan;
2. Peningkatan koordinasi internal antarbagian di lingkungan Sekretariat DPRD dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara efektif dan terpadu;
3. Optimalisasi kelembagaan yang ada melalui sinergi antarunit kerja dengan saling mengisi dan melengkapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga fasilitasi terhadap tugas dan fungsi DPRD dapat berjalan secara optimal.

c. Perencanaan

Permasalahan yang dihadapi pada unsur perencanaan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Dinamika perubahan regulasi dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang cepat dan dinamis, sehingga memerlukan tindak lanjut yang segera agar tetap selaras dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
2. Belum meratanya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) ASN perencana, serta adanya dinamika mutasi ASN perencana, yang berdampak pada perlunya pendampingan secara intensif dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
3. Belum optimalnya proses pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, sehingga hasil pengendalian dan evaluasi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan dan perbaikan kualitas perencanaan pembangunan daerah;

Faktor Penentu Keberhasilan untuk mengatasi permasalahan unsur perencanaan, di antaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi dan responsivitas terhadap perubahan kebijakan yang dinamis, guna menjamin sinergi dan keselarasan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
2. Peningkatan kapasitas dan pengembangan kompetensi ASN perencana, serta pelaksanaan pendampingan secara intensif dalam penyusunan



dokumen perencanaan Perangkat Daerah agar kualitas perencanaan pembangunan daerah semakin meningkat;

3. Pembangunan basis data terpadu serta pengembangan sistem perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang terintegrasi, guna menjamin keakuratan data evaluasi serta meningkatkan pemanfaatan hasil pengendalian dan evaluasi sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah.

d. Keuangan

Permasalahan yang dihadapi pada unsur keuangan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten dan proporsi PAD terhadap pendapatan daerah. Hasil analisa di tahun 2025 realisasi PAD sebesar Rp.528.101.636.571,00 dan proporsi PAD terhadap Pendapatan daerah sebesar 18,40% dari pendapatan daerah sebesar Rp.2.870.701.368.786,00.
2. Belum seluruh aset milik Pemerintah Daerah bersertifikat, sampai dengan tahun 2025 baru sebesar 86,56% aset milik Pemerintah Daerah yang sudah bersertifikat;
3. Masih ditemukan adanya kelemahan dalam pengendalian internal maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pajak daerah antara lain belum dimutakhirkannya basis data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta belum optimalnya pengelolaan parkir daerah.
4. Perencanaan pengalokasian SiLPA tahun berkenaan yang terlalu besar, sehingga tidak sesuai dengan realisasi SiLPA tahun sebelumnya, yang kemudian menyebabkan harus dilakukan pengurangan belanja pada saat perubahan APBD tahun berkenaan.

Faktor Penentu Keberhasilan untuk mengatasi permasalahan unsur keuangan, di antaranya sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pelaksanaan studi potensi PAD, khususnya dari sektor pajak daerah, untuk mengetahui potensi riil pajak daerah, melakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), mendorong inovasi pengelolaan PAD, meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi, serta memperkuat koordinasi dengan OPD pengelola pendapatan daerah;
2. Percepatan sertifikasi aset daerah melalui koordinasi yang intensif dengan para Pengguna Barang, peningkatan kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Klaten dan pemangku kepentingan terkait, serta penyediaan anggaran yang memadai untuk pengurusan sertifikat tanah aset milik pemerintah daerah;



3. Melakukan pemutakhiran database secara berkala atas data luasan bangunan, menyusun kajian teknis serta analisis kelayakan yang menghasilkan profit sharing yang adil dalam pengelolaan lahan parkir serta meninjau kembali perjanjian kerjasama yang telah dilakukan;
4. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran SiLPA melalui koordinasi yang erat dengan OPD yang membidangi perencanaan, sehingga penganggaran SiLPA didasarkan pada perhitungan yang lebih cermat dan rasional dengan mempertimbangkan proyeksi realisasi anggaran.

e. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan yang dihadapi pada unsur kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penerapan sistem merit ASN, khususnya dalam pengelolaan manajemen talenta sebagai dasar pengembangan karier dan pengisian jabatan;
2. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan ASN antar Perangkat Daerah, di tengah keterbatasan ruang fiskal akibat tingginya belanja pegawai;
3. Belum tersusunnya analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja bagi seluruh pegawai.

Faktor Penentu Keberhasilan untuk mengatasi permasalahan unsur kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, di antaranya sebagai berikut :

1. Menyusun regulasi daerah atau kebijakan internal sebagai dasar pelaksanaan manajemen talenta ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten diantaranya membentuk Komite Talenta sebagai unsur pengarah dan pengambil keputusan dalam pelaksanaan manajemen talenta, menyusun talenta pool dan rencana suksesi sesuai PermenPAN RB Nomor 3 Tahun 2020.
2. Mengoptimalkan penataan dan redistribusi ASN antar Perangkat Daerah guna memenuhi kebutuhan pegawai secara lebih proporsional dan efisien serta mengusulkan kebutuhan ASN kepada Panselnas sesuai hasil perhitungan peta jabatan dan analisis beban kerja, serta menerima mutasi masuk dari luar daerah melalui seleksi yang mempertimbangkan kualifikasi dan kebutuhan organisasi.
3. Peningkatan Kualitas dan pemerataan pengembangan kompetensi ASN melalui pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN secara daring (online) untuk memperluas akses, meningkatkan efisiensi anggaran, dan menjangkau lebih banyak ASN.



f. Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan yang dihadapi pada unsur penelitian dan pengembangan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Persentase implementasi penerapan hasil penelitian dan kelitbangan belum optimal;
2. Belum optimalnya kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset;
3. Kapabilitas SDM IPTEK masih kurang memadai baik jumlah maupun kualitasnya;
4. Sarana dan prasarana serta pendanaan IPTEK perlu ditingkatkan;
5. Kurangnya partisipasi dan kreativitas masyarakat dalam mendukung inovasi daerah

Faktor Penentu Keberhasilan untuk mengatasi permasalahan unsur penelitian dan pengembangan, di antaranya sebagai berikut :

1. Peningkatan pemanfaatan hasil kelitbangan melalui mekanisme tindak lanjut yang jelas dan berkelanjutan seperti kewajiban perangkat daerah mengadopsi hasil penelitian yang relevan sehingga persentase penerapan inovasi dapat meningkat;
2. Memperkuat kerja sama berkelanjutan dengan perguruan tinggi dan lembaga riset melalui MoU dan riset terapan;
3. Meningkatkan kapasitas SDM IPTEK melalui pelatihan, sertifikasi, dan kolaborasi riset;
4. Meningkatkan dukungan sarana, prasarana, dan pendanaan litbang yang terintegrasi dengan prioritas daerah;
5. Mendorong partisipasi dan kreativitas masyarakat melalui penguatan Krenova, inkubasi inovasi, dan pendampingan.

g. Pengawasan

Permasalahan yang dihadapi pada unsur pengawasan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas dan kompetensi APIP belum sepenuhnya sebanding dengan luasnya objek pengawasan (perangkat daerah, sekolah, puskesmas, desa, BUMD).
2. Pola pengawasan yang masih dipersepsikan sebagai “formalitas”, bukan sebagai alat perbaikan tata kelola;
3. Dokumen manajemen risiko di sebagian perangkat daerah masih bersifat administratif dan belum menjadi dasar pengambilan keputusan serta Integrasi manajemen risiko dengan perencanaan dan penganggaran belum berjalan optimal;
4. Kebutuhan peningkatan digitalisasi proses pengawasan untuk efisiensi dan akurasi;



5. Masih ada pandangan bahwa pengawasan bersifat “mencari kesalahan”, bukan mitra strategis peningkatan kinerja;
6. Masyarakat semakin kritis terhadap pengelolaan keuangan dan pelayanan publik sehingga penanganan pengaduan masyarakat menuntut respons yang cepat, transparan, dan akuntabel;
7. Pembangunan budaya integritas di perangkat daerah, sekolah, dan desa masih perlu diperkuat dan membutuhkan pendekatan berkelanjutan.

Faktor Penentu Keberhasilan untuk mengatasi permasalahan unsur pengawasan, di antaranya sebagai berikut :

1. Menerapkan pengawasan berbasis risiko yang diprioritaskan pada objek strategis dan berisiko tinggi, disertai peningkatan kompetensi APIP secara berkelanjutan;
2. Memperkuat pendekatan pengawasan yang berorientasi pada perbaikan tata kelola dan peningkatan kinerja melalui audit kinerja, asistensi, dan rekomendasi solusi;
3. Mendorong integrasi manajemen risiko ke dalam perencanaan dan penganggaran OPD melalui pendampingan dan reviu berkala;
4. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengawasan;
5. Memperkuat peran Inspektorat sebagai mitra strategis OPD melalui pendekatan preventif, komunikatif, dan berbasis pembinaan;
6. Mengoptimalkan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat yang responsif, transparan, dan akuntabel;
7. Melaksanakan penguatan budaya integritas secara berkelanjutan melalui edukasi, pengawasan preventif, dan kolaborasi lintas sektor.

h. Kewilayahan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kewilayahan di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Ketimpangan kualitas perencanaan antar kecamatan dikarenakan perbedaan kapasitas dan kompetensi SDM Perencana Kecamatan;
2. Kesenjangan akses infrastruktur (jalan, jembatan, fasilitas sosial) antar wilayah dalam kecamatan;
3. Belum optimalnya peran kecamatan sebagai pusat pelayanan;
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan program pembangunan kecamatan;
5. Koordinasi antar desa/kecamatan yang belum efektif dalam menentukan prioritas pembangunan.

Faktor Penentu Keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan kewilayahan, di antaranya sebagai berikut :



1. Tersedianya SDM perencana yang kompeten dan proporsional di setiap kecamatan melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan teknis perencanaan;
2. Tersusunnya peta kebutuhan infrastruktur per kecamatan secara komprehensif dan berbasis data spasial untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah;
3. Optimalisasi fungsi kecamatan sebagai pelayan publik melalui peningkatan kewenangan, sarana prasarana, dan dukungan sistem pelayanan berbasis digital;
4. Terlaksananya mekanisme perencanaan partisipatif yang inklusif dan representatif melalui penguatan forum Musrenbang Kecamatan;
5. Terbangunnya sistem koordinasi yang efektif antar desa dan kecamatan dalam penyusunan prioritas pembangunan wilayah.

1.3.2.5. Permasalahan Pembangunan Pada Urusan Pemerintahan Umum

a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda serta meningkatnya pengaruh budaya yang bertentangan dengan Pancasila;
2. Tingginya penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Klaten serta masih adanya mantan narapidana terorisme yang memerlukan pembinaan dan deradikalisasi berkelanjutan;
3. Masih terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas yang dilakukan oleh remaja sehingga menimbulkan keresahan masyarakat.

Faktor Penentu Keberhasilan untuk mengatasi permasalahan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik, di antaranya sebagai berikut :

1. Penguatan internalisasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan melalui pendidikan karakter, pendekatan budaya, literasi digital, serta peran aktif generasi muda dalam menumbuhkan toleransi, gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial;
2. Penguatan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan deradikalisasi melalui kolaborasi lintas sektor, peningkatan edukasi masyarakat, serta penetapan dan implementasi Perda P4GN;
3. Pendekatan komprehensif terhadap remaja melalui sinergi orang tua, sekolah, dan masyarakat dengan penguatan komunikasi, pendidikan karakter, pengawasan, penyediaan kegiatan positif, serta penegakan hukum yang tegas.



BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2027 disusun sebagai landasan perencanaan pembangunan tahunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025–2029. Perumusan kerangka ini memperhatikan perkembangan dan tren kondisi perekonomian daerah dan nasional tahun 2026, serta kebijakan dan regulasi fiskal yang mempengaruhi kinerja ekonomi dan kapasitas keuangan daerah.

Kondisi perekonomian Kabupaten Klaten pada tahun 2026 menunjukkan kecenderungan stabil dan menguat, tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, peningkatan aktivitas sektor-sektor utama daerah, serta upaya pengendalian inflasi yang relatif terkendali. Sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan, dan jasa masih menjadi penopang utama perekonomian daerah, meskipun masih dihadapkan pada tantangan peningkatan produktivitas, pemerataan pertumbuhan, dan penguatan daya saing ekonomi lokal. Sejalan dengan hal tersebut, arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2027 difokuskan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengurangan kesenjangan dan kemiskinan.

Dalam kerangka ekonomi makro daerah, target pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2027 diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta pengendalian laju inflasi daerah. Capaian indikator makro tersebut diharapkan menjadi cerminan keberhasilan pembangunan daerah yang selaras dengan sasaran RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025–2029.

Dari sisi keuangan daerah, kebijakan fiskal Kabupaten Klaten Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan fiskal nasional dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026, khususnya terkait kebijakan transfer ke daerah, penguatan belanja prioritas, dan pengendalian kualitas belanja daerah. Pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang sah, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, serta penguatan sistem pengelolaan pendapatan daerah.

Kebijakan belanja daerah difokuskan pada peningkatan kualitas belanja yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, dengan prioritas pada belanja yang mendukung pencapaian indikator makro pembangunan, pelayanan dasar, pengurangan kemiskinan, peningkatan daya saing daerah, serta penguatan reformasi birokrasi. Sementara itu, kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal dan mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara optimal.



Selain bersumber dari APBD Kabupaten Klaten, pendanaan pembangunan Tahun 2027 juga diupayakan melalui sinergi dan integrasi pendanaan dengan APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, dunia usaha, serta partisipasi masyarakat. Sinergi pendanaan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagai bagian dari tahapan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025–2029.

Melalui Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah ini, diharapkan pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2027 dapat dilaksanakan secara terarah, konsisten, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi dan kebijakan, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Klaten pada tahun 2027 yang merupakan periode transisi pada akhir periode RPJMD Tahun 2025-2029 dan perodesasi Kebijakan Bupati Klaten perodesasi tahun 2025-2030, sedangkan prioritas pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2027 untuk mendukung Peningkatan kontribusi sektor-sektor unggulan dan potensial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan investasi daerah, serta untuk mewujudkan transisi dan transformasi pemerintahan Kabupaten Klaten yang baru periode tahun 2025-2029 sebagai pondasi awal menuju Klaten Bersinar 2045. Sedangkan Visi Kepala Daerah terpilih merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Klaten sebelumnya yaitu **“Mewujudkan Klaten yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan”**, untuk mendukung UMKM yang naik kelas, pengembangan ekonomi rakyat serta penguatan ekonomi yang inklusif dan kreatif yang mendukung investasi daerah dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan nilai daya saing dan kemandirian daerah berbasis potensi sumber daya lokal.

Penciptaan lapangan kerja pada sektor investasi diharapkan benar-benar memprioritaskan pada pemberdayaan tenaga kerja lokal, dikarenakan saat ini investasi yang berkembang di Kabupaten Klaten cukup banyak, namun penyerapan tenaga kerja lokal yang ada di Kabupaten Klaten masih rendah, hal ini ditunjukkan masih banyaknya tenaga kerja yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Klaten, untuk menciptakan lapangan kerja diperlukan adanya pendampingan kepada pelaku UMKM untuk menumbuhkan wirausaha baru dengan fasilitasi wifi gratis di ruang terbuka untuk mendukung digitalisasi pasar online atau *marketplace* dengan harapan dapat membuka peluang dan perluasan kesempatan kerja untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, guna mendukung penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) melalui sinergitas dan kolaborasi multisektor dalam rangka penyerapan tenaga kerja melalui *link and mach* atau kesesuaian baik antara tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia industri dan dunia usaha dengan spesifikasi tenaga kerja yang tersedia, antara lain kebijakan sektor pendidikan dalam mempersiapkan sumberdaya manusianya, wisata edukasi sejak usia dini dengan



melibatkan anak-anak sekolah serta kebijakan sektor perindustrian dan perdagangan dalam melaksanakan rekrutmen dan penempatan tenaga kerja melalui pola pendekatan klaster.

Sedangkan untuk penguatan daya saing daerah, diharapkan dapat meningkatkan UMKM agar dapat naik kelas sehingga mampu berdaya saing dan berorientasi ekspor, sehingga mampu membranding Kabupaten Klaten melalui Produk Unggulan Daerah. Produk Unggulan Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 31/050/1 Tahun 2024 ada 10 (sepuluh) Produk Unggulan Daerah,

Sedangkan pengembangan perekonomian daerah dengan pola pendekatan klaster, dalam Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 050/225 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Klaten Nomor 050/216 Tahun 2022 tentang Lokasi Klaster Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten, telah ditetapkan 11 Klaster UMKM. Untuk mendukung pengembangan klaster UMKM, perlu adanya pemberdayaan koperasi yang produktif dan untuk pengembangan klaster UMKM tersebut telah difasilitasi melalui kegiatan pelatihan manajemen ekspor-impor hasil produksi, fasilitasi PIRT, sertifikat Halal, sertifikasi TKDN, pelatihan packaging dan fasilitasi promosi produk-produk UMKM khususnya serta pendampingan dari hulu sampai hilir baik untuk sektor Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertanian, Perijinan dan Investasi serta Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkelanjutan, serta menjadikan Kabupaten Klaten sebagai daerah tujuan wisata termasuk untuk pengembangan geoheritage Bayat.

Guna mendukung program tersebut, maka diperlukan adanya kolaborasi, inovasi dan kreatifitas serta perlu adanya gerakan Cinta Produk Klaten sesuai dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penggunaan Slogan Aku Cinta Produk Klaten untuk mendukung program Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Untuk itu perlu adanya peningkatan daya saing produk, peningkatan produktivitas, peningkatan kreativitas dan inovatif serta percepatan proses digitalisasi UMKM, agar bisa memberikan dampak yang positif serta menjadi daya ungkit dalam pergerakan perekonomian dan dapat memberikan nilai tambah serta dapat memberikan dampak pada peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Termasuk didalamnya kebijakan pengembangan konsep hilirisasi sektor pertanian, pengembangan agro industri pertanian dalam arti luas sebagaimana yang telah dikembangkan di Kabupaten Klaten meliputi pendampingan pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan yang dapat memberikan nilai tambah melalui pelatihan-pelatihan, baik pelatihan pengemasan agar lebih menarik, pengolahan dan penyimpanan agar lebih awet sampai dengan pemasaran melalui bazar dan pameran-pameran sebagai ajang promosinya.

Selain itu juga merintis program untuk meminimalkan dan mencegah terjadinya *Food Loss and Waste* dalam rangka menekan ekonomi yang hilang melalui sosialisasi kepada masyarakat, agar memanfaatkan sisa makanan yang masih bagus dan sebelum kadaluwarsa untuk diberikan kepada yang lebih membutuhkan, dapat juga diolah sebagai produk pupuk organik cair maupun padat yang akan memberikan nilai tambah.



Rintisan Badan Usaha Milik Petani yang telah dilaksanakan di Kabupaten Klaten sebagai bentuk kegiatan yang berupa kerjasama antara Petani dengan Bumdes, maupun Lembaga Perbankan dalam bentuk kemudahan akses keuangan untuk memenuhi kebutuhan petani serta fasilitasi pemasaran hasil pertaniannya. Kabupaten Klaten terkenal sebagai lumbung padi di Jawa Tengah, untuk mengembalikan kejayaan beras Rojolele di masa lalu, serta untuk menjadikan Kabupaten Klaten menuju kemandirian dan kedaulatan pangan untuk mewujudkan program Swasembada Pangan dengan mengembangkan dan memanfaatkan pangan lokal melalui diversifikasi pangan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat, serta untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperuntukkan bagi anak sekolah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, meningkatkan kesehatan masyarakat, pemenuhan gizi dan pencegahan stunting, dengan memanfaatkan pangan lokal, memberdayakan masyarakat, UMKM, koperasi, Bumdes dan *stakeholder* terkait, serta untuk mendukung rencana program pemerintah dalam mewujudkan Koperasi Merah Putih.

Sedangkan rintisan untuk *green and circulaireconomy*, sudah dikembangkan melalui Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce, Reuse, dan Recycle* (TPS3R), budidaya maggot dengan memanfaatkan daur ulang sampah untuk kompos, kerajinan serta pemanfaatan sisa makanan untuk budidaya maggot yang dimanfaatkan untuk makanan olahan seperti peyek, untuk pakan ikan dan pakan ternak yang dapat memberikan nilai tambah dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendukung program yang ramah lingkungan, program tersebut merupakan dampingan baik dari pemerintah maupun dunia usaha. Diharapkan dengan berbagai prioritas program unggulan sebagaimana tersebut akan dapat mendukung percepatan penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Klaten dan juga meningkatkan daya saing produk UMKM Kabupaten Klaten dalam mendukung percepatan perkembangan ekonomi daerah.

Kondisi perekonomian Kabupaten Klaten dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif stabil. Aktivitas ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta jasa-jasa. Struktur ini mencerminkan karakter ekonomi daerah yang bertumpu pada sektor primer dan sektor tersier dengan dukungan sektor sekunder yang terus berkembang. Seiring dengan dinamika perekonomian regional dan nasional, Kabupaten Klaten menghadapi tantangan berupa perlunya peningkatan nilai tambah ekonomi, produktivitas tenaga kerja, serta pemerataan hasil pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi daerah diarahkan tidak hanya pada peningkatan pertumbuhan, tetapi juga pada kualitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi..

Kondisi faktual dan dinamika tersebut merupakan tantangan dalam pengembangan perekonomian di Kabupaten Klaten di tahun 2025. Namun di sisi lain, ada juga potensi yang bisa menjadi modal dan prospek dalam meningkatkan perekonomian daerah, seperti masih banyaknya potensi sumber daya alam, potensi lokal daerah di sektor kepariwisataan dan kebudayaan yang memiliki unsur khas daerah, klaster-klaster usaha berbasis keunggulan khas daerah, yang bisa dioptimalkan pengelolaannya dan dikembangkan.



Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan yang tepat, efektif, efisien serta tepat sasaran yang diambil oleh pemerintah daerah sangat menentukan dari tujuan pembangunan daerah.

Selain itu, letak geografis Kabupaten Klaten ke depan sebagai jalur strategis di antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta serta termasuk sebagai salah satu kabupaten yang menjadi fokus pemerintah pusat dalam pengembangan kawasan strategis nasional, serta adanya pembangunan jalan tol Jogja-Solo bisa menjadi prospek yang bagus dalam peningkatan dan pengembangan perekonomian daerah jika pemerintah daerah mampu mengambil peluang dalam merencanakan pembangunan daerah secara tepat untuk ke depannya.

Tabel 3.1 Proyeksi Indikator Ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2026-2027

No	Indikator	Satuan	Proyeksi Tahun		
			Target 2026	Target 2027	
				RKPD	HASIL RAKORTEKBANG
1	PDRB ADHB	Miliar Rp	68,02	75,27	-
2	PDRB ADHK	Miliar Rp	35,3	39,59	-
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,20 – 5,80	5,22	4,73-6,58
4	PDRB per kapita	Rupiah	48,63 juta	52,58 juta	-
5	Inflasi	%	2,5±1	2,5±1	-
6	Nilai Investasi PMA dan PMDN	(Ribu) Rp	4.008.745.091.53	4.206.847.037.98	-
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,00 – 3,68	3,50	3,60-3,00
8	Kemiskinan	%	11,00-10,50	10,10	10,10-9,80

Sumber : Bapperida Klaten, 2026 (hasil analisis)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten pada Tahun 2027 diproyeksikan tetap berada pada jalur pertumbuhan yang positif dan terkendali. Proyeksi ini disusun berdasarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Klaten beberapa tahun terakhir, struktur ekonomi daerah menurut lapangan usaha, serta mempertimbangkan asumsi kondisi perekonomian regional dan nasional.

Berdasarkan hasil analisis, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2027 diperkirakan berada pada kisaran 6,60-7,20 persen (*year-on-year*). Capaian tersebut sejalan dengan sasaran pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten dan mencerminkan upaya menjaga kesinambungan pembangunan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah pada Tahun 2027 masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga sebagai komponen utama pembentuk PDRB. Stabilitas daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi domestik menjadi faktor penting dalam menjaga laju pertumbuhan ekonomi. Selain itu, peran belanja pemerintah dan pembentukan modal tetap bruto turut memberikan kontribusi dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah.

Sektor industri pengolahan diproyeksikan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB relatif besar dan menunjukkan kecenderungan meningkat. Pengembangan industri pengolahan, khususnya industri berbasis hasil pertanian lokal serta penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah,



diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing ekonomi daerah. Perkembangan sektor industri pengolahan juga memberikan dampak lanjutan terhadap sektor perdagangan, jasa, dan penyerapan tenaga kerja.

Sektor perdagangan besar dan eceran diperkirakan tumbuh stabil sejalan dengan meningkatnya aktivitas distribusi barang dan jasa. Penguatan sistem perdagangan, termasuk pemanfaatan teknologi digital, menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan efisiensi dan jangkauan pasar produk lokal. Sementara itu, sektor jasa, khususnya jasa pendidikan dan kesehatan, berperan sebagai penopang stabilitas pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah, meskipun kontribusinya terhadap PDRB cenderung menurun secara proporsional. Pada Tahun 2027, sektor ini diproyeksikan tumbuh secara moderat, dipengaruhi oleh keterbatasan lahan, faktor iklim, dan fluktuasi harga komoditas. Oleh karena itu, pengembangan sektor pertanian diarahkan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah melalui hilirisasi dan penerapan teknologi pertanian.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Tahun 2027, Kabupaten Klaten masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan peningkatan nilai tambah sektor ekonomi, produktivitas tenaga kerja yang belum merata antar sektor, serta kebutuhan investasi baru yang mampu mendorong transformasi struktur ekonomi daerah. Selain itu, dinamika ekonomi eksternal dan risiko perubahan iklim juga berpotensi mempengaruhi kinerja perekonomian daerah. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2027 diarahkan pada pertumbuhan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan sektor unggulan, peningkatan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta pengembangan ekonomi lokal yang berdaya saing.

Secara keseluruhan, proyeksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2027 diharapkan mampu mendorong peningkatan PDRB per kapita, mendukung penurunan tingkat pengangguran terbuka, serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan sasaran pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD dan dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD Tahun 2027.

Struktur PDRB Kabupaten Klaten menurut lapangan usaha menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih memberikan kontribusi yang signifikan, meskipun secara proporsional cenderung menurun seiring dengan perkembangan sektor lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya proses transformasi struktural ekonomi daerah, sedangkan sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan yang relatif lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Hal ini didorong oleh berkembangnya industri makanan dan minuman serta industri berbasis hasil pertanian lokal. Perdagangan besar dan eceran juga menunjukkan peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, sejalan dengan meningkatnya daya beli dan distribusi barang dan jasa. Sektor jasa, khususnya jasa pendidikan, kesehatan, dan jasa pemerintahan, memberikan kontribusi yang stabil dan berperan dalam menjaga ketahanan ekonomi daerah. Sementara itu, sektor konstruksi



tumbuh seiring dengan pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan permukiman.

Proyeksi kontribusi masing-masing lapangan usaha yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2027 berdasarkan komponen Lapangan Usaha adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2 Proyeksi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Klaten Tahun 2026 dan 2027

No	Lapangan Usaha	Proyeksi Pertumbuhan (%)	
		2026	2027
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,19	5,17
B	Pertambangan dan Penggalian	5,82	5,63
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	12,10	12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,23	7,44
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,87	1,79
F	Konstruksi	17,55	15,54
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,11	7,15
H	Transportasi dan Pergudangan	15,00	14,86
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,24	10,28
J	Informasi dan Komunikasi	4,37	4,4
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,71	3,57
L	Real Estate	8,15	8,39
M	Jasa Perusahaan	9,66	9,17
N	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	6,15	5,93
O	Jasa Pendidikan	6,14	6,07
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,48	8,21
Q,S,T,U	Jasa Lainnya	9,03	8,78

Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, 2026 (hasil analisis)

Tabel 3.3 Proyeksi Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Klaten Tahun 2026 dan 2027

No	Lapangan Usaha	Proyeksi Pertumbuhan (%)	
		2026	2027
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,63	9,17
B	Pertambangan dan Penggalian	2,54	5,93
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	40,06	40,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,13	0,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,03	0,03
F	Konstruksi	10,55	10,55
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,72	13,72
H	Transportasi dan Pergudangan	2,95	2,95



No	Lapangan Usaha	Proyeksi Pertumbuhan (%)	
		2026	2027
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,66	3,75
J	Informasi dan Komunikasi	3,23	3,23
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,79	2,78
L	Real Estate	1,13	1,13
M,N	Jasa Perusahaan	0,33	0,33
N	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	1,76	1,76
O	Jasa Pendidikan	5,66	5,65
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,17	1,16
Q,S,T,U	Jasa Lainnya	1,65	1,65

Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, 2026 (hasil analisis)

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten disusun sebagai pedoman pengelolaan keuangan daerah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025–2029. Perumusan kebijakan keuangan daerah memperhatikan dinamika perekonomian, kapasitas fiskal daerah, serta kebijakan dan regulasi keuangan nasional dan Provinsi Jawa Tengah, dengan tetap berpedoman pada prinsip pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan berkelanjutan

Kebijakan keuangan daerah diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta serta penjabaran dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Selain itu, arah kebijakan juga memperhatikan kebijakan fiskal nasional dan Provinsi Jawa Tengah, khususnya terkait dengan pengelolaan transfer ke daerah, kebijakan belanja prioritas, serta penguatan sinergi dan integrasi pendanaan pembangunan.

Selain pendanaan melalui sumber pendapatan daerah dalam APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya yang perlu dikonsolidasikan terhadap program pembangunan, antara lain pendanaan melalui APBN, APBD Provinsi, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) maupun konsolidasi dan sinkronisasi program pembangunan Kabupaten dengan program pembangunan desa yang bersumber dari APBDes.

Keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan harus dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan tepat agar dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Dalam hal pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Klaten mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta arah kebijakan yang selaras dengan arah kebijakan guna mendukung pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita dan pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan



mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada Tahun 2029, serta sesuai dengan program dan arah kebijakan Bupati Klaten Periode 2025-2030. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, dirumuskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kemandirian keuangan daerah dapat diukur melalui kinerja pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Pendapatan daerah dihitung dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, meliputi asumsi kondisi dan perkembangan ekonomi makro, kebijakan fiskal nasional yang mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah, kondisi perkembangan ekonomi daerah serta potensi yang dimiliki Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya.

Kebijakan pendapatan daerah tahun 2027 Kabupaten Klaten memperhatikan Target RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 serta mempertimbangkan APBD Tahun 2026 antara lain sebagai berikut:

1. PAD Kabupaten mengalami fluktuasi yang memiliki kecenderungan kenaikan walaupun tidak signifikan 6,6% atau sebesar Rp 36.519.772.632,00 dengan asumsi perbandingan PAD tahun 2026, dengan mengoptimalkan PAD melalui:
 - a. Peningkatan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - b. Peninjauan kembali dan penyesuaian tarif pajak/dasar pengenaan pajak tertentu dan retribusi;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak secara akuntabel dan transparansi;
 - d. *Study* potensi terhadap penerimaan PAD;
 - e. Optimalisasi penerapan sistem dan prosedur pelayanan pajak dan retribusi dengan pendekatan teknologi informasi berbasis online system meliputi:
 - 1) Penerapan online system dalam penerimaan pajak daerah (*ebilling, e-ticketing, tapping, banking system*);
 - 2) Pemutakhiran data objek pajak;
 - 3) Peningkatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap wajib pajak *self-assessment*;
 - 4) Peninjauan kembali dan penyesuaian peraturan terkait pajak dan retribusi yang tidak relevan, termasuk Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
2. Potensi Pendapatan Asli Daerah diperkirakan akan mengalami peningkatan utamanya dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli



Daerah Yang Sah, dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah dari pos pendapatan pajak naik signifikan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya pencatatan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 9,09% dan Opsen BBNKB sebesar 3,61%.

3. Pada komponen lain-lain PAD yang sah terdapat penyesuaian adanya pengalihan pencatatan pendapatan pelayanan kesehatan pada BLUD menjadi pendapatan retribusi daerah yang sebelumnya tercatat di lain-lain pendapatan yang sah implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Pendapatan daerah pada kerangka keuangan Kabupaten Klaten masih didominasi oleh Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) dimana proyeksi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, hal ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah masih rendah. Dalam hal alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diproyeksikan pada komponen DAU yang tidak ditentukan penggunaan dan DAU yang ditentukan penggunaan sesuai dengan alokasi tahun 2026, pada komponen DAK Non Fisik dan pada komponen DAK Fisik diproyeksikan dengan identifikasi kebutuhan usulan yang akan diajukan pada Pemerintah Pusat, sedangkan untuk pendapatan bagi hasil DBHCHT diproyeksikan pada perencanaan dan dialokasikan kembali sesuai dengan peraturan perundangan.
5. Proyeksi pendapatan daerah disusun dengan memperhatikan kondisi perekonomian daerah.
6. Pemerintah daerah terus melakukan pemulihan sektor-sektor ekonomi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah yang berorientasi pada peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan potensi unggulan daerah serta meningkatkan koordinasi antar level pemerintahan dan *stakeholder* terkait.
7. Pendapatan daerah diperkirakan akan mengalami peningkatan dengan mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Transfer dengan cara penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban hingga di tingkat kecamatan dan desa/ kelurahan.

Guna memastikan target pendapatan daerah tahun 2027 tercapai, kebijakan yang perlu ditempuh sebagai berikut :

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;
2. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya aparatur pengelola;
3. Peningkatan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan;
4. Identifikasi, optimalisasi dan peningkatan kualitas manajemen aset daerah;
5. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan PPK BLUD;

Secara keseluruhan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Klaten Rencana 2027, ditargetkan sebesar Rp. 2.706.833.406.297,00. Gambaran realisasi dan rencana pendapatan daerah tahun 2022-2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 3.4 Realisasi dan Rencana Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022-2027

Kode	Uraian	R. 2022#)	R. 2023#)	R. 2024#)	R.2025#)	APBD 2026	Rencana 2027
4	PENDAPATAN DAERAH	2.587.693.432.935	2.672.891.835.275	2.769.790.059.107	2.870.672.325.035	2.719.689.796.665	2.706.833.406.297
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	358.048.103.989	339.095.872.692	372.119.407.091	528.101.636.571	553.420.820.665	589.940.593.297
4.1.01	Pajak Daerah	146.179.152.569	165.852.621.12	180.723.655.751	320.477.874.453	336.328.350.000	364.809.577.276
4.1.02	Restribusi Daerah	17.152.918.048	18.784.804.890	148.686.406.479	152.677.342.236	180.955.878.85	185.701.624.971
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.641.433.357	21.741.480.54	23.716.628.018	27.345.694.197	21.188.191.751	23.307.010.926
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	176.074.600.015	132.716.966.134	18.992.716.843	27.600.725.685	14.948.400.056	16.122.380.124
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.214.576.328.946	2.319.295.962.583	2.384.470.652.016	2.329.170.688.464	2.153.228.976.000	2.103.852.813.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.982.237.746.675	2.085.460.339.174	2.384.470.652.016	1.802.928.382.917	2.043.514.183.000	1.994.138.020.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-		
4.2.03	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	232.338.582.271	233.835.623.409	254.621.067.438	152.205.906.963	109.714.793.000	109.714.793.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.069.000.000	14.500.000.00	13.200.000.000	13.040.000.000	13.040.000.000	13.040.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	15.069.000.000	14.500.000.000	13.200.000.000	13.040.000.000	13.040.000.000	13.040.000.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0	0	0	0

Sumber : Proyeksi Pendapatan BPPKPAD. Tahun Rencana 2027Keterangan
#) diolah dengan melakukan restrukturisasi sesuai PP-12/2019 *) An-Audit



3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, serta Urusan Pemerintahan Penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Secara umum, kebijakan keuangan daerah tahun 2027 diarahkan pendanaan program pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Pemenuhan Belanja wajib (*mandatory spending*) dalam APBD memedomani pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional; diantaranya:
 - a. Pendidikan (20%) dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD tahun anggaran berkenaan dan telah memenuhi sebesar 30,33%;
 - b. Belanja pegawai di luar tunjangan guru mendekati diangka 30% (tiga puluh persen) dari Belanja Daerah;
 - c. Pemenuhan belanja infrastruktur pelayanan publik mendekati 40% (empat puluh persen);
 - d. Belanja Wajib yang didanai dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditentukan penggunaannya.
 - e. Belanja mengikat dari Opsen PKB dan BBNKB yang diperuntukan jalan dan perlengkapan jalan dikisaran 74,56%;
2. Prioritas belanja program pembangunan daerah antara lain:
 - a. Pemenuhan belanja yang mendukung visi misi Bupati Klaten;
 - b. Pemenuhan belanja yang merupakan 10 Program Prioritas Bupati Klaten;
 - c. Pemenuhan pendanaan dalam rangka belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pada 6 urusan wajib pelayanan dasar;
 - d. SDG's (pengurangan kemiskinan) dan sinkronisasi prioritas program/ kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;



- e. Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah;
 - f. Pendanaan Kelurahan yang secara alokasi secara kumulatif telah mendekati batas minimal Dana Desa terendah di Kabupaten Klaten. sedangkan dalam hal peruntukan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan
3. Pemenuhan belanja *Universal Health Coverage* (UHC) sebesar 81,54 % dari penerimaan belanja bagi hasil pajak rokok mendasari hasil konsolidasai dengan BPJS Kesehatan;
 4. Pemenuhan belanja Pajak Air Tanah sebesar 10,72% yang difokuskan untuk pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
 5. Pemenuhan belanja dalam rangka meningkatkan optimalisasi opsen PKB dan opsen BBNKB berupa penguatan sinergi antara Pemerintah Kabupaten Klaten dan UPPD Samsat Klaten dalam percepatan penanganan piutang. Kegiatan sinergitas direncanakan sebesar Rp. 1.959.208.248,- dengan peruntukan yaitu:
 - a. Edukasi kepada masyarakat berupa sosialisasi melalui media cetak, digital, maupun langsung dianggarkan sebesar 3,74%
 - b. Fasilitasi layanan kemudahan pembayaran pajak, mendekatkan titik layanan dan penyederhanaan layanan seperti Samsat Budiman, pemberian souvenir dianggarkan sebesar 2,14%
 - c. Fasilitasi penanganan tunggakan/piutang melalui kegiatan Sengkuyung dianggarkan sebesar 6,74%
 - d. Pemberian apresiasi kepada masyarakat berupa *reward* untuk Wajib Pajak, Bumdes, dan Koperasi dianggarkan sebesar 48,41%
 - e. Penyediaan sarana prasarana layanan pajak seperti komputer, printer, ATK, genset dianggarkan sebesar 15,86%

Kebijakan belanja daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 disusun dengan berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:
 - a. Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja OPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mendekati besaran angka 34,06% ;
 - b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktivitas dengan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan manfaat;



- c. Belanja Subsidi diperuntukan kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah lainnya. badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah tahun 2027 antara lain digunakan untuk pembiayaan BOSDa, pendidikan umum dan keagamaan, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan, organisasi olahraga, kebudayaan, serta hibah kepada partai politik dan lembaga sosial kemasyarakatan;
 - e. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset. Belanja modal sebagian besar berada pada urusan Pendidikan. Kesehatan dan Pekerjaan Umum.
3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
 - 1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - 3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat,



4. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa), Belanja transfer tahun 2027 dirinci atas jenis:
- a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/ kota;
 - b. Belanja Alokasi Dana Desa lebih dari 10 % dari proyeksi pendapatan Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum;
 - c. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan,
 - d. Penggunaan Dana Desa difokuskan untuk mendukung pengembangan Desa Mandiri serta penyelesaian beberapa isu dan permasalahan prioritas daerah serta permasalahan lainnya diantaranya penurunan stunting dan kemiskinan

Rencana belanja daerah di tahun 2027 diasumsikan dengan berpedoman Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 dan pada program prioritas kepala daerah terpilih serta hasil analisa kebutuhan setiap Perangkat Daerah di Tahun rencana 2027 Gambaran realisasi dan rencana belanja tahun 2022-2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5 Realisasi dan Rencana Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022-2027

Kode	Uraian	R. 2022#)	R.TA 2023#)	R.TA 2024#)	TA 2025#)	APBD 2026#)	Rencana 2027*)
5	BELANJA DAERAH	2.527.619.332.474	2.843.755.495.798	2.846.943.837.640	2.754.087.278.661	2.969.658.354.566	2.837.155.274.275
5.1	BELANJA OPERASI	1.619.377.441.227	1.813.918.311.416	1.907.987.444.311	1.891.553.526.262	2.168.032.110.152	1.964.916.973.582
5.1.01	Belanja Pegawai	965.541.425.166	974.218.788.878	1.043.577.278.123	1.112.234.078.658,	1.315.185.692.044	1.202.604.547.310
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	583.404.693.292	734.742.952.742	748.141.399.634	709.154.626.987	783.069.344.108	694.531.016.742
5.1.03	Belanja Subsidi	1.795.750.000	1.907.074.332	1.249.916.001	1.401.182.046	2.000.000.000	2.000.000.000
5.1.04	Belanja Hibah	57.905.772.769	89.978.195.464	104.633.550.553	61.684.838.571	61.225.474.000	61.561.409.530
5.1.05	Belanja Bantuan Sosial	10.729.800.000	13.071.300.000	10.385.300.000	7.078.800.000	6.551.600.000	4.220.000.000
5.2	BELANJA MODAL	246.670.020.742	295.594.876.519	273.582.426.518	185.757.329.976	223.598.007.978	236.509.312.368
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.495.352.100	657.130.800	605.500.000	934.082.000	10.651.547.625	16.829.636.000
5.4	BELANJA TRANSFER	653.777.793.405	733.585.177.063	664.768.466.811	675.842.340.423	567.376.688.811	618.899.352.325
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	16.621.066.005	18.057.136.463	20.490.965.311	31.466.719.039	36.745.401.811	55.051.120.225
5.4.03	Belanja Bantuan Keuangan	637.156.727.400	715.528.040.600	644.277.501.500	644.375.621.384	530.631.287.000	563.848.232.100

Sumber : Analisa Bapperida Kab. Klaten. 2026

Keterangan

#) diolah dengan melakukan restrukturisasi sesuai PP-12/2019

*) Masih bersifat proyeksi mendasari analisa kebutuhan 2026



3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk menjaga kesinambungan fiskal sekaligus mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah. Pembiayaan daerah berfungsi sebagai instrumen untuk menutup defisit anggaran, menjaga stabilitas pelaksanaan program pembangunan, serta memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah melalui investasi jangka Panjang. Pembiayaan daerah meliputi seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya terdiri dari SiLPA terikat yang peruntukannya pada RSUD Bagas Waras dan 34 Puskesmas sedangkan SiLPA bebas diperuntukan menutup defisit dari belanja daerah dengan mempedomani trend setiap tahunnya. Sedangkan pada komponen akun Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan untuk Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp. 20.000.000.000,- untuk persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak serta pada pos penyertaan modal dialokasikan pada Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku digunakan untuk memperkuat kapasitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara ringkas realisasi dan rencana pembiayaan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022-2027 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6 Realisasi dan Rencana Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2022-2027

Kode	Uraian	R. 2022*)	R. 2023#)	R. TA 2024*)	TA 2025#)	TA 2026#)	Rencana 2027
6	PEMBIAYAAN						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	493.720.575.841,28	529.593.676.302	364.430.015.779	287.275.617.246	269.968.557.901	159.991.867.978
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	493.720.575.841,28	529.593.676.302	319.430.015.779	287.275.617.246	269.968.557.901	159.991.867.978
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0	0	45.000.000.000			
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	24.201.000.000,00	39.300.000.000	0	6.000.000.000	20.000.000.000	29.670.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000,00	15.000.000.000	0			20.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	9.201.000.000,00	24.300.000.000	0	6.000.000.000	20.000.000.000	9.670.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	469.519.575.841,28	490.293.676.302	364.430.015.779	281.275.617.246	249.968.557.901	130.321.867.978

Sumber : Analisa Bapperida Kabupaten Klaten. 2026
Keterangan
#) diolah dengan melakukan restrukturisasi sesuai PP-12/2019
*) Audited



Secara makro, proyeksi perubahan kerangka keuangan daerah pada RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2027 sebagaimana disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.7 Proyeksi Ringkasan Kerangka Keuangan Daerah pada RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2027

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	2.706.833.406.297
4.1	Pendapatan Asli Daerah	589.940.593.297
4.1.01	Pajak Daerah	364.809.577.276
4.1.02	Restribusi Daerah	185.701.624.971
4.1.03	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	23.307.010.926
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	16.122.380.124
4.2	Pendapatan Transfer	2.103.852.813.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.994.138.020.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	109.714.793.000
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	13.040.000.000
5	BELANJA DAERAH	2.837.155.274.275
5.1	Belanja Operasi	1.964.916.973.582
5.1.01	Belanja Pegawai	1.202.604.547.310
5.1.02	Belanja Barang Jasa	694.531.016.742
5.1.04	Belanja Subsidi	2.000.000.000
5.1.05	Belanja Hibah	61.561.409.530
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.220.000.000
5.2	Belanja Modal	236.509.312.368
5.3	Belanja Tidak Terduga	16.829.636.000
5.4	Belanja Transfer	618.899.352.325
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	55.051.120.225
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	563.848.232.100
SURPLUS/(DEFISIT)		(130.321.867.978)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	159.991.867.978
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	159.991.867.978
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	29.670.000.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	20.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	9.670.000.000
PEMBIAYAAN NETO		130.321.867.978
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		0

Sumber : Analisa Bapperida Kab. Klaten, 2026
Keterangan
#) diolah dengan melakukan restrukturisasi sesuai PP-12/2019



3.2.4. Alternatif Pendanaan Melalui Keterlibatan Dunia Usaha

Pembangunan daerah pada era keterbatasan kapasitas fiskal tidak lagi hanya bertumpu pada pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Paradigma pembangunan saat ini menuntut adanya kolaborasi multipihak (*collaborative governance*) yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi, media, dan komunitas sebagai mitra strategis dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan menjadi salah satu instrumen pendanaan alternatif yang memiliki potensi besar dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Kabupaten Klaten telah membentuk Forum CSR sebagai wadah koordinasi antara pemerintah daerah dengan dunia usaha dalam menyinergikan program-program tanggung jawab sosial perusahaan dengan prioritas pembangunan daerah. Forum ini diharapkan mampu menjadi media komunikasi, koordinasi, sinkronisasi, serta integrasi berbagai program CSR agar lebih tepat sasaran, tidak tumpang tindih, serta memberikan dampak yang lebih luas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan Forum CSR menunjukkan tren yang cukup positif. Jumlah perusahaan yang bergabung meningkat dari 57 perusahaan pada tahun 2020 menjadi 110 perusahaan pada tahun 2026, atau meningkat hampir dua kali lipat dalam kurun waktu enam tahun. Kondisi tersebut menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran dunia usaha terhadap pentingnya kemitraan pembangunan daerah. Namun demikian, peningkatan jumlah anggota Forum CSR belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan perusahaan yang aktif melaporkan pelaksanaan program CSR. Dari sekitar 150 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Klaten, rata-rata perusahaan yang menyampaikan laporan CSR setiap tahun masih berada pada kisaran 17–21 persen, sehingga masih terdapat potensi kontribusi yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal

Tabel 3.8 Laporan Perkembangan Kontribusi Dunia dalam Prioritas Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten Tahun 2020-2026

Tahun	Perusahaan	Perusahaan yang Tergabung dalam Forum CSR	Perusahaan yang Melaporkan	Kontribusi CSR
2020	150	57	26	10.388.405.997
2021	150	57	26	13.858.255.612
2022	150	72	25	14.402.583.632
2023	150	84	16	11.568.603.800
2024	150	96	32	13.453.326.918
2025	150	103	25	14.630.248.064
2026*	150	110	8	354.400.500

Catatan : Data tahun 2024-2026 masih data sementara karena di tahun 2026 masih ada perusahaan yang melaporkan kegiatan tahun 2024

Apabila diasumsikan seluruh perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Klaten aktif melaksanakan program CSR dengan kontribusi rata-rata sebagaimana perusahaan yang telah bergabung dalam Forum CSR, maka potensi pendanaan alternatif diperkirakan dapat meningkat hingga lebih dari **Rp20 miliar per tahun**. Potensi tersebut dapat menjadi sumber pembiayaan



strategis untuk mendukung berbagai program prioritas daerah, khususnya yang bersifat pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berbasis komunitas.

Selain CSR konvensional, peluang pendanaan alternatif juga semakin terbuka melalui implementasi prinsip *Environmental, Social and Governance* (ESG), program TJSL BUMN, kemitraan investasi sosial, filantropi perusahaan, maupun skema pembiayaan bersama (*blended financing*). Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki peluang untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD secara legal, transparan, dan berkelanjutan, disisi lain prioritas pembangunan yang berpotensi didukung CSR antara lain:

Tabel 3.9 Prioritas Pembangunan yang Berpotensi Didukung CSR

No	Bidang	Program Unggulan
1	Pengentasan Kemiskinan	RTLH, bantuan sosial produktif, pemberdayaan keluarga miskin
2	Pendidikan	Beasiswa, digitalisasi sekolah, laboratorium, perpustakaan
3	Kesehatan	Penurunan stunting, sanitasi, air bersih, posyandu
4	Infrastruktur	Jalan lingkungan, penerangan jalan, ruang terbuka hijau
5	Lingkungan Hidup	Pengelolaan sampah, penghijauan, konservasi mata air
6	Ekonomi	UMKM naik kelas, inkubasi bisnis, pelatihan tenaga kerja
7	Pariwisata	Penataan destinasi wisata, desa wisata, ekonomi kreatif
8	Ketahanan Pangan	Pertanian modern, irigasi tersier, pemberdayaan petani

Sumber: Forum CSR Kab. Klaten 2026

Untuk mengoptimalkan kontribusi dunia usaha dalam pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Klaten perlu mendorong transformasi Forum CSR dari sekadar wadah koordinasi menjadi platform kemitraan pembangunan daerah. Pendekatan ini dilakukan melalui penguatan regulasi, penyusunan bank program pembangunan, digitalisasi tata kelola CSR, pemberian penghargaan kepada perusahaan yang berkontribusi, serta integrasi pendanaan CSR ke dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 3.10 Proyeksi target kontribusi CSR dalam Pembangunan Daerah

No	Uraian	Target Tahun 2027
1	Jumlah Perusahaan yang Tergabung dalam Forum CSR	116,00
2	Perusahaan yang Melaporkan	31,00
3	Kontribusi CSR	14.630.248.064

Sumber: Forum CSR Kab. Klaten 2026.



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta rumusan prioritas dan sasaran Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2027 mengacu pada permasalahan dan isu strategis yang didasarkan pada hasil analisis terhadap: 1) hasil evaluasi RKPD tahun 2025; 2) Isu strategis Daerah; 3) Prioritas dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah RKP Tahun 2027; 4) Prioritas dan sasaran RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027; dan 5) Arah Kebijakan Tahun 2027 dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 serta visi-misi dan program strategis Bupati Klaten periodisasi 2025-2030.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jangka Menengah

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2027 merupakan bagian integral dari tahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2025–2029. RKPD Tahun 2027 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang berfungsi untuk menjabarkan arah kebijakan, sasaran, serta prioritas pembangunan daerah pada tahun ketiga pelaksanaan RPJMD, dengan tetap memperhatikan dinamika lingkungan strategis, capaian kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, serta isu-isu strategis yang berkembang di tingkat daerah, regional, dan nasional.

Sasaran pembangunan daerah Tahun 2027 dirumuskan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025–2029, dengan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya serta kondisi dan isu strategis daerah. Visi Bupati periode 2025-2029 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Klaten yaitu **“Mewujudkan KLATEN yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”**. Makna yang terkandung dalam Visi, sebagai berikut:

MAJU, yang artinya sumber daya manusia yang berkualitas dengan SDM yang unggul, produktif, dan berbudaya akan mengakselerasi pembangunan Klaten yang berdaya saing.

SEJAHTERA, mengandung makna Adil Makmur sebagaimana cita-cita nasional dalam Pembukaan UUD 1945 yang dimaknai bahwa masyarakat mampu memenuhi kebutuhan tanpa kekurangan, baik secara material maupun spiritual.

BERKELANJUTAN, memiliki arti Pembangunan berkelanjutan yang mendasarkan aspek menyeluruh baik prinsip kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial dan pelestarian lingkungan. Dalam rangka upaya pencapaian visi Bupati Klaten Periode Tahun 2025-2030 yang memiliki tagline Bersama Kita MENANGkan KLATEN dengan 6 misi yang telah disesuaikan, di antaranya:



1. **Meningkatkan** kualitas sumber daya manusia menjadi lebih sehat, cerdas, produktif, berdaya saing dan berkepribadian;
2. **Efektivitas** pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan yang menjamin kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
3. **Nilai tambah** ekonomi kerakyatan yang ditingkatkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkeadilan;
4. **Akuntabilitas** penyelenggaraan pemerintahan daerah terus ditingkatkan menuju pemerintahan yang bersih, bebas korupsi dan berkeadaban serta setia pada Pancasila, UUD 1945 dan Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera);
5. **Nilai Daya Saing dan Kemandirian Daerah** berbasis potensi lokal yang terus ditingkatkan didukung pengembangan Klaten sebagai Kabupaten yang *smart*;
6. **Gotong royong** memajukan kebudayaan dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian warisan leluhur.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2025-2029 lebih terarah dan implementatif, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2025-2029 meliputi 3 (tiga) tujuan dengan 6 indikator dan 10 (sepuluh) sasaran dengan 16 indikator, diuraikan pada Tabel berikut:



Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2027

Frase Visi	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2027	Strategi	Kebijakan
MAJU		Tujuan1: Mewujudkan Klaten maju dan berdaya saing	1. Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	4,00		
			2. Tingkat Kemiskinan	%	10,10		
		Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia menjadi lebih sehat, cerdas, produktif, berdaya saing dan berkepribadian	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	79,90	1. meningkatnya kualitas & akses pendidikan; 2. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 3. memperkuat kompetensi & produktivitas angkatan kerja; 4. <i>link and match</i> antara pendidikan, pelatihan & dunia usaha; 5. mengoptimalkan penduduk usia produktif & kelompok rentan, kesetaraan gender	1. Peningkatan akses & mutu pendidikan serta kesehatan dengan melibatkan pihak swasta; 2. pengembangan sistem pendidikan inklusif; 3. melestarikan budaya lokal dalam pendidikan, ekonomi kreatif & pariwisata 4. pengarusutamaan gender diberbagai sektor; 5. memperkuat tata kelola SDM & ketenagakerjaan; 6. pemberdayaan penduduk usia produktif secara inklusif; 7. pelatihan yang <i>link & match</i> dengan kebutuhan industri
			2. Tingkat pengangguran terbuka	%	3,50		
SEJAHTERA	Misi 3: Nilai tambah ekonomi kerakyatan yang ditingkatkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif yang berkeadilan	Sasaran 1.2 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah, pendapatan perkapita masyarakat dan berkurangnya ketimpangan pendapatan	3. Pertumbuhan Ekonomi	%	5,22	1. memperkuat sektor unggulan & ekonomi lokal, UMKM; 2. menumbuhkan lapangan kerja inklusif; 3. mengakselerasi pemerataan ekonomi antar wilayah; 4. memperkuat sistem perlindungan sosial	1. pengembangan sektor-sektor produktif berbasis potensi lokal; 2. penguatan UMKM melalui pembiayaan, pelatihan, pendampingan usaha; 3. memperkuat konektivitas infrastruktur dasar & ekonomi; 4. mendorong investasi & pemerataan lapangan kerja di wilayah tertinggal.
			4. PDRB Per Kapita	Juta Rp	52,58		
			5. Indeks gini	Indeks	0,320		
	Misi 5: Nilai Daya Saing dan Kemandirian Daerah berbasis potensi lokal yang terus ditingkatkan	Sasaran 1.3 : Meningkatnya daya saing ekonomi dan	6. Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	%	2,24	1. meningkatnya kapasitas produksi, adopsi teknologi, perluasan akses pasar; 2. memperkuat perekonomian	1. pengembangan sektor unggulan daerah dengan peningkatan produktivitas, pemasaran & digitalisasi;



Frase Visi	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2027	Strategi	Kebijakan
	didukung pengembangan Klaten sebagai Kabupaten yang smart	potensi lokal daerah	7. Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum	%	9,82	desa,lumbung pangan, koperasi desa; 3. hilirisasi produk unggulan lokal; 4. memperkuat iklim investasi; 5. memperkuat infrastruktur ekonomi.	2. penguatan UMKM & koperasi; 3. peningkatan permodalan & investasi; 4. peningkatan infrastruktur ekonomi & aksesibilitas
			8. Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	6,14		
MAJU	Misi 2: Efektivitas pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan yang menjamin kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Sasaran 1.4 : Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan meningkatnya konektivitas antar wilayah	9. Indeks Infrastruktur	Indeks	73,75	1. meningkatnya kualitas & pemerataan infrastruktur dasar; 2. memperkuat konektivitas wilayah; 3. memperkuat tata kelola penyelenggaraan infrastruktur.	1.pemerataan & peningkatan infrastruktur dasar yang berkelanjutan& ramah lingkungan berbasis kebutuhan; 2. peningkatan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah; 3. optimalisasi alternatif pendanaan & kemitraan dalam pembangunan infrastruktur
			10. Rasio Konektivitas	Rasio	0,125		
		Tujuan 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, dinamis dan berintegritas	3. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85,25		
	Misi 4: Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah terus ditingkatkan menuju pemerintahan yang bersih, bebas korupsi dan berkeadaban serta setia pada Pancasila, UUD 1945 dan Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera)	Sasaran 2.1 : Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	11. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah (AKIP)	Nilai	68,35	1. memperkuat perencanaan, penganggaran, pelaksanaan & pelaporan kinerja yang terintegrasi & berbasis hasil; 2. mengoptimalkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.	1.peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, & pelaporan kinerja secara terintegrasi berbasis hasil; 2. peningkatan kompetensi ASN, SDM & kewirausahaan masyarakat Desa; 3. memperkuat budaya kinerja akuntabel melalui mekanisme reward & punishment bagi perangkat daerah; 3. digitalisasi sistem pemerintahan daerah; 4. optimalisasi pelayanan publik; 5. pembangunan berbasis



Frase Visi	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2027	Strategi	Kebijakan
							pemberdayaan masyarakat & kearifan lokal
		Sasaran 2.2 : Meningkatnya efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah	12. Maturitas SPIP (sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah)	Nilai	3,101	1. memperkuat SPIP terintegrasi pada perangkat daerah; 2. meningkatnya kualitas manajemen risiko pemerintah daerah; 3. meningkatnya kapasitas APIP;	1. pemutakhiran kebijakan & SOP pengendalian intern; 2. integrasi SPIP dengan manajemen risiko & kinerja; 3. peningkatan komitmen pimpinan & ASN terhadap SPIP; 4. monitoring & evaluasi pelaksanaan SPIP; 5. digitalisasi dalam pengendalian intern
BERKELANJUTAN		Tujuan 3: Mewujudkan kondusivitas wilayah dan lingkungan hidup yang lestari	4. Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	86,72		
			5. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	72,71		
			6. Indeks Risiko Bencana	Indeks	73,78		
	Misi 6 : Gotong royong memajukan kebudayaan dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian warisan leluhur	Sasaran 3.1 : Meningkatnya kondusivitas wilayah dan kerukunan antar umat beragama	13. Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	6,90	1. memperkuat dialog antarumat beragama & peran tokoh agama; 2. memperkuat deteksi dini dan pencegahan potensi konflik sosial; 3. mengembangkan pendidikan karakter kebhinekaan	1. penguatan peran pemerintah & seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga kerukunan antarumat beragama serta ketentraman wilayah; 2. pencegahan potensi konflik sosial; 3. penguatan pendidikan, literasi & modernisasi beragama;



Frase Visi	Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	2027	Strategi	Kebijakan
BERKELANJUTAN	Misi 2: Efektivitas pembangunan infrastruktur berkualitas dan berkelanjutan yang menjamin kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan bencana	Sasaran 3.2 : Terwujudnya lingkungan hidup yang Asri dan berkualitas	14. Kontribusi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Ton CO2 Eq	1.569.338,99	1. melindungi ekosistem, pengendalian pencemaran & pengelolaan SDA berkelanjutan; 2. memperkuat regulasi dan pengawasan; 3. imbal jasa lingkungan /PES;	1. peningkatan RTH & keanekaragaman hayati; 2. pengelolaan sampah & limbah berkelanjutan; 3. pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) & efisiensi SDA; 4. penerapan skema <i>Payment for Environmental Services</i> (PES); 5. kolaborasi multipihak dalam tata kelola lingkungan berkelanjutan; 6. penurunan emisi GRK; 7. penguatan kebijakan & regulasi lingkungan hidup.
		Sasaran 3.3 : Terwujudnya ketahanan energi, air dan kemandirian pangan	15. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Pravalence of Undernourishment</i>)	%	8,78	1. memperkuat sistem pendukung ketahanan energi, air & pangan terpadu berkelanjutan; 2. efisiensi energi % pengembangan energi baru terbarukan (EBT); 3. meningkatnya produktivitas pertanian, memperkuat cadangan pangan lokal & pemberdayaan petani	1. diversifikasi sumber energi & energi baru terbarukan (EBT); 2. pengelolaan sumber daya air berkelanjutan; 3. peningkatan produk & produktivitas pertanian; 4. penguatan sistem distribusi & cadangan pangan; 5. pemberdayaan petani & pelaku usaha pangan.
		Sasaran 3.4 : Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim	16. Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,94	1. edukasi kebencanaan & pelibatan aktif masyarakat; 2. meningkatnya sistem peringatan dini & respon tanggap darurat; 3. memperkuat koordinasi dan sinergi penanggulangan bencana;	1. penguatan kebijakan & regulasi dalam manajemen risiko bencana & perubahan iklim; 2. edukasi terhadap peningkatan sistem peringatan dini & kesiapsiagaan masyarakat; 3.penguatan infrastruktur tahan bencana & adaptif terhadap perubahan iklim; 4. restorasi & perlindungan ekosistem; 5. penguatan kapasitas & kolaborasi antar pihak; 6. peningkatan sistem logistik & pemulihan pasca bencana

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2027

Penetapan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Klaten pada Tahun 2027 dilaksanakan secara bertahap dalam mencapai sasaran jangka menengah daerah dengan memperhatikan keterpaduan, sinkronisasi, dan kesinambungan kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Prioritas pembangunan daerah memuat program-program unggulan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah pada tahun rencana. Program prioritas ditetapkan secara selektif berdasarkan tingkat urgensi permasalahan, capaian kinerja pembangunan, serta kemampuan fiskal daerah. Program prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran arah kebijakan kepala daerah dan hasil perumusan teknokratis dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang ditetapkan sebagai daya ungkit strategis dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.

4.2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2027

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2027, arah kebijakan pembangunan nasional menjadi salah satu rujukan utama dalam perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Sinkronisasi kebijakan dilakukan untuk memastikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung pencapaian Prioritas Nasional melalui program, kegiatan, dan subkegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan (8) Prioritas Nasional pembangunan Jangka Menengah yang merupakan implementasi Asta Cita, meliputi:

- a. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM);
- b. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
- c. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- d. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;
- e. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- f. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- g. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;

- h. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 adalah **Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri**. Prioritas Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis seperti halnya proyek strategis nasional. Representasi keberhasilan pembangunan tahun 2027 tergambar pada pencapaian sasaran dan indikator pembangunan, sebagai berikut:

- a. Sasaran Pembangunan 2027
 - 1. Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan:
 - a) Pertumbuhan ekonomi 5,9-7,5%
 - b) GNI per kapita 5.900-5.990 (USD);
 - c) Penurunan Intensitas Emisi GRK 39,57 %;
 - d) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 76,84;
 - 2. Penurunan Kemiskinan:
 - a) Tingkat kemiskinan 6,5-6,00 %;
 - b) Kemiskinan Ekstrem 0 %;
 - c) Rasio gini 0,362-0,367;
 - d) Tingkat Pengangguran Terbuka 4,30-4,87%;
 - 3. Sumber Daya Manusia Berkualitas
 - a) Indeks Modal Manusia 0,575;

4.2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027

Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 difokuskan pada tema pembangunan yaitu **Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi**. Tingkat pencapaian kinerja berbagai aktivitas yang akan dilakukan dalam rangka mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah di Jawa Tengah akan diukur dengan indikator sebagai berikut:

- 1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,30 – 7,00 %;
- 2. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (Pariwisata) sebesar 3,72 %;
- 3. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional sebesar 13,54 %;
- 4. Jumlah Produk Tersertifikasi Halal sebesar 556.618 produk;
- 5. Aset Perbankan Syariah/PDRB sebesar 3,32 %;
- 6. Indeks Zakat Nasional (Provinsi) sebesar 0,68.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap kedua “**Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah**” ini diarahkan pada prioritas daerah dengan fokus strategi sebagai berikut:

- 1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah;
- 2. Peningkatan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan;
- 3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter

Pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 diukur dengan Indikator Kinerja Utama Daerah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027

IKU	Satuan	Target 2027
1. Tingkat Kemiskinan	%	8,51-8,17
2. Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	92,50
3. Indeks Integritas Nasional	Angka	82,25
4. Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	86,80-90,22
5. Otonomi Fiskal Daerah	%	66,80
6. Pertumbuhan Ekonomi	%	5,60–7,40
7. Indeks Modal Manusia	Angka	0,63
8. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,65-4,08

4.2.3. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2027

Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2027 disusun selaras dengan kebijakan pembangunan nasional Asta Cita serta disinergikan dengan tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 yaitu Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi, dengan menitikberatkan pada **Akselerasi Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur** sebagai upaya untuk memperkuat kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, meningkatkan daya saing daerah, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam rangka mengimplementasikan arah kebijakan tersebut, dirumuskan 5 (lima) prioritas pembangunan daerah yang menjadi fokus penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2027 dengan prinsip keterpaduan lintas sektor, lintas wilayah, dan sinergi antar pemangku kepentingan, yaitu:

a. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial;

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemerataan layanan dasar yang inklusif dan berkeadilan.

- 1) Perluasan beasiswa daerah bagi siswa miskin dan berprestasi di tingkat SD hingga perguruan tinggi;

- 2) Peningkatan kualitas guru melalui pelatihan pedagogik dan teknologi pembelajaran digital;
- 3) Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas di wilayah terpencil;
- 4) Pemberian seragam gratis bagi siswa baru;
- 5) Digitalisasi sekolah, penyediaan perangkat TIK dan platform belajar daring;
- 6) Peningkatan sarana-prasarana Puskesmas rawat inap dan mobil layanan kesehatan keliling;
- 7) Layanan kesehatan berbasis aplikasi (*telemedicine*) dan peningkatan sistem rujukan;
- 8) Program promotif dan preventif seperti posyandu digital, deteksi dini penyakit menular dan tidak menular;
- 9) Validasi dan pemutakhiran DTKS secara berkala;
- 10) Perluasan program bantuan sosial berbasis komunitas;
- 11) Pembentukan unit layanan disabilitas dan pendampingan bagi lansia;
- 12) Optimalisasi peran TPPS Kecamatan dalam pencegahan, percepatan penurunan stunting; dan
- 13) Pelaksanaan konvergensi pencegahan, percepatan penurunan stunting di lintas perangkat daerah dan stakeholder terkait.

b. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Investasi

Meningkatkan daya saing daerah dan menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi

- 1) Penguatan Mall Pelayanan Publik dengan sistem OSS yang terintegrasi dan *user-friendly*;
- 2) Promosi investasi berbasis potensi lokal (pertanian, pariwisata, manufaktur ringan) melalui website interaktif dan *expo*;
- 3) Pengembangan kawasan industri mikro dan sentra UMKM berbasis klaster (batik, olahan pangan, logam);
- 4) Pendampingan dan pelatihan UMKM untuk akses ke pasar digital (*ecommerce*, *marketplace* lokal);
- 5) Penguatan ekonomi dan keuangan syariah melalui penguatan halal *value chain* dan penguatan keuangan syariah;
- 6) Penyediaan fasilitas inkubator bisnis untuk pelaku usaha pemula.

c. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial;

Mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan melalui pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan.

- 1) Revitalisasi pasar tradisional menjadi pasar digital dan ramah lingkungan;
- 2) Pengembangan kawasan agropolitan dan hilirisasi produk pertanian;
- 3) Pembangunan jalan usaha tani, embung, dan saluran irigasi teknis serta pembangunan dan optimalisasi lumbung pangan desa sebagai pusat cadangan dan distribusi pangan lokal untuk mendukung ketahanan pangan;
- 4) Rehabilitasi dan pembangunan sekolah, puskesmas, serta fasilitas sosial lainnya;

- 5) Program bedah rumah untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- 6) Pengembangan kawasan permukiman berbasis tata ruang dan aman bencana;
- 7) Pemeliharaan dan pembangunan jalan kabupaten dan jembatan penghubung desa;
- 8) Peningkatan transportasi umum dan fasilitas pejalan kaki yang inklusif;
- 9) Peningkatan infrastruktur penunjang kawasan geopark seperti akses jalan, pusat informasi geowisata, dan fasilitas edukatif;
- 10) Kolaborasi riset geologi dan lingkungan dengan perguruan tinggi untuk mendukung validasi ilmiah kawasan geopark;
- 11) Meningkatkan ketahanan dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim melalui penguatan mitigasi, adaptasi, dan pengelolaan risiko secara berkelanjutan;
- 12) Penyediaan infrastruktur yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan tangguh bencana guna mendukung keselamatan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah.

d. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah;

Mengembangkan budaya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

- 1) Fasilitasi riset terapan oleh akademisi dan lembaga penelitian lokal untuk sektor unggulan daerah;
- 2) Peningkatan kapasitas ASN dan masyarakat dalam inovasi pelayanan publik (klinik inovasi daerah);
- 3) Insentif bagi desa atau OPD yang berhasil menciptakan inovasi pelayanan masyarakat;
- 4) Pengembangan Technopark atau inkubator UMKM berbasis potensi unggulan (agro, energi, digital);
- 5) Peluncuran platform digital “Klaten Inovatif” untuk menampung gagasan, kolaborasi, dan kompetisi inovasi tingkat daerah;
- 6) Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif terhadap pelayanan publik;
- 7) Memastikan pelaksanaan pelayanan publik yang efisien dan akuntabel serta berbasis data dan informasi.
- 8) Pengawasan dan pembinaan tata kelola administratif Desa/Kelurahan yang berbasis teknologi dan inovasi;
- 9) Manajemen Pengelolaan SDM yang akuntabel sehingga mampu menciptakan yang berdaya saing, berintegritas dan inovatif

e. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah

Mengembangkan pariwisata berkelanjutan dengan prinsip ekonomi syariah

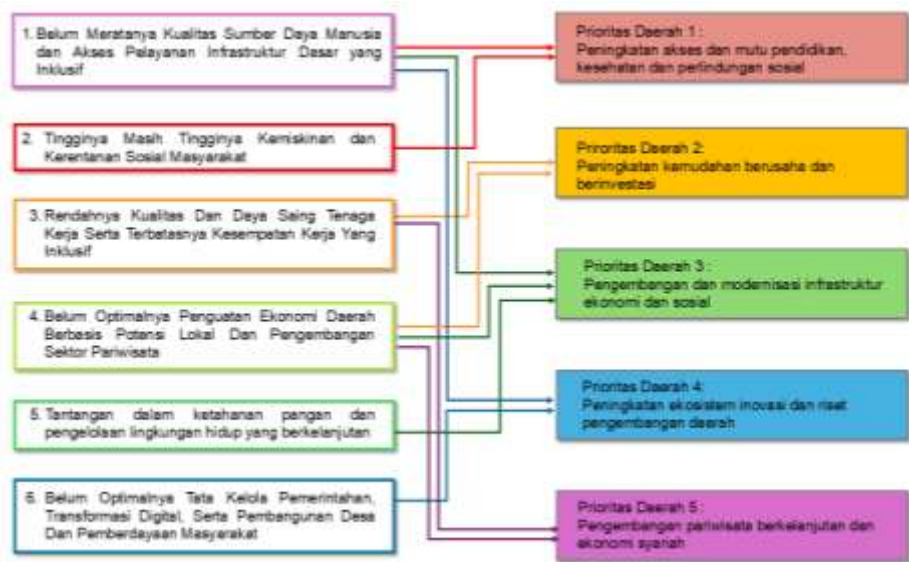
- 1) Pengembangan Geopark berbasis potensi kawasan Gunung Merapi sebagai bagian dari jaringan geopark nasional/global, yang mendukung konservasi, edukasi, dan pengembangan ekonomi lokal;
- 2) Penyusunan masterplan pengembangan Geopark Gunung Merapi Klaten, termasuk zonasi konservasi, edukasi, dan pariwisata dan pariwisata secara terpadu dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan;

- 3) Pemasaran dan promosi Geopark sebagai destinasi wisata edukatif serta integrasi dengan produk UMKM lokal khususnya produk bersertifikasi halal sehingga mendukung tumbuhnya ekosistem ekonomi syariah;
- 4) Pelatihan pemandu lokal dan pemberdayaan masyarakat sekitar geopark untuk pengembangan geowisata berbasis komunitas dengan penerapan prinsip syariah seperti keadilan, keberlanjutan dan kemaslahatan bersama;
- 5) Penguatan Lembaga dan SDM pendukung ekosistem halal serta penguatan kemitraan ekosistem halal untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan;
- 6) Penguatan Ekonomi Syariah melalui pengembangan kelembagaan keuangan mikro syariah, fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM, promosi pariwisata halal, serta integrasi produk lokal ke dalam rantai nilai pariwisata berkelanjutan.

Penetapan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2027 dimaksudkan untuk menyelaraskan pelaksanaan 10 (sepuluh) Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Klaten sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029, agar terimplementasi secara efektif, terukur, dan terintegrasi melalui program, kegiatan, dan subkegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. 10 (sepuluh) Program Prioritas Bupati Wakil Bupati tersebut disusun sebagai instrumen strategis pencapaian sasaran pembangunan daerah, yang berfokus pada :

- 1) Dalam Alus, Padang dan Banyu Lancar;
- 2) Pupuk Murah, Mudah dan Insentif untuk Petani;
- 3) Modal Usaha 15 juta setiap karang taruna desa
- 4) Bela beli produk UMKM, Perizinan Mudah dan Perluasan Lapangan Kerja;
- 5) Gratis berobat, Pendidikan dan Sembako hanya dengan KTP
- 6) Internet Gratis sampai Desa;
- 7) Program Insentif (Guru ngaji, Guru Honorer, Penjaga tempat ibadah, Kader Posyandu, PKK, Hansip, PKUB, Relawan, RT dan RW)
- 8) Satu Desa satu fasilitas olahraga;
- 9) Lingkungan Asri, sampah teratasi;
- 10) Pembangunan Creative Hub dan Gedung Kesenian.

Konsistensi antara prioritas daerah dengan isu strategis RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2027 menunjukkan bahwa penetapan prioritas pembangunan daerah dirumuskan secara terarah untuk menjawab isu-isu strategis pembangunan daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan Tahun 2027 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.



Gambar 4.1 Konsistensi Antara Prioritas Daerah dengan Isu Strategis RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2027

Perumusan prioritas di atas diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2027 serta menjawab isu strategis permasalahan daerah yang dirumuskan dalam target sasaran makro daerah tahun 2027, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Klaten Tahun 2027

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target RKPD 2027	Target Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Klaten
1. Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	4,00	-
2. Tingkat Kemiskinan	%	10,10	10,10 – 9,80
3. PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	52,58	-
4. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85,25	-
5. Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	6,90	-
6. Kontribusi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	TonCO ₂ eq	1.569.338,99	-
7. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	72,71	-
8. Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	79,90	79,90
9. Indeks Infrastruktur	Indeks	73,75	-
10. Pertumbuhan Ekonomi	%	5,22	4,73 – 6,58

Sumber : Berita Acara Rakortekrenbang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026
Catatan : Tanda “-” menunjukkan bahwa indikator terkait tidak dibahas/ditetapkan dalam Rakortekrenbang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

4.3. Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kebijakan Nasional Dan Provinsi

Prioritas Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan dan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan nasional serta pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Penyelarasan ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan perencanaan dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan secara efektif pada tingkat nasional, provinsi, dan daerah.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2027 disusun selaras dengan delapan Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025–2029 serta Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027. Keselarasan tersebut diwujudkan melalui penetapan prioritas daerah yang mengakomodasi arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 4.4 Keselarasan Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2027

Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2027
PN-1 Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM	PP-1 Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah	PD-1 Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial;
		PD-4 Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah
PN-2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	PP-2 Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berbasis Lingkungan melalui Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah	PD-2 Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi;
		PD-3 Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial;
		PD-5 Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah
PN-3 Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi	PP-2 Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berbasis Lingkungan melalui Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah	PD-2 Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi;
		PD-3 Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial;
		PD-5 Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah
PN-4 Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas	PP-3 Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	PD-1 Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial;
		PD-4 Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah
PN-5 Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	PP-2 Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berbasis Lingkungan melalui Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah	PD-2 Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi;
		PD-4 Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah
		PD-5 Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah

Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027	Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2027
PN-6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	PP-2 Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berbasis Lingkungan melalui Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah	PD-1 Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial;
	PP-3 Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	PD-2 Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi;
		PD-5 Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah
PN-7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	PP-1 Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah	PD-2 Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi;
		PD-4 Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah
PN-8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta meningkatkan toleransi antarumat beragama	PP-1 Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah	PD-1 Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial;
	PP-2 Penguatan Landasan Perekonomian yang Berdaya Saing, Inklusif dan Berbasis Lingkungan melalui Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah	PD-3 Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial;
	PP-3 Penguatan Landasan Pembentukan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter	PD-5 Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah

Sumber : Analisis Bapperida, 2026

Sasaran Utama Pembangunan (SUP) Tahun 2027 merupakan target kinerja pembangunan nasional yang menjadi acuan dalam penyusunan sasaran pembangunan provinsi dan kabupaten/kota, guna memastikan keterpaduan dan sinergi pencapaian pembangunan secara berjenjang. Keselarasan antara Sasaran Utama Pembangunan (SUP) Tahun 2027, Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Tengah, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2027 sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Keselarasan Sasaran Utama Pembangunan (SUP) Tahun 2027

No	Indikator Sasaran Utama Pembangunan (SUP) Nasional	Target 2027	Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi	Target 2027	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Target 2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,9-7,5	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,60–7,40	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,22
2	GNI per Kapita (USD)	5.900-5.990	PDRB per Kapita (Juta Rp)	56,0-59,8	PDRB per Kapita (Juta Rp)	52,58
3	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	39,57	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	6,69	Penurunan Emisi GRK (TonCO2eq)	1.569.338,99
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	76,84	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	75,78	-	-
5	Tingkat kemiskinan (%)	6,0-6,5	Tingkat kemiskinan (%)	8,51-8,17	Tingkat kemiskinan (%)	10,10
6	Kemiskinan Ekstrem (%)	0,00	-	-	-	-
7	Rasio gini (Angka)	0,362-0,367	Rasio gini (Angka)	0,358-0,363	Indeks Gini (indeks)	0,320
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,87-4,30	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,65-4,08	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,50
9	Indeks Modal Manusia (Angka)	0,58	Indeks Modal Manusia (Angka)	0,63	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	79,90

Sumber : Analisis Bapperida, 2026

Indikator Utama Pembangunan (IUP) Tahun 2027 menjadi acuan dalam penyusunan target pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Klaten. Keselarasan indikator tersebut diperlukan untuk memastikan kontribusi pembangunan daerah terhadap pencapaian target pembangunan nasional dan provinsi secara terukur dan berkesinambungan. Adapun keselarasan IUP Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Klaten disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.6 Keselarasan IUP Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Klaten

No	Indikator Utama Pembangunan (IUP) Provinsi Jawa Tengah	Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kabupaten Klaten	Target RKPD Kabupaten Klaten 2027
A	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	-	-
2	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	-	-
3	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah(Angka)	-	-
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	2,41
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	27,50
6	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	-	-
7	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh/Kapita)	-	-
8	Intensitas Energi Primer (SBM/Rp miliar)	-	-
9	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	9,70
10	Indeks Ketahanan Pangan (Angka)	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	72,71
11	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	-	-
12	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	96,62
13	Persentase Kondisi Baik Infrastruktur Tampung Air Kewenangan Provinsi (%)	-	-
14	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi (Angka)	Indeks kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten/kota (indeks)	15,986
15	Persentase Sungai Kondisi Baik Kewenangan Provinsi (%)	-	-
16	Indeks Risiko Bencana (Angka)	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	74,280
17	Persentase Penurunan Emisi GRK	Kontribusi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	
	- Kumulatif (%)	- Kumulatif (TonCO2eq)	1.569.338,990
	- Tahunan (%)	-	-
B	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		
1	Tingkat Kemiskinan (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	10,10
2	PDRB per Kapita (Juta Rp)	PDRB per Kapita (Juta Rp)	52,58
3	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,22
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,50
5	Rasio Gini (Angka)	Indeks Gini (Indeks)	0,320
6	Indeks Modal Manusia (Angka)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,90
7	Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	78,09

No	Indikator Utama Pembangunan (IUP) Provinsi Jawa Tengah	Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kabupaten Klaten	Target RKPD Kabupaten Klaten 2027
8	Angka Kematian Ibu (per 100.000 KH)	Jumlah Kasus Kematian Ibu (Kasus)	10,00
9	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita (%)	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita (%)	17,60
10	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	85,00
11	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	85,00
12	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	99,30
13	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca (%)	Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	
14	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi (%)	a. Literasi Membaca SD/Sederajat (%)	75,66
15	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca (%)	b. Literasi Membaca SMP/Sederajat (%)	83,43
16	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi (%)	c. Numerasi SD/Sederajat (%)	66,83
		d. Numerasi SMP/Sederajat (%)	73,90
17	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (Tahun)	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (Tahun)	9,78
18	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,92
19	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,62
20	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	-	-
21	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	56,57
22	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang Ketenagakerjaan (Orang)	76,00
23	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (Angka)	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (%)	41,57
24	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (Angka)	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) (Indeks)	73,80
25	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Angka)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,13
26	Indeks Kesejahteraan Sosial (Angka)	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) (Indeks)	57,59
27	-	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	100,00
28	-	Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun (%)	94,25

No	Indikator Utama Pembangunan (IUP) Provinsi Jawa Tengah	Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kabupaten Klaten	Target RKPD Kabupaten Klaten 2027
29	-	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/ mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir (%)	22,45
30	-	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/ seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan (%)	100,00
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH		
1	Tingkat Inflasi (%)	Tingkat Inflasi (%)	2,5±1
2	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (Angka)	-	-
3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	-	-
4	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	-	-
5	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	40,86
6	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	3,76
7	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Orang)	248.660
8	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional (%)	-	-
9	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	-	-
10	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	-	-
11	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	4,30
12	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,15
13	Return on Aset (RoA) BUMD (%)	Return on Aset (RoA) BUMD (%)	3,19
14	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	-	-
15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	75,64
16	Kapabilitas Inovasi (Angka)	Kapabilitas Inovasi (Indeks)	2,94
17	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal (Produk)	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal (Produk)	16.811,00
18	Aset Perbankan Syariah/PDRB (%)	-	-
19	Indeks Zakat Nasional (Provinsi) (Angka)	Indeks Zakat Nasional (Indeks)	0,48
20	Indeks Ekonomi Hijau (Angka)	-	-
21	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	-	-
22	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Angka)	Persentase rumah tangga dengan akses internet (%)	84,00
23	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi (Angka)	-	-
24	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB (%)	24,35
25	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	-	-
26	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional (%)	-	-
27	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (%)	97,85
28	Persentase Desa Mandiri (%)	Persentase Desa Mandiri (%)	22,76

No	Indikator Utama Pembangunan (IUP) Provinsi Jawa Tengah	Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kabupaten Klaten	Target RKPD Kabupaten Klaten 2027
29	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap (%)	Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten/kota (%)	84,81
30	Indeks Pelayanan Transportasi (Angka)	-	-
31	Persentase Keterwujudan Penataan Ruang (%)	-	-
32	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,95
33	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	Total dana pihak ketiga pada bank kabupaten/ kota per PDRB	0,96
34	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	-	-
35	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi (Nilai)	-	-
36	Total Kredit/PDRB (%)	Total kredit pada bank milik kabupaten/ kota per PDRB	0,97
37	Inklusi Keuangan (%)	-	-
38	-	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	
39	-	Jumlah pengunjung tempat bersejarah (Orang)	3.725.574,00
40	-	Disparitas harga (%)	12,20
D	ASPEK PELAYANAN UMUM-		
1	Indeks Reformasi Birokrasi (Angka)	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	85,25
2	Indeks Integritas Nasional (Angka)	Indeks Integritas Nasional (Indeks)	78,76
3	Indeks Demokrasi Indonesia (Angka)	Indeks Demokrasi Indonesia (Indeks)	84,84
4	Otonomi Fiskal Daerah (%)	-	-
5	Kapasitas Institusi (Angka)	-	-
6	Indeks Reformasi Hukum (Angka)	Indeks Reformasi Hukum (Indeks)	98,7
7	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Angka)	Indeks SPBE / Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)	1,80
8	Indeks Pelayanan Publik (Angka)	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	4,54
9	Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM (Angka)	-	-
10	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	-	-
11	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (Kategori)	-	-
12	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Jawa Tengah (Kategori)	Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	0,94
13	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) (Angka)	Jumlah Kejadian Konflik SARA (Angka)	0,00
14	Manajemen Risiko Indeks (Angka)	-	-

Sumber : Analisis Bapperida, 2026

Program pembangunan Kabupaten Klaten disusun dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional, termasuk mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Dukungan tersebut diwujudkan melalui integrasi program, kegiatan, dan penganggaran daerah yang selaras dengan prioritas nasional sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 4.7 Dukungan Kabupaten Klaten terhadap Pelaksanaan Program Strategis Nasional Tahun 2027

No	Pro-SN	Proyek/Kegiatan	Outcome Proyek/Kegiatan	Dukungan Kabupaten Klaten
1	Pengentasan Kemiskinan Pengentasan Kemiskinan Pengentasan Kemiskinan	Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Menurunnya Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem	- Melakukan pemutakhiran data sasaran berbasis <i>By Name By Address</i> (BNBA) secara berkala; - Melakukan penyaluran jaminan sosial terintegrasi; - Melakukan pelatihan keterampilan kerja; - Melakukan penguatan kemitraan pelaku usaha dengan industri lokal; - Sinkronisasi penyediaan infrastruktur dasar di desa prioritas penanganan kemiskinan.
		Sekolah Rakyat	Terbangunnya 500 Bangunan Sekolah Rakyat Tahun 2029	- Menyediakan lahan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat; - Memfasilitasi proses perizinan Sekolah Rakyat sebagai tindak lanjut untuk mendukung percepatan pelaksanaan Program Strategis Nasional.
		Pembangunan 3 Juta Rumah	Meningkatnya Akses Rumah Tangga terhadap Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	- Penyusunan dan pengundangan Peraturan Bupati tentang Kemudahan Kemitraan Penyediaan Perumahan MBR dan Insentif Non-Fiskal Pengembang; - Penyelarasan tata ruang perumahan MBR dengan peta LSD; Sosialisasi Multi-Stakeholder mengenai Pembebasan BPHTB dan Penghapusan Retribusi PBG bagi MBR; - Konsolidasi Pelayanan & Monitoring penerbitan PBG khusus MBR.
2	Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan	Irigasi Mendukung Sawsembada Pangan	Terlaksananya Jaringan Irigasi Swasembada Pangan yang Berkelanjutan	- Normalisasi saluran irigasi primer dan sekunder dari sedimentasi pada kawasan sentra padi unggulan; - Optimalisasi Komisi Irigasi (Komir) Kabupaten Klaten - Penyusunan kalender pola tanam bersama; - Pemberdayaan Kelembagaan Petani
		Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)	Meningkatnya Indeks Pertanaman Hasil Cetak Sawah	- Optimalisasi pemanfaatan lahan sawah; - Fasilitasi bantuan alsintan modern; - Pembangunan jalan usaha tani (JUT); Penyediaan pupuk bersubsidi/organik tepat waktu; - Pemurnian benih, perluasan areal tanam (<i>scaleup</i>), dan pendampingan budidaya spesifik untuk varietas Rojolele Srinuk, Srinar, dan Rojolele Delanggu; - Penguatan jejaring pemasaran gabah/beras Rojolele melalui kemitraan dengan swasta, BUMDes, korporasi petani, serta; - Digitalisasi rantai pasok.

No	Pro-SN	Proyek/Kegiatan	Outcome Proyek/Kegiatan	Dukungan Kabupaten Klaten
		Pangan Akuatik	Terwujudnya Ketersediaan Sumber Pangan Akuatik Secara Berkelanjutan sebagai Bentuk Swasembada dan Ketahanan Pangan	- Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Perikanan Air Tawar (Komoditas Nila dan Lele) berbasis kawasan minapolitan pedesaan; - Bantuan benih unggul dan normalisasi saluran air; - Diversifikasi produk olahan berbasis ikan; - Pemberdayaan & Kelembagaan Pembudidaya
3	Kesehatan Untuk Semua Kesehatan Untuk Semua Kesehatan Untuk Semua	Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	Pencegahan dan Penurunan Stunting	- Optimalisasi dan ekspansi sasaran program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) lintas sektor melibatkan TP PKK, PGRI, Dharma Wanita, dan dunia usaha; - Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) menggunakan komoditas lokal perikanan air tawar (seperti nila, lele); - Konvergensi Intervensi Sensitif Lingkungan; Penyelenggaraan forum koordinasi, Musrenbang Tematik Stunting, hingga Rembug Stunting tingkat desa.
		Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Meningkatnya Masyarakat Kelompok Usia Bayi, Balita, Remaja, Dewasa, dan Lansia yang Menerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis sebagai Upaya Deteksi Dini, Pencegahan Penyakit, dan Pengurangan Potensi Beban Anggaran Pengendalian Penyakit	- Screening tumbuh kembang di Posyandu/Puskesmas terintegrasi ILP serta Konsultasi Spesialis Anak Keliling (SPELING) untuk balita dengan indikasi gizi buruk atau stunting; - Penjaringan kesehatan massal di sekolah (indra, gigi, kebugaran); - Skrining PTM (gula darah, tensi) di tempat kerja; SPELING Spesialis Obgyn/Kandungan untuk USG gratis bagi ibu hamil demi menekan Angka Kematian Ibu (AKI); - Pemeriksaan laboratorium sederhana di Posyandu Lansia.
		Jaminan Kesehatan Nasional	Memperkuat Kapasitas JKN dan Pendanaan Kesehatan dalam Mendukung Pembangunan Kesehatan	- Pemetaan & Rekonsiliasi Data Kepesertaan JKN; - Optimalisasi & Diversifikasi Pendanaan (pengalokasian dana Pajak Rokok Daerah dan pemanfaatan DBHCHT sektor kesehatan secara konvergen untuk pembayaran premi JKN dan sarpras faskes); - Digitalisasi antrean faskes (Mobile JKN); - Pengawasan terpadu terhadap kepatuhan perusahaan/industri dalam mendaftarkan pekerjaanya ke segmen Pekerja Penerima Upah (PPU).

No	Pro-SN	Proyek/Kegiatan	Outcome Proyek/Kegiatan	Dukungan Kabupaten Klaten
	Kesehatan Untuk Semua Kesehatan Untuk Semua Kesehatan Untuk Semua	Penuntasan Tuberkulosis (TB)	Tercapainya Penuntasan TBC melalui Peningkatan Upaya Pencegahan TBC, Insentifisasi Penemuan Kasus secara Masif dan Pengobatan TBC sampai Tuntas	- Sosialisasi masif perluasan pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) bagi kontak erat serta imunisasi BCG terjadwal di posyandu; - Pembentukan Tim Pendamping Pasien / Pengawas Menelan Obat (PMO) terlatih; - Penguatan tata kerja Tim Percepatan Penanggulangan TBC (TP2TBC) Kabupaten sesuai mandat Perbup Nomor 27 Tahun 2025.
		Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kualitas Rumah Sakit Tipe atau Kelas D menjadi C melalui Peningkatan Infratraktur dan Fasilitas di Rumah Sakit Daerah	- Pemenuhan Sarpras & Fasilitas Fisik Kelas C sesuai standar Nasional; - Peningkatan Infrastruktur Medis Spesialis; - Tata Kelola & Regulasi Internal Faskes; - Memfasilitasi kemudahan izin operasional pembaruan (upgrade) dari tipe D ke C.
		Makan Bergizi Gratis	Meningkatnya Asupan Gizi dan Pengetahuan Gizi Kelompok Sasaran	- Penyerapan bahan baku menu MBG langsung dari petani dan pembudidaya lokal Klaten; - Kampanye gizi seimbang melalui metode Isi Piringku; - Monitoring Evaluasi & Standar Kecukupan Gizi; - Dinas Kesehatan memberikan pendampingan intensif untuk penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS);
4	Perluasan Akses Pendidikan	Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Sekolah Unggulan Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran	Terpenuhinya Pelayanan Dasar di Bidang Pendidikan	- Rehabilitasi ruang kelas rusak sedang/berat, serta sanitasi sehat ramah anak di jenjang PAUD, SD, dan SMP; - Transformasi ruang kelas konvensional menjadi ruang multimedia interaktif; - Penyediaan Seragam Sekolah Gratis Siswa Baru; - Perluasan wajib belajar PAUD satu tahun pra-sekolah terintegrasi posyandu untuk penapisan stunting dini di desa.
5	Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Inflasi	Pengendalian Inflasi dengan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	- Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM); - Penyaluran Paket Sembako Subsidi; - Optimalisasi hasil panen padi lokal varietas unggul; - Pengawasan jalur distribusi, sidak berkala ke pasar tradisional dan gudang logistik; - Pelaksanaan rapat koordinasi TPID secara berkala.

No	Pro-SN	Proyek/Kegiatan	Outcome Proyek/Kegiatan	Dukungan Kabupaten Klaten
	Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan Ekonomi	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Meningkatnya Peran Koperasi dalam Perekonomian Lokal melalui Pengembangan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih	- Pembentukan dan legalisasi pengurus KDMP di seluruh desa/kelurahan se-Kabupaten Klaten; - Pengembangan 6 gerai inti di tiap KDMP (Sembako, Pupuk, Gas, Apotek Desa, Agen Pembayaran, dan <i>Cold Storage System</i>); - Digitalisasi layanan transaksi keuangan dan manajemen inventori di gerai KDMP; - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola; Mengintegrasikan KDMP dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) lokal; - Pemerintah Desa didorong untuk memfasilitasi penyediaan lahan kas desa strategis/gedung menganggur sebagai kantor gerai KDMP melalui skema sewa murah atau penyertaan modal desa
		Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	- Modernisasi & Optimalisasi TPA Troketon; - Reaktivasi dan optimalisasi TPS3R di tiap desa; - Perluasan gerakan "Pilah Sampah dari Rumah"; - Konservasi & Pelestarian Mata Air (Umbul); Penegakan Hukum & Pengawasan Lingkungan

Sumber : Analisis Bapperida, 2026

Dalam rangka mewujudkan keterpaduan antara kebijakan pembangunan daerah dengan arah kebijakan pembangunan regional, Pemerintah Kabupaten Klaten memperhatikan arah kebijakan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Regional Tahun 2027 sebagai salah satu referensi dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan penganggaran daerah. Sinkronisasi tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional. Adapun keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Klaten dengan Intervensi Pemda KEM-PPKF Regional sebagai berikut:

Tabel 4.8 Keterkaitan Intervensi KEM-PPKF Regional dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2027

Fokus KEM-PPKF Regional	Intervensi Pemda KEM-PPKF Regional	Prioritas Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2027	Sasaran Makro Daerah yang Didukung
Pertumbuhan Ekonomi	Menjaga kualitas belanja sebagai katalis investasi melalui penguatan aspek daya saing yang masih lemah utamanya pada Pasar Produk, Pasar	- Peningkatan kemudahan berusaha dan berinvestasi; - Pengembangan dan modernisasi infrastruktur ekonomi dan sosial;	Pertumbuhan Ekonomi; PDRB per Kapita; Indeks Daya Saing Daerah.

Fokus KEM-PPKF Regional	Intervensi Pemda KEM-PPKF Regional	Prioritas Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2027	Sasaran Makro Daerah yang Didukung
	Tenaga Kerja dan Sistem Keuangan. - Reformasi kebijakan PDD yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah. - Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif misalnya melalui skema KPBU dan skema pinjaman konsesional sebagai <i>tools afirmasi</i> untuk mendukung pembangunan infrastruktur daerah. - Sinergi pendanaan belanja pusat dan daerah untuk mendukung konektivitas.	Peningkatan ekosistem inovasi dan riset pengembangan daerah.	
Penurunan Kemiskinan	<i>Refocusing</i> belanja yang berdampak langsung pada penurunan kemiskinan seperti: (1) penguatan SDM, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan meningkatkan skala usaha, dan formalisasi UMKM, dan (2) belanja dari earmarking TKD diprioritaskan untuk pencapaian SPM layanan publik seperti fasilitas pendidikan yang mapan untuk keluarga rentan. - Pemberian insentif PRDB bagi UMKM untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. - Dukungan optimalisasi peran KD/KMP dalam mengurangi kemiskinan. - Dukungan kemudahan perizinan usaha dan memberikan pinjaman konsesional serta fleksibilitas kredit UMKM. - Dukungan fasilitas pembiayaan kreatif untuk infrastruktur pendidikan.	- Peningkatan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial; - Peningkatan kemudahan berusaha dan berinvestasi.	Tingkat Kemiskinan; IPM; Pertumbuhan Ekonomi.
Pendidikan	- Mengarahkan fokus belanja pendidikan untuk mencegah penurunan kualitas layanan dasar pendidikan. - Memanfaatkan Rapor Pendidikan sebagai dasar perencanaan berbasis data, sehingga alokasi belanja daerah lebih tepat sasaran untuk meningkatkan capaian SPM. - Optimalisasi pemanfaatan skema sinergi pendanaan pusat-daerah serta <i>creative financing</i> untuk mendukung inovasi dan peningkatan kualitas layanan pendidikan, antara lain: KPBU skala kecil-menengah untuk <i>smart school</i>, <i>blended finance vokasi-industri</i> dan Dana Abadi Pendidikan Daerah.	Peningkatan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial.	IPM; Indeks Daya Saing Daerah; Tingkat Kemiskinan.

Fokus KEM-PPKF Regional	Intervensi Pemda KEM-PPKF Regional	Prioritas Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2027	Sasaran Makro Daerah yang Didukung
	Memperkuat <i>link and match</i> pendidikan vokasi agar lulusan terserap secara optimal di dunia kerja dan industri.		
Kesehatan	- Percepatan peningkatan layanan kesehatan melalui pemenuhan layanan dasar dan penguatan akses terhadap fasilitas kesehatan, serta memberikan perhatian pada aspek distribusi tenaga kesehatan dan tenaga medis, serta pengelolaan layanan kesehatan. - Optimalisasi pemanfaatan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan. - Intervensi penanganan stunting dapat difokuskan pada aspek yang masih memerlukan perhatian, yaitu aspek ibu dan bayi dan infeksi penyakit. - Penajaman penggunaan anggaran kesehatan, serta mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing, misalnya melalui skema pinjaman konsesional untuk afirmasi.	Peningkatan akses dan mutu pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial.	IPM; Tingkat Kemiskinan; Kualitas Kesehatan Masyarakat.
Pertanian	- Dukungan belanja daerah untuk meningkatkan produktivitas dan hilirisasi produk hasil pertanian. - Dukungan belanja daerah untuk peningkatan nilai tukar petani. Tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan. - Prioritisasi <i>earmarking</i> PKB dan Opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan sarpras yang mendukung konektivitas produksi dan/atau distribusi pangan. - Optimalisasi sinergi pendanaan dan mendorong akses skema <i>creative financing</i> untuk pengembangan produktivitas dan nilai tambah produksi sektor pertanian.	Pengembangan dan modernisasi infrastruktur ekonomi dan sosial.	Indeks Ketahanan Pangan; Tingkat Kemiskinan; PDRB Per Kapita.
Perikanan	- Belanja daerah untuk meningkatkan produksi perikanan dan hilirisasi hasil produksi perikanan. - Belanja daerah untuk mendukung peningkatan nilai tukar nelayan dan pembudidaya ikan. - Meningkatkan tata kelola pungutan retribusi terkait jasa perikanan. - Optimalisasi sinergi pendanaan dan mendorong akses skema	Pengembangan dan modernisasi infrastruktur ekonomi dan sosial.	Pertumbuhan Ekonomi; PDRB Per Kapita; Peningkatan Pendapatan Masyarakat.

Fokus KEM-PPKF Regional	Intervensi Pemda KEM-PPKF Regional	Prioritas Pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2027	Sasaran Makro Daerah yang Didukung
	<i>creative financing</i> untuk pengembangan nilai tambah produksi sektor perikanan.		

Sumber: Hasil Analisis keselarasan prioritas daerah dengan KEM-PPKF Regional Kabupaten Klaten Tahun 2027

Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah merupakan instrumen sinergi pembangunan yang dilaksanakan oleh kabupaten/kota untuk mendukung pencapaian target pembangunan provinsi. Dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Klaten mengintegrasikan Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah ke dalam Prioritas Daerah Tahun 2027 sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan pembangunan daerah.

Tabel 4.9 Dukungan Kabupaten Klaten terhadap Program Delegasi Provinsi

No	Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2027	Dukungan Kabupaten Klaten
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya: Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center dengan memanfaatkan aset pemerintah kabupaten/ kota	PD-1 Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial	1. Pelatihan tenaga kerja khusus disabilitas (ULD bidang tenaga kerja); 2. Penempatan tenaga kerja disabilitas di industri sesuai kriteria
2	Pembangunan Infrastruktur dan Permukiman Layak Huni: Program “1 KK 1 rumah layak huni”, pengembangan pusat rekreasi, promosi membangun, dan gelanggang olahraga Internasional. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dibagi menjadi 30 % kewenangan kabupaten/ kota dan 20 % desa	PD-3 Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
3	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi: Pelatihan berbasis ISO 37001 untuk ASN dan penyelenggara pemerintah desa bekerjasama dengan aparat penegak hukum (Ombudsman, Kepolisian, Kejaksaan, BPK & KPK)	PD-4 Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan antikorupsi bagi ASN dan aparatur pemerintah desa oleh Inspektorat untuk memperkuat integritas, mencegah tindak pidana korupsi, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.
4	Pelayanan Kesehatan: Layanan kesehatan keliling, puskesmas pembantu dan layanan kesehatan di setiap desa	PD-1 Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial	Opersional pelayanan kesehatan di Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa
5	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir: Pengembangan tambak Ikan nila	PD-1 Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial	1. Penataan kelembagaan Pokdakan di kawasan Minapolitan dan kawasan sentra budidaya ikan melalui metode <i>Smart Fisheries Village/ SFV</i> (Kampung Budidaya); 2. Menghidupkan kembali Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) sebagai upaya penataan

No	Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2027	Dukungan Kabupaten Klaten
			kelembagaan kelompok perikanan di Kabupaten Klaten
6	Sekolah Unggulan: Mendorong sekolah unggulan di setiap kecamatan	PD-1 Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial	Perluasan Kompleks Ruang Kelas Baru, Pembangunan Fasilitas Administrasi dan Penunjang Belajar SMA Negeri 1 Kemalang
7	Rumah perlindungan anak, perempuan dan disabilitas: Dibangun di setiap kecamatan	PD-1 Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial	Implementasi Peraturan Bupati Klaten Nomor 8 Tahun 2024 melalui penguatan kelembagaan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), peningkatan kapasitas layanan perlindungan, serta pengembangan jejaring penanganan kasus perempuan, anak, dan penyandang disabilitas hingga tingkat kecamatan.
8	Pengembangan wisata: Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru	PD-5 Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah	Pembangunan dan Pengembangan Desa Wisata: 1. Pelatihan pengelolaan desa wisata; 2. Pelatihan pemandu wisata ekowisata (desa wisata); 3. Pelatihan kuliner (higienitas sajian kuliner) bagi pelaku wisata di desa wisata
9	BUMDES Berdaya: Kepastian hukum dan bantuan modal usaha bagi setiap Bumdes di Jawa Tengah	PD-2 Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi	Pembinaan dan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes/BUMDesma.
10	Penguatan BPBD dan Tagana: Untuk penanganan bencana berbasis kelompok masyarakat	PD-3 Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial	Penguatan Program KENCANA (Kecamatan Tangguh Bencana) melalui peningkatan kapasitas aparatur kecamatan, relawan dan masyarakat, penyediaan logistik kebencanaan, operasional mobil dapur umum, pelatihan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, penguatan sistem koordinasi penanggulangan bencana, serta penanganan tanggap darurat dan pemulihan pascabencana.
11	Cek Kesehatan Gratis	PD-1 Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial	1. Pengadaan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai); 2. Pengadaan alat kesehatan; pelayanan cek kesehatan gratis oleh puskesmas; 3. Pelaksanaan program Speling (Dokter Spesialis Keliling)
12	Penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan di setiap Puskesmas Pembantu	PD-1 Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial	Distribusi redistribusi tenaga kesehatan tenaga medis, pengadaan CPNS/PPPK, untuk ABK pengajuan rekomendasi unit pembina melalui aplikasi data Rencana Kebutuhan.

No	Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2027	Dukungan Kabupaten Klaten
13	Melahirkan Pemerintahan yang <i>Good Clear Government</i> dan <i>Collaborative Governance</i> melalui peningkatan kesejahteraan serta profesionalitas ASN dan perangkat desa	PD-4 Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah	Pengembangan kompetensi ASN melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, penguatan manajemen talenta, pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan jabatan, serta internalisasi nilai-nilai ASN BerAKHLAK guna mewujudkan aparatur yang profesional, berintegritas, adaptif, dan berorientasi pelayanan.
14	Bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	PD-1 Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial	Penguatan akses terhadap layanan bantuan hukum melalui fasilitasi konsultasi dan pendampingan hukum bagi perangkat daerah, pemerintah desa, serta kelompok rentan termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan tenaga pendidik sesuai kewenangan daerah.
15	Pengembangan 10 titik aglomerasi menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi baru	PD-2 Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi	Pengembangan Rowo Jombor, Geopark Merapi, dan Sport Center sebagai kawasan aglomerasi ekonomi melalui peningkatan infrastruktur, pengembangan destinasi wisata unggulan, penguatan UMKM dan ekonomi kreatif, serta peningkatan investasi dan kunjungan wisatawan.
		PD-5 Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah	
16	Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	PD-1 Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial	Pelindungan dan pemberdayaan anak rentan melalui bimbingan sosial, penguatan kapasitas dan partisipasi anak, serta optimalisasi peran Forum Anak sebagai wadah pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Klaten.
17	Ekosistem ekonomi syariah: Penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	PD-5 Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah	Sosialisasi ekonomi syariah bagi masyarakat, fasilitasi kemudahan akses keuangan pada masyarakat (Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah)
18	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	PD-2 Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi	Fasilitasi pendaftaran dan pendampingan sertifikasi halal, HAKI, P-IRT, ISO, dan TKDN bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan legalitas usaha, kualitas produk, dan daya saing di pasar.
		PD-5 Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah	
19	Peningkatan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	PD-5 Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah	Pelatihan untuk para jagal melalui Juru Sembelih Halal (Juleha)
20	Desa maju dan berdaya: Pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan tim tanggap bencana	PD-2 Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi	Penguatan kemandirian desa melalui pengembangan lumbung pangan desa, optimalisasi Sistem Informasi Desa (SID), serta peningkatan kapasitas Tagana

No	Program Delegasi Provinsi Jawa Tengah	Prioritas Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2027	Dukungan Kabupaten Klaten
			dan relawan bencana di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.
21	Desa mandiri energi: Pengembangan bio gas, <i>mikro hydro</i> dan tenaga surya	PD-3 Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial	-
22	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	PD-2 Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi	Dukungan terhadap program pemberdayaan petani perempuan dilaksanakan melalui penguatan dan fasilitasi kegiatan Kelompok Wanita Tani (KWT)
23	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	PD-5 Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah	Peningkatan kapasitas pengelola desa wisata melalui pelatihan pemasaran digital, pembuatan konten kreatif, dan pemanfaatan media sosial untuk memperluas promosi dan meningkatkan daya tarik destinasi wisata.
24	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM (1 RT-1 Kelompok UMKM)	PD-2 Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi	Peningkatan akses permodalan bagi UMKM melalui fasilitasi subsidi bunga ringan
25	Hilirisasi produk unggulan dengan semangat ekonomi hijau	PD-2 Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Berinvestasi	Pengembangan bank sampah dan ekonomi sirkular
		PD-4 Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah	

Sumber : Analisis Bapperida, 2026

Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Klaten berperan dalam mendukung pencapaian target pembangunan provinsi melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2027. Oleh karena itu, penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2027 dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah guna mewujudkan pembangunan yang sinergis, efektif, dan berkelanjutan. Penyusunan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2027 juga dilakukan melalui penyelarasan target indikator makro pembangunan daerah dengan target pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 4.10 Sinkronisasi Sasaran Indikator Makro Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Klaten Tahun 2027

No	Indikator	Satuan	Target Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Klaten	Target RKPD Kabupaten Klaten 2027
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	79,90	79,90
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,73 – 6,58	5,22
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,60 – 3,00	3,50
4	Tingkat Kemiskinan	%	10,10 – 9,80	10,10

Sumber : Berita Acara Rakortekrenbang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

Dalam rangka mendukung tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 yaitu “*Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi*”, Kabupaten Klaten berkontribusi terhadap pencapaian indikator tematik Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 4.11 Dukungan Pencapaian Indikator Tematik Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator	Satuan	Target Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Klaten	Target RKPD Kabupaten Klaten 2027
Pariwisata				
1	Jumlah DTW Alam yang dikembangkan	Unit	10	10
2	Jumlah Desa/Kampung Wisata Baru yang dicanangkan	Unit	50	50
3	Jumlah Usaha Pariwisata Ramah Muslim yang ditetapkan	Unit	5	5
4	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	7.935.953	7.935.953
5	Jumlah Konten Kreator yang dilatih	Orang	5	5
Ekonomi Syariah				
6	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Produk	16 811	16 811
7	Jumlah RPH/TPH yang Tersertifikasi Halal	Unit	1	1
8	Jumlah Dana Zakat, Infaq, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya yang Dihimpun	Rupiah	9 250.000.000	9 250.000.000
9	Jumlah Penyaluran Pembiayaan Syariah	Rupiah	196 M	196 M
10	Jumlah Tukang Jagal yang Tersertifikat Halal	Orang	2	2

Sumber : Berita Acara Rakortekrenbang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026

4.4. Kebijakan Pembangunan Daerah Berbasis Pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (T-H-I-S)

a. Pusat Pengembangan Kawasan Di Sekitar *Exit* Tol Solo Yogyakarta di Wilayah Kabupaten Klaten.

Pengembangan kawasan di sekitar *exit* Tol Solo – Yogyakarta diarahkan sebagai motor pertumbuhan ekonomi wilayah melalui penguatan fungsi industri, logistik, perdagangan, jasa, pariwisata, serta pusat permukiman yang terintegrasi dengan sistem transportasi regional. Keberadaan jaringan tol strategis ini meningkatkan aksesibilitas, efisiensi distribusi, dan daya saing wilayah, sehingga berpotensi mendorong investasi serta pemerataan pembangunan antarwilayah di Kabupaten Klaten.

1) Kawasan Industri Ceper (*Exit* Tol Ceper)

Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Ceper dengan luas ± 394,05 hektar dikembangkan untuk kegiatan industri manufaktur, pergudangan, dan perkantoran pendukung, yang dilengkapi dengan pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung, meliputi peningkatan kapasitas jalan akses kawasan, jaringan drainase, utilitas dasar, serta sarana dan prasarana keselamatan jalan.

Keberadaan *exit* tol Ceper menjadi keunggulan logistik (*logistics advantage*) yang diharapkan mampu menarik investor, menekan biaya distribusi, serta mempercepat konektivitas antara kawasan industri dengan pusat-pusat ekonomi regional di Solo Raya dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain fungsi industri, *exit* tol Ceper juga diproyeksikan sebagai gerbang masuk wisatawan dari luar daerah menuju Kawasan Wisata Polanharjo dan sekitarnya, sehingga mendorong sinergi antara sektor industri dan pariwisata berbasis ekonomi lokal.

2) Kawasan Industri dan UMKM Barat Klaten (*Exit* Tol Prambanan)

Di sisi barat wilayah Kabupaten Klaten, keberadaan *exit* tol Prambanan diarahkan untuk mendukung pengembangan Kawasan Peruntukan Industri seluas ±214,59 hektar yang berada di Kecamatan Jogonalan dan Prambanan. Pengembangan kawasan ini difokuskan pada industri skala kecil dan menengah, industri kreatif, serta kegiatan pendukung rantai pasok regional. Selain itu, *exit* tol Prambanan juga berfungsi sebagai pengungkit pengembangan UMKM lokal, khususnya di Kecamatan Jogonalan dan Prambanan, melalui penguatan sentra produksi, promosi produk unggulan, serta pengembangan kawasan komersial berbasis pariwisata. *Exit* tol Prambanan memiliki peran strategis sebagai pintu masuk utama wisatawan menuju Kawasan Wisata Prambanan serta kawasan wisata lereng Merapi, sehingga mendukung integrasi sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan perdagangan jasa.

3) Pusat Kegiatan Wilayah di Sekitar *Exit* Tol Ngawen

Kawasan sekitar *exit* tol Ngawen dikembangkan untuk mendukung fungsi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kabupaten Klaten, dengan penguatan peran sebagai pusat permukiman, perkantoran pemerintahan dan swasta, perdagangan, serta jasa skala kabupaten. Pengembangan kawasan ini diarahkan secara terencana untuk menciptakan kawasan perkotaan baru (*urban growth center*) yang berfungsi sebagai penyeimbang pertumbuhan wilayah timur Kabupaten Klaten. Penguatan konektivitas antarwilayah, penyediaan infrastruktur perkotaan, serta penataan ruang yang berkelanjutan di kawasan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong aktivitas ekonomi lokal, serta mendukung pengendalian *urban sprawl*.

b. Pengembangan kawasan Geopark Klaten

Kawasan Geopark Klaten merupakan kawasan strategis berbasis warisan geologi (*geoheritage*), keanekaragaman hayati, dan budaya, yang tersebar di 13 kecamatan, yaitu: Cawas, Bayat, Wedi, Gantiwarno, Prambanan, Jogonalan, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Kalikotes, Trucuk, Klaten Utara, Kebonarum, dan Ngawen, dengan luas total ±29.794,80 hektar. Kawasan ini memiliki potensi besar sebagai pengungkit pembangunan wilayah berbasis konservasi, edukasi, dan ekonomi masyarakat melalui pengembangan geowisata berkelanjutan. Pada Tahun 2027,

pengembangan Kawasan Geopark Klaten dititikberatkan pada tiga pilar utama sebagai berikut:

1) Peningkatan Visibilitas Kawasan Geopark

Visibilitas merupakan faktor kunci dalam menjadikan Geopark Klaten sebagai destinasi geowisata yang dikenali, mudah diakses, dan memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat. Peningkatan visibilitas diarahkan untuk memperkuat identitas geopark, memperluas jangkauan informasi, meningkatkan aksesibilitas, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Kampus Lapangan Geologi Bayat atau Stasiun Lapangan Geologi Prof. R. Soeroso Notohadiprawiro berperan strategis sebagai pusat informasi, pendidikan, dan penelitian kebumian nasional, sekaligus menjadi pusat informasi Calon Geopark Klaten, mengingat sebagian besar warisan geologi berada di Kecamatan Bayat. Penyebarluasan informasi Geopark Klaten dikembangkan melalui media digital, antara lain website resmi dan media sosial, sebagai bagian dari strategi promosi dan edukasi publik.

Aksesibilitas geopark ditingkatkan melalui penyediaan dan peningkatan kualitas jaringan jalan menuju kawasan dan situs geologi, pemasangan penanda lokasi (*signage*), serta penguatan keterhubungan antar-situs. Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui keterlibatan penjaga situs/juru kunci dan komunitas lokal dalam perawatan, perlindungan, serta pemanfaatan berkelanjutan warisan geologi, budaya, dan hayati.

2) Pengembangan Fasilitas dan Infrastruktur Pendukung Geopark

Pengembangan fasilitas dan infrastruktur pendukung Geopark menjadi elemen penting dalam mendukung fungsi Geopark Klaten sebagai kawasan pariwisata edukatif dan pusat pertumbuhan wilayah. Arah kebijakan difokuskan pada peningkatan dan pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas transportasi (terminal dan stasiun), serta sarana pendukung pariwisata yang terhubung dengan seluruh situs geopark. Kampus Lapangan Geologi UGM di Kecamatan Bayat memiliki peran strategis sebagai simpul aktivitas pendidikan, penelitian, dan wisata edukasi, sehingga penguatan konektivitas menuju kawasan ini menjadi prioritas. Pengembangan infrastruktur dilakukan dengan prinsip berkelanjutan, ramah lingkungan, dan selaras dengan rencana tata ruang, guna menjaga kelestarian kawasan geopark.

3) Pendidikan, Penyebaran kesadaran Geopark dan Penelitian

Pengembangan aspek edukasi dan peningkatan kesadaran geopark dilakukan melalui sosialisasi kepada aparaturnya pemerintah daerah, pemerintah kecamatan dan desa, pendidik, tokoh masyarakat, serta tokoh agama. Program edukasi diperluas melalui kegiatan *Geopark Goes to School* dan *School Goes to Geopark* secara lebih masif, serta pembentukan *Youth Geopark Forum* sebagai agen edukasi dan penggerak geopark di kalangan generasi muda.

Muatan lokal Geopark Klaten dirancang untuk diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan, sebagai upaya menanamkan kesadaran konservasi sejak dini. Kampus Lapangan Geologi UGM di Bayat secara rutin menyelenggarakan kuliah lapangan dan ekskursi yang diikuti oleh perguruan tinggi kebumihutan, organisasi profesi, serta sekolah menengah dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan kunjungan langsung ke situs-situs *geoheritage* di sekitar Bayat, yang memperkuat peran Geopark Klaten sebagai laboratorium alam nasional.

c. Pengembangan Jaringan Ekonomi Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan

Pengembangan jaringan ekonomi wilayah Kabupaten Klaten diarahkan untuk memperkuat keterkaitan antarwilayah dan antar-sektor melalui optimalisasi komoditas unggulan dan pengembangan klaster ekonomi daerah. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, memperkuat daya saing UMKM, serta mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Pengembangan jaringan ekonomi wilayah dilaksanakan selaras dengan dokumen peta komoditas unggulan daerah, kebijakan pengembangan klaster industri dan klaster pertanian, serta arah kebijakan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 dalam penguatan ekonomi kerakyatan dan pengembangan kawasan strategis ekonomi.

1) Pengembangan Kawasan Prambanan–Manisrenggo–Kemalang

Kawasan Prambanan–Manisrenggo–Kemalang dikembangkan sebagai klaster ekonomi terpadu berbasis sektor pertanian, industri pengolahan (termasuk UMKM), dan pariwisata, dengan dukungan kedekatan terhadap kawasan wisata nasional dan konektivitas regional. Pada sektor pertanian, komoditas unggulan meliputi padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, kopi, dan aneka sayuran. Pengembangan diarahkan pada peningkatan produktivitas, penguatan rantai pasok, serta integrasi dengan industri pengolahan dan agrowisata.

Sektor industri pengolahan dan UMKM difokuskan pada komoditas industri makanan olahan, gula kelapa/aren, anyam-anyaman, dan batik, yang dikembangkan dalam pola klaster berbasis desa dan sentra produksi. Pada sektor pariwisata, kawasan ini ditopang oleh destinasi kawasan candi, kawasan monumen, agrowisata dan perkebunan, desa wisata, serta destinasi unggulan seperti Kali Talang, Deles Indah, Girpasang, dan Sapu Angin. Pengembangan pariwisata diarahkan untuk memperkuat keterkaitan dengan produk UMKM dan hasil pertanian lokal sebagai bagian dari ekosistem ekonomi wilayah.

2) Pengembangan Kawasan Ceper–Trucuk–Juwiring

Kawasan Ceper–Trucuk–Juwiring dikembangkan sebagai klaster ekonomi berbasis pertanian dan industri rakyat, dengan dukungan penguatan UMKM dan pariwisata berbasis sejarah dan budaya. Sektor pertanian meliputi komoditas unggulan padi, jagung, kedelai, dan tembakau, yang dikembangkan melalui penguatan produksi, pascapanen, serta keterhubungan dengan industri pengolahan lokal. Sektor

industri pengolahan dan UMKM difokuskan pada pengembangan klaster cor logam, lurik, *handycraft*, dan mebel yang telah menjadi identitas ekonomi wilayah, dengan dukungan peningkatan kualitas produk, desain, dan akses pasar. Sektor pariwisata dikembangkan melalui optimalisasi destinasi Sendang Srinongko dan Makam Ronggowarsito sebagai wisata religi dan budaya, yang terintegrasi dengan sentra UMKM dan produk ekonomi kreatif setempat.

3) Pengembangan Kawasan Delanggu–Polanharjo–Tulung

Kawasan Delanggu–Polanharjo–Tulung diarahkan sebagai klaster pertanian pangan dan minapolitan, yang terintegrasi dengan pengembangan pariwisata berbasis sumber daya air dan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan. Sektor pertanian difokuskan pada komoditas unggulan padi, yang didukung oleh pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan air tawar.

Sektor pariwisata meliputi destinasi unggulan Janti Park, OMAC, Umbul Ponggok, Umbul Pelem, Umbul Manten, Umbul Kapilaler, serta berbagai wisata air lainnya yang tersebar di wilayah Polanharjo. Pengembangan pariwisata diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan, daya dukung lingkungan, dan keterkaitan dengan ekonomi lokal. Sektor industri pengolahan dan UMKM dikembangkan melalui penguatan sentra makanan olahan (keripik ikan, abon lele, jenang), industri logam (pande besi), industri handuk, kerajinan tanduk, dan kipas, sebagai bagian dari penguatan rantai nilai lokal.

4.5. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD Untuk RKPD Tahun 2027

Salah satu tahapan dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Penelaahan pokok-pokok Pikiran DPRD, hal ini disebutkan pada beberapa Pasal yaitu Pasal 78, Pasal 153, Pasal 178 dan Pasal 348 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan dokumen strategis untuk menjadi dasar dan pedoman serta arahan rencana pembangunan daerah yang berasal dari berbagai masukan, risalah rapat dengar pendapat dan rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses khususnya konstituen dari masing-masing partai politik untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah daerah yang memuat pandangan dan pertimbangan DPRD

Mendasari dari gambaran umum kondisi daerah dan isu-isu strategis dan permasalahan daerah, tahun 2027 diharapkan dapat lebih fokus pada tahapan pemantapan pencapaian tujuan pembangunan jangka menengah daerah. Prioritas pembangunan tahun 2027 dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD ini diharapkan mampu mendukung pencapaian Visi Kabupaten Klaten yaitu ***Mewujudkan Klaten yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan*** yang kemudian dirumuskan dalam Tema Pembangunan Tahun 2027 yaitu ***“Akselerasi Pembangunan SDM dan Infrastruktur”***

Sedangkan dari rumusan tema tersebut, perlu menyusun program prioritas yang kemudian dijabarkan kedalam kegiatan operasional dengan klasifikasi berdasarkan aspek strategis, meliputi :

1. Aspek Kesejahteraan Sosial, penekanan pada :

- a. Penurunan Tingkat Kemiskinan, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat antara lain :
 - Perluasan cakupan jaminan dan bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu meliputi jaminan siswa miskin, jaminan kesehatan, pendampingan PKH, subsidi listrik maupun perlindungan sosial lainnya.
 - Pemenuhan kebutuhan perumahan melalui bantuan rumah layak huni, akses air minum dan sanitasi bagi rumah tangga miskin.
 - Pemberdayaan masyarakat miskin, melalui keterpaduan antar sektor atau program dan berkelanjutan seperti pemberian ketrampilan, optimalisasi lahan pekarangan, kecukupan pangan dan gizi.
- b. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui kemudahan akses usaha, penguatan sektor-sektor ekonomi perdesaan melalui BUMDes, pengembangan produk unggulan daerah, pemberdayaan IKM/UMKM serta bantuan sarana prasarana produksi dan pemasaran usaha kecil menengah dan koperasi.
- c. Penekanan Tingkat Pengangguran Terbuka, melalui perluasan lapangan kerja, penumbuhkembangan wirausaha baru, peningkatan dan penyiapan kapasitas kompetensi tenaga kerja dengan kerjasama dunia usaha serta penyediaan informasi dan bursa kerja, ataupun melalui pemberian bantuan peratan UMKM/fasilitasi bantuan Pra Kerja.
- d. Peningkatan pemerataan kualitas pendidikan, melalui penyelenggaraan pendidikan non formal, peningkatan sarana prasarana pendidikan, pemerataan pendidik, dan peningkatan kesejahteraan pendidik. Termasuk dalam hal ini adalah perlunya penyediaan tenaga pendidik yang sampai saat ini masih banyak kekurangan atau kekosongan serta peningkatan kapasitas sistem pembelajaran yang inovatif.

2. Aspek Pelayanan Umum, penekanan pada :

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan, melalui pemenuhan kebutuhan sarana prasarana layanan kesehatan, penguatan manajemen dan layanan kesehatan, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, peningkatan perlindungan kesehatan khususnya bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah.
Pemerataan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah baik ditingkat Kabupaten hingga Desa/Kelurahan serta sarana prasarana utilitas umum, melalui pemenuhan ketersediaan infrastruktur yang memadai antara lain jalan, jembatan, jaringan drainase, penyediaan ruang terbuka hijau, pengelolaan persampahan.

Hal-hal lain terkait infrastruktur yang perlu diperhatikan untuk dibangun, dikembangkan dan ditingkatkan, yaitu :

- 1) Peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan khususnya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), termasuk pengembangan lahan TPA agar pengelolaan dapat lebih optimal.
 - 2) Peningkatan dan pengembangan pengelolaan sampah sistem 3 R di setiap wilayah Kecamatan
 - 3) Pembangunan dan penataan Rest Area di sekitar *Exit Tol*
 - 4) Pembangunan *Underpas* atau *fly over* di jalan *By Pass*, khususnya yang melewati perlintasan kereta api di Krapyak, untuk mengurangi kemacetan yang setiap hari sering terjadi.
 - 5) Peningkatan kapasitas akses jalan dan infrastruktur lainnya menuju kawasan wisata serta sentra atau zona industri.
 - 6) Pembangunan *sport center*, termasuk didalamnya lapangan tenis *indoor*.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik, seperti layanan perijinan, pencarian KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Kematian, layanan kesehatan, layanan persampahan dan layanan air bersih.

3. Aspek Daya Saing Daerah, dengan penekanan pada :

- a. Peningkatan Iklim Investasi Daerah melalui kemudahan akses perizinan, penciptaan kondusivitas keamanan dan ketertiban daerah, penerapan kebijakan daerah serta regulasi yang mendukung iklim usaha serta penyediaan informasi investasi dan peningkatan promosi investasi;
- b. Pengembangan sektor-sektor perdagangan, pariwisata, Klaster UMKM dan industri yang dapat mendukung pengembangan ekonomi daerah.
- c. Penguatan Ketahanan Pangan Daerah melalui sektor pertanian dan perikanan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas hasil produksi, penyediaan infrastuktur jalan usaha tani serta jaringan irigasi, peningkatan inovasi pertanian dengan dukungan alat mesin pertanian yang memadai serta mengembangkan system pertanian berkelanjutan berbasis teknologi dan penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan tani guna mendukung terwujudnya kemandirian ataupun kedaulatan pangan;
- d. Pengembangan dan penguatan Produk Unggulan Daerah sebagai *brand image* dan *trademark* Kabupaten Klaten serta memperkuat jargon ***Aku Cinta Produk Klaten***.
- e. Penciptaan dan pengembangan Inovasi yang dapat mengungkit kapasitas pembangunan daerah dan mampu mendorong terciptanya ekonomi berbasis kerakyatan.
- f. Peningkatan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) daerah yang mampu bersaing dalam era dan tantangan kedepan.

4. **Aspek Pemberdayaan Masyarakat**, dengan penekanan pada :
- a. Peningkatan dan penguatan kearifan lokal, melalui pengembangan sosial budaya masyarakat dan potensi lokal.
 - b. Peningkatan dan penguatan kelembagaan masyarakat, melalui pemberian pelatihan ketrampilan, bantuan sosial dan pengembangan usaha-usaha produktif lainnya

Mendasari rumusan tema pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2027 serta jabaran prioritas yang disertai kegiatan operasional tersebut, serta memperhatikan kondisi ekonomi makro nasional, diharapkan pada Tahun 2027 dapat tercapai sasaran makro pembangunan Kabupaten Klaten, yaitu :

Tabel 4.12 Keselarasan Sasaran Makro dengan Pokok-Pokok Pikiran

No	Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Klaten	Satuan	Target 2027	
			RKPD	Pokir DPRD
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,22	6,60 – 7,20
2	Tingkat Kemiskinan	%	10,10	10,50 10,33
3	Inflasi	%	2,5±1	2,5±1
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,50	3,65 – 3,55
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	79,90	79,00 – 80,00
6	PDRB per Kapita	Rp.	52,58 juta	52,58 juta



Tabel 4.13 Keselarasan Sub Kegiatan dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD			URUSAN BIDANG	KODE SUBKEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
ASPEK STRATEGIS	FOKUS PRIORITAS	KEGIATAN				
Aspek Kesejahteraan Sosial	Penurunan Tingkat Kemiskinan	Perluasan cakupan jaminan dan bantuan sosial	Kesehatan	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN
			Sosial	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	DINSSOSP3AKB
		Pemenuhan kebutuhan perumahan	Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	DISPERAKIM
		Akses Air Minum Bagi Rumah Tangga Miskin	Pekerjaan Umum	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	DPUPR
		Akses Sanitasi Bagi Rumah Tangga Miskin	Pekerjaan Umum	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	DPUPR
			Pekerjaan Umum	1.03.05.2.01.0051	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	DPUPR
		Pemberdayaan masyarakat miskin	Sosial	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	DINSSOSP3AKB
			Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2.14.04.2.02.0009	Pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh TPK (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	DINSSOSP3AKB
		Penekanan Tingkat Pengangguran Terbuka	Tenaga Kerja	2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	DISPERINAKER
			Tenaga Kerja	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	DISPERINAKER
			Koperasi dan UKM	2.17.08.2.01.0023	Pembinaan dan Fasilitasi Perkuatan Produk UMKM Pasar Dalam Negeri	DKUKMP
			Penanaman Modal	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP



POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD			URUSAN BIDANG	KODE SUBKEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
ASPEK STRATEGIS	FOKUS PRIORITAS	KEGIATAN				
Aspek Pelayanan Umum	Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan	Peningkatan pemerataan kualitas pendidikan	Pendidikan	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	DINAS PENDIDIKAN
			Pendidikan	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN
			Pendidikan	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN
			Pendidikan	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN
			Pendidikan	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	DINAS PENDIDIKAN
			Pendidikan	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	DINAS PENDIDIKAN
	Peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan	Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana layanan kesehatan	Kesehatan	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	DINAS KESEHATAN
			Kesehatan	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	DINAS KESEHATAN
			Kesehatan	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	DINAS KESEHATAN
		Penguatan manajemen dan layanan kesehatan, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan	Kesehatan	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	DINAS KESEHATAN
			Kesehatan	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	DINAS KESEHATAN
			Kesehatan	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	DINAS KESEHATAN
			Kesehatan	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	DINAS KESEHATAN
			Kesehatan	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	DINAS KESEHATAN
			Kesehatan	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	DINAS KESEHATAN
			Kesehatan	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	DINAS KESEHATAN
			Kesehatan	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	DINAS KESEHATAN
			Kesehatan	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	DINAS KESEHATAN
			Kesehatan	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	DINAS KESEHATAN
			Kesehatan	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	DINAS KESEHATAN



POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD			URUSAN BIDANG	KODE SUBKEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
ASPEK STRATEGIS	FOKUS PRIORITAS	KEGIATAN				
			Kesehatan	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	DINAS KESEHATAN
			Kesehatan	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	DINAS KESEHATAN
			Kesehatan	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	DINAS KESEHATAN
			Kesehatan	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	DINAS KESEHATAN
			Kesehatan	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	DINAS KESEHATAN
			Kesehatan	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	DINAS KESEHATAN
			Kesehatan	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	DINAS KESEHATAN
			Kesehatan	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	DINAS KESEHATAN
			Kesehatan	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	DINAS KESEHATAN
	Pemerataan kualitas dan kuantitas infrastruktur	Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	Kesehatan	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KESEHATAN
		Peningkatkan kapasitas pengelolaan persampahan khususnya di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Pekerjaan Umum	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	DPUPR
		Peningkatan dan pengembangan pengelolaan sampah sistem 3 R disetiap wilayah Kecamatan				DPUPR
		Pembangunan dan penataan Rest Area di sekitar Exit Tol	Pekerjaan Umum	1.03.08.2.01.0034	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	DPUPR



POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD			URUSAN BIDANG	KODE SUBKEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
ASPEK STRATEGIS	FOKUS PRIORITAS	KEGIATAN				
			Pekerjaan Umum	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	DPUPR
		Peningkatan kapasitas akses jalan dan infrastruktur	Pekerjaan Umum	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	DPUPR
			Pekerjaan Umum	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan	DPUPR
			Pekerjaan Umum	1.03.10.2.01.0057	Penggantian Jembatan	DPUPR
			Pekerjaan Umum	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan	DPUPR
			Pekerjaan Umum	1.03.10.2.01.0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar	DPUPR
		Pembangunan <i>sport center</i>	Pekerjaan Umum	1.03.08.2.01.0034	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	DPUPR
	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Pelayananan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	DISDUKCAPIL
				2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	DISDUKCAPIL
	Aspek Daya Saing Daerah	Peningkatan Iklim Investasi Daerah	Kemudahan akses perizinan	PENANAMAN MODAL	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
PENANAMAN MODAL				2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP
Penciptaan kondusivitas keamanan dan ketertiban daerah			PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01.0007	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	DPMPTSP
penyediaan informasi investasi dan peningkatan promosi investasi			PENANAMAN MODAL	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	DPMPTSP
Pengembangan ekonomi daerah		Pengembangan sektor-sektor	Perindustrian	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	DISPERINAKER



POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD			URUSAN BIDANG	KODE SUBKEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
ASPEK STRATEGIS	FOKUS PRIORITAS	KEGIATAN				
		perdagangan, pariwisata, Klaster UMKM dan industri	Koperasi dan UKM	2.17.08.2.01.0023	Pembinaan dan Fasilitas Perkuatan Produk UMKM Pasar Dalam Negeri	DKUKMP
			Perdagangan	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	DKUKMP
			Perdagangan	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	DKUKMP
	Penguatan Ketahanan Pangan Daerah	Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil produksi	Pangan	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	DKPP
			Pangan	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DKPP
		Penyediaan infrastruktur jalan usaha tani serta jaringan irigasi	Pekerjaan Umum	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	DPUPR
			Pekerjaan Umum	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	DPUPR
			Pekerjaan Umum	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	DPUPR
		Peningkatan inovasi pertanian dengan dukungan alat mesin pertanian yang memadai serta mengembangkan system pertanian berkelanjutan berbasis teknologi	Pertanian	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	DKPP
	Pengembangan dan penguatan Produk Unggulan Daerah	Brand image dan trademark Kabupaten Klaten	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07.2.01.0016	Perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	DKUKMP



POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD			URUSAN BIDANG	KODE SUBKEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH
ASPEK STRATEGIS	FOKUS PRIORITAS	KEGIATAN				
	Penciptaan dan pengembangan Inovasi	Penciptaan dan pengembangan Inovasi	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	BAPPERIDA
	Peningkatan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)	Peningkatan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)	KEPEGAWAIAN	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	BKPSDM
Aspek Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan dan penguatan kearifan lokal	Pengembangan sosial budaya masyarakat dan potensi lokal	KEBUDAYAAN	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	DISBUDPORAPAR
	Peningkatan dan penguatan kelembagaan masyarakat	Pemberian pelatihan ketrampilan	Tenaga Kerja	2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	DISPERINAKER
		Pengembangan usaha-usaha produktif lainnya	Koperasi dan UKM	2.17.08.2.01.0023	Pembinaan dan Fasilitasi Perkuatan Produk UMKM Pasar Dalam Negeri	DKUKMP



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2027 disusun sebagai instrumen pendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025–2029, yang diarahkan untuk menjawab permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang telah dirumuskan dan berkembang selama ini. Berbagai permasalahan pembangunan tersebut perlu menjadi perhatian bersama dan ditangani secara berkelanjutan melalui perumusan serta pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang tepat sasaran, efektif, dan terukur.

Upaya penyelesaian permasalahan pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah semata, tetapi memerlukan dukungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, serta stakeholder terkait lainnya. Sinergi dan kemitraan tersebut menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pelaksanaan pembangunan daerah.

Pendanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2027 bersumber tidak hanya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten, tetapi juga didukung oleh sumber pendanaan lainnya, antara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD Provinsi Jawa Tengah, kontribusi badan usaha milik negara dan swasta, serta swadaya masyarakat. Optimalisasi berbagai sumber pendanaan tersebut diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendorong percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025–2029.

5.2. Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2027

5.2.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2027 yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal pada 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar berdasarkan pemetaan usulan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 tercantum pada tabel berikut ini.



Tabel 5.1 Rencana Program dan Kegiatan Penunjang yang Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

No	Urusan Bidang	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
1	Bidang Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	55,000,000
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	25,000,000
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	135,600,000
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	85,000,000
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	10,000,000
				Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	70,000,000
		Pendidikan Dasar	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50,000,000
				Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	55,000,000
				Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	25,000,000
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	344,600,000
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	55,000,000
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	10,951,425,000
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	759,800,000
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	10,000,000
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	10,000,000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	15,000,000,000



No	Urusan Bidang	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	55,000,000
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	344,600,000
				Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	55,000,000
				Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	10,951,425,000
				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	150,000,000
				Pengembangan konten digital untuk pendidikan	10,000,000
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	10,000,000
				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	10,000,000
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	15,000,000,000
2	Bidang Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Balita	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	179,015,800
		Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2,051,414,550
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	33,145,000
		Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2,811,658,375



No	Urusan Bidang	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	296,550,000
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	629,510,000
		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2,406,001,907
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	1,691,837,585
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	85,071,106
		Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	21,695,000
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	27,705,000
3	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2,010,008,000



No	Urusan Bidang	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
				Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	5,000,000
		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	25,000,000
		Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	15,000,000
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	117,800,000
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	66,297,694
				Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	10,000,000
				Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15,000,000
				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	7,500,000
			Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	10,000,000
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	50,000,000
				Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	5,000,000
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	152,000,000
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	222,750,000



No	Urusan Bidang	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
				Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	375,250,000
4	Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	600,000,000
5	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	5,000,000
				Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	5,000,000
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	11,600,000
				Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	4,000,000
		Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	50,000,000
				Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	50,000,000
			Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	8,400,000
				Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	8,400,000
			Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	4,950,000
			Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	7,000,000
				Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	2,650,000



No	Urusan Bidang	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
			Relokasi Program Kabupaten/Kota	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	15,000,000
6	Bidang Sosial	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	15,000,000
				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	215,000,000
				Penyediaan Makanan	5,000,000
				Penyediaan Sandang	155,000,000
				Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	5,000,000
		Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	134,720,000
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	36,540,000
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	574,290,000
				Pemberian Layanan Kedaruratan	20,000,000
				Pemberian Layanan Rujukan	15,660,000
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	15,660,000
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	134,720,000
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	36,540,000
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	574,290,000
				Pemberian Layanan Kedaruratan	20,000,000
				Pemberian Layanan Rujukan	15,660,000
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	15,660,000
		Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	134,720,000
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak	36,540,000



No	Urusan Bidang	Layanan SPM	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp)
			Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	574,290,000
				Pemberian Layanan Kedaruratan	20,000,000
				Pemberian Layanan Rujukan	15,660,000
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	15,660,000
		Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	134,720,000
				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	36,540,000
				Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	574,290,000
				Pemberian Layanan Kedaruratan	20,000,000
				Pemberian Layanan Rujukan	15,660,000
				Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	15,660,000

Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, 2026



5.2.2. Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Alokasi Anggaran dalam Mendukung Proyek Strategis Nasional (ProSN) Kabupaten Klaten Tahun 2027

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (ProSN), Pemerintah Kabupaten Klaten mengintegrasikan berbagai program, kegiatan, subkegiatan, dan alokasi anggaran ke dalam dokumen RKPD Tahun 2027 sesuai dengan kewenangan daerah. Matriks keterkaitan ProSN dengan program pembangunan daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.2 Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Alokasi Anggaran terhadap Proyek Strategis Nasional (ProSN) Kabupaten Klaten Tahun 2027

ProSN/Proyek ProSN	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
1	2	3	4	5	6
Pengentasan Kemiskinan					
Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan Dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem					
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
	1.06.05.2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
	1.06.05.2.02.0006			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.440.400.000
Sekolah Rakyat					
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
	1.06.05.2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
	1.06.05.2.02.0008			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	182.000.000
Pembangunan 3 Juta Rumah					
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
	1.03.08.2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan		



ProSN/Proyek ProSN	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
			Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		
	1.03.08.2.01.0023			Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	571.244.176
	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
	1.04.02.2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota		
	1.04.02.2.03.0004			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	50.000.000
	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			
	1.04.04.2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota		
	1.04.04.2.01.0001			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3.889.102.000
Ketahanan Pangan					



ProSN/Proyek ProSN	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
Swasembada Pangan (Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan)					
	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
	1.03.02.2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	1.03.02.2.02.0021			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1.476.000.000
	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
	3.27.03.2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian		
	3.27.03.2.02.0010			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	3.460.000.000
Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Sawah/Lumbung Pangan/Food Estate)					
	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			
	2.09.02.2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
	2.09.02.2.01.0006	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia (unit)		Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	252.660.000



ProSN/Proyek ProSN	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
Pangan Akuatik					
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
	3.25.03.2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
	3.25.03.2.01.0002			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	75.000.000
Kesehatan untuk Semua					
Pencegahan Dan Percepatan Penurunan Stunting					
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	1.02.02.2.02.0015			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.240.913.605
	1.02.02.2.02.0046			Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	246.054.314
	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	X.XX.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	X.XX.01.2.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	861.904.649
	X.XX.01.2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD		



ProSN/Proyek ProSN	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
	X.XX.01.2.10.0001			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	174.773.310.862
	4.01.01.2.13		Penataan Organisasi		
	4.01.01.2.13.0003			Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	113.062.480
Pemeriksaan Kesehatan Gratis					
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	1.02.02.2.02.0026			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	57.938.794.250
Jaminan Kesehatan Nasional					
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	1.02.02.2.02.0026			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	57.938.794.250
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
	1.06.05.2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
	1.06.05.2.02.0008			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	182.000.000
Penuntasan TBC					



ProSN/Proyek ProSN	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
	1.02.02.2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	1.02.02.2.02.0011			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	2.406.001.907
	1.02.02.2.02.0040			Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	52.510.000
	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
	1.06.05.2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		
	1.06.05.2.02.0006			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3.440.400.000
Makan Bergizi Gratis					
	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
	1.02.04.2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		
	1.02.04.2.04.0001			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	15.216.700

Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, 2026



Berdasarkan hasil pemetaan, Program Strategis Nasional (Pro-SN) dan proyek/kegiatan Pro-SN telah memperoleh dukungan melalui program, kegiatan dan subkegiatan yang dianggarkan dalam RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2027. Namun demikian, tidak seluruh dukungan tersebut dapat ditandai (*tagging*) hingga tingkat subkegiatan. Hal ini disebabkan nomenklatur subkegiatan dalam RKPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2027, sehingga hanya subkegiatan yang memiliki kesesuaian langsung dengan nomenklatur ProSN yang dapat dilakukan *tagging*.

Meskipun demikian, beberapa ProSN tetap memperoleh dukungan sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Klaten, meskipun tidak dapat diidentifikasi secara spesifik melalui mekanisme *tagging* subkegiatan. Dukungan tersebut antara lain terhadap proyek/kegiatan berikut:

1. Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah;
2. Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, serta Digitalisasi Pembelajaran;
3. Pengendalian Inflasi;
4. Optimalisasi APBD;
5. Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP);
6. Industrialisasi dan Hilirisasi untuk Mendorong Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja;
7. Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah.

Oleh karena itu, meskipun tidak seluruh dukungan dapat ditampilkan melalui *tagging* subkegiatan, secara substansi Pemerintah Kabupaten Klaten tetap berkomitmen mendukung pelaksanaan seluruh ProSN sesuai dengan kewenangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



5.2.3. Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) 2025-2029

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/ SDGs) dikelompokkan berdasarkan tujuan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3 Rencana Program / Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) 2025-2029

Kode Program	Tujuan/ Indikator/ Program	Target SDGs Tahun 2027	Indikatif Alokasi Tahun 2027 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
Tujuan 1: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun				
Indikator SDGs 1.2.1 *) Tingkat Kemiskinan (%)		10,50-10,33	393,715,320,880	
Indikator SDGs 10.1.1.(b) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional				
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		175,527,125,000	DINAS PENDIDIKAN
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		97,611,619,219	DINAS KESEHATAN/PUSKESMAS
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		3,711,000,000	DPUPR
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		712,290,000	DISPERAKIM
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		425,020,000	DISPERAKIM
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		3,889,102,000	DISPERAKIM
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		64,187,500	DISPERAKIM
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		3,000,000	DISPERAKIM
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		3,250,267,180	Satpol PP dan Damkar
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		953,422,130	BPBD
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		719,725,000	DISSOSP3APPKB
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		1,706,350,000	DISSOSP3APPKB
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		3,622,400,000	DISSOSP3APPKB
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		245,000,000	DISSOSP3APPKB
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		982,600,000	DISPERINAKER
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		1,265,400,000	DISPERINAKER
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		424,400,000	DISPERINAKER



Kode Program	Tujuan/ Indikator/ Program	Target SDGs Tahun 2027	Indikatif Alokasi Tahun 2027 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		43,925,000	DISSOSP3APPKB
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		72,150,000	DISSOSP3APPKB
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		20,000,000	DISSOSP3APPKB
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		252,660,000	DKPP
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		367,160,000	DKPP
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		100,135,000	DKPP
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		8,077,917,142	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		50,000,000	DISDUKCAPIL
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		50,000,000	DISDUKCAPIL
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		99,200,000	DISDUKCAPIL
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		5,000,000	DISDUKCAPIL
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA		5,000,000	DISPERMASDES
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		5,183,005,544	DISPERMASDES
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		2,582,600,000	DISPERMASDES
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		84,189,000	DISSOSP3APPKB
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		314,836,000	DISSOSP3APPKB
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		119,025,000	DISSOSP3APPKB
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		47,275,787,534	DINAS PERHUBUNGAN
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		175,000,000	DKUKMP
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		144,100,000	DPMPSTP
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		10,347,100,000	DISBUDPORAPAR
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		148,179,170	DISPERSIP
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		75,000,000	DKPP
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		485,000,000	DKPP
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		97,160,000	DISBUDPORAPAR



Kode Program	Tujuan/ Indikator/ Program	Target SDGs Tahun 2027	Indikatif Alokasi Tahun 2027 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
3.26.02.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		0	DISBUDPORAPAR
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		88,550,000	DISBUDPORAPAR
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		166,450,000	DISBUDPORAPAR
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		3,727,781,932	DKPP
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		5,973,260,000	DKPP
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		75,000,000	DKPP
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		248,000,000	DKPP
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		18,000,000	DKUKMP
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		162,700,000	DKUKMP
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		653,500,000	DKUKMP
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		150,000,000	DKUKMP
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		1,106,800,000	DISPERINAKER
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		30,000,000	DISPERINAKER
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI		50,600,000	DISPERINAKER
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		6,024,140,519	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		3,953,501,010	SEKRETARIAT DAERAH
Indikator SDGs 1.4.1 *) Persentase penduduk hidup dalam rumah tangga yang mempunyai akses pada pelayanan dasar			99,394,619,219	
	a) Proporsi rumah tangga dengan akses pada layanan air minum layak (%)	99.48		
	b) Proporsi rumah tangga dengan akses pada layanan sanitasi layak (%)	97.48		
	c) Proporsi rumah tangga dengan akses pada layanan fasilitas kesehatan dasar (%)	100		
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		600,000,000	DPUPR
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		400,000,000	
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		504,000,000	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		279,000,000	



Kode Program	Tujuan/ Indikator/ Program	Target SDGs Tahun 2027	Indikatif Alokasi Tahun 2027 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		97,611,619,219	DINAS KESEHATAN/PUSKESMAS
Indikator SDGs 1.4.2 *) Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan tipe kepemilikan (Rumah milik sendiri) (%)		88.60	2,171,118,500	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		2,137,538,500	BPKPAD
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		6,000,000	DISPERAKIM
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		10,000,000	
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		10,000,000	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		7,580,000	
Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan Dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan				
Indikator SDGs 2.1.1*): Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)		9.70		
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN		100,135,000	DKPP
Indikator SDGs 2.2.1*) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita (%)		17.60		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		97,611,619,219	DINAS KESEHATAN/PUSKESMAS
Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia				
Indikator SDGs 3.1.1* Jumlah kasus kematian Ibu (kasus)		10.00	97,611,619,219	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		97,611,619,219	DINAS KESEHATAN/PUSKESMAS
Indikator SDGs 3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya:			97,611,619,219	
	a) ditolong tenaga kesehatan (%)	100		
	b) di fasilitas kesehatan (%)	100		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		97,611,619,219	DINAS KESEHATAN/PUSKESMAS



Kode Program	Tujuan/ Indikator/ Program	Target SDGs Tahun 2027	Indikatif Alokasi Tahun 2027 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
	Indikator SDGs 3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang (per 1.000 orang)	0.06	97,611,619,219	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		97,611,619,219	DINAS KESEHATAN/PUSKESMAS
	Indikator SDGs 3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan:		97,611,619,219	
	a) Jumlah kasus kronis filariasis (Proxy) (kasus)	0		
	b) Prevalensi penderita kusta per 10.000 penduduk (Proxy) (per 10.000 penduduk)	0.24		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		97,611,619,219	DINAS KESEHATAN/PUSKESMAS
	Indikator SDGs 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	98.95	97,611,619,219	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		97,611,619,219	DINAS KESEHATAN/PUSKESMAS
	Indikator SDGs 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun (%)	23.83	97,611,619,219	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		97,611,619,219	DINAS KESEHATAN/PUSKESMAS
	Indikator SDGs 3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan (per 1.000 penduduk) : - Apoteker - Bidan - Dokter Gigi - Dokter Spesialis - Dokter Umum - Perawat - Tenaga Gizi - Tenaga Kesehatan Lingkungan - Tenaga Kesehatan Masyarakat - Tenaga Keteknisian Medis - Tenaga Keterampilan Fisik - Tenaga Psikolog Klinik - Tenaga Teknik Biomedika	7.36	1,451,777,950	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		1,451,777,950	DINAS KESEHATAN/PUSKESMAS



Kode Program	Tujuan/ Indikator/ Program	Target SDGs Tahun 2027	Indikatif Alokasi Tahun 2027 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua				
Indikator SDGs 4.1.1.(a)			175,697,125,000	
a) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca (Proxy - IUP) (%)		79.55		
b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi (Proxy - IUP) (%)		70.37		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		175,527,125,000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM		170,000,000	DINAS PENDIDIKAN
Indikator SDGs 4.4.1.(a) Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)			4,121,064,009	
a) Remaja (%)		99.74		
b) Dewasa (%)		88.18		
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		4,121,064,009	DISKOMINFO
Indikator SDGs 4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas			175,527,125,000	
a) Rasio APM Perempuan/Laki SD/ sederajat (%)		100.65		
b) Rasio APM Kuintil terbawah/ teratas SD/ sederajat (%)				
c) Rasio APK Perempuan/Laki SMP/ sederajat (%)		105.39		
d) Rasio APK Kuintil terbawah/ teratas SMP/ sederajat (%)				
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		175,527,125,000	DINAS PENDIDIKAN
Tujuan 5 : Mencapai Kesenjangan Gender Dan Memberdayakan Kaum Perempuan				
Indikator SDGs 5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (usia>5 th) (%)		78.50	4,121,064,009	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		4,121,064,009	DISKOMINFO
Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua				
Indikator SDGs 6.1.1* Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)		96.62	600,000,000	



Kode Program	Tujuan/ Indikator/ Program	Target SDGs Tahun 2027	Indikatif Alokasi Tahun 2027 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		600,000,000	DPUPR
Indikator SDGs 6.2.1* Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak			99,394,619,219	
	a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman (%)	2.41		
	b) Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air (%)	100		
	c) Persentase rumah tangga yang masih melakukan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka (%)	2.52		
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		97,611,619,219	DINAS KESEHATAN/PUSKESMAS
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		600,000,000	DPUPR
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL		400,000,000	DPUPR
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		504,000,000	DPUPR
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		279,000,000	DPUPR
Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua				
Indikator SDGs 8.1.1* Laju pertumbuhan PDRB per kapita (%)		4.42	15,446,161,932	
Indikator SDGS 8.1.1.(a) PDRB per kapita (Rupiah)		52.58	15,446,161,932	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		127,050,000	DPMPTSP
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		120,200,000	DPMPTSP
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		144,100,000	DPMPTSP
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		982,600,000	DISPERINAKER
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		1,265,400,000	DISPERINAKER
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		175,000,000	DKUKMP
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		572,250,000	DKUKMP
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		18,000,000	DKUKMP
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		162,700,000	DKUKMP
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		653,500,000	DKUKMP



Kode Program	Tujuan/ Indikator/ Program	Target SDGs Tahun 2027	Indikatif Alokasi Tahun 2027 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		150,000,000	DKUKMP
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		360,000,000	DKUKMP
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		75,000,000	DKPP
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		485,000,000	DKPP
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		97,160,000	DKPP
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		3,727,781,932	DKPP
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		5,973,260,000	DKPP
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		357,160,000	DKPP
Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan				
Indikator SDGs 11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau		97.57	5,127,179,500	
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		712,290,000	DISPERAKIM
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		425,020,000	DISPERAKIM
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		3,889,102,000	DISPERAKIM
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		64,187,500	DISPERAKIM
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		3,000,000	DISPERAKIM
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		6,000,000	DISPERAKIM
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		10,000,000	DISPERAKIM
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		10,000,000	DISPERAKIM
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		7,580,000	DISPERAKIM
Indikator SDGs 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang			953,422,130	
	a) Jumlah korban meninggal per 100.000 orang (per 100.000 orang)	menurun		
	b) Jumlah korban hilang per 100.000 orang (per 100.000 orang)	menurun		



Kode Program	Tujuan/ Indikator/ Program	Target SDGs Tahun 2027	Indikatif Alokasi Tahun 2027 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
	c) Jumlah korban luka per 100.000 orang (per 100.000 orang)	menurun		
	d) Jumlah korban mengungsi per 100.000 orang (per 100.000 orang)	menurun		
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		953,422,130	BPBD
Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan				
	Indikator SDGs 12.5.1.(a) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (Ton)	26.75	8,077,917,142	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		8,077,917,142	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya				
	Indikator SDGs 13.2.2.(a) Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (TonCO ₂ eq)	1,569,338.99	187,604,748	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		187,604,748	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Tujuan 16. Menguatkan Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Di Semua Tingkatan				
	Indikator SDGs 16.6.1.(a) Persentase Instansi Pemerintah yang mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (%)	WTP	638,514,821,825	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		638,514,821,825	BPKPAD
	Indikator SDGs 16.6.1.(b) Persentase instansi/pemerintah kab/kota dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B (%)	100	48,364,409,552	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		47,631,830,052	SEKRETARIAT DAERAH
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		732,579,500	INSPEKTORAT DAERAH
	Indikator SDGs 16.6.1.(c) Persentase instansi/pemerintah kab/kota dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B (%)	100	47,631,830,052	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		47,631,830,052	SEKRETARIAT DAERAH
	Indikator SDGs 16.6.2.(a) Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik (instansi)	7 UPP (sampling)	47,631,830,052	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		47,631,830,052	SEKRETARIAT DAERAH
	Indikator SDGs 16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur (%)	96.60	50,000,000	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		50,000,000	DISDUKCAPIL



Kode Program	Tujuan/ Indikator/ Program	Target SDGs Tahun 2027	Indikatif Alokasi Tahun 2027 (Rp.)	Perangkat Daerah Pelaksana
	Indikator SDGs 16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah (%)	99.05	50,000,000	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		50,000,000	DISDUKCAPIL
	Indikator SDGs 16.9.1.(b) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun (%)	99.40	50,000,000	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		50,000,000	DISDUKCAPIL
Tujuan 17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan Dan Merevitalisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan				
	Indikator SDGs 17.1.1*Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDRB menurut sumbernya (%)	5.01	3,891,537,866	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH		3,891,537,866	BPKPAD
	Indikator SDGs 17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDRB (%)	0.58	3,891,537,866	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH		3,891,537,866	BPKPAD
	Indikator SDGs 17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik (%)	0.13	3,891,537,866	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH		3,891,537,866	BPKPAD

Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, 2026



5.2.4. Subkegiatan yang Mendukung Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Klaten

Tabel 5.4 Rencana Sub Kegiatan yang Mendukung Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Klaten

No	Kode Subkegiatan	Subkegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2027 (Rp)	Perangkat Daerah Pelaksana
1	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	85.000.000,00	Dinas Pendidikan
2	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	20.000.000,00	Dinas Pendidikan
3	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	2.811.658.375,00	Dinas Kesehatan dan 34 Puskemas
4	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.240.913.605,00	Dinas Kesehatan dan 34 Puskemas
5	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2.771.791.989,00	Dinas Kesehatan dan 34 Puskemas
6	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	55.022.794.250,00	Dinas Kesehatan
7	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	568.780.000,00	Dinas Kesehatan dan 34 Puskemas
8	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	600.000.000,00	DPUPR
9	1.03.05.2.01.0051	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	227.000.000,00	DPUPR
10	1.04.03.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	25.000.000,00	Disperakim
11	1.04.03.2.02.0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	36.500.000,00	Disperakim
12	1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	36.540.000,00	Dissosp3appkb
13	1.06.04.2.02.0001	Penyediaan Permakanan	254.200.000,00	Dissosp3appkb
14	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	282.160.000,00	DKPP
15	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	591.213.372,80	DLH



No	Kode Subkegiatan	Subkegiatan	Indikatif Alokasi Tahun 2027 (Rp)	Perangkat Daerah Pelaksana
16	2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	15.000.000,00	Disdukcapil
17	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan Masyarakat Hukum Adat	1.557.600.000,00	Dispermasdes
18	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.000.000.000,00	Dispermasdes
19	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	84.189.000,00	Dissosp3appkb
20	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	71.136.000,00	Dissosp3appkb
21	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	53.700.000,00	Dissosp3appkb
22	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	190.000.000,00	Dissosp3appkb
23	2.14.04.2.01.0039	Penyediaan Biaya Operasional Pelaksanaan Kelompok Kegiatan/Poktan (BKB, BKR, BKL, Satyagraha, PIK-Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	56.800.000,00	Dissosp3appkb
24	2.14.04.2.02.0009	Pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh TPK (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	62.225.000,00	Dissosp3appkb
25	2.16.02.2.01.0026	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	418.929.020,00	Diskominfo
26	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	282.160.000,00	DKPP

Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, 2026



5.2.5. Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian 10 Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati

Tabel 5.5 Rencana Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian 10 Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati

Program Unggulan	Aktifitas Kegiatan	Urusan Bidang	Kode Sub Kegiatan Nomenklatur	Mapping Sub Kegiatan Nomenklatur Kepmen Nomor 900.1-861 Tahun 2026	Alokasi Pagu Indikatif (Rp.)	Perangkat Daerah Pengampu
Dalan Alus, Padang dan Banyu Lancar	Penyediaan Air Baku dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2,114,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	1,476,000,000.00	
	Terpenuhinya Akses Air Minum Layak		1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	600,000,000.00	
	Penataan Sistem Drainase Perkotaan		1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	169,000,000.00	
	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan	91,755,000,000.00	
			1.03.10.2.01.0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar	17,040,000,000.00	
			1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	20,006,718,000.00	
			1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan	5,690,000,000.00	
			1.03.10.2.01.0057	Penggantian Jembatan	17,045,000,000.00	
	Penyediaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (Penerangan Jalan Utama)	Perhubungan	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	14,649,513,377.00	DINAS PERHUBUNGAN
			2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	30,103,546,657.00	
	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pertanian	Pertanian	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1,915,561,932.00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
			3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	677,160,000.00	
Pupuk Murah, Mudah dan Insentif untuk Petani	Penyediaan sarana dan prasarana pertanian (alat pertanian)	Pertanian	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1,915,561,932.00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	Paket bantuan bibit tanaman hortikutura (alpokat, tanaman cabai dan bawang merah);		3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	677,160,000.00	



Program Unggulan	Aktifitas Kegiatan	Urusan Bidang	Kode Sub Kegiatan Nomenklatur	Mapping Sub Kegiatan Nomenklatur Kepmen Nomor 900.1-861 Tahun 2026	Alokasi Pagu Indikatif (Rp.)	Perangkat Daerah Pengampu
	Paket bantuan untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan (benih/bibit tanaman, ternak kecil/ikan);		3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	317,900,000.00	
	Paket bantuan pupuk organik cair/pupuk hayati cair		3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	400,000,000.00	
	Pelatihan Pangan Lokal	Ketahanan Pangan	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	282,160,000.00	
			2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	85,000,000.00	
	Pemberian bantuan berupa pupuk dan bibit ternak kecil/Ikan	Perikanan	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	335,000,000.00	
Modal Usaha 15 juta setiap karang taruna desa	Pemberian Hibah Kepada Lembaga Karang Taruna	Sosial	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	719,725,000.00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Bela beli produk UMKM, Perizinan Mudah dan Perluasan Lapangan Kerja	Pelatihan Manajemen Usaha (Koperasi Desa Merah Putih)	Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	150,000,000.00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



Program Unggulan	Aktifitas Kegiatan	Urusan Bidang	Kode Sub Kegiatan Nomenklatur	Mapping Sub Kegiatan Nomenklatur Kepmen Nomor 900.1-861 Tahun 2026	Alokasi Pagu Indikatif (Rp.)	Perangkat Daerah Pengampu
	Fasilitasi Produk Unggulan		2.17.07.2.01.0022	Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	80,000,000.00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	Pembinaan dan Pelatihan UMKM		2.17.07.2.01.0018	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	95,000,000.00	
	1. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk lokal 2. Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi UMKM		2.17.07.2.01.0022	Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	80,000,000.00	
	Penyelenggaraan Expo/Pameran UMKM		2.17.08.2.01.0023	Pembinaan dan Fasilitasi Perkuatan Produk UMKM Pasar Dalam Negeri	572,250,000.00	
	Peningkatan kemudahan perizinan berusaha	Penanaman Modal	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	67,050,000.00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Peningkatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan penanaman modal		2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	120,200,000.00	
	Peningkatan informasi dan promosi terkait potensi investasi		2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	85,700,000.00	
			2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	60,000,000.00	
	Penyelenggaraan pelatihan kerja bagi SDM dan Bantuan Peralatan Produksi Pengrajin Klaster Unggulan (Logam)	Tenaga Kerja	2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	982,600,000.00	DINAS PERINDUSTRIAN
	Kemitraan dan Kerjasama pengiriman tenaga kerja dengan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja		2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	1,265,400,000.00	



Program Unggulan	Aktifitas Kegiatan	Urusan Bidang	Kode Sub Kegiatan Nomenklatur	Mapping Sub Kegiatan Nomenklatur Kepmen Nomor 900.1-861 Tahun 2026	Alokasi Pagu Indikatif (Rp.)	Perangkat Daerah Pengampu
	Optimalisasi penempatan tenaga kerja melalui pengembangan informasi digital (Sikendi)	Perindustrian	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	840,160,108.00	DAN TENAGA KERJA
	Pelatihan dan pendampingan bagi Industri Kecil Menengah (IKM) Batik		3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	40,000,000.00	
Gratis berobat, Pendidikan dan Sembako hanya dengan KTP	Penyediaan Alat Kesehatan	Kesehatan	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3,916,000,000.00	DINAS KESEHATAN
	1. Jaminan Kesehatan bagi masyarakat miskin 2. Program cek kesehatan gratis bagi masyarakat		1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	55,022,794,250.00	
	1. Pengadaan perlengkapan alat sekolah bagi siswa baru 2. Reward bagi sekolah berprestasi (Sarpras sekolah) 3. Alat Praktik Peraga Siswa PAUD	Pendidikan	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	4,921,425,000.00	DINAS PENDIDIKAN
			1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	5,930,000,000.00	
	Rehabilitasi Ruang Kelas SD		1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	10,625,000,000.00	
	Rehabilitasi Sanitasi SD		1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	685,000,000.00	
	Rehabilitasi Ruang Kelas SMP		1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4,375,000,000.00	



Program Unggulan	Aktifitas Kegiatan	Urusan Bidang	Kode Sub Kegiatan Nomenklatur	Mapping Sub Kegiatan Nomenklatur Kepmen Nomor 900.1-861 Tahun 2026	Alokasi Pagu Indikatif (Rp.)	Perangkat Daerah Pengampu
	Pemberian Bantuan Sosial untuk warga kurang mampu	Sosial	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	3,440,400,000.00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Internet Gratis sampai Desa	Pengadaan jaringan internet ruang publik	Komunikasi dan Informatika	2.16.03.2.02.0043	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	3,302,589,491.00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Mekanisme Bantuan Keuangan Desa (BKK): Pengadaan Jaringan Internet (Balai Pertemuan Desa, Sanggar Desa, Sekolah Non Formal, Perpustakaan Desa)	Keuangan	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	563,908,112,100.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Lingkungan Asri, sampah teratasi	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan persampah	Lingkungan Hidup	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	6,982,303,804.80	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Pengadaan bibit tanaman penghijauan (RTH)		2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1,079,619,046.00	
	1. Optimalisasi Pengelolaan Sampah Mulai dari Rumah Tangga; 2. Pelatihan Peningkatan kapasitas Pengelolaan persampahan (Kelompok Masyarakat)		2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	591,213,372.80	
	Peningkatan Infrastruktur Persampahan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	277,000,000.00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN



Program Unggulan	Aktifitas Kegiatan	Urusan Bidang	Kode Sub Kegiatan Nomenklatur	Mapping Sub Kegiatan Nomenklatur Kepmen Nomor 900.1-861 Tahun 2026	Alokasi Pagu Indikatif (Rp.)	Perangkat Daerah Pengampu
						PENATAAN RUANG
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh		1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	122,720,000.00	
	Pengelolaan PSU Perumahan		1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	64,187,500.00	
	Rehabilitasi RTLH pada Permukiman Kumuh		1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3,889,102,000.00	
Satu Desa satu fasilitas olahraga	Mekanisme Bantuan Keuangan Desa (BKK): 1. Pembangunan Lapangan Olahraga Milik Desa 2. Pembangunan Gedung Olahraga Milik Desa 3. Rehab Gedung Olahraga Milik Desa 4. Rehab Lapangan Olahraga Milik Desa 5. Pengadaan sarana prasarana Olahraga Milik Desa	Keuangan	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	563,908,112,100.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Program Insentif (Guru ngaji, Guru Honorer, Penjaga tempat ibadah, Kader posyandu, PKK, Hansip, PKUB, Relawan, RT dan RW)	Pemberian insentif bagi Honorer GTT/PTT	Pendidikan	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	25,127,725,422.00	DINAS PENDIDIKAN
	Prioritas 2028 (Grand Design ADD untuk Insentif)	Keuangan	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	563,908,112,100.00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH



Program Unggulan	Aktifitas Kegiatan	Urusan Bidang	Kode Sub Kegiatan Nomenklatur	Mapping Sub Kegiatan Nomenklatur Kepmen Nomor 900.1-861 Tahun 2026	Alokasi Pagu Indikatif (Rp.)	Perangkat Daerah Pengampu
Pembangunan Creative Hub dan Gedung Kesenian.	Sarana dan Prasarana Kelengkapan Daya Tarik Wisata dan Ekonomi Kreatif	Pariwisata	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	877,852,729.00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	Ekosistem creative Hub		3.26.02.2.01.0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	370,900,000.00	
			3.26.04.2.02.0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	88,550,000.00	

Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, 2026



5.3. Perincian Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2027

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 dengan fokus pada **Akselerasi Pembangunan SDM dan Infrastruktur**. Dengan mempedomani arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2027, rencana kerja pembangunan dijabarkan ke dalam program target kinerja yang akan dicapai beserta kerangka pendanaan indikatif. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan ditentukan berdasarkan akumulasi standar belanja program dan kegiatan serta mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dalam pelaksanaan program kegiatan di tahun 2027.

Indikasi rencana program dan kegiatan tahun 2027 juga mempertimbangkan prioritas Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2025-2029 dan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 yang kemudian dikelompokkan menjadi 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 8 (delapan) penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawas urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur kewilayahan serta 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

5.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Adapun program-program yang mendukung pencapaian target pada urusan pendidikan adalah sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Pendidikan

Fokus dari program pengelolaan pendidikan pada kegiatan pembangunan ruang unit kesehatan SD; pembangunan perpustakaan sekolah SD; Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD/SMP/ PAUD; Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan SMP; Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah SD/SMP; Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium SMP; Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD; Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas SMP/PAUD; Pengadaan Mebel SMP/PAUD; Pengadaan Perlengkapan SD; Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik SD/SMP; Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD/SMP/PAUD; Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SD/SMP; Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SD/SMP; Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan SD/SMP/PAUD; Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen SD/SMP/PAUD; Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SD/SMP; Pengelolaan Dana BOP PAUD; Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD; Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan SD/SMP; Pengembangan konten digital untuk pendidikan SD/SMP/PAUD; Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan SD/SMP/PAUD; Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan SD/SMP/PAUD; Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang



Pendidikan SD/SMP/PAUD; Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD/SMP/PAUD; Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik SD/SMP; Pembangunan Ruang Kelas Baru SD/PAUD; Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan SD/SMP; Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik SD/SMP/PAUD; Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD; Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD/SMP; Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SMP; Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan; Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan; Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan.

b. Program Pengembangan Kurikulum

Program ini difokuskan pada penguatan muatan lokal sebagai bagian dari upaya pelestarian nilai budaya, pengembangan potensi unggulan daerah, dan pembentukan karakter peserta didik. Pelaksanaan program dilakukan melalui penyusunan, pengembangan, pembinaan, pendampingan, serta evaluasi penerapan kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal, yang menunjukkan tingkat implementasi kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan sebagai upaya mewujudkan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dan potensi daerah.

c. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Fokus kegiatan antara lain pada pelaksanaan sertifikasi pendidik, pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, seleksi calon kepala sekolah dan pengawas, pembinaan minat bakat dan kreativitas guru SD/SMP, peningkatan kapasitas tenaga kependidikan dan pengawas, peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan salah satunya melalui pemberian kesejahteraan GTT/PTT.

d. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Program Pengendalian Perizinan Pendidikan dilaksanakan untuk menjamin tertib administrasi, kepastian hukum, dan kualitas penyelenggaraan pendidikan melalui pengelolaan perizinan satuan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Program ini difokuskan pada fasilitasi, verifikasi, evaluasi, serta penerbitan dan pembaruan izin operasional satuan pendidikan agar penyelenggaraan layanan pendidikan memenuhi standar yang ditetapkan. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbarui, yang mencerminkan kinerja pelayanan perizinan serta pemenuhan kebutuhan legalitas penyelenggaraan pendidikan di daerah.



e. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Program ini diarahkan pada Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah serta pengembangan dan peningkatan apresiasi siswa terhadap Bahasa dan sastra daerah.

2. Kesehatan

Adapun program-program yang mendukung pencapaian urusan kesehatan adalah sebagai berikut:

a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Fokus pada kegiatan peningkatan kesehatan keluarga dan pendampingan polindes, pengadaan obat dan perbekalan kesehatan, pembinaan pengawasan obat dan makan, penyuluhan kesehatan masyarakat, upaya perbaikan gizi keluarga pembinaan kewaspadaan pangan dan gizi, pengendalian penyakit menular langsung dan penyakit tidak menular, penanggulangan kejadian luar biasa (KLB), pengendalian penyakit bersumber binatang, kemitraan pelayanan jasa kesehatan masyarakat miskin (BPJS), serta peningkatan pelayanan kesehatan rumah sakit daerah.

b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan utamanya pada kegiatan fasilitasi uji kompetensi fungsional kesehatan; serta pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan dan non kesehatan. Program ini diarahkan untuk mendukung tersedianya sumber daya manusia kesehatan yang kompeten, profesional, dan berdaya saing sehingga mampu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun rujukan.

c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan utamanya pada kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga; Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan; dan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan utamanya pada kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat; Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat; dan



Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang diprioritaskan dalam rangka meningkatkan pemenuhan infrastruktur publik dan sarana dan prasarana dasar masyarakat, sedangkan jabaran program untuk mendukung prioritas tersebut antara lain:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Fokus Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dilaksanakan untuk meningkatkan ketersediaan dan keberlanjutan layanan sumber daya air guna mendukung ketahanan pangan, produktivitas pertanian, dan kesejahteraan masyarakat. Program ini mendukung prioritas Bupati melalui program Banyu Lancar dengan fokus pada pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi serta prasarana sumber daya air. Keberhasilan program diukur melalui Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten yang dilayani oleh Jaringan Irigasi, yang mencerminkan tingkat pelayanan irigasi dalam mendukung sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.

b. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui penyusunan, koordinasi, sinkronisasi, pemanfaatan, serta pengendalian tata ruang daerah. Program ini diukur melalui indikator Persentase Rencana Tata Ruang yang Disusun melalui penetapan RTRW dan RRTR, koordinasi serta sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang guna mendukung pembangunan Kabupaten Klaten yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dilaksanakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air minum yang aman, layak, dan berkelanjutan. Dalam Perubahan RKPD Tahun 2026, program ini mendukung prioritas pembangunan daerah melalui program Banyu Lancar dengan fokus pada pengembangan dan peningkatan layanan SPAM jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan terlindungi. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi, yang mencerminkan tingkat pelayanan air minum bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan lingkungan.



d. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan yang berkelanjutan melalui penyediaan dan pengembangan sarana serta prasarana persampahan. Program ini mendukung Program Prioritas Bupati Klaten “Lingkungan Asri, Sampah Teratasi” dengan mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat melalui pembangunan dan peningkatan fasilitas pengelolaan sampah. Keberhasilan program diukur melalui Persentase TPA/TPS-3R/TPS yang Terbangun, yang mencerminkan ketersediaan infrastruktur persampahan dalam mendukung pengelolaan sampah yang efektif dan berwawasan lingkungan.

e. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sanitasi dan kesehatan lingkungan melalui penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestik yang aman, layak, dan berkelanjutan. Program ini mendukung prioritas pembangunan daerah melalui program Banyu Lancar dengan fokus pada pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik bagi masyarakat. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik, yang mencerminkan tingkat akses masyarakat terhadap layanan sanitasi.

f. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini mendukung prioritas pembangunan daerah melalui program Banyu Lancar dengan fokus pada pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan drainase. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik, yang mencerminkan kualitas layanan drainase dalam mendukung lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas genangan.

g. Program Penataan Bangunan Gedung

Fokus Program ini difokuskan pada pembangunan, peningkatan, dan penataan bangunan gedung perkantoran pemerintah sesuai standar teknis guna mendukung fungsi pelayanan publik. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Bangunan Gedung Perkantoran Pemerintah yang Terbangun, yang mencerminkan ketersediaan sarana perkantoran yang memadai dalam mendukung kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

h. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas tata bangunan dan lingkungan guna mendukung estetika kawasan, fungsi ruang, dan kenyamanan masyarakat. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Penataan Bangunan dan



Lingkungan, yang mencerminkan tingkat keteraturan dan kualitas lingkungan binaan dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

i. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan kemandirian infrastruktur jalan guna mendukung konektivitas wilayah, mobilitas masyarakat, serta kelancaran aktivitas ekonomi. Program ini mendukung prioritas Bupati Klaten, Jalan Alus, Padang, dan Banyu Lancar, khususnya dalam penyediaan infrastruktur jalan yang mantap, aman, dan nyaman. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Jalan dalam Kondisi Baik, yang mencerminkan kualitas pelayanan infrastruktur jalan dalam mendukung aksesibilitas dan pertumbuhan wilayah.

j. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini difokuskan pada peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi melalui sertifikasi serta penguatan pengawasan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi guna mewujudkan keselamatan konstruksi. Keberhasilan program diukur melalui Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi dan Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi, yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia konstruksi dan tingkat keselamatan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi di daerah.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sasaran untuk meningkatkan pemenuhan prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman menjadi fokus dari urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dengan program-program yang mendukung antara lain:

a. Program Pengembangan Perumahan

Fokus pada pendataan, penyediaan, Rehabilitasi dan Pembangunan Rumah Korban Bencana Kab/Kota dan Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota.

b. Program Kawasan Permukiman

Fokus pada penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Klaten yang menjadi prioritas pembangunan baik Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni maupun Pembangunan Rumah Baru Layak Huni

c. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Fokus pada Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Fokus pada pendataan, penyerahterimaan, penyertifikatan, PSU perumahan dari Pengembang perumahan dan Pengelolaan Fasilitas Umum milik daerah.



e. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Fokus pada Sertifikasi dan Registrasi bagi orang atau badan usaha hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program-program yang mendukung pencapaian sasaran Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Fokus pada peningkatan kapasitas aparatur Satlimantas, penegakan dan penertiban (K3, PKL, reklame) serta pemetaan kawasan rawan pelanggaran Prokumda, pembinaan dan sosialisasi kepatuhan hukum kepada masyarakat serta penguatan kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.

b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Fokus pada pemetaan titik rawan kebakaran, pelaksanaan evakuasi dan penyelamatan, pendataan sarpras dan relawan serta upaya pemenuhannya melalui peningkatan sarpras pemadam serta peningkatan kapasitas relawan kebakaran dalam rangka meningkatkan Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran.

c. Program Penanggulangan Bencana

Menitikberatkan pada penguatan gerakan kecamatan tangguh bencana (Kencana) dan desa tangguh bencana (Destana) untuk mendukung respon cepat jika terjadi darurat bencana, penyediaan informasi rawan bencana, pemenuhan kebutuhan dasar darurat bencana (air bersih dan logistik), pelatihan mitigasi dalam rangka peningkatan kapasitas personil penanganan bencana, pendataan kawasan rawan bencana, serta peningkatan kerjasama daerah dalam penanganan bencana di wilayah perbatasan.

6. Sosial

Urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Sosial diarahkan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dengan pemberian bantuan sosial, penyempurnaan sistem perlindungan sosial, peningkatan akses pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi. Adapun program yang akan dilaksanakan dalam mencapai target di atas antara lain:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Fokus pada kegiatan Pemberdayaan Organisasi/lembaga Sosial dan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Fasilitasi Rehabilitasi Bersumber daya Masyarakat (RBM). Berbagai pengembangan



potensi tersebut diarahkan untuk mencapai potensi sumber kesejahteraan sosial yang mendapatkan peningkatan kapasitas.

b. Program Rehabilitasi Sosial

Fokus pada kegiatan peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS; Rehabilitasi dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial; Peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial anak terintegrasi; peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS; Rehabilitasi dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial; serta Peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial anak terintegratif. Rangkaian upaya rehabilitasi sosial untuk meningkatkan persentase PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial diluar panti.

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diprioritaskan pada kegiatan pemberian bantuan sosial KUBE dan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial dengan persentase proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah.

d. Program Penanganan Bencana

Program ini difokuskan pada penyediaan bantuan logistik, layanan dukungan sosial, serta koordinasi penanganan korban bencana guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat terpenuhi secara cepat dan tepat serta dan mempercepat proses pemulihan pascabencana.

e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini difokuskan pada pengelolaan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Ratna Bantala agar tetap terawat, tertib, bersih, dan representatif sebagai tempat penghormatan serta kegiatan peringatan hari-hari besar nasional. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola dengan Baik, yang mencerminkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan sebagai aset sejarah dan simbol penghargaan kepada para pejuang bangsa.

5.3.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Urusan tenaga kerja diarahkan untuk mendukung penciptaan kesempatan kerja, mengurangi penduduk miskin serta menurunkan angka pengangguran. Program yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target tersebut di atas antara lain:

a. Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini difokuskan pada penyusunan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data serta informasi ketenagakerjaan sebagai dasar perencanaan tenaga kerja, penyusunan kebijakan, dan pelaksanaan program ketenagakerjaan. Keberhasilan program diukur melalui Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja.



b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini difokuskan pada pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta, serta optimalisasi sertifikasi kompetensi tenaga kerja guna menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi, yang mencerminkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing tenaga kerja daerah.

c. Program Penempatan Tenaga Kerja

Fokus pada kegiatan Pelayanan antar Kerja, Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja, Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan, Perluasan Kesempatan Kerja, Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online, Job Fair /Bursa Kerja; dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan.

d. Program Hubungan Industrial

Fokus pada penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan serta optimalisasi Pemenuhan hak pekerja/ buruh dalam hal kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dengan diarahkan untuk mendukung pemberdayaan sumberdaya perempuan dan anak, peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah. Program yang akan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian target di atas adalah sebagai berikut:

a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Fokus pada kegiatan peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak, Advokasi Penguatan Kelembagaan PUG, peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan pada sumber daya ekonomi dan Peningkatan peran serta Organisasi Wanita. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD.

b. Program Perlindungan Perempuan

Fokus pada penguatan layanan pengaduan, pendampingan, perlindungan, rehabilitasi, serta koordinasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan TPPO. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan, yang mencerminkan efektivitas pelayanan perlindungan dan pemulihan bagi perempuan korban. Keberhasilan program diukur melalui Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan.



c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada penguatan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dan lembaga layanan keluarga sebagai upaya meningkatkan fungsi keluarga dalam pengasuhan, perlindungan, pendidikan, dan pembentukan karakter anggota keluarga. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Kecamatan yang Mempunyai PUSPAGA Aktif, yang mencerminkan jangkauan dan efektivitas layanan peningkatan kualitas keluarga di daerah.

d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini diarahkan pada penyusunan data gender dan anak serta pengembangan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pemenuhan Hak Anak (PUHA) guna mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Keterisian Data Pilah Gender dan Anak Kabupaten pada Aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA).

e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada kegiatan konferensi forum anak Klaten, serta TOT fasilitator sebaya forum anak di desa/kelurahan se-kabupaten Klaten. Keberhasilan program diukur melalui Persentase desa dan kelurahan dengan peringkat desa/kelurahan layak Anak pada klaster Pemenuhan Hak Anak.

f. Program Perlindungan Khusus Anak

Fokus pada kegiatan Penanganan dan Pencegahan korban kekerasan berbasis anak, dengan persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai standar.

3. Pangan

Urusan Pangan mengarah pada Ketersediaan pangan utama/beras, ketersediaan energi, ketersediaan protein serta penanganan daerah rawan pangan hal tersebut bertujuan untuk mempertahankan ketahanan pangan yang ada di daerah untuk menjaga pasokan atau ketersediaan pangan dan untuk menjaga stabilitas harga, maka target tersebut diterjemahkan dengan program sebagai berikut :

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini difokuskan pada kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan guna menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Keberhasilan program diukur melalui Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, yang mencerminkan kesiapan daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan mengantisipasi kerawanan pangan. Pelaksanaan program ini memperkuat peran Kabupaten Klaten sebagai salah satu daerah penyokong lumbung pangan nasional melalui peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan yang berkelanjutan.



b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini difokuskan pada kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan target di tahun 2027 sebesar 4 unit jumlah kelembagaan penyalur pangan pokok/pangan lainnya yang melaksanakan stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi dengan target di tahun 2027 sebesar 2.000 K.Kal/Kapita/Hari konsumsi energi dan 58 gram/kapita/hari;

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini difokuskan pada kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target di tahun 2027 sebesar 10 ton jumlah pengadaan/ penambahan cadangan pangan untuk penanganan kerawanan pangan daerah

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini difokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota dengan target di tahun 2027 sebesar 20 kali jumlah pelaksanaan pengawasan pangan segar.

4. Pertanian

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan pertanian yang menjadi kewenangan kabupaten adalah pemberian izin lokasi di wilayah kabupaten, penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten, dan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah. Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah kabupaten dilakukan oleh Kantor ATR Kabupaten Klaten, sedangkan untuk penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Klaten lebih diprioritaskan kepada pengadaan lahan untuk pembangunan daerah. Program terkait urusan pertanian meliputi:

a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Fokus pada inventarisasi dan penanganan kasus sengketa tanah garapan serta pelaksanaan mediasi untuk mencapai kesepakatan para pihak secara adil dan berkelanjutan. Keberhasilan program diukur melalui Persentase sengketa tanah garapan yang diselesaikan, yang mencerminkan efektivitas pemerintah daerah dalam mengurangi konflik pertanian dan memberikan kepastian hukum pemanfaatan tanah.



b. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

Fokus pada fasilitasi musyawarah, verifikasi, dan penyelesaian pembayaran ganti kerugian serta santunan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat terdampak. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, yang mencerminkan efektivitas penyelesaian administrasi pertanahan dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.

c. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee

Fokus pada fasilitasi sertifikasi tanah milik pemerintah daerah melalui proses administrasi pertanahan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, guna mendukung tertib administrasi dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Terfasilitasi Pensertifikatannya, yang mencerminkan tingkat kepastian hukum dan tertib pengelolaan aset tanah pemerintah daerah.

d. Program Penatagunaan Tanah

Fokus pada penyusunan dokumen penatagunaan tanah serta fasilitasi sertifikasi tanah milik pemerintah daerah guna memberikan kepastian hukum dan mendukung optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Keberhasilan program diukur melalui Persentase dokumen penatagunaan tanah yang tersusun.

5. Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup diarahkan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup, indikasi program yang akan dilaksanakan antara lain:

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;

Fokus pada penyusunan dokumen-dokumen lingkungan RPPLH dan KLHS Kabupaten guna mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti sebagai landasan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di daerah.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;

Fokus pada upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), pemantauan kualitas air dan udara, serta pengendalian sumber-sumber pencemaran lingkungan, guna mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan program tercermin dari terjaganya kualitas lingkungan hidup dan meningkatnya upaya pengendalian pencemaran serta penurunan emisi gas rumah kaca di daerah. Keberhasilan program diukur melalui Indeks Pencemaran Air dan Indeks Pencemaran Udara.



c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);

Fokus pada pengelolaan keanekaragaman hayati dan ruang terbuka hijau (RTH), pemeliharaan dan pengembangan RTH, serta pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam pengelolaan keanekaragaman hayati. Pelaksanaan program diarahkan untuk mendukung pelestarian ekosistem, meningkatkan kualitas lingkungan, serta memperkuat fungsi ruang terbuka hijau sebagai penyangga keseimbangan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Keberhasilan program tercermin dari Persentase RTH Publik Kabupaten.

d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3);

Fokus pada upaya penyimpanan, pengumpulan, dan pengelolaan limbah B3 guna mencegah pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Limbah B3 yang Terkelola, yang mencerminkan efektivitas pengendalian pencemaran lingkungan.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);

Fokus pada pengawasan penyimpanan dan pengumpulan limbah B3 serta pengendalian potensi pencemaran lingkungan akibat B3, guna memastikan pengelolaan limbah dilakukan sesuai ketentuan dan standar lingkungan. Keberhasilan program diukur melalui Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;

Fokus pada penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup

g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;

Fokus pada pencapaian penghargaan Adipura, pengembangan dan pembinaan Sekolah Adiwiyata, serta penguatan peran masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan hidup. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mencerminkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;

Fokus pada untuk meningkatkan perlindungan lingkungan hidup melalui penanganan pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.



i. Program Pengelolaan Persampahan.

Fokus pada peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di TPA Troketon, penanganan sampah melalui pemrosesan akhir di TPA Troketon, pembangunan TPS3R, penguatan kelembagaan pengelolaan sampah, pemberdayaan masyarakat, serta penerapan pemilahan sampah dari sumbernya (rumah tangga). Program ini mendukung Prioritas Bupati Klaten “Lingkungan Asri Sampah Teratasi”. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diarahkan untuk menata administrasi kependudukan di Kabupaten Klaten. Adapun program yang mendukung pencapaian target tersebut antara lain:

a. Program Pendaftaran Penduduk

Fokus pada Peningkatan kemudahan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, penyelenggaraan layanan konsultasi dan pengaduan masyarakat terkait administrasi kependudukan serta percepatan pendaftaran kependudukan melalui optimalisasi layanan online Sakura, layanan jemput bola, pelayanan keliling desa/sekolahan/kelurahan, pelayanan bagi masyarakat difabel dan penduduk rentan administrasi kependudukan termasuk untuk pendataan intervensi kemiskinan. Disamping itu juga fokus pada optimalisasi kepemilikan identitas kependudukan digital melalui kebijakan layanan identitas kependudukan digital di desa/kelurahan, Pemberian hak akses SIAK kepada operator desa/kelurahan untuk aktivasi dan registrasi IKD.

b. Program Pencatatan Sipil

Fokus pada optimalisasi pelayanan kepengurusan Dokumen Administrasi Kependudukan dari peristiwa penting (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan/Pengesahan Anak) melalui penyederhanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan, penyusunan dan publikasi standar pelayanan serta persyaratan layanan secara jelas melalui media informasi pelayanan (website, media social, media cetak, leaflet) yang mudah diakses masyarakat.

c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Fokus pada optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan dan peningkatan kualitas layanan daring (online), khususnya aplikasi atau sistem layanan Sakura, guna memperluas jangkauan pelayanan, mempercepat proses administrasi serta optimalisasi peningkatan kerjasama Perangkat Daerah dan instansi lainnya dalam pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung pelayanan publik yang terintegrasi melalui Pembaruan



Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan data kependudukan dengan perangkat daerah dan instansi terkait.

d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

Fokus pada penyusunan dan penyajian profil perkembangan kependudukan yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan sebagai dasar penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Ketersediaan Profil Perkembangan Kependudukan Tahunan, yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perumusan program pembangunan yang lebih tepat sasaran.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Adapun program-program yang mendukung capaian urusan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi:

a. Program Penataan Desa

Fokus pada capaian persentase fasilitasi penataan desa dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitasi kegiatan terpadu antara TNI dan Pemerintah Daerah TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang meliputi pembangunan infrastruktur fisik serta penyuluhan non-fisik.

b. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Fokus pada percepatan peningkatan status desa mandiri melalui Penguatan dan pengembangan ekonomi desa, antara lain melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengembangan pasar desa serta pengembangan kawasan pedesaan dengan peningkatan kerjasama antar desa dalam kawasan pedesaan.

c. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Fokus pada peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa (BPD), fasilitasi penyelenggaraan administrasi desa, penyusunan produk hukum dan perencanaan desa serta fasilitasi dan pembinaan Pemerintah Desa dalam pengelolaan dan inventarisasi aset desa.

d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Fokus pada Optimalisasi peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) melalui kegiatan Sambung Rasa Bupati, fasilitasi dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam upaya percepatan penurunan stunting, penurunan kemiskinan dan mendukung layanan 6 (enam) SPM secara terpadu dan berkelanjutan. Fasilitasi kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Karya Bakti Mandiri Klaten Bersinar (KBMKB) serta fasilitasi kegiatan Tim Penggerak PKK.



8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana diarahkan untuk mencapai indek pembangunan keluarga (ibangga). Program pendukung pencapaian target bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan; Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal; Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan; Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga; Penyediaan Data dan Informasi Keluarga; Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga; Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB; Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain; Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB; dan Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Keberhasilan program diukur melalui Angka Kelahiran Remaja Usia 15–19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15–19), yang mencerminkan efektivitas pengendalian penduduk dan peningkatan kualitas kehidupan remaja.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Fokus pada kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan KB, Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan dan Pengadaan Bina Keluarga Balita/BKB KIT; Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR; pelayanan KB medis operasi, pelayanan KB melalui mobil pelayanan, pelayanan KB dengan Mitra Kerja. Keberhasilan program diukur melalui indikator Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi, yang mencerminkan terpenuhinya akses masyarakat terhadap pelayanan KB.

c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)); Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA); Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga); Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA); Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan



Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA); dan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan. Keberhasilan program diukur melalui persentase anggota BKB, BKR, BKL, dan UPPKS yang menjadi peserta KB, yang mencerminkan meningkatnya kesadaran dan partisipasi keluarga dalam mewujudkan keluarga kecil, berkualitas, dan sejahtera.

9. Perhubungan

Diarahkan pada kinerja lalu lintas serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan dan meningkatkan kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan melalui Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Program ini mendukung program prioritas Bupati melalui Dalam Alus, Padang, dan Banyu Lanca, khususnya melalui pemasangan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU).

10. Komunikasi dan Informatika

Program-program yang akan dilaksanakan pada bidang komunikasi dan Informatika antara lain:

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Fokus pada penguatan relasi media, pelayanan informasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, penyusunan konten informasi pembangunan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi publik. Program ini mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, informatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keberhasilan program diukur melalui Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah.

b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Fokus pada penyediaan akses internet bagi perangkat daerah, pengembangan dan integrasi aplikasi pemerintahan, serta penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Program ini mendukung program prioritas Bupati Klaten “Internet Gratis Sampai Desa” dalam rangka memperluas akses layanan digital bagi pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Capaian Digitalisasi Pemerintahan dan Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Rencana program urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah diarahkan pada pelaku usaha maupun lembaga koperasi dapat mengoptimalkan untuk penyediaan bahan baku, modal, tenaga kerja maupun produksinya, menurunkan omset penjualan. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:



a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Fokus pada pemeriksaan dan pengawasan koperasi, termasuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) yang wilayah keanggotaannya berada dalam daerah kabupaten, penguatan tata kelola kelembagaan koperasi, serta pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, yang mencerminkan tingkat kepatuhan, kesehatan, dan kualitas tata kelola koperasi dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan di daerah.

b. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Fokus pada penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota, peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian, serta penguatan kapasitas dan kompetensi pengurus, pengawas, pengelola, dan anggota koperasi. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan, yang mencerminkan kemampuan kelembagaan koperasi dalam mengelola usaha secara sehat dan berkelanjutan.

c. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Fokus pada kegiatan peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM usaha mikro dan kecil, pemberdayaan usaha mikro melalui kemitraan usaha, fasilitasi kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha mikro, serta penyusunan basis data usaha mikro yang akurat dan terintegrasi. Program ini juga mendukung prioritas Bupati Klaten “Bela Beli Produk UMKM, Perizinan Mudah, dan Perluasan Lapangan Kerja”. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Usaha Mikro yang bertransformasi dari Informal menjadi Formal.

d. Program Pengembangan UMKM

Fokus pada pemberdayaan usaha mikro melalui kemitraan usaha, fasilitasi kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha mikro, serta penyusunan basis data usaha mikro yang akurat dan terintegrasi. Program ini mendukung prioritas Bupati Klaten “Bela Beli Produk UMKM, Perizinan Mudah, dan Perluasan Lapangan Kerja” melalui peningkatan legalitas dan kapasitas usaha. Keberhasilan program diukur melalui Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya.

12. Penanaman Modal

Urusan ini ini diorientasikan untuk mencapai target realisasi investasi baik PMDN maupun PMA dan juga berpengaruh pada pelaksanaan kerjasama di bidang investasi baik di tingkat daerah maupun regional, untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu diimplementasikan program dan kegiatan berikut:



a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Fokus pada kegiatan sosialisasi pemberian fasilitas/insentif kemudahan penanaman modal, kemitraan antara UMKM dengan usaha besar, penyusunan Peta Potensi Investasi kabupaten/kota dan peluang investasi Kabupaten. Program ini mendukung prioritas Bupati Klaten “Bela Beli Produk UMKM, Perizinan Mudah, dan Perluasan Lapangan Kerja”. Keberhasilan program diukur melalui Realisasi Total terhadap Target Investasi.

b. Program Promosi Penanaman Modal

Fokus pada kegiatan pameran investasi, mengadakan forum bisnis, dan penyusunan Peraturan Bupati terkait promosi. Program ini mendukung prioritas Bupati Klaten “Bela Beli Produk UMKM, Perizinan Mudah, dan Perluasan Lapangan Kerja”. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi.

c. Program Pelayanan Penanaman Modal

Fokus pada penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui inovasi Jempol Manis (jemput bola pelayanan izin online aman dan gratis), pendampingan sistem OSS dan Si Cantik, serta inovasi Otewe (informasi terkini proses izin via *WhatsApp Gateway*). Program ini juga mencakup layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik, serta pemantauan dan pelaporan di bidang perizinan. Pelayanan diberikan melalui sistem perizinan berbasis risiko, pengelolaan layanan konsultasi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha. Program ini mendukung prioritas Bupati Klaten: “Bela Beli Produk UMKM, Perizinan Mudah, dan Perluasan Lapangan Kerja.” Keberhasilan program diukur melalui Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan, sebagai indikator efektivitas pelayanan perizinan dan dukungan terhadap pengembangan UMKM serta penciptaan lapangan kerja.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Fokus pada kegiatan evaluasi dan pengawasan kegiatan penanaman modal, bimbingan teknis kepada pelaku usaha, asistensi dan konsultasi input laporan kegiatan penanaman modal. Program ini mendukung prioritas Bupati Klaten “Bela Beli Produk UMKM, Perizinan Mudah, dan Perluasan Lapangan Kerja”. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan.

e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini menekankan pemeliharaan sistem MPP dan pengelolaan data perizinan terintegrasi untuk mendukung pelayanan investasi yang lebih berkualitas dan digitalisasi pemerintahan.



13. Kepemudaan dan Olahraga

Pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga diarahkan pada berbagai program di bidang kepemudaan dan olahraga yang disusun untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah, meliputi:

a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Fokus pada penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan bagi pemuda pelopor, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader, serta penguatan organisasi kepemudaan di tingkat kabupaten. Program ini mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda, peningkatan keterampilan, dan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan daerah. Keberhasilan program diukur melalui Rasio Wirausaha Pemuda.



b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Fokus pada kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia bidang olahraga, penyelenggaraan kompetisi olahraga dan pengiriman kontingen olahraga. Program ini mendukung prioritas Bupati Klaten “Satu Desa Satu Fasilitas Olahraga” dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prestasi olahraga daerah. Keberhasilan program diukur melalui Persentase pembinaan Atlet berprestasi.

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Difokuskan pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas organisasi, serta pembinaan kegiatan kepramukaan untuk membentuk generasi muda yang berkarakter, disiplin, mandiri, dan memiliki jiwa kepemimpinan. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Kwartir/Gugus Depan yang Melaksanakan Program Kerja Tahunan secara Konsisten, yang mencerminkan efektivitas penyelenggaraan dan pembinaan kepramukaan. Program ini mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, serta memiliki semangat kebangsaan dan kepedulian sosial

14. Statistik

Urusan statistik lebih diprioritaskan untuk menyediakan data statistik sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah. Urusan ini difokuskan pada penyediaan dokumen statistik sektoral yang berkualitas melalui penerapan Prinsip Satu Data Indonesia, yang didukung melalui Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral guna meningkatkan kualitas tata kelola data dan pengambilan keputusan berbasis data. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah.

15. Persandian

Urusan persandian lebih diprioritaskan untuk meningkatkan keamanan informasi dan perlindungan data pemerintah daerah guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang andal dan aman. Urusan Persandian ini dilaksanakan melalui Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi yang difokuskan pada pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah berbasis elektronik maupun non-elektronik. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah, yang mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam melindungi informasi dan sistem elektronik dari berbagai ancaman keamanan siber.



16. Kebudayaan

Urusan kebudayaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian seni budaya daerah. Adapun program yang direncanakan pada urusan kebudayaan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan untuk melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan kekayaan budaya daerah sebagai identitas serta aset pembangunan. Program ini difokuskan pada pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan tradisi budaya, pelestarian kesenian tradisional, pembinaan sumber daya manusia, lembaga dan pranata kebudayaan, serta pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi dan berkontribusi dalam pemajuan kebudayaan. Keberhasilan program diukur melalui Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan.

b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan untuk menjaga keberlangsungan dan meningkatkan kualitas kesenian tradisional sebagai bagian dari identitas budaya daerah. Program ini difokuskan pada peningkatan kompetensi pelaku seni melalui pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumber daya manusia kesenian tradisional, serta penguatan tata kelola lembaga kesenian tradisional agar lebih profesional, adaptif, dan berkelanjutan. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan, yang mencerminkan upaya pelestarian, pengembangan, dan regenerasi seni tradisional di Kabupaten Klaten.

c. Program Pembinaan Sejarah

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kepedulian, dan partisipasi masyarakat terhadap sejarah lokal sebagai bagian dari identitas dan jati diri daerah. Program ini difokuskan pada pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal, serta peningkatan akses masyarakat terhadap data dan informasi sejarah guna mendukung pelestarian nilai-nilai sejarah dan budaya daerah. Keberhasilan program diukur melalui Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Tinjauan Sejarah Lokal, yang mencerminkan meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pelestarian dan pemanfaatan sejarah lokal.

d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya; Penetapan Cagar Budaya; Pelindungan Cagar Budaya; Pengembangan Cagar Budaya; dan Pemanfaatan Cagar Budaya.

e. Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini diarahkan untuk melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan cagar budaya sebagai warisan budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu



pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Program ini difokuskan pada pendaftaran objek diduga cagar budaya, penetapan cagar budaya, serta upaya perlindungan dan pengelolaan cagar budaya guna menjaga keberadaan dan kelestariannya bagi generasi mendatang. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Terlestarikannya cagar budaya, yang mencerminkan efektivitas upaya perlindungan dan pengelolaan warisan budaya daerah.

17. Perpustakaan

Urusan Perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan budaya baca, literasi masyarakat, serta pelestarian koleksi pengetahuan dan warisan budaya daerah. Prioritas pembangunan urusan ini dilaksanakan melalui Program Pembinaan Perpustakaan dan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno, sebagai berikut :sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar masyarakat.

a. Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas layanan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai pusat literasi, informasi, dan pembelajaran masyarakat, target koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah sebesar 54.331. Program ini difokuskan pada pembinaan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas perpustakaan guna memperluas akses masyarakat terhadap layanan perpustakaan. Keberhasilan program diukur melalui Tingkat Pemanfaatan Perpustakaan dan Persentase Perpustakaan yang Dibina, yang mencerminkan kualitas layanan dan tingkat akses masyarakat terhadap perpustakaan.

b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini dilaksanakan untuk melindungi, merawat, dan melestarikan koleksi nasional, naskah kuno, serta koleksi budaya daerah sebagai sumber pengetahuan dan warisan budaya bangsa. Program ini difokuskan pada inventarisasi, konservasi, digitalisasi, dan pelestarian koleksi nasional, naskah kuno, dan koleksi budaya etnis nusantara agar tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Koleksi Nasional, Naskah Kuno, dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilestarikan, yang mencerminkan efektivitas upaya pelestarian warisan dokumenter dan budaya daerah.

18. Kearsipan

Pelaksanaan urusan kearsipan diarahkan pada program yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target di bidang kearsipan meliputi:

a. Program Pengelolaan Arsip

Fokus pada sosialisasi, pembinaan Perangkat Daerah dalam pengelolaan arsip secara baku serta peningkatan kapasitas pengelola kearsipan.

b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Fokus pada penilaian, pemusnahan, perlindungan dan penyelamatan arsip.



c. Program Perizinan Penggunaan Arsip

Program Perizinan Penggunaan Arsip difokuskan pada penyelenggaraan layanan perizinan dan akses pemanfaatan arsip yang bersifat tertutup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, guna mendukung kebutuhan informasi, penelitian, dan pelayanan publik. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup, yang mencerminkan meningkatnya kualitas layanan kearsipan, keterbukaan informasi yang terukur, serta pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi yang akuntabel dan terpercaya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

5.3.3 Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Program Kelautan dan Perikanan diarahkan untuk peningkatan produksi perikanan tangka, produksi perikanan budidaya, cakupan tebar benih ikan (Restocking) perairan umum dan produk olahan ikan. mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi ikan, diperlukan adanya pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat mengatasi permasalahan, melalui :

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program difokuskan pada kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dengan target di tahun 2027 sebesar 573,24 ton jumlah produksi penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya;

b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program difokuskan pada kegiatan sebagai berikut:

- Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil dengan target di tahun 2027 sebesar 22 kelompok;
- Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dengan target di tahun 2027 sebesar 1.200.000 ekor jumlah produksi benih ikan di UPTD Budidaya Ikan dan 30 unit jumlah penyediaan prasarana peningkatan produksi perikanan budidaya;

c. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program difokuskan pada kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 2.696,20 ton jumlah ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan.



2. Pariwisata

Urusan pariwisata diarahkan untuk peningkatan Presentase Daya Tarik Wisata serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diperlukan adanya pelaksanaan melalui program:

a. **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**

Fokus pada kegiatan fasilitasi pembentukan daya tarik wisata / desa wisata, pengadaan/pemeliharaan sarana prsarana di daya tarik destinasi pariwisata, pembiayaan operasional pengelolaan daya tarik destinasi pariwisata, penyusunan dokumen perencanaan pengembangan daya tarik destinasi pariwisata dan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha pariwisata

b. **Program Pemasaran Pariwisata**

Fokus pada kegiatan kerjasama dan kemitraan dengan kabupaten/kota yang lain untuk memasarkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif , menyelenggarakan event pariwisata, pameran pariwisata dan *roadshow* pariwisata di dalam kota maupun luar kota (apabila dimungkinkan di luar negeri), memanfaatkan media cetak, media elektronik, media sosial dan media lainnya untuk promosi pariwisata.

c. **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

Fokus pada fasilitasi penguatan kekayaan intelektual, menyusun dokumen pengembangan ekonomi kreatif (untuk beberapa sektor) serta monitoring dan pendataan pelaku ekonomi kreatif.

d. **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif**

Fokus pada kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pelaku sdm pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka peningkatan kompetensi, fasilitasi sertifikasi keahlian untuk tenaga kerja/SDM pariwisata dan ekonomi kreatif.

3. Pertanian

Pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian target bidang pertanian, meliputi:

a. **Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**

Program difokuskan pada kegiatan sebagai berikut:

- Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dengan target tahun 2027 sebagai berikut:
 - a) 560 ton produksi tembakau rajangan
 - b) 1.850 ton produksi tembakau asepap
 - c) 449.258 ton produksi padi
 - d) 183 ton produksi kedelai
 - e) 95.800 ton produksi jagung



- Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target tahun 2027 sebesar 13,00 ton benih unggul padi berlabel yang disediakan.
- Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain dengan target tahun 2027 sebagai berikut:
 - f) 150 ekor bibit ternak yang disediakan bagi peternak ruminansia besar dan kecil
 - g) 206.169 ekor ternak sapi potong + sapi perah + kerbau potong + kambing potong + domba + sapi potong eks import + kerbau perah + kambing
 - h) 10.360.505 ekor ternak kuda + babi + ayam ras petelur produktif + ayam ras pedaging + ayam buras + itik + kelinci + puyuh + entog + angsa + merpati + ayam ras petelur afkir + ayam ras petelur pejantan.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.

Program difokuskan pada kegiatan sebagai berikut:

- Pengembangan Prasarana Pertanian dengan target tahun 2027 sebesar 25.254,22 ha luasan lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B.
- Pembangunan Prasarana Pertanian dengan target tahun 2027 sebesar 2.094 ekor ternak ruminansia besar yang dipotong di RPH pemerintah dan 30 unit total prasarana pertanian yang dibangun/direhabilitasi/dipelihara pada tahun berkenaan

c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Program difokuskan pada kegiatan sebagai berikut:

- Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota dengan target tahun 2027 sebesar 95 kasus kejadian/kasus PHM yang ditangani
- Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota dengan target tahun 2027 sebesar 350 kali pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan yang dilaksanakan
- Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan target tahun 2027 sebesar 5.000 ekor hewan yang mendapatkan pelayanan kesehatan hewan dan IB.
- Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan target tahun 2027 sebesar:
 - a) 60 unit usaha yang tersertifikasi jaminan keamanan produknya di masyarakat
 - b) 13.000 ton produksi daging dari ternak ruminansia + non ruminansia



- c) 13.279.716 kg produksi telur
- d) 2.102.483 liter produksi susu.

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program difokuskan pada kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota dengan target tahun 2027 sebesar 11.500 ha lahan yang mendapat penanganan pengendalian OPT dan pencegahan bencana pertanian;

e. Program Penyuluhan Pertanian

Program difokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan target tahun 2027 sebesar 148 orang SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya dan 250 kelompok tani yang ditingkatkan kapasitasnya

4. Kehutanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terkait urusan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah adalah pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) kabupaten/kota. Untuk Kabupaten Klaten tidak ada wilayah TAHURA, sehingga untuk urusan ini Kabupaten Klaten di tahun 2024 tidak memiliki kewenangan.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, urusan energi dan sumber daya mineral yang merupakan kewenangan kabupaten adalah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten. Hingga saat ini di Kabupaten Klaten belum ditemukan sumber panas bumi, sehingga tidak ada program bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

6. Perdagangan

Urusan Perdagangan diorientasikan pada sektor perdagangan yang pada satu tahun terakhir mengalami omset penjualan menurun, dikarenakan banyaknya UMKM yang tutup dan tidak beroperasi, lemahnya tingkat perlindungan konsumen, perlunya pembinaan pedagang kaki lima beserta kelembagaannya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian target tersebut sebagai berikut:

a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Fokus pada kegiatan pembinaan pada pelaku usaha terkait penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat ,pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan, penerbitan tanda daftar gudang dan penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW). Program ini mendukung prioritas Bupati Klaten “Bela Beli Produk UMKM, Perizinan Mudah, dan Perluasan Lapangan Kerja.” Keberhasilan program diukur melalui Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan).



b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Fokus pada kegiatan revitalisasi/pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan serta pembinaan bagi pedagang. Program ini juga mendukung prioritas Bupati Klaten “Bela Beli Produk UMKM” melalui penguatan sarana distribusi yang memperlancar pemasaran produk lokal, meningkatkan akses pasar, serta memperluas jangkauan distribusi produk UMKM. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya.

c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Fokus pada kegiatan koordinasi dan pengawasan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Program ini mendukung ketahanan ekonomi daerah serta pengendalian inflasi. Keberhasilan program diukur melalui Indeks Stabilisasi Harga, yang mencerminkan stabilnya harga dan ketersediaan barang di pasar daerah.

d. Program Pengembangan Ekspor

Fokus pada kegiatan promosi dagang produk serta pembinaan pengembangan ekspor. Program ini mendukung penguatan ekonomi daerah berbasis produk unggulan dan daya saing global. Keberhasilan program diukur melalui Nilai Ekspor Barang, yang mencerminkan peningkatan kinerja ekspor produk daerah ke pasar internasional.

e. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Fokus pada pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) guna memastikan akurasi dan keadilan dalam kegiatan perdagangan. Program ini mendukung terciptanya transaksi yang adil, transparan, dan terpercaya di pasar. Keberhasilan program diukur melalui Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku, yang mencerminkan tingkat kepatuhan dan akurasi alat ukur yang digunakan dalam kegiatan perdagangan di daerah.

f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Fokus pada pelaksanaan promosi, pemasaran, dan peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) guna memperluas akses pasar dan memperkuat ekonomi daerah berbasis produk lokal. Program ini mendukung prioritas Bupati Klaten “Bela Beli Produk UMKM” dalam rangka meningkatkan konsumsi dan keberpihakan terhadap produk lokal. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan, yang mencerminkan intensitas promosi dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri di daerah.



7. Perindustrian

Urusan diorientasikan pada keberlangsungan usaha dan produksi bagi Industri Kecil Menengah (IKM), alih transfer teknologi secara umum, produktivitas sentra industri, suplay bahan baku serta pemenuhan permintaan pasar. Implementasi program dan kegiatan sebagai berikut:

a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Fokus pada koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat, serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri. Program ini mendukung prioritas Bupati Klaten “Bela Beli Produk UMKM” melalui penguatan kapasitas dan daya saing IKM sebagai penggerak ekonomi daerah. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang Dibina, yang mencerminkan peningkatan pembinaan dan pengembangan sektor industri daerah.

b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Fokus pada penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) sesuai kewenangan kabupaten/kota guna mendukung kemudahan berusaha dan pengembangan sektor industri. Program ini mendukung prioritas Bupati Klaten “Perizinan Mudah dan Perluasan Lapangan Kerja” melalui peningkatan akses perizinan yang cepat, transparan, dan sesuai ketentuan. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang Telah Memiliki Izin Sesuai Ketentuan, yang mencerminkan tingkat kepatuhan dan legalitas usaha industri di daerah.

c. Program Pengelolaan Sistem Industri Nasional.

Fokus pada penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI, serta fasilitasi pengumpulan, pengolahan, dan analisis data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) guna mendukung tata kelola industri yang berbasis data dan terintegrasi. Program ini mendukung prioritas Bupati Klaten “Perizinan Mudah” melalui penguatan sistem informasi dan layanan industri yang lebih efektif dan akuntabel. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang terfasilitasi dalam SIINas, yang mencerminkan tingkat partisipasi pelaku industri dalam penyediaan data industri daerah.

8. Transmigrasi

Urusan transmigrasi dilaksanakan dalam rangka pencapaian salah satu tujuan Pemerintah Daerah dalam hal pemerataan penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat program yang mendukung bidang transmigrasi adalah Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi. Fokus pada upaya mendorong partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi melalui penyuluhan dan pembinaan bagi calon



Transmigran penduduk rawan bencana dan kemiskinan serta penyelenggaraan (MOU) antara daerah asal dengan Provinsi/ Kabupaten daerah penempatan.

5.3.4 Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Pencapaian target Urusan penunjang pada Sekretariat Daerah didukung dengan program antara lain:

a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Fokus pada fasilitasi koordinasi kegiatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Fasilitasi penyusunan Laporan LPPD dan LKPJ, serta fasilitasi kerja sama daerah. Fasilitasi penyusunan Produk Hukum Daerah (Prokumda), Fasilitasi bantuan hukum untuk masyarakat miskin, digitalisasi produk hukum serta optimalisasi strategi pencapaian Indeks Reformasi Hukum. Fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual dan pelaksanaan kebijakan Kesra.

b. Program Perekonomian dan Pembangunan

Fokus pada peningkatan efektivitas pelaksanaan monitoring evaluasi program pembangunan melalui Pembangunan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan terintegrasi. Optimalisasi pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan optimalisasi pembinaan BLUD serta pemenuhan alokasi anggaran program subsidi bunga.

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Fokus pada pemenuhan kebutuhan Rumah Tangga Bupati/Wabup dan Sekda, Optimalisasi fasilitasi keprotokolan dan komunikasi pimpinan melalui peningkatan kapasitas SDM Keprotokolan dan perbaruan perangkat dokumentasi berbasis IT. Peningkatan pelayanan publik dengan pemenuhan 6 aspek yanblik. Penerapan Standar Kepuasan Masyarakat (SKM), penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tematik serta mendorong peningkatan nilai AKIP.

2. Sekretariat DPRD

Urusan penunjang pemerintahan pada Sekretariat DPRD diarahkan untuk memberikan dukungan administrasi, keuangan, persidangan, serta fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD agar dapat berjalan secara efektif dan optimal. Melalui Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, disediakan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Penetapan Ranperda Tahun N, Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N, dan Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, yang mencerminkan optimalnya peran DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta terwujudnya tata kelola pemerintahan.

3. Perencanaan

Program yang akan dilaksanakan untuk mendukung capaian urusan bidang perencanaan antara lain:



a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah diarahkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang terintegrasi, berbasis data, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan Daerah maupun Pusat. Fokus pelaksanaan program meliputi analisis data dan informasi pembangunan daerah, penyusunan Perubahan RKPD, sinkronisasi perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, serta pelaporan pembangunan daerah guna memastikan tercapainya target pembangunan secara efektif dan akuntabel. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD, yang mencerminkan konsistensi dan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Klaten.

b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Fokus pada meningkatkan keterpaduan dan konsistensi perencanaan pembangunan antara pemerintah daerah dan perangkat daerah melalui koordinasi dan sinkronisasi pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, serta Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah, yang mencerminkan terwujudnya perencanaan pembangunan yang terintegrasi, selaras dengan prioritas daerah, dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Klaten secara efektif dan berkelanjutan.



4. Keuangan

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian urusan keuangan meliputi:

a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Fokus pada penguatan sistem pengendalian internal maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan akuntabilitas laporan keuangan daerah. Keberhasilan program diukur melalui Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang mencerminkan kualitas tata kelola keuangan daerah dan akuntabilitas pengelolaan APBD.

b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Fokus pada Penyusunan Standar Harga dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) serta percepatan proses sertifikasi tanah aset pemerintah daerah. Program ini mendukung terwujudnya tata kelola aset yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan Kabupaten Klaten.

c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Fokus pada optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terutama perluasan objek pajak dan retribusi daerah, optimalisasi opsen PKB dan opsen BBNKB, Pelaksanaan studi potensi PAD, mendorong inovasi pengelolaan PAD, penguatan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah provinsi serta penguatan pengendalian internal dan kepatuhan pengelolaan pajak daerah.

5. Kepegawaian

Program pendukung yang dilaksanakan pada urusan kepegawaian adalah Program Kepegawaian Daerah. Fokus pada pemetaan kompetensi ASN, penyusunan kebijakan internal melalui pembentukan komite talenta dan menyusun talenta pool dalam rangka optimalisasi pengelolaan manajemen talenta dan pengembangan karir. Integrasi sistem informasi kepegawaian, penyusunan analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja serta pengadaan CASN sesuai dengan formasi kebutuhan.

6. Pendidikan dan Pelatihan

Urusan Pendidikan dan Pelatihan diarahkan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kapasitas aparatur sipil negara guna mendukung terwujudnya birokrasi yang berkinerja tinggi dan berorientasi pada pelayanan publik. Melalui Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, dilaksanakan fasilitasi pengembangan kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan fungsional bagi ASN, termasuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional, serta penguatan sertifikasi dan kelembagaan pengembangan kompetensi.

Keberhasilan program diukur melalui Persentase ASN yang Meningkatkan Kompetensinya, yang mencerminkan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, adaptif, inovatif, dan



mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta pelayanan masyarakat di Kabupaten Klaten.

7. Penelitian dan Pengembangan

Program yang dilaksanakan untuk mendukung urusan penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut:

a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Diarahkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah melalui penyediaan kajian, penelitian, dan rekomendasi yang berbasis bukti (evidence-based policy). Fokus pada peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dalam perumusan kebijakan, penguatan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga riset, serta penerapan inovasi dan teknologi guna mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efektif. Fokus tersebut diwujudkan melalui aktivitas penyusunan kajian strategis dan penelitian isu prioritas daerah, evaluasi kebijakan dan program pembangunan, pengkajian regulasi daerah, penyusunan rekomendasi kebijakan, serta diseminasi dan pemantauan pemanfaatan hasil kelitbang. Selain itu, dilakukan pembinaan dan pendampingan inovasi perangkat daerah, pengembangan teknologi tepat guna, fasilitasi penerapan hasil penelitian, pengelolaan data inovasi daerah, peningkatan kapasitas SDM inovasi, dan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual.

b. Program Riset dan Inovasi Daerah

Fokus pada penguatan ekosistem riset dan inovasi untuk menghasilkan solusi yang mendukung pembangunan daerah, peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui aktivitas fasilitasi pengembangan hasil riset dan inovasi masyarakat, penyelenggaraan Kompetisi Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (Krenova), pendampingan dan inkubasi inovasi, pengembangan teknologi tepat guna, fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual, serta promosi dan diseminasi hasil inovasi.

5.3.5 Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan (Inspektorat Daerah)

Untuk mencapai target pada unsur pengawas didukung dengan program sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Fokus pada pelaksanaan pengawasan intern daerah yang berbasis risiko melalui pemetaan dan penetapan prioritas objek pengawasan strategis, pelaksanaan audit kinerja, audit kepatuhan, reviu, evaluasi, monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya yang berorientasi pada perbaikan tata kelola dan peningkatan kinerja perangkat daerah. Program ini juga diarahkan pada penguatan implementasi manajemen risiko perangkat daerah melalui



pendampingan dan reviu berkala, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan, serta optimalisasi pengelolaan pengaduan masyarakat secara responsif dan akuntabel.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Fokus pada perumusan kebijakan teknis pengawasan yang adaptif terhadap perkembangan regulasi dan kebutuhan tata kelola pemerintahan daerah, disertai pemberian pendampingan, asistensi, konsultasi, dan pembinaan kepada perangkat daerah dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, reformasi birokrasi, peningkatan integritas, pencegahan korupsi, serta penyelesaian permasalahan tata kelola. Program ini juga diarahkan untuk meningkatkan kompetensi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) secara berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kapasitas profesional guna mendukung kualitas pengawasan yang efektif dan berbasis risiko.

5.3.6 Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

Program yang dilaksanakan di wilayah kecamatan meliputi:

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Fokus pada kegiatan pelayanan publik di tingkat kecamatan serta fasilitasi PATEN di tingkat kecamatan serta Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal khususnya SPM kebencanaan melalui gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana).

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Fokus pada kegiatan yang mendukung *major project* Kabupaten Klaten dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penanganan stunting di wilayah kecamatan, peningkatan Standar Pelayanan Minimal penanggulangan kebencanaan di wilayah serta kegiatan lain yang bersifat pemberdayaan masyarakat.

c. Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Fokus pada koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan cipta kondisi di wilayah kecamatan.

d. Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum

Fokus pada fasilitasi kegiatan administrative kewilayahan.

e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Difokuskan pada pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja Pemerintah Desa.

5.3.7 Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)

Program yang dilaksanakan pada urusan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi:

a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Fokus pada kegiatan sosialisasi penguatan ideologi Pancasila pada pelajar, lingkup ASN dan masyarakat umum, pelaksanaan Upacara Hari Nasional (Hari



Lahir Pancasila, Hari Kesaktian Pancasila, dan Hari Bela Negara), Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Kabupaten, Pembinaan Purna Paskibraka.

b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Fokus pada kegiatan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, optimalisasi pemberian pendidikan politik bagi pemilih pemula, Fasilitas Hibah Bantuan Partai Politik, serta pemantauan situasi politik di daerah.

c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Fokus pada kegiatan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran, pemberdayaan ormas, mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas serta fasilitas hibah kepada ormas.

d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Fokus pada kegiatan Fasilitas Pencegahan, Pemberantasan, Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) melalui sosialisasi dan implementasi Peraturan Daerah P4GN, Fasilitas Penghayat Kepercayaan serta Fasilitas Kerukunan Umat Beragama.

e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Fokus pada pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini melalui pembentukan tim kewaspadaan dini yang melaksanakan kegiatan cegah dan deteksi dini dengan fokus pada pengumpulan informasi, analisis ancaman dan pencegahan konflik, serta pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda).

Jabaran rencana program yang mendukung prioritas pembangunan Daerah tahun 2027 berdasarkan Perangkat Daerah disajikan dalam Lampiran Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2027.

5.4. Ringkasan Pagu Indikatif Tahun 2027

Ringkasan pagu indikatif pendanaan program dan kegiatan berdasarkan Perangkat Daerah, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.6 Ringkasan Pagu Indikatif Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2027 Berdasarkan Perangkat Daerah

KODE SUB UNIT	URAI SUB UNIT	TOTAL PAGU INDIKATIF	%
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN	933,865,046,422	32.92%
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN	459,367,684,234	16.19%
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	223,863,781,598	7.89%
1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	13,473,869,241	0.47%



KODE SUB UNIT	URAI SUB UNIT	TOTAL PAGU INDIKATIF	%
1.05.0.00.0.00.03.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	11,331,278,080	0.40%
1.05.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7,316,176,600	0.26%
1.06.2.08.2.14.06.0000	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	15,581,700,999	0.55%
2.09.3.25.3.27.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	26,196,027,932	0.92%
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	31,128,818,196	1.10%
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8,859,153,319	0.31%
2.13.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	12,159,116,209	0.43%
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN	58,051,796,654	2.05%
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12,870,118,673	0.45%
2.17.3.30.0.00.03.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	21,388,017,906	0.75%
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	4,813,802,820	0.17%
2.22.2.19.3.26.04.0000	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA	33,054,355,084	1.17%
2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5,333,508,797	0.19%
3.31.2.07.3.32.05.0000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	9,994,600,108	0.35%
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	57,609,471,581	2.03%
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD	69,147,174,676	2.44%
5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	8,569,500,279	0.30%
5.02.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	682,337,801,367	24.05%
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	10,316,656,752	0.36%
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT	15,808,268,573	0.56%
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN PRAMBANAN	3,437,058,099	0.12%
7.01.0.00.0.00.02.0000	KECAMATAN GANTIWARNO	2,629,170,051	0.09%
7.01.0.00.0.00.03.0000	KECAMATAN WEDI	3,113,732,790	0.11%
7.01.0.00.0.00.04.0000	KECAMATAN BAYAT	3,101,287,385	0.11%
7.01.0.00.0.00.05.0000	KECAMATAN CAWAS	2,980,030,884	0.11%
7.01.0.00.0.00.06.0000	KECAMATAN TRUCUK	2,692,667,180	0.09%
7.01.0.00.0.00.07.0000	KECAMATAN KEBONARUM	2,687,495,250	0.09%
7.01.0.00.0.00.08.0000	KECAMATAN JOGONALAN	2,506,187,527	0.09%
7.01.0.00.0.00.09.0000	KECAMATAN MANISRENGGO	2,624,399,823	0.09%
7.01.0.00.0.00.10.0000	KECAMATAN KARANGNONGKO	2,958,220,956	0.10%



KODE SUB UNIT	URAI SUB UNIT	TOTAL PAGU INDIKATIF	%
7.01.0.00.0.00.11.0000	KECAMATAN CEPER	2,618,711,386	0.09%
7.01.0.00.0.00.12.0000	KECAMATAN PEDAN	2,487,920,291	0.09%
7.01.0.00.0.00.13.0000	KECAMATAN KARANGDOWO	3,078,239,705	0.11%
7.01.0.00.0.00.14.0000	KECAMATAN JUWIRING	2,965,912,144	0.10%
7.01.0.00.0.00.15.0000	KECAMATAN WONOSARI	3,221,131,993	0.11%
7.01.0.00.0.00.16.0000	KECAMATAN DELANGGU	3,107,925,970	0.11%
7.01.0.00.0.00.17.0000	KECAMATAN POLANHARJO	2,980,535,623	0.11%
7.01.0.00.0.00.18.0000	KECAMATAN KARANGANOM	3,043,747,997	0.11%
7.01.0.00.0.00.19.0000	KECAMATAN TULUNG	3,081,916,066	0.11%
7.01.0.00.0.00.20.0000	KECAMATAN JATINOM	4,426,520,557	0.16%
7.01.0.00.0.00.21.0000	KECAMATAN KEMALANG	3,003,739,510	0.11%
7.01.0.00.0.00.22.0000	KECAMATAN NGAWEN	3,180,039,906	0.11%
7.01.0.00.0.00.23.0000	KECAMATAN KALIKOTES	3,190,713,556	0.11%
7.01.0.00.0.00.24.0000	KECAMATAN KLATEN UTARA	6,116,048,930	0.22%
7.01.0.00.0.00.25.0000	KECAMATAN KLATEN TENGAH	12,481,205,562	0.44%
7.01.0.00.0.00.26.0000	KECAMATAN KLATEN SELATAN	4,102,641,957	0.14%
8.01.8.01.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12,900,347,077	0.45%
GRAND TOTAL		2,837,155,274,275	100.00%

Sumber: Bapperida Kabupaten Klaten, 2026



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Indikator kinerja daerah digunakan sebagai instrumen pengukuran keberhasilan pembangunan daerah yang menggambarkan tingkat pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, sekaligus kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan. Penetapan indikator kinerja tahunan dalam RKPD mencerminkan keterkaitan dan konsistensi antara arah kebijakan pembangunan daerah dengan target kinerja RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025–2029, serta menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Indikator kinerja daerah dalam Bab ini diklasifikasikan ke dalam **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**. IKU digunakan untuk mengukur capaian kinerja pembangunan daerah secara makro terhadap sasaran strategis daerah, sedangkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun menurut aspek dan fokus kinerja pada setiap urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan. Melalui pengukuran kinerja tersebut, diharapkan capaian kinerja tahunan dapat selaras dengan target RPJMD dan mendukung terwujudnya hasil pembangunan daerah yang berkelanjutan.

6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai upaya pencapaian prioritas pembangunan Daerah tahun 2027 ditetapkan target indikator kinerja utama (IKU) sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan jangka menengah Daerah tahun 2025-2029. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Klaten Tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Klaten Tahun 2027

No.	Indikator Kinerja Utama	Definsi Operasional/ Formulasi Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2025	RKPD Tahun 2027	Target Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Klaten
1	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan indikator yang mengukur tingkat daya saing dan produktivitas daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.(Sesuai perhitungan BRIN)	Indeks	3,86	4,00	-
2	Tingkat Kemiskinan	Banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia	%	11,00	10,10	10,10 – 9,80
3	PDRB Perkapita**	PDRB Per Kapita = PDRB ADHB / populasi PDRB ADHB = PDRB Atas Dasar harga Berlaku Populasi = Jumlah Penduduk Regional t = periode	Juta Rp.	44,92*	52,58	-



No.	Indikator Kinerja Utama	Definsi Operasional/ Formulasi Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2025	RKPD Tahun 2027	Target Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Klaten
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi, yang dinilai oleh Kementerian PANRB berdasarkan RB General (bobot 100) dan RB Tematik (bobot 20)	Indeks	84,78	85,25	-
5	Indeks Harmoni Indonesia	Model formula pengukuran IHaI dengan pendekatan Wellbeing Methodology (WM), yaitu: $IHaI = \sum (k_i - X_i)$ IHaI: Nilai akhir dari indeks harmoni $\sum$: simbol operasi penjumlahan k_i : Bobot yang diberikan setiap variabel X_i X_i : Variabel operasional yang mencerminkan aspek tertentu dari kondisi harmoni	Indeks	6,83	6,90	-
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan emisi GRK merupakan indikator yang mengukur keberhasilan pegurangan emisi GRK dari empat sektor/sub sektor prioritas yaitu transportasi, AFOLU, pengelolaan sampah.	TonCO2eq	522.007,1	1.569.338,99	-
7	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan z-score dan <i>distance to scale</i> (0-100); 2. Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator; 3. Mengelompokkan wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkan <i>cut off point</i> IKP	Indeks	71,98	72,71	-
8	Indeks Pembangunan Manusia	IPM menggambarkan kemampuan penduduk dalam mengakses hasil pembangunan, terutama pada aspek kesehatan, pendidikan, dan pendapatan (Berdasarkan perhitungan BPS)	Indeks	78,68	79,90	79,90
9	Indeks Infrastruktur	Rata-rata capaian indikator infrastruktur daerah meliputi jalan, sanitasi, air minum, irigasi, rumah layak huni, prasarana perlengkapan jalan dan akses internet	Indeks	72,42	73,75	-
10	Pertumbuhan Ekonomi*	Pertumbuhan ekonomi adalah laju peningkatan aktivitas ekonomi daerah yang dihitung	%	4,62	5,22	4,73-6,58



No.	Indikator Kinerja Utama	Definsi Operasional/ Formulasi Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2025	RKPD Tahun 2027	Target Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Klaten
		berdasarkan PDRB/PDB dari tahun sebelumnya. (Berdasarkan perhitungan BPS)				

Catatan : 1. Tanda * menunjukkan Data Capaian Sangat Sementara Tahun 2025
2. Tanda – menunjukkan bahwa indikator terkait tidak dibahas/ditetapkan dalam Rakortekrenbang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

6.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029 ditetapkan menjadi 4 (empat) aspek, yaitu: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Jabaran indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta target tahun 2027 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Klaten Tahun 2027

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
A	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI				
1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)* ¹	Indeks	71,98	72,71	DKPP
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) ¹	%	8,78*	8,78	DKPP
3	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan ¹	%	95,50	96,62	DPUPR, PDAM
4	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ¹	%	1,89	2,41	DPUPR
5	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ¹	%	27,41	27,50	DLH
6	Kontribusi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (kumulatif)* ¹	TonCO2eq	522.007,10	1.569.338,99	DLH, DKPP, DISHUB, DPU, DISPERINAKER
7	Indeks Risiko Bencana (IRB) ¹	Indeks	74,28	73,78	BPBD
8	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,94	0,94	BPBD
9	Indeks kinerja sistem irigasi kewenangan kabupaten/kota ¹	Indeks	15,376	15,986	DPUPR
10	Indeks Harmoni Indonesia*	Indeks	6,83	6,90	BAKESBANGPOL
B	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Pertumbuhan Ekonomi* ¹	%	4,62	5,22	Semua OPD, koordinator BAPPERIDA
2	Tingkat Kemiskinan* ¹	%	11,00	10,10	Semua OPD, koordinator BAPPERIDA
3	PDRB Perkapita (ADHB)*	Juta Rupiah	44,92	52,58	Semua OPD, koordinator BAPPERIDA
4	Tingkat Pengangguran Terbuka ¹	%	3,88	3,50	Semua OPD, koordinator BAPPERIDA



No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
5	Indeks Gini	Indeks	0,350	0,320	Semua OPD, koordinator BAPPERIDA
6	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia ¹	%	17,84-18,04	18,84	SEKRETARIAT DAERAH
7	Indeks Pembangunan Manusia*	Indeks	78,68	79,90	BAPPERIDA
8	Usia Harapan Hidup ¹	Tahun	77,69	78,09	DINAS KESEHATAN
9	Jumlah Kasus Kematian Ibu ¹	kasus	11,00	10,00	DINAS KESEHATAN
10	Jumlah Kematian Balita	balita	20,00	17,00	DINAS KESEHATAN
11	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ¹	%	20,80	17,60	DINAS KESEHATAN
12	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) ¹	%	72,40	85,00	DINAS KESEHATAN
13	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) ¹	%	83,00	85,00	DINAS KESEHATAN
14	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional ¹	%	99,20	99,30	DINAS KESEHATAN
15	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun ¹	tahun	9,30	9,78	DINAS PENDIDIKAN
16	Harapan Lama Sekolah ¹	tahun	13,44	13,92	DINAS PENDIDIKAN
17	Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				DINAS PENDIDIKAN
	a. Literasi Membaca SD/Sederajat ¹	%	68,15	75,66	DINAS PENDIDIKAN
	b. Literasi Membaca SMP/Sederajat ¹	%	80,23	83,43	DINAS PENDIDIKAN
	c. Numerasi SD/Sederajat ¹	%	58,13	66,83	DINAS PENDIDIKAN
	d. Numerasi SMP/Sederajat ¹	%	69,40	73,90	DINAS PENDIDIKAN
18	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi ¹	%	10,84	11,62	DINAS PENDIDIKAN
19	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru mengajar mulok bahasa daerah/ seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan ¹	%	100	100	DINAS PENDIDIKAN
20	Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun ¹	%	69,40	94,25	DINAS PENDIDIKAN
21	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	12,24	12,40	DISPERSIP
22	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan ¹	%	41,57	37,08	DISBUDPORAPAR
23	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/ mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir ¹	%	64,91	22,45	DISBUDPORAPAR
24	Persentase PPKS yang mendapatkan peningkatan kesejahteraan sosial	%	99,62	99,62	DISSOSP3APPKB
25	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	78,30	78,30	DISSOSP3APPKB



No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
26	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga) ¹	Indeks	73,70	73,80	DISSOSP3APPKB
27	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	69,70	69,80	DISSOSP3APPKB
28	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) ¹	Indeks	0,141	0,130	DISSOSP3APPKB
29	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	74,21	74,30	DISBUDPORAPAR
30	Persentase Prestasi Olahraga	%	41,26	53,00	DISBUDPORAPAR
31	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan ¹	%	39,44	56,57	DISPERINAKER
32	Jumlah tamu wisatawan mancanegara ¹	Orang	214.823	248.660	DISBUDPORAPAR
33	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas (ULD) bidang Ketenagakerjaan	Orang	76,00	76,00	DISPERINAKER
34	Indeks Zakat Nasional	Indeks	0,39	0,48	SEKRETARIAT DAERAH
35	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Produk	3.659	3.894	DKUKMP
36	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS)	Indeks	57,83	57,90	DISSOSP3APPKB
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan ¹	%	39,29	40,86	DISPERINAKER
2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum ¹	%	3,74	3,76	DISBUDPORAPAR
3	Rasio Kewirausahaan Daerah ¹	%	3,30	4,30	DKUKMP
4	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB ¹	%	1,14	1,15	DKUKMP
5	Kapabilitas Inovasi ¹	Indeks	2,94	2,94	BAPPERIDA
6	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB ¹	%	23,05	24,35	DPMPTSP
7	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian ADHK	%	1,36	2,24	DKPP
8	Rasio PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	3,95	4,25	DKUKMP
9	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB ¹	%	0,95	0,95	BPKPAD
10	Return On Asset (ROA) BUMD ¹	%	3,19	3,19	SEKRETARIAT DAERAH
11	Indeks Infrastruktur*	Indeks	72,42	73,75	DPUPR, DISHUB, DISPERAKIM, DISKOMINFO
12	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak ¹	%	97,79	97,93	DISPERAKIM
13	Persentase Desa Mandiri	%	19,43	22,76	DISPERMASDES
14	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	%	18,40	18,40	BPKPAD
15	Tingkat Inflasi	%	2,5±1	2,5±1	SEKRETARIAT DAERAH
16	Rasio konektivitas	Rasio	0,120	0,125	DISHUB



No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
17	Jumlah pengunjung tempat bersejarah ¹	orang	2.503.566,00	3.725.574,00	DISBUDPORAPAR
18	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan ¹	%	75,64	75,64	DISSOSP3APPKB
19	Total dana pihak ketiga pada bank kabupaten/ kota per PDRB ¹	%	0,86	0,96	SEKRETARIAT DAERAH
20	Total kredit pada bank milik kabupaten/ kota per PDRB ¹	%	0,84	0,97	SEKRETARIAT DAERAH
21	Disparitas harga ¹	%	6,54	12,20	DKUKMP
D	ASPEK PELAYANAN UMUM				
1	Indeks Reformasi Birokrasi* ¹	Indeks	84,78	85,25	SEKRETARIAT DAERAH
2	Indeks Reformasi Hukum ¹	Indeks	98,70	98,70	SEKRETARIAT DAERAH
3	Indeks SPBE / Indeks Pemerintahan Digital ¹	Indeks	4,22	1,80	DISKOMINFO
4	Indeks Pelayanan Publik ¹	Indeks	4,54	4,54	SEKRETARIAT DAERAH
5	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	Nilai	67,27	68,35	SEKRETARIAT DAERAH
6	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	80,58	83,00	BKPSDM
7	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	81,10	87,25	BAPPERIDA
8	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	N/A	79,20	SEKRETARIAT DAERAH
9	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Angka	N/A	3,101	INSPEKTORAT
10	Indeks Integritas Nasional ¹	Indeks	73,97	78,76	INSPEKTORAT
11	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	SATPOL PP DAN DAMKAR
12	Indeks Daya Saing Daerah*	Indeks	3,86	4,00	BAPPERIDA
13	Jumlah Kejadian Konflik SARA ¹	Angka	0,00	0,00	BAKESBANGPOL
14	Persentase panjang jalan kondisi permukaan mantap kewenangan kabupaten/kota ¹	%	84,21	84,81	DPUPR
15	Persentase rumah tangga dengan akses internet ¹	%	74,62	84,00	DISKOMINFO
16	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	4,67	4,74	SEKRETARIAT DAERAH
E	INDIKATOR KINERJA KUNCI				
1)	Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
a.	Urusan Pendidikan				
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	91,17	100	DINAS PENDIDIKAN
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,12	99,21	DINAS PENDIDIKAN
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	98,38	98,51	DINAS PENDIDIKAN



No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	11,05	12,58	DINAS PENDIDIKAN
5	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi ¹	%	10,84	11,62	DINAS PENDIDIKAN
b.	Urusan Kesehatan				
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	1,20	1,20	DINAS KESEHATAN
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	DINAS KESEHATAN
3	Persentase ibu hamil Mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	DINAS KESEHATAN
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	DINAS KESEHATAN
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	DINAS KESEHATAN
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	DINAS KESEHATAN
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	DINAS KESEHATAN
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	DINAS KESEHATAN
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	DINAS KESEHATAN
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	DINAS KESEHATAN
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	DINAS KESEHATAN
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	DINAS KESEHATAN
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	DINAS KESEHATAN
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	DINAS KESEHATAN
c.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	0,46	0,47	DPUPR



No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	%	95,50	96,62	DPUPR
3	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	1,89	2,41	DPUPR
4	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	%	100	100	DPUPR
5	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota		84,21	84,81	DPUPR
6	Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	100	100	DPUPR
7	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	DPUPR
d.	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	DISPERAKIM
2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	DISPERAKIM
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/ Kota yang ditangani	%	100	100	DISPERAKIM
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	97,79	97,85	DISPERAKIM
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100	100	DISPERAKIM
e.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat				
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	SATPOL PP DAN DAMKAR
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	SATPOL PP DAN DAMKAR
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	BPBD
4	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	BPBD
5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	BPBD
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	SATPOL PP DAN DAMKAR
7	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	menit	14,12	13,75	SATPOL PP DAN DAMKAR



No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
f. Urusan Sosial					
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100	100	DISSOSP3APPKB
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	DISSOSP3APPKB
2) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					
a. Urusan Tenaga Kerja					
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	DISPERINAKER
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	13,66	23,28	DISPERINAKER
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	45,55	45,89	DISPERINAKER
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	3,70	4,10	DISPERINAKER
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	90,76	90,78	DISPERINAKER
b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	%	1,34	2,30	DISSOSP3APPKB
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	DISSOSP3APPKB
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 1000 penduduk perempuan)	%	0,07	0,07	DISSOSP3APPKB
c. Urusan Pangan					
1	Ketersediaan pangan utama/beras	Ton	294.922,49	294.922,49	DKPP
2	Jumlah produksi daging	Ton	12.921,17	13.000,00	DKPP
3	Jumlah produksi telur	Kg	11.545.411	13.279.716	DKPP
4	Jumlah produksi susu	liter	2.298.053	2.298.053	DKPP
5	Populasi ternak ruminansia	ekor	308.222	308.222	DKPP
6	Populasi ternak non ruminansia	ekor	9.512.374	10.360.505	DKPP
d. Urusan Pertanian					
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	DISPERAKIM



No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	DISPERAKIM
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	100	100	DISPERAKIM
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	100	100	DISPERAKIM
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	100	100	DISPERAKIM
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	DISPERAKIM
e.	Urusan Lingkungan Hidup				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) ¹	Indeks	69,56	71,92	DLH
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Indeks	53,03	68,27	DLH
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Indeks	0	0	DLH
f.	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
1	Persentase Perekaman KTP elektronik	%	99,34	99,73	DISDUKCAPIL
2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	78,51	84,00	DISDUKCAPIL
3	Kepemilikan Akta Kelahiran umur 0-18 tahun	%	99,36	99,48	DISDUKCAPIL
4	Persentase perangkat daerah dan organisasai atau lembaga yang berpotensi memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	80,80	89,13	DISDUKCAPIL
g.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	100	DISPERMASDES
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	181,48	4,71	DISPERMASDES
h.	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	1,94	1,95	DISSOSP3APPKB
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/ MCPR</i>)	%	63,60	67,50	DISSOSP3APPKB
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	7,29	7,80	DISSOSP3APPKB
i.	Urusan Perhubungan				
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio	0,120	0,125	DISHUB
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/ kota	%	0,43	0,33	DISHUB
j.	Urusan Komunikasi dan Informatika				



No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	DISKOMINFO
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	91,00	92,00	DISKOMINFO
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	75,00	80,00	DISKOMINFO
k. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	40,37	43,30	DKUKMP
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	63,69	64,50	DKUKMP
l. Urusan Penanaman Modal					
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	36,00	38,00	DPMPSTP
m. Urusan Kepemudaan dan Olahraga					
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1,40	1,70	DISBUDPORAPAR
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	4,88	4,90	DISBUDPORAPAR
3	Persentase Prestasi Olahraga	%	41,26	53,00	DISBUDPORAPAR
n. Urusan Statistik					
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	DISKOMINFO
2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	DISKOMINFO
o. Urusan Persandian					
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	78,00	80,00	DISKOMINFO
p. Urusan Kebudayaan					
1	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan ¹	%	41,57	41,57	DISBUDPORAPAR
q. Urusan Perpustakaan					
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	58,50	58,60	DISPERSIP
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	12,24	12,40	DISPERSIP



No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
r.	Urusan Kearsipan				
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	%	100	100	DISPERSIP
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	89,17	91,00	DISPERSIP
3)	Urusan Pilihan				
a.	Urusan Kelautan dan Perikanan				
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/ Kota	ton	32.157,00	32.157,00	DKPP
b.	Urusan Pariwisata				
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	10,00	10,00	DISBUDPORAPAR
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	5,89	7,13	DISBUDPORAPAR
3	Tingkat hunian akomodasi	%	37,65	37,85	DISBUDPORAPAR
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	4,14	4,74	DISBUDPORAPAR
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	7,25	7,45	DISBUDPORAPAR
c.	Urusan Pertanian				
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	Ku/Ha	66,23	68,87	DKPP
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	74,39	25,00	DKPP
d.	Urusan Perdagangan				
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	100	DKUKMP
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	84,79	90,50	DKUKMP
3	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	96,50	97,30	DKUKMP
e.	Urusan Perindustrian				
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	%	1,13	1,15	DISPERINAKER



No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	98,00	98,00	DISPERINAKER
3	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%	100	100	DISPERINAKER
4)	Unsur Penunjang Urusan				
a.	Unsur Penunjang Sekretariat Daerah				
1	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	40,04	46,00	SEKRETARIAT DAERAH
2	Rasio nilai belanja yang dilakukan lewat pengadaan	%	69,34	72,00	SEKRETARIAT DAERAH
3	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	-23,23	41,00	SEKRETARIAT DAERAH
b.	Unsur Penunjang Perencanaan				
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang Didukung Program Daerah	%	100,00	100,00	BAPPERIDA
c.	Unsur Penunjang Keuangan Daerah				
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	32,21	32,21	BPKPAD
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	18,40	18,40	BPKPAD
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	88,19	91,45	BPKPAD
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	3,01	6,50	BPKPAD
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	26,50	31,20	BPKPAD
6	Persentase Penurunan SILPA	%	38,52	-9,80	BPKPAD
d.	Unsur Penunjang Kepegawaian				
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	60,24	60,26	BKPSDM
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	21,41	24,80	BKPSDM
e.	Unsur Penunjang Pendidikan dan Pelatihan				
1	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	93,64	100	BKPSDM
f.	Unsur Penunjang Pengawasan				
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Angka	N/A	3,101	INSPEKTORAT



No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2025	Target Tahun 2027	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Angka	N/A	3,310	INSPEKTORAT

6.3. Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan tolok ukur pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Jabaran indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) beserta target tahun 2026 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.3 Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Klaten Tahun 2027

Bidang Urusan/Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal			Satuan	Target Tahun 2027	Urusan/ OPD Pengampu
A	Urusan Pendidikan				
	1)	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	100	DINAS PENDIDIKAN
	2)	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	100	DINAS PENDIDIKAN
	3)	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	100	DINAS PENDIDIKAN
B	Urusan Kesehatan				
	1)	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	DINAS KESEHATAN
	2)	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	DINAS KESEHATAN
	3)	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	DINAS KESEHATAN
	4)	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	DINAS KESEHATAN
	5)	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	DINAS KESEHATAN
	6)	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	DINAS KESEHATAN
	7)	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	DINAS KESEHATAN
	8)	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	DINAS KESEHATAN
	9)	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	DINAS KESEHATAN
	10)	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	DINAS KESEHATAN



Bidang Urusan/Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal			Satuan	Target Tahun 2027	Urusan/ OPD Pengampu
	11)	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	DINAS KESEHATAN
	12)	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	DINAS KESEHATAN
C	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
	1)	Jumlah/Persentase Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.	%	100	DPUPR
	2)	Jumlah/Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik.	%	100	DPUPR
D	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
	1)	Presentase korban yang memperoleh penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni akibat bencana daerah	%	100	DISPERAKIM
	2)	Presentase masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah yang menerima fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	DISPERAKIM
E	Urusan Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat				
	1)	Presentase Warga Negara yang memperoleh pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	%	100	SATPOL PP DAN DAMKAR
	2)	Presentase korban kebakaran yang memperoleh penyelamatan dan evakuasi	%	100	SATPOL PP DAN DAMKAR
	3)	Presentase Warga Negara yang memperoleh pelayanan informasi rawan bencana	%	100	BPBD
	4)	Presentase Warga Negara yang memperoleh pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	BPBD
	5)	Presentase korban bencana yang memperoleh penyelamatan dan evakuasi	%	100	BPBD
F	Urusan Sosial				
	1)	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	%	100	DISSOSP3APPKB
	2)	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	%	100	DISSOSP3APPKB
	3)	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar lanjut usia Terlantar di Luar Panti	%	100	DISSOSP3APPKB
	4)	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Tuna Sosial (Gelandangan dan Pengemis) di Luar Panti	%	100	DISSOSP3APPKB
	5)	Terpenuhinya Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	%	100	DISSOSP3APPKB



BAB VII

PENUTUP

Pelaksanaan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2027 dilaksanakan berdasarkan kaidah perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan konsisten dengan arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta program prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025–2029. Seluruh perangkat daerah diwajibkan untuk menjaga keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas kewenangan guna meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2027 ditetapkan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan pembangunan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Berikut kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2027:

1. RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2027 menjadi pedoman bagi Perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2027 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2027 akan dijabarkan ke dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2027 untuk dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2027 diharapkan untuk dapat dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2027 secara tepat berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, akuntabel dan partisipatif.
4. Untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan RKPD tahun 2027, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah berkewajiban melakukan pemantauan terhadap penjabaran RKPD tahun 2027 ke dalam Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah, KUA dan PPAS, dan RKA APBD Tahun Anggaran 2027, serta mengevaluasi hasil RKPD tahun 2027.
5. Seluruh Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan RKPD Tahun 2027 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dan antar unit kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Seluruh *stakeholders* (masyarakat dan dunia usaha) diharapkan untuk turut berpartisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen RKPD Kabupaten Klaten tahun 2027.

Dalam rangka menjamin kualitas pelaksanaan pembangunan daerah, penerapan manajemen risiko menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan RKPD Kabupaten



Klaten Tahun 2027. Manajemen risiko diterapkan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, baik risiko strategis, operasional, keuangan, maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan manajemen risiko tersebut diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, serta ketepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Selain itu, pelaksanaan RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2027 juga dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya. Sinergi pendanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat terus diperkuat untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara optimal.

Dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Klaten Tahun 2027, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga target kinerja pembangunan daerah tahun 2027 dapat tercapai dan memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya visi pembangunan Kabupaten Klaten yaitu **Mewujudkan Klaten yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan**



BUPATI KLATEN

HAMENANG WAJAR ISMOYO

LAMPIRAN

**RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2027**



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		DINAS PENDIDIKAN				806.618.196.422,00							809.432.371.385,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				806.618.196.422,00							809.432.371.385,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				806.618.196.422,00							809.432.371.385,00	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				757.513.071.422,00							773.376.147.385,00	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi				757.513.071.422,00							773.376.147.385,00	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,15 Indeks	83,87 Indeks	757.513.071.422,00						84,90 Indeks	773.376.147.385,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.00 Nilai	81.75 Nilai	757.513.071.422,00						82.15 Nilai	773.376.147.385,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				131.700.000,00					Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan, Guru, Siswa		100.000.000,00	
		Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sesuai dengan perundang-undangan yang berlaaku				131.700.000,00					Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan, Guru, Siswa		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	4 Dokumen	4 Dokumen	116.700.000,00						4 Dokumen	60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	15.000.000,00						4 Laporan	40.000.000,00	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				116.700.000,00							60.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	16 Dokumen	116.700.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Desa Tegalyoso 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		4 Dokumen	60.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	7 Laporan	15.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		4 Laporan	40.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				731.074.261.000,00					ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan		770.456.147.385,00	
		Terlaksananya administrasi keuangan sesuai perundang-undangan yang berlaku				731.074.261.000,00					ASN di Lingkungan Dinas Pendidikan		770.456.147.385,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	303.000.000,00						2 Dokumen	55.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6845 Orang/bulan	6845 Orang/bulan	730.771.261.000,00						6845 Orang/bulan	770.401.147.385,00	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				730.771.261.000,00							770.401.147.385,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	6845 Orang/bulan	6845 Orang/bulan	730.771.261.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU) DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		6845 Orang/bulan	770.401.147.385,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				303.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen	16 Dokumen	303.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		2 Dokumen	55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				75.000.000,00					Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan, Guru, Siswa		350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya administrasi BMD sesuai perundang-undangan yang berlaku				75.000.000,00					Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan, Guru, Siswa		350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00						4 Laporan	350.000.000,00	
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				75.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	75.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		4 Laporan	350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				602.360.000,00					Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan		400.000.000,00	
		Terlaksananya pengadministrasian umum tepat waktu				602.360.000,00					Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan		400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	407 Laporan	307 Laporan	602.360.000,00						307 Laporan	400.000.000,00	
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				602.360.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	407 Laporan	285 Laporan	602.360.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		307 Laporan	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				24.878.010.422,00					Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan, PTK		2.000.000.000,00	
		Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu				24.878.010.422,00					Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan, PTK		2.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	24.878.010.422,00						36 Laporan	2.000.000.000,00	
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				24.878.010.422,00							2.000.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	48 Laporan	24.878.010.422,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		36 Laporan	2.000.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				751.740.000,00					Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan		70.000.000,00	
		Terlaksananya pemeliharaan BMD tepat waktu				751.740.000,00					Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan		70.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	185 Unit	185 Unit	751.740.000,00						185 Unit	70.000.000,00	
	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				751.740.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	185 Unit	207 Unit	751.740.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		185 Unit	70.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				48.837.325.000,00							34.816.224.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Usia Sekolah				48.662.325.000,00							31.946.224.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			999.Persentase PAUD dan PNF berakreditasi minimal B	58.00 %	57.00 %	48.662.325.000,00						57.85 %	31.946.224.000,00	
			999.Persentase SD berakreditasi minimal B	99,40 %	98,95 %	48.662.325.000,00						99,10 %	31.946.224.000,00	
			999.Persentase SMP berakreditasi minimal B	90,10 %	88,70 %	48.662.325.000,00						88,95 %	31.946.224.000,00	
			999.Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	98.67 %	98.51 %	48.662.325.000,00						98.58 %	31.946.224.000,00	
			999.Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	98.18 %	93.98 %	48.662.325.000,00						95.38 %	31.946.224.000,00	
			999.Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99.39 %	99.21 %	48.662.325.000,00						99.26 %	31.946.224.000,00	
			999.Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	14.87 %	12.58 %	48.662.325.000,00						13.34 %	31.946.224.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				18.488.025.000,00					Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, Siswa dan guru		7.129.809.000,00	
		Terwujudnya pengelolaan pendidikan Sekolah Dasar yang bermutu				18.488.025.000,00					Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan, Siswa dan guru		7.129.809.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	5 Paket	750.000.000,00						5 Paket	750.000.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	3 Kegiatan	3 Kegiatan	37.800.000,00						3 Kegiatan	200.000.000,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	26 Komunitas	26 Komunitas	35.000.000,00						26 Komunitas	200.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	130 Orang	130 Orang	35.000.000,00						130 Orang	300.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	800 Orang	800 Orang	759.800.000,00						800 Orang	900.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	50 Orang	50 Orang	10.000.000,00						50 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2000 Paket	2000 Paket	4.921.425.000,00						2000 Paket	456.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5000 Peserta Didik	5000 Peserta Didik	12.800.000,00						5000 Peserta Didik	20.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	14 Ruang	6 Ruang	10.625.000.000,00						13 Ruang	1.786.529.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	10 Unit	685.000.000,00						10 Unit	917.280.000,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	710 Satuan Pendidikan	710 Satuan Pendidikan	30.000.000,00						710 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	210 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	77.800.000,00						120 Satuan Pendidikan	550.000.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1230 Peserta Didik	1150 Peserta Didik	508.400.000,00						1200 Peserta Didik	750.000.000,00	
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				508.400.000,00							750.000.000,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1230 Peserta Didik	1150 Peserta Didik	508.400.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		1200 Peserta Didik	750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2000 Paket	10125 Paket	4.921.425.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		2000 Paket	456.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				685.000.000,00							917.280.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Unit	10 Unit	685.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		10 Unit	917.280.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				30.000.000,00							250.000.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	710 Satuan Pendidikan	710 Satuan Pendidikan	30.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		710 Satuan Pendidikan	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				10.625.000.000,00							1.786.529.000,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	14 Ruang	85 Ruang	10.625.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		13 Ruang	1.786.529.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				12.800.000,00							20.000.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5000 Peserta Didik	50000 Peserta Didik	12.800.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		5000 Peserta Didik	20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				750.000.000,00							750.000.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket	11 Paket	750.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		5 Paket	750.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				11.701.800.000,00					Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan dan PTK		6.276.415.000,00	
		Terwujudnya pengelolaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang bermutu				11.701.800.000,00					Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan dan PTK		6.276.415.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	10 Paket	250.000.000,00						10 Paket	250.000.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	20.000.000,00						2 Kegiatan	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	20 Orang	20 Orang	10.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		20 Orang	360.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				150.000.000,00							500.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	340 Orang	150 Orang	150.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		340 Orang	500.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				266.800.000,00							1.119.651.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	117 Satuan Pendidikan	118 Satuan Pendidikan	266.800.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		117 Satuan Pendidikan	1.119.651.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				20.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	117 Orang	118 Orang	20.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		117 Orang	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan				10.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	2 Konten Digital	2 Konten Digital	10.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		2 Konten Digital	150.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				50.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		2 Dokumen	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan				10.000.000,00							200.000.000,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	3 Komunitas	5 Komunitas	10.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		2 Komunitas	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				20.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlayannya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		2 Kegiatan	200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				50.000.000,00							300.000.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	117 Satuan Pendidikan	118 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		117 Satuan Pendidikan	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				5.930.000.000,00							300.000.000,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	1000 Paket	12250 Paket	5.930.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		1000 Paket	300.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				250.000.000,00							250.000.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	10 Paket	37 Paket	250.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		10 Paket	250.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				16.506.300.000,00					Lembaga PAUD, Siswa dan PTK		19.639.400.000,00	
		Terwujudnya pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang bermutu				16.506.300.000,00					Lembaga PAUD, Siswa dan PTK		19.639.400.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	20 Paket	20 Paket	300.000.000,00						20 Paket	400.000.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00						2 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	2 Komunitas	2 Komunitas	10.000.000,00						2 Komunitas	50.000.000,00	
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	250 Satuan Pendidikan	200 Satuan Pendidikan	135.600.000,00						200 Satuan Pendidikan	200.000.000,00	
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1114 Satuan Pendidikan	1114 Satuan Pendidikan	15.740.100.000,00						1114 Satuan Pendidikan	18.029.400.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	604 Orang	604 Orang	85.000.000,00						604 Orang	350.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1112 Satuan Pendidikan	1112 Satuan Pendidikan	67.800.000,00						1112 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1350 Peserta didik	1200 Peserta didik	122.800.000,00						1250 Peserta didik	375.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1350 Peserta didik	1980 Peserta didik	122.800.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		1250 Peserta didik	375.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD				300.000.000,00							400.000.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	20 Paket	20 Paket	300.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		20 Paket	400.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				67.800.000,00							100.000.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	1112 Satuan Pendidikan	1080 Satuan Pendidikan	67.800.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		1112 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				2.141.200.000,00					Satuan Pendidikan Nonformal, Murid, Tutor		1.770.600.000,00	
		Terwujudnya pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan yang bermutu				2.141.200.000,00					Satuan Pendidikan Nonformal, Murid, Tutor		1.770.600.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	15 Paket	15 Paket	100.000.000,00						15 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	15 Peserta Didik	15 Peserta Didik	60.000.000,00						15 Peserta Didik	145.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	12 Satuan Pendidikan	12 Satuan Pendidikan	1.981.200.000,00						12 Satuan Pendidikan	1.605.600.000,00	
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				1.981.200.000,00							1.605.600.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	12 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	1.981.200.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		12 Satuan Pendidikan	1.605.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				100.000.000,00							20.000.000,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	15 Paket	50 Paket	100.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		15 Paket	20.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				60.000.000,00							145.000.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	15 Peserta Didik	15 Peserta Didik	60.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		15 Peserta Didik	145.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		3 Dokumen	350.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
5.	1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				10.000.000,00							50.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan				10.000.000,00							50.000.000,00	
			999.Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	100 Persentase	100 Persentase	10.000.000,00						100 Persentase	50.000.000,00	
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000,00					Satuan Pendidikan Nonformal		50.000.000,00	
		Terlaksananya penerbitan izin satuan pendidikan PAUD dan PNF yang diselenggarakan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku				10.000.000,00					Satuan Pendidikan Nonformal		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	30 Dokumen	40 Dokumen	10.000.000,00						30 Dokumen	50.000.000,00	
	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				10.000.000,00							50.000.000,00	
		Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	30 Dokumen	220 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		30 Dokumen	50.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
6.	1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				37.800.000,00							90.000.000,00	
		Meningkatnya pelindungan dan pemajuan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah				37.800.000,00							90.000.000,00	
			999.Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	100 Persentase	100 Persentase	37.800.000,00						100 Persentase	90.000.000,00	
	1.01.06.2.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				37.800.000,00					Satuan Pendidikan, Murid dan Guru		90.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah				37.800.000,00					Satuan Pendidikan, Murid dan Guru		90.000.000,00	
			Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	1 Bahasa	1 Bahasa	37.800.000,00						1 Bahasa	90.000.000,00	
	1.01.06.2.01.0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota				37.800.000,00							90.000.000,00	
		Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	1 Bahasa	1 Bahasa	37.800.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		1 Bahasa	90.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN
		TK NEGERI PEMBINA KLATEN				195.730.000,00							197.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				195.730.000,00							197.000.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				195.730.000,00							197.000.000,00	
7.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				159.130.000,00							141.800.000,00	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	83,87 Indeks	25.000.000,00						-	17.000.000,00	
			-	-	-	119.130.000,00						-	114.800.000,00	
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				40.000.000,00					-		27.000.000,00	
		-				40.000.000,00					-		27.000.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	12 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Ngawen Desa Mayungan 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	10.000.000,00	TK NEGERI PEMBINA KLATEN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				37.000.000,00							37.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan	37.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Ngawen Desa Mayungan 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	37.500.000,00	TK NEGERI PEMBINA KLATEN
8.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				36.600.000,00							55.200.000,00	
			Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	-	93,98 %	36.600.000,00						-	55.200.000,00	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				36.600.000,00					-		55.200.000,00	
		-				36.600.000,00					-		55.200.000,00	
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	-	-	36.600.000,00						-	55.200.000,00	
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD				36.600.000,00							55.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	-	1 Satuan Pendidikan	36.600.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Ngawen Desa Mayungan 1	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	55.200.000,00	TK NEGERI PEMBINA KLATEN
		SD NEGERI				75.325.500.000,00							79.174.330.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				75.325.500.000,00							79.174.330.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				75.325.500.000,00							79.174.330.000,00	
9.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				75.325.500.000,00							79.174.330.000,00	
			Persentase SD berakreditasi minimal B	-	98,75 %	75.325.500.000,00						-	79.174.330.000,00	
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	-	99,21 %	75.325.500.000,00						-	79.174.330.000,00	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				75.325.500.000,00					-		79.174.330.000,00	
		-				75.325.500.000,00					-		79.174.330.000,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	-	75.325.500.000,00						-	79.174.330.000,00	
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				75.325.500.000,00							79.174.330.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	-	710 Satuan Pendidikan	75.325.500.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	79.174.330.000,00	SD NEGERI
		SMP NEGERI				50.808.100.000,00							51.741.070.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				50.808.100.000,00							51.741.070.000,00	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				50.808.100.000,00							51.741.070.000,00	
10.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				50.808.100.000,00							51.741.070.000,00	
			Persentase SMP berakreditasi minimal B	-	94,05 %	50.808.100.000,00						-	51.741.070.000,00	
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	-	98,51 %	50.808.100.000,00						-	51.741.070.000,00	
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				50.808.100.000,00					-		51.741.070.000,00	
		-				50.808.100.000,00					-		51.741.070.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan	212.715.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Cawas Desa Barepan 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	127.000.000,00	SPNF SKB KLATEN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				101.489.000,00					-		136.500.000,00	
		-				101.489.000,00					-		136.500.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	90.000.000,00						-	108.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	3.950.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	0,00						-	15.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	7.539.000,00						-	8.500.000,00	
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				3.950.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	1 Unit	3.950.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Cawas Desa Barepan 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	5.000.000,00	SPNF SKB KLATEN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				90.000.000,00							108.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	90.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Cawas Desa Barepan 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	108.000.000,00	SPNF SKB KLATEN
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	0 Unit	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Cawas Desa Barepan 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	15.000.000,00	SPNF SKB KLATEN
	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.539.000,00							8.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	8 Unit	7.539.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Cawas Desa Barepan 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	8.500.000,00	SPNF SKB KLATEN
12.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				519.600.000,00							344.000.000,00	
		-	-	-	-	508.200.000,00						-	308.800.000,00	
			Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	-	93,98 %	11.400.000,00						-	35.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	-	12,58 %	11.400.000,00						-	35.200.000,00	
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				11.400.000,00					-		35.200.000,00	
		-				11.400.000,00					-		35.200.000,00	
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	-	-	11.400.000,00						-	10.200.000,00	
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	-	-	0,00						-	25.000.000,00	
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD				11.400.000,00							10.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	-	1 Satuan Pendidikan	11.400.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Cawas Desa Barepan 1	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	10.200.000,00	SPNF SKB KLATEN
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				0,00							25.000.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	-	19 Satuan Pendidikan	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Cawas Desa Barepan 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	25.000.000,00	SPNF SKB KLATEN
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				508.200.000,00					-		308.800.000,00	
		-				508.200.000,00					-		308.800.000,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-	-	0,00						-	70.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	-	-	508.200.000,00						-	238.800.000,00	
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				508.200.000,00							238.800.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	-	1 Satuan Pendidikan	508.200.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Cawas Desa Baran 1	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	238.800.000,00	SPNF SKB KLATEN
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				0,00							70.000.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-	1 Peserta Didik	0,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Cawas Desa Barepan 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	70.000.000,00	SPNF SKB KLATEN
		DINAS KESEHATAN				266.138.733.372,00							234.886.050.764,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				266.138.733.372,00							234.886.050.764,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				266.138.733.372,00							234.886.050.764,00	
13.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				183.403.877.442,00							171.387.814.261,00	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi				183.403.877.442,00							171.187.814.261,00	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89.30 Indeks	89.00 Indeks	183.403.877.442,00						89.00 Indeks	171.187.814.261,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	75.85 Nilai	75.40 Nilai	183.403.877.442,00						75.55 Nilai	171.187.814.261,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				85.782.730,00					Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten		45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit	2 Unit	70.278.000,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		2 Unit	55.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				345.839.957,00					Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten		291.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				345.839.957,00					Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten		291.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	262.220.000,00						12 Laporan	235.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	83.619.957,00						6 Paket	56.000.000,00	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				83.619.957,00							56.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	8 Paket	83.619.957,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		6 Paket	56.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				262.220.000,00							235.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	262.220.000,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		12 Laporan	235.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.169.627.535,00					-		3.607.024.901,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.169.627.535,00					-		3.607.024.901,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	4.169.627.535,00						12 Laporan	3.607.024.901,00	
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				4.169.627.535,00							3.607.024.901,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	48 Laporan	4.169.627.535,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil	-	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		12 Laporan	3.607.024.901,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.047.128.000,00					Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten		300.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.047.128.000,00					Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten		300.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	244.133.000,00						1 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	28 Unit	802.995.000,00						28 Unit	100.000.000,00	
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				802.995.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	28 Unit	100 Unit	802.995.000,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil	-	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		28 Unit	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				244.133.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	72 Unit	244.133.000,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		1 Unit	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				105.095.000,00					Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten		210.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Pelayanan BLUD				105.095.000,00					Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten		210.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	36 Unit Kerja	36 Unit Kerja	105.095.000,00						36 Unit Kerja	210.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				105.095.000,00							210.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	36 Unit Kerja	35 Unit Kerja	105.095.000,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		36 Unit Kerja	210.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00					Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten		200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0,00					Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten		200.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	0,00						-	200.000.000,00	
	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	12 Unit	0,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
14.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				79.615.686.680,00							60.388.186.503,00	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat				79.615.686.680,00							59.048.186.503,00	
			1.Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	13.95 Orang	14.10 Orang	79.615.686.680,00						14.05 Orang	59.048.186.503,00	
			2.Cakupan imunisasi bayi lengkap	99.00 Persentase	98.00 Persentase	79.615.686.680,00						99.00 Persentase	59.048.186.503,00	
			3.Persentase Desa/Kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat	100.00 %	100.00 %	79.615.686.680,00						100.00 %	59.048.186.503,00	
			3.Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	63.50 %	62.50 %	79.615.686.680,00						62.80 %	59.048.186.503,00	
			4.Persentase fasyankes terakreditasi paripurna	51.53 %	51.53 %	79.615.686.680,00						51.53 %	59.048.186.503,00	
			5.Persentase keaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Klaten	82.10 %	81.80 %	79.615.686.680,00						81.90 %	59.048.186.503,00	
			6.Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	80.00 Persentase	50.00 Persentase	79.615.686.680,00						60.00 Persentase	59.048.186.503,00	
			8.Persentase Rumah Sakit bagus Waras dalam memenuhi ketersediaan sarana , prasarana dan alat kesehatan /SPA sesuai standar	64.00 %	61.00 %	79.615.686.680,00						62.00 %	59.048.186.503,00	
			9.Persentase balita gizi buruk mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	100.00 %	100.00 %	79.615.686.680,00						100.00 %	59.048.186.503,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				12.879.500.136,00					Masyarakat Kabupaten Klaten		10.918.750.000,00	
		Tersedianya Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				12.879.500.136,00					Masyarakat Kabupaten Klaten		10.918.750.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	200 Unit	100 Unit	171.354.000,00						200 Unit	318.750.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	3.916.000.000,00						8 Unit	1.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	1 Unit	114.030.956,00						1 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	34 Paket	34 Paket	8.678.115.180,00						34 Paket	9.000.000.000,00	
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				114.030.956,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit	2 Unit	114.030.956,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		1 Unit	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				3.916.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	8 Unit	435 Unit	3.916.000.000,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil	-	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		8 Unit	1.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				171.354.000,00							318.750.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	200 Unit	360 Unit	171.354.000,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		200 Unit	318.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan				8.678.115.180,00							9.000.000.000,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	34 Paket	34 Paket	8.678.115.180,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		34 Paket	9.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		Terlaksananya Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				66.097.463.494,00					Masyarakat Kabupaten Klaten		48.179.436.503,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	154127 Orang	154127 Orang	33.379.850,00						154127 Orang	40.000.000,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	67596 Orang	67596 Orang	179.015.800,00						67596 Orang	110.000.000,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11333 Orang	11333 Orang	2.051.414.550,00						11333 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	34 Dokumen	19 Dokumen	33.850.000,00						26 Dokumen	70.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	55.022.794.250,00						1 Dokumen	40.434.436.503,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	34 Dokumen	34 Dokumen	40.730.000,00						34 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	36 Dokumen	36 Dokumen	11.100.000,00						36 Dokumen	60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	43 Dokumen	43 Dokumen	398.317.238,00						43 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	29 Dokumen	4 Dokumen	23.230.000,00						5 Dokumen	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	36 Dokumen	36 Dokumen	2.319.018.825,00						36 Dokumen	400.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	67 Dokumen	66 Dokumen	49.386.250,00						67 Dokumen	105.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	37 Dokumen	37 Dokumen	411.138.100,00						37 Dokumen	875.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	39 Dokumen	39 Dokumen	100.872.250,00						39 Dokumen	350.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	36 Dokumen	36 Dokumen	100.000.000,00						36 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	700.913.750,00						1 Dokumen	850.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	34 Unit	34 Unit	27.157.500,00						34 Unit	1.800.000.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11800 Orang	11800 Orang	33.145.000,00						11800 Orang	90.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11291 Orang	11291 Orang	293.075.500,00						11291 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	873 Orang	870 Orang	31.805.000,00						870 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1692 Orang	1692 Orang	52.510.000,00						1692 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	14692 Orang	14692 Orang	629.510.000,00						14692 Orang	450.000.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	8517 Orang	8517 Orang	1.993.350.000,00						8517 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	172 Orang	172 Orang	24.840.000,00						172 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	3132 Orang	3132 Orang	17.460.000,00						3132 Orang	55.000.000,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33397 Orang	33397 Orang	21.695.000,00						33397 Orang	60.000.000,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	333504 Orang	333504 Orang	27.705.000,00						333504 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	219731 Orang	219731 Orang	20.278.925,00						219731 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	799900 Orang	799900 Orang	85.071.106,00						799900 Orang	120.000.000,00	
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	1 Unit	369.952.350,00						1 Unit	700.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				293.075.500,00							100.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11291 Orang	401 Orang	293.075.500,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		11291 Orang	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin				33.145.000,00							90.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11800 Orang	498 Orang	33.145.000,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		11800 Orang	90.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir				2.051.414.550,00							50.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	11333 Orang	68 Orang	2.051.414.550,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		11333 Orang	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita				179.015.800,00							110.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	67596 Orang	110 Orang	179.015.800,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		67596 Orang	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				33.379.850,00							40.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	154127 Orang	34 Orang	33.379.850,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		154127 Orang	40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif				85.071.106,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	799900 Orang	1320 Orang	85.071.106,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		799900 Orang	120.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut				20.278.925,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	219731 Orang	264 Orang	20.278.925,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		219731 Orang	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi				27.705.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	333504 Orang	2621 Orang	27.705.000,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		333504 Orang	50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus				21.695.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	33397 Orang	702 Orang	21.695.000,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		33397 Orang	60.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	37 Dokumen	4 Dokumen	411.138.100,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		37 Dokumen	875.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya				49.386.250,00							105.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	67 Dokumen	34 Dokumen	49.386.250,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		67 Dokumen	105.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				100.872.250,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	39 Dokumen	4 Dokumen	100.872.250,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		39 Dokumen	350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				55.022.794.250,00							40.434.436.503,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	55.022.794.250,00	Kab. Klaten	Pajak Rokok Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		1 Dokumen	40.434.436.503,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				700.913.750,00							850.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	700.913.750,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		1 Dokumen	850.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota				27.157.500,00							1.800.000.000,00	
		Terlaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	34 Unit	34 Unit	27.157.500,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		34 Unit	1.800.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				33.850.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	34 Dokumen	2 Dokumen	33.850.000,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		26 Dokumen	70.000.000,00	DINAS KESEHATAN

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	200 Orang	250 Orang	1.336.500.000,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		200 Orang	1.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				64.480.275,00					Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten		100.000.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				64.480.275,00					Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	-	64.480.275,00						-	100.000.000,00	
	1.02.03.2.02.0004	Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan				64.480.275,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	2 Dokumen	64.480.275,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil	-	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
16.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				605.239.125,00							725.050.000,00	
		Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman				605.239.125,00							685.050.000,00	
			0.Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional yang memenuhi ketentuan	50.00 %	50.00 %	605.239.125,00						50.00 %	685.050.000,00	
			1.Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	100 %	100 %	605.239.125,00						100 %	685.050.000,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				87.043.225,00					Masyarakat di Wilayah Kabupaten Klaten		193.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				87.043.225,00					Masyarakat di Wilayah Kabupaten Klaten		193.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	85 Dokumen	85 Dokumen	87.043.225,00						85 Dokumen	193.000.000,00	
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				87.043.225,00							193.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	85 Dokumen	85 Dokumen	87.043.225,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		85 Dokumen	193.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				259.101.200,00					Masyarakat di Wilayah Kabupaten Klaten		252.050.000,00	
		Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				259.101.200,00					Masyarakat di Wilayah Kabupaten Klaten		252.050.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	450 Dokumen	450 Dokumen	259.101.200,00						450 Dokumen	252.050.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				259.101.200,00							252.050.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	450 Dokumen	450 Dokumen	259.101.200,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		450 Dokumen	252.050.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				15.216.700,00					Masyarakat di Wilayah Kabupaten Klaten		40.000.000,00	
		Terlaksananya Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				15.216.700,00					Masyarakat di Wilayah Kabupaten Klaten		40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	1 Dokumen	15.216.700,00						1 Dokumen	40.000.000,00	
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				15.216.700,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1 Dokumen	1 Dokumen	15.216.700,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		1 Dokumen	40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				23.280.000,00					Masyarakat di Wilayah Kabupaten Klaten		40.000.000,00	
		Terlaksananya Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				23.280.000,00					Masyarakat di Wilayah Kabupaten Klaten		40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	1 Dokumen	23.280.000,00						1 Dokumen	40.000.000,00	
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				23.280.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	1 Dokumen	1 Dokumen	23.280.000,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		1 Dokumen	40.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				220.598.000,00					Masyarakat di Wilayah Kabupaten Klaten		200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				220.598.000,00					Masyarakat di Wilayah Kabupaten Klaten		200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	35 Dokumen	1 Dokumen	561.230.050,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		35 Dokumen	500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		RSUD BAGAS WARAS				79.000.000.000,00							78.000.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				79.000.000.000,00							78.000.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				79.000.000.000,00							78.000.000.000,00	
18.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				79.000.000.000,00							78.000.000.000,00	
			Nilai indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	92 %	79.000.000.000,00						-	78.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				79.000.000.000,00					-		78.000.000.000,00	
		-				79.000.000.000,00					-		78.000.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	79.000.000.000,00						-	78.000.000.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				79.000.000.000,00							78.000.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	79.000.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kelurahan Buntalan 0	Retribusi Jasa Umum Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	78.000.000.000,00	RSUD BAGAS WARAS
		PUSKESMAS KLATEN UTARA				2.231.043.332,00							2.230.657.130,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.231.043.332,00							2.230.657.130,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.231.043.332,00							2.230.657.130,00	
19.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.732.036.911,00							1.820.540.602,00	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	89 indeks	1.732.036.911,00						-	1.820.540.602,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				1.732.036.911,00					-		1.820.540.602,00	
		-				1.732.036.911,00					-		1.820.540.602,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	1.732.036.911,00						-	1.820.540.602,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.732.036.911,00							1.820.540.602,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	1.732.036.911,00	Kab. Klaten	Retribusi Jasa Umum Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	1.820.540.602,00	PUSKESMAS KLATEN UTARA
20.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				494.006.421,00							405.116.528,00	
			Persentase Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	-	50 %	439.006.421,00						-	340.116.528,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				494.006.421,00					-		405.116.528,00	
		-				494.006.421,00					-		405.116.528,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	50.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	116.098.968,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	13.170.000,00						-	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	-	270.000,00						-	270.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	127.967.453,00						-	133.346.528,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	85.000.000,00						-	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	-	25.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	-	25.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	11.500.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				85.000.000,00							50.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	340 Orang	85.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	50.000.000,00	PUSKESMAS KLATEN UTARA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				50.000.000,00							20.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	6579 Orang	50.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	20.000.000,00	PUSKESMAS KLATEN UTARA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	128 Orang	10.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	10.000.000,00	PUSKESMAS KLATEN UTARA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				11.500.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	268 Orang	11.500.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	10.000.000,00	PUSKESMAS KLATEN UTARA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				116.098.968,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	1 Dokumen	116.098.968,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	100.000.000,00	PUSKESMAS KLATEN UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				13.170.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen	13.170.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	1.500.000,00	PUSKESMAS KLATEN UTARA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	10.000.000,00	PUSKESMAS KLATEN UTARA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas				127.967.453,00							133.346.528,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	1 Dokumen	127.967.453,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	133.346.528,00	PUSKESMAS KLATEN UTARA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				270.000,00							270.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	270.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	270.000,00	PUSKESMAS KLATEN UTARA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi				10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	10.000.000,00	PUSKESMAS KLATEN UTARA
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa				10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	50 Orang	10.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	10.000.000,00	PUSKESMAS KLATEN UTARA
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular				25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	25.000.000,00	PUSKESMAS KLATEN UTARA
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular				25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	25.000.000,00	PUSKESMAS KLATEN UTARA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
21.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				5.000.000,00							5.000.000,00	
			Cakupan Posyandu siklus hidup aktif	-	98 %	5.000.000,00					-		5.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000,00					-		5.000.000,00	
		-				5.000.000,00					-		5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	5.000.000,00					-		5.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial	-		5.000.000,00	PUSKESMAS KLATEN UTARA
		PUSKESMAS KLATEN TENGAH				2.317.263.681,00							2.373.057.540,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.317.263.681,00							2.373.057.540,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.317.263.681,00							2.373.057.540,00	
22.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.812.520.663,00							1.868.314.522,00	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	100 %	1.812.520.663,00					-		1.868.314.522,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				1.812.520.663,00					-		1.868.314.522,00	
		-				1.812.520.663,00					-		1.868.314.522,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	1.812.520.663,00					-		1.868.314.522,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.812.520.663,00							1.868.314.522,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	1.812.520.663,00	Kab. Klaten	Retribusi Jasa Umum Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial	-		1.868.314.522,00	PUSKESMAS KLATEN TENGAH
23.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				499.743.018,00							499.743.018,00	
			Persentase Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	-	50 %	489.743.018,00					-		489.743.018,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				499.743.018,00					-		499.743.018,00	
		-				499.743.018,00					-		499.743.018,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	46.160.960,00					-		46.160.960,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	20.000.000,00					-		20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	120.000.000,00					-		120.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	10.660.000,00					-		10.660.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	10.000.000,00					-		10.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	-	270.000,00					-		270.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	113.912.736,00					-		113.912.736,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	65.000.000,00					-		65.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	-	35.000.000,00					-		35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	PRIORITAS		(12)	(13)	(14)	(15)
									NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	10.000.000,00	PUSKESMAS KLATEN TENGAH
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas				113.912.736,00							113.912.736,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	1 Dokumen	113.912.736,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	113.912.736,00	PUSKESMAS KLATEN TENGAH
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				270.000,00							270.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	270.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	270.000,00	PUSKESMAS KLATEN TENGAH
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi				20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	20.000.000,00	PUSKESMAS KLATEN TENGAH
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa				17.239.322,00							17.239.322,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	44 Orang	17.239.322,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	17.239.322,00	PUSKESMAS KLATEN TENGAH
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular				35.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	1 Laporan	35.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	35.000.000,00	PUSKESMAS KLATEN TENGAH
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular				40.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	40.000.000,00	PUSKESMAS KLATEN TENGAH
24.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				5.000.000,00							5.000.000,00	
			Cakupan Posyandu siklus hidup aktif	-	98 %	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000,00					-		5.000.000,00	
		-				5.000.000,00					-		5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	5.000.000,00	PUSKESMAS KLATEN TENGAH
		PUSKESMAS KLATEN SELATAN				2.861.716.018,00							2.928.851.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.861.716.018,00							2.928.851.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.861.716.018,00							2.928.851.000,00	
25.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.249.285.000,00							2.391.351.000,00	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	89 %	2.249.285.000,00						-	2.391.351.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				2.249.285.000,00					-		2.391.351.000,00	
		-				2.249.285.000,00					-		2.391.351.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	2.249.285.000,00						-	2.391.351.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2.249.285.000,00							2.391.351.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	2.249.285.000,00	Kab. Klaten	Retribusi Jasa Umum Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	2.391.351.000,00	PUSKESMAS KLATEN SELATAN
26.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				597.431.018,00							522.500.000,00	
			Persentase Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	-	50 %	507.431.018,00						-	442.500.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				597.431.018,00					-		522.500.000,00	
		-				597.431.018,00					-		522.500.000,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	60.000.000,00						-	60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	25.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	161.931.018,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	25.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	20.000.000,00						-	10.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	-	3.000.000,00						-	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	128.000.000,00						-	125.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	92.000.000,00						-	92.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	-	20.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	-	25.000.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	20.000.000,00						-	20.000.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	-	7.500.000,00						-	7.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				92.000.000,00							92.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	431 Orang	92.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	92.000.000,00	PUSKESMAS KLATEN SELATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				60.000.000,00							60.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	4621 Orang	60.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	60.000.000,00	PUSKESMAS KLATEN SELATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat				10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	113 Orang	10.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	10.000.000,00	PUSKESMAS KLATEN SELATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis				20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	428 Orang	20.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	20.000.000,00	PUSKESMAS KLATEN SELATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				161.931.018,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	1 Dokumen	161.931.018,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	100.000.000,00	PUSKESMAS KLATEN SELATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	25.000.000,00	PUSKESMAS KLATEN SELATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan				20.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	10.000.000,00	PUSKESMAS KLATEN SELATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas				128.000.000,00							125.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	1 Dokumen	128.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	125.000.000,00	PUSKESMAS KLATEN SELATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				3.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	3.000.000,00	PUSKESMAS KLATEN SELATAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi				25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	25.000.000,00	PUSKESMAS KLATEN SELATAN
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa				7.500.000,00							7.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	20 Orang	7.500.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	7.500.000,00	PUSKESMAS KLATEN SELATAN
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular				20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	20.000.000,00	PUSKESMAS KLATEN SELATAN
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular				25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	25.000.000,00	PUSKESMAS KLATEN SELATAN
27.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				15.000.000,00							15.000.000,00	
		Cakupan Posyandu siklus hidup aktif		-	98 %	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				15.000.000,00					-		15.000.000,00	
		-				15.000.000,00					-		15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	15.000.000,00	PUSKESMAS KLATEN SELATAN
		PUSKESMAS KALIKOTES				2.086.809.498,00							2.075.383.062,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.086.809.498,00							2.075.383.062,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.086.809.498,00							2.075.383.062,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	360.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	360.000,00	PUSKESMAS JOGONALAN I
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi				16.500.000,00							14.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	16.500.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	14.500.000,00	PUSKESMAS JOGONALAN I
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa				10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	100 Orang	10.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	10.000.000,00	PUSKESMAS JOGONALAN I
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular				50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	50.000.000,00	PUSKESMAS JOGONALAN I
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular				50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	50.000.000,00	PUSKESMAS JOGONALAN I
42.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				5.000.000,00							5.000.000,00	
			Cakupan Posyandu siklus hidup aktif	-	98 %	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000,00					-		5.000.000,00	
		-				5.000.000,00					-		5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	5.000.000,00	PUSKESMAS JOGONALAN I
		PUSKESMAS JOGONALAN II				2.657.827.995,00							2.657.827.995,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.657.827.995,00							2.657.827.995,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.657.827.995,00							2.657.827.995,00	
43.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.135.413.007,00							2.135.413.007,00	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	89 Indeks	2.135.413.007,00						-	2.135.413.007,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				2.135.413.007,00					-		2.135.413.007,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		-				2.135.413.007,00					-		2.135.413.007,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	2.135.413.007,00					-		2.135.413.007,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2.135.413.007,00							2.135.413.007,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	2.135.413.007,00	Kab. Klaten	Retribusi Jasa Umum Pendapatan dari BLUD Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial	-		2.135.413.007,00	PUSKESMAS JOGONALAN II
44.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				460.197.358,00							460.197.358,00	
			Persentase Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	-	50 %	449.127.358,00					-		449.127.358,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				460.197.358,00					-		460.197.358,00	
		-				460.197.358,00					-		460.197.358,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	11.250.000,00					-		11.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	-	27.720.000,00					-		27.720.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	167.512.000,00					-		167.512.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	15.300.000,00					-		15.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	14.580.000,00					-		14.580.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	-	900.000,00					-		900.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	143.421.383,00					-		143.421.383,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	40.352.000,00					-		40.352.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	-	11.070.000,00					-		11.070.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	-	11.070.000,00					-		11.070.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	4.320.000,00					-		4.320.000,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	-	10.001.975,00					-		10.001.975,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	-	-	2.700.000,00					-		2.700.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil				40.352.000,00							40.352.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	285 Orang	40.352.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial	-		40.352.000,00	PUSKESMAS JOGONALAN II
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar				11.250.000,00							11.250.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	3464 Orang	11.250.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial	-		11.250.000,00	PUSKESMAS JOGONALAN II

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	10.000.000,00	PUSKESMAS PRAMBANAN
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa				10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	65 Orang	10.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	10.000.000,00	PUSKESMAS PRAMBANAN
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular				103.562.261,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	1 Laporan	103.562.261,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	10.000.000,00	PUSKESMAS PRAMBANAN
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular				58.510.000,00							93.390.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	1 Laporan	58.510.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	93.390.000,00	PUSKESMAS PRAMBANAN
51.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				5.000.000,00							5.000.000,00	
			Cakupan posyandu siklus hidup aktif	-	98 %	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000,00					-		5.000.000,00	
		-				5.000.000,00					-		5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	5.000.000,00	PUSKESMAS PRAMBANAN
		PUSKESMAS KEBONDALEM LOR				2.332.359.435,00							2.324.681.757,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.332.359.435,00							2.324.681.757,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.332.359.435,00							2.324.681.757,00	
52.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.894.023.312,00							1.960.225.643,00	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	89 Indeks	1.894.023.312,00						-	1.960.225.643,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				1.894.023.312,00					-		1.960.225.643,00	
		-				1.894.023.312,00					-		1.960.225.643,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	1.894.023.312,00						-	1.960.225.643,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				1.894.023.312,00							1.960.225.643,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	10.000.000,00	PUSKESMAS KEBONDALEM LOR
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa				10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	72 Orang	10.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	10.000.000,00	PUSKESMAS KEBONDALEM LOR
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular				40.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	40.000.000,00	PUSKESMAS KEBONDALEM LOR
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular				40.000.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	45.000.000,00	PUSKESMAS KEBONDALEM LOR
54.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				5.000.000,00							5.000.000,00	
			Cakupan Posyandu siklus hidup aktif	-	98 %	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000,00					-		5.000.000,00	
		-				5.000.000,00					-		5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	5.000.000,00	PUSKESMAS KEBONDALEM LOR
		PUSKESMAS MANISRENGGO				3.857.041.553,00							4.072.787.425,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.857.041.553,00							4.072.787.425,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.857.041.553,00							4.072.787.425,00	
55.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.277.448.103,00							3.583.192.913,00	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	89 Indeks	3.277.448.103,00						-	3.583.192.913,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				3.277.448.103,00					-		3.583.192.913,00	
		-				3.277.448.103,00					-		3.583.192.913,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	3.277.448.103,00						-	3.583.192.913,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				3.277.448.103,00							3.583.192.913,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	6.300.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	20.000.000,00	PUSKESMAS MANISRENGGO
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa				7.903.406,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	50 Orang	7.903.406,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	3.000.000,00	PUSKESMAS MANISRENGGO
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular				5.000.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	45.000.000,00	PUSKESMAS MANISRENGGO
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular				5.000.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	45.000.000,00	PUSKESMAS MANISRENGGO
57.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				5.000.000,00							5.000.000,00	
			Cakupan Posyandu Siklus Hidup Aktif	-	98 %	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000,00					-		5.000.000,00	
		-				5.000.000,00					-		5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	5.000.000,00	PUSKESMAS MANISRENGGO
		PUSKESMAS KEMALANG				4.247.562.450,00							4.536.823.188,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.247.562.450,00							4.536.823.188,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				4.247.562.450,00							4.536.823.188,00	
58.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.709.604.000,00							4.025.565.000,00	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	89 Indeks	3.709.604.000,00						-	4.025.565.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				3.709.604.000,00					-		4.025.565.000,00	
		-				3.709.604.000,00					-		4.025.565.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	3.709.604.000,00						-	4.025.565.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				3.709.604.000,00							4.025.565.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	30.000.000,00	PUSKESMAS KARANGNONGKO
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa				4.460.000,00							4.460.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	95 Orang	4.460.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	4.460.000,00	PUSKESMAS KARANGNONGKO
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular				50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dan Perlindungan Sosial		-	50.000.000,00	PUSKESMAS KARANGNONGKO
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular				50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	50.000.000,00	PUSKESMAS KARANGNONGKO
63.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				25.019.048,00							25.000.000,00	
			Cakupan Posyandu siklus hidup aktif	-	98 %	25.019.048,00						-	25.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				25.019.048,00					-		25.000.000,00	
		-				25.019.048,00					-		25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	25.019.048,00						-	25.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				25.019.048,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	25.019.048,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	25.000.000,00	PUSKESMAS KARANGNONGKO
		PUSKESMAS JATINOM				2.989.881.934,00							3.179.194.352,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.989.881.934,00							3.179.194.352,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.989.881.934,00							3.179.194.352,00	
64.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.456.097.349,00							2.663.207.084,00	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	89 Indeks	2.456.097.349,00						-	2.663.207.084,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				2.456.097.349,00					-		2.663.207.084,00	
		-				2.456.097.349,00					-		2.663.207.084,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	2.456.097.349,00						-	2.663.207.084,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2.456.097.349,00							2.663.207.084,00	

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	10.000.000,00	PUSKESMAS KAYUMAS
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa				5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	36 Orang	5.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	5.000.000,00	PUSKESMAS KAYUMAS
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular				30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	30.000.000,00	PUSKESMAS KAYUMAS
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular				30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	30.000.000,00	PUSKESMAS KAYUMAS
69.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				50.000.000,00							50.000.000,00	
			Cakupan Posyandu siklus hidup aktif	-	98 %	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50.000.000,00					-		50.000.000,00	
		-				50.000.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	50.000.000,00	PUSKESMAS KAYUMAS
		PUSKESMAS KARANGANOM				3.498.226.639,00							3.430.621.738,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.498.226.639,00							3.430.621.738,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.498.226.639,00							3.430.621.738,00	
70.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.913.803.189,00							2.846.198.288,00	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	89 %	2.913.803.189,00						-	2.846.198.288,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				2.913.803.189,00					-		2.846.198.288,00	
		-				2.913.803.189,00					-		2.846.198.288,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	2.913.803.189,00						-	2.846.198.288,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2.913.803.189,00							2.846.198.288,00	

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	5.000.000,00	PUSKESMAS MAJEGAN
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa				5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	41 Orang	5.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	10.000.000,00	PUSKESMAS MAJEGAN
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular				25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	25.000.000,00	PUSKESMAS MAJEGAN
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular				25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	25.000.000,00	PUSKESMAS MAJEGAN
78.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				15.000.000,00							5.000.000,00	
			Cakupan Posyandu siklus hidup aktif	-	98 %	15.000.000,00						-	5.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				15.000.000,00					-		5.000.000,00	
		-				15.000.000,00					-		5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	15.000.000,00						-	5.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				15.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	5.000.000,00	PUSKESMAS MAJEGAN
		PUSKESMAS POLANHARJO				2.795.508.317,00							2.804.417.343,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.795.508.317,00							2.804.417.343,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.795.508.317,00							2.804.417.343,00	
79.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.184.599.000,00							2.297.100.000,00	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	89 Indeks	2.184.599.000,00						-	2.297.100.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				2.184.599.000,00					-		2.297.100.000,00	
		-				2.184.599.000,00					-		2.297.100.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	2.184.599.000,00						-	2.297.100.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2.184.599.000,00							2.297.100.000,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	10.000.000,00	PUSKESMAS JUWIRING
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa				4.000.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	40 Orang	4.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	4.000.000,00	PUSKESMAS JUWIRING
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular				25.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	30.000.000,00	PUSKESMAS JUWIRING
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular				20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	20.000.000,00	PUSKESMAS JUWIRING
87.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				5.000.000,00							5.000.000,00	
			Cakupan Posyandu siklus hidup aktif	-	98 %	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000,00					-		5.000.000,00	
		-				5.000.000,00					-		5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	5.000.000,00	PUSKESMAS JUWIRING
		PUSKESMAS WONOSARI I				2.644.654.262,00							2.726.209.574,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.644.654.262,00							2.726.209.574,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.644.654.262,00							2.726.209.574,00	
88.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.131.667.408,00							2.284.334.149,00	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	89 Indeks	2.131.667.408,00						-	2.284.334.149,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				2.131.667.408,00					-		2.284.334.149,00	
		-				2.131.667.408,00					-		2.284.334.149,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	2.131.667.408,00						-	2.284.334.149,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2.131.667.408,00							2.284.334.149,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	20.000.000,00	PUSKESMAS WONOSARI I
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa				1.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	20 Orang	1.500.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	0,00	PUSKESMAS WONOSARI I
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular				3.111.429,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	1 Laporan	3.111.429,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	0,00	PUSKESMAS WONOSARI I
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular				50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	50.000.000,00	PUSKESMAS WONOSARI I
90.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				5.000.000,00							5.000.000,00	
			Cakupan Posyandu siklus hidup aktif	-	98 %	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000,00					-		5.000.000,00	
		-				5.000.000,00					-		5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	5.000.000,00	PUSKESMAS WONOSARI I
		PUSKESMAS WONOSARI II				2.450.373.187,00							2.584.656.709,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.450.373.187,00							2.584.656.709,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.450.373.187,00							2.584.656.709,00	
91.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.934.344.900,00							2.105.229.390,00	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	89 Indeks	1.934.344.900,00						-	2.105.229.390,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				1.934.344.900,00					-		2.105.229.390,00	
		-				1.934.344.900,00					-		2.105.229.390,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	25.000.000,00	PUSKESMAS WONOSARI II
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa				10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	100 Orang	10.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	10.000.000,00	PUSKESMAS WONOSARI II
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular				30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	30.000.000,00	PUSKESMAS WONOSARI II
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular				66.500.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	1 Laporan	66.500.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	50.000.000,00	PUSKESMAS WONOSARI II
93.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				15.000.000,00							15.000.000,00	
			Cakupan Posyandu siklus hidup aktif	-	98 %	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				15.000.000,00					-		15.000.000,00	
		-				15.000.000,00					-		15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	15.000.000,00						-	15.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	15.000.000,00	PUSKESMAS WONOSARI II
		PUSKESMAS CEPER				3.112.283.421,00							3.296.357.421,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.112.283.421,00							3.296.357.421,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.112.283.421,00							3.296.357.421,00	
94.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.675.831.000,00							2.904.905.000,00	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	89 INDEKS	2.675.831.000,00						-	2.904.905.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				2.675.831.000,00					-		2.904.905.000,00	
		-				2.675.831.000,00					-		2.904.905.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	2.675.831.000,00						-	2.904.905.000,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				2.675.831.000,00							2.904.905.000,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	20.000.000,00	PUSKESMAS PEDAN
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa				15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	150 Orang	15.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	15.000.000,00	PUSKESMAS PEDAN
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular				5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	5.000.000,00	PUSKESMAS PEDAN
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular				100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	100.000.000,00	PUSKESMAS PEDAN
102.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				10.000.000,00							5.000.000,00	
			Cakupan Posyandu siklus hidup aktif	-	98 %	10.000.000,00						-	5.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000,00					-		5.000.000,00	
		-				10.000.000,00					-		5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	10.000.000,00						-	5.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				10.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	5.000.000,00	PUSKESMAS PEDAN
		PUSKESMAS KARANGDOWO				6.646.637.967,00							7.087.050.841,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.646.637.967,00							7.087.050.841,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				6.646.637.967,00							7.087.050.841,00	
103.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.987.248.918,00							6.469.373.810,00	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	89 Indeks	5.987.248.918,00						-	6.469.373.810,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				5.987.248.918,00					-		6.469.373.810,00	
		-				5.987.248.918,00					-		6.469.373.810,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	5.987.248.918,00						-	6.469.373.810,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				5.987.248.918,00							6.469.373.810,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	20.000.000,00	PUSKESMAS CAWAS I
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa				10.800.000,00							10.800.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	120 Orang	10.800.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	10.800.000,00	PUSKESMAS CAWAS I
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular				28.310.000,00							28.310.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	1 Laporan	28.310.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	28.310.000,00	PUSKESMAS CAWAS I
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular				28.310.000,00							28.310.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	1 Laporan	28.310.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	28.310.000,00	PUSKESMAS CAWAS I
108.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				5.000.000,00							5.000.000,00	
			Cakupan Posyandu siklus hidup aktif	-	98 %	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000,00					-		5.000.000,00	
		-				5.000.000,00					-		5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	5.000.000,00	PUSKESMAS CAWAS I
		PUSKESMAS CAWAS II				2.239.941.287,00							2.227.643.455,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.239.941.287,00							2.227.643.455,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				2.239.941.287,00							2.227.643.455,00	
109.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.734.500.000,00							1.758.800.000,00	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	89 Indeks	1.734.500.000,00						-	1.758.800.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				1.734.500.000,00					-		1.758.800.000,00	
		-				1.734.500.000,00					-		1.758.800.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	10.800.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	10.800.000,00	PUSKESMAS CAWAS II
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa				3.600.000,00							3.600.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	40 Orang	3.600.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	3.600.000,00	PUSKESMAS CAWAS II
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular				25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	25.000.000,00	PUSKESMAS CAWAS II
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular				25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	25.000.000,00	PUSKESMAS CAWAS II
111.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				5.000.000,00							5.000.000,00	
			Cakupan Posyandu siklus hidup aktif	-	98 %	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000,00					-		5.000.000,00	
		-				5.000.000,00					-		5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	5.000.000,00	PUSKESMAS CAWAS II
		PUSKESMAS TRUCUK I				4.005.474.082,00							3.534.162.378,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.005.474.082,00							3.534.162.378,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				4.005.474.082,00							3.534.162.378,00	
112.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.458.955.930,00							3.018.251.523,00	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	89 Indeks	3.458.955.930,00						-	3.018.251.523,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				3.458.955.930,00					-		3.018.251.523,00	
		-				3.458.955.930,00					-		3.018.251.523,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	25.000.000,00	PUSKESMAS TRUCUK I
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa				900.000,00							900.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	10 Orang	900.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	900.000,00	PUSKESMAS TRUCUK I
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular				20.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	40.000.000,00	PUSKESMAS TRUCUK I
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular				35.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	1 Laporan	35.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	35.000.000,00	PUSKESMAS TRUCUK I
114.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				5.000.000,00							5.000.000,00	
			Cakupan Posyandu siklus hidup aktif	-	98 %	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000,00					-		5.000.000,00	
		-				5.000.000,00					-		5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	5.000.000,00	PUSKESMAS TRUCUK I
		PUSKESMAS TRUCUK II				3.446.396.835,00							3.434.020.389,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.446.396.835,00							3.434.020.389,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				3.446.396.835,00							3.434.020.389,00	
115.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.993.615.385,00							3.057.078.229,00	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	89 Indeks	2.993.615.385,00						-	3.057.078.229,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				2.993.615.385,00					-		3.057.078.229,00	
		-				2.993.615.385,00					-		3.057.078.229,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	10.800.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	10.800.000,00	PUSKESMAS TRUCUK II
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa				20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	40 Orang	20.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	-	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		-	20.000.000,00	PUSKESMAS TRUCUK II
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular				25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	25.000.000,00	PUSKESMAS TRUCUK II
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular				25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	25.000.000,00	PUSKESMAS TRUCUK II
117.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				5.000.000,00							5.000.000,00	
			Cakupan Posyandu siklus hidup aktif	-	98 %	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000,00					-		5.000.000,00	
		-				5.000.000,00					-		5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	5.000.000,00	PUSKESMAS TRUCUK II
		PUSKESMAS BAYAT				5.350.667.611,00							5.295.703.004,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.350.667.611,00							5.295.703.004,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				5.350.667.611,00							5.295.703.004,00	
118.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.681.330.294,00							4.639.765.687,00	
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	89 Indeks	4.681.330.294,00						-	4.639.765.687,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				4.681.330.294,00					-		4.639.765.687,00	
		-				4.681.330.294,00					-		4.639.765.687,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	4.681.330.294,00						-	4.639.765.687,00	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				4.681.330.294,00							4.639.765.687,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	-	1 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	1.800.000,00	PUSKESMAS BAYAT
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa				900.000,00							900.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-	10 Orang	900.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	900.000,00	PUSKESMAS BAYAT
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular				58.565.000,00							58.565.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-	1 Laporan	58.565.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	58.565.000,00	PUSKESMAS BAYAT
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular				87.515.000,00							87.515.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-	1 Laporan	87.515.000,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	87.515.000,00	PUSKESMAS BAYAT
120.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				5.148.944,00							5.148.944,00	
			Cakupan Posyandu siklus hidup aktif	-	98 %	5.148.944,00						-	5.148.944,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5.148.944,00					-		5.148.944,00	
		-				5.148.944,00					-		5.148.944,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	5.148.944,00						-	5.148.944,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				5.148.944,00							5.148.944,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	5.148.944,00	Kab. Klaten	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	5.148.944,00	PUSKESMAS BAYAT
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				223.863.781.598,00							196.202.389.491,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				223.863.781.598,00							196.202.389.491,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				223.863.781.598,00							196.202.389.491,00	
121.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				30.475.983.483,00							23.902.325.491,00	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi				30.475.983.483,00							23.902.325.491,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	57 Lembaga	57 Lembaga	61.000.000,00	Kab. Klaten	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		57 Lembaga	80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota				60.000.000,00							65.000.000,00	
		Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Klaten	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		1 Dokumen	65.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				3.590.000.000,00					Masyarakat Petani		8.854.975.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sesuai perundangan yang berlaku				3.590.000.000,00					Masyarakat Petani		8.854.975.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	180 KM	180 KM	1.476.000.000,00						180 KM	6.000.000.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	4.6 KM	4.4 KM	2.114.000.000,00						2.7 KM	2.854.975.000,00	
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan				2.114.000.000,00							2.854.975.000,00	
		Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	4.6 KM	.5 KM	2.114.000.000,00	Kab. Klaten	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		2.7 KM	2.854.975.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				1.476.000.000,00							6.000.000.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	180 KM	150 KM	1.476.000.000,00	Kab. Klaten	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		180 KM	6.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
123.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				600.000.000,00							1.827.824.000,00	
		Meningkatnya akses air minum yang layak bagi masyarakat				600.000.000,00							1.827.824.000,00	
			999.Persentase Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Air Minum Layak	97.49 %	96.00 %	600.000.000,00						96.42 %	1.827.824.000,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				600.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Klaten		1.827.824.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku				600.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Klaten		1.827.824.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	3 Lembaga	3 Lembaga	0,00						3 Lembaga	117.824.000,00	
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	120 SR	200 SR	600.000.000,00						100 SR	600.000.000,00	
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	1.00 Liter/Detik	1.00 Liter/Detik	0,00						1.00 Liter/Detik	1.000.000.000,00	
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				0,00							110.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Klaten	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		1 Dokumen	110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				0,00							1.000.000.000,00	
		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	1.00 Liter/Detik	0 Liter/Detik	0,00	Kab. Klaten	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		1.00 Liter/Detik	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				600.000.000,00							600.000.000,00	
		Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	120 SR	200 SR	600.000.000,00	Kab. Klaten	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		100 SR	600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.03.2.01.0034	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				0,00							117.824.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	3 Lembaga	0 Lembaga	0,00	Kab. Klaten	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		3 Lembaga	117.824.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
124.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				400.000.000,00							3.144.447.000,00	
		Meningkatnya layanan persampahan regional				400.000.000,00							3.144.447.000,00	
			999.Persentase Peningkatan Sampah yang Dikelola di TPA/TPST	100.00 %	100.00 %	400.000.000,00						100.00 %	3.144.447.000,00	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota				400.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Klaten		3.144.447.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku				400.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Klaten		3.144.447.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00						1 Dokumen	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	0.1 Ton/hari	0.1 Ton/hari	0,00						0.1 Ton/hari	2.894.447.000,00	
	1.03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan				400.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		1 Dokumen	250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R				0,00							2.894.447.000,00	
		Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	0.1 Ton/hari	0 Ton/hari	0,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		0.1 Ton/hari	2.894.447.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
125.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				504.000.000,00							2.667.461.000,00	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah				504.000.000,00							1.767.461.000,00	
			999.Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	4.38 %	2.00 %	504.000.000,00						2.99 %	1.767.461.000,00	
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				504.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Klaten		2.667.461.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku				504.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Klaten		2.667.461.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	110.000.000,00	
			Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	210.000.000,00	
			Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Penyelenggara	1 Penyelenggara	0,00						1 Penyelenggara	147.461.000,00	
	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)				0,00							210.000.000,00	
		Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		1 Unit	210.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0043	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				0,00							147.461.000,00	
		Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang mendapatkan Peningkatan kapasitas	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Penyelenggara	0 Penyelenggara	0,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		1 Penyelenggara	147.461.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				0,00							110.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		1 Dokumen	110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku				504.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Klaten		2.667.461.000,00	
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	-	-	227.000.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	-	277.000.000,00						-	900.000.000,00	
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-	-	0,00						-	900.000.000,00	
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)				277.000.000,00							900.000.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	-	1 Unit	277.000.000,00	Kab. Klaten	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		-	900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0049	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat				0,00							900.000.000,00	
		Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	-	0 M³/Hari	0,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		-	900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0051	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat				227.000.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	-	40 Rumah Tangga	227.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		-	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
126.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				279.000.000,00							2.777.071.000,00	
		Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan				279.000.000,00							2.777.071.000,00	
			999.Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	63.64 Persentase	63.18 Persentase	279.000.000,00						63.34 Persentase	2.777.071.000,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				279.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Klaten		2.777.071.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Bertaku				279.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Klaten		2.777.071.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	230.000.000,00	
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	169.000.000,00						1 Sistem Drainase Perkotaan	400.000.000,00	
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	110.000.000,00						1 Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000.000,00	
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	0,00						1 Sistem Drainase Perkotaan	1.147.071.000,00	
	1.03.06.2.01.0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				0,00							1.147.071.000,00	
		Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	1 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		1 Sistem Drainase Perkotaan	1.147.071.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan				110.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	110.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		1 Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan				0,00							230.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		1 Dokumen	230.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan				169.000.000,00							400.000.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Sistem Drainase Perkotaan	1 Sistem Drainase Perkotaan	169.000.000,00	Kab. Klaten	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		1 Sistem Drainase Perkotaan	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
127.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				33.481.589.636,00							39.461.328.000,00	
		Meningkatnya kualitas bangunan gedung				33.481.589.636,00							39.461.328.000,00	
			999.Persentase Bangunan Gedung perkantoran pemerintah yang terbangun	100,00 %	100,00 %	33.481.589.636,00						100,00 %	39.461.328.000,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				33.481.589.636,00					Gedung Pemerintah Kabupaten Klaten		39.461.328.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	919.000.000,00	Kab. Klaten	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		10 Dokumen	625.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan				594.010.000,00							650.000.000,00	
		Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	720.85 KM	720.85 KM	594.010.000,00	Kab. Klaten	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		720.85 KM	650.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan				20.006.718.000,00							21.321.009.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	98 KM	100 KM	20.006.718.000,00	Kab. Klaten	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		90 KM	21.321.009.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan				5.690.000.000,00							2.000.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	3 KM	2.89 KM	5.690.000.000,00	Kab. Klaten	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		1.5 KM	2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0057	Penggantian Jembatan				17.045.000.000,00							8.000.000.000,00	
		Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	9 Meter	75 Meter	17.045.000.000,00	Kab. Klaten	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		8 Meter	8.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan				91.755.000.000,00							24.800.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	6.3 KM	26.07 KM	91.755.000.000,00	Kab. Klaten	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		5.6 KM	24.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar				17.040.000.000,00							48.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	1 Badan Usaha	0 Badan Usaha	0,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		1 Badan Usaha	50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
131.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				1.153.323.625,00							260.000.000,00	
		Meningkatnya keteraturan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah				1.153.323.625,00							130.000.000,00	
			999.Persentase rencana tata ruang yang disusun	100,00 %	100,00 %	1.153.323.625,00						100,00 %	130.000.000,00	
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota				641.200.875,00					Masyarakat Kabupaten Klaten		140.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Perundang-undang yang berlaku.				641.200.875,00					Masyarakat Kabupaten Klaten		140.000.000,00	
			Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	Dokumen	282.124.125,00						1 Dokumen	70.000.000,00	
			Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	359.076.750,00						1 Dokumen	70.000.000,00	
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota				359.076.750,00							70.000.000,00	
		Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	359.076.750,00	Kab. Klaten	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		1 Dokumen	70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				282.124.125,00							70.000.000,00	
		Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1 Dokumen	282.124.125,00	Kab. Klaten	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		1 Dokumen	70.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				138.588.750,00					Masyarakat Kabupaten Klaten		60.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Perundang-undang yang berlaku.				138.588.750,00					Masyarakat Kabupaten Klaten		60.000.000,00	
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	360 Layanan	360 Layanan	138.588.750,00						360 Layanan	60.000.000,00	
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang				138.588.750,00							60.000.000,00	
		Terlayannya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	360 Layanan	300 Layanan	138.588.750,00	Kab. Klaten	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		360 Layanan	60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				373.534.000,00					Masyarakat Kabupaten Klaten		60.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Perundang-undang yang berlaku.				373.534.000,00					Masyarakat Kabupaten Klaten		60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	373.534.000,00						1 Dokumen	60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				373.534.000,00							60.000.000,00	
		Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	373.534.000,00	Kab. Klaten	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		1 Dokumen	60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				13.473.869.241,00							11.604.426.272,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				13.440.289.241,00							11.514.426.272,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				13.440.289.241,00							11.514.426.272,00	
132.	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.346.689.741,00							6.516.324.272,00	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi				8.336.689.741,00							6.516.324.272,00	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85.20 Indeks	85.05 Indeks	8.336.689.741,00						85.10 Indeks	6.516.324.272,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82.50 Nilai	81.75 Nilai	8.336.689.741,00						82.00 Nilai	6.516.324.272,00	
	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000,00					Pegawai Disperakim		60.000.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000,00					Pegawai Disperakim		60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50 Dokumen	50 Dokumen	10.000.000,00						50 Dokumen	60.000.000,00	
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50 Dokumen	50 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		50 Dokumen	60.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.277.466.000,00					Pegawai Disperakim		4.046.324.272,00	
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah				4.277.466.000,00					Pegawai Disperakim		4.046.324.272,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	4.277.466.000,00						32 Orang/bulan	4.046.324.272,00	
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.277.466.000,00							4.046.324.272,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	28 Orang/bulan	4.277.466.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		32 Orang/bulan	4.046.324.272,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				36.005.000,00					Pegawai Disperakim		15.000.000,00	
		Terlaksananya administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah				36.005.000,00					Pegawai Disperakim		15.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	36.005.000,00						2 Dokumen	15.000.000,00	
	1.04.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				36.005.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	36.005.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		2 Dokumen	15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				10.000.000,00					Pegawai Disperakim		80.000.000,00	
		Terlaksananya administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah				10.000.000,00					Pegawai Disperakim		80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00						12 Laporan	80.000.000,00	
	1.04.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				10.000.000,00							80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	PRIORITAS		(12)	(13)	(14)	(15)
									NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		12 Laporan	80.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				319.492.285,00					Pegawai Disperakim		250.000.000,00	
		Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah				319.492.285,00					Pegawai Disperakim		250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	319.492.285,00						100 Laporan	250.000.000,00	
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				319.492.285,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	100 Laporan	319.492.285,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		100 Laporan	250.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.272.712.590,00					Pegawai Disperakim		2.000.000.000,00	
		Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah				3.272.712.590,00					Pegawai Disperakim		2.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.272.712.590,00						12 Laporan	2.000.000.000,00	
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3.272.712.590,00							2.000.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	3.272.712.590,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		12 Laporan	2.000.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				421.013.866,00					Pegawai Disperakim		65.000.000,00	
		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				421.013.866,00					Pegawai Disperakim		65.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	30 Unit	421.013.866,00						30 Unit	65.000.000,00	
	1.04.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				421.013.866,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	30 Unit	421.013.866,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		30 Unit	65.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
133.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				712.290.000,00							489.000.000,00	
		Terpenuhinya kebutuhan rumah layak bagi korban bencana dan masyarakat yang terdampak program pemerintah				625.490.000,00							254.000.000,00	
			999.Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100.00 %	100.00 %	625.490.000,00						100.00 %	254.000.000,00	
			999.Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100.00 %	100.00 %	625.490.000,00						100.00 %	254.000.000,00	
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				40.800.000,00					Masyarakat Kab Klaten		100.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				40.800.000,00					Masyarakat Kab Klaten		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	11.600.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	8.400.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	1 Dokumen	8.400.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	1 Dokumen	8.400.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan				11.600.000,00							20.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen	11.600.000,00	Kab. Klaten	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani				8.400.000,00							20.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	1 Dokumen	8.400.000,00	Kab. Klaten	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana				8.400.000,00							20.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	1 Dokumen	8.400.000,00	Kab. Klaten	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus				4.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Klaten	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota				8.400.000,00							20.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	8.400.000,00	Kab. Klaten	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				39.650.000,00					Masyarakat Kab Klaten		94.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	10 Dokumen	10 Dokumen	7.000.000,00						10 Dokumen	9.000.000,00	
			Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	20 Orang	20 Orang	2.650.000,00						20 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	15.000.000,00						100 Orang	50.000.000,00	
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana				15.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 Orang	100 Orang	15.000.000,00	Kab. Klaten	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		100 Orang	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator				2.650.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	20 Orang	20 Orang	2.650.000,00	Kab. Klaten	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		20 Orang	5.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan				7.000.000,00							9.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	10 Dokumen	10 Dokumen	7.000.000,00	Kab. Klaten	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		10 Dokumen	9.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				110.000.000,00					Masyarakat Kab Klaten		140.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				110.000.000,00					Masyarakat Kab Klaten		140.000.000,00	
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	3 Unit Rumah	1 Unit Rumah	50.000.000,00						1 Unit Rumah	50.000.000,00	
			Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 Unit Rumah	4 Unit Rumah	50.000.000,00						4 Unit Rumah	50.000.000,00	
			Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	5.000.000,00						5 Unit Rumah	15.000.000,00	
			Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	5 Rumah Tangga	5 Rumah Tangga	5.000.000,00						5 Rumah Tangga	25.000.000,00	
	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 Unit Rumah	4 Unit Rumah	50.000.000,00	Kab. Klaten	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		4 Unit Rumah	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	3 Unit Rumah	1 Unit Rumah	50.000.000,00	Kab. Klaten	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		1 Unit Rumah	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota				5.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	5 Unit Rumah	5 Unit Rumah	5.000.000,00	Kab. Klaten	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		5 Unit Rumah	15.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0008	Fasilitas Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota				5.000.000,00							25.000.000,00	
		Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	5 Rumah Tangga	5 Rumah Tangga	5.000.000,00	Kab. Klaten	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		5 Rumah Tangga	25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				476.730.000,00					Masyarakat Kab Klaten		50.000.000,00	
		-				476.730.000,00					Masyarakat Kab Klaten		50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	12 Laporan	12 Laporan	476.730.000,00						12 Laporan	50.000.000,00	
	1.04.02.2.05.0001	Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun				476.730.000,00							50.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	12 Laporan	12 Laporan	476.730.000,00	Kab. Klaten	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		12 Laporan	50.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				40.160.000,00					Masyarakat Kab Klaten		100.000.000,00	
		Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				40.160.000,00					Masyarakat Kab Klaten		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	12 Laporan	12 Laporan	40.160.000,00						12 Laporan	100.000.000,00	
	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				40.160.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	12 Laporan	12 Laporan	40.160.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		12 Laporan	100.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				39.650.000,00					Masyarakat Kab Klaten		94.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		<i>Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU tingkat kemampuan menengah</i>				3.000.000,00							20.000.000,00	
			999.Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU yang diterbitkan	100,00 %	100,00 %	3.000.000,00						100,00 %	20.000.000,00	
	1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil				3.000.000,00					Masyarakat Kab Klaten		20.000.000,00	
		Terlaksana Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil				3.000.000,00					Masyarakat Kab Klaten		20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00						1 Laporan	20.000.000,00	
	1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil				3.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Klaten	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		1 Laporan	20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				33.580.000,00							90.000.000,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				33.580.000,00							90.000.000,00	
138.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN				6.000.000,00							25.000.000,00	
		<i>Terselesaikannya konflik dan kepastian status hukum atas tanah garapan</i>				6.000.000,00							25.000.000,00	
			999.Persentase sengketa tanah garapan yang diselesaikan	100.00 %	100.00 %	6.000.000,00						100.00 %	25.000.000,00	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				6.000.000,00					Masyarakat Kab Klaten		25.000.000,00	
		Terselesaikannya Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				6.000.000,00					Masyarakat Kab Klaten		25.000.000,00	
			Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
	2.10.04.2.01.0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				6.000.000,00							25.000.000,00	
		Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Klaten	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
139.	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN				10.000.000,00							25.000.000,00	
		<i>Terselesaikannya pengadaan tanah untuk pembangunan secara tepat waktu dan terpenuhinya hak ganti kerugian masyarakat</i>				10.000.000,00							25.000.000,00	
			999.Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	100,00 Persentase	100,00 Persentase	10.000.000,00						100,00 Persentase	25.000.000,00	
	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000,00					Masyarakat Kab Klaten		25.000.000,00	
		Terselesaikannya Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000,00					Masyarakat Kab Klaten		25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Klaten	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
140.	2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE				10.000.000,00							20.000.000,00	
		Terfasilitasinya pensertifikatan tanah milik pemerintah daerah serta terselenggaranya redistribusi tanah dan penyelesaian ganti kerugian secara tepat dan tertib administrasi				10.000.000,00							20.000.000,00	
			999.Persentase tanah milik pemerintah daerah yang terfasilitasi pensertifikatannya	77.00 %	74.00 %	10.000.000,00						75.00 %	20.000.000,00	
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000,00					Masyarakat Kab Klaten		20.000.000,00	
		Terlaksananya Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000,00					Masyarakat Kab Klaten		20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
	2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				10.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Klaten	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		1 Dokumen	20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
141.	2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH				7.580.000,00							20.000.000,00	
		Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah				7.580.000,00							20.000.000,00	
			999.Persentase dokumen penatagunaan tanah yang tersusun	100.00 %	100.00 %	7.580.000,00						100.00 %	20.000.000,00	
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				7.580.000,00					Masyarakat Kab Klaten		20.000.000,00	
		Terlaksananya Penatagunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				7.580.000,00					Masyarakat Kab Klaten		20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	7.580.000,00						1 Laporan	20.000.000,00	
	2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah				7.580.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	7.580.000,00	Kab. Klaten	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		1 Laporan	20.000.000,00	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				11.331.278.080,00							10.198.187.858,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				11.331.278.080,00							10.198.187.858,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				11.331.278.080,00							10.198.187.858,00	
142.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.759.413.206,00							5.797.629.858,00	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi				7.759.413.206,00							5.797.629.858,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				62.390.000,00					ASN Satpol PP Damkar		15.000.000,00	
		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, serta laporan evaluasi kinerja yang berkualitas dan tepat waktu				62.390.000,00					ASN Satpol PP Damkar		15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	62.390.000,00						2 Dokumen	15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				62.390.000,00							15.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	62.390.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kelurahan Tonggalan ILO	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		2 Dokumen	15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.826.267.000,00					ASN Satpol PP Damkar		5.298.522.857,00	
		Terciptanya tertib administrasi, penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu, pengelolaan anggaran yang akuntabel, dan peningkatan kualitas layanan administrasi keuangan				4.826.267.000,00					ASN Satpol PP Damkar		5.298.522.857,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	4.826.267.000,00						37 Orang/bulan	5.298.522.857,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.826.267.000,00							5.298.522.857,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	4.826.267.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kelurahan Tonggalan ILO	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		37 Orang/bulan	5.298.522.857,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				74.607.000,00					ASN dan THL Satpol PP Damkar Kab. Klaten		80.000.000,00	
		Tersedianya dukungan administrasi, pengelolaan barang daerah, penyediaan jasa penunjang, serta peningkatan pelayanan administrasi umum				74.607.000,00					ASN dan THL Satpol PP Damkar Kab. Klaten		80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	74.607.000,00						12 Laporan	80.000.000,00	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				74.607.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	74.607.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kelurahan Tonggalan ILO	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Laporan	80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12.210.000,00					ASN dan THL Satpol PP Damkar Kab. Klaten		10.000.000,00	
		Terpenuhinya kebutuhan barang dan peralatan yang diperlukan untuk mendukung operasional dan pelaksanaan tugas secara efisien dan efektif				12.210.000,00					ASN dan THL Satpol PP Damkar Kab. Klaten		10.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	2 Unit	12.210.000,00						2 Unit	10.000.000,00	
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				12.210.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	2 Unit	12.210.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kelurahan Tonggalan ILO	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		2 Unit	10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.390.939.206,00					ASN dan THL Satpol PP Damkar Kab. Klaten		39.107.001,00	
		Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien, serta terpenuhinya kebutuhan penunjang operasional				2.390.939.206,00					ASN dan THL Satpol PP Damkar Kab. Klaten		39.107.001,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.390.939.206,00						12 Laporan	39.107.001,00	
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.390.939.206,00							39.107.001,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.390.939.206,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kelurahan Tonggalan ILO	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Laporan	39.107.001,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	4 Laporan	4 Laporan	5.110.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kelurahan Tonggalan	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4 Laporan	5.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
144.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				321.597.694,00							1.905.119.000,00	
		Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanggulangan kebakaran dan non-kebakaran secara efektif dan responsif				296.597.694,00							1.805.119.000,00	
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				98.797.694,00					ASN Satpol PP Damkar, THL Satpol PP Damkar dan Masyarakat Kab. Klaten		1.685.119.000,00	
		-				98.797.694,00					ASN Satpol PP Damkar, THL Satpol PP Damkar dan Masyarakat Kab. Klaten		1.685.119.000,00	
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	29 Orang	29 Orang	10.000.000,00						29 Orang	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	7.500.000,00						12 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	85.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	66.297.694,00						12 Laporan	1.560.119.000,00	
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				15.000.000,00							85.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		1 Dokumen	85.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				66.297.694,00							1.560.119.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	66.297.694,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Laporan	1.560.119.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran				7.500.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Dokumen	20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				10.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	29 Orang	29 Orang	10.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		29 Orang	20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				25.000.000,00					ASN Satpol PP Damkar, THL Satpol PP Damkar dan Masyarakat Kab. Klaten		20.000.000,00	
		-				25.000.000,00					ASN Satpol PP Damkar, THL Satpol PP Damkar dan Masyarakat Kab. Klaten		20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00						12 Dokumen	20.000.000,00	
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				25.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Dokumen	20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				132.800.000,00					ASN Satpol PP Damkar, THL Satpol PP Damkar dan Masyarakat Kab. Klaten		60.000.000,00	
		-				132.800.000,00					ASN Satpol PP Damkar, THL Satpol PP Damkar dan Masyarakat Kab. Klaten		60.000.000,00	
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	20 Desa/Kelurahan	20 Desa/Kelurahan	15.000.000,00						20 Desa/Kelurahan	25.000.000,00	
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	250 Orang	250 Orang	117.800.000,00						250 Orang	35.000.000,00	
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				117.800.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	250 Orang	250 Orang	117.800.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		250 Orang	35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				15.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	20 Desa/Kelurahan	20 Desa/Kelurahan	15.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		20 Desa/Kelurahan	25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				65.000.000,00					ASN Satpol PP Damkar, THL Satpol PP Damkar dan Masyarakat Kab. Klaten		140.000.000,00	
		-				65.000.000,00					ASN Satpol PP Damkar, THL Satpol PP Damkar dan Masyarakat Kab. Klaten		140.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00						4 Laporan	25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00						12 Laporan	35.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	3 Unit	3 Unit	50.000.000,00						3 Unit	80.000.000,00	
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia				5.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Laporan	35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi				10.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4 Laporan	25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	1.05.04.2.05.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi				50.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	3 Unit	3 Unit	50.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kelurahan Tanggalan 11.0	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		3 Unit	80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				7.316.176.600,00							6.497.585.333,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				7.316.176.600,00							6.497.585.333,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				7.316.176.600,00							6.497.585.333,00	
145.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.362.754.470,00							4.028.760.333,00	
		<i>Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi</i>				6.362.754.470,00							4.028.760.333,00	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89.70 Indeks	89.40 Indeks	6.362.754.470,00						89.50 Indeks	4.028.760.333,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	70.60 Nilai	69.35 Nilai	6.362.754.470,00						70.00 Nilai	4.028.760.333,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.734.350,00					ASN BPBD		18.000.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.734.350,00					ASN BPBD		18.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	6.734.350,00						2 Dokumen	18.000.000,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6.734.350,00							18.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	6.734.350,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		2 Dokumen	18.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.566.957.000,00					ASN BPBD		3.255.760.333,00	
		Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Keuangan				4.566.957.000,00					ASN BPBD		3.255.760.333,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	4.566.957.000,00						21 Orang/bulan	3.255.760.333,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.566.957.000,00							3.255.760.333,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	4.566.957.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		21 Orang/bulan	3.255.760.333,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				58.561.000,00					BPBD		125.000.000,00	
		Terlaksananya Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum				58.561.000,00					BPBD		125.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	58.561.000,00						12 Laporan	125.000.000,00	
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				58.561.000,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	58.561.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		12 Laporan	125.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.423.392.120,00					ASN BPBD		420.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.423.392.120,00					ASN BPBD		420.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.423.392.120,00						12 Laporan	420.000.000,00	
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.423.392.120,00							420.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	1.423.392.120,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		12 Laporan	420.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				307.110.000,00					ASN BPBD		210.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				307.110.000,00					ASN BPBD		210.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	307.110.000,00						-	210.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				307.110.000,00							210.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	4 Unit	307.110.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		-	210.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
146.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				953.422.130,00							2.468.825.000,00	
		Meningkatnya ketangguhan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana				953.422.130,00							1.968.825.000,00	
			4.Persentase kelompok relawan bencana yang aktif	100,00 %	85,00 %	953.422.130,00						90,00 %	1.968.825.000,00	
			5.Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100,00 %	100,00 %	953.422.130,00						100,00 %	1.968.825.000,00	
			999.Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100,00 %	100,00 %	953.422.130,00						100,00 %	1.968.825.000,00	
			999.persentase warga negara dan aparaturnya yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100,00 %	100,00 %	953.422.130,00						100,00 %	1.968.825.000,00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				103.056.730,00					Perangkat Daerah,Relawan dan Masyarakat Kabupaten Klaten		230.000.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	35 Unit	40.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		15 Unit	300.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.026.775.000,00					Perangkat Daerah		985.612.889,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.026.775.000,00					Perangkat Daerah		985.612.889,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.026.775.000,00						12 Laporan	985.612.889,00	
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.026.775.000,00							985.612.889,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.026.775.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		12 Laporan	985.612.889,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				668.220.999,00					Perangkat Daerah		100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				668.220.999,00					Perangkat Daerah		100.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	142 Unit	134 Unit	668.220.999,00						135 Unit	100.000.000,00	
	1.06.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				668.220.999,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	142 Unit	127 Unit	668.220.999,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		135 Unit	100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
148.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				719.725.000,00							3.135.000.000,00	
		Meningkatnya keberdayaan kelompok rentan dalam kehidupan sosial				719.725.000,00							3.135.000.000,00	
			999.Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Lembaga dan Non Lembaga yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial	98,00 %	95,00 %	719.725.000,00						96,00 %	3.135.000.000,00	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				719.725.000,00					Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		3.135.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				719.725.000,00					Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial		3.135.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Lembaga	6 Lembaga	719.725.000,00						6 Lembaga	3.135.000.000,00	
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				719.725.000,00							3.135.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Lembaga	6 Lembaga	719.725.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		6 Lembaga	3.135.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
149.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1.706.350.000,00							3.007.320.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1210 Orang	750 Orang	450.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		1210 Orang	975.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang				150.000.000,00							352.920.000,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	1210 Orang	750 Orang	150.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		1210 Orang	352.920.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu				185.966.500,00							296.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	55 Orang	185.966.500,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		50 Orang	296.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				15.660.000,00							28.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	14 Orang	15.660.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		60 Orang	28.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial				71.313.500,00							58.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	60 Orang	71.313.500,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		150 Orang	58.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				36.540.000,00							143.200.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	600 Orang	90 Orang	36.540.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		600 Orang	143.200.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				134.720.000,00							80.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	400 Orang	120 Orang	134.720.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		400 Orang	80.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				320.090.000,00							898.200.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	380 Orang	320.090.000,00	Kab. Klaten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		50 Orang	898.200.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan				20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	12 Orang	20.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		12 Orang	20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				15.660.000,00							20.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	14 Orang	15.660.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		60 Orang	20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan				15.660.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	14 Orang	15.660.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		60 Orang	20.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.01.0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota				36.540.000,00							16.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	90 Orang	36.540.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		60 Orang	16.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				254.200.000,00					PMKS lainnya bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di luar panti		100.000.000,00	
		Terlaksanya Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				254.200.000,00					PMKS lainnya bukan Korban HIV/ AIDS dan NAPZA di luar panti		100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	25 Orang	254.200.000,00						35 Orang	100.000.000,00	
	1.06.04.2.02.0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				254.200.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	500 Orang	254.200.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		35 Orang	100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
150.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				3.622.400.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Orang	52 Orang	5.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		125 Orang	75.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang				5.000.000,00							50.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Orang	52 Orang	5.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		125 Orang	50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				215.000.000,00							150.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	125 Orang	215.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		100 Orang	150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial				15.000.000,00							30.000.000,00	
		Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	52 Orang	15.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		100 Orang	30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				5.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	5 Orang	5.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		10 Orang	100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
152.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				150.000.000,00							100.000.000,00	
		Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan				150.000.000,00							100.000.000,00	
			999.Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik	100,00 %	100,00 %	150.000.000,00						100,00 %	100.000.000,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				150.000.000,00					Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				150.000.000,00					Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		100.000.000,00	
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	1 Makam	150.000.000,00						1 Makam	100.000.000,00	
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				150.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	1 Makam	150.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		1 Makam	100.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.176.175.000,00							2.895.000.000,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				658.125.000,00							960.000.000,00	
153.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				43.925.000,00							50.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan				43.925.000,00							50.000.000,00	
			999.Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	2.60 %	2.30 %	43.925.000,00						2.40 %	50.000.000,00	
	2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				43.925.000,00					Perangkat Daerah		50.000.000,00	
		Terlaksananya Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				43.925.000,00					Perangkat Daerah		50.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Laporan	1 Laporan	43.925.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota				43.925.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Laporan	1 Laporan	43.925.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		1 Laporan	50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
154.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				72.150.000,00							155.000.000,00	
		Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dari kekerasan dan diskriminasi				72.150.000,00							155.000.000,00	
			999.Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan	100,00 %	100,00 %	72.150.000,00						100,00 %	155.000.000,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000,00					Perangkat Daerah dan Masyarakat		30.000.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000,00					Perangkat Daerah dan Masyarakat		30.000.000,00	
			Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	-	-	20.000.000,00						-	30.000.000,00	
	2.08.03.2.01.0009	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota				20.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	-	1 Kegiatan	20.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	30.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				52.150.000,00					Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		125.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				52.150.000,00					Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		125.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-	-	52.150.000,00						-	125.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	2.08.03.2.02.0010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota				52.150.000,00							125.000.000,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-	15 Orang	52.150.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	125.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
155.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				158.550.000,00							375.000.000,00	
		<i>Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak</i>				158.550.000,00							375.000.000,00	
			999.Persentase kecamatan yang mempunyai puspaga aktif	53.85 %	42.31 %	158.550.000,00						46.15 %	375.000.000,00	
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				158.550.000,00					Perangkat Daerah		375.000.000,00	
		Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				158.550.000,00					Perangkat Daerah		375.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	20 Lembaga	20 Lembaga	93.550.000,00						20 Lembaga	225.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	10 Lembaga	10 Lembaga	65.000.000,00						10 Lembaga	150.000.000,00	
	2.08.04.2.02.0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				65.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	10 Lembaga	8 Lembaga	65.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		10 Lembaga	150.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.04.2.02.0008	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				93.550.000,00							225.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	20 Lembaga	10 Lembaga	93.550.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		20 Lembaga	225.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
156.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				20.000.000,00							50.000.000,00	
		<i>Tersedianya data gender dan anak yang akurat dan terintegrasi</i>				20.000.000,00							50.000.000,00	
			999.Persentase keterisian data pilah gender dan anak kabupaten pada aplikasi sistem informasi gender dan anak (SIGA)	96 %	90 %	20.000.000,00						92 %	50.000.000,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000,00					Perangkat Daerah		50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				20.000.000,00					Perangkat Daerah		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota yang Tersedia	-	-	20.000.000,00						-	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	2.08.05.2.01.0007	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kab/Kota				20.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota yang Tersedia	-	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
157.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				271.350.000,00							165.000.000,00	
		<i>Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif</i>				271.350.000,00							165.000.000,00	
			999.Persentase desa dan kelurahan dengan peringkat desa/kelurahan layak Anak pada klaster Pemenuhan Hak Anak	49,88 %	24,94 %	271.350.000,00						31,17 %	165.000.000,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				271.350.000,00					Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha		165.000.000,00	
		Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				271.350.000,00					Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha		165.000.000,00	
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	-	-	271.350.000,00						-	165.000.000,00	
	2.08.06.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota				271.350.000,00							165.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	-	100 Lembaga	271.350.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	165.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
158.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				92.150.000,00							165.000.000,00	
		<i>Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak</i>				92.150.000,00							165.000.000,00	
			999.Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan	100,00 %	100,00 %	92.150.000,00						100,00 %	165.000.000,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000,00					Sekolah		40.000.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				30.000.000,00					Sekolah		40.000.000,00	
			Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	-	-	30.000.000,00						-	40.000.000,00	
	2.08.07.2.01.0014	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota				30.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	-	1 Kegiatan	30.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	40.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				62.150.000,00					anak korban kekerasan yang Memerlukan Perlindungan Khusus		125.000.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	1 Laporan	71.136.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		1 Laporan	350.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				53.700.000,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	1 Organisasi	1 Organisasi	53.700.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		1 Organisasi	85.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				190.000.000,00					Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		650.000.000,00	
		Presentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP				190.000.000,00					Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		650.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1100 Orang	800 Orang	190.000.000,00						850 Orang	650.000.000,00	
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				190.000.000,00							650.000.000,00	
		Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1100 Orang	250 Orang	190.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		850 Orang	650.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
161.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)				119.025.000,00							300.000.000,00	
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)				119.025.000,00							300.000.000,00	
			999.Persentase anggota BKL yang menjadi peserta KB	76.52 %	75.02%	119.025.000,00						75.52 %	300.000.000,00	
			999.Persentase anggota BKB yang menjadi peserta KB	100,00 %	100,00 %	119.025.000,00						100,00 %	300.000.000,00	
			999.Persentase anggota BKR yang menjadi peserta KB	84.10 %	82.60 %	119.025.000,00						83.10 %	300.000.000,00	
			999.Persentase anggota UPPKS yang menjadi peserta KB	74.39 %	72.89 %	119.025.000,00						73.39 %	300.000.000,00	
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				56.800.000,00					Linsek/ormas/mitra yang telah berperan dalam kegiatan BKB,BKR,BKL dan UPPKA		50.000.000,00	
		Persentase Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang terbina				56.800.000,00					Linsek/ormas/mitra yang telah berperan dalam kegiatan BKB,BKR,BKL dan UPPKA		50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Jumlah Kelompok Kegiatan/Poktan atau setara Poktan (BKB, BKR, BKL, Satyagatra, PIK-Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapatkan biaya operasional pelaksanaan kelompok kegiatan (Poktan)	-	-	56.800.000,00						-	50.000.000,00	
	2.14.04.2.01.0039	Penyediaan Biaya Operasional Pelaksanaan Kelompok Kegiatan/Poktan (BKB, BKR, BKL, Satyagatra, PIK-Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				56.800.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya biaya operasional pelaksanaan kelompok kegiatan (Poktan) bagi BKB, BKR, BKL, Satyagatra, PIK-Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan/Poktan atau setara Poktan (BKB, BKR, BKL, Satyagatra, PIK-Remaja dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapatkan biaya operasional pelaksanaan kelompok kegiatan (Poktan)	-	26 Kelompok	56.800.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	50.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				62.225.000,00					linsek/ormas/mitra yang telah berperan dalam kegiatan BKB,BKR,BKL dan UPPKA		250.000.000,00	
		Presentase linsek/ormas/mitra yang telah berperan dalam kegiatan BKB,BKR,BKL dan UPPKA				62.225.000,00					linsek/ormas/mitra yang telah berperan dalam kegiatan BKB,BKR,BKL dan UPPKA		250.000.000,00	
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan	-	-	62.225.000,00						-	250.000.000,00	
	2.14.04.2.02.0009	Pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh TPK (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				62.225.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan	-	4855 Keluarga	62.225.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	250.000.000,00	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN				26.196.027.932,00							53.307.694.227,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				15.157.666.000,00							34.359.739.277,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				15.157.666.000,00							34.359.739.277,00	
162.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.387.346.000,00							32.194.739.277,00	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi				14.387.346.000,00							32.194.739.277,00	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.00 Indeks	83.20 Indeks	14.387.346.000,00						83.50 Indeks	32.194.739.277,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	73.01 Nilai	72.78 Nilai	14.387.346.000,00						72.79 Nilai	32.194.739.277,00	
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21.000.000,00					ASN DKPP		55.000.000,00	
		Terlaksananya penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Evaluasi Kinerja				21.000.000,00					ASN DKPP		55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	21.000.000,00						12.00 Dokumen	55.000.000,00	
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				21.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.00 Dokumen	19 Dokumen	21.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Utara Desa Jonggrangan 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		12.00 Dokumen	55.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				12.389.846.000,00					ASN DKPP		30.899.739.277,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terpenuhinya pembayaran gaji / tunjangan, penyusunan dokumen administrasi ASN dan penatausahaan keuangan				12.389.846.000,00					ASN DKPP		30.899.739.277,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	15.000.000,00						12.00 Dokumen	37.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	171.00 Orang/bulan	199.00 Orang/bulan	12.374.846.000,00						192.00 Orang/bulan	30.862.239.277,00	
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12.374.846.000,00							30.862.239.277,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	171.00 Orang/bulan	74 Orang/bulan	12.374.846.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Utara Desa Jonggrangan 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		192.00 Orang/bulan	30.862.239.277,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				15.000.000,00							37.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.00 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Utara Desa Jonggrangan 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		12.00 Dokumen	37.500.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				45.000.000,00					Aset Pemda		75.000.000,00	
		Terkelolanya barang milik daerah				45.000.000,00					Aset Pemda		75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8.00 Dokumen	8.00 Dokumen	45.000.000,00						8.00 Dokumen	75.000.000,00	
	2.09.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				45.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8.00 Dokumen	8 Dokumen	45.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Utara Desa Jonggrangan 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		8.00 Dokumen	75.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100.000.000,00					ASN DKPP		215.000.000,00	
		Terpenuhi dan Terlaporkannya Pelayanan Administrasi Umum				100.000.000,00					ASN DKPP		215.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00 Laporan	12.00 Laporan	100.000.000,00						12.00 Laporan	215.000.000,00	
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100.000.000,00							215.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Utara Desa Jonggrangan 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		12.00 Laporan	215.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.496.657.500,00					ASN DKPP		825.000.000,00	
		Tersedia dan terlaporkannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan				1.496.657.500,00					ASN DKPP		825.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	1.496.657.500,00						12.00 Laporan	825.000.000,00	
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.496.657.500,00							825.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00 Laporan	12 Laporan	1.496.657.500,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Utara Desa Jonggrangan 1	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		12.00 Laporan	825.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				334.842.500,00					Kendaraan dinas, gedung/bangunan kantor dan sarana prasarana pendukung		125.000.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah				334.842.500,00					Kendaraan dinas, gedung/bangunan kantor dan sarana prasarana pendukung		125.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	75.00 Unit	65.00 Unit	334.842.500,00						70.00 Unit	125.000.000,00	
	2.09.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				334.842.500,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	75.00 Unit	260 Unit	334.842.500,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Utara Desa Jonggrangan 1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		70.00 Unit	125.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
163.	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				252.660.000,00							910.000.000,00	
		Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan				252.660.000,00							910.000.000,00	
			999.Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	95.22 Ton	45.22 Ton	252.660.000,00						60.22 Ton	910.000.000,00	
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				252.660.000,00					Gapoktan dan kelompok lumbung pangan		910.000.000,00	
		Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kab/Kota				252.660.000,00					Gapoktan dan kelompok lumbung pangan		910.000.000,00	
			Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	1.00 unit	1.00 unit	252.660.000,00						1.00 unit	910.000.000,00	
	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				252.660.000,00							910.000.000,00	
		Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	1.00 unit	1 unit	252.660.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		1.00 unit	910.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
164.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				367.160.000,00							970.000.000,00	
		Meningkatnya diversifikasi konsumsi pangan dan ketahanan pangan masyarakat				367.160.000,00							970.000.000,00	
			999.Skor Pola Pangan Harapan	94.00 Nilai	93.30 Nilai	367.160.000,00						93.50 Nilai	970.000.000,00	
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				85.000.000,00					Kelompok Wanita Tani dan masyarakat Kab. Klaten		500.000.000,00	
		Terkoordinasikannya kelembagaan penyalur pangan pokok/ pangan lainnya yang melaksanakan stabilisasi pasokan dan harga pangan				85.000.000,00					Kelompok Wanita Tani dan masyarakat Kab. Klaten		500.000.000,00	
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	4.00 Unit	4.00 Unit	85.000.000,00						4.00 Unit	500.000.000,00	
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota				85.000.000,00							500.000.000,00	
		Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	4.00 Unit	2 Unit	85.000.000,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		4.00 Unit	500.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				282.160.000,00					Kelompok Wanita Tani dan Masyarakat Kab. Klaten		470.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Tercapainya Konsumsi Energi dan Protein				282.160.000,00					Kelompok Wanita Tani dan Masyarakat Kab. Klaten		470.000.000,00	
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.00 Laporan	2.00 Laporan	282.160.000,00						2.00 Laporan	470.000.000,00	
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				282.160.000,00							470.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	2.00 Laporan	2 Laporan	282.160.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		2.00 Laporan	470.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
165.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				100.135.000,00							205.000.000,00	
		Menurunnya kerawanan pangan dan meningkatnya akses pangan bagi masyarakat rentan				100.135.000,00							205.000.000,00	
			999.Persentase penanganan daerah rawan pangan	23.00 %	18.00 %	100.135.000,00						20.00 %	205.000.000,00	
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				100.135.000,00					Kelompok afinitas dan masyarakat Kab. Klaten		205.000.000,00	
		Terlaksananya pengadaan/ penambahan cadangan pangan untuk penanganan kerawanan pangan daerah				100.135.000,00					Kelompok afinitas dan masyarakat Kab. Klaten		205.000.000,00	
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1.00 Laporan	1.00 Laporan	100.135.000,00						1.00 Laporan	205.000.000,00	
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				100.135.000,00							205.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1.00 Laporan	1 Laporan	100.135.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		1.00 Laporan	205.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
166.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				50.365.000,00							80.000.000,00	
		Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan				50.365.000,00							80.000.000,00	
			999.Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	96.50 Persentase	95.00 Persentase	50.365.000,00						95.50 Persentase	80.000.000,00	
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				50.365.000,00					Pelaku usaha dan penyuluh pertanian lapangan		80.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar				50.365.000,00					Pelaku usaha dan penyuluh pertanian lapangan		80.000.000,00	
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	20.00 Dokumen	10.00 Dokumen	50.365.000,00						15.00 Dokumen	80.000.000,00	
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				50.365.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	20.00 Dokumen	10 Dokumen	50.365.000,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		15.00 Dokumen	80.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				11.038.361.932,00							18.947.954.950,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				657.160.000,00							1.585.000.000,00	
167.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				75.000.000,00							120.000.000,00	
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap				75.000.000,00							120.000.000,00	
			999.Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	614.04 Ton	573.24 Ton	75.000.000,00						584.58 Ton	120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				75.000.000,00					Kelompok nelayan tangkap dan masyarakat Kabupaten Klaten		120.000.000,00	
		Tercapainya Produksi Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya				75.000.000,00					Kelompok nelayan tangkap dan masyarakat Kabupaten Klaten		120.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	6.00 Unit	3.00 Unit	75.000.000,00						4.00 Unit	120.000.000,00	
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				75.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	6.00 Unit	3 Unit	75.000.000,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		4.00 Unit	120.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
168.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				485.000.000,00							1.265.000.000,00	
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya				485.000.000,00							1.265.000.000,00	
			999.Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	31313.14 Ton	31126.01 Ton	485.000.000,00						31188.26 Ton	1.265.000.000,00	
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				485.000.000,00					Kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) dan UPTD Unit Budidaya Ikan Kabupaten Klaten		1.265.000.000,00	
		Tercapainya produksi/ penyediaan benih ikan pemerintah				485.000.000,00					Kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) dan UPTD Unit Budidaya Ikan Kabupaten Klaten		1.265.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.00 Unit	30.00 Unit	335.000.000,00						30.00 Unit	990.000.000,00	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.00 Unit	1.00 Unit	150.000.000,00						1.00 Unit	275.000.000,00	
		Tersedianya prasarana peningkatan produksi perikanan budidaya				485.000.000,00					Kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) dan UPTD Unit Budidaya Ikan Kabupaten Klaten		1.265.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.00 Unit	30.00 Unit	335.000.000,00						30.00 Unit	990.000.000,00	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.00 Unit	1.00 Unit	150.000.000,00						1.00 Unit	275.000.000,00	
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				335.000.000,00							990.000.000,00	
		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	35.00 Unit	15 Unit	335.000.000,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		30.00 Unit	990.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000,00							275.000.000,00	
		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.00 Unit	1 Unit	150.000.000,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		1.00 Unit	275.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
169.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				97.160.000,00							200.000.000,00	
		Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat				97.160.000,00							200.000.000,00	
			999.Angka Konsumsi Ikan	22.64 Kg/KAP/TH	22.11 Kg/KAP/TH	97.160.000,00						22.24 Kg/KAP/TH	200.000.000,00	
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				97.160.000,00					Poklahsar perikanan dan masyarakat Kabupaten Klaten		200.000.000,00	
		Tercapainya penyediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan				97.160.000,00					Poklahsar perikanan dan masyarakat Kabupaten Klaten		200.000.000,00	
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.08 Ton	7.50 Ton	97.160.000,00						6.40 Ton	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				97.160.000,00							200.000.000,00	
		Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.08 Ton	7.5 Ton	97.160.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		6.40 Ton	200.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				10.381.201.932,00							17.362.954.950,00	
170.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				3.727.781.932,00							8.790.000.000,00	
		Meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan sarana produksi pertanian yang mendukung usaha tani berkelanjutan				3.727.781.932,00							8.790.000.000,00	
			999.Produktivitas padi dan bahan pangan utama lokal lainnya	68.94 Kuintal/Ha	68.87 Kuintal/Ha	3.727.781.932,00						68.89 Kuintal/Ha	8.790.000.000,00	
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				2.592.721.932,00					Kelompok tani dan gabungan kelompok tani		5.555.000.000,00	
		Tercapainya produksi tanaman pangan dan perkebunan				2.592.721.932,00					Kelompok tani dan gabungan kelompok tani		5.555.000.000,00	
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2.00 Laporan	2.00 Laporan	677.160.000,00						2.00 Laporan	5.000.000.000,00	
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.915.561.932,00						1.00 Laporan	555.000.000,00	
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1.915.561.932,00							555.000.000,00	
		Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.00 Laporan	1 Laporan	1.915.561.932,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Pendapatan Bagi Hasil PaiaK Rokok	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		1.00 Laporan	555.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				677.160.000,00							5.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	2.00 Laporan	1 Laporan	677.160.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		2.00 Laporan	5.000.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				717.900.000,00					Kelompok Tani, Gapoktan dan UPTD Agro Techno Park		2.535.000.000,00	
		Tersedia dan termanfaatkannya benih unggul padi berlabel				717.900.000,00					Kelompok Tani, Gapoktan dan UPTD Agro Techno Park		2.535.000.000,00	
			Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	317.900.000,00						2.00 Dokumen	1.800.000.000,00	
			Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	3.00 Varietas Unggul Baru (VUB)	3.00 Varietas Unggul Baru (VUB)	400.000.000,00						3.00 Varietas Unggul Baru (VUB)	735.000.000,00	
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				317.900.000,00							1.800.000.000,00	
		Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	2.00 Dokumen	1 Dokumen	317.900.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		2.00 Dokumen	1.800.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman				400.000.000,00							735.000.000,00	
		Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	3.00 Varietas Unggul Baru (VUB)	3 Varietas Unggul Baru (VUB)	400.000.000,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		3.00 Varietas Unggul Baru (VUB)	735.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				417.160.000,00					Kelompok ternak		700.000.000,00	
		Terlaksananya fasilitas bibit ternak bagi peternak ruminansia besar dan kecil				417.160.000,00					Kelompok ternak		700.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	300.00 Ekor	150.00 Ekor	417.160.000,00						200.00 Ekor	700.000.000,00	
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				417.160.000,00							700.000.000,00	
		Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	300.00 Ekor	125 Ekor	417.160.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		200.00 Ekor	700.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
171.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				5.973.260.000,00							6.627.954.950,00	
		Meningkatnya kualitas prasarana pertanian dan cakupan lahan yang ditetapkan sebagai LP2B				5.973.260.000,00							6.627.954.950,00	
			999.Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B	100,00 %	100,00 %	5.973.260.000,00						100,00 %	6.627.954.950,00	
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian				50.000.000,00					Kelompok tani/Gapoktan dan Masyarakat Kab. Klaten		85.000.000,00	
		Tercapainya luasan lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B				50.000.000,00					Kelompok tani/Gapoktan dan Masyarakat Kab. Klaten		85.000.000,00	
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.000.000,00						1.00 Dokumen	85.000.000,00	
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota				50.000.000,00							85.000.000,00	
		Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	1.00 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		1.00 Dokumen	85.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian				5.923.260.000,00					Kelompok tani dan gabungan kelompok tani/Gapoktan		6.542.954.950,00	
		Terbangunnya prasarana pertanian				5.923.260.000,00					Kelompok tani dan gabungan kelompok tani/Gapoktan		6.542.954.950,00	
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	15.00 Unit	10.00 Unit	1.820.000.000,00						10.00 Unit	2.149.875.000,00	
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	17.00 Unit	15.00 Unit	3.460.000.000,00						17.00 Unit	3.093.079.950,00	
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2.00 Unit	2.00 Unit	228.260.000,00						2.00 Unit	1.000.000.000,00	
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	2.00 Unit	2.00 Unit	415.000.000,00						2.00 Unit	300.000.000,00	
		Terlaksananya pemotongan ternak ruminansia besar di Rumah Pemotongan Hewan pemerintah				5.923.260.000,00					Kelompok tani dan gabungan kelompok tani/Gapoktan		6.542.954.950,00	
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	15.00 Unit	10.00 Unit	1.820.000.000,00						10.00 Unit	2.149.875.000,00	
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	17.00 Unit	15.00 Unit	3.460.000.000,00						17.00 Unit	3.093.079.950,00	
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2.00 Unit	2.00 Unit	228.260.000,00						2.00 Unit	1.000.000.000,00	
			Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	2.00 Unit	2.00 Unit	415.000.000,00						2.00 Unit	300.000.000,00	
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani				1.820.000.000,00							2.149.875.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	15.00 Unit	22 Unit	1.820.000.000,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		10.00 Unit	2.149.875.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				228.260.000,00							1.000.000.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	90.00 Unit Usaha	30 Unit Usaha	75.000.000,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		70.00 Unit Usaha	225.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
173.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN				75.000.000,00							350.000.000,00	
		Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian				75.000.000,00							350.000.000,00	
			999.Persentase Penanganan Bencana Pertanian	100,00 Persentase	100,00 Persentase	75.000.000,00						100,00 Persentase	350.000.000,00	
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				75.000.000,00					Kelompok Tani, Gapoktan dan Masyarakat Kab. Klaten		350.000.000,00	
		Tercapainya luasan penanganan pengendalian OPT dan pencegahan bencana pertanian				75.000.000,00					Kelompok Tani, Gapoktan dan Masyarakat Kab. Klaten		350.000.000,00	
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	10000.00 Ha	10000.00 Ha	75.000.000,00						10000.00 Ha	350.000.000,00	
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				75.000.000,00							350.000.000,00	
		Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	10000.00 Ha	1500 Ha	75.000.000,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		10000.00 Ha	350.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
174.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN				248.000.000,00							790.000.000,00	
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian				248.000.000,00							790.000.000,00	
			999.Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100,00 %	100,00 %	248.000.000,00						100,00 %	790.000.000,00	
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				248.000.000,00					Kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani dan Masyarakat Kab. Klaten		790.000.000,00	
		Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM Penyuluh Pertanian dan kelompok tani				248.000.000,00					Kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani dan Masyarakat Kab. Klaten		790.000.000,00	
			Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	-	-	248.000.000,00						-	790.000.000,00	
	3.27.07.2.01.0013	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa				248.000.000,00							790.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kelemagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	-	25 Unit	248.000.000,00	Kab. Klaten	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		-	790.000.000,00	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP				31.128.818.196,00							34.133.507.382,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				31.128.818.196,00							34.133.507.382,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				31.128.818.196,00							34.133.507.382,00	
175.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				21.325.464.860,40							12.352.772.382,00	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi				21.325.464.860,40							12.352.772.382,00	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95.74 Indeks	95.72 Indeks	21.325.464.860,40						95.73 Indeks	12.352.772.382,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	2 Dokumen	127.604.748,00	Kab. Klaten	Retribusi Jasa Umum Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		2 Dokumen	138.021.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim				60.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Klaten	Retribusi Jasa Umum	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		1 Dokumen	70.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
178.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				1.079.619.046,00							5.500.379.000,00	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati				1.079.619.046,00							5.500.379.000,00	
			999.Persentase RTH Publik Kabupaten	0.72 %	0.69 %	1.079.619.046,00						0.70 %	5.500.379.000,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				1.079.619.046,00					DLH Kabupaten Klaten		5.500.379.000,00	
		Terkelolanya keanekaragaman hayati kabupaten/kota				1.079.619.046,00					DLH Kabupaten Klaten		5.500.379.000,00	
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	11.6 Ha	11.6 Ha	1.079.619.046,00						11.6 Ha	5.500.379.000,00	
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				1.079.619.046,00							5.500.379.000,00	
		Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	11.6 Ha	11.6 Ha	1.079.619.046,00	Kab. Klaten	Pajak Air Tanah Lain-lain PAD Yang Sah	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		11.6 Ha	5.500.379.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
179.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				33.032.000,00							28.552.000,00	
		Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)				33.032.000,00							28.552.000,00	
			999.Persentase Limbah B3 yang Terkelola	44,00 Persentase	29,00 Persentase	33.032.000,00						34,00 Persentase	28.552.000,00	
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				33.032.000,00					DLH Kabupaten Klaten		28.552.000,00	
		Terlaksananya pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota				33.032.000,00					DLH Kabupaten Klaten		28.552.000,00	
			jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	10 Usaha	10 Usaha	33.032.000,00						10 Usaha	28.552.000,00	
	2.11.05.2.02.0004	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota				33.032.000,00							28.552.000,00	
		terlaksananya pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	10 Usaha	10 Usaha	33.032.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		10 Usaha	28.552.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
180.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				20.600.000,00							45.000.000,00	
		Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan PPLH				20.600.000,00							45.000.000,00	
			999.Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	74 Indeks	71 Indeks	20.600.000,00						72 Indeks	45.000.000,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				20.600.000,00					DLH Kabupaten Klaten		45.000.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	2.230.672.319,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Desa Tegalyoso 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Laporan	195.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				224.662.000,00					Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		39.900.000,00	
		Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				224.662.000,00					Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		39.900.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	224.662.000,00						3 Unit	39.900.000,00	
	2.12.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				224.662.000,00							39.900.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	224.662.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Desa Tegalyoso 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		3 Unit	39.900.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
186.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK				50.000.000,00							24.336.000,00	
		Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk				50.000.000,00							24.336.000,00	
			999.Kepemilikan Akta Kelahiran umur 0-18 tahun	90,00 %	84,00 %	50.000.000,00						86,00 %	24.336.000,00	
			999.Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Dijital (IKD)	16 %	10 %	50.000.000,00						12 %	24.336.000,00	
			999.Persentase Perekaman KTP Elektronik	99,65 %	99,60 %	50.000.000,00						99,62 %	24.336.000,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk				15.000.000,00					Anak Usia Dini , Pelajar dan Seluruh Masyarakat Kabupaten Klaten		5.408.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan pendaftaran penduduk				15.000.000,00					Anak Usia Dini , Pelajar dan Seluruh Masyarakat Kabupaten Klaten		5.408.000,00	
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	200 Orang	150 Orang	15.000.000,00						200 Orang	5.408.000,00	
	2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk				15.000.000,00							5.408.000,00	
		Terlasaksananya Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	200 Orang	150 Orang	15.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		200 Orang	5.408.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk				5.000.000,00					Seluruh Masyarakat Kabupaten Klaten		8.112.000,00	
		Terselenggaranya penataan pendaftaran penduduk				5.000.000,00					Seluruh Masyarakat Kabupaten Klaten		8.112.000,00	
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10 Dokumen	10 Dokumen	5.000.000,00						10 Dokumen	8.112.000,00	
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan				5.000.000,00							8.112.000,00	
		Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		10 Dokumen	8.112.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	2 Dokumen	2 Dokumen	89.200.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		2 Dokumen	15.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				6.400.000,00					Lembaga Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Pengguna Data dan Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan		75.000.000,00	
		Terselenggaranya pengelolaan informasi administrasi kependudukan				6.400.000,00					Lembaga Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Pengguna Data dan Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan		75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	6.400.000,00						1 Laporan	75.000.000,00	
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				6.400.000,00							75.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	6.400.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		1 Laporan	75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				3.600.000,00					Lembaga Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Pengguna Data dan Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan		17.006.000,00	
		Terbina dan terawasinya pengelolaan informasi administrasi kependudukan				3.600.000,00					Lembaga Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Pengguna Data dan Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Layanan		17.006.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	3.600.000,00						1 Laporan	17.006.000,00	
	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				3.600.000,00							17.006.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1 Laporan	1 Laporan	3.600.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		1 Laporan	17.006.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
189.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN				5.000.000,00							17.000.000,00	
		Tersedianya profil kependudukan yang akurat dan mendukung perencanaan pembangunan				5.000.000,00							17.000.000,00	
			999.Persentase Ketersediaan Profil Perkembangan Kependudukan Tahunan	100.00 %	100.00 %	5.000.000,00						100.00 %	17.000.000,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan				5.000.000,00					Seluruh Desa, Seluruh Kecamatan, Perangkat Daerah		17.000.000,00	
		Tersusunnya profil kependudukan				5.000.000,00					Seluruh Desa, Seluruh Kecamatan, Perangkat Daerah		17.000.000,00	
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	17.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota				5.000.000,00							17.000.000,00	
		Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		1 Dokumen	17.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				12.159.116.209,00							9.530.562.408,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.159.116.209,00							9.530.562.408,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				12.159.116.209,00							9.530.562.408,00	
190.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.368.510.665,00							3.920.260.794,00	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi				4.368.510.665,00							3.920.260.794,00	
	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.500.000,00					Pemangku kepentingan		5.000.000,00	
		-				1.500.000,00					Pemangku kepentingan		5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	1.500.000,00						2.00 Dokumen	5.000.000,00	
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.500.000,00							5.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.00 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kelurahan Klaten 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		2.00 Dokumen	5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.576.844.000,00					Aparatur Sipil Negara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten		3.630.260.794,00	
		-				3.576.844.000,00					Aparatur Sipil Negara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten		3.630.260.794,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32.00 Orang/bulan	32.00 Orang/bulan	3.576.844.000,00						32.00 Orang/bulan	3.630.260.794,00	
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.576.844.000,00							3.630.260.794,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32.00 Orang/bulan	20 Orang/bulan	3.576.844.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kelurahan Klaten 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		32.00 Orang/bulan	3.630.260.794,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				65.000.000,00					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten		105.000.000,00	
		-				65.000.000,00					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten		105.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000,00						12 Laporan	105.000.000,00	
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65.000.000,00							105.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1 Laporan	65.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kelurahan Klaten 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		12 Laporan	105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				676.491.069,00					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten		95.000.000,00	
		-				676.491.069,00					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten		95.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	676.491.069,00						12 Laporan	95.000.000,00	
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				676.491.069,00							95.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1 Laporan	676.491.069,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kelurahan Klaten 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		12 Laporan	95.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				48.675.596,00					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten		85.000.000,00	
		-				48.675.596,00					Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten		85.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	15 Unit	48.675.596,00						15 Unit	85.000.000,00	
	2.13.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				48.675.596,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	19 Unit	48.675.596,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kelurahan Klaten 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		15 Unit	85.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
191.	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA				20.000.000,00							70.000.000,00	
		Tertatanya administrasi dan wilayah desa secara legal dan fungsional				20.000.000,00							70.000.000,00	
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa				20.000.000,00					Kabupaten Klaten		70.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Desa				20.000.000,00					Kabupaten Klaten		70.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	4 Unit	4 Unit	20.000.000,00						4 Unit	70.000.000,00	
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa				20.000.000,00							70.000.000,00	
		Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	4 Unit	4 Unit	20.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		4 Unit	70.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
192.	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA				5.000.000,00							75.000.000,00	
		Meningkatnya efektivitas kerja sama desa				5.000.000,00							75.000.000,00	
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa				5.000.000,00					Kabupaten Klaten		75.000.000,00	
		Terfasilitasinya Kerja Sama antar Desa				5.000.000,00					Kabupaten Klaten		75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	75.000.000,00	
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				5.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		1 Dokumen	75.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
193.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				5.183.005.544,00							4.135.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				5.167.005.544,00							4.080.000.000,00	
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				5.183.005.544,00					Kabupaten Klaten		4.135.000.000,00	
		-				5.183.005.544,00					Kabupaten Klaten		4.135.000.000,00	
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	391 Orang	391 Orang	3.000.000,00						391 Orang	120.000.000,00	
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	10 Desa	10 Desa	10.000.000,00						10 Desa	55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00						1 Dokumen	65.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00						1 Dokumen	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		2 Laporan	130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				20.000.000,00							130.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		1 Laporan	130.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1.000.000.000,00							420.301.614,00	
		Terlaksananya Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		1 Dokumen	420.301.614,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		DINAS PERHUBUNGAN				58.051.796.654,00							42.434.327.698,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				58.051.796.654,00							42.434.327.698,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				58.051.796.654,00							42.434.327.698,00	
195.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10.776.009.120,00							9.217.460.486,00	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi				10.776.009.120,00							9.217.460.486,00	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76.00 Indeks	74.00 Indeks	10.776.009.120,00						75.00 Indeks	9.217.460.486,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	72.00 Nilai	71.50 Nilai	10.776.009.120,00						71.50 Nilai	9.217.460.486,00	
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.000.000,00					Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten		25.000.000,00	
		Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.000.000,00					Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten		25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	30.000.000,00						8 Dokumen	25.000.000,00	
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				30.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Utara Desa Belangwetan 1	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		8 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.120.848.000,00					Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten		5.872.553.486,00	
		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan				7.120.848.000,00					Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten		5.872.553.486,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	61 Orang/bulan	7.120.848.000,00						65 Orang/bulan	5.872.553.486,00	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7.120.848.000,00							5.872.553.486,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	61 Orang/bulan	7.120.848.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Utara Desa Belangwetan 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		65 Orang/bulan	5.872.553.486,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				239.840.000,00					Pegawai Dinas Perhubungan		250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum				239.840.000,00					Pegawai Dinas Perhubungan		250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	239.840.000,00						12 Laporan	250.000.000,00	
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				239.840.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	239.840.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Utara Desa Belangwetan 1	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		12 Laporan	250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.843.441.120,00					Pegawai Dinas Perhubungan		2.989.907.000,00	
		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang Tersedia				2.843.441.120,00					Pegawai Dinas Perhubungan		2.989.907.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.843.441.120,00						12 Laporan	2.989.907.000,00	
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.843.441.120,00							2.989.907.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2.843.441.120,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Utara Desa Belangwetan 1	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		12 Laporan	2.989.907.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				541.880.000,00					Pegawai Dinas Perhubungan		80.000.000,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara				541.880.000,00					Pegawai Dinas Perhubungan		80.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	541.880.000,00						20 Unit	80.000.000,00	
	2.15.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				541.880.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	20 Unit	541.880.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Utara Desa Belangwetan 1	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		20 Unit	80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
196.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)				47.275.787.534,00							33.216.867.212,00	
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat				47.275.787.534,00							33.216.867.212,00	
			999.Persentase kendaraan yang melakukan uji KIR	67.00 %	64.00 %	47.275.787.534,00						65.00 %	33.216.867.212,00	
			999.Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota	77.00 Persentase	74.00 Persentase	47.275.787.534,00						75.00 Persentase	33.216.867.212,00	
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				44.753.060.034,00					Masyarakat pengguna jalan		30.501.807.212,00	
		Tersedianya dan terpasangnya Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Ideal				44.753.060.034,00					Masyarakat pengguna jalan		30.501.807.212,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	200 Unit	130 Unit	14.649.513.377,00						140 Unit	2.550.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7550 Unit	7250 Unit	30.103.546.657,00						7400 Unit	27.951.807.212,00	
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				14.649.513.377,00							2.550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	200 Unit	130 Unit	14.649.513.377,00	Kab. Klaten	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		140 Unit	2.550.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan				30.103.546.657,00							27.951.807.212,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	7550 Unit	7250 Unit	30.103.546.657,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		7400 Unit	27.951.807.212,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				17.060.000,00					Masyarakat Pengguna Layanan Terminal Penumpang Tipe C		15.060.000,00	
		Terkelolanya Operasional Terminal Penumpang Tipe C Tepat Waktu Sesuai Strandar yang ditetapkan				17.060.000,00					Masyarakat Pengguna Layanan Terminal Penumpang Tipe C		15.060.000,00	
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	1 Unit	17.060.000,00						1 Unit	15.060.000,00	
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)				17.060.000,00							15.060.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit	1 Unit	17.060.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Ceper Desa Jambukulon 1	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		1 Unit	15.060.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				1.150.752.000,00					Masyarakat Kabupaten Klaten		960.000.000,00	
		Terkelolanya Kapling serta Fasilitas Parkir dengan baik sesuai dengan Dokumen Perencanaan				1.150.752.000,00					Masyarakat Kabupaten Klaten		960.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	1.150.752.000,00						12 Laporan	960.000.000,00	
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				1.150.752.000,00							960.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	1.150.752.000,00	Kab. Klaten	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		12 Laporan	960.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				485.587.500,00					Masyarakat pemilik Kendaraan Wajib Uji dan pegawai Dinas Perhubungan		245.000.000,00	
		Terselenggaranya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				485.587.500,00					Masyarakat pemilik Kendaraan Wajib Uji dan pegawai Dinas Perhubungan		245.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	13 Unit	13 Unit	444.587.500,00						13 Unit	190.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang	3 Orang	41.000.000,00						3 Orang	55.000.000,00	
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				41.000.000,00							55.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Orang	3 Orang	41.000.000,00	Kab. Klaten	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		3 Orang	55.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				444.587.500,00							190.000.000,00	
		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	13 Unit	13 Unit	444.587.500,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Utara Desa Belangwetan 1	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		13 Unit	190.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				678.720.000,00					Masyarakat umum pengguna jalan di Kabupaten Klaten		1.130.000.000,00	
		Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota				678.720.000,00					Masyarakat umum pengguna jalan di Kabupaten Klaten		1.130.000.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 Laporan	12 Laporan	245.840.000,00						12 Laporan	360.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	432.880.000,00						12 Laporan	770.000.000,00	
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				432.880.000,00							770.000.000,00	
		Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Laporan	12 Laporan	432.880.000,00	Kab. Klaten	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		12 Laporan	770.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				245.840.000,00							360.000.000,00	
		Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	12 Laporan	12 Laporan	245.840.000,00	Kab. Klaten	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		12 Laporan	360.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				20.220.000,00					Masyarakat Kabupaten Klaten		40.000.000,00	
		Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Kabupaten / Kota				20.220.000,00					Masyarakat Kabupaten Klaten		40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 Laporan	12 Laporan	20.220.000,00						12 Laporan	40.000.000,00	
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				20.220.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 Laporan	12 Laporan	20.220.000,00	Kab. Klaten	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		12 Laporan	40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				170.388.000,00					Masyarakat Kabupaten Klaten		325.000.000,00	
		Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota				170.388.000,00					Masyarakat Kabupaten Klaten		325.000.000,00	
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	14 Unit	12 Unit	170.388.000,00						12 Unit	325.000.000,00	
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				170.388.000,00							325.000.000,00	
		Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	14 Unit	12 Unit	170.388.000,00	Kab. Klaten	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		12 Unit	325.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				12.870.118.673,00							16.265.348.244,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				12.870.118.673,00							16.265.348.244,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				12.626.423.323,00							15.907.535.244,00	
	197. 2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.174.018.744,00							4.392.264.244,00	
		<i>Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi</i>				<i>6.174.018.744,00</i>							<i>4.392.264.244,00</i>	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85.00 Indeks	82.00 Indeks	6.174.018.744,00						83.00 Indeks	4.392.264.244,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	87.00 Nilai	84.00 Nilai	6.174.018.744,00						85.00 Nilai	4.392.264.244,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.946.500,00					Perangkat Daerah		20.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6.946.500,00					Perangkat Daerah		20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	6.946.500,00						8 Dokumen	20.000.000,00	
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6.946.500,00							20.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	6.946.500,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		8 Dokumen	20.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.017.165.000,00					ASN Diskominfo dan Perangkat daerah		3.972.264.244,00	
		Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat daerah				4.017.165.000,00					ASN Diskominfo dan Perangkat daerah		3.972.264.244,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	23 Orang/bulan	4.017.165.000,00						21 Orang/bulan	3.972.264.244,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.017.165.000,00							3.972.264.244,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	23 Orang/bulan	4.017.165.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		21 Orang/bulan	3.972.264.244,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				303.896.600,00					Diskominfo		185.000.000,00	
		Terlaksananya Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah				303.896.600,00					Diskominfo		185.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	303.896.600,00						12 Laporan	185.000.000,00	
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				303.896.600,00							185.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	303.896.600,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		12 Laporan	185.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.455.549.644,00					Diskominfo		115.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.455.549.644,00					Diskominfo		115.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.455.549.644,00						12 Laporan	115.000.000,00	
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.455.549.644,00							115.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.455.549.644,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		12 Laporan	115.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				390.461.000,00					Diskominfo		100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				390.461.000,00					Diskominfo		100.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	390.461.000,00						-	100.000.000,00	
	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				390.461.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	25 Unit	390.461.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		-	100.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
198.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				2.331.340.570,00							3.221.000.000,00	
		<i>Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah</i>				2.331.340.570,00							3.221.000.000,00	
			999.Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	83.00 %	77.00 %	2.331.340.570,00						79.00 %	3.221.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah				2.331.340.570,00					Masyarakat		3.221.000.000,00	
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	10 Laporan	7 Laporan	1.912.411.550,00						8 Laporan	2.766.000.000,00	
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media				1.912.411.550,00							2.766.000.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	51 Titik	3.302.589.491,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		-	7.440.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				115.835.250,00							191.647.000,00	
200.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				115.835.250,00							191.647.000,00	
		<i>Tersedianya data statistik sektoral yang akurat dan mendukung pengambilan kebijakan</i>				115.835.250,00							191.647.000,00	
			999.Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100.00 %	100.00 %	115.835.250,00						100.00 %	191.647.000,00	
			999.Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100.00 %	100.00 %	115.835.250,00						100.00 %	191.647.000,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				115.835.250,00					Masyarakat dan Perangkat Daerah		191.647.000,00	
		Terselenggaranya kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadada				115.835.250,00					Masyarakat dan Perangkat Daerah		191.647.000,00	
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	60.00 Orang	60.00 Orang	115.835.250,00						60.00 Orang	191.647.000,00	
	2.20.02.2.01.0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				115.835.250,00							191.647.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	60.00 Orang	60 Orang	115.835.250,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		60.00 Orang	191.647.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				127.860.100,00							166.166.000,00	
201.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				127.860.100,00							166.166.000,00	
		<i>Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah</i>				127.860.100,00							166.166.000,00	
			999.Persentase tingkat keamanan informasi pemerintah	84 %	73 %	127.860.100,00						76 %	166.166.000,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				127.860.100,00					Perangkat Daerah		166.166.000,00	
		Terselenggaranya pengamanan informasi yang diamankan dengan sertifikat elektronik				127.860.100,00					Perangkat Daerah		166.166.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-	-	127.860.100,00						-	166.166.000,00	
	2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				127.860.100,00							166.166.000,00	
		Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-	12 Laporan	127.860.100,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		-	166.166.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN				21.388.017.906,00							26.639.733.149,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				19.988.817.906,00							19.909.733.149,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				19.988.817.906,00							19.909.733.149,00	
202.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				19.040.567.906,00							17.509.733.149,00	
		<i>Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi</i>				19.040.567.906,00							17.509.733.149,00	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.80 Indeks	86.20 Indeks	19.040.567.906,00						86.40 Indeks	17.509.733.149,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	75.30 Nilai	75.00 Nilai	19.040.567.906,00						75.10 Nilai	17.509.733.149,00	
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				60.000.000,00					ASN DKUKMP		65.000.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	25 Unit	655.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Investasi		25 Unit	300.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
203.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				51.000.000,00							150.000.000,00	
		<i>Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi</i>				51.000.000,00							150.000.000,00	
			999.Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	67.10 Persentase	65.80 Persentase	51.000.000,00						66.90 Persentase	150.000.000,00	
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				51.000.000,00					Unit Usaha Koperasi		150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah				51.000.000,00					Unit Usaha Koperasi		150.000.000,00	
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	51.000.000,00						100 Unit Usaha	150.000.000,00	
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				51.000.000,00							150.000.000,00	
		Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	51.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Investasi		100 Unit Usaha	150.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
204.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				150.000.000,00							450.000.000,00	
		<i>Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia koperasi dalam pengelolaan usaha koperasi</i>				150.000.000,00							450.000.000,00	
			999.Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	46.70 Persentase	40.70 Persentase	150.000.000,00						42.50 Persentase	450.000.000,00	
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000,00					Unit Usaha Koperasi		450.000.000,00	
		Peningkatan kualitas koperasi dengan pendidikan dan pelatihan perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000,00					Unit Usaha Koperasi		450.000.000,00	
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100 Orang	100 Orang	150.000.000,00						100 Orang	450.000.000,00	
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				150.000.000,00							450.000.000,00	
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Investasi		100 Orang	450.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
205.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				175.000.000,00							1.400.000.000,00	
		<i>Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri</i>				175.000.000,00							1.400.000.000,00	
			999.Persentase Usaha Mikro yang bertransformasi dari Informal menjadi Formal	66.00 %	64.50 %	175.000.000,00						65.00 %	1.400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				175.000.000,00					Pelaku Usaha (UMKM)		1.400.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				175.000.000,00					Pelaku Usaha (UMKM)		1.400.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-	-	95.000.000,00						-	1.200.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-	-	80.000.000,00						-	200.000.000,00	
	2.17.07.2.01.0018	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha				95.000.000,00							1.200.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-	2520 Orang	95.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Investasi		-	1.200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	2.17.07.2.01.0022	Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM				80.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-	32200 Unit Usaha	80.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Investasi		-	200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
206.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				572.250.000,00							400.000.000,00	
		Meningkatnya daya saing UMKM				572.250.000,00							400.000.000,00	
			999.Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya	4.00 %	2.80 %	572.250.000,00						3,20 %	400.000.000,00	
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				572.250.000,00					Pelaku Usaha (UMKM)		400.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				572.250.000,00					Pelaku Usaha (UMKM)		400.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perkuatan Produk Pasar Dalam Negeri	-	-	572.250.000,00						-	400.000.000,00	
	2.17.08.2.01.0023	Pembinaan dan Fasilitasi Perkuatan Produk UMKM Pasar Dalam Negeri				572.250.000,00							400.000.000,00	
		Terfasilitasinya pengembangan UMKM dalam Perkuatan Produk UMKM Pasar Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perkuatan Produk Pasar Dalam Negeri	-	105 Produk	572.250.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Investasi		-	400.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				1.399.200.000,00							6.730.000.000,00	
3.30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				1.399.200.000,00							6.730.000.000,00	
207.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				18.000.000,00							30.000.000,00	
		Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha				18.000.000,00							30.000.000,00	
			999.Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100 %	100 %	18.000.000,00						100 %	30.000.000,00	
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang				18.000.000,00					Pelaku Usaha		30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terbitnya Tanda Daftar Gudang				18.000.000,00					Pelaku Usaha		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00						1 Dokumen	30.000.000,00	
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang				18.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1 Dokumen	1 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		1 Dokumen	30.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
208.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				162.700.000,00							5.350.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi				162.700.000,00							5.350.000.000,00	
			999.Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	57.14 Persentase	51.02 Persentase	162.700.000,00						53.06 Persentase	5.350.000.000,00	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				100.700.000,00					Pelaku Usaha		4.850.000.000,00	
		Terlaksananya Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				100.700.000,00					Pelaku Usaha		4.850.000.000,00	
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	27 Unit	24 Unit	100.700.000,00						25 Unit	4.850.000.000,00	
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				100.700.000,00							4.850.000.000,00	
		Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	27 Unit	24 Unit	100.700.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		25 Unit	4.850.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				62.000.000,00					Pelaku Usaha		500.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				62.000.000,00					Pelaku Usaha		500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	12 Dokumen	62.000.000,00						12 Dokumen	500.000.000,00	
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				62.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	12 Dokumen	62.000.000,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Dokumen	500.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
209.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				653.500.000,00							300.000.000,00	
		Meningkatnya kelancara distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				653.500.000,00							300.000.000,00	
			1.Indeks Stabilitas Harga	100.00 %	100.00 %	653.500.000,00						100.00 %	300.000.000,00	
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				45.000.000,00					Pelaku Usaha		200.000.000,00	
		Tersedianya Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				45.000.000,00					Pelaku Usaha		200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	6 Laporan	4 Laporan	45.000.000,00						4 Laporan	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	3.30.04.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				45.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	6 Laporan	4 Laporan	45.000.000,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		4 Laporan	200.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				608.500.000,00					Masyarakat di Kabupaten Klaten		100.000.000,00	
		Terkendalnya Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				608.500.000,00					Masyarakat di Kabupaten Klaten		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	608.500.000,00						2 Laporan	100.000.000,00	
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				608.500.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	608.500.000,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		2 Laporan	100.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
210.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				150.000.000,00							350.000.000,00	
		Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor				150.000.000,00							350.000.000,00	
			999.Nilai Ekspor Barang	1650000000 US\$	1450000000 US\$	150.000.000,00						1500000000 US\$	350.000.000,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000,00					Pelaku Usaha		350.000.000,00	
		Terselenggaranya Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				150.000.000,00					Pelaku Usaha		350.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	150.000.000,00						3 Pelaku Usaha	350.000.000,00	
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional				150.000.000,00							350.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3 Pelaku Usaha	3 Pelaku Usaha	150.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		3 Pelaku Usaha	350.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
211.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN				55.000.000,00							50.000.000,00	
		Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap standar dan perlindungan konsumen				55.000.000,00							50.000.000,00	
			999.Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	98 %	97.30 %	55.000.000,00						97.60 %	50.000.000,00	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				55.000.000,00					Masyarakat di Kabupaten Klaten		50.000.000,00	
		Terlaksananya Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				55.000.000,00					Masyarakat di Kabupaten Klaten		50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	9000 Unit	9000 Unit	55.000.000,00						9000 Unit	50.000.000,00	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang				55.000.000,00							50.000.000,00	
		Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	9000 Unit	9000 Unit	55.000.000,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		9000 Unit	50.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
212.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				360.000.000,00							650.000.000,00	
		Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri				360.000.000,00							650.000.000,00	
			999.Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	71.43 Persentase	57.14 Persentase	360.000.000,00						57.14 Persentase	650.000.000,00	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				360.000.000,00					Pelaku Usaha (UMKM)		650.000.000,00	
		Terlaksananya Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				360.000.000,00					Pelaku Usaha (UMKM)		650.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10 UMKM	10 UMKM	360.000.000,00						10 UMKM	650.000.000,00	
	3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				360.000.000,00							650.000.000,00	
		Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10 UMKM	10 UMKM	360.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		10 UMKM	650.000.000,00	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				4.813.802.820,00							4.249.427.626,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				4.813.802.820,00							4.249.427.626,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				4.813.802.820,00							4.249.427.626,00	
213.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.278.102.820,00							3.315.122.626,00	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi				4.278.102.820,00							3.315.122.626,00	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.50 Indeks	91.50 Indeks	4.278.102.820,00						92.50 Indeks	3.315.122.626,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82.00 Nilai	80.75 Nilai	4.278.102.820,00						81.00 Nilai	3.315.122.626,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				28.500.000,00					asn dpmptsp		80.000.000,00	
		Tersedianya dokumen perangkat daerah				28.500.000,00					asn dpmptsp		80.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00 Dokumen	100.00 Dokumen	28.500.000,00						100.00 Dokumen	80.000.000,00	
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				28.500.000,00							80.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100.00 Dokumen	10 Dokumen	28.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Desa Semangkak 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Investasi		100.00 Dokumen	80.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.042.913.000,00					asn dpmptsp		2.375.122.626,00	
		Tersedianya Jumlah laporan administrasi keuangan PD yang terpenuhi dibagi Jumlah laporan administrasi keuangan PD yang harus disusun dikali 100				3.042.913.000,00					asn dpmptsp		2.375.122.626,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	20.200.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	13.00 Orang/bulan	3.022.713.000,00						13.00 Orang/bulan	2.350.122.626,00	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.022.713.000,00							2.350.122.626,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	12 Orang/bulan	3.022.713.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Desa Semangkak 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Investasi		13.00 Orang/bulan	2.350.122.626,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				20.200.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	20.200.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Desa Semangkak 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Investasi		1 Dokumen	25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				75.000.000,00					asn dpmptsp		120.000.000,00	
		tersedianya Jumlah pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi dibagi jumlah pelayanan administrasi umum perangkat daerah kali 100				75.000.000,00					asn dpmptsp		120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00 Laporan	12.00 Laporan	75.000.000,00						12.00 Laporan	120.000.000,00	
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75.000.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Investasi		12.00 Laporan	120.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				877.364.509,00					asn dpmptsp		500.000.000,00	
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah				877.364.509,00					asn dpmptsp		500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	877.364.509,00						12 Laporan	500.000.000,00	
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				877.364.509,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	877.364.509,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Desa Semangkak 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	2. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Investasi		12 Laporan	500.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				254.325.311,00					asn dpmptsp		240.000.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah				254.325.311,00					asn dpmptsp		240.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80 Unit	80 Unit	254.325.311,00						80 Unit	240.000.000,00	
	2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				254.325.311,00							240.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80 Unit	40 Unit	254.325.311,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Desa Semangkak 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	2. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Investasi		80 Unit	240.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
214.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				127.050.000,00							160.000.000,00	
		Meningkatnya kemudahan berinvestasi				127.050.000,00							160.000.000,00	
			999.Realisasi Total terhadap Target Investasi	68.73 %	67.79 %	127.050.000,00						67.80 %	160.000.000,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				67.050.000,00					pelaku usaha		70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
219.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				10.347.100.000,00							160.000.000,00	
		Meningkatnya daya saing kepemudaan				10.347.100.000,00							160.000.000,00	
			999.Rasio Wirausaha Pemuda	11.00 %	9,00 %	10.347.100.000,00						10,00 %	160.000.000,00	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				10.272.100.000,00					Pemuda		85.000.000,00	
		terlaksananya pembinaan pemuda pelopor, wirausaha muda pemuda dan pemuda kader				10.272.100.000,00					Pemuda		85.000.000,00	
			Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	-	-	10.272.100.000,00						-	85.000.000,00	
	2.19.02.2.01.0022	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota				10.272.100.000,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	-	50 Orang	10.272.100.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	85.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				75.000.000,00					Organisasi Kepemudaan		75.000.000,00	
		terlaksananya pengembangan Organisasi Kepemudaan				75.000.000,00					Organisasi Kepemudaan		75.000.000,00	
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-	-	75.000.000,00						-	75.000.000,00	
	2.19.02.2.02.0005	Penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				75.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-	1 Organisasi	75.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	75.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
220.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				6.875.000.000,00							4.600.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas pembinaan, prestasi dan daya saing keolahragaan secara berkelanjutan				6.875.000.000,00							4.600.000.000,00	
			999.Persentase pembinaan Atlet berprestasi	45.00 %	44.00 %	6.875.000.000,00						44.33 %	4.600.000.000,00	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				3.875.000.000,00					Atlit pelajar, perkumpulan olahraga dan masyarakat		3.900.000.000,00	
		terlaksananya pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah				3.875.000.000,00					Atlit pelajar, perkumpulan olahraga dan masyarakat		3.900.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar	-	-	3.675.000.000,00						-	3.900.000.000,00	
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-	-	200.000.000,00						-	0,00	
	2.19.03.2.01.0007	Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar				3.675.000.000,00							3.900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Festival/Kejuaraan oleh Satuan Pendidikan Usia Dini dan Dasar	-	3 Kegiatan	3.675.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	3.900.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.01.0009	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota				200.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-	2 Unit	200.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	0,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				600.000.000,00					Atlit pelajar dan perkumpulan olahraga		600.000.000,00	
		terselenggaranya event Olahraga prestasi tingkat daerah				600.000.000,00					Atlit pelajar dan perkumpulan olahraga		600.000.000,00	
			Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	-	-	600.000.000,00						-	600.000.000,00	
	2.19.03.2.02.0007	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga				600.000.000,00							600.000.000,00	
		Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	-	400 Orang	600.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	600.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				2.400.000.000,00					Atlit pelajar, perkumpulan olahraga dan masyarakat		100.000.000,00	
		terbinanya olahraga prestasi tingkat daerah dan propinsi				2.400.000.000,00					Atlit pelajar, perkumpulan olahraga dan masyarakat		100.000.000,00	
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-	-	2.400.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.19.03.2.03.0012	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga				2.400.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-	400 Orang	2.400.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
221.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				890.000.000,00							100.000.000,00	
		Meningkatnya pembinaan kepramukaan				890.000.000,00							100.000.000,00	
			999.Persentase kwartir/ gudep yang melaksanakan program kerja tahunan secara konsisten	100.00 %	100.00 %	890.000.000,00						100.00 %	100.000.000,00	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				890.000.000,00					Organisasi Kepramukaan		100.000.000,00	
		terlaksananya laporan kegiatan kepramukaan tingkat daerah				890.000.000,00					Organisasi Kepramukaan		100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	-	-	890.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.19.04.2.01.0010	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				890.000.000,00							100.000.000,00	
		Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	-	1 Laporan	890.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		-	100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				12.516.302.355,00							10.328.090.446,00	
222.	2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.357.709.391,00							7.703.090.446,00	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi				8.357.709.391,00							7.703.090.446,00	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88.50 Indeks	87.20 Indeks	8.357.709.391,00						87.50 Indeks	7.703.090.446,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	73.07 Nilai	73.01 Nilai	8.357.709.391,00						73.03 Nilai	7.703.090.446,00	
	2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000,00					Pegawai Disbudporapar		50.000.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				10.000.000,00					Pegawai Disbudporapar		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.00 Dokumen	6.00 Dokumen	10.000.000,00						6.00 Dokumen	50.000.000,00	
	2.22.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.00 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kelurahan Klaten 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		6.00 Dokumen	50.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.082.674.000,00					Pegawai Disbudporapar		5.930.030.300,00	
		Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Keuangan				5.082.674.000,00					Pegawai Disbudporapar		5.930.030.300,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34.00 Orang/bulan	34.00 Orang/bulan	5.082.674.000,00						34.00 Orang/bulan	5.930.030.300,00	
	2.22.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.082.674.000,00							5.930.030.300,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34.00 Orang/bulan	34 Orang/bulan	5.082.674.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kelurahan Klaten 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		34.00 Orang/bulan	5.930.030.300,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				170.000.000,00					Pegawai Disbudporapar		100.000.000,00	
		Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum				170.000.000,00					Pegawai Disbudporapar		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.00 Laporan	4.00 Laporan	170.000.000,00						4.00 Laporan	100.000.000,00	
	2.22.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				170.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.00 Laporan	4 Laporan	170.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kelurahan Klaten 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		4.00 Laporan	100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.786.315.391,00					Pegawai Disbudporapar		1.560.060.146,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah				2.786.315.391,00					Pegawai Disbudporapar		1.560.060.146,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4.00 Laporan	4.00 Laporan	2.786.315.391,00						4.00 Laporan	1.560.060.146,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksanakannya Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2 Dokumen	370.900.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				34.200.000,00					Kawasan Prambanan, Rowo Jombor dskt, Merapi, Pelaku Usaha Pariwisata		100.000.000,00	
		terkelolanya kawasan strategis pariwisata				34.200.000,00					Kawasan Prambanan, Rowo Jombor dskt, Merapi, Pelaku Usaha Pariwisata		100.000.000,00	
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	10 Lokasi	6 Lokasi	34.200.000,00						6 Lokasi	100.000.000,00	
	3.26.02.2.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				34.200.000,00							100.000.000,00	
		Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	10 Lokasi	3 Lokasi	34.200.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah		6 Lokasi	100.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				877.852.729,00					Destinasi Pariwisata Kab. Klaten, Produk dan Layanan pariwisata, destinasi pariwisata di Kabupaten Klaten, pengunjung destinasi pariwisata		2.450.000.000,00	
		terkelolanya destinasi pariwisata dengan baik				877.852.729,00					Destinasi Pariwisata Kab.Klaten, Produk dan Layanan pariwisata, destinasi pariwisata di Kabupaten Klaten, pengunjung destinasi pariwisata		2.450.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	155 Unit	147 Unit	877.852.729,00						149 Unit	2.450.000.000,00	
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				877.852.729,00							2.450.000.000,00	
		Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	155 Unit	140 Unit	877.852.729,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	-	5. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah		149 Unit	2.450.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
	3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota				15.000.000,00					Pelaku Usaha Pariwisata		60.000.000,00	
		terfasilitasinya pelaku usaha yang memenuhi standar usaha pariwisata				15.000.000,00					Pelaku Usaha Pariwisata		60.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	-	-	15.000.000,00						-	60.000.000,00	
	3.26.02.2.04.0019	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha				15.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	-	25 Pelaku Usaha	15.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	-	5. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah		-	60.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
229.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				873.000.000,00							1.380.000.000,00	
		Meningkatnya promosi dan citra positif pariwisata				873.000.000,00							1.380.000.000,00	
			999.Persentase media pemasaran pariwisata	100.00 %	100.00 %	873.000.000,00						100.00 %	1.380.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	100.00 Orang	100 Orang	166.450.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	5. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah		100.00 Orang	125.000.000,00	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA, DAN PARIWISATA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				5.333.508.797,00							4.993.116.969,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.333.508.797,00							4.993.116.969,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				5.196.358.184,00							4.657.502.969,00	
232.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.017.729.014,00							4.265.752.969,00	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi				5.017.729.014,00							4.265.752.969,00	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	91 Indeks	89 Indeks	5.017.729.014,00						90 Indeks	4.265.752.969,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	82.45 Nilai	82.00 Nilai	5.017.729.014,00						82.35 Nilai	4.265.752.969,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.000.000,00					Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		21.000.000,00	
		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja				5.000.000,00					Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah		21.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	5.000.000,00						7 Dokumen	21.000.000,00	
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.000.000,00							21.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		7 Dokumen	21.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.725.134.000,00					ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten		3.684.752.969,00	
		Terpenuhinya pembayaran gaji, tunjangan ASN, dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu				3.725.134.000,00					ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten		3.684.752.969,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	3.725.134.000,00						32 Orang/bulan	3.684.752.969,00	
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.725.134.000,00							3.684.752.969,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	32 Orang/bulan	3.725.134.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		32 Orang/bulan	3.684.752.969,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				214.375.000,00					ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten		130.000.000,00	
		Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah tepat waktu				214.375.000,00					ASN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten		130.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	214.375.000,00						60 Laporan	130.000.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	29 Unit	301.140.014,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kelurahan Bareng 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		1 Unit	100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
233.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN				148.179.170,00							370.000.000,00	
		Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan				148.179.170,00							370.000.000,00	
			999.Persentase perpustakaan yang dibina	84.33 %	50.33 %	148.179.170,00						60.67 %	370.000.000,00	
			999.Tingkat pemanfaatan perpustakaan	0,30 %	0,12 %	148.179.170,00						0,15 %	370.000.000,00	
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				89.521.776,00					Siswa, guru dan masyarakat pengguna perpustakaan Kabupaten Klaten		40.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan monitoring perpustakaan desa dan sekolah				89.521.776,00					Siswa, guru dan masyarakat pengguna perpustakaan Kabupaten Klaten		40.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	74 Perpustakaan	56 Perpustakaan	89.521.776,00						62 Perpustakaan	40.000.000,00	
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan				89.521.776,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	74 Perpustakaan	40 Perpustakaan	89.521.776,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		62 Perpustakaan	40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				58.657.394,00					Siswa, guru dan masyarakat pengguna perpustakaan Kabupaten Klaten		330.000.000,00	
		Terpenuhinya cakupan lokus layanan gemar membaca				58.657.394,00					Siswa, guru dan masyarakat pengguna perpustakaan Kabupaten Klaten		330.000.000,00	
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	400 Lokus	400 Lokus	58.657.394,00						400 Lokus	330.000.000,00	
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				58.657.394,00							330.000.000,00	
		Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	400 Lokus	200 Lokus	58.657.394,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		400 Lokus	330.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
234.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO				30.450.000,00							21.750.000,00	
		Terpeliharanya koleksi nasional dan naskah kuno				30.450.000,00							21.750.000,00	
			999.Persentase Koleksi Nasional, Naskah Kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dilestarikan	100 %	10 %	30.450.000,00						30 %	21.750.000,00	
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota				6.000.000,00					Naskah kuno dan Koleksi Budaya Etnis Nusantara di Kabupaten Klaten		10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	200 Arsip	60 Arsip	19.215.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		150 Arsip	25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota				5.500.000,00					Masyarakat pemerhati arsip dan perpustakaan Kabupaten Klaten		40.500.000,00	
		Meningkatnya Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota				5.500.000,00					Masyarakat pemerhati arsip dan perpustakaan Kabupaten Klaten		40.500.000,00	
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	190 Pengguna	160 Pengguna	5.500.000,00						170 Pengguna	40.500.000,00	
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				5.500.000,00							40.500.000,00	
		Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	190 Pengguna	160 Pengguna	5.500.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		170 Pengguna	40.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
236.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP				29.400.000,00							85.114.000,00	
		Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK				29.400.000,00							85.114.000,00	
			999.Arsip usul musnah	120,00 Meter	84,00 Meter	29.400.000,00						96,00 Meter	85.114.000,00	
			999.Persentase arsip yang dialihmediakan	20,00 %	20,00 %	29.400.000,00						20,00 %	85.114.000,00	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				13.000.000,00					Arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun di Kabupaten Klaten Kab. Klaten		20.000.000,00	
		Terlaksananya arsip kategori musnah yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) Tahun dimusnahkan				13.000.000,00					Arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun di Kabupaten Klaten Kab. Klaten		20.000.000,00	
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	400 Arsip	400 Arsip	13.000.000,00						400 Arsip	20.000.000,00	
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				13.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	400 Arsip	300 Arsip	13.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		400 Arsip	20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota				5.500.000,00					Masyarakat di daerah rawan bencana Kabupaten Klaten		35.114.000,00	
		Terlaksananya perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana berskala Kabupaten/Kota				5.500.000,00					Masyarakat di daerah rawan bencana Kabupaten Klaten		35.114.000,00	
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	1000 Arsip	1000 Arsip	5.500.000,00						1000 Arsip	35.114.000,00	
	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana				5.500.000,00							35.114.000,00	
		Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	1000 Arsip	300 Arsip	5.500.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		1000 Arsip	35.114.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	275 Orang	650 Orang	1.265.400.000,00	Kab. Klaten	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Investasi		250 Orang	110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
241.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				424.400.000,00							305.000.000,00	
		Terciptanya hubungan kerja yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah				424.400.000,00							305.000.000,00	
			999.Persentase sengketa hubungan industrial yang terselesaikan	100,00 %	100,00 %	424.400.000,00						100,00 %	305.000.000,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000,00					Perusahaan		110.000.000,00	
		Terlaksananya perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)				5.000.000,00					Perusahaan		110.000.000,00	
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	230 Perusahaan	200 Perusahaan	5.000.000,00						210 Perusahaan	110.000.000,00	
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan				5.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	230 Perusahaan	30 Perusahaan	5.000.000,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Investasi		210 Perusahaan	110.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				419.400.000,00					Pekerja dan Pemberi Kerja		195.000.000,00	
		Terlaksananya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial,mogok kerja dan penutupan perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				419.400.000,00					Pekerja dan Pemberi Kerja		195.000.000,00	
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	4 Perkara	4 Perkara	49.200.000,00						4 Perkara	120.000.000,00	
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100000 Orang	70000 Orang	370.200.000,00						80000 Orang	75.000.000,00	
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				49.200.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	4 Perkara	4 Perkara	49.200.000,00	Kab. Klaten	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Investasi		4 Perkara	120.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				370.200.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	100000 Orang	70000 Orang	370.200.000,00	Kab. Klaten	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Investasi		80000 Orang	75.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				7.317.200.108,00							6.596.903.359,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	130.000.000,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Investasi		12 Laporan	150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				840.160.108,00					ASN Disperinaker		480.000.000,00	
		Terlaksananya pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu				840.160.108,00					ASN Disperinaker		480.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	840.160.108,00						12 Laporan	480.000.000,00	
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				840.160.108,00							480.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	840.160.108,00	Kab. Klaten	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Investasi		12 Laporan	480.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				240.830.000,00					ASN Disperinaker		50.000.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				240.830.000,00					ASN Disperinaker		50.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	30 Unit	240.830.000,00						30 Unit	50.000.000,00	
	3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				240.830.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	30 Unit	240.830.000,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Investasi		30 Unit	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
243.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				1.106.800.000,00							900.000.000,00	
		Meningkatnya realisasi pembangunan industri				1.106.800.000,00							900.000.000,00	
			999.Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina	27.00 %	21.00 %	1.106.800.000,00						23.00 %	900.000.000,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				1.106.800.000,00					Industri Kecil dan Menengah (IKM)		900.000.000,00	
		Terlaksananya IKM yang terkoordinasi				1.106.800.000,00					Industri Kecil dan Menengah (IKM)		900.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1.106.800.000,00						1 Dokumen	900.000.000,00	
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1.106.800.000,00							900.000.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1.106.800.000,00	Kab. Klaten	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Investasi		1 Dokumen	900.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Klaten	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Investasi		1 Dokumen	142.804.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				50.600.000,00							50.000.000,00	
246.	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				50.600.000,00							50.000.000,00	
		Meningkatnya jumlah dan kualitas pengiriman transmigran ke kawasan yang telah disiapkan				50.600.000,00							50.000.000,00	
			999.Persentase pengiriman transmigran ke lokasi transmigasi	100 %	100 %	50.600.000,00						100 %	50.000.000,00	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				50.600.000,00					Calon Transmigran		50.000.000,00	
		Terselenggaranya pemindahan dan penempatan transmigran				50.600.000,00					Calon Transmigran		50.000.000,00	
			Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	3 KK	3 KK	50.600.000,00						3 KK	50.000.000,00	
	3.32.03.2.01.0018	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi				50.600.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan Dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	3 KK	3 KK	50.600.000,00	Kab. Klaten	Dana Bagi Hasil (DBH) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		3 KK	50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
		BAGIAN PEMERINTAHAN				448.946.769,00							654.867.358,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				448.946.769,00							654.867.358,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH				448.946.769,00							654.867.358,00	
247.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				171.427.799,00							164.700.930,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	88,10 Indeks	171.427.799,00						-	164.700.930,00	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	-	74,70 Nilai	171.427.799,00						-	164.700.930,00	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				122.507.799,00					-		142.140.930,00	
		-				122.507.799,00					-		142.140.930,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	122.507.799,00						-	142.140.930,00	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				122.507.799,00							142.140.930,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 Laporan	122.507.799,00	Kab. Klaten	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	142.140.930,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				48.920.000,00					-		22.560.000,00	
		-				48.920.000,00					-		22.560.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	48.920.000,00						-	22.560.000,00	
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				48.920.000,00							22.560.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	29 Unit	48.920.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Desa Tegalyoso 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	22.560.000,00	BAGIAN PEMERINTAHAN
248.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				277.518.970,00							490.166.428,00	
			Nilai EPPD	-	3,40 Skor	277.518.970,00						-	490.166.428,00	
			Persentase Kecamatan mencapai kategori Prima	-	7,69 %	277.518.970,00						-	490.166.428,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	PRIORITAS		(12)	(13)	(14)	(15)
									NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	27 Unit	37.897.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Desa Tegalyoso 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah	-	-	54.457.000,00	BAGIAN HUKUM
250.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				407.257.000,00							680.732.730,00	
			Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi pemerintah daerah	-	100 %	407.257.000,00					-	-	680.732.730,00	
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				407.257.000,00					-	-	680.732.730,00	
		-				407.257.000,00					-	-	680.732.730,00	
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	-	-	201.192.000,00					-	-	260.732.730,00	
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	-	-	143.200.000,00					-	-	270.000.000,00	
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	-	-	62.865.000,00					-	-	150.000.000,00	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah				143.200.000,00							270.000.000,00	
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	-	500 Dokumen	143.200.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah	-	-	270.000.000,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum				201.192.000,00							260.732.730,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	-	8 Kasus	201.192.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah	-	-	260.732.730,00	BAGIAN HUKUM
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum danPengelolaan Informasi Hukum				62.865.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	-	500 Dokumen	62.865.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah	-	-	150.000.000,00	BAGIAN HUKUM
		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				5.435.712.549,00							5.765.396.843,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				5.435.712.549,00							5.765.396.843,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH				5.435.712.549,00							5.765.396.843,00	
251.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				96.348.000,00							110.000.000,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	88,10 Indeks	96.348.000,00					-	-	110.000.000,00	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	-	74,70 Nilai	30.018.000,00					-	-	70.000.000,00	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	-	74,70 nilai	66.330.000,00					-	-	40.000.000,00	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				30.018.000,00					-	-	70.000.000,00	
		-				30.018.000,00					-	-	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	30.018.000,00					-	-	70.000.000,00	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30.018.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 Laporan	30.018.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Desa Tegalyoso 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah	-	-	70.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				66.330.000,00					-	-	40.000.000,00	
		-				66.330.000,00					-	-	40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	66.330.000,00						-	40.000.000,00	
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				66.330.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	18 Unit	66.330.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Desa Tegalyoso 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	40.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
252.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				5.339.364.549,00							5.655.396.843,00	
			Tingkat capaian kinerja pelaksanaan kegiatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	-	100 %	5.339.364.549,00						-	5.655.396.843,00	
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				5.339.364.549,00						-	5.655.396.843,00	
		-				5.339.364.549,00						-	5.655.396.843,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-	-	4.408.864.049,00						-	4.850.396.843,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	-	-	17.710.750,00						-	56.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-	912.789.750,00						-	749.000.000,00	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				4.408.864.049,00							4.850.396.843,00	
		Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	-	12 Dokumen	4.408.864.049,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	4.850.396.843,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial				912.789.750,00							749.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	-	12 Dokumen	912.789.750,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	749.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat				17.710.750,00							56.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	-	12 Dokumen	17.710.750,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	56.000.000,00	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM				3.335.502.440,00							3.708.825.190,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				3.335.502.440,00							3.708.825.190,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH				3.335.502.440,00							3.708.825.190,00	
253.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				161.554.000,00							100.000.000,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	88,10 Indeks	99.754.000,00						-	80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	88,10 indeks	61.800.000,00						-	20.000.000,00	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (AKI) Perangkat Daerah	-	74,70 Nilai	99.754.000,00						-	80.000.000,00	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	-	74,70 nilai	61.800.000,00						-	20.000.000,00	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				99.754.000,00					-		80.000.000,00	
		-				99.754.000,00					-		80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	99.754.000,00						-	80.000.000,00	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				99.754.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 Dokumen Laporan	99.754.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	80.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				61.800.000,00					-		20.000.000,00	
		-				61.800.000,00					-		20.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	61.800.000,00						-	20.000.000,00	
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				61.800.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	13 Unit	61.800.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Desa Tegalyoso 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	20.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
254.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				3.173.948.440,00							3.608.825.190,00	
			Indeks Akses Keuangan Daerah	-	4.96 indeks	2.542.945.000,00						-	2.913.825.190,00	
			Indeks Akses Keuangan Daerah	-	4,96 indeks	631.003.440,00						-	695.000.000,00	
			Persentase BLUD yang berkinerja baik	-	100 %	2.542.945.000,00						-	2.913.825.190,00	
			Persentase BLUD Yang Berkinerja Baik	-	100 %	631.003.440,00						-	695.000.000,00	
			Persentase BUMD yang berkinerja baik	-	80 %	2.542.945.000,00						-	2.913.825.190,00	
			Persentase BUMD Yang Berkinerja Baik	-	80 %	631.003.440,00						-	695.000.000,00	
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				2.542.945.000,00					-		2.913.825.190,00	
		-				2.542.945.000,00					-		2.913.825.190,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-	-	335.755.000,00						-	500.467.790,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	-	-	2.207.190.000,00						-	2.413.357.400,00	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				335.755.000,00							500.467.790,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	-	3 Dokumen	335.755.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		-	500.467.790,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				2.207.190.000,00							2.413.357.400,00	
		Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	-	2 Dokumen	2.207.190.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		-	2.413.357.400,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam				631.003.440,00					-		695.000.000,00	
		-				631.003.440,00					-		695.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	-	-	118.516.000,00						-	160.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	-	-	512.487.440,00						-	535.000.000,00	
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan				512.487.440,00							535.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	-	3 Dokumen	512.487.440,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		-	535.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air				118.516.000,00							160.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	-	2 Dokumen	118.516.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		-	160.000.000,00	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN				494.248.610,00							626.379.862,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				494.248.610,00							626.379.862,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH				494.248.610,00							626.379.862,00	
255.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				148.926.000,00							122.167.409,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	88,10 indeks	148.926.000,00						-	122.167.409,00	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	-	74,70 nilai	148.926.000,00						-	122.167.409,00	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				43.906.000,00					-		100.987.409,00	
		-				43.906.000,00					-		100.987.409,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	43.906.000,00						-	100.987.409,00	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				43.906.000,00							100.987.409,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 Laporan	43.906.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Desa Tegalyoso 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	100.987.409,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				105.020.000,00					-		21.180.000,00	
		-				105.020.000,00					-		21.180.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	105.020.000,00						-	21.180.000,00	
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				105.020.000,00							21.180.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	34 Unit	105.020.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Desa Tegalyoso 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	21.180.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
256.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				345.322.610,00							504.212.453,00	
			Tingkat Capaian Persentase fisik pelaksanaan pembangunan	-	100 %	345.322.610,00						-	504.212.453,00	
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				345.322.610,00					-		504.212.453,00	
		-				345.322.610,00					-		504.212.453,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	-	-	94.865.800,00						-	10.652.053,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-	-	67.500.000,00						-	200.130.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-	-	182.956.810,00						-	293.430.400,00	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan				94.865.800,00							10.652.053,00	
		Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	-	5 Dokumen	94.865.800,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Desa Tegalyoso 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	10.652.053,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				182.956.810,00							293.430.400,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	-	1 Laporan	182.956.810,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Desa Tegalyoso 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	293.430.400,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				67.500.000,00							200.130.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	-	4 Laporan	67.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Desa Tegalyoso 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	200.130.000,00	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA				545.137.960,00							945.326.356,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				545.137.960,00							945.326.356,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH				545.137.960,00							945.326.356,00	
257.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				110.908.000,00							60.000.000,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	88,10 indeks	20.338.000,00						-	45.000.000,00	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	-	74,70 Nilai	20.338.000,00						-	45.000.000,00	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	-	74,70 Nilai	90.570.000,00						-	15.000.000,00	
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				20.338.000,00					-		45.000.000,00	
		-				20.338.000,00					-		45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	20.338.000,00						-	45.000.000,00	
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				20.338.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	1 Laporan	20.338.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Desa Tegalyoso 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	45.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				90.570.000,00					-		15.000.000,00	
		-				90.570.000,00					-		15.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	90.570.000,00						-	15.000.000,00	
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				90.570.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	25 Unit	90.570.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Desa Tegalyoso 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	15.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
258.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				434.229.960,00							885.326.356,00	
			Indeks Tata Kelola Pengadaan	-	71,46 %	434.229.960,00					-		885.326.356,00	
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				434.229.960,00					-		885.326.356,00	
		-				434.229.960,00					-		885.326.356,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	-	21.189.250,00					-		95.326.356,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	395.040.710,00					-		700.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	18.000.000,00					-		90.000.000,00	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				395.040.710,00							700.000.000,00	
		Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	-	12 Dokumen	395.040.710,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Desa Tegalyoso 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	700.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				21.189.250,00							95.326.356,00	
		Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	-	12 Dokumen	21.189.250,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Desa Tegalyoso 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	95.326.356,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				18.000.000,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	-	200 Orang	18.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Desa Tegalyoso 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	90.000.000,00	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
		BAGIAN UMUM				42.724.708.819,00							28.973.682.019,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				42.724.708.819,00							28.973.682.019,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH				42.724.708.819,00							28.973.682.019,00	
259.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				42.724.708.819,00							28.973.682.019,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	88,10 indeks	42.424.708.819,00						-	28.773.682.019,00	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	-	74,70 nilai	42.424.708.819,00						-	28.773.682.019,00	
			Persentase pelayanan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terlaksana dengan baik	-	100 %	42.424.708.819,00						-	28.773.682.019,00	
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.466.500,00					-		20.000.000,00	
		-				8.466.500,00					-		20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	8.466.500,00						-	20.000.000,00	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8.466.500,00							20.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	6 Dokumen	8.466.500,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Desa Tegalyoso 1	Pajak Daerah	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	20.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				20.909.534.000,00					-		19.830.183.557,00	
		-				20.909.534.000,00					-		19.830.183.557,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	20.909.534.000,00						-	19.830.183.557,00	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				20.909.534.000,00							19.830.183.557,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	71 Unit	1.484.025.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Desa Tegalyoso 1	Pajak Daerah	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah	-	-	120.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2.996.357.000,00					-		2.018.576.000,00	
		-				2.996.357.000,00					-		2.018.576.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	2.427.781.000,00						-	1.550.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	268.576.000,00						-	268.576.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-	-	200.000.000,00						-	100.000.000,00	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				268.576.000,00							268.576.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	2 Orang/Bulan	268.576.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Desa Tegalyoso 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah	-	-	268.576.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				200.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-	6 Paket	200.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Desa Tegalyoso 1	Pajak Daerah	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah	-	-	100.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	2 Orang	100.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Desa Tegalyoso 1	Pajak Daerah	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah	-	-	100.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2.427.781.000,00							1.550.000.000,00	
		Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	2 Orang/Bulan	2.427.781.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Desa Tegalyoso 1	Pajak Daerah	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah	-	-	1.550.000.000,00	BAGIAN UMUM
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				5.700.000.000,00					-		2.510.000.000,00	
		-				5.700.000.000,00					-		2.510.000.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	-	-	3.000.000.000,00						-	1.510.000.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	-	-	2.700.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				3.000.000.000,00							1.510.000.000,00	

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Fasilitas Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	12 Laporan	12 Laporan	342.425.000,00	Kab. Klaten	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Laporan	45.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				393.842.801,00							568.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12 Laporan	12 Laporan	393.842.801,00	Kab. Klaten	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Laporan	568.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				747.880.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	9 Paket	9 Paket	747.880.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		9 Paket	400.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				927.000.000,00					Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten		350.000.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				927.000.000,00					Sekretariat DPRD Kabupaten Klaten		350.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	927.000.000,00						-	350.000.000,00	
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				927.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	14 Unit	927.000.000,00	Kab. Klaten	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
263.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				28.288.667.000,00							16.615.809.000,00	
		Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan dan Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan				25.782.467.000,00							12.815.809.000,00	
			999.Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	100.00 %	100.00 %	25.782.467.000,00						100.00 %	12.815.809.000,00	
			999.Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	100.00 %	100.00 %	25.782.467.000,00						100.00 %	12.815.809.000,00	
			999.Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100.00 %	100.00 %	25.782.467.000,00						100.00 %	12.815.809.000,00	
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				3.716.900.000,00					DPRD Kabupaten Klaten		3.740.000.000,00	
		Disahkannya Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				3.716.900.000,00					DPRD Kabupaten Klaten		3.740.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	14 Dokumen	8 Dokumen	2.722.900.000,00						10 Dokumen	2.800.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	675.000.000,00						2 Dokumen	590.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	500 Orang	500 Orang	319.000.000,00						500 Orang	350.000.000,00	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan ProgramPembentukan Peraturan Daerah				675.000.000,00							590.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	675.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		2 Dokumen	590.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				2.722.900.000,00							2.800.000.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	14 Dokumen	8 Dokumen	2.722.900.000,00	Kab. Klaten	Lain-lain PAD Yang Sah	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		10 Dokumen	2.800.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah				319.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	500 Orang	50 Orang	319.000.000,00	Kab. Klaten	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		500 Orang	350.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran				1.624.057.000,00					DPRD Kabupaten Klaten		285.000.000,00	
		Dibahasnya Kebijakan Anggaran				1.624.057.000,00					DPRD Kabupaten Klaten		285.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1.624.057.000,00						1 Dokumen	285.000.000,00	
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD				1.624.057.000,00							285.000.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	2 Dokumen	1.624.057.000,00	Kab. Klaten	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		1 Dokumen	285.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				10.600.000.000,00					DPRD Kabupaten Klaten		4.050.000.000,00	
		Terawasinya OPD Penyelenggaraan Pemerintahan				10.600.000.000,00					DPRD Kabupaten Klaten		4.050.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	12 Laporan	3.208.200.000,00						12 Laporan	1.100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	12 Laporan	2.379.400.000,00						12 Laporan	950.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	12 Laporan	12 Laporan	2.506.200.000,00						12 Laporan	1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	12 Laporan	2.506.200.000,00						12 Laporan	1.000.000.000,00	
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				2.379.400.000,00							950.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	12 Laporan	12 Laporan	2.379.400.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Laporan	950.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				3.208.200.000,00							1.100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	12 Laporan	12 Laporan	3.208.200.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Laporan	1.100.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				2.506.200.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	12 Laporan	12 Laporan	2.506.200.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Laporan	1.000.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	540.630.000,00	Kab. Klaten	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Dokumen	407.737.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				1.119.950.000,00							1.250.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	12 Dokumen	12 Dokumen	1.119.950.000,00	Kab. Klaten	Lain-lain PAD Yang Sah	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Dokumen	1.250.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				2.300.000.000,00							1.150.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12 Dokumen	12 Dokumen	2.300.000.000,00	Kab. Klaten	Lain-lain PAD Yang Sah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Dokumen	1.150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH				8.569.500.279,00							8.154.575.551,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				8.569.500.279,00							8.154.575.551,00	
	5.01	PERENCANAAN				8.036.800.279,00							7.754.575.551,00	
264.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.895.300.279,00							5.664.575.551,00	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi				6.895.300.279,00							5.664.575.551,00	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.50 Indeks	89.75 Indeks	6.895.300.279,00						90.00 Indeks	5.664.575.551,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	84.10 Nilai	83.95 Nilai	6.895.300.279,00						84.00 Nilai	5.664.575.551,00	
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				63.000.000,00					ASN Bapperida Kabupaten Klaten		20.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				63.000.000,00					ASN Bapperida Kabupaten Klaten		20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	63.000.000,00						2 Dokumen	20.000.000,00	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				63.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2 Dokumen	63.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		2 Dokumen	20.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.992.928.000,00					ASN Bapperida Kabupaten Klaten		5.173.625.551,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.992.928.000,00					ASN Bapperida Kabupaten Klaten		5.173.625.551,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	5.992.928.000,00						31 Orang/bulan	5.173.625.551,00	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.992.928.000,00							5.173.625.551,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31 Orang/bulan	31 Orang/bulan	5.992.928.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		31 Orang/bulan	5.173.625.551,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				230.000.000,00					ASN Bapperida Kabupaten Klaten		325.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				230.000.000,00					ASN Bapperida Kabupaten Klaten		325.000.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen	1 Dokumen	40.900.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		1 Dokumen	110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				82.250.000,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	1 Berita Acara	82.250.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		1 Berita Acara	85.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				148.250.000,00							450.000.000,00	
		Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	2 Dokumen	148.250.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		2 Dokumen	450.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				104.300.000,00					Perangkat Daerah di Kabupaten Klaten		280.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah				104.300.000,00					Perangkat Daerah di Kabupaten Klaten		280.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	6 Dokumen	6 Dokumen	104.300.000,00						6 Dokumen	280.000.000,00	
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				104.300.000,00							280.000.000,00	
		Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	6 Dokumen	6 Dokumen	104.300.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Desa Tegalyoso 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		6 Dokumen	280.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				132.800.000,00					Perangkat Daerah di Kabupaten Klaten		115.000.000,00	
		Tersedianya Pelaporan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				132.800.000,00					Perangkat Daerah di Kabupaten Klaten		115.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	4 Laporan	132.800.000,00						4 Laporan	115.000.000,00	
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				132.800.000,00							115.000.000,00	
		Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan	7 Laporan	132.800.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Desa Tegalyoso 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4 Laporan	115.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
266.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				633.000.000,00							1.050.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan bidang pemerintahan pembangunan manusia, infrastruktur kewilayahan dan perekonomian dan SDA				476.850.000,00							1.050.000.000,00	
			999.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100,00 Persentase	100,00 Persentase	476.850.000,00						100,00 Persentase	1.050.000.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	2 Dokumen	106.150.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		2 Dokumen	225.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				50.000.000,00							125.000.000,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		2 Dokumen	125.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				156.150.000,00					OPD di bawah Koordinasi bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		300.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				156.150.000,00					OPD di bawah Koordinasi bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	2 Dokumen	106.150.000,00						2 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	100.000.000,00	
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				106.150.000,00							200.000.000,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	2 Dokumen	106.150.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Desa Tegalyoso 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		2 Dokumen	200.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		2 Dokumen	100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				532.700.000,00							400.000.000,00	
267.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				477.700.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya data, kajian, dan inovasi untuk mendukung pembangunan daerah berbasis ilmu pengetahuan				477.700.000,00							200.000.000,00	
			999.Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	88.00 Persentase	80.00 Persentase	477.700.000,00						85.00 Persentase	200.000.000,00	
			999.Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	90.00 Persentase	60.00 Persentase	477.700.000,00						70.00 Persentase	200.000.000,00	
			999.Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	70.00 Persentase	62.00 Persentase	477.700.000,00						64.00 Persentase	200.000.000,00	
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				257.700.000,00					Masyarakat Semua Kabupaten Klaten		150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00 Laporan	12 Laporan	130.924.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Desa Tegalyoso 1	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		12.00 Laporan	580.829.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.037.415.000,00					BPKPAD Kabupaten Klaten		159.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.037.415.000,00					BPKPAD Kabupaten Klaten		159.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	2.037.415.000,00						12.00 Laporan	159.000.000,00	
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.037.415.000,00							159.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00 Laporan	12 Laporan	2.037.415.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Desa Tegalyoso 1	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		12.00 Laporan	159.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				516.030.000,00					BPKPAD Kabupaten Klaten		75.000.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				516.030.000,00					BPKPAD Kabupaten Klaten		75.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	516.030.000,00						-	75.000.000,00	
	5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				516.030.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	119 Unit	516.030.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Desa Tegalyoso 1	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		-	75.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
270.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				638.514.821.825,00							614.647.532.040,00	
		<i>Meningkatnya tata kelola anggaran, Meningkatnya tata kelola perbendaharaan, dan Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan</i>				638.514.821.825,00							614.647.532.040,00	
			999.Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	638.514.821.825,00						100 %	614.647.532.040,00	
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				1.907.680.000,00					SKPD se Kabupaten Klaten		1.090.000.000,00	
		Tercapainya Alokasi Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD sesuai aturan				1.907.680.000,00					SKPD se Kabupaten Klaten		1.090.000.000,00	
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	410.000.000,00						2.00 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	1.462.680.000,00						2.00 Dokumen	800.000.000,00	
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	52.00 Dokumen	52.00 Dokumen	35.000.000,00						52.00 Dokumen	40.000.000,00	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				410.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2.00 Dokumen	2 Dokumen	410.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Desa Tegalyoso 1	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		2.00 Dokumen	250.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD				35.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	52.00 Dokumen	52 Dokumen	35.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Desa Tegalyoso 1	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		52.00 Dokumen	40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2.00 Dokumen	2 Dokumen	178.532.500,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Desa Tegalyoso 1	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		2.00 Dokumen	214.412.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				264.255.000,00							804.044.000,00	
		Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	3.00 Dokumen	3 Dokumen	264.255.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Desa Tegalyoso 1	Pendapatan Bagi Hasil	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		3.00 Dokumen	804.044.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				635.788.868.325,00					SKPD se Kabupaten Klaten		612.188.837.040,00	
		Terselurkannya belanja transfer ke desa (DD, ADD, Bankeusus) secara optimal.				635.788.868.325,00					SKPD se Kabupaten Klaten		612.188.837.040,00	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2.00 Laporan	2.00 Laporan	563.908.112.100,00						2.00 Laporan	549.018.455.084,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4.00 Laporan	4.00 Laporan	55.051.120.225,00						4.00 Laporan	58.170.381.956,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12.00 Laporan	12.00 Laporan	16.829.636.000,00						12.00 Laporan	5.000.000.000,00	
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				563.908.112.100,00							549.018.455.084,00	
		Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2.00 Laporan	2 Laporan	563.908.112.100,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Desa Tegalyoso 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pendapatan Bagi Hasil Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Desa	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		2.00 Laporan	549.018.455.084,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				16.829.636.000,00							5.000.000.000,00	
		Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12.00 Laporan	12 Laporan	16.829.636.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Desa Tegalyoso 1	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		12.00 Laporan	5.000.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				55.051.120.225,00							58.170.381.956,00	
		Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	4.00 Laporan	4 Laporan	55.051.120.225,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Desa Tegalyoso 1	Pajak Daerah Retribusi Daerah - LRA	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		4.00 Laporan	58.170.381.956,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah				119.811.000,00					SKPD se Kabupaten Klaten		160.808.000,00	
		Terkelolanya data dan implementasi sistem informasi keuangan daerah				119.811.000,00					SKPD se Kabupaten Klaten		160.808.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	102.00 Orang	102.00 Orang	119.811.000,00						102.00 Orang	160.808.000,00	
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				119.811.000,00							160.808.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	102.00 Orang	102 Orang	119.811.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Desa Tegalyoso 1	Pendapatan Bagi Hasil Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		102.00 Orang	160.808.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	7 Laporan	7 Laporan	152.022.400,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		7 Laporan	230.200.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				3.233.690.255,00							4.000.000.000,00	
275.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				3.233.690.255,00							4.000.000.000,00	
		Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme ASN				3.233.690.255,00							4.000.000.000,00	
			999.Persentase ASN yang meningkat Kompetensinya	100.00 %	100.00 %	3.233.690.255,00						100.00 %	4.000.000.000,00	
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				3.233.690.255,00					ASN Kabupaten Klaten		4.000.000.000,00	
		Meningkatnya kompetensi CASN, JPT, Jabatan administrasi dan Pejabat Fungsional				3.233.690.255,00					ASN Kabupaten Klaten		4.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3.00 Laporan	3.00 Laporan	3.233.690.255,00						3.00 Laporan	4.000.000.000,00	
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				3.233.690.255,00							4.000.000.000,00	
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3.00 Laporan	3 Laporan	3.233.690.255,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		3.00 Laporan	4.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT				15.808.268.573,00							14.110.462.113,00	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				15.808.268.573,00							14.110.462.113,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH				15.808.268.573,00							14.110.462.113,00	
276.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.710.104.373,00							10.930.725.313,00	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi				14.710.104.373,00							10.930.725.313,00	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.45 Indeks	86.42 Indeks	14.710.104.373,00						86.43 Indeks	10.930.725.313,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	83.40 Nilai	83.37 Nilai	14.710.104.373,00						83.38 Nilai	10.930.725.313,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				48.300.000,00					Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten		30.000.000,00	
		Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				48.300.000,00					Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	48.300.000,00						3 Dokumen	30.000.000,00	
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				48.300.000,00							30.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	48.300.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Desa Semangkak 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		3 Dokumen	30.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.390.343.000,00					Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten		9.018.725.313,00	
		Terlaksananya pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah				10.390.343.000,00					Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten		9.018.725.313,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	10.390.343.000,00						56 Orang/bulan	9.018.725.313,00	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.390.343.000,00							9.018.725.313,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan	62 Orang/bulan	10.390.343.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Desa Semangkak 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		56 Orang/bulan	9.018.725.313,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				294.813.050,00					Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten		22.000.000,00	
		Terlaksananya pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah				294.813.050,00					Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten		22.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	294.813.050,00						4 Dokumen	22.000.000,00	
	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				294.813.050,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	4 Dokumen	294.813.050,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Desa Semangkak 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4 Dokumen	22.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.849.016.733,00					Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten		410.000.000,00	
		Terlaksananya pemenuhan administrasi umum perangkat daerah				2.849.016.733,00					Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten		410.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	2.849.016.733,00						12 Laporan	410.000.000,00	
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2.849.016.733,00							410.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	2.849.016.733,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Laporan	410.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				339.552.690,00					Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten		400.000.000,00	
		Terperuhinya kebutuhan barang milik daerah				339.552.690,00					Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten		400.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	339.552.690,00						20 Unit	400.000.000,00	
	6.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				339.552.690,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	339.552.690,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		20 Unit	400.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				473.748.900,00					Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten		500.000.000,00	
		Terlaksananya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				473.748.900,00					Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten		500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	473.748.900,00						12 Laporan	500.000.000,00	
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				473.748.900,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	473.748.900,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Laporan	500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				314.330.000,00					Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten		550.000.000,00	
		Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				314.330.000,00					Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten		550.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	34 Unit	314.330.000,00						34 Unit	550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				314.330.000,00							550.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	34 Unit	34 Unit	314.330.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		34 Unit	550.000.000,00	INSPEKTORAT
277.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				732.579.500,00							1.799.736.800,00	
		Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan				732.579.500,00							1.319.736.800,00	
			999.Persentase pelaksanaan pengawasan Irban Bidang Keuangan Daerah	100 %	100 %	732.579.500,00						100 %	1.319.736.800,00	
			999.Persentase pelaksanaan pengawasan Irban Bidang Khusus	100 %	100 %	732.579.500,00						100 %	1.319.736.800,00	
			999.Persentase pelaksanaan pengawasan Irban Bidang Kinerja Perangkat Daerah dan BUMD/BUM Desa	100 %	100 %	732.579.500,00						100 %	1.319.736.800,00	
			999.Persentase pelaksanaan pengawasan Irban Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100 %	100 %	732.579.500,00						100 %	1.319.736.800,00	
			999.Persentase pelaksanaan pengawasan Irban Bidang Reformasi Birokrasi	100 %	100 %	732.579.500,00						100 %	1.319.736.800,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				654.284.500,00					Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa, Sekolah, Puskesmas, dan unit kerja yang menjadi obyek pemeriksaan Inspektorat Daerah		1.499.736.800,00	
		Terselenggaranya pengawasan internal				654.284.500,00					Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa, Sekolah, Puskesmas, dan unit kerja yang menjadi obyek pemeriksaan Inspektorat Daerah		1.499.736.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	114 Dokumen	114 Dokumen	59.555.000,00						114 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	27 Laporan	27 Laporan	285.537.000,00						27 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	2 Laporan	94.275.000,00						2 Laporan	230.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	62 Laporan	62 Laporan	84.420.000,00						62 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	114 Laporan	114 Laporan	85.257.500,00						114 Laporan	324.112.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	2 Laporan	45.240.000,00						2 Laporan	295.624.500,00	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				84.420.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	62 Laporan	62 Laporan	84.420.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		62 Laporan	250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				94.275.000,00							230.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	2 Laporan	94.275.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		2 Laporan	230.000.000,00	INSPEKTORAT

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	PRIORITAS		(12)	(13)	(14)	(15)
									NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	12 Kegiatan	12 Kegiatan	139.090.500,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Kegiatan	420.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				82.163.200,00							310.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	4 perangkat daerah	4 perangkat daerah	82.163.200,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4 perangkat daerah	310.000.000,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN PRAMBANAN				3.437.058.099,00							2.765.797.963,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.437.058.099,00							2.765.797.963,00	
	7.01	KECAMATAN				3.437.058.099,00							2.765.797.963,00	
279.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.031.159.144,00							2.545.884.963,00	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi				3.031.159.144,00							2.545.884.963,00	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87.00 Indeks	86.30 Indeks	3.031.159.144,00						86.35 Indeks	2.545.884.963,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	65.68 Nilai	65.40 Nilai	3.031.159.144,00						65.60 Nilai	2.545.884.963,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.000.000,00					Kecamatan Prambanan		8.000.000,00	
		Terpenuhinya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Kecamatan				9.000.000,00					Kecamatan Prambanan		8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	9.000.000,00						4 Dokumen	8.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9.000.000,00							8.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	9.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Prambanan Desa Tlogo 1	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4 Dokumen	8.000.000,00	KECAMATAN PRAMBANAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.734.766.000,00					Kecamatan Prambanan		2.374.884.963,00	
		Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan				2.734.766.000,00					Kecamatan Prambanan		2.374.884.963,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19.00 Orang/bulan	19.00 Orang/bulan	2.734.766.000,00						19.00 Orang/bulan	2.374.884.963,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.734.766.000,00							2.374.884.963,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19.00 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.734.766.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Prambanan Desa Tlogo 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		19.00 Orang/bulan	2.374.884.963,00	KECAMATAN PRAMBANAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				12.406.000,00					Kecamatan Prambanan		40.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum				12.406.000,00					Kecamatan Prambanan		40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00 Laporan	12.00 Laporan	12.406.000,00						12.00 Laporan	40.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.406.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00 Laporan	12 Laporan	12.406.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Prambanan Desa Tlogo 1	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12.00 Laporan	40.000.000,00	KECAMATAN PRAMBANAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				190.687.144,00					Kecamatan Prambanan		105.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Umum Kantor				190.687.144,00					Kecamatan Prambanan		105.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	190.687.144,00						12.00 Laporan	105.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				190.687.144,00							105.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00 Laporan	12 Laporan	190.687.144,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Prambanan Desa Tlogo 1	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12.00 Laporan	105.000.000,00	KECAMATAN PRAMBANAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				84.300.000,00					Kecamatan Prambanan		18.000.000,00	
		Terpelihanya Barang Milik Daerah di Kecamatan Prambanan				84.300.000,00					Kecamatan Prambanan		18.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8.00 Unit	7.00 Unit	84.300.000,00						7.00 Unit	18.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				84.300.000,00							18.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8.00 Unit	7 Unit	84.300.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Prambanan Desa Tlogo 1	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		7.00 Unit	18.000.000,00	KECAMATAN PRAMBANAN
280.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				11.418.000,00							25.632.000,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik				11.418.000,00							25.632.000,00	
			999.Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	100,00 %	100,00 %	11.418.000,00						100,00 %	25.632.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				11.418.000,00					Kencana / Masyarakat		25.632.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Publik yang dilimpahkan di Kecamatan				11.418.000,00					Kencana / Masyarakat		25.632.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	11.418.000,00						2 Laporan	25.632.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				11.418.000,00							25.632.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	11.418.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Prambanan Desa Tlogo 1	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		2 Laporan	25.632.000,00	KECAMATAN PRAMBANAN
281.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				155.104.855,00							49.281.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				155.104.855,00							49.281.000,00	
			999.Persentase lembaga masyarakat aktif	100,00 %	100,00 %	155.104.855,00						100,00 %	49.281.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				155.104.855,00					Lembaga Masyarakat		49.281.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa				155.104.855,00					Lembaga Masyarakat		49.281.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	155.104.855,00						12 Laporan	49.281.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				155.104.855,00							49.281.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	4 Laporan	155.104.855,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Prambanan Desa Tlogo 1	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Laporan	49.281.000,00	KECAMATAN PRAMBANAN
282.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				105.676.100,00							91.000.000,00	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum				105.676.100,00							91.000.000,00	
			999.Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	97.00 %	97.00 %	105.676.100,00						97.00 %	91.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	1.900.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN GANTIWARNO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.938.694.000,00					ASN, Pemerintah Desa dan Masyarakat		1.682.368.307,00	
		Terlaksananya pemenuhan administrasi keuangan				1.938.694.000,00					ASN, Pemerintah Desa dan Masyarakat		1.682.368.307,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1.938.694.000,00						11 Orang/bulan	1.682.368.307,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.938.694.000,00							1.682.368.307,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	11 Orang/bulan	11 Orang/bulan	1.938.694.000,00	Kab. Klaten	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		11 Orang/bulan	1.682.368.307,00	KECAMATAN GANTIWARNO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				29.568.000,00					ASN, Pemerintah Desa dan Masyarakat		30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum				29.568.000,00					ASN, Pemerintah Desa dan Masyarakat		30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	29.568.000,00						12 Laporan	30.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				29.568.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	29.568.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Laporan	30.000.000,00	KECAMATAN GANTIWARNO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				188.070.551,00					ASN, Pemerintah Desa dan Masyarakat		160.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah di Kecamatan				188.070.551,00					ASN, Pemerintah Desa dan Masyarakat		160.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	188.070.551,00						12 Laporan	160.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				188.070.551,00							160.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	188.070.551,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Laporan	160.000.000,00	KECAMATAN GANTIWARNO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				73.500.000,00					ASN, Pemerintah Desa dan Masyarakat		5.050.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah				73.500.000,00					ASN, Pemerintah Desa dan Masyarakat		5.050.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	73.500.000,00						6 Unit	5.050.000,00	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				73.500.000,00							5.050.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	23 Unit	73.500.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		6 Unit	5.050.000,00	KECAMATAN GANTIWARNO
285.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				42.550.000,00							27.889.000,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik				42.550.000,00							27.889.000,00	
			999.Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	100,00 %	100,00 %	42.550.000,00						100,00 %	27.889.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				42.550.000,00					ASN, Pemerintah Desa dan Masyarakat		27.889.000,00	
		Terfasilitasinya kegiatan Pelayanan Publik (PATEN) di Kecamatan				42.550.000,00					ASN, Pemerintah Desa dan Masyarakat		27.889.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	42.550.000,00						2 Laporan	27.889.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				42.550.000,00							27.889.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	42.550.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	-	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		2 Laporan	27.889.000,00	KECAMATAN GANTIWARNO
286.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				99.182.000,00							113.613.000,00	
		<i>Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</i>				99.182.000,00							113.613.000,00	
			999.Persentase lembaga masyarakat aktif	100,00 %	100,00 %	99.182.000,00						100,00 %	113.613.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				99.182.000,00					ASN, Pemerintah Desa dan Masyarakat		113.613.000,00	
		Terkoordinasinya Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan				99.182.000,00					ASN, Pemerintah Desa dan Masyarakat		113.613.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	99.182.000,00						4 Laporan	113.613.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				99.182.000,00							113.613.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	99.182.000,00	Kab. Klaten	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4 Laporan	113.613.000,00	KECAMATAN GANTIWARNO
287.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				136.378.000,00							87.000.000,00	
		<i>Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum</i>				136.378.000,00							87.000.000,00	
			999.Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	100,00 %	100,00 %	136.378.000,00						100,00 %	87.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				136.378.000,00					ASN, Polisi, TNI, Masyarakat		87.000.000,00	
		Terkoordinasinya ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan di kecamatan				136.378.000,00					ASN, Polisi, TNI, Masyarakat		87.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	136.378.000,00						4 Laporan	87.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				136.378.000,00							87.000.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	12 Laporan	136.378.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4 Laporan	87.000.000,00	KECAMATAN GANTIWARNO
288.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				19.920.000,00							38.082.000,00	
		<i>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</i>				19.920.000,00							38.082.000,00	
			999.Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	97.00 %	97.00 %	19.920.000,00						97.00 %	38.082.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				19.920.000,00					ASN, Polisi, TNI, Masyarakat		38.082.000,00	
		terfasilitasinya koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan				19.920.000,00					ASN, Polisi, TNI, Masyarakat		38.082.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	650 Orang	650 Orang	19.920.000,00						650 Orang	38.082.000,00	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				19.920.000,00							38.082.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	650 Orang	20 Orang	19.920.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		650 Orang	38.082.000,00	KECAMATAN GANTIWARNO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
289.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				99.407.500,00							44.000.000,00	
		<i>Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa</i>				99.407.500,00							44.000.000,00	
			999.Persentase desa dengan tertib administrasi	78.00 %	78.00 %	99.407.500,00						78.00 %	44.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				99.407.500,00					ASN, Pemerintah Desa dan Masyarakat		44.000.000,00	
		Terkoordinasinya Pemerintah Desa yang Dilakukan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan				99.407.500,00					ASN, Pemerintah Desa dan Masyarakat		44.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00						1 Dokumen	9.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	96.407.500,00						1 Dokumen	35.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				96.407.500,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	2 Dokumen	96.407.500,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		1 Dokumen	35.000.000,00	KECAMATAN GANTIWARNO
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				3.000.000,00							9.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		1 Dokumen	9.000.000,00	KECAMATAN GANTIWARNO
		KECAMATAN WEDI				3.113.732.790,00							2.721.930.829,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN				3.113.732.790,00							2.721.930.829,00	
7.01		KECAMATAN				3.113.732.790,00							2.721.930.829,00	
290.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.711.732.790,00							2.454.430.829,00	
		<i>Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi</i>				2.711.732.790,00							2.454.430.829,00	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87.00 Indeks	85.50 Indeks	2.711.732.790,00						86.00 Indeks	2.454.430.829,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	63.75 Nilai	63.25 Nilai	2.711.732.790,00						63.50 Nilai	2.454.430.829,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.000.000,00					ASN Kecamatan Wedi		4.000.000,00	
		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja				4.000.000,00					ASN Kecamatan Wedi		4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4.000.000,00						4 Dokumen	4.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	6 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4 Dokumen	4.000.000,00	KECAMATAN WEDI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.459.509.000,00					ASN Kecamatan Wedi		2.295.430.829,00	
		Terlaksananya pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah				2.459.509.000,00					ASN Kecamatan Wedi		2.295.430.829,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	2.459.509.000,00						17 Orang/bulan	2.295.430.829,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.459.509.000,00							2.295.430.829,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.459.509.000,00	Kab. Klaten	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		17 Orang/bulan	2.295.430.829,00	KECAMATAN WEDI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				16.000.000,00					ASN Kecamatan Wedi, Masyarakat Penerima Layanan		20.000.000,00	
		Terlaksananya pemenuhan pelayanan administrasi umum				16.000.000,00					ASN Kecamatan Wedi, Masyarakat Penerima Layanan		20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	172.829.005,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Laporan	113.000.000,00	KECAMATAN BAYAT
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				120.134.000,00					ASN Kecamatan Bayat		10.500.000,00	
		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				120.134.000,00					ASN Kecamatan Bayat		10.500.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	25 Unit	120.134.000,00						25 Unit	10.500.000,00	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				120.134.000,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	25 Unit	120.134.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		25 Unit	10.500.000,00	KECAMATAN BAYAT
297.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				34.483.480,00							24.722.000,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik				34.483.480,00							24.722.000,00	
			999.Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	100,00 %	100,00 %	34.483.480,00						100,00 %	24.722.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				34.483.480,00					Masyarakat Wilayah Kecamatan Bayat		24.722.000,00	
		Terlaksananya kegiatan pelayanan publik yang dilimpahkan di kecamatan				34.483.480,00					Masyarakat Wilayah Kecamatan Bayat		24.722.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	34.483.480,00						2 Laporan	24.722.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				34.483.480,00							24.722.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	34.483.480,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		2 Laporan	24.722.000,00	KECAMATAN BAYAT
298.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				167.003.950,00							100.777.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				167.003.950,00							100.777.000,00	
			999.Persentase lembaga masyarakat aktif	100,00 %	100,00 %	167.003.950,00						100,00 %	100.777.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				167.003.950,00					18 Desa Wilayah Kecamatan Bayat		100.777.000,00	
		Terciptanya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa				167.003.950,00					18 Desa Wilayah Kecamatan Bayat		100.777.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 Laporan	18 Laporan	167.003.950,00						18 Laporan	100.777.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				167.003.950,00							100.777.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 Laporan	18 Laporan	167.003.950,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		18 Laporan	100.777.000,00	KECAMATAN BAYAT
299.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				134.668.250,00							112.000.000,00	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum				134.668.250,00							112.000.000,00	
			999.Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	100,00 %	100,00 %	134.668.250,00						100,00 %	112.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				134.668.250,00					18 Desa Wilayah Kecamatan Bayat		112.000.000,00	
		Terciptanya koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum				134.668.250,00					18 Desa Wilayah Kecamatan Bayat		112.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	134.668.250,00						12 Laporan	112.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa				258.316.700,00							36.000.000,00	
			999.Persentase desa dengan tertib administrasi	100,00 %	85.00 %	258.316.700,00						90.00 %	36.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				258.316.700,00					Desa Se-Kecamatan Cawas		36.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				258.316.700,00					Desa Se-Kecamatan Cawas		36.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	6.818.750,00						2 Dokumen	16.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	251.497.950,00						2 Dokumen	20.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				251.497.950,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	251.497.950,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		2 Dokumen	20.000.000,00	KECAMATAN CAWAS
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				6.818.750,00							16.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2 Dokumen	2 Dokumen	6.818.750,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		2 Dokumen	16.000.000,00	KECAMATAN CAWAS
		KECAMATAN TRUCUK				2.692.667.180,00							2.155.300.880,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.692.667.180,00							2.155.300.880,00	
	7.01	KECAMATAN				2.692.667.180,00							2.155.300.880,00	
308.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.296.845.180,00							1.800.243.880,00	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi				2.296.845.180,00							1.800.243.880,00	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85.40 Indeks	84.50 Indeks	2.296.845.180,00						84.80 Indeks	1.800.243.880,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	70.00 Nilai	69.53 Nilai	2.296.845.180,00						69.56 Nilai	1.800.243.880,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000,00					Seluruh ASN dan Masyarakat di Kecamatan Trucuk.		1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00					Seluruh ASN dan Masyarakat di Kecamatan Trucuk.	4 Dokumen	1.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4 Dokumen	1.000.000,00	KECAMATAN TRUCUK
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.945.246.000,00							1.615.534.401,00	
		Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Keuangan				1.945.246.000,00					Seluruh ASN dan Masyarakat di Kecamatan Trucuk.		1.615.534.401,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	1.945.246.000,00						10 Orang/bulan	1.615.534.401,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.945.246.000,00							1.615.534.401,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10 Orang/bulan	10 Orang/bulan	1.945.246.000,00	Kab. Klaten	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		10 Orang/bulan	1.615.534.401,00	KECAMATAN TRUCUK
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				35.782.000,00							40.000.000,00	
											Seluruh ASN dan Masyarakat di Kecamatan Trucuk.			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum				35.782.000,00					Seluruh ASN dan Masyarakat di Kecamatan Trucuk.		40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	35.782.000,00						12 Laporan	40.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35.782.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	35.782.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Laporan	40.000.000,00	KECAMATAN TRUCUK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				245.337.180,00					Seluruh ASN dan Masyarakat di Kecamatan Trucuk.		135.000.000,00	
		Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang Tersedia				245.337.180,00					Seluruh ASN dan Masyarakat di Kecamatan Trucuk.		135.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	245.337.180,00						12 Laporan	135.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				245.337.180,00							135.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	245.337.180,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Laporan	135.000.000,00	KECAMATAN TRUCUK
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				68.480.000,00					Seluruh ASN dan Masyarakat di Kecamatan Trucuk.		8.709.479,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				68.480.000,00					Seluruh ASN dan Masyarakat di Kecamatan Trucuk.		8.709.479,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	68.480.000,00						1 Unit	8.709.479,00	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				68.480.000,00							8.709.479,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	68.480.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		1 Unit	8.709.479,00	KECAMATAN TRUCUK
309.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				25.280.000,00							18.925.000,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik				25.280.000,00							18.925.000,00	
			999.Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	100,00 %	100,00 %	25.280.000,00						100,00 %	18.925.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				25.280.000,00					Seluruh ASN dan Masyarakat di Kecamatan Trucuk.		18.925.000,00	
		Terlaksananya kegiatan pelayanan publik yang dilimpahkan di kecamatan				25.280.000,00					Seluruh ASN dan Masyarakat di Kecamatan Trucuk.		18.925.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	25.280.000,00						2 Laporan	18.925.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				25.280.000,00							18.925.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	25.280.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		2 Laporan	18.925.000,00	KECAMATAN TRUCUK
310.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				148.650.000,00							211.274.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				148.650.000,00							211.274.000,00	
			999.Persentase lembaga masyarakat aktif	95.00 %	95.00 %	148.650.000,00						95.00 %	211.274.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				148.650.000,00					Seluruh ASN dan Masyarakat di Kecamatan Trucuk.		211.274.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				148.650.000,00					Seluruh ASN dan Masyarakat di Kecamatan Trucuk.		211.274.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	148.650.000,00						4 Laporan	211.274.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				148.650.000,00							211.274.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	148.650.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4 Laporan	211.274.000,00	KECAMATAN TRUCUK
311.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				104.800.000,00							98.000.000,00	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum				104.800.000,00							98.000.000,00	
			999.Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	97.00 %	97.00 %	104.800.000,00						97.00 %	98.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				104.800.000,00					Seluruh ASN dan Masyarakat di Kecamatan Trucuk.		98.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				104.800.000,00					Seluruh ASN dan Masyarakat di Kecamatan Trucuk.		98.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	104.800.000,00						4 Laporan	98.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				104.800.000,00							98.000.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	104.800.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4 Laporan	98.000.000,00	KECAMATAN TRUCUK
312.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				3.580.000,00							5.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				3.580.000,00							5.000.000,00	
			999.Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	97.00 %	97.00 %	3.580.000,00						97.00 %	5.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				3.580.000,00					Seluruh ASN dan Masyarakat di Kecamatan Trucuk.		5.000.000,00	
		Terfasilitasinya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				3.580.000,00					Seluruh ASN dan Masyarakat di Kecamatan Trucuk.		5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 Orang	20 Orang	3.580.000,00						20 Orang	5.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				3.580.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	20 Orang	20 Orang	3.580.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		20 Orang	5.000.000,00	KECAMATAN TRUCUK
313.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				113.512.000,00							21.858.000,00	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa				113.512.000,00							21.858.000,00	
			999.Persentase desa dengan tertib administrasi	98.00 %	98.00 %	113.512.000,00						98.00 %	21.858.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				113.512.000,00					Seluruh ASN dan Masyarakat di Kecamatan Trucuk.		21.858.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				113.512.000,00					Seluruh ASN dan Masyarakat di Kecamatan Trucuk.		21.858.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	3.760.000,00						1 Dokumen	11.858.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	109.752.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				109.752.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	109.752.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		1 Dokumen	10.000.000,00	KECAMATAN TRUCUK
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				3.760.000,00							11.858.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	3.760.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		1 Dokumen	11.858.000,00	KECAMATAN TRUCUK
		KECAMATAN KEBONARUM				2.687.495.250,00							2.402.106.381,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.687.495.250,00							2.402.106.381,00	
	7.01	KECAMATAN				2.687.495.250,00							2.402.106.381,00	
314.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.470.433.250,00							2.109.899.131,00	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi				2.470.433.250,00							2.109.899.131,00	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.40 Indeks	85.70 Indeks	2.470.433.250,00						85.90 Indeks	2.109.899.131,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	70.90 Nilai	70.00 Nilai	2.470.433.250,00						70.30 Nilai	2.109.899.131,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.253.750,00					Pegawai Kecamatan Kebonarum		1.000.000,00	
		Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang tersusun				1.253.750,00					Pegawai Kecamatan Kebonarum		1.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	1.253.750,00						4 Dokumen	1.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.253.750,00							1.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	1.253.750,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Kebonarum Desa Pluneng 1	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4 Dokumen	1.000.000,00	KECAMATAN KEBONARUM
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.273.198.000,00					Pegawai Kecamatan Kebonarum		1.990.899.131,00	
		Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi				2.273.198.000,00					Pegawai Kecamatan Kebonarum		1.990.899.131,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.273.198.000,00						15 Orang/bulan	1.990.899.131,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.273.198.000,00							1.990.899.131,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.273.198.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Kebonarum Desa Pluneng 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		15 Orang/bulan	1.990.899.131,00	KECAMATAN KEBONARUM
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				22.220.000,00					Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kebonarum		9.000.000,00	
		Pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi				22.220.000,00					Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kebonarum		9.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	22.220.000,00						12 Laporan	9.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22.220.000,00							9.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	22.220.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Kebonarum Desa Pluneng 1	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Laporan	9.000.000,00	KECAMATAN KEBONARUM
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				141.531.500,00					Pegawai Kecamatan Kebonarum		104.000.000,00	
		Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia				141.531.500,00					Pegawai Kecamatan Kebonarum		104.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	141.531.500,00						12 Laporan	104.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				141.531.500,00							104.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	141.531.500,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Kebonarum Desa Pluneng 1	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Laporan	104.000.000,00	KECAMATAN KEBONARUM
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				32.230.000,00					Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kebonarum		5.000.000,00	
		Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara				32.230.000,00					Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kebonarum		5.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	32.230.000,00						4 Unit	5.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				32.230.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	1 Unit	32.230.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Kebonarum Desa Pluneng 1	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4 Unit	5.000.000,00	KECAMATAN KEBONARUM
315.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				6.995.250,00							15.710.000,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik				6.995.250,00							15.710.000,00	
			999.Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	100,00 %	100,00 %	6.995.250,00						100,00 %	15.710.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				6.995.250,00					Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kebonarum		15.710.000,00	
		Kegiatan Pelayanan Publik Pelimpahan yang Dilaksanakan				6.995.250,00					Pegawai dan Masyarakat Kecamatan Kebonarum		15.710.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	6.995.250,00						2 Laporan	15.710.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				6.995.250,00							15.710.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	6.995.250,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Kebonarum Desa Pluneng 1	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		2 Laporan	15.710.000,00	KECAMATAN KEBONARUM
316.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				77.888.750,00							69.646.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				77.888.750,00							69.646.000,00	
			999.Persentase lembaga masyarakat aktif	100,00 %	100,00 %	77.888.750,00						100,00 %	69.646.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	585 Orang	90 Orang	4.660.750,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Kebonarum Desa Pluneng 1	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		585 Orang	109.951.250,00	KECAMATAN KEBONARUM
319.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				31.146.500,00							10.500.000,00	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa				31.146.500,00							10.500.000,00	
			999.Persentase desa dengan tertib administrasi	100,00 %	100,00 %	31.146.500,00						100,00 %	10.500.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				31.146.500,00					pegawai Kecamatan Kebonarum, Pemerintah Desa dan Masyarakat		10.500.000,00	
		Desa yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengawasan				31.146.500,00					pegawai Kecamatan Kebonarum, Pemerintah Desa dan Masyarakat		10.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	4.590.750,00						1 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	26.555.750,00						1 Dokumen	7.500.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				26.555.750,00							7.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	26.555.750,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Kebonarum Desa Pluneng 1	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		1 Dokumen	7.500.000,00	KECAMATAN KEBONARUM
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				4.590.750,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	4.590.750,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Kebonarum Desa Pluneng 1	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		1 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN KEBONARUM
		KECAMATAN JOGONALAN				2.506.187.527,00							2.247.161.880,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.506.187.527,00							2.247.161.880,00	
	7.01	KECAMATAN				2.506.187.527,00							2.247.161.880,00	
320.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.179.671.427,00							1.913.348.880,00	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi				2.179.671.427,00							1.908.348.880,00	
			1.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	90.07 Nilai	89.89 Nilai	2.179.671.427,00						90.00 Nilai	1.908.348.880,00	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	71.00 Indeks	68.00 Indeks	2.179.671.427,00						69.00 Indeks	1.908.348.880,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.431.535,00					ASN Kecamatan Jogonalan		5.000.000,00	
		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja				2.431.535,00					ASN Kecamatan Jogonalan		5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	2.431.535,00						4 Dokumen	5.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.431.535,00							5.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	2.431.535,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN JOGONALAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.891.458.000,00					ASN Kecamatan Jogonalan		1.813.348.880,00	
		Terlaksananya laporan administrasi keuangan PD yang terpenuhi				1.891.458.000,00					ASN Kecamatan Jogonalan		1.813.348.880,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				110.339.875,00							75.763.000,00	
			999.Persentase lembaga masyarakat aktif	100,00 %	100,00 %	110.339.875,00						100,00 %	75.763.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				110.339.875,00					18 Desa wilayah Kecamatan Jogonalan		75.763.000,00	
		Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat				110.339.875,00					18 Desa wilayah Kecamatan Jogonalan		75.763.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	110.339.875,00						4 Laporan	75.763.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				110.339.875,00							75.763.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	110.339.875,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4 Laporan	75.763.000,00	KECAMATAN JOGONALAN
323.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				92.025.000,00							86.605.000,00	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum				92.025.000,00							86.605.000,00	
			999.Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	96.00 %	96.00 %	92.025.000,00						96.00 %	86.605.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban Umum				92.025.000,00					18 Desa wilayah Kecamatan Jogonalan		86.605.000,00	
		Terselenggaranya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum				92.025.000,00					18 Desa wilayah Kecamatan Jogonalan		86.605.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	92.025.000,00						4 Laporan	86.605.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				92.025.000,00							86.605.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	92.025.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4 Laporan	86.605.000,00	KECAMATAN JOGONALAN
324.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				4.000.000,00							113.582.000,00	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				4.000.000,00							113.582.000,00	
			999.Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	96.00 %	96.00 %	4.000.000,00						96.00 %	113.582.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				4.000.000,00					18 Desan wilayah Kecamatan Jogonalan		113.582.000,00	
		Terkoordinasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang diselenggarakan				4.000.000,00					18 Desan wilayah Kecamatan Jogonalan		113.582.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	650 Orang	650 Orang	4.000.000,00						650 Orang	113.582.000,00	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				4.000.000,00							113.582.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	650 Orang	650 Orang	4.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		650 Orang	113.582.000,00	KECAMATAN JOGONALAN
325.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				83.525.000,00							28.924.000,00	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa				83.525.000,00							28.924.000,00	
			999.Persentase desa dengan tertib administrasi	75.00 %	75.00 %	83.525.000,00						75.00 %	28.924.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				83.525.000,00					18 Desa wilayah Kecamatan Jogonalan		28.924.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00 Laporan	12 Laporan	8.160.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12.00 Laporan	5.000.000,00	KECAMATAN MANISRENGGO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				147.461.489,00					Masyarakat Kecamatan Manisrenggo		94.200.000,00	
		tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah				147.461.489,00					Masyarakat Kecamatan Manisrenggo		94.200.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	147.461.489,00						12.00 Laporan	94.200.000,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				147.461.489,00							94.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00 Laporan	12 Laporan	147.461.489,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12.00 Laporan	94.200.000,00	KECAMATAN MANISRENGGO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				54.117.944,00					Masyarakat Kecamatan Manisrenggo		6.000.000,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				54.117.944,00					Masyarakat Kecamatan Manisrenggo		6.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6.00 Unit	6.00 Unit	54.117.944,00						6.00 Unit	6.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				54.117.944,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6.00 Unit	5 Unit	54.117.944,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		6.00 Unit	6.000.000,00	KECAMATAN MANISRENGGO
327.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				11.628.600,00							25.632.000,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik				11.628.600,00							25.632.000,00	
			999.Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	100,00 %	100,00 %	11.628.600,00						100,00 %	25.632.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				11.628.600,00					Masyarakat Kecamatan Manisrenggo		25.632.000,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Paten di Kecamatan Manisrenggo				11.628.600,00					Masyarakat Kecamatan Manisrenggo		25.632.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	11.628.600,00						3 Laporan	25.632.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				11.628.600,00							25.632.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	1 Laporan	11.628.600,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		3 Laporan	25.632.000,00	KECAMATAN MANISRENGGO
328.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				91.546.650,00							43.446.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				91.546.650,00							43.446.000,00	
			999.Persentase lembaga masyarakat aktif	95.00 %	95.00 %	91.546.650,00						95.00 %	43.446.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				91.546.650,00					Masyarakat Kecamatan Manisrenggo		43.446.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa di Kecamatan Manisrenggo				91.546.650,00					Masyarakat Kecamatan Manisrenggo		43.446.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.00 Laporan	4.00 Laporan	91.546.650,00						4.00 Laporan	43.446.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				91.546.650,00							43.446.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.00 Laporan	4 Laporan	91.546.650,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4.00 Laporan	43.446.000,00	KECAMATAN MANISRENGGO
329.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				98.842.140,00							94.393.000,00	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum				98.842.140,00							94.393.000,00	
			999.Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	100,00 %	100,00 %	98.842.140,00						100,00 %	94.393.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				98.842.140,00					Masyarakat Kecamatan Manisrenggo		94.393.000,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				98.842.140,00					Masyarakat Kecamatan Manisrenggo		94.393.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.00 Laporan	4.00 Laporan	98.842.140,00						4.00 Laporan	94.393.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				98.842.140,00							94.393.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.00 Laporan	4 Laporan	98.842.140,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4.00 Laporan	94.393.000,00	KECAMATAN MANISRENGGO
330.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				750.000,00							130.213.000,00	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				750.000,00							130.213.000,00	
			999.Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	97.00 %	97.00 %	750.000,00						97.00 %	130.213.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				750.000,00					Masyarakat Kecamatan Manisrenggo		130.213.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				750.000,00					Masyarakat Kecamatan Manisrenggo		130.213.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	650.00 Orang	650.00 Orang	750.000,00						650.00 Orang	130.213.000,00	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				750.000,00							130.213.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	650.00 Orang	90 Orang	750.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		650.00 Orang	130.213.000,00	KECAMATAN MANISRENGGO
331.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				80.363.050,00							7.844.000,00	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa				80.363.050,00							7.844.000,00	
			999.Persentase desa dengan tertib administrasi	75.00 %	75.00 %	80.363.050,00						75.00 %	7.844.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				80.363.050,00					Masyarakat Kecamatan Manisrenggo		7.844.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Manisrenggo				80.363.050,00					Masyarakat Kecamatan Manisrenggo		7.844.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	2.887.700,00						1.00 Dokumen	4.844.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	77.475.350,00						1.00 Dokumen	3.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				77.475.350,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.00 Dokumen	1 Dokumen	77.475.350,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		1.00 Dokumen	3.000.000,00	KECAMATAN MANISRENGGO
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				2.887.700,00							4.844.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.00 Dokumen	1 Dokumen	2.887.700,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		1.00 Dokumen	4.844.000,00	KECAMATAN MANISRENGGO
		KECAMATAN KARANGNONGKO				2.958.220.956,00							2.689.306.036,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.958.220.956,00							2.689.306.036,00	
	7.01	KECAMATAN				2.958.220.956,00							2.689.306.036,00	
332.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.562.825.956,00							2.391.965.036,00	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi				2.562.825.956,00							2.391.965.036,00	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.70 Indeks	84.40 Indeks	2.562.825.956,00						84.50 Indeks	2.391.965.036,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	63.50 Nilai	63.20 Nilai	2.562.825.956,00						63.30 Nilai	2.391.965.036,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.049.000,00					ASN Kecamatan Karangnongko		7.500.000,00	
		Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja				7.049.000,00					ASN Kecamatan Karangnongko		7.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.00 Dokumen	4.00 Dokumen	7.049.000,00						4.00 Dokumen	7.500.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.049.000,00							7.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.00 Dokumen	4 Dokumen	7.049.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4.00 Dokumen	7.500.000,00	KECAMATAN KARANGNONGKO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.321.369.000,00					ASN Kecamatan Karangnongko		2.234.465.036,00	
		Terpenuhinya Pemenuhan Administrasi Keuangan				2.321.369.000,00					ASN Kecamatan Karangnongko		2.234.465.036,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15.00 Orang/bulan	15.00 Orang/bulan	2.321.369.000,00						15.00 Orang/bulan	2.234.465.036,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.321.369.000,00							2.234.465.036,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15.00 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.321.369.000,00	Kab. Klaten	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		15.00 Orang/bulan	2.234.465.036,00	KECAMATAN KARANGNONGKO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				57.000.000,00					-		60.000.000,00	
		Terpenuhinya Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum				57.000.000,00					-		60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00 Laporan	12.00 Laporan	57.000.000,00						12.00 Laporan	60.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				57.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00 Laporan	12 Laporan	57.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	-	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12.00 Laporan	60.000.000,00	KECAMATAN KARANGNONGKO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				130.600.000,00					ASN Kecamatan Karangnongko, Sarana Prasarana dan Gedung Kantor Kecamatan Karangnongko		80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah				130.600.000,00					ASN Kecamatan Karangnongko, Sarana Prasarana dan Gedung Kantor Kecamatan Karangnongko		80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	130.600.000,00						12.00 Laporan	80.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				130.600.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00 Laporan	12 Laporan	130.600.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12.00 Laporan	80.000.000,00	KECAMATAN KARANGNONGKO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				46.807.956,00					ASN Kecamatan Karangnongko, Sarana Prasarana dan Gedung Kantor Kecamatan Karangnongko		10.000.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah				46.807.956,00					ASN Kecamatan Karangnongko, Sarana Prasarana dan Gedung Kantor Kecamatan Karangnongko		10.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10.00 Unit	10.00 Unit	46.807.956,00						10.00 Unit	10.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				46.807.956,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10.00 Unit	10 Unit	46.807.956,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		10.00 Unit	10.000.000,00	KECAMATAN KARANGNONGKO
333.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				30.850.000,00							28.699.000,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik				30.850.000,00							28.699.000,00	
			999.Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	100,00 %	100,00 %	30.850.000,00						100,00 %	28.699.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				30.850.000,00					Masyarakat di Kecamatan Karangnongko		28.699.000,00	
		Tersedianya Jenis Layanan di Kecamatan yang sudah Menerapkan SOP Tetap				30.850.000,00					Masyarakat di Kecamatan Karangnongko		28.699.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3.00 Laporan	3.00 Laporan	30.850.000,00						3.00 Laporan	28.699.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				30.850.000,00							28.699.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3.00 Laporan	3 Laporan	30.850.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		3.00 Laporan	28.699.000,00	KECAMATAN KARANGNONGKO
334.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				134.895.000,00							88.953.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				134.895.000,00							88.953.000,00	
			999.Persentase lembaga masyarakat aktif	100,00 %	100,00 %	134.895.000,00						100,00 %	88.953.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				134.895.000,00					Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan Karangnongko		88.953.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat				134.895.000,00					Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan Karangnongko		88.953.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.00 Laporan	4.00 Laporan	134.895.000,00						4.00 Laporan	88.953.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				134.895.000,00							88.953.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.00 Laporan	4 Laporan	134.895.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4.00 Laporan	88.953.000,00	KECAMATAN KARANGNONGKO
335.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				131.650.000,00							86.400.000,00	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum				131.650.000,00							86.400.000,00	
			999.Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	100,00 %	100,00 %	131.650.000,00						100,00 %	86.400.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				131.650.000,00					Muspika, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dan Masyarakat di Kecamatan Karangnongko		86.400.000,00	
		Terfasilitasinya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				131.650.000,00					Muspika, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dan Masyarakat di Kecamatan Karangnongko		86.400.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.00 Laporan	4.00 Laporan	131.650.000,00						4.00 Laporan	86.400.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				131.650.000,00							86.400.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.00 Laporan	4 Laporan	131.650.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4.00 Laporan	86.400.000,00	KECAMATAN KARANGNONGKO
336.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				10.000.000,00							91.009.000,00	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				10.000.000,00							91.009.000,00	
			999.Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	100,00 %	100,00 %	10.000.000,00						100,00 %	91.009.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				10.000.000,00					ASN, Kepala Desa, Masyarakat dan Perangkat Desa		91.009.000,00	
		Terfasilitasinya Penyelenggaraan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				10.000.000,00					ASN, Kepala Desa, Masyarakat dan Perangkat Desa		91.009.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	520.00 Orang	520.00 Orang	10.000.000,00						520.00 Orang	91.009.000,00	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				10.000.000,00							91.009.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	520.00 Orang	300 Orang	10.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		520.00 Orang	91.009.000,00	KECAMATAN KARANGNONGKO
337.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				88.000.000,00							2.280.000,00	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa				88.000.000,00							1.140.000,00	
			999.Persentase desa dengan tertib administrasi	80.00 %	80.00 %	88.000.000,00						80.00 %	1.140.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				88.000.000,00					Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa		2.280.000,00	
		Terfasilitasinya Desa yang Memperoleh Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan				88.000.000,00					Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa		2.280.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	5.005.000,00						1.00 Dokumen	1.140.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	82.995.000,00						1.00 Dokumen	1.140.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				82.995.000,00							1.140.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.00 Dokumen	1 Dokumen	82.995.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		1.00 Dokumen	1.140.000,00	KECAMATAN KARANGNONGKO
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				5.005.000,00							1.140.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.00 Dokumen	1 Dokumen	5.005.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		1.00 Dokumen	1.140.000,00	KECAMATAN KARANGNONGKO
		KECAMATAN CEPER				2.618.711.386,00							2.869.358.929,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.618.711.386,00							2.869.358.929,00	
	7.01	KECAMATAN				2.618.711.386,00							2.869.358.929,00	
338.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.303.463.892,00							2.614.116.929,00	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi				2.303.463.892,00							2.614.116.929,00	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88.00 Indeks	86.70 Indeks	2.303.463.892,00						87.00 Indeks	2.614.116.929,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	66.30 Nilai	64.50 Nilai	2.303.463.892,00						64.70 Nilai	2.614.116.929,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.500.000,00					ASN dan Pegawai Kecamatan Ceper		3.500.000,00	
		Tersusunya dokumen perencanaan dan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				6.500.000,00					ASN dan Pegawai Kecamatan Ceper		3.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	6.500.000,00						4 Dokumen	3.500.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6.500.000,00							3.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5 Dokumen	6.500.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4 Dokumen	3.500.000,00	KECAMATAN CEPER
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.042.279.000,00					ASN dan Pegawai Kecamatan Ceper		2.483.616.929,00	
		Terlaksannnya administrasi keuangan perangkat daerah				2.042.279.000,00					ASN dan Pegawai Kecamatan Ceper		2.483.616.929,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.042.279.000,00						15 Orang/bulan	2.483.616.929,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.042.279.000,00							2.483.616.929,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.042.279.000,00	Kab. Klaten	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		15 Orang/bulan	2.483.616.929,00	KECAMATAN CEPER
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				33.584.892,00					ASN dan Pegawai Kecamatan Ceper		25.000.000,00	
		terlaksananya administrasi umum perangkat daerah				33.584.892,00					ASN dan Pegawai Kecamatan Ceper		25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	33.584.892,00						12 Laporan	25.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				33.584.892,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	43 Laporan	33.584.892,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Laporan	25.000.000,00	KECAMATAN CEPER
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				165.000.000,00					ASN dan Pegawai Kecamatan Ceper		97.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Tersediannya jasa penunjang urusan pemerintah daerah				165.000.000,00					ASN dan Pegawai Kecamatan Ceper		97.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	165.000.000,00						12 Laporan	97.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				165.000.000,00							97.000.000,00	
		Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	29 Laporan	165.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Laporan	97.000.000,00	KECAMATAN CEPER
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				56.100.000,00					ASN dan Pegawai Kecamatan Ceper		5.000.000,00	
		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah				56.100.000,00					ASN dan Pegawai Kecamatan Ceper		5.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	56.100.000,00						3 Unit	5.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				56.100.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	47 Unit	56.100.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		3 Unit	5.000.000,00	KECAMATAN CEPER
339.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				23.415.000,00							24.832.000,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik				23.415.000,00							24.832.000,00	
			999.Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	100,00 %	100,00 %	23.415.000,00						100,00 %	24.832.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				23.415.000,00					Masyarakat dan ASN		24.832.000,00	
		Terselenggaranya urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah di kecamatan				23.415.000,00					Masyarakat dan ASN		24.832.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	23.415.000,00						2 Laporan	24.832.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				23.415.000,00							24.832.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	23.415.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		2 Laporan	24.832.000,00	KECAMATAN CEPER
340.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				100.650.494,00							140.417.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				100.650.494,00							140.417.000,00	
			999.Persentase lembaga masyarakat aktif	95.00 %	95.00 %	100.650.494,00						95.00 %	140.417.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				100.650.494,00					Masyarakat dan ASN		140.417.000,00	
		Terlaksannannya kooedinasi kegiatan pemberdayaan di desa				100.650.494,00					Masyarakat dan ASN		140.417.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 Laporan	18 Laporan	100.650.494,00						18 Laporan	140.417.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				100.650.494,00							140.417.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	18 Laporan	23 Laporan	100.650.494,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	-	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		18 Laporan	140.417.000,00	KECAMATAN CEPER
341.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				89.400.000,00							70.000.000,00	
		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum				89.400.000,00							70.000.000,00	
			999.Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	96.00 %	96.00 %	89.400.000,00						96.00 %	70.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				89.400.000,00					Masyarakat dan ASN		70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksanannya koordinasi dan upaya penyelenggaraan trantibum				89.400.000,00					Masyarakat dan ASN		70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	89.400.000,00						12 Laporan	70.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				89.400.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	27 Laporan	89.400.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Laporan	70.000.000,00	KECAMATAN CEPER
342.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				6.782.000,00							3.993.000,00	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				6.782.000,00							3.993.000,00	
			999.Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	97.00 %	97.00 %	6.782.000,00						97.00 %	3.993.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				6.782.000,00					Masyarakat dan ASN		3.993.000,00	
		Terselenggaranya urusan pemerintah umum sesuai penugasan kepala daerah				6.782.000,00					Masyarakat dan ASN		3.993.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	540 Orang	540 Orang	6.782.000,00						540 Orang	3.993.000,00	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				6.782.000,00							3.993.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	540 Orang	550 Orang	6.782.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		540 Orang	3.993.000,00	KECAMATAN CEPER
343.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				95.000.000,00							16.000.000,00	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa				95.000.000,00							16.000.000,00	
			999.Persentase desa dengan tertib administrasi	98.00 %	98.00 %	95.000.000,00						98.00 %	16.000.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan desa				95.000.000,00					Masyarakat dan ASN		16.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				80.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	5 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		1 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN CEPER
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				95.000.000,00					Masyarakat dan ASN		16.000.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan desa				95.000.000,00					Masyarakat dan ASN		16.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-	15.000.000,00						-	1.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				15.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	3 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	1.000.000,00	KECAMATAN CEPER
		KECAMATAN PEDAN				2.487.920.291,00							2.326.435.821,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN				2.487.920.291,00							2.326.435.821,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	7.01	KECAMATAN				2.487.920.291,00							2.326.435.821,00	
344.	7.01.01	PROGRAM PENUNJIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.167.097.754,00							2.020.078.821,00	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi				2.167.097.754,00							2.015.078.821,00	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.60 Indeks	84.30 Indeks	2.167.097.754,00						84.40 Indeks	2.015.078.821,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	70.70 Nilai	70.55 Nilai	2.167.097.754,00						70.60 Nilai	2.015.078.821,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.000.000,00					ASN Kecamatan Pedan dan SKPD Terkait		5.000.000,00	
		Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.000.000,00					ASN Kecamatan Pedan dan SKPD Terkait		5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5.000.000,00						5 Dokumen	5.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	7 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		5 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN PEDAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.929.706.000,00					ASN Kecamatan Pedan		1.874.357.330,00	
		Terpenuhinya Administrasi Keuangan				1.929.706.000,00					ASN Kecamatan Pedan		1.874.357.330,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.929.706.000,00						12 Orang/bulan	1.874.357.330,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.929.706.000,00							1.874.357.330,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	1.929.706.000,00	Kab. Klaten	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Orang/bulan	1.874.357.330,00	KECAMATAN PEDAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				15.100.000,00					ASN Kecamatan Pedan dan Sarana Prasarana dan Gedung Kantor Kec. Pedan		10.000.000,00	
		Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum				15.100.000,00					ASN Kecamatan Pedan dan Sarana Prasarana dan Gedung Kantor Kec. Pedan		10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	15.100.000,00						12 Laporan	10.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				15.100.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	15.100.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Laporan	10.000.000,00	KECAMATAN PEDAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				163.271.754,00					ASN Kecamatan Pedan, Sarana Prasarana dan Gedung Kantor Kec. Pedan		125.721.491,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah di Kecamatan				163.271.754,00					ASN Kecamatan Pedan, Sarana Prasarana dan Gedung Kantor Kec. Pedan		125.721.491,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	163.271.754,00						12 Laporan	125.721.491,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				163.271.754,00							125.721.491,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	163.271.754,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Laporan	125.721.491,00	KECAMATAN PEDAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				54.020.000,00					ASN Kecamatan Pedan, Sarana Prasarana dan Gedung Kantor Kec. Pedan		5.000.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah				54.020.000,00					ASN Kecamatan Pedan, Sarana Prasarana dan Gedung Kantor Kec. Pedan		5.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	54.020.000,00						2 Unit	5.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				54.020.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	30 Unit	54.020.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		2 Unit	5.000.000,00	KECAMATAN PEDAN
345.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				18.000.000,00							25.382.000,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik				18.000.000,00							25.382.000,00	
			999.Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	100,00 %	100,00 %	18.000.000,00						100,00 %	25.382.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				18.000.000,00					Masyarakat di Kecamatan Pedan		25.382.000,00	
		Terfasilitasinya Pelayanan Publik (PATEN) untuk Masyarakat				18.000.000,00					Masyarakat di Kecamatan Pedan		25.382.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	18.000.000,00						3 Laporan	25.382.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				18.000.000,00							25.382.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	18.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		3 Laporan	25.382.000,00	KECAMATAN PEDAN
346.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				117.822.537,00							179.253.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				117.822.537,00							179.253.000,00	
			999.Persentase lembaga masyarakat aktif	95.00 %	95.00 %	117.822.537,00						95.00 %	179.253.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				117.822.537,00					Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan Pedan		179.253.000,00	
		Terkoordinasinya Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan				117.822.537,00					Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan Pedan		179.253.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	117.822.537,00						12 Laporan	179.253.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				117.822.537,00							179.253.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	117.822.537,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Laporan	179.253.000,00	KECAMATAN PEDAN
347.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				104.000.000,00							98.000.000,00	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum				104.000.000,00							98.000.000,00	
			999.Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	96.00 %	96.00 %	104.000.000,00						96.00 %	98.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				104.000.000,00					Muspika, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dan Masyarakat di Kec. Pedan		98.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum				104.000.000,00					Muspika, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dan Masyarakat di Kec. Pedan		98.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	104.000.000,00						12 Laporan	98.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				104.000.000,00							98.000.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	104.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Laporan	98.000.000,00	KECAMATAN PEDAN
348.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				8.000.000,00							1.722.000,00	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				8.000.000,00							1.722.000,00	
			999.Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	97.00 %	97.00 %	8.000.000,00						97.00 %	1.722.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				8.000.000,00					ASN, Kepala Desa, Masyarakat dan Perangkat Desa		1.722.000,00	
		Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional				8.000.000,00					ASN, Kepala Desa, Masyarakat dan Perangkat Desa		1.722.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4 Orang	4 Orang	8.000.000,00						4 Orang	1.722.000,00	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				8.000.000,00							1.722.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4 Orang	100 Orang	8.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4 Orang	1.722.000,00	KECAMATAN PEDAN
349.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				73.000.000,00							2.000.000,00	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa				73.000.000,00							2.000.000,00	
			999.Persentase desa dengan tertib administrasi	98.00 %	98.00 %	73.000.000,00						98.00 %	2.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				73.000.000,00					Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa		2.000.000,00	
		Terselenggaranya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemerintah Desa				73.000.000,00					Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa		2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14 Dokumen	14 Dokumen	73.000.000,00						14 Dokumen	2.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				73.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	14 Dokumen	14 Dokumen	73.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		14 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN PEDAN
		KECAMATAN KARANGDOWO				3.078.239.705,00							2.886.183.387,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN				3.078.239.705,00							2.886.183.387,00	
	7.01	KECAMATAN				3.078.239.705,00							2.886.183.387,00	
350.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.731.119.705,00							2.371.268.387,00	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi				2.731.119.705,00							2.371.268.387,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90.00 Indeks	88.50 Indeks	2.731.119.705,00						89.00 Indeks	2.371.268.387,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	80.00 Nilai	74.00 Nilai	2.731.119.705,00						76.00 Nilai	2.371.268.387,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.000.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan Karangdowo, Pegawai Kecamatan Karangdowo		8.000.000,00	
		Tersusnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja				3.000.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan Karangdowo, Pegawai Kecamatan Karangdowo		8.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen		3.000.000,00						5 Dokumen	8.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.000.000,00							8.000.000,00	
		Tersusnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		5 Dokumen	8.000.000,00	KECAMATAN KARANGDOWO
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.406.238.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan Karangdowo, Pegawai Kecamatan Karangdowo		2.193.268.387,00	
		Terbayarkanya gaji, tunjangan ASN dan tersusnya laporan keuangan tepat waktu				2.406.238.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan Karangdowo, Pegawai Kecamatan Karangdowo		2.193.268.387,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	16 Orang/bulan		2.406.238.000,00						16 Orang/bulan	2.193.268.387,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.406.238.000,00							2.193.268.387,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	2.406.238.000,00	Kab. Klaten	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		16 Orang/bulan	2.193.268.387,00	KECAMATAN KARANGDOWO
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				31.830.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan Karangdowo, Pegawai Kecamatan Karangdowo		50.000.000,00	
		Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu				31.830.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan Karangdowo, Pegawai Kecamatan Karangdowo		50.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan		31.830.000,00						12 Laporan	50.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				31.830.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	31.830.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Laporan	50.000.000,00	KECAMATAN KARANGDOWO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				185.741.705,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan Karangdowo, Pegawai Kecamatan Karangdowo		100.000.000,00	
		Terpenuhinya kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu				185.741.705,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan Karangdowo, Pegawai Kecamatan Karangdowo		100.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan		185.741.705,00						12 Laporan	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				185.741.705,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	185.741.705,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Laporan	100.000.000,00	KECAMATAN KARANGDOWO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				104.310.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan Karangdowo, Pegawai Kecamatan Karangdowo		20.000.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				104.310.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan Karangdowo, Pegawai Kecamatan Karangdowo		20.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	104.310.000,00						10 Unit	20.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				104.310.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	104.310.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		10 Unit	20.000.000,00	KECAMATAN KARANGDOWO
351.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				28.320.000,00							24.805.000,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik				28.320.000,00							24.805.000,00	
			999.Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	100,00 %	100,00 %	28.320.000,00						100,00 %	24.805.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				28.320.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan Karangdowo, Pegawai Kecamatan Karangdowo		24.805.000,00	
		Terfasilitasinya Masyarakat di Pelayanan Publik (PATEN)				28.320.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan Karangdowo, Pegawai Kecamatan Karangdowo		24.805.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	28.320.000,00						3 Laporan	24.805.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				28.320.000,00							24.805.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	28.320.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		3 Laporan	24.805.000,00	KECAMATAN KARANGDOWO
352.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				84.000.000,00							387.189.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				84.000.000,00							387.189.000,00	
			999.Persentase lembaga masyarakat aktif	100,00 %	100,00 %	84.000.000,00						100,00 %	387.189.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				84.000.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan Karangdowo		387.189.000,00	
		Terkoordinasinya Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan				84.000.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan Karangdowo		387.189.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	84.000.000,00						4 Laporan	387.189.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				84.000.000,00							387.189.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	84.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4 Laporan	387.189.000,00	KECAMATAN KARANGDOWO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
353.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				120.000.000,00							90.000.000,00	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum				120.000.000,00							90.000.000,00	
			999.Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	100,00 %	100,00 %	120.000.000,00						100,00 %	90.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				120.000.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan Karangdowo		90.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum				120.000.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan Karangdowo		90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	120.000.000,00						4 Laporan	90.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				120.000.000,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	120.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4 Laporan	90.000.000,00	KECAMATAN KARANGDOWO
354.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				9.300.000,00							4.135.000,00	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				9.300.000,00							4.135.000,00	
			999.Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	100,00 %	100,00 %	9.300.000,00						100,00 %	4.135.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				9.300.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan Karangdowo		4.135.000,00	
		Terlaksananya koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional				9.300.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan Karangdowo		4.135.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	520 Orang	520 Orang	9.300.000,00						520 Orang	4.135.000,00	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				9.300.000,00							4.135.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	520 Orang	95 Orang	9.300.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		520 Orang	4.135.000,00	KECAMATAN KARANGDOWO
355.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				105.500.000,00							8.786.000,00	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa				105.500.000,00							8.786.000,00	
			999.Persentase desa dengan tertib administrasi	100,00 %	100,00 %	105.500.000,00						100,00 %	8.786.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				105.500.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan Karangdowo		8.786.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				105.500.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan Karangdowo		8.786.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00						1 Dokumen	5.286.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	102.000.000,00						1 Dokumen	3.500.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				102.000.000,00							3.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	102.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		1 Dokumen	3.500.000,00	KECAMATAN KARANGDOWO

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	7.01.06.2.01.0016	Facilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				3.500.000,00							5.286.000,00	
		Terlaksananya Facilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		1 Dokumen	5.286.000,00	KECAMATAN KARANGDOWO
		KECAMATAN JUWIRING				2.965.912.144,00							2.402.092.564,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				2.965.912.144,00							2.402.092.564,00	
	7.01	KECAMATAN				2.965.912.144,00							2.402.092.564,00	
356.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.658.441.894,00							2.230.045.564,00	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi				2.658.441.894,00							2.230.045.564,00	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89 Indeks	87 Indeks	2.658.441.894,00						87.5 Indeks	2.230.045.564,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	72.00 Nilai	69.00 Nilai	2.658.441.894,00						70.00 Nilai	2.230.045.564,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.406.690.000,00					ASN Kecamatan juwiring		2.017.045.564,00	
		Terpenuhinya pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah				2.406.690.000,00					ASN Kecamatan juwiring		2.017.045.564,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.406.690.000,00						14 Orang/bulan	2.017.045.564,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.406.690.000,00							2.017.045.564,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.406.690.000,00	Kab. Klaten	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		14 Orang/bulan	2.017.045.564,00	KECAMATAN JUWIRING
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				6.000.000,00					ASN Kecamatan juwiring		80.000.000,00	
		Terpenuhinya pemenuhan pelayanan administrasi umum perangkat daerah				6.000.000,00					ASN Kecamatan juwiring		80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00						12 Laporan	80.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Laporan	80.000.000,00	KECAMATAN JUWIRING
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				187.631.894,00					ASN dan Outsourcing se Kecamatan juwiring		125.000.000,00	
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				187.631.894,00					ASN dan Outsourcing se Kecamatan juwiring		125.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	187.631.894,00						12 Laporan	125.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				187.631.894,00							125.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	187.631.894,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Laporan	125.000.000,00	KECAMATAN JUWIRING
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				58.120.000,00					ASN se Kecamatan juwiring		8.000.000,00	
		Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				58.120.000,00					ASN se Kecamatan juwiring		8.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit	22 Unit	58.120.000,00						8 Unit	8.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				58.120.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	22 Unit	8 Unit	58.120.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		8 Unit	8.000.000,00	KECAMATAN JUWIRING

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	PRIORITAS		(12)	(13)	(14)	(15)
									NASIONAL	DAERAH				
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		6 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN WONOSARI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.602.201.000,00					ASN Kecamatan Wonosari		2.385.833.706,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.602.201.000,00					ASN Kecamatan Wonosari		2.385.833.706,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2.602.201.000,00						18 Orang/bulan	2.385.833.706,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.602.201.000,00							2.385.833.706,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	2.602.201.000,00	Kab. Klaten	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		18 Orang/bulan	2.385.833.706,00	KECAMATAN WONOSARI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				10.000.000,00					Kecamatan Wonosari		9.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				10.000.000,00					Kecamatan Wonosari		9.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00						12 Laporan	9.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				10.000.000,00							9.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Laporan	9.000.000,00	KECAMATAN WONOSARI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				165.000.000,00					Kecamatan Wonosari		118.522.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				165.000.000,00					Kecamatan Wonosari		118.522.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	165.000.000,00						12 Laporan	118.522.000,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				165.000.000,00							118.522.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	165.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Laporan	118.522.000,00	KECAMATAN WONOSARI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				72.427.000,00					Kecamatan Wonosari		10.858.996,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				72.427.000,00					Kecamatan Wonosari		10.858.996,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	72.427.000,00						2 Unit	10.858.996,00	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				72.427.000,00							10.858.996,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	72.427.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		2 Unit	10.858.996,00	KECAMATAN WONOSARI
363.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				25.534.000,00							27.079.000,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik				25.534.000,00							27.079.000,00	
			999.Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	100,00 %	100,00 %	25.534.000,00						100,00 %	27.079.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				25.534.000,00					Kecamatan Wonosari		27.079.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				25.534.000,00					Kecamatan Wonosari		27.079.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	25.534.000,00						3 Laporan	27.079.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	240 Orang	8.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	22.000.000,00	KECAMATAN WONOSARI
367.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				119.198.500,00							14.000.000,00	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa				119.198.500,00							14.000.000,00	
			999.Persentase desa dengan tertib administrasi	100,00 %	100,00 %	119.198.500,00						100,00 %	14.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				119.198.500,00					ASN, Masyarakat, Pemerintah Desa Kecamatan Wonosari		14.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				119.198.500,00					ASN, Masyarakat, Pemerintah Desa Kecamatan Wonosari		14.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00						1 Dokumen	6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	116.698.500,00						1 Dokumen	8.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				116.698.500,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	116.698.500,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		1 Dokumen	8.000.000,00	KECAMATAN WONOSARI
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				2.500.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		1 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN WONOSARI
		KECAMATAN DELANGGU				3.107.925.970,00							2.105.145.118,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.107.925.970,00							2.105.145.118,00	
	7.01	KECAMATAN				3.107.925.970,00							2.105.145.118,00	
368.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.846.970.970,00							1.958.897.118,00	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi				2.846.970.970,00							1.958.897.118,00	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87.00 Indeks	86.00 Indeks	2.846.970.970,00						87.00 Indeks	1.958.897.118,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	65.50 Nilai	64.00 Nilai	2.846.970.970,00						64.50 Nilai	1.958.897.118,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.223.706,00					ASN Kecamatan Delanggu		5.500.000,00	
		Terlaksananya kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan				25.223.706,00					ASN Kecamatan Delanggu		5.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	25.223.706,00						4 Dokumen	5.500.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25.223.706,00							5.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	25.223.706,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4 Dokumen	5.500.000,00	KECAMATAN DELANGGU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.550.826.000,00					ASN Kecamatan Delanggu		1.752.741.118,00	
		Terlaksananya kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundangan				2.550.826.000,00					ASN Kecamatan Delanggu		1.752.741.118,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	2.550.826.000,00						14 Orang/bulan	1.752.741.118,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.550.826.000,00							1.752.741.118,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12.00 Laporan	12 Laporan	35.400.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12.00 Laporan	30.000.000,00	KECAMATAN POLANHARJO
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				186.380.873,00					ASN Kecamatan Polanharjo		110.000.000,00	
		-				186.380.873,00					ASN Kecamatan Polanharjo		110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00 Laporan	12.00 Laporan	186.380.873,00						12.00 Laporan	110.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				186.380.873,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12.00 Laporan	12 Laporan	186.380.873,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12.00 Laporan	110.000.000,00	KECAMATAN POLANHARJO
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				50.770.000,00					ASN Kecamatan Polanhajo		14.400.000,00	
		-				50.770.000,00					ASN Kecamatan Polanhajo		14.400.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10.00 Unit	10.00 Unit	50.770.000,00						10.00 Unit	14.400.000,00	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.770.000,00							14.400.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10.00 Unit	10 Unit	50.770.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		10.00 Unit	14.400.000,00	KECAMATAN POLANHARJO
375.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				32.185.050,00							24.680.000,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik				32.185.050,00							24.680.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				32.185.050,00					ASN Dan Masyarakat 18 desa Di Kecamatan Polanharjo		24.680.000,00	
		-				32.185.050,00					ASN Dan Masyarakat 18 desa Di Kecamatan Polanharjo		24.680.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3.00 Laporan	3.00 Laporan	32.185.050,00						3.00 Laporan	24.680.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				32.185.050,00							24.680.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3.00 Laporan	3 Laporan	32.185.050,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		3.00 Laporan	24.680.000,00	KECAMATAN POLANHARJO
376.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				147.047.450,00							177.197.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				147.047.450,00							177.197.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				147.047.450,00					Toga Tomas, Muspika , Masyarakat 18 Desa Di Kecamatan Polanharjo		177.197.000,00	
		-				147.047.450,00					Toga Tomas, Muspika , Masyarakat 18 Desa Di Kecamatan Polanharjo		177.197.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.00 Laporan	4.00 Laporan	147.047.450,00						4.00 Laporan	177.197.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1.00 Dokumen	1 Dokumen	132.630.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		1.00 Dokumen	13.000.000,00	KECAMATAN POLANHARJO
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				2.650.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.00 Dokumen	1 Dokumen	2.650.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		1.00 Dokumen	0,00	KECAMATAN POLANHARJO
		KECAMATAN KARANGANOM				3.043.747.997,00							2.348.706.074,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.043.747.997,00							2.348.706.074,00	
	7.01	KECAMATAN				3.043.747.997,00							2.348.706.074,00	
380.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.625.678.000,00							1.847.259.538,00	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi				2.625.678.000,00							1.847.259.538,00	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87.00 Indeks	87.00 Indeks	2.625.678.000,00						87.00 Indeks	1.847.259.538,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	67.00 Nilai	67.00 Nilai	2.625.678.000,00						67.00 Nilai	1.847.259.538,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.000.000,00					ASN dan Masyarakat 19 desa di Kecamatan Karanganom		2.000.000,00	
		Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah				8.000.000,00					ASN dan Masyarakat 19 desa di Kecamatan Karanganom		2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	8.000.000,00						5 Dokumen	2.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		5 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN KARANGANOM
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.337.678.000,00					ASN dan Masyarakat 19 desa di Kecamatan Karanganom		1.690.259.538,00	
		Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah				2.337.678.000,00					ASN dan Masyarakat 19 desa di Kecamatan Karanganom		1.690.259.538,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	2.337.678.000,00						12 Orang/bulan	1.690.259.538,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.337.678.000,00							1.690.259.538,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	2.337.678.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Orang/bulan	1.690.259.538,00	KECAMATAN KARANGANOM
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				65.000.000,00					ASN dan Masyarakat 19 desa di Kecamatan Karanganom		40.000.000,00	
		Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah				65.000.000,00					ASN dan Masyarakat 19 desa di Kecamatan Karanganom		40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000,00						12 Laporan	40.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	65.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Laporan	40.000.000,00	KECAMATAN KARANGANOM

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	148.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4 Laporan	200.446.536,00	KECAMATAN KARANGANOM
383.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				126.136.897,00							120.000.000,00	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum				126.136.897,00							120.000.000,00	
			999.Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	100,00 %	100,00 %	126.136.897,00						100,00 %	120.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				126.136.897,00					ASN dan Masyarakat 19 desa di Kecamatan Karanganom		120.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum				126.136.897,00					ASN dan Masyarakat 19 desa di Kecamatan Karanganom		120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	126.136.897,00						4 Laporan	120.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				126.136.897,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	126.136.897,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4 Laporan	120.000.000,00	KECAMATAN KARANGANOM
384.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				3.383.250,00							165.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				3.383.250,00							165.000.000,00	
			999.Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitas koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	100,00 %	100,00 %	3.383.250,00						100,00 %	165.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				3.383.250,00					ASN dan Masyarakat 19 desa di Kecamatan Karanganom		165.000.000,00	
		Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah				3.383.250,00					ASN dan Masyarakat 19 desa di Kecamatan Karanganom		165.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	650 Orang	650 Orang	3.383.250,00						650 Orang	165.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				3.383.250,00							165.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	650 Orang	650 Orang	3.383.250,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		650 Orang	165.000.000,00	KECAMATAN KARANGANOM
385.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				120.549.850,00							6.000.000,00	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa				120.549.850,00							3.000.000,00	
			999.Persentase desa dengan tertib administrasi	100,00 %	100,00 %	120.549.850,00						100,00 %	3.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				120.549.850,00					ASN dan Masyarakat 19 desa di Kecamatan Karanganom		6.000.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi, dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				120.549.850,00					ASN dan Masyarakat 19 desa di Kecamatan Karanganom		6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	18.480.000,00						1 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	102.069.850,00						1 Dokumen	3.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				102.069.850,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	163.316.068,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Laporan	62.000.000,00	KECAMATAN TULUNG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				20.613.938,00					ASN/ Pegawai Kecamatan Tulung		15.000.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah				20.613.938,00					ASN/ Pegawai Kecamatan Tulung		15.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	20.613.938,00						2 Unit	15.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.613.938,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1 Unit	20.613.938,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		2 Unit	15.000.000,00	KECAMATAN TULUNG
387.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				13.925.000,00							33.074.000,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik				13.925.000,00							33.074.000,00	
			1.Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	100.00 %	100.00 %	13.925.000,00						100.00 %	33.074.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				13.925.000,00					Masyarakat Kecamatan Tulung		33.074.000,00	
		Tersedianya Jenis Layanan di Kecamatan yang sudah Menerapkan SOP Tetap				13.925.000,00					Masyarakat Kecamatan Tulung		33.074.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	13.925.000,00						2 Laporan	33.074.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				13.925.000,00							33.074.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	13.925.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		2 Laporan	33.074.000,00	KECAMATAN TULUNG
388.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				108.154.500,00							86.889.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				108.154.500,00							86.889.000,00	
			999.Persentase lembaga masyarakat aktif	100.00 %	100.00 %	108.154.500,00						100.00 %	86.889.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				108.154.500,00					Masyarakat Kecamatan Tulung		86.889.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat				108.154.500,00					Masyarakat Kecamatan Tulung		86.889.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	108.154.500,00						4 Laporan	86.889.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				108.154.500,00							86.889.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	108.154.500,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4 Laporan	86.889.000,00	KECAMATAN TULUNG
389.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				163.890.535,00							81.684.000,00	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum				163.890.535,00							81.684.000,00	
			999.Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	100.00 %	100.00 %	163.890.535,00						100.00 %	81.684.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				163.890.535,00					Masyarakat Kecamatan Tulung		81.684.000,00	
		Terfasilitasinya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				163.890.535,00					Masyarakat Kecamatan Tulung		81.684.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	163.890.535,00						4 Laporan	81.684.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				163.890.535,00							81.684.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	163.890.535,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4 Laporan	81.684.000,00	KECAMATAN TULUNG
390.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				2.138.250,00							131.284.000,00	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				2.138.250,00							131.284.000,00	
			1.Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	100.00 %	100.00 %	2.138.250,00						100.00 %	131.284.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				2.138.250,00					Masyarakat Kecamatan Tulung		131.284.000,00	
		Terfasilitasinya Penyelenggaraan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				2.138.250,00					Masyarakat Kecamatan Tulung		131.284.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	585 Orang	585 Orang	2.138.250,00						585 Orang	131.284.000,00	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				2.138.250,00							131.284.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	585 Orang	30 Orang	2.138.250,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		585 Orang	131.284.000,00	KECAMATAN TULUNG
391.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				91.059.775,00							29.447.000,00	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa				91.059.775,00							29.447.000,00	
			999.Persentase desa dengan tertib administrasi	100.00 %	100.00 %	91.059.775,00						100.00 %	29.447.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				91.059.775,00					Masyarakat Kecamatan Tulung		29.447.000,00	
		Terfasilitasinya Desa yang Memperoleh Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan				91.059.775,00					Masyarakat Kecamatan Tulung		29.447.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1.060.000,00						1 Dokumen	14.447.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	89.999.775,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				89.999.775,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	4 Dokumen	89.999.775,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		1 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN TULUNG
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				1.060.000,00							14.447.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1.060.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		1 Dokumen	14.447.000,00	KECAMATAN TULUNG
		KECAMATAN JATINOM				3.777.439.757,00							3.543.143.623,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.777.439.757,00							3.543.143.623,00	
	7.01	KECAMATAN				3.777.439.757,00							3.543.143.623,00	
392.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.056.289.757,00							2.875.969.623,00	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi				3.056.289.757,00							2.875.969.623,00	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.50 Indeks	83.75 Indeks	3.056.289.757,00						84.00 Indeks	2.875.969.623,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	74.00 Nilai	71.00 Nilai	3.056.289.757,00						72.00 Nilai	2.875.969.623,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000,00					Pemangku Kepentingan		4.800.000,00	
		Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja				2.000.000,00					Pemangku Kepentingan		4.800.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00						4 Dokumen	4.800.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.000.000,00							4.800.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4 Dokumen	4.800.000,00	KECAMATAN JATINOM
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.818.734.000,00					Pemangku Kepentingan		2.622.169.623,00	
		Terpenuhinya Pemenuhan Administrasi Keuangan				2.818.734.000,00					Pemangku Kepentingan		2.622.169.623,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	28 Orang/bulan	2.818.734.000,00						28 Orang/bulan	2.622.169.623,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.818.734.000,00							2.622.169.623,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang/bulan	19 Orang/bulan	2.818.734.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		28 Orang/bulan	2.622.169.623,00	KECAMATAN JATINOM
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				29.750.000,00					Pemangku Kepentingan		35.000.000,00	
		Terpenuhinya Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum				29.750.000,00					Pemangku Kepentingan		35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	29.750.000,00						24 Laporan	35.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				29.750.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	12 Laporan	29.750.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		24 Laporan	35.000.000,00	KECAMATAN JATINOM
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				185.325.757,00					Pemangku Kepentingan		191.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah				185.325.757,00					Pemangku Kepentingan		191.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	185.325.757,00						24 Laporan	191.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				185.325.757,00							191.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	12 Laporan	185.325.757,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		24 Laporan	191.000.000,00	KECAMATAN JATINOM
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				20.480.000,00					Pemangku Kepentingan		23.000.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah				20.480.000,00					Pemangku Kepentingan		23.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	20.480.000,00						5 Unit	23.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.480.000,00							23.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	21 Unit	20.480.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		5 Unit	23.000.000,00	KECAMATAN JATINOM
393.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				27.000.000,00							33.074.000,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik				27.000.000,00							33.074.000,00	
			999.Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	100,00 %	100,00 %	27.000.000,00						100,00 %	33.074.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				27.000.000,00					Pemangku Kepentingan		33.074.000,00	
		Tersedianya Jenis Layanan di Kecamatan yang sudah Menerapkan SOP Tetap				27.000.000,00					Pemangku Kepentingan		33.074.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	27.000.000,00						2 Laporan	33.074.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				27.000.000,00							33.074.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	27.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		2 Laporan	33.074.000,00	KECAMATAN JATINOM
394.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				505.000.000,00							495.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				505.000.000,00							495.000.000,00	
			999.Persentase lembaga masyarakat aktif	100,00 %	100,00 %	505.000.000,00						100,00 %	495.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				505.000.000,00					Pemangku Kepentingan		495.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat				505.000.000,00					Pemangku Kepentingan		495.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	505.000.000,00						4 Laporan	495.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				505.000.000,00							495.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	505.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4 Laporan	495.000.000,00	KECAMATAN JATINOM
395.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				86.000.000,00							94.000.000,00	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum				86.000.000,00							94.000.000,00	
			999.Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	100,00 %	100,00 %	86.000.000,00						100,00 %	94.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				86.000.000,00					Pemangku Kepentingan		94.000.000,00	
		Terfasilitasinya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum				86.000.000,00					Pemangku Kepentingan		94.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	86.000.000,00						4 Laporan	94.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				86.000.000,00							94.000.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	86.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4 Laporan	94.000.000,00	KECAMATAN JATINOM
396.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				8.000.000,00							15.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				8.000.000,00							15.000.000,00	
			999.Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitas koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	100,00 %	100,00 %	8.000.000,00						100,00 %	15.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penguasan Kepala Daerah				8.000.000,00					Pemangku Kepentingan		15.000.000,00	
		Terfasilitasinya Penyelenggaraan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				8.000.000,00					Pemangku Kepentingan		15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	520 Orang	520 Orang	8.000.000,00						520 Orang	15.000.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan	173.437.092,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Jatinom Kelurahan Jatinom 0	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	102.644.600,00	KELURAHAN JATINOM
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				21.820.000,00					-		4.000.000,00	
		-				21.820.000,00					-		4.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	21.820.000,00						-	4.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				21.820.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	4 Unit	21.820.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Jatinom Kelurahan Jatinom 0	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah	-		4.000.000,00	KELURAHAN JATINOM
399.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				439.798.708,00							611.083.000,00	
			Persentase lembaga masyarakat aktif	-	100 %	439.798.708,00					-		611.083.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				439.798.708,00					-		611.083.000,00	
		-				439.798.708,00					-		611.083.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	340.662.350,00						-	371.083.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	-	99.136.358,00						-	240.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				99.136.358,00							240.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	5 Unit	99.136.358,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Jatinom Kelurahan Jatinom 0	Pajak Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah	-		240.000.000,00	KELURAHAN JATINOM
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				340.662.350,00							371.083.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	9 Pokmas / Ormas	340.662.350,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Jatinom Kelurahan Jatinom 0	Pajak Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah	-		371.083.000,00	KELURAHAN JATINOM
		KECAMATAN KEMALANG				3.003.739.510,00							2.666.708.017,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN				3.003.739.510,00							2.666.708.017,00	
	7.01	KECAMATAN				3.003.739.510,00							2.666.708.017,00	
400.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.563.349.510,00							2.174.208.017,00	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi				2.563.349.510,00							2.174.208.017,00	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84.50 Indeks	83.75 Indeks	2.563.349.510,00						84.00 Indeks	2.174.208.017,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	66.00 Nilai	63.00 Nilai	2.563.349.510,00						64.00 Nilai	2.174.208.017,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8.300.000,00					Warga Kemalang		4.000.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai regulasi				8.300.000,00					Warga Kemalang		4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	8.300.000,00						5 Dokumen	4.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8.300.000,00							4.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	8.300.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		5 Dokumen	4.000.000,00	KECAMATAN KEMALANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	3 Laporan	18.100.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		3 Laporan	8.000.000,00	KECAMATAN KEMALANG
402.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				188.986.000,00							178.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				188.986.000,00							178.000.000,00	
			999.Persentase lembaga masyarakat aktif	100,00 %	100,00 %	188.986.000,00						100,00 %	178.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				188.986.000,00					Warga Desa di Kec Kemalang		178.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sesuai regulasi				188.986.000,00					Warga Desa di Kec Kemalang		178.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	188.986.000,00						4 Laporan	178.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				188.986.000,00							178.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	188.986.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4 Laporan	178.000.000,00	KECAMATAN KEMALANG
403.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				140.694.000,00							175.000.000,00	
		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum				140.694.000,00							175.000.000,00	
			999.Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	100,00 %	100,00 %	140.694.000,00						100,00 %	175.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				140.694.000,00					Warga Kemalang		175.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai regulasi				140.694.000,00					Warga Kemalang		175.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	140.694.000,00						4 Laporan	175.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				140.694.000,00							175.000.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	140.694.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4 Laporan	175.000.000,00	KECAMATAN KEMALANG
404.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				4.875.000,00							120.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				4.875.000,00							120.000.000,00	
			999.Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitas koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	100,00 %	100,00 %	4.875.000,00						100,00 %	120.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				4.875.000,00					Warga Kemalang		120.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah sesuai regulasi				4.875.000,00					Warga Kemalang		120.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	650 Orang	650 Orang	4.875.000,00						650 Orang	120.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				4.875.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	650 Orang	650 Orang	4.875.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		650 Orang	120.000.000,00	KECAMATAN KEMALANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
405.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				87.735.000,00							11.500.000,00	
		<i>Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa</i>				87.735.000,00							11.500.000,00	
			999.Persentase desa dengan tertib administrasi	100,00 %	100,00 %	87.735.000,00						100,00 %	11.500.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				87.735.000,00					Desa di Kecamatan Kemalang		11.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sesuai aturan/ regulasi yang berlaku				87.735.000,00					Desa di Kecamatan Kemalang		11.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00						1 Dokumen	5.500.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	83.235.000,00						1 Dokumen	6.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				83.235.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	83.235.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		1 Dokumen	6.000.000,00	KECAMATAN KEMALANG
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				4.500.000,00							5.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah		1 Dokumen	5.500.000,00	KECAMATAN KEMALANG
		KECAMATAN NGAWEN				3.180.039.906,00							2.541.026.519,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.180.039.906,00							2.541.026.519,00	
	7.01	KECAMATAN				3.180.039.906,00							2.541.026.519,00	
406.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.747.968.906,00							2.261.026.519,00	
		<i>Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi</i>				2.747.968.906,00							2.261.026.519,00	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87.00 Indeks	85.50 Indeks	2.747.968.906,00						86.00 Indeks	2.261.026.519,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	75.00 Nilai	72.00 Nilai	2.747.968.906,00						73.00 Nilai	2.261.026.519,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.000.000,00					ASN Kecamatan Ngawen		7.000.000,00	
		Tersusnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja				2.000.000,00					ASN Kecamatan Ngawen		7.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00						4 Dokumen	7.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.000.000,00							7.000.000,00	
		Tersusnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4 Dokumen	7.000.000,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.448.529.000,00					ASN Kecamatan Ngawen		2.014.026.519,00	
		Terbayarkanya gaji, tunjangan ASN dan tersusnya laporan keuangan tepat waktu				2.448.529.000,00					ASN Kecamatan Ngawen		2.014.026.519,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	2.448.529.000,00						16 Orang/bulan	2.014.026.519,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.448.529.000,00							2.014.026.519,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	2.448.529.000,00	Kab. Klaten	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		16 Orang/bulan	2.014.026.519,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				65.000.000,00					ASN Kecamatan Ngawen		100.000.000,00	
		Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu				65.000.000,00					ASN Kecamatan Ngawen		100.000.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		1 Dokumen	20.000.000,00	KECAMATAN NGAWEN
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				2.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		1 Dokumen	5.000.000,00	KECAMATAN NGAWEN
		KECAMATAN KALIKOTES				3.190.713.556,00							2.871.920.875,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				3.190.713.556,00							2.871.920.875,00	
	7.01	KECAMATAN				3.190.713.556,00							2.871.920.875,00	
412.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.897.700.656,00							2.527.427.875,00	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi				2.897.700.656,00							2.527.427.875,00	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.60 Indeks	83.35 Indeks	2.897.700.656,00						83.50 Indeks	2.527.427.875,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	70.06 Nilai	70.02 Nilai	2.897.700.656,00						70.03 Nilai	2.527.427.875,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.938.000,00					ASN Kecamatan Kalikotes dan SKPD terkait		2.000.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.938.000,00					ASN Kecamatan Kalikotes dan SKPD terkait		2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	1.938.000,00						4 Dokumen	2.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.938.000,00							2.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	1.938.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4 Dokumen	2.000.000,00	KECAMATAN KALIKOTES
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.670.593.000,00					ASN Kecamatan Kalikotes dan OPD terkait		2.434.427.875,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.670.593.000,00					ASN Kecamatan Kalikotes dan OPD terkait		2.434.427.875,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	16 Orang/bulan	2.670.593.000,00						13 Orang/bulan	2.434.427.875,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.670.593.000,00							2.434.427.875,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	16 Orang/bulan	2.670.593.000,00	Kab. Klaten	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		13 Orang/bulan	2.434.427.875,00	KECAMATAN KALIKOTES
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				55.596.156,00					ASN Kecamatan Kalikotes dan OPD terkait		13.000.000,00	
		Terlaksananya administrasi umum Perangkat Daerah				55.596.156,00					ASN Kecamatan Kalikotes dan OPD terkait		13.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	55.596.156,00						12 Laporan	13.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				55.596.156,00							13.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	55.596.156,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Laporan	13.000.000,00	KECAMATAN KALIKOTES
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				94.617.500,00					ASN Kecamatan Kalikotes dan OPD terkait		66.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	58.985.700,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		7 Dokumen	11.813.000,00	KECAMATAN KALIKOTES
		KECAMATAN KLATEN UTARA				4.492.249.530,00							4.137.452.529,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				4.492.249.530,00							4.137.452.529,00	
	7.01	KECAMATAN				4.492.249.530,00							4.137.452.529,00	
418.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				4.072.249.530,00							3.567.452.529,00	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi				4.072.249.530,00							3.567.452.529,00	
			1.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	70.11 Nilai	70.08 Nilai	4.072.249.530,00						70.09 Nilai	3.567.452.529,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93.50 Indeks	92.00 Indeks	4.072.249.530,00						92.50 Indeks	3.567.452.529,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000,00					ASN Kecamatan Klaten Utara		4.000.000,00	
		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja				10.000.000,00					ASN Kecamatan Klaten Utara		4.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00						6 Dokumen	4.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		6 Dokumen	4.000.000,00	KECAMATAN KLATEN UTARA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.758.937.000,00					ASN Kecamatan Klaten Utara		3.339.843.514,00	
		Terpenuhinya Administrasi Keuangan				3.758.937.000,00					ASN Kecamatan Klaten Utara		3.339.843.514,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	18 Orang/bulan	3.758.937.000,00						18 Orang/bulan	3.339.843.514,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.758.937.000,00							3.339.843.514,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	20 Orang/bulan	3.758.937.000,00	Kab. Klaten	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		18 Orang/bulan	3.339.843.514,00	KECAMATAN KLATEN UTARA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				50.000.000,00					ASN Kecamatan Klaten Utara		35.000.000,00	
		Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum				50.000.000,00					ASN Kecamatan Klaten Utara		35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	18 Laporan	50.000.000,00						18 Laporan	35.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		18 Laporan	35.000.000,00	KECAMATAN KLATEN UTARA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				195.312.530,00					ASN Kecamatan Klaten Utara		138.609.015,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah				195.312.530,00					ASN Kecamatan Klaten Utara		138.609.015,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	195.312.530,00						36 Laporan	138.609.015,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				195.312.530,00							138.609.015,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	12 Laporan	195.312.530,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		36 Laporan	138.609.015,00	KECAMATAN KLATEN UTARA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				58.000.000,00					ASN Kecamatan Klaten Utara		50.000.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				58.000.000,00					ASN Kecamatan Klaten Utara		50.000.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Laporan	115.000.000,00	KECAMATAN KLATEN UTARA
422.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				5.000.000,00							165.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				5.000.000,00							165.000.000,00	
			999.Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	100,00 %	100,00 %	5.000.000,00						100,00 %	165.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				5.000.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan Klaten Utara		165.000.000,00	
		Terfasilitasinya penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				5.000.000,00					Masyarakat di wilayah Kecamatan Klaten Utara		165.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	650 Orang	650 Orang	5.000.000,00						650 Orang	165.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				5.000.000,00							165.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	650 Orang	70 Orang	5.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		650 Orang	165.000.000,00	KECAMATAN KLATEN UTARA
423.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				124.000.000,00							135.000.000,00	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa				124.000.000,00							135.000.000,00	
			999.Persentase desa dengan tertib administrasi	100,00 %	100,00 %	124.000.000,00						100,00 %	135.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				124.000.000,00					Seluruh Desa dan Kelurahan di Kecamatan Klaten Utara		135.000.000,00	
		Terpenuhinya desa yang memperoleh fasilitasi pembinaan dan pengawasan				124.000.000,00					Seluruh Desa dan Kelurahan di Kecamatan Klaten Utara		135.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	109.000.000,00						1 Dokumen	120.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				109.000.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	6 Dokumen	109.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		1 Dokumen	120.000.000,00	KECAMATAN KLATEN UTARA
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		1 Dokumen	15.000.000,00	KECAMATAN KLATEN UTARA
		KELURAHAN BARENGLOR				833.549.700,00							1.006.000.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				643.549.700,00							806.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN				643.549.700,00							806.000.000,00	
424.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				74.000.000,00							56.000.000,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	92.00 Indeks	74.000.000,00						-	56.000.000,00	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	-	70.08 Nilai	74.000.000,00						-	56.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	2 Unit	219.702.500,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Utara Kelurahan Gergunung 0	Pajak Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	-	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	250.000.000,00	KELURAHAN GERGUNUNG
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				384.337.200,00							461.400.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	10 Pokmas / Ormas	384.337.200,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Utara Kelurahan Gergunung 0	Pajak Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	461.400.000,00	KELURAHAN GERGUNUNG
		KECAMATAN KLATEN TENGAH				8.022.644.314,00							6.821.873.807,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				8.022.644.314,00							6.821.873.807,00	
	7.01	KECAMATAN				8.022.644.314,00							6.821.873.807,00	
429.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.299.141.000,00							6.056.373.807,00	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi				7.299.141.000,00							6.056.373.807,00	
			999. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86.25 Indeks	85.50 Indeks	7.299.141.000,00						85.80 Indeks	6.056.373.807,00	
			999. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	68.00 Nilai	67.20 Nilai	7.299.141.000,00						67.20 Nilai	6.056.373.807,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				11.550.000,00					Pegawai Kecamatan Klaten Tengah		8.500.000,00	
		Terlaksananya penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				11.550.000,00					Pegawai Kecamatan Klaten Tengah		8.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	11.550.000,00						6 Dokumen	8.500.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11.550.000,00							8.500.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	11.550.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		6 Dokumen	8.500.000,00	KECAMATAN KLATEN TENGAH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.899.011.000,00					Pegawai Kecamatan Klaten Tengah		5.842.873.807,00	
		Terlaksananya Pemenuhan Administrasi Keuangan				6.899.011.000,00					Pegawai Kecamatan Klaten Tengah		5.842.873.807,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	52 Orang/bulan	6.899.011.000,00						59 Orang/bulan	5.842.873.807,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.899.011.000,00							5.842.873.807,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/bulan	52 Orang/bulan	6.899.011.000,00	Kab. Klaten	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		59 Orang/bulan	5.842.873.807,00	KECAMATAN KLATEN TENGAH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				62.310.000,00					Pegawai Kecamatan Klaten Tengah		33.000.000,00	
		Terlaksananya Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum				62.310.000,00					Pegawai Kecamatan Klaten Tengah		33.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan	84 Laporan	62.310.000,00						84 Laporan	33.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				62.310.000,00							33.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	84 Laporan	12 Laporan	62.310.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		84 Laporan	33.000.000,00	KECAMATAN KLATEN TENGAH
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				235.000.000,00					Pegawai Kecamatan Klaten Tengah		145.000.000,00	
		Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah				235.000.000,00					Pegawai Kecamatan Klaten Tengah		145.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84 Laporan	84 Laporan	235.000.000,00						84 Laporan	145.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				235.000.000,00							145.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84 Laporan	12 Laporan	235.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		84 Laporan	145.000.000,00	KECAMATAN KLATEN TENGAH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				91.270.000,00					Pegawai Kecamatan Klaten Tengah		27.000.000,00	
		Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				91.270.000,00					Pegawai Kecamatan Klaten Tengah		27.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	23 Unit	91.270.000,00						27 Unit	27.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				91.270.000,00							27.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	28 Unit	37 Unit	91.270.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		27 Unit	27.000.000,00	KECAMATAN KLATEN TENGAH
430.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				58.000.000,00							45.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik				58.000.000,00							45.000.000,00	
			999.Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	100,00 %	100,00 %	58.000.000,00						100,00 %	45.000.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				58.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Klaten Tengah		45.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan pelayanan publik yang dilimpahkan di kecamatan				58.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Klaten Tengah		45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	58.000.000,00						2 Laporan	45.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				58.000.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	58.000.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		2 Laporan	45.000.000,00	KECAMATAN KLATEN TENGAH
431.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				329.944.000,00							332.500.000,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				329.944.000,00							332.500.000,00	
			999.Persentase lembaga masyarakat aktif	100,00 %	100,00 %	329.944.000,00						100,00 %	332.500.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				329.944.000,00					Masyarakat Kecamatan Klaten Tengah		332.500.000,00	
		Terlaksananya Desa yang Terkoordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan				329.944.000,00					Masyarakat Kecamatan Klaten Tengah		332.500.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	329.944.000,00						12 Laporan	332.500.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				329.944.000,00							332.500.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	329.944.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Laporan	332.500.000,00	KECAMATAN KLATEN TENGAH
432.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				129.850.000,00							225.000.000,00	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum				129.850.000,00							225.000.000,00	
			999.Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	98.00 %	98.00 %	129.850.000,00						98.00 %	225.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteritban Umum				129.850.000,00					Masyarakat Kecamatan Klaten Tengah		225.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban di kecamatan				129.850.000,00					Masyarakat Kecamatan Klaten Tengah		225.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	129.850.000,00						12 Laporan	225.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				129.850.000,00							225.000.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	129.850.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		12 Laporan	225.000.000,00	KECAMATAN KLATEN TENGAH
433.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				75.750.000,00							78.000.000,00	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				75.750.000,00							78.000.000,00	
			999.Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	98.00 %	98.00 %	75.750.000,00						98.00 %	78.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				75.750.000,00					Masyarakat Kecamatan Klaten Tengah		78.000.000,00	
		Terlaksananya penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				75.750.000,00					Masyarakat Kecamatan Klaten Tengah		78.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30 Orang	30 Orang	75.750.000,00						30 Orang	78.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				75.750.000,00							78.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	30 Orang	30 Orang	75.750.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		30 Orang	78.000.000,00	KECAMATAN KLATEN TENGAH
434.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				129.959.314,00							85.000.000,00	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintah desa				129.959.314,00							85.000.000,00	
			999.Persentase desa dengan tertib administrasi	98.00 %	98.00 %	129.959.314,00						98.00 %	85.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				129.959.314,00					Masyarakat Kecamatan Klaten Tengah		85.000.000,00	
		Terlaksananya desa yang memperoleh fasilitasi pembinaan dan pengawasan				129.959.314,00					Masyarakat Kecamatan Klaten Tengah		85.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	29.400.060,00						1 Dokumen	55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	100.559.254,00						1 Dokumen	30.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				100.559.254,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokumen	5 Dokumen	100.559.254,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		1 Dokumen	30.000.000,00	KECAMATAN KLATEN TENGAH
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				29.400.060,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	29.400.060,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		1 Dokumen	55.000.000,00	KECAMATAN KLATEN TENGAH
		KELURAHAN BARENG				703.297.800,00							758.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				703.297.800,00							758.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN				703.297.800,00							758.000.000,00	
435.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				257.351.034,00							168.000.000,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	85.50 Indeks	22.500.000,00						-	15.000.000,00	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	-	67.20 Nilai	154.201.034,00						-	135.000.000,00	
			Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	-	100 %	103.150.000,00						-	33.000.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				22.500.000,00					-		15.000.000,00	
		-				22.500.000,00					-		15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	22.500.000,00						-	15.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22.500.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 Laporan	22.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kelurahan Bareng	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	15.000.000,00	KELURAHAN BARENG
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				131.701.034,00					-		120.000.000,00	
		-				131.701.034,00					-		120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	131.701.034,00						-	120.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				131.701.034,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan	131.701.034,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kelurahan Bareng	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	120.000.000,00	KELURAHAN BARENG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				103.150.000,00					-		33.000.000,00	
		-				103.150.000,00					-		33.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	103.150.000,00						-	33.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				103.150.000,00							33.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	4 Unit	103.150.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kelurahan Bareng	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	33.000.000,00	KELURAHAN BARENG
436.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				445.946.766,00							590.000.000,00	
			Persentase lembaga masyarakat yang aktif	-	100 %	445.946.766,00						-	590.000.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				445.946.766,00					-		590.000.000,00	
		-				445.946.766,00					-		590.000.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	209.746.766,00						-	340.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	-	236.200.000,00						-	250.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				236.200.000,00							250.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	2 Unit	236.200.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kelurahan Bareng	Pajak Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		-	250.000.000,00	KELURAHAN BARENG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				209.746.766,00							340.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	7 Pokmas / Ormas	209.746.766,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kelurahan Bareng	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		-	340.000.000,00	KELURAHAN BARENG
		KELURAHAN KABUPATEN				712.181.905,00							757.316.339,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				712.181.905,00							757.316.339,00	
	7.01	KECAMATAN				712.181.905,00							757.316.339,00	
437.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				165.262.355,00							163.862.143,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	85.50 Indeks	156.872.355,00						-	159.862.143,00	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	-	67.20 Nilai	14.390.000,00						-	14.500.000,00	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	-	67.20 Nilai	150.872.355,00						-	149.362.143,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				6.000.000,00					-		10.500.000,00	
		-				6.000.000,00					-		10.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	6.000.000,00						-	10.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				6.000.000,00							10.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 Laporan	6.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kelurahan Kabupaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	10.500.000,00	KELURAHAN KABUPATEN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				150.872.355,00					-		149.362.143,00	
		-				150.872.355,00					-		149.362.143,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	150.872.355,00						-	149.362.143,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				150.872.355,00							149.362.143,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan	150.872.355,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kelurahan Kabupaten	Pajak Daerah	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	149.362.143,00	KELURAHAN KABUPATEN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				8.390.000,00					-		4.000.000,00	
		-				8.390.000,00					-		4.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	8.390.000,00						-	4.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				8.390.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	8.390.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kelurahan Kabupaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	4.000.000,00	KELURAHAN KABUPATEN
438.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				546.919.550,00							593.454.196,00	
			Persentase lembaga masyarakat yang aktif	-	100 %	546.919.550,00						-	593.454.196,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				546.919.550,00					-		593.454.196,00	
		-				546.919.550,00					-		593.454.196,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	281.969.550,00						-	343.454.196,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	5 Unit	14.305.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kelurahan Tonggalan I	Pajak Daerah	-	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	21.000.000,00	KELURAHAN TONGGALAN
442.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				572.080.764,00							537.782.800,00	
			Persentase lembaga masyarakat yang aktif	-	100 %	572.080.764,00						-	537.782.800,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				572.080.764,00					-		537.782.800,00	
		-				572.080.764,00					-		537.782.800,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	245.880.764,00						-	309.282.800,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	-	326.200.000,00						-	228.500.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				326.200.000,00							228.500.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	5 Unit	326.200.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kelurahan Tonggalan I	Pajak Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	228.500.000,00	KELURAHAN TONGGALAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				245.880.764,00							309.282.800,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	4 Pokmas / Ormas	245.880.764,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kelurahan Tonggalan I	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	309.282.800,00	KELURAHAN TONGGALAN
		KELURAHAN BUNTALAN				816.250.000,00							751.466.667,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				816.250.000,00							751.466.667,00	
	7.01	KECAMATAN				816.250.000,00							751.466.667,00	
443.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				192.928.298,00							141.000.000,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	undefined	58.005.000,00						-	9.000.000,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	85.50 Indeks	134.923.298,00						-	132.000.000,00	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	-	67.20 Nilai	134.923.298,00						-	132.000.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				3.750.000,00					-		12.000.000,00	
		-				3.750.000,00					-		12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	3.750.000,00						-	12.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3.750.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 Laporan	3.750.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kelurahan Buntalan I	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	12.000.000,00	KELURAHAN BUNTALAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				131.173.298,00					-		120.000.000,00	
		-				131.173.298,00					-		120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	131.173.298,00						-	120.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				131.173.298,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan	131.173.298,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kelurahan Buntalan I	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	120.000.000,00	KELURAHAN BUNTALAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				58.005.000,00					-		9.000.000,00	
		-				58.005.000,00					-		9.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	-	58.005.000,00						-	9.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				58.005.000,00							9.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	5 Unit	58.005.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kelurahan Buntalan II.0	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	9.000.000,00	KELURAHAN BUNTALAN
444.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				623.321.702,00							610.466.667,00	
			Persentase Lembaga Masyarakat Aktif	-	100 %	623.321.702,00						-	610.466.667,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				623.321.702,00					-		610.466.667,00	
		-				623.321.702,00					-		610.466.667,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	297.816.288,00						-	375.466.667,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	-	325.505.414,00						-	235.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				325.505.414,00							235.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	2 Unit	325.505.414,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kelurahan Buntalan II.0	Pajak Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	235.000.000,00	KELURAHAN BUNTALAN
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				297.816.288,00							375.466.667,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	9 Pokmas / Ormas	297.816.288,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kelurahan Buntalan II.0	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Pengembangan dan Modernisasi Infrastruktur Ekonomi dan Sosial		-	375.466.667,00	KELURAHAN BUNTALAN
		KELURAHAN MOJAYAN				778.146.260,00							781.072.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN				778.146.260,00							781.072.000,00	
	7.01	KECAMATAN				778.146.260,00							781.072.000,00	
445.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				267.832.810,00							160.107.000,00	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	85.50 Indeks	167.792.810,00						-	156.477.000,00	
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	-	67.20 Nilai	167.792.810,00						-	156.477.000,00	
		-		-	-	100.040.000,00						-	3.630.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				4.500.000,00					-		4.477.000,00	
		-				4.500.000,00					-		4.477.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	4.500.000,00						-	4.477.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4.500.000,00							4.477.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	12 Laporan	4.500.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kelurahan Mojayan II.0	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	4.477.000,00	KELURAHAN MOJAYAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				163.292.810,00					-		152.000.000,00	
		-				163.292.810,00					-		152.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	163.292.810,00						-	152.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				163.292.810,00							152.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	PRIORITAS		(12)	(13)	(14)	(15)
									NASIONAL	DAERAH				
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	2.111.500,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4 Dokumen	450.000,00	KECAMATAN KLATEN SELATAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.920.890.000,00					ASN Kecamatan Klaten Selatan		2.580.458.449,00	
		Terlaksananya pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu				2.920.890.000,00					ASN Kecamatan Klaten Selatan		2.580.458.449,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.920.890.000,00						15 Orang/bulan	2.580.458.449,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				2.920.890.000,00							2.580.458.449,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2.920.890.000,00	Kab. Klaten	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		15 Orang/bulan	2.580.458.449,00	KECAMATAN KLATEN SELATAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				25.178.900,00					ASN Kecamatan Klaten Selatan		3.000.000,00	
		Terlaksananya pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu				25.178.900,00					ASN Kecamatan Klaten Selatan		3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	24 Laporan	25.178.900,00						24 Laporan	3.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				25.178.900,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	12 Laporan	25.178.900,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		24 Laporan	3.000.000,00	KECAMATAN KLATEN SELATAN
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				165.470.648,00					ASN Kecamatan Klaten Selatan		95.105.820,00	
		Terlaksananya pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu				165.470.648,00					ASN Kecamatan Klaten Selatan		95.105.820,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	24 Laporan	165.470.648,00						24 Laporan	95.105.820,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				165.470.648,00							95.105.820,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	12 Laporan	165.470.648,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		24 Laporan	95.105.820,00	KECAMATAN KLATEN SELATAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				50.030.000,00					ASN Kecamatan Klaten Selatan		3.450.000,00	
		Terlaksananya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara				50.030.000,00					ASN Kecamatan Klaten Selatan		3.450.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	50.030.000,00						5 Unit	3.450.000,00	
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				50.030.000,00							3.450.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	38 Unit	50.030.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		5 Unit	3.450.000,00	KECAMATAN KLATEN SELATAN
448.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				15.845.350,00							19.724.000,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik				15.845.350,00							19.724.000,00	
			999.Persentase Jenis Layanan Di Kecamatan Yang Sudah Menerapkan SOP Tetap	100,00 %	100,00 %	15.845.350,00						100,00 %	19.724.000,00	
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				15.845.350,00					Masyarakat Kecamatan Klaten Selatan		19.724.000,00	
		Terlaksananya kegiatan pelayanan publik yang dilimpahkan di kecamatan				15.845.350,00					Masyarakat Kecamatan Klaten Selatan		19.724.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	15.845.350,00						2 Laporan	19.724.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				15.845.350,00							19.724.000,00	
		Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2 Laporan	15.845.350,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		2 Laporan	19.724.000,00	KECAMATAN KLATEN SELATAN
449.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				122.507.820,00							101.283.500,00	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				122.507.820,00							101.283.500,00	
			999.Persentase lembaga masyarakat aktif	90.00 %	100 %	122.507.820,00						90.00 %	101.283.500,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				122.507.820,00					Desa / Kelurahan Se - Kecamatan Klaten Selatan		101.283.500,00	
		Terlaksananya koordinasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Desa				122.507.820,00					Desa / Kelurahan Se - Kecamatan Klaten Selatan		101.283.500,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	122.507.820,00						4 Laporan	101.283.500,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				122.507.820,00							101.283.500,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	122.507.820,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4 Laporan	101.283.500,00	KECAMATAN KLATEN SELATAN
450.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				100.025.000,00							86.400.000,00	
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum				100.025.000,00							86.400.000,00	
			999.Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	90.00 %	100 %	100.025.000,00						90.00 %	86.400.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				100.025.000,00					Masyarakat Kecamatan Klaten Selatan		86.400.000,00	
		Terlaksananya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi				100.025.000,00					Masyarakat Kecamatan Klaten Selatan		86.400.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	100.025.000,00						4 Laporan	86.400.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				100.025.000,00							86.400.000,00	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	100.025.000,00	Kab. Klaten	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		4 Laporan	86.400.000,00	KECAMATAN KLATEN SELATAN
451.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				4.005.750,00							144.694.000,00	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				4.005.750,00							144.694.000,00	
			999.Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitas koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	90.00 %	100 %	4.005.750,00						90.00 %	144.694.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				4.005.750,00					Masyarakat Kecamatan Klaten Selatan		144.694.000,00	
		Terlaksananya penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang terfasilitasi				4.005.750,00					Masyarakat Kecamatan Klaten Selatan		144.694.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	520 Orang	520 Orang	4.005.750,00						520 Orang	144.694.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
												TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	12 Laporan	143.336.456,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Kelurahan Gayampurit L.O	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	95.105.820,00	KELURAHAN GAYAMPRIT
454.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				463.689.396,00							622.968.000,00	
			Persentase lembaga masyarakat aktif	-	90 %	463.689.396,00						-	622.968.000,00	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				463.689.396,00					-		622.968.000,00	
		-				463.689.396,00					-		622.968.000,00	
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	-	269.018.686,00						-	392.968.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	-	194.670.710,00						-	230.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				194.670.710,00							230.000.000,00	
		Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	-	2 Unit	194.670.710,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Kelurahan Gayampurit L.O	Pajak Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	230.000.000,00	KELURAHAN GAYAMPRIT
	7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				269.018.686,00							392.968.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	8 Pokmas / Ormas	269.018.686,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Kelurahan Gayampurit L.O	Pajak Daerah DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan Ekosistem Inovasi dan Riset Pengembangan Daerah		-	392.968.000,00	KELURAHAN GAYAMPRIT
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				12.900.347.077,00							6.535.125.102,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				12.900.347.077,00							6.535.125.102,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				12.900.347.077,00							6.535.125.102,00	
455.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.711.276.547,00							3.193.133.717,00	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi				3.711.276.547,00							3.193.133.717,00	
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92.50 Indeks	92.00 Indeks	3.711.276.547,00						92.50 Indeks	3.193.133.717,00	
			999.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	69.00 Nilai	68.50 Nilai	3.711.276.547,00						68.50 Nilai	3.193.133.717,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.120.000,00					Pegawai Bakesbangpol		3.000.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.120.000,00					Pegawai Bakesbangpol		3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2.120.000,00						2 Dokumen	3.000.000,00	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2.120.000,00							3.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	2.120.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		2 Dokumen	3.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.247.155.000,00					Pegawai Bakesbangpol		3.043.133.717,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.247.155.000,00					Pegawai Bakesbangpol		3.043.133.717,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	3.247.155.000,00						17 Orang/bulan	3.043.133.717,00	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.247.155.000,00							3.043.133.717,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	3.247.155.000,00	Kab. Klaten	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		17 Orang/bulan	3.043.133.717,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.600.000,00					Pegawai Bakesbangpol		2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.600.000,00					Pegawai Bakesbangpol		2.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.600.000,00						1 Dokumen	2.000.000,00	
	8.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3.600.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.600.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Kelurahan Gavamporit I.0.	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		1 Dokumen	2.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				78.000.000,00					Pegawai Bakesbangpol		80.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah				78.000.000,00					Pegawai Bakesbangpol		80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	78.000.000,00						12 Laporan	80.000.000,00	
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				78.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	78.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Kelurahan Gavamporit I.0.	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		12 Laporan	80.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				295.401.547,00					Pegawai Bakesbangpol		60.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				295.401.547,00					Pegawai Bakesbangpol		60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	295.401.547,00						12 Laporan	60.000.000,00	
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				295.401.547,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	295.401.547,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Kelurahan Gavamporit I.0.	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		12 Laporan	60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				85.000.000,00					Pegawai Bakesbangpol		5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				85.000.000,00					Pegawai Bakesbangpol		5.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	85.000.000,00						2 Unit	5.000.000,00	
	8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				85.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	85.000.000,00	Provinsi Jawa Tengah Kab. Klaten Kecamatan Klaten Selatan Kelurahan Gavamporit I.0.	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		2 Unit	5.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
456.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				659.300.000,00							505.000.000,00	
		Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan				659.300.000,00							505.000.000,00	
			999.Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	74.07 Persentase	29.63 Persentase	659.300.000,00						44.44 Persentase	505.000.000,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				659.300.000,00					Pegawai Bakesbangpol, Siswa SMA/SMK di Kabupaten Klaten, Purna Paskibraka, Masyarakat		505.000.000,00	

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
									NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Meningkatnya kapasitas dan kepatuhan organisasi kemasyarakatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan				237.110.000,00							250.000.000,00	
			999.Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	100.00 Persentase	100.00 Persentase	237.110.000,00						100.00 Persentase	250.000.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				237.110.000,00					Organisasi Masyarakat, Pegawai Bakesbangpol, Masyarakat		250.000.000,00	
		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				237.110.000,00					Organisasi Masyarakat, Pegawai Bakesbangpol, Masyarakat		250.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 Orang	120 Orang	237.110.000,00						120 Orang	250.000.000,00	
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				237.110.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	120 Orang	120 Orang	237.110.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		120 Orang	250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
459.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA				152.500.000,00							260.000.000,00	
		Meningkatnya ketahanan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya				152.500.000,00							260.000.000,00	
			999.Cakupan penyuluhan P4GN	36.00 %	27.00 %	152.500.000,00						30.00 %	260.000.000,00	
			999.Persentase kelompok agama yang mendapatkan pembinaan kerukunan beragama	100.00 %	100.00 %	152.500.000,00						100.00 %	260.000.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				152.500.000,00					Siswa-siswi SMP,SMA/SMK/MA , Masyarakat, FKUB, PKUB, Pegawai Bakesbangpol		260.000.000,00	
		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				152.500.000,00					Siswa-siswi SMP,SMA/SMK/MA , Masyarakat, FKUB, PKUB, Pegawai Bakesbangpol		260.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	100 Orang	152.500.000,00						100 Orang	260.000.000,00	
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				152.500.000,00							260.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang	500 Orang	152.500.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		100 Orang	260.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
460.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				5.783.736.529,00							310.000.000,00	
		Meningkatnya deteksi dini dan penanganan potensi konflik sosial				5.783.736.529,00							310.000.000,00	
			999.Persentase potensi konflik sosial yang tertangani	100.00 %	100.00 %	5.783.736.529,00						100.00 %	310.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
					TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF		
									NASIONAL						DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				5.783.736.529,00					Masyarakat, BIN, BNPT, Polres, Kodim, Forkompimda, Pegawai Bakesbangpol		310.000.000,00		
		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				5.783.736.529,00					Masyarakat, BIN, BNPT, Polres, Kodim, Forkompimda, Pegawai Bakesbangpol		310.000.000,00		
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	5.666.736.529,00						12 Dokumen	250.000.000,00		
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	100 Orang	117.000.000,00						100 Orang	60.000.000,00		
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				117.000.000,00							60.000.000,00		
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang	100 Orang	117.000.000,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		100 Orang	60.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				5.666.736.529,00							250.000.000,00		
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	12 Dokumen	5.666.736.529,00	Kab. Klaten	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	1. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan, Kesehatan dan Perlindungan Sosial		12 Dokumen	250.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	J U M L A H					2.837.155.274.275,00								2.705.782.094.982,00	